



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2010 – 2015**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, memperhatikan rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat disamping itu juga memuat arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc dan Muslim Kasim, SE, Akt, MM (dilantik pada tanggal 15 Agustus 2010) yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas pembangunan dan program Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan paling lambat 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah sudah harus menetapkan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, sekaligus dalam kerangka penyusunan dan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan pelaku pembangunan.

Sampai dengan tahun 2013, pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut, telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJMN, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional, kemampuan keuangan daerah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah serta perubahan asumsi, sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara target pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal (282)-(284) maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan Hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

2. RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

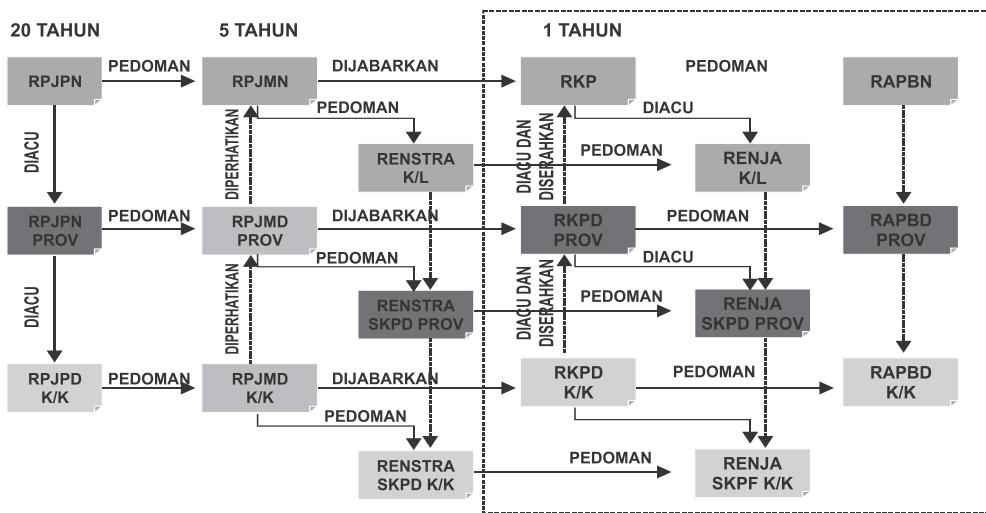
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

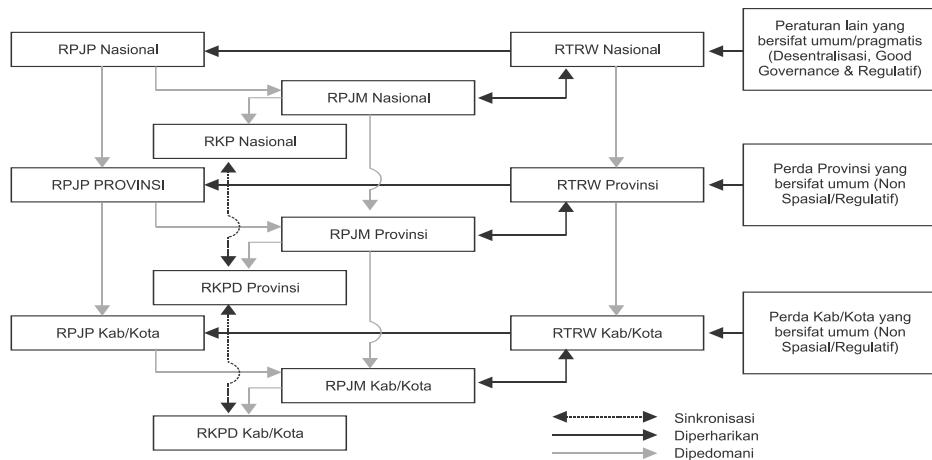
Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1.**

Proses penyusunan dan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya  
Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004, PP 8/2008 (diolah)

Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2.**

Bagan keterkaitan RPJMD Provinsi  
dengan dokumen perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Sumber : UU 25/2004, UU 26/2007, PP 8/2008 (diolah)

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah

### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan

### **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Arah RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2010-2015.

### **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

### **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam agenda dan prioritas pembangunan daerah.

### **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

**BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian *outcome* tahunan selama periode 2011-2015.

**BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Memuat ketentuan peralihan untuk penyusunan RKPD transisi tahun 2016, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

**1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi. Disamping itu RPJMD dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu dilingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lintas sektor, wilayah, dan lintas Kabupaten/Kota. Selain itu juga dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun kedepan.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Sumatera Barat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi**

Provinsi Sumatera Barat terletak antara  $0^{\circ} 54'$  Lintang Utara (LU), sampai dengan  $3^{\circ} 30'$  Lintang Selatan (LS), dan antara  $98^{\circ} 36'$  sampai  $101^{\circ} 53'$  Bujur Timur (BT), mempunyai luas daerah daratan  $\pm 42.297,30$  km<sup>2</sup> dan luas perairan (laut)  $\pm 52.882,42$  km<sup>2</sup> dengan panjang pantai wilayah daratan  $\pm 375$  km ditambah panjang garis pantai kepulauan mentawai  $\pm 1.003$  km, sehingga total garis pantai keseluruhan  $\pm 1.378$  km. Perairan laut ini memiliki 185 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Dengan letak tersebut menjadikan provinsi ini sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maupun pelabuhan laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

###### **2. Kondisi Geografis**

###### **A. Topografi**

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41 %), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21 %), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07 %), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13 %), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67 %) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dataran rendah (< 500 m dpl) tercatat hanya 45 %, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32 % dan 23 % daerah Sumatera Barat berada pada dataran tinggi. Dengan kondisi tersebut sumberdaya alam yang potensial pada suatu daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara seksama. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam perlu dicermati agar tidak terjadi kerusakan yang permanen di suatu kawasan yang berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang.

Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40 % tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bahagian Timur Sumatera Barat.

## B. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

Secara umum kondisi stratigrafi dari struktur geologi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- **Kelompok Pra Tersier:** kelompok ini mencakup masa Paleozoikum – Mesozoikum, dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan mélange, kelompok batuan malihan; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Tersier** dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan mélange; kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Transisi Tersier – Kquarter** (Pilo-Plistosen) dapat dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Kquarter** dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; batuan gunungapi dan aluhium

## **C. Hidrologi**

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 buah yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km<sup>2</sup>, Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km<sup>2</sup>, sedangkan Danau Diatas (3.150 km<sup>2</sup>), Danau Dibawah (1.400 km<sup>2</sup>), dan Danau Talang (1,02 km<sup>2</sup>) terdapat di Kabupaten Solok.

## **D. Klimatologi**

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem Schmidt-Fergusson daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayang-an hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 18° – 34° C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5°C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5° – 7° C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan

Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu  $4^{\circ} - 6^{\circ}$  C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79 % – 87 % dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

## **E. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan manifestasi dari kegiatan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

### **▪ Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Sebaran permukiman perkotaan relatif terkonsentrasi di wilayah bagian tengah, terutama jalur antara Kota Padang dan Bukittinggi, sedang permukiman perdesaan menyebar di seluruh wilayah provinsi.

Sebaran kawasan permukiman perkotaan mencakup beberapa wilayah, yaitu seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Dari sebaran kawasan permukiman perkotaan tersebut paling luas adalah Kota Padang dan yang terkecil Kota Sawahlunto. Perkembangan kawasan permukiman Kota Padang berjalan cukup pesat baik dari segi jumlah penduduk maupun luas kawasan, bahkan cenderung membentuk kawasan perkotaan cukup luas yang mencakup beberapa bagian wilayah kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Perkembangan ini ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, dan prasarana permukiman lainnya.

#### ▪ **Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**

*Kawasan Tanaman Pangan* yang meliputi Kabupaten-kabupaten Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Solok dan Pasaman. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai "lumbung pangan" Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, kedepan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga, terutama Riau.

Budidaya pertanian tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah, dan pertanian tanaman pangan lahan kering. Sampai tahun 2010 luas pertanian lahan basah yang meliputi sawah dengan irigasi, tada hujan, pasang surut, dan polder lainnya mencapai 237.327 Ha. Dari luas sawah yang diusahakan, sebagian besar diusahakan untuk tanaman padi yang mencapai 230.756 Ha (97,23 %) dan sisanya bukan tanaman padi. Selanjutnya dari luas tanaman padi sekitar 73,84 % dapat dilakukan penanaman dua kali setahun, dan sisanya sekali dalam setahun.

Untuk pertanian tanaman pangan lahan kering sampai tahun 2007 luasnya sekitar 692.604 Ha yang diusahakan dalam bentuk lahan pekarangan, tegalan/kebun, dan ladang dengan total luas 510.945 Ha (73,77 %) dan sisanya sementara tidak diusahakan seluas 181.659 Ha.

#### ▪ **Kawasan Perkebunan**

*Kawasan Perkebunan* yang meliputi kabupaten-kabupaten yaitu Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Untuk meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (*Crumb-rubber*) terutama di Kota Padang dan pabrik minyak sawit (*Crude Palm Oil, CPO*) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmasraya. Kedepan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.

Lahan di Provinsi Sumatera Barat sangat sesuai untuk pengembangan budidaya perkebunan, untuk tanaman karet, kelapa sawit, kopi, dan kakao sebagai komoditas utama, dan komoditi lain yang meliputi gambir, kasiavera, pala, cengkeh, tembakau, tebu, pinang, nilam, kelapa, kemiri dan sebagainya termasuk dalam komoditi unggulan lokal. Pemasaran komoditi utama telah menembus pasar

internasional, terutama Singapura, Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa.

Pengelolaan dan pengembangan perkebunan dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, BUMN, swasta maupun masyarakat yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Budidaya perkebunan di provinsi ini sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat, dan sisanya dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Sampai tahun 2010, tanaman kelapa sawit menunjukkan luas terbesar yaitu mencapai sekitar 353.300 Ha dan menunjukkan pertambahan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena perluasan dan pembangunan kawasan perkebunan yang dilakukan oleh BUMN maupun perusahaan swasta cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. Dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya. Luas lahan Tanaman Karet tahun 2010 mencapai 175.985 Ha dan pada umumnya merupakan perkebunan rakyat. Luas tanaman Kakao tahun 2010 mencapai 101.014 Ha, tanaman ini merupakan perkebunan rakyat yang ditanam pada lahan pekarangan dan tegalan.

- **Kawasan Peternakan**

Pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan di provinsi ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, yang terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 7 unit, pasar ternak 29 unit, TPH 32 unit, poskeswan 41 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 110 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

- **Kawasan Industri**

Kawasan industri membutuhkan hamparan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Adapun rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman seluas ± 70 Ha dan Kota Padang seluas ± 220 Ha berupa kawasan Padang Industrial Park (PIP).

Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri di kawasan pesisir yang mengolah hasil budidaya laut komersial, seperti industri perikanan tangkap.

Kegiatan industri yang telah berkembang di Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan menjadi industri besar, menengah dan kecil. Bahan baku industri memanfaatkan bahan baku lokal. Industri besar yang berkembang seperti Semen Padang, industri menengah meliputi industri pengolahan, sedangkan industri kecil meliputi industri pengolahan hasil tanaman pangan, industri sandang kulit; industri kimia bangunan; industri logam elektronika dan industri kerajinan seperti industri bordir, konveksi, tenun, batik tanah liat, mebel kayu, rotan, dan kerajinan tanah liat.

Sampai tahun 2009 jumlah industri kecil baik formal maupun non formal memiliki 34.757 unit usaha, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 128.563 orang, dengan total investasi sebesar Rp.795.202.263.000.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri unggulan yaitu: Industri Pengolahan Kakao, Industri Gambir, Industri Minyak Atsiri, Industri Pengolahan Makanan Ringan, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Tekstil dan Produk Tesktil, Industri Pengolahan Hasil Laut, Industri Maritim (Perkapalan), Industri Alsintan, Industri Semen.

#### ▪ **Kawasan Pertambangan**

*Kawasan Pertambangan*, yang meliputi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi. Dalam rangka peningkatan produksi batubara daerah ini, pemerintah daerah telah mengundang beberapa investor asing baik dari Australia, Polandia dan China untuk mengelola tambang dalam yang memerlukan teknologi pertambangan yang lebih tinggi.

Pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan

negara (WPN), sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Selanjutnya pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

Bahan pertambangan batubara potensinya cukup besar dan telah diusahakan untuk memasok kebutuhan bahan bakar di beberapa industri dan pembangkit listrik tenaga uap, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran lokasi pertambangan batubara diantaranya di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan.

Sebaran bahan pertambangan mineral logam seperti emas berada di wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Bahan mineral bijih besi diantaranya di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman Barat. Bahan pertambangan mineral logam lainnya berupa mangan ditemukan di Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar. Sedang timah hitam ditemukan di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman.

Pertambangan mineral bukan logam, seperti pertambangan pasir besi menyebar di kawasan pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Tembaga dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok. Untuk bahan tambang yang berupa belerang ditemukan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, sementara air raksa potensinya ditemukan di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya bahan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan untuk industri yang berupa batu kapur menyebar di wilayah Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Dolomit ditemukan di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok. Bahan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan lain yang ditemukan di provinsi ini adalah marmer (Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat); granit (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Dharmasraya); andesit dan basalt (Kabupaten

Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan), batu apung (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok), Batu tulis (Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto); feldspar (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok); obsidian (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar); perlit (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman); Trass (Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh); kaolin (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto); pasir kuarsa (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sijunjung); fosfat (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang); dan tawas (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan).

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar lokasi usaha pertambangan tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya, sementara metode penambangan umumnya dilakukan secara terbuka yang dapat mengancam keberadaan hutan lindung di atasnya. Kondisi fisik provinsi ini sangat membutuhkan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor).

#### ▪ **Kawasan Perikanan dan Kelautan**

*Kawasan Perikanan dan Kelautan* yang meliputi Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah pantai, potensi pembangunan yang dimiliki kawasan ini tentunya adalah dalam bidang perikanan dan kelautan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa lautan Samudra Indonesia yang terletak di kawasan pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik.

Produksi ikan dari perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sebanyak 197.345 ton, dengan jumlah nelayan penuh sebanyak 16.073 orang nelayan dan 30.061 orang nelayan sambilan. Potensi pembudidayaan perikanan darat (perairan umum dan budidaya) di Provinsi Sumatera Barat cukup besar.

Pengembangan sub sektor perikanan masih ada peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti:

1. Masih tersedianya lahan budidaya di darat seperti danau, sungai, kolam, sawah dan perairan umum lainnya untuk budidaya ikan air tawar,
2. Adanya potensi ikan tuna dan cakalang di perairan ZEE yang belum sepenuhnya di eksplorasi.
3. Adanya potensi pengembangan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan barat Provinsi Sumatera Barat, yang belum tersentuh oleh nelayan setempat.

Selanjutnya sumberdaya kelautan yang ada meliputi terumbu karang, hutan mangrove, moluska, teripang, dan penyu laut. Ekosistem terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat luasnya 25.984 Ha dan menyebar di perairan pesisir kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai persentase tutupan karang rendah, sehingga dapat dikategorikan rusak dan rusak berat. Tutupan terumbu karang dengan kondisi baik hanya ditemukan pada 4 lokasi sebaran, yaitu Pulau Pieh di Kabupaten Padang Pariaman, Pulau Simangke Kecil, Pulau Cingkuak dan Pulau Penyu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Potensi mangrove di Provinsi Sumatera Barat sebesar 39.832 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir Kabupaten Pasaman Barat (6.273,5 hektar) sampai Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 32.600 hektar. Di Kota Padang, luas hutan mangrove tidak lebih dari 10 hektar, yang terdapat di kawasan Sungai Pisang. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*.

Penyebaran kerang-kerangan meliputi seluruh perairan pantai yang berlumpur, terutama pada kawasan hutan bakau (*mangrove*), sepanjang pantai di Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran cumi-cumi meliputi seluruh perairan di Provinsi Sumatera Barat.

#### ▪ **Kawasan Hutan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha, yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung (0,91 juta Ha), hutan produksi terbatas (0,25 juta Ha), hutan produksi tetap (0,40 juta Ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (0,19 juta Ha). Luasan kawasan hutan tersebut diatas meliputi seluas 61 % wilayah provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas.

Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan selain menurunnya produktivitas hasil hutan karena semakin berkurangnya potensi hutan produksi, juga masalah perluasan kawasan budidaya ke dalam kawasan hutan, kondisi ini telah banyak menimbulkan bencana alam terutama banjir dan tanah longsor, bahkan berpengaruh terhadap perubahan iklim mikro.

Penetapan Kawasan Perairan seluas 39.900 Ha berupa Taman Wisata Laut Pulau Pieh di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan penunjukan SK Menhut 070/Kpts-II/2000.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara kongkrit sektor dan subsektor yang mempunyai potensi pengembangan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah guna dapat menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah, dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh *Keuntungan Komperatif* yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektor yang sama secara nasional. Tingkat Keuntungan Komperatif sektor dan subsektor suatu daerah dapat diukur dengan Indek Koefisien Lokasi (*Location Quotient*, LQ). Indikator ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena dalam era globalisasi seperti halnya dewasa ini, tingkat persaingan adalah sangat tajam. Dalam kondisi yang demikian, sektor dan subsektor yang dapat berkembang dengan pesat adalah sektor dan subsektor yang mempunyai daya saing yang didukung oleh keuntungan komperatif yang cukup tinggi. Sedangkan potensi pembangunan wilayah lebih banyak ditentukan oleh kandungan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan sehingga menentukan arah pembangunan daerah terkait.

Berdasarkan Indek Koefisien Lokasi maka potensi pengembangan ekonomi daerah menurut sektor dan subsektor di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2005-2009 adalah seperti digambarkan pada Tabel 2.1. Disini terlihat bahwa nilai LQ dalam periode waktu 5 tahun sebelumnya sedikit mengalami fluktuasi, karena itu analisis didasarkan pada nilai rata-rata untuk periode 2005-2009 yang memperlihatkan kondisi umum daerah bersangkutan.

Hasil perhitungan pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sektor pertanian ternyata masih merupakan salah satu potensi ekonomi wilayah yang cukup penting bagi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai LQ lebih besar dari satu yaitu 1,75 yang memperlihatkan bahwa sektor ini mempunyai Keuntungan Komperatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata pada provinsi lainnya di Indonesia.

Di dalam sektor pertanian tersebut terlihat pula bahwa subsektor tanaman pangan ternyata merupakan potensi ekonomi utama Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari nilai LQ yang cukup tinggi yaitu rata-rata 1,78. Sedangkan subsektor perkebunan merupakan potensi ekonomi wilayah terbesar dengan nilai LQ rata-rata mencapai 2,75. Sedangkan subsektor Kehutanan mempunyai potensi pengembangan yang juga cukup tinggi dengan nilai LQ sebesar 1,71. Sedangkan subsektor perikanan dan peternakan mempunyai potensi pengembangan yang cukup besar yang terlihat dari nilai LQ yang lebih besar dari satu.

**Tabel 2.1  
Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi Menurut Sektor dan  
Subsektor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009**

| No. | Sektor/Sub-sektor                               | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | Rata-rata   |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.  | <b>Pertanian</b>                                | <b>1.72</b> | <b>1.74</b> | <b>1.77</b> | <b>1.76</b> | <b>1.76</b> | <b>1.75</b> |
| a.  | Tanaman Pangan                                  | 1.76        | 1.78        | 1.80        | 1.77        | 1.78        | 1.78        |
| b.  | Perkebunan                                      | 2.57        | 2.69        | 2.80        | 2.85        | 2.83        | 2.75        |
| c.  | Perternakan                                     | 1.11        | 1.09        | 1.10        | 1.11        | 1.13        | 1.11        |
| d.  | Kehutanan                                       | 1.73        | 1.75        | 1.69        | 1.68        | 1.68        | 1.71        |
| e.  | Perikanan                                       | 1.24        | 1.21        | 1.21        | 1.23        | 1.22        | 1.22        |
| 2.  | <b>Pertambangan dan Penggalian</b>              | <b>0.35</b> | <b>0.35</b> | <b>0.36</b> | <b>0.37</b> | <b>0.37</b> | <b>0.36</b> |
| a.  | Pertambangan tanpa gas                          | 0.20        | 0.20        | 0.19        | 0.20        | 0.19        | 0.20        |
| b.  | Penggalian                                      | 2.97        | 2.81        | 2.72        | 2.67        | 2.62        | 2.76        |
| 3.  | <b>Industri Pengolahan</b>                      | <b>0.52</b> | <b>0.51</b> | <b>0.51</b> | <b>0.52</b> | <b>0.52</b> | <b>0.52</b> |
| a.  | Industri tanpa migas                            | 0.52        | 0.51        | 0.51        | 0.52        | 0.52        | 0.52        |
| 4.  | <b>Listrik dan Air Minum</b>                    | <b>1.76</b> | <b>1.80</b> | <b>1.74</b> | <b>1.62</b> | <b>1.51</b> | <b>1.68</b> |
| a.  | Listrik   | 2.31        | 2.36        | 2.34        | 2.25        | 2.23        | 2.30        |
| b.  | Air bersih                                      | 1.04        | 1.06        | 1.10        | 1.13        | 1.17        | 1.10        |
| 5.  | <b>Bangunan</b>                                 | 0.83        | 0.82        | 0.80        | 0.79        | 0.77        | 0.80        |
| 6.  | <b>Perdagangan</b>                              | <b>1.08</b> | <b>1.08</b> | <b>1.06</b> | <b>1.06</b> | <b>1.08</b> | <b>1.07</b> |
| a.  | Perdagangan Besar dan Eceran                    | 1.27        | 1.27        | 1.24        | 1.23        | 1.28        | 1.26        |
| b.  | Hotel   | 0.22        | 0.22        | 0.23        | 0.23        | 0.23        | 0.23        |
| c.  | Restoran  | 0.21        | 0.20        | 0.20        | 0.20        | 0.19        | 0.20        |
| 7.  | <b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>              | <b>2.06</b> | <b>1.98</b> | <b>1.90</b> | <b>1.76</b> | <b>1.62</b> | <b>1.87</b> |
| a.  | Pengangkutan                                    | 2.71        | 2.71        | 2.81        | 2.89        | 2.89        | 2.80        |
| b.  | Komunikasi                                      | 1.06        | 1.02        | 0.94        | 0.00        | 0.73        | 0.75        |
| 8.  | <b>Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan</b> | <b>0.76</b> | <b>0.55</b> | <b>0.55</b> | <b>0.38</b> | <b>0.54</b> | <b>0.56</b> |
| a.  | Bank  | 0.43        | 0.45        | 0.45        | 1.28        | 0.46        | 0.61        |
| b.  | Lembaga keuangan tanpa bank                     | 1.63        | 1.65        | 1.61        | 2.27        | 1.54        | 1.74        |
| c.  | Jasa Perusahaan                                 | 0.09        | 0.09        | 0.09        | 1.14        | 0.08        | 0.30        |
| 9.  | <b>Jasa-jasa</b>                                | <b>1.79</b> | <b>1.76</b> | <b>1.75</b> | <b>1.75</b> | <b>1.74</b> | <b>1.76</b> |
| a.  | Pemerintahan                                    | 2.65        | 2.61        | 2.61        | 2.64        | 2.64        | 2.63        |
| b.  | Swasta  | 1.07        | 1.07        | 1.07        | 1.07        | 1.05        | 1.06        |

Sumber data : BPS Sumatera Barat, diolah

Potensi pengembangan sektor jasa cukup besar dalam perekonomian daerah Sumatera Barat dan cenderung meningkat. Sektor jasa yang dimaksudkan disini adalah dalam pengertian luas yang meliputi sektor: perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dan jasa-jasa lainnya, termasuk juga jasa pendidikan dan kesehatan. Seperti terli merupakan potensi pembangunan yang berperan cukup penting dengan nilai LQ mencapai 2,63.

Salah satu potensi Sumatera Barat adalah penyediaan tenaga listrik dan air minum karena didukung oleh sumberdaya alam. Sebagaimana diketahui bahwa daerah ini mempunyai beberapa sumberdaya yang sangat potensial digunakan untuk pembangkit tenaga listrik seperti tenaga air dan batubara. Dewasa ini telah berjalan dua Pusat Listrik Tenaga Air, yaitu PLTA Maninjau dan PLTA Singkarak dengan kapasitas yang cukup besar. Karena daerah ini juga mempunyai tambang batubara, telah dibangun pula PLTU Ombilin dan sedang dibangun pula sekarang PLTU Bungus yang keduanya juga mempunyai kapasitas cukup besar. Potensi pembangkit tenaga listrik yang cukup besar ini menyebabkan Indek Koefisien Lokasi sektor ini menjadi cukup tinggi yaitu 1,68. Dengan subsektor listrik merupakan potensi utama dengan nilai LQ mencapai 2,30.

Sektor industri pengolahan belum banyak berkembang di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai LQ yang kurang dari satu. Hal yang sama juga terjadi dengan sektor pertambangan yang ternyata pertumbuhannya terus menurun karena semakin menipisnya deposit tambang luar, sedangkan eksplorasi tambang dalam memerlukan biaya produksi yang jauh lebih besar dan sebagian besar berada pada kawasan lindung. Sektor jasa keuangan belum berkembang secara optimal di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai LQ kurang dari satu. Namun demikian, potensi pengembangan jasa keuangan non bank kelihatannya cukup tinggi dengan nilai LQ mencapai 1,74.

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Dengan banyaknya jenis bahaya alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah "Supermarket Bencana Alam". Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Pada paragraf berikut akan disajikan gambaran umum potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Potensi bencana ini diperoleh berdasarkan hasil identifikasi data melalui survei secara tidak langsung maupun secara langsung.

## **1. Ancaman Bahaya**

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.

Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, telah terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan kekuatan 7 Skala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan  $\pm$  3.000 rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang-orang tua masyarakat yang berada di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi lagi dengan kekuatan 6,3 Skala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan  $\pm$  35.000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini. Begitu juga gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada 10 Kabupaten/Kota. Jumlah korban 1.195 orang meninggal. Kerusakan rumah lebih dari 249.000 dan kerusakan infrastruktur sosial ekonomi yang parah. Walaupun jumlah korban tidak sebanyak yang pertama, namun banyaknya rumah yang rusak telah membuat masyarakat trauma dan merasa tidak aman terhadap kehidupan yang akan datang. Setelah gempa dan tsunami Aceh pada bulan Oktober 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Lebih-lebih lagi kejadian gempa yang terjadi secara beruntun pada tahun berikutnya seperti pada bulan April 2005, Maret 2007, September 2007, dan juga gempa-gempa kecil yang mengikutinya telah membuat bencana gempa bumi menjadi isu utama di provinsi ini yang menggerakkan semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Disamping itu, Peraturan Gempa Indonesia (SNI-1726, 2002) menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki percepatan gempa maksimum (PGA) tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat bisa dipastikan adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Dari hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Dalam waktu dekat para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai

di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat gunung ini berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun 2006, aktifitas Gunung Talang yang sempat menyembulkan lahar, meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar, telah menarik para ahli nasional maupun internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk memprediksi aktifitasnya dimasa yang akan datang.

Begitu juga Gunung Marapi masih terus mengeluarkan asap pada beberapa tahun belakangan ini, sehingga potensi bencana yang ditimbukannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup padat saat ini sangat besar. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat. Secara tradisional, perkembangan penduduk di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari daerah tepian sungai-sungai besar seperti asal usul masyarakat di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Agam. Lokasi yang berada di sekitar sungai menyebabkan potensi terjadinya banjir juga besar terutama pada saat musim hujan. Telah dilaporkan bahwa banyak korban dan infrastruktur rusak ketika bencana banjir terjadi. Bencana longsor telah terjadi pada tanggal 4 Mei 1987 di Padang Panjang. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 143 orang meninggal dunia, 49 rumah rusak, dan 1 buah bangunan sekolah tertimbun. Bencana ini diperkirakan merupakan bencana longsor terbesar di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat berbatasan secara langsung dengan Lautan India di arah barat. Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam siklus aliran air laut yang berpotensi menimbulkan abrasi pantai. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai di Provinsi Sumatera Barat akibat abrasi pantai yang tentunya juga menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya runtuh.

## **2. Kerentanan**

Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurang-mampuan masyarakat untuk menanggulangi dampak suatu bencana. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Kerentanan dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kerentanan fisik dan kerentanan non-fisik. Secara umum kerentanan fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terhadap semua

jenis bahaya dapat di lihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Kerentanan Umum di Provinsi Sumatera Barat**

| Jenis Bahaya  | Uraian Jenis Kerentanan   |  |
|---------------|---|--|
|               | Fisik   | Non-fisik  |
| Semua Ancaman | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan sistem peringatan dini akan bahaya belum ada/lengkap</li> <li>- Peta risiko belum ada/lengkap</li> <li>- Jalur evakuasi belum definitif</li> <li>- Bangunan/tempat pengungsian belum ada</li> <li>- Listrik dan air bersih belum lengkap</li> <li>- Peralatan tanggap darurat belum tersedia</li> <li>- Tidak ada terminal khusus bantuan bencana</li> <li>- Peralatan kesehatan masih kurang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada lembaga khusus kebencanaan</li> <li>- Masyarakat tidak/kurang terdidik</li> <li>- Sistem informasi bencana lambat</li> <li>- Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana</li> <li>- Anggaran khusus kebencanaan di daerah masih kurang</li> <li>- Prosedur tanggap bencana tidak tersedia</li> <li>- Kurangnya pelatihan kebencanaan</li> <li>- Peraturan daerah/local kebencanaan kurang memadai</li> <li>- Kurangnya komitmen bersama antar lembaga (egosektoral)</li> </ul> |

*Sumber data : BPBD Sumatera Barat, RAD, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2009-2011*

Berdasarkan data-data sekunder dan survey yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap suatu ancaman bahaya yang ada, telah teridentifikasi khusus kerentanan seperti terlihat pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Kerentanan Khusus di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Jenis Bahaya           | Uraian Jenis Kerentanan   |   |
|----|------------------------|---|---|
|    |                        | Fisik   | Non-fisik   |
|    | Gempa-bumi             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada panduan konstruksi bangunan tahan gempa</li> <li>- Belum ada peta risiko gempa-bumi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan aparatur dan Masyarakat tentang kegempaan kurang</li> </ul>  |
|    | Tsunami                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada sistem peringatan dini</li> <li>- Peta risiko belum definitif</li> <li>- Peta evakuasi belum definitif</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan aparatur dan Masyarakat tentang tsunami kurang</li> </ul>  |
|    | Banjir                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan pendekripsi banjir belum memadai</li> <li>- Belum ada sistem peringatan dini</li> <li>- Peta risiko banjir belum lengkap</li> <li>- Bangunan penanggulangan banjir belum banyak/cukup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata ruang tidak berorientasi bahaya banjir</li> <li>- Masyarakat masih memanfaatkan aliran alam untuk keperluan hidupnya</li> <li>- Masih banyak masyarakat membuang sampah di aliran sungai</li> </ul> |
|    | Kebakaran bangunan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perlengkapan pemadam kebakaran kurang</li> <li>- Belum ada standar pemadam kebakaran pada bangunan</li> <li>- Peralatan pemadam api di bangunan umum kurang</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada latihan secara rutin untuk kebakaran</li> <li>- Rencana detail pembangunan tidak berorientasi kebakaran</li> </ul>   |
|    | Badai/ Putting beliung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada sistem peringatan dini untuk bahaya badai</li> <li>- Belum ada peta risiko</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan rumah tidak tahan badai/angin</li> </ul>  |
|    | Gelombang pasang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada perlengkapan sistem terpasang untuk peringatan</li> <li>- Belum ada peta risiko</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak terdidik</li> <li>- Budaya tinggal dekat pantai masih melekat</li> </ul>  |
|    | Kekeringan             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada peramalan bahaya kekeringan di daerah</li> <li>- Belum ada peta risiko kekeringan belum ada</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak terdidik</li> <li>- Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana</li> </ul>   |

| No | Jenis Bahaya                                 | Uraian Jenis Kerentanan   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | Fisik   | Non-fisik   |
|    | Epidemi wabah penyakit (termasuk AID/HIV)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada panduan bahaya epidemic yang harus diwaspadai.</li> <li>- Masih ada tempat-tempat dimana sumber bahaya berkembang</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegakan omog masih lemah</li> <li>- Masyarakat tidak terlibat secara langsung</li> <li>- Pengetahuan masyarakat/ aparatur masih kurang</li> </ul>  |
|    | Penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku panduan untuk bahaya narkoba bagi masyarakat umum kurang</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi kurang gencar dari semua media</li> <li>- Pendidikan khusus di sekolah tidak ada</li> </ul>  |
|    | Gagal Teknologi                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya peralatan pendikteksi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak terinformasikan akan bahaya</li> <li>- Pengetahuan masyarakat/ aparatur masih kurang</li> </ul>   |
|    | Konflik Sosial                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas administrasi antar wilayah belum definitif</li> <li>- Kurangnya fasilitas khusus/ umum untuk berkomunikasi/ silaturahmi</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan masih beragam (senjang)</li> <li>- Kesenjangan ekonomi</li> </ul>   |
|    | Pencemaran Lingkungan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada peralatan pendeteksi pencemaran</li> <li>- Kurangnya rambu-rambu peringatan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak terdidik untuk ramah terhadap lingkungan</li> <li>- Perilaku tradisional tidak berwawasan lingkungan (lading berpindah, dll)</li> <li>- Rencana pembangunan tidak/kurang berwawasan lingkungan</li> </ul> |
|    | Longsor                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada (sangat kurang) tanda-tanda pada lokasi bahaya</li> <li>- Belum ada/lengkap peta risiko gempabumi</li> <li>- Belum terpasang alat peringatan dini</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak terdidik untuk menghindari bahaya</li> <li>- Keterbatasan lahan pembuatan pemukiman</li> <li>- Sistem pemilikan tanah melibatkan budaya lokal</li> </ul>  |
|    | Letusan Gunung Api                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan sistem peringatan dini perlu diperbarui</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak terinformasi akan bahaya</li> <li>- Tidak ada organisasi khusus</li> </ul>  |
|    | Kebakaran hutan dan lahan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi hutan masih terbuka</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat masih tinggal dan memanfaatkan hutan sebagai penopang hidup</li> <li>- Masih ada budaya pembukaan lahan baru oleh masyarakat</li> </ul>   |
|    | Abrasi pantai                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada peringatan bahaya abrasi</li> <li>- Organisasi masyarakat belum terbentuk di lokasi bahaya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dilokasi kurang terdidik</li> </ul>   |

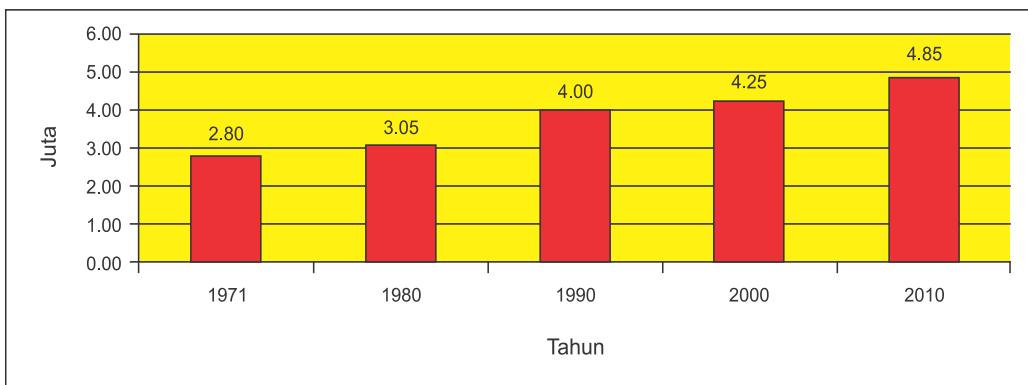
Sumber data : BPBD Sumatera Barat, RAD, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2009-2011

#### 2.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, total penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.241.605 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2.0778.572 jiwa dan perempuan 2.163.033 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk terakhir 2010, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 4.845.998 orang, yang terdiri atas 2.404.472 laki-laki dan 2.441.526 perempuan. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitannya peran penduduk tersebut, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Pada umumnya penduduk Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 1971 jumlah

penduduk Sumatera Barat berjumlah 2,80 juta jiwa, pada tahun 1980 telah bertambah menjadi 3,05 juta jiwa, tahun 1990 meningkat terus menjadi 4,00 juta jiwa, tahun 2000 sebanyak 4,25 juta jiwa, dan pada tahun 2010 sudah mencapai 4,85 juta jiwa. Tren tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

**Gambar 2.1**  
Penduduk Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 1971-2010

Sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa sebaran penduduk Sumatera Barat 73,10 persen berada di daerah Kabupaten dan 26,90 % berada di Kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan 3 (tiga) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 2010**

| Kabupaten/Kota   | Penduduk  |           |                       | Sex Ratio |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
|                  | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |           |
| <b>Kabupaten</b> |           |           |                       |           |
| Kep. Mentawai    | 39.629    | 36.792    | 76.421                | 108       |
| Pesisir Selatan  | 212.640   | 217.059   | 429.699               | 98        |
| Solok            | 172.004   | 176.987   | 348.991               | 97        |
| Sijunjung        | 100.759   | 100.868   | 201.627               | 100       |
| Tanah Datar      | 164.857   | 173.727   | 338.584               | 95        |
| Padang Pariaman  | 191.496   | 198.708   | 390.204               | 96        |
| Agam             | 223.544   | 231.940   | 455.484               | 96        |
| Lima Puluh Kota  | 172.507   | 175.742   | 348.249               | 98        |
| Pasaman          | 125.289   | 127.692   | 252.981               | 98        |
| Solok Selatan    | 72.614    | 71.622    | 144.236               | 101       |
| Dharmasraya      | 98.871    | 92.406    | 191.277               | 107       |

| Kabupaten/Kota        | Penduduk         |                  |                       | Sex Ratio |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|
|                       | Laki-Laki        | Perempuan        | Laki-Laki + Perempuan |           |
| Pasaman Barat         | 183.828          | 180.759          | 364.587               | 102       |
| <b>Kota</b>           |                  |                  |                       |           |
| Padang                | 412.235          | 418.349          | 833.584               | 99        |
| Solok                 | 29.261           | 30.056           | 59.317                | 97        |
| Sawahlunto            | 28.127           | 28.685           | 56.812                | 98        |
| Padang Panjang        | 23.290           | 23.718           | 47.008                | 98        |
| Bukittinggi           | 53.745           | 57.2009          | 110.954               | 94        |
| Payakumbuh            | 57.890           | 59.020           | 116.910               | 98        |
| Pariaman              | 38.886           | 40.187           | 79.073                | 97        |
| <b>Sumatera Barat</b> | <b>2.404.472</b> | <b>2.441.526</b> | <b>4.845.998</b>      | <b>98</b> |

*Sumber Data : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 1,34 % per tahun jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2000. Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan angka proyeksi penduduk secara terperinci tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Tahun 2006 - 2010**

| NO | URAIAN                    | TAHUN     |           |           |           |           |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                           | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      |
| 1. | Jumlah Penduduk           | 4.632.152 | 4.697.764 | 4.763.099 | 4.827.973 | 4.845.998 |
| 2. | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,45      | 1,42      | 1,39      | 1,36      | 1,34      |

*Sumber : Angka proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000*

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecendrungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui Program Keluarga Berencana (KB) melalui akseptor KB dengan jumlah akseptor KB tahun 2006 sebesar 104.369, tahun 2007 sebesar 108.296, tahun 2008 sebesar 122.589, tahun 2009 sebesar 140.369 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 10,30 %.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2010 menunjukkan adanya peningkatan pada kelompok penduduk yang bekerja dan sehingga terjadi penurunan

tingkat pengangguran. Angkatan kerja mencapai 2,27 juta orang, naik sebanyak lebih dari 92,1 ribu orang dibanding Februari 2009. Jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 92,3 ribu orang dan jumlah pengangguran terbuka turun sebanyak 169 orang, atau angka penganggurannya turun dari 7,90 % menjadi 7,57 %. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan jumlah penganggur telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,43 %, dari 64,91 % pada Februari 2009 menjadi 66,39 % pada Februari 2010.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.

Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat (66,39 %) lebih rendah dibandingkan TPAK Nasional (67,83 %) pada Februari 2010. Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat (9,73 %) lebih tinggi dari angka Nasional (8,46 %) pada Februari 2008, tetapi Februari 2009 (7,90 %) lebih rendah dari angka nasional (8,14 %), dan menariknya pada Februari 2010 (7,57 %) kembali lebih tinggi dari angka Nasional (7,41 %). Perkembangan ini mengungkapkan bahwa percepatan penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat lebih lambat dibanding tingkat Nasional. Salah satu penyebabnya adalah dampak dari gempa 7,6 SR pada 30 September 2009 yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, atau ada kemungkinan lain penyebabnya yang perlu dianalisis lebih lanjut.

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan wilayah menurut Williamson, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan, dan jumlah angka kriminalitas yang tertangani.

Sektor yang memiliki nilai terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat pada periode RPJMD I tahun 2005-2010 adalah sektor pertanian yang pada tahun 2005 berjumlah Rp 7.293 miliar atau kontribusinya adalah sebesar 25,01 % dari total PDRB tahun 2005. Hal ini terus mengalami kenaikan dalam nilainya yang tahun 2010 mencapai Rp 9.094 miliar atau kontribusinya sebesar 23,40 %, lihat Tabel 2.6 di bawah.

**Tabel 2.6  
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi  
Dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat  
Periode 2005-2010 atas Dasar Harga Konstan**

| No | Sektor Ekonomi                    | 2005      |       | 2006   |       | 2007   |       | 2008   |       | 2009   |       | 2010*  |       |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|    |                                   | Rp Milyar | %     | Rp     | %     |
| 1. | Pertanian                         | 7.293     | 25,01 | 7.658  | 24,74 | 8.039  | 24,43 | 8.437  | 24,10 | 8.761  | 24,03 | 9.094  | 23,40 |
| 2. | Pertambangan dan pengalian        | 951       | 3,26  | 980    | 3,17  | 1.029  | 3,13  | 1.081  | 3,09  | 1.125  | 3,09  | 1.204  | 3,10  |
| 3. | Industri Pengolahan               | 3.808     | 13,06 | 3.978  | 12,85 | 4.209  | 12,79 | 4.464  | 12,75 | 4.586  | 12,58 | 4.788  | 12,32 |
| 4. | Listrik, Gas, air bersih          | 338       | 1,16  | 368    | 1,19  | 394    | 1,20  | 408    | 1,17  | 431    | 1,18  | 441    | 1,13  |
| 5. | Bangunan                          | 1.440     | 4,94  | 1.544  | 4,99  | 1.627  | 4,94  | 1.739  | 4,97  | 1.814  | 4,97  | 2.074  | 5,34  |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran   | 5.305     | 18,19 | 5.662  | 18,29 | 6.057  | 18,40 | 6.463  | 18,46 | 6.673  | 18,30 | 6.941  | 17,86 |
| 7. | Pengangkutan dan komunikasi       | 3.754     | 12,87 | 4.140  | 13,38 | 4.527  | 13,75 | 4.916  | 14,04 | 5.206  | 14,28 | 5.778  | 14,87 |
| 8. | Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan | 1.464     | 5,02  | 1.579  | 5,10  | 1.693  | 5,14  | 1.811  | 5,17  | 1.895  | 5,20  | 2.011  | 5,17  |
| 9. | Jasa-jasa                         | 4.802     | 16,47 | 5.035  | 16,27 | 5.339  | 16,22 | 5.688  | 16,25 | 5.972  | 16,38 | 6.531  | 16,81 |
|    | PDRB                              | 29.159    | 100   | 30.950 | 100   | 32.912 | 100   | 35.008 | 100   | 36.465 | 100   | 38.860 | 100   |

*Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*

*\*Angka Sementara*

Selama periode 2005-2010 sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, tetapi perkembangan kontribusinya telah mengalami penurunan. Tahun 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 25,01 % terhadap nilai PDRB dan tahun 2010 telah menurun menjadi 23,40 %. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini diiringi oleh kenaikan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana tahun 2005 sektor ini berkontribusi sebesar 18,19 % dan mengalami peningkatan yang tajam sampai tahun 2009 menjadi 18,30 %. Sementara itu, industri pengolahan justru kontribusinya semakin menurun, dimana tahun 2005 adalah sebesar 13,06 % tetapi tahun 2009 menurun menjadi 12,58 %. Hal ini berimplikasi bahwa perkembangan perekonomian Sumatera Barat telah mengalami perubahan dari dominan sektor pertanian perlahan-lahan ke dominan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perekonomian Sumatera Barat menjadi lebih berorientasi ke luar (eksport), sedangkan seharusnya, keberhasilan sektor pertanian diikuti oleh sektor industri pengolahan yang mengolah produk pertanian

menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, sehingga nilai eksport akan lebih memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi.

Kelemahan yang akan ditemui, jika keberhasilan sektor pertanian diiringi oleh sektor perdangan hotel dan restoran bukan industri pengolahan, adalah produk pertanian yang pada umumnya masih bahan mentah (primer), lebih rentan terhadap goncangan fluktuasi nilai tukar rupiah, dan goncangan krisis moneter yang melanda negara-negara tujuan eksport.

Oleh karena itu, kedepan, pengembangan sektor pertanian haruslah diiringi dengan pengembangan sektor industri pengolahan, agar terjadi peningkatan nilai tambah, dan perekonomian lebih tahan terhadap berbagai goncangan yang disebabkan oleh perkembangan perekonomian negara tujuan eksport seperti krisis finansial global, dan lain sebagainya.

**Tabel 2.7**  
**Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam**  
**Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat**  
**Periode 2005-2010 Atas Dasar Harga Berlaku**

| No | Sektor Ekonomi                    | 2005         |       | 2006   |       | 2007   |       | 2008   |       | 2009   |       | 2010*  |       |
|----|-----------------------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|    |                                   | Rp<br>Miliar | %     | Rp     | %     |
| 1. | Pertanian                         | 11.433       | 25,59 | 13.397 | 25,26 | 14.744 | 24,66 | 17.273 | 24,46 | 18.120 | 23,75 | 20.792 | 23,84 |
| 2. | Pertambangan dan pen-galian       | 1.514        | 3,39  | 1.829  | 3,45  | 2.060  | 3,44  | 2.351  | 3,33  | 2.545  | 3,34  | 2.764  | 3,17  |
| 3. | Industri Pengolahan               | 5.084        | 11,38 | 6.056  | 11,42 | 7.179  | 12,01 | 8.554  | 12,11 | 9.195  | 12,05 | 10.197 | 11,69 |
| 4. | Listrik, Gas, Air Bersih          | 667          | 1,49  | 755    | 1,42  | 822    | 1,37  | 863    | 1,22  | 899    | 1,18  | 925    | 1,06  |
| 5. | Bangunan                          | 2.473        | 5,54  | 2.972  | 5,60  | 3.290  | 5,50  | 3.905  | 5,53  | 4.314  | 5,65  | 5.499  | 6,30  |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran   | 7.800        | 17,46 | 8.992  | 16,96 | 10.368 | 17,34 | 12.529 | 17,74 | 13.727 | 17,99 | 15.475 | 17,74 |
| 7. | Pengangkutan dan komu-nikasi      | 6.167        | 13,80 | 8.022  | 15,13 | 9.009  | 15,07 | 10.603 | 15,02 | 11.543 | 15,13 | 13.439 | 15,41 |
| 8. | Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan | 2.249        | 5,03  | 2.632  | 4,96  | 2.963  | 4,95  | 3.463  | 4,90  | 3.783  | 4,96  | 4.145  | 4,75  |
| 9. | Jasa-jasa                         | 7.287        | 16,31 | 8.374  | 15,79 | 9.352  | 15,64 | 11.073 | 15,68 | 12.171 | 15,95 | 13.985 | 16,03 |
|    | PDRB                              | 44.675       | 100   | 53.030 | 100   | 59.799 | 100   | 70.614 | 100   | 76.295 | 100   | 87.221 | 100   |

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

\*Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, terlihat bahwa dari sisi harga berlaku kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 adalah sebesar 25,59 % terus mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 23,75 %. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDRB pada harga berlaku ini diiringi oleh semakin meningkatnya kontribusi industri pengolahan dari 11,38 % pada tahun 2005 menjadi 12,05 % tahun 2009. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2005 berkontribusi sebesar 17,46 % dan terus mengalami kenaikan

tahun 2009 menjadi 17,99 %. Sehingga dari sisi harga berlaku ini, terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian masih tetap dominan, tetapi perlahan-lahan digantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.

Apabila dibandingkan antara kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB antara harga berlaku dengan harga konstan, maka terlihat bahwa sektor industri pengolahan terlihat semakin meningkat perannya sejalan dengan menurunnya peran sektor pertanian. Peningkatan peran industri pengolahan ini lebih besar disebabkan karena peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi. Besarnya laju inflasi umum pada tahun 2005 adalah sebesar 65,27 %, dan inflasi yang paling tinggi itu terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 93 % disusul oleh pertanian yang mencapai 58 %, sedangkan pada sektor bangunan sebesar 6 %. Sektor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga itu adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan jasa-jasa. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.8 di bawah ini.

**Tabel 2.8**

**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB pada tahun 2005-2010 atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat.**

| No | Sektor Ekonomi                   | 2005  |       | 2006  |       | 2007  |       | 2008  |       | 2009  |       | 2010  |       |
|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                  | %HB   | %HK   |
| 1. | Pertanian                        | 25,59 | 25,01 | 25,26 | 24,74 | 24,66 | 24,43 | 24,46 | 24,10 | 23,75 | 24,70 | 23,84 | 23,40 |
| 2. | Pertambangan dan pengalian       | 3,39  | 3,26  | 3,45  | 3,17  | 3,44  | 3,13  | 3,33  | 3,09  | 3,34  | 3,09  | 3,17  | 3,10  |
| 3. | Industri Pengolahan              | 11,38 | 13,06 | 11,42 | 12,85 | 12,01 | 12,79 | 12,11 | 12,75 | 12,05 | 12,58 | 11,69 | 12,32 |
| 4. | Listrik, Gas, air bersih         | 1,49  | 1,16  | 1,42  | 1,19  | 1,37  | 1,20  | 1,22  | 1,17  | 1,18  | 1,18  | 1,06  | 1,13  |
| 5. | Bangunan                         | 5,54  | 4,94  | 5,60  | 4,99  | 5,50  | 4,94  | 5,53  | 4,97  | 5,65  | 4,97  | 6,30  | 5,34  |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran  | 17,46 | 18,19 | 16,96 | 18,29 | 17,34 | 18,40 | 17,74 | 18,46 | 17,99 | 18,30 | 17,74 | 17,86 |
| 7. | Pengangkutan dan komunikasi      | 13,80 | 12,87 | 15,13 | 13,38 | 15,07 | 13,75 | 15,02 | 14,04 | 15,13 | 14,28 | 15,41 | 14,87 |
| 8. | Keuangan, sewa, &jasa Perusahaan | 5,03  | 5,02  | 4,96  | 5,10  | 4,95  | 5,14  | 4,90  | 5,17  | 4,96  | 5,20  | 4,75  | 5,17  |
| 9. | Jasa-jasa                        | 16,31 | 16,47 | 15,79 | 16,27 | 15,64 | 16,22 | 15,68 | 16,25 | 15,95 | 16,38 | 16,03 | 16,81 |
|    | PDRB                             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju inflasi umum tahun 2009 adalah sebesar 47,79 % jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi umum tahun 2005 yang mencapai 65,27 %, sehingga selama lima tahun terakhir laju inflasi umum telah mampu ditekan sebesar 17,48 %. Pada tahun 2009 laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar 85 %, di susul oleh sektor bangunan sebesar 68 %, dan diiringi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25 % (laju inflasi umum dihitung berdasarkan PDRB HK di bagi PDRB HB dikalikan 100 %).

Menurunnya kontribusi sektor pertanian pada harga berlaku pada tahun 2010 memperlihatkan juga bahwa nilai komoditi pertanian ini semakin lebih rendah kontribusinya terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat. Sedangkan pada sektor industri pengolahan nilainya semakin lebih tinggi dari tahun ke tahun, terkecuali untuk tahun 2009 yang mengalami perkembangan nilainya yang lebih rendah. Hal ini berimplikasi bahwa pengembangan industri pengolahan akan lebih baik dibandingkan dengan pengembangan sektor pertanian, karena lebih rentannya terhadap perubahan harga.

Selanjutnya, pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 telah mencapai 25,06 % pada harga konstan. Pertumbuhan tertinggi telah dicapai oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 38,68%, disusul oleh pertumbuhan sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 29,44 %, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 27,51 %, sektor bangunan adalah sebesar 25,97 %, Sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 25,79 %. Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat selama ini, masing-masing hanya sebesar 18,30 % dan 20,13 %.

Masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dalam mendorong pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini adalah disebabkan oleh masing rendahnya nilai tambah sektor pertanian ini dalam system pertukaran ekonomi. Sektor pertanian masih mengalami hambatan dalam system produksi (*production plan*), karena komoditinya masih didominasi oleh produk primer, dan sub sektor yang menjadi andalan dalam peningkatan nilai sektor ini terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat selama ini yakni sub sektor perkebunan komoditinya masih dalam bentuk produk primer, dan belum dikembangkan kearah industri pengolahannya seperti karet, kayu manis, sawit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan, pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambahnya dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor industri pengolahan produk-produk pertanian yang merupakan komoditi eksport utama selama ini.

**Tabel 2.9**  
**Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Pada Harga Belaku dan Harga Konstan**  
**Tahun 2005-2009 di Provinsi Sumatera Barat.**

| No | Sektor Ekonomi                   | Pertumbuhan   |               |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                  | %HB 2005-2009 | %HK 2005-2009 |
| 1. | Pertanian                        | 58,48         | 20,13         |
| 2. | Pertambangan dan pengalian       | 68,10         | 18,30         |
| 3. | Industri Pengolahan              | 80,86         | 20,43         |
| 4. | Listrik, Gas, air bersih         | 34,78         | 27,51         |
| 5. | Bangunan                         | 74,44         | 25,97         |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran  | 75,99         | 25,79         |
| 7. | Pengangkutan dan komunikasi      | 87,17         | 38,68         |
| 8. | Keuangan, sewa, &jasa Perusahaan | 68,21         | 29,44         |
| 9. | Jasa-jasa                        | 67,02         | 24,36         |
|    | PDRB                             | 70,78         | 25,06         |

Tabel 2.9 diatas memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan yang diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, ternyata juga berlum berarti sumbangannya dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan selama ini hanyalah sebesar 20,43 %. Pada hal nilai transaksinya pada sektor industri pengolahan ini sangat besar yang terlihat dari pertumbuhan sektor ini pada harga berlaku sebesar 80,86 %.

Dari sisi harga berlaku, pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat selama 2005-2009 adalah sebesar 70,78 % pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 87,17 %, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 80,86 %, dan sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 75,99 %. Artinya, aktifitas perekonomian Sumatera Barat selama ini telah didorong oleh kegiatan industri pengolahan yakni industri minyak sawit dan lemak hewan, industri tekstil, dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, serta industri semen. Namun, nilai tambah yang ditangkap dari kegiatan ini adalah pada sektor pentransportasiannya, karena besarnya pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi, disamping sektor perdagangan, hotel dan restoran. Artinya, kegiatan perekonomian Sumatera Barat yang didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama perkebunan sawit, karet, dan kakao, ternyata lebih besar diperdagangkan ke luar wilayah dan eksternal wilayah, yang ditandai dengan besarnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, terutama angkutan darat.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ke depan, upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan raya, akan terus mendapat perhatian, terutama jalan arteri primer yang menghubungkan antara Kota Padang dengan kota-kota pusat kegiatan wilayah (PKW) yang ada di Sumatera Barat seperti dengan Kota Solok, Kota Bukittinggi, Pulau Punjung,

dan Simpang Empat. Kota-kota pusat kegiatan wilayah ini merupakan simpul-simpul pusat pertumbuhan pada kawasan perkebunan utama yang ada di Sumatera Barat. Besarnya, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi ini tentunya mengimplikasikan bahwa masih tingginya biaya transportasi melalui jalur angkutan jalan raya ini, sehingga apabila di masa depan dapat dikembangkan angkutan kereta api yang lebih efisien untuk pengangkutan barang, tentunya sektor-sektor pengangkutan dan perdagangan ini akan semakin lebih berkembang lagi dan pada gilirannya akan mampu memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat di masa yang akan datang.

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 menurut Kabupaten dan Kota**  
**Berdasarkan pada harga berlaku dan harga Konstan**

| No  | Kabupaten/Kota       | PDRB   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                      | 2005   |        | 2006   |        | 2007   |        | 2008   |        | 2009   |        |        |        |
|     |                      | HB     | HK     |
| 1.  | Kep Mentawai         | 671    | 429    | 797    | 446    | 913    | 466    | 1.100  | 487    | 1.295  | 509    | 1.439  | 534    |
| 2.  | Kab. Pesisir Selatan | 2.275  | 1.626  | 2.654  | 1.711  | 3.081  | 1.801  | 3.581  | 1.899  | 4.081  | 2.002  | 4.619  | 2.108  |
| 3.  | Kab Solok            | 2.439  | 1.609  | 2.888  | 1.705  | 3.421  | 1.812  | 4.043  | 1.927  | 4.639  | 2.048  | 5.309  | 2.175  |
| 4.  | Kab. Sijunjung       | 1.532  | 1.023  | 1.821  | 1.084  | 2.072  | 1.145  | 2.418  | 1.206  | 2.713  | 1.273  | 3.065  | 1.343  |
| 5.  | Kab. Tanah Datar     | 2.867  | 1.962  | 3.395  | 2.076  | 3.814  | 2.202  | 4.377  | 2.332  | 4.844  | 2.469  | 5.425  | 2.614  |
| 6.  | Kab. Padang Pariaman | 2.987  | 1.972  | 3.890  | 2.346  | 4.382  | 2.490  | 5.128  | 2.645  | 5.594  | 2.749  | 6.021  | 2.891  |
| 7.  | Kab.Agam             | 3.378  | 2.325  | 3.925  | 2.469  | 4.463  | 2.626  | 5.206  | 2.793  | 5.822  | 2.930  | 6.593  | 3.096  |
| 8.  | Kab. 50 Kota         | 3.081  | 2.126  | 3.650  | 2.255  | 4.197  | 2.399  | 5.022  | 2.546  | 5.529  | 2.685  | 6.296  | 2.846  |
| 9.  | Kab. Pasaman         | 1.592  | 1.022  | 1.909  | 1.081  | 2.234  | 1.145  | 2.578  | 1.215  | 2.889  | 1.289  | 3.283  | 1.368  |
| 10. | Kab. Solok Selatan   | 710    | 486    | 818    | 515    | 921    | 546    | 1.067  | 579    | 1.221  | 615    | 1.408  | 653    |
| 11. | Kab. Dharmasraya     | 1.290  | 846    | 1.513  | 899    | 1.787  | 958    | 2.110  | 1.020  | 2.346  | 1.088  | 2.678  | 1.159  |
| 12. | Kab. Pasaman Barat   | 2.983  | 1.989  | 3.507  | 2.115  | 4.116  | 2.251  | 4.868  | 2.395  | 5.518  | 2.545  | 6.320  | 2.707  |
| 13. | Kota Padang          | 13.266 | 9.111  | 15.294 | 9.577  | 17.369 | 10.166 | 20.142 | 10.797 | 21.837 | 11.346 | 24.586 | 12.022 |
| 14. | Kota Solok           | 575    | 394    | 676    | 419    | 757    | 445    | 891    | 473    | 982    | 498    | 1.091  | 527    |
| 15. | Kota Sawahlunto      | 620    | 445    | 678    | 449    | 756    | 459    | 862    | 474    | 976    | 494    | 1.121  | 520    |
| 16. | Kota Padang Panjang  | 468    | 311    | 549    | 330    | 623    | 351    | 730    | 373    | 852    | 387    | 919    | 421    |
| 17. | Kota Bukittinggi     | 1.086  | 762    | 1.269  | 810    | 1.436  | 862    | 1.699  | 919    | 1.881  | 970    | 2.182  | 1.029  |
| 18. | Kota Payakumbuh      | 952    | 644    | 1.133  | 684    | 1.295  | 728    | 1.501  | 774    | 1.653  | 818    | 1.886  | 872    |
| 19. | Kota Pariaman        | 866    | 562    | 1.020  | 590    | 1.126  | 622    | 1.318  | 656    | 1.488  | 686    | 1.581  | 722    |
|     | Sumbar               | 44.675 | 29.159 | 53.030 | 30.950 | 59.799 | 32.913 | 70.614 | 35.008 | 76.295 | 37.408 | 86.004 | 39.607 |
|     | Pertumbuhan Ekonomi  |        | 5,73   |        | 6,14   |        | 6,34   |        | 6,37   |        | 4,16   |        | 5,93   |

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Tabel 2.10 di atas memperlihatkan bahwa perkembangan nilai PDRB Sumatera Barat dari tahun 2005 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2005 nilai PDRB Sumatera Barat mencapai Rp 44.675 miliar pada harga berlaku dan sebesar Rp 29.159 miliar pada harga konstan. Angka ini terus meningkat sampai tahun 2009, dimana nilai PDRB telah mencapai Rp 76.295 miliar pada harga berlaku dan sebesar Rp 36.465 miliar pada harga

konstan. Berarti selama tahun 2005-2009 nilai PDRB Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan sebesar 70,78 % pada harga berlaku dan sebesar 25,06 %. Rata-rata pertumbuhan pertahunnya menurut harga berlaku adalah sebesar 14,16 % dan pada harga konstan adalah sebesar 5,01 % setiap tahunnya.

Diantara kabupaten yang ada, maka kabupaten Agam memiliki nilai PDRB tahun 2005 yang paling tinggi yakni mencapai Rp 3.378 miliar atau sebesar 7,56 % dari PDRB Sumatera Barat tahun 2005 pada harga berlaku dan sebesar Rp 2.325 miliar atau (7,97 %), disusul oleh kabupaten 50 Kota yang mencapai Rp 3.081 miliar, atau sebesar 6,90 % dari PDRB Sumatera Barat, dan tempat ketiga diduduki oleh kabupaten Padang Pariaman yang mencapai Rp 2.987 miliar atau sebesar 6,69 % dari PDRB Sumatera Barat. Diantara wilayah kabupaten yang memiliki nilai PDRB yang masih relative rendah adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 671 miliar, dan kabupaten Solok Selatan yang berjumlah Rp 710 miliar tahun 2005 pada harga berlaku. Dominasi kabupaten Agam ini terus terjadi pada tahun 2009 yang mencapai Rp 5.822 miliar pada harga berlaku atau sebesar 7,63 % dan sebesar Rp 2.930 miliar atau sebesar perkembangan perekonomian yang baik selama ini adalah kabupaten Agam, kabupaten 50 Kota, kabupaten Padang Pariaman, dan kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kabupaten lain relative masih belum berkembangnya perekonomianya dibandingkan dengan empat kabupaten maju ini.

Sedangkan pada seluruh wilayah Kota, maka kota Padang memiliki nilai PDRB yang tertinggi yakni mencapai Rp 13.266 miliar atau sebesar 29, 69% pada tahun 2005 dan pada harga berlaku. Kota Bukittinggi menempati urutan kedua terbesar yakni Rp 1.086 miliar atau sebesar 2,43%. Sedangkan kota Payakumbuh memiliki nilai PDRB Rp 952 miliar, dan Kota Pariaman sebesar Rp 866 miliar. Pada harga konstan, nilai PDRB Kota Padang adalah berjumlah Rp 9.111 miliar atau sebesar 31,25 % dari nilai PDRB provinsi Sumatera Barat, disusul oleh Kota Bukittinggi sebesar Rp 762 miliar atau sebesar 2,61 %. Sedangkan kota yang memiliki nilai PDRB tahun 2005 pada harga berlaku yang paling rendah adalah Kota Padangpanjang sebesar Rp 468 miliar atau hanya 1,05 % dari nilai PDRB Sumatera Barat.

Pada tahun 2009, nilai PDRB Kota Padang pada harga berlaku berjumlah Rp 21.837 miliar atau sebesar 28,62 %, sedangkan Kota Bukittinggi berjumlah Rp 970 miliar atau sebesar 2,66 % dari nilai PDRB Sumatera Barat. Setelah itu, disusul oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.653 miliar atau sebesar 2,17 %, dan Kota Pariaman sebesar Rp 1.488 miliar atau sebesar 1,95 %.

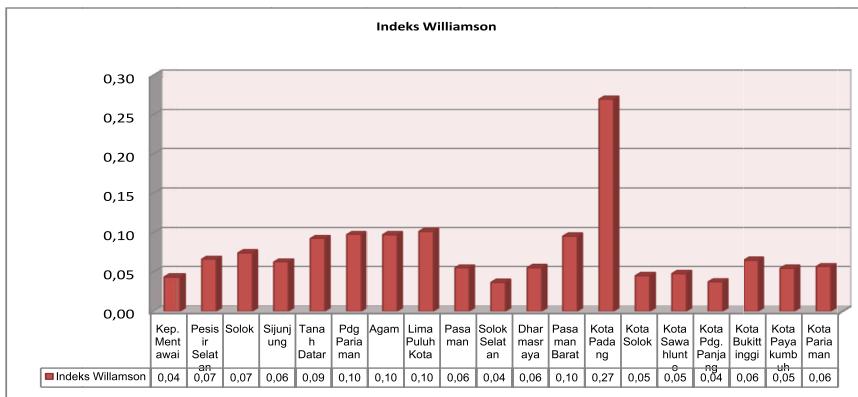
**Tabel 2.11**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2005 s/d 2010**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

| No  | Kabupaten/Kota       | PDRB Perkapita Harga Konstan (Rp Juta) |       |       |       |       |       |
|-----|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                      | 2005                                   | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
| 1.  | Kep. Mentawai        | 6,65                                   | 6,73  | 6,93  | 7,15  | 6,75  | 6,98  |
| 2.  | Kab. Pesisir Selatan | 3,84                                   | 3,98  | 4,13  | 4,29  | 4,72  | 4,90  |
| 3.  | Kab Solok            | 4,69                                   | 4,91  | 5,15  | 5,42  | 5,94  | 6,21  |
| 4.  | Kab. Sijunjung       | 5,43                                   | 5,62  | 5,79  | 5,96  | 6,38  | 6,65  |
| 5.  | Kab. Tanah Datar     | 5,92                                   | 6,21  | 6,57  | 6,94  | 7,38  | 7,71  |
| 6.  | Kab. Padang Pariaman | 5,21                                   | 6,14  | 6,48  | 6,83  | 7,13  | 7,40  |
| 7.  | Kab. Agam            | 5,47                                   | 5,78  | 6,13  | 6,50  | 6,51  | 6,79  |
| 8.  | Kab. 50 Kota         | 6,56                                   | 6,89  | 7,28  | 7,67  | 7,80  | 8,16  |
| 9.  | Kab. Pasaman         | 4,18                                   | 4,34  | 4,52  | 4,72  | 5,16  | 5,40  |
| 10. | Kab. Solok Selatan   | 3,83                                   | 4,00  | 4,19  | 4,38  | 4,31  | 4,53  |
| 11. | Kab. Dharmasraya     | 5,12                                   | 5,28  | 5,46  | 5,64  | 5,76  | 6,05  |
| 12. | Kab. Pasaman Barat   | 6,28                                   | 6,56  | 6,87  | 7,19  | 7,07  | 7,42  |
| 13. | Kota Padang          | 11,39                                  | 11,68 | 12,13 | 12,60 | 13,78 | 14,41 |
| 14. | Kota Solok           | 7,29                                   | 7,51  | 7,79  | 8,09  | 8,49  | 8,88  |
| 15. | Kota Sawah Lunto     | 8,38                                   | 8,42  | 8,51  | 8,73  | 8,81  | 9,14  |
| 16. | Kota Padang Panjang  | 6,84                                   | 6,63  | 6,75  | 6,88  | 8,54  | 8,94  |
| 17. | Kota Bukittinggi     | 7,58                                   | 7,90  | 8,27  | 8,67  | 8,85  | 9,27  |
| 18. | Kota Payakumbuh      | 6,32                                   | 6,57  | 6,93  | 7,30  | 7,09  | 7,45  |
| 19. | Kota Pariaman        | 8,02                                   | 8,38  | 8,82  | 9,29  | 8,78  | 9,12  |
| 20. | Sumbar               | 6,40                                   | 6,68  | 7,01  | 7,35  | 7,81  | 8,16  |

Sumber Data : BPS, Nilai tahun 2006 s.d 2009 dihitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2000,  
Nilai tahun 2010 dihitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010

Tabel 2.11. di atas memperlihatkan besarnya nilai PDRB per Kapita Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD pertama. Tahun 2005 besarnya PDRB per kapita Sumatera Barat adalah sebesar Rp 6,40 juta/jiwa terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan sampai tahun 2010 yang mencapai Rp 8,16 juta/jiwa, dengan pertumbuhan sebesar 27,50 % dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya adalah sebesar 5,50 % per tahun.

Pada tahun 2005, terdapat delapan kabupaten dan Kota yang memiliki nilai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB per kapita Sumatera Barat, diantaranya adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 6,65 juta, kabupaten 50 Kota yang mencapai Rp 6,56 juta, Kota Padang sebesar Rp 11,39 juta, dan Kota Payakumbuh yang berada di bawah angka provinsi Sumatera Barat yakni sebesar Rp 6,32 juta. Pada tahun 2009 masih terdapat delapan wilayah kabupaten dan Kota yang memiliki PDRB per Kapita yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten 50 Kota sebesar Rp. 7,80 juta, Kota Padang sebesar Rp 13,78 juta, dan semua kota lainnya, untuk lebih jelasnya lihat tabel di atas.

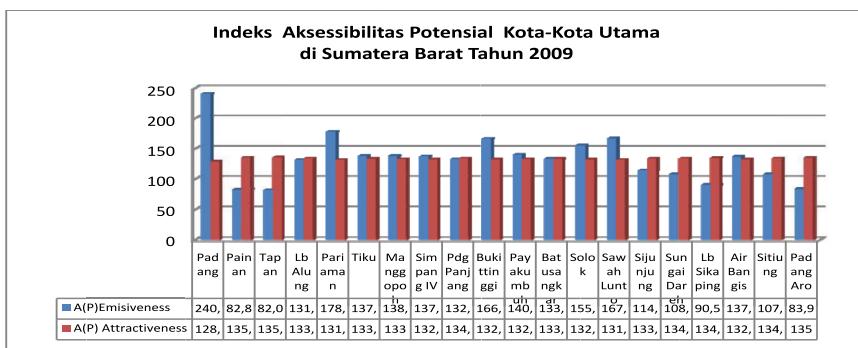


**Gambar 2.2**

Ketimpangan Wilayah Menurut Indeks Williamson di Sumatera Barat

Gambar 2.2 diatas memperlihatkan bahwa indeks ketimpangan wilayah yang paling tinggi terdapat pada Kota Padang yang ditunjukkan oleh nilai indeks Williamson sebesar 0,27 yang mendekati satu; yang berarti sangat timpang. Ketimpangan wilayah ini dilihat dari nilai pendapatan per kapita Kota Padang yang mencapai Rp 12,1 juta dengan jumlah penduduk tahun 2008 adalah sebanyak 838.190 jiwa dan besarnya PDRBnya adalah Rp 17,4 miliar. terdapat empat kabupaten yang lebih mendekati kemajuan wilayah Kota Padang yakni kabupaten Agam, 50 Kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan kabupaten lain relatif merata. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang paling merata adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padangpanjang.

Besarnya ketimpangan wilayah yang terjadi ini lebih disebabkan karena lebih terfokusnya kegiatan ekonomi pada Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional, sedangkan transaksi ekonomi antara kota Padang dengan kota-kota pusat kegiatan wilayah lainnya, lebih dominan pada pendistribusian barang dan jasa dari Kota Padang ke Kota PKW lainnya, sedangkan arus masuk barang dan jasa dari PKW menuju Kota Padang lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan industri belum berfungsi dengan baik selama ini.



**Gambar 2.3**

Gambar Grafik Indeks Aksessibilitas Potensial Kota-Kota Utama di Sumatera Barat, Tahun 2009

Gambar 2.3 diatas memperlihatkan bahwa terdapat lima kota yang memiliki tingkat daya sebar arus barang dan jasa yang tinggi menuju ke luar wilayahnya yakni Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto. Artinya, kota-kota ini arus barang dan orang lebih besar meninggalkan wilayahnya jika dibandingkan dengan arus barang dan orang yang masuk ke wilayah sendiri. Kota-kota yang berfungsi sebagai wilayah pusat pertumbuhan local dengan aktifitas ekonomi industri haruslah memiliki kekuatan arus barang masuknya lebih tinggi dari pada arus keluar barang dan orangnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan wilayah ke depan, bagaimana memfungsikan pusat-pusat pertumbuhan local ini saling terkait dengan pusat pertumbuhan utama di Sumatera Barat, sehingga saling hubungan wilayah pembangunan di Sumatera Barat dapat dikembangkan kearah transaksi ekonomi yang saling menguntungkan ke dalam wilayah sendiri. Apabila pusat-pusat pertumbuhan local ini lebih tertarik ke pusat pertumbuhan wilayah provinsi tetangga, tentunya akan terjadi kebocoran ekonomi wilayah (*economics of leakage*) di Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan harus memperhatikan saling keterkaitan spatial diantara wilayah-wilayahnya terutama keterkaitan wilayah pusat pertumbuhan utama dengan wilayah hinterlandnya.

**Tabel 2.12  
Nilai Inflasi PDRB Rata-rata Tahun 2005- 2009 Provinsi Sumatera Barat**

| No | Sektor Ekonomi                   | 2005         | 2006         | 2007        | 2008         | 2009        |
|----|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. | Pertanian                        | 19,95        | 11,59        | 4,93        | 11,54        | 1,02        |
| 2. | Pertambangan dan pengalian       | 11,69        | 17,26        | 7,34        | 8,61         | 3,98        |
| 3. | Industri Pengolahan              | 5,90         | 14,01        | 12,06       | 12,34        | 4,65        |
| 4. | Listrik, Gas, air bersih         | 7,88         | 3,93         | 1,90        | 1,60         | 1,60        |
| 5. | Bangunan                         | 17,68        | 12,08        | 5,09        | 11,03        | 5,92        |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran  | 4,81         | 8,02         | 7,80        | 13,25        | 6,10        |
| 7. | Pengangkutan dan komunikasi      | 22,81        | 17,96        | 2,72        | 8,36         | 2,81        |
| 8. | Keuangan, sewa, &jasa Perusahaan | 9,53         | 8,48         | 5,06        | 9,22         | 4,40        |
| 9. | Jasa-jasa                        | 10,94        | 9,59         | 5,34        | 11,13        | 4,68        |
|    | <b>Sumatera Barat</b>            | <b>13,10</b> | <b>11,84</b> | <b>6,04</b> | <b>11,02</b> | <b>3,73</b> |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju inflasi PDRB Sumatera Barat tahun 2005 adalah sebesar 13,10 dan terus mengalami penurunan hingga sampai tahun 2009 yang hanya mencapai 3,73. Artinya selama periode 2005-2009 perkembangan harga produk sektor ekonomi semakin lebih baik. Pada tahun 2005 sektor ekonomi yang memiliki nilai inflasi yang paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi

sebesar 22,81, disusul oleh sektor pertanian sebesar 19,95 dan sektor bangunan sebesar 17,68. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 5,90, dan perdagangan hotel dan restoran memiliki nilai inflasi yang paling rendah yakni mencapai 4,81. Rendahnya nilai inflasi sektor industri pengolahan dan perdagangan ini berimplikasi bahwa perkembangan harga-harga pada sektor ini masih rendah, karena produk yang dihasilkan masih barang primer atau bahan mentah.

Apabila dilihat per sektor, pada tahun 2009, sektor pertanian memiliki nilai inflasi yang paling rendah yakni hanya 1,02, sedangkan laju inflasi yang tertinggi ada pada sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 6,10, disusul oleh sektor bangunan sebesar 5,92. Sektor industri pengolahan hanya sebesar 4,64 telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga peningkatan nilai produk industri pengolahan ini perlu terus ditingkatkan, dengan mengembangkan kearah pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Angka laju inflasi lainnya seperti yang dipublikasikan oleh BPS pada setiap bulannya dihitung dengan menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK) Kota Padang, dimana Kota Padang termasuk salah satu dari 66 kota di Indonesia yang dijadikan dasar perhitungan Indek Harga Konsumen Nasional/Gabungan.

## **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **1. Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Visi Sumatera Barat Tahun 2025 yang menjadikan pembangunan di Sumatera Barat berbasiskan kepada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Pembangunan manusia seutuhnya meliputi manusia sebagai insan manusia dan sumber daya pembangunan. Dalam perwujudannya selalu memperhatikan insan manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, bermoral, memiliki jati diri serta berkarakter; mempunyai sikap mental positif; berdaya pikir, cipta dan karsa dan karya. Dilain pihak pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi dan berkualitas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, serta berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pembangunan sumber daya manusia sebagai insan manusia dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila pendidikan yang baik dan benar dilaksanakan sejak dini dan mampu membentuk karakter sumber daya manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang antara kemampuan intelektual, emosional serta spiritual. Sehingga pendidikan dalam konteks ini, harus membuat seimbang antara pembentukan dan pembinaan karakter dan pendidikan yang menekankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Selama periode 2005-2010, berbagai upaya pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sumatera Barat telah dilakukan. Kecenderungan (*trend*) keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun 2008, menunjukkan kemajuan yang berarti.

Sampai dengan tahun 2008, antara besaran target dan realisasi program berjalan seimbang, namun terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009, di Sumatera Barat telah membawa kemunduran (*setback*) terhadap perkembangan pendidikan. Hasil survei setelah terjadinya gempa yang dilakukan UNDP: Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Manusia (UNDP tahun 2009) (N = 500), menunjukkan:

- a. Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan akibat gempa adalah: Kota Padang, Kota Pariaman, kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman , Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pola bencana akibat gempa: (1) tingginya tingkat kehancuran rumah-rumah pedesaan, (2) tingginya tingkat kehancuran/kerusakan pada sekolah baik yang mengalami rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan (3) putusnya jalan akses pedesaan akibat longsor yang dipicu oleh gempa dan diperparah oleh degradasi hutan
- c. Salah satu dampak umum bencana: Terganggunya pendidikan anak, Lebih dari separuh gedung sekolah memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tiga puluh tujuh persen (37 %) tidak ada bangunan yang tersedia, 19,2 % tersedia, tetapi tidak aman
- d. Menurut laporan data Satkorlak Provinsi Sumatera Barat yang kemudian diadopsi dalam laporan UNDP tahun 2009, sarana dan prasarana sekolah yang rusak akibat gempa yakni :
  - a. Rusak Berat : 2.146 unit (perlu pembongkaran) ,
  - b. Rusak Sedang : 1.447 unit (perlu penilaian dari insinyur struktural)
  - c. Rusak Ringan : 1.137 unit (perlu rehab ringan).

## **2. Kebudayaan**

Pembangunan bidang kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat, sumberdaya manusia adalah salah satu kekuatan bagi pembangunan Sumatera Barat. Kekuatan ini telah melahirkan kreativitas dari orang Minangkabau untuk turut serta dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Sumatera Barat dewasa ini telah berkembang kepada masyarakat yang heterogen dan multikultural sebagai konsekuensi dari masuknya budaya luar. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain disebabkan karena keterbukaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk: (1) terbuka terhadap warga luar daerah untuk bermukim dalam wilayah Sumatera Barat; (2) terbuka terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi di Kabupaten/Kota; (3) terbuka terhadap perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat; (4) terbuka terhadap perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat; dan (5) terbuka terhadap efek pembangunan fisik dan infrastruktur.

Selama RPJMD ke 1 (tahun 2006-2010) beberapa kegiatan yang melampaui target sasaran yang telah ditetapkan yaitu: (1) Pengembangan lembaga seni dan budaya target 446 lembaga/sanggar, sedangkan realisasinya adalah 510, dan (2) Pembinaan seni budaya langka, target 35 kegiatan, sedangkan realisasinya adalah 37 kegiatan.

Untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan, maka diperlukan gerakan terpadu untuk peningkatan nilai-nilai seni dan kebudayaan berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK). Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Sistem nilai merupakan tingkat tertinggi dan abstrak yang mengatur adat istiadat, karena sifatnya yang abstrak, nilai budaya terletak dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga pendukung suatu kebudayaan tersebut. Dalam tiap masyarakat, terdapat sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan yang digunakan sebagai pedoman dan pendorong bagi kehidupan warga masyarakat.

### **2.2.3. Gambaran Kondisi Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat**

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara

secara minimal. Sampai kondisi tahun 2012 realisasi penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Gambaran kondisi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat**

| No | Bidang/Jenis Layanan   | Indikator Kinerja  | Target Rencana Pencapaian | Batas Waktu Pencapaian | Realisasi Pencapaian Target |        |        |
|----|--|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|    |  |  |                           |                        | 2010                        | 2011   | 2012   |
| 1  | <b>Sosial</b>  |  |                           |                        |                             |        |        |
|    | Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial:   |  |                           |                        |                             |        |        |
|    | a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi                                | Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.   | 80%                       | 2010-2015              | 0,95                        | 1,46   | 2,83   |
|    | b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi  | Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.                             | 60                        | 2010-2015              | 38,17                       | 39,69  | 41,98  |
|    | Penyediaan sarana dan prasarana sosial:  |  |                           |                        |                             |        |        |
|    | a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi   | Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.                                 | 80                        | 2010-2015              | 43,51                       | 45,04  | 48,09  |
|    | b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi   | Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.                    | 60                        | 2010-2015              | 14,40                       | 20,16  | 20,99  |
|    | Penanggulangan korban bencana:   |  |                           |                        |                             |        |        |
|    | a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi   | Persentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.   | 80%                       | 2010-2015              | 100,00                      | 100,00 | 100,00 |
|    | b. Evaluasi korban bencana skala provinsi  | Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi         | 80%                       | 2010-2015              | 100,00                      | 100,00 | 100,00 |
|    | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: |  |                           |                        |                             |        |        |
|    | a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi   | Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial | 40%                       | 2010-2015              | 100,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 2  | <b>Lingkungan Hidup</b>  |  |                           |                        |                             |        |        |
|    | Jenis pelayanan Informasi status mutu air  | Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya                  | 100                       | 2010-2015              | 20,00                       | 60,00  | 80,00  |
|    | Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien   | Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya                              | 100                       | 2010-2015              | 26,32                       | 47,37  | 78,95  |
|    | Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup       | Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti             | 100                       | 2010-2015              | 40,00                       | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang/Jenis Layanan      | Indikator Kinerja  | Target Rencana Pencapaian | Batas Waktu Pencapaian | Realisasi Pencapaian Target |  |   |
|----|---------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|
|    |                           |  |                           |                        | 2010                        | 2011   | 2012  |
| 3  | <b>Penanaman Modal</b>    |  |                           |                        |                             |  |   |
|    | Kebijakan Penanaman Modal | Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan   | 1 sektor/bidang usaha/th  | 2010-2014              | 0                           | industri pengalengan ikan lokasi Pasaman Barat luas 1.5 Ha dan Pabrik Ban Lokasi PIP luas lahan 587 Ha | Cable car lokasi padang panjang (minang kabau fantaasi dan minang kabau village) luas 1.680M2 dg panjang 1.800 M (PP) |
|    | Kerjasama Penanaman Modal | Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha  | 1 kali/th                 |                        |                             |  | 0   |
|    | Promosi Penanaman Modal   | Terselelenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi  | 1 kali/th                 | 2010-2014              |                             |  | 7 kali  |
|    |                           | Hasil promosi penanaman modal tingkat provinsi   | 5 MoU                     | 2010-2014              |                             |  |   |
|    | Pelayanan Penanaman Modal | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Izin Prinsip PMBN, Izin Usaha PMDN, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), per panjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi. | 100%                      | 2010-2014              |                             |  | 100%  |

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib

##### 1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan Sumatera Barat secara umum menunjukkan hasil cukup baik, antara lain dilihat dari perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan dalam kurun waktu tahun 2006-2009. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan pada periode ini di Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat antara lain dilihat dari pencapaian angka partisipasi kasar (APK), bahwa tingkat pendidikan SD/MI/Paket A, tahun 2006 dari target 113,36 % terealisasi 113,37 %. Selanjutnya dari tahun 2006 sampai tahun 2009 realisasi indikatornya selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti dan berdampak positif terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMTLB/Paket B, dapat dikatakan menunjukkan keberhasilan, hal ini dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi dari tahun 2006-2009 sudah melampaui target yang direncanakan, yaitu tahun 2006 target 88,18 %, teralisasi sebesar 88,28 % dan seterusnya tahun 2009 target 96,07 % terealisasi 97,42 %. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C, perlu mendapatkan perhatian karena pencapaian realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2006 dengan target 64,90 % terealisasi 64,71 %, selanjutnya tahun 2009 dengan target sebesar 76,84 % hanya terealisasi sebesar 72,51 %. Namun demikian realiasinya dari mulai tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pencapaian pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan unggul seperti Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dimulai pada tahun 2008, meliputi SBI SD sebanyak 2 sekolah, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP 17 sekolah, RSBI SAM 17 sekolah, RSBI SMK 21 sekolah dan SMA bersertifikat ISO 1900-2000 sebanyak 29 sekolah.

Untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM), pada seluruh jenjang pendidikan dapat dikatakan menggambarkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat terlihat pada Tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2006-2009 pada setiap tahunnya, hasil realisasi pencapaian indikator pembangunan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target yang direncanakan. Data tersebut dapat dicermati pada tabel di atas yaitu tahun 2006 dengan target 97,61 % terealisasi 97,61 %, seterusnya 2009 target 98,57 % telah direalisasikan sebesar 99,85 %. Tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Paket B juga mengalami hal yang sama dengan tingkat pendidikan SD/ MI/Paket A. Pada tahun 2006 dicapai realisasi 70,62 % dari target 67,16 % dan tahun 2009 target 77,25 % direalisasikan 78,56 %. Tingkat SMA/ MA/SMK/Paket C rata-rata setiap tahunnya pencapaian realisasi juga melebihi target yang telah direncanakan.

Untuk indikator Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/Diploma IV, pada setiap jenjang tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dalam kurun waktu 2006-2009, dapat digambarkan realisasi pelaksanaannya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait pada tahun-tahun mendatang, sehingga pencapaian realisasi dapat memenuhi target yang telah direncanakan.

Pada Indikator Sertifikasi Guru dari evaluasi kinerja secara makro berdasarkan Tabel 2.14. menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK,

SLB, SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2006-2009, realisasi pelaksanaan program selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data indikator makro pada tabel di atas, realisasi kegiatan dari tahun ke tahun mulai tahun 2006 sampai tahun 2009, menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Selain itu, sampai dengan tahun 2009, terjadi peningkatan terhadap rata-rata lama sekolah menjadi 8,45 tahun.

**Tabel 2.14  
Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan  
Tahun 2006– 2010**

| Indikator Kinerja   | Sa-tuan | 2006   |           | 2007   |           | 2008   |           | 2009   |           | 2010   |           |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|   |         | Target | Realisasi |
| <b>a. Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>                     |         |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1. SD/MI/SDLB/Paket A                                       | %       | 113,36 | 113,37    | 117,27 | 114,50    | 119,67 | 115,82    | 122,08 | 116,11    | 124,48 | 112,54    |
| 2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B                                    | %       | 88,15  | 88,28     | 90,20  | 93,90     | 93,13  | 96,08     | 96,07  | 97,42     | 99,15  | 98,31     |
| 3. SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C                               | %       | 64,90  | 64,71     | 70,52  | 65,98     | 73,68  | 68,56     | 76,84  | 72,51     | 80,25  | 83,92     |
| <b>b. Angka Partisipasi Murni (APM)</b>                     |         |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1. SD/MI/SDLB/Paket A                                       | %       | 97,61  | 97,61     | 97,69  | 98,60     | 98,13  | 99,67     | 98,57  | 99,85     | 99,01  | 99,67     |
| 2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B                                    | %       | 67,16  | 70,62     | 71,75  | 72,44     | 74,70  | 75,91     | 77,25  | 78,56     | 80,30  | 77,25     |
| 3. SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C                                | %       | 49,16  | 49,13     | 48,77  | 53,36     | 49,84  | 55,55     | 50,90  | 62,13     | 51,97  | 55,50     |
| <b>c. Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/ Diploma IV</b> |         |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1. SD   | %       | 15,00  | 15,00     | 17,50  | 17,50     | 20,00  | 14,79     | 22,50  | 16,49     | 25,00  | 20,00     |
| 2. SMP  | %       | 74,13  | 74,13     | 80,38  | 80,38     | 86,63  | 56,33     | 92,88  | 59,94     | 100,00 | 86,63     |
| 3. SMA  | %       | 83,12  | 83,12     | 87,37  | 87,37     | 91,62  | 86,88     | 95,87  | 87,35     | 100,00 | 91,01     |
| 4. SMK  | %       | 81,51  | 81,37     | 86,26  | 66,26     | 91,01  | 82,40     | 95,76  | 85,00     | 100,00 | 91,01     |
| <b>d. Sertifikasi Guru (Pem. Pusat)</b>                     |         |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1. TK   | Org     | -      | 6         | 30     | 30        | 30     | 38        | 40     | 84        | 50     | 30        |
| 2. SLB  | Org     | -      | 5         | 30     | 30        | 30     | 23        | 40     | 74        | 50     | 30        |
| 3. SD/MI  | Org     | -      | 65        | 500    | 500       | 600    | 1.870     | 700    | 3.175     | 2.500  | 600       |
| 4. SMP/MTs  | Org     | -      | 84        | 1.240  | 1.240     | 1.440  | 1.499     | 1.620  | 2.458     | 2.900  | 1.440     |
| 5. SMA/SMK/MA   | Org     | -      |           |        | 1.700     |        | 1.743     |        | 2.889     |        | 2.400     |
| Persentase penduduk Buta Huruf menurut kelompok umur        |         |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| a. 15+  | %       | -      | 4,12      | -      | 3,90      | -      | 3,34      | -      | -         | -      | -         |
| b. 15 - 44  | %       | -      | 1,50      | -      | 1,78      | -      | 0,83      | -      | -         | -      | -         |
| c. 45 +   | %       | -      | 9,43      | -      | 7,97      | -      | 7,99      | -      | -         | -      | -         |
| Rata-rata lama sekolah warga masyarakat                     | th      | -      | 8         | -      | 8,18      | -      | 8,26      | -      | 8,45      | -      | 8,79      |

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi

Pendidikan merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing Sumatera Barat. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis, dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama secara keseluruhan. Oleh karena itu pembangunan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, dan menyenangkan dengan menekankan pada pembinaan

dan perkembangan pribadi anak didik secara utuh, berkarakter dan mandiri.

## **2. Kesehatan**

Gempa yang terjadi 30 September 2009, memberikan dampak di segala sektor bagi Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bidang Kesehatan. Hal ini akan makin menambah permasalahan kesehatan yang telah ada sebelumnya.

Pencapaian target bukan semata-mata menunjukkan kinerja pemerintah di bidang Kesehatan, namun target indikator bidang Kesehatan yang dibuat berdasarkan indikator 4 tahun pencapaian kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 - 2010, dimana dijadikan suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan rujukan dan gambaran kondisi derajat kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja bidang kesehatan pada masa yang akan datang. Target kesehatan yang ingin dicapai mengacu untuk tahun Indikator Sumbar Sehat yang ingin dicapai pada Tahun 2010.

Pencapaian target kinerja program bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Tahun 2006- 2010, penilaian dilakukan dengan index antara target dan realisasi. Indek lebih besar atau sama dengan 1,00 termasuk *Klasifikasi A*, Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010 terlampaui dengan klasifikasi Sangat memuaskan, namun target tersebut perlu tetap ditingkatkan. Indek antara 0,75 dengan 1,00 termasuk *Klasifikasi B*, Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010 belum tercapai, sehingga perlu perhatian dan langkah peningkatan, indeks antara 0,55 sampai 0,75 termasuk *Klasifikasi C*, Target belum terpenuhi dan perlu perbaikan terhadap kinerja pencapaian target. Indeks dibawah 0,55 termasuk *Klasifikasi D*, target masih jauh dari harapan, perlu penanganan dan tindakan khusus terhadap kinerja pencapaian target.

Perkembangan pencapaian indikator derajat Kesehatan selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Target Derajat Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Terhadap target Indikator Kinerja Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Kinerja Makro Bidang Kesehatan Sumatera Barat**  
**Tahun 2006-2010**

| INDIKATOR KINERJA   | Sat  | 2006       |              |       | 2007       |              |       | 2008       |              |       | 2009       |              |       | 2010       |              |       |
|---|------|------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|
|   |      | Tar<br>get | Realisasi    | Index |
| 1. Angka harapan hidup (Th)   | TH   | 66.52      | 68.60        | 1.03  | 66.7       | 68.80        | 1.03  | 67.00      | 68.90        | 1.03  | 67,20      | 70.40        | 1.06  | 70,9       | 70,9         | 1.00  |
| 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)   | KH   | 42,10      | 36,00        | 1.14  | 41,7       | 34,00        | 1.18  | 40,12      | 28,50        | 1.29  | 39,25      | 26,00        | 1.34  | 26         | 26           | 1.00  |
| 3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (KH)                                   | KH   | 274,6      | 230          | 1.16  | 258,4      | 229          | 1.11  | 242,2      | 215,9        | 1.11  | 226        | 208          | 1.08  | 214        | 207          | 0.97  |
| 4. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)/ Jumlah ibu hamil yang berkunjung 4 kali sebelum melahirkan (%) | %    | 81         | 76,2         | 0.94  | 84         | 84,8         | 1.01  | 87         | 87,1         | 1.00  | 90         | 90           | 1.00  | 90         | 93,5         | 1.04  |
| 5. Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi (%)                                    | %    | 79,5       | 75,6         | 0.95  | 82         | 82,7         | 1.01  | 84,5       | 85,97        | 1.02  | 87         | 87,1         | 1.00  | 90         | 90,8         | 1.01  |
| 6. Desa Universal Child Immunization (Desa/ Jorong/ Kelurahan Cakupan Imunisasi) (%)                | %    | 80         | 84,7         | 1.06  | 85         | 88,8         | 1.04  | 90         | 90,2         | 1.00  | 95         | 95,4         | 1.00  | 100        | 96,6         | 0.97  |
| 7. Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita (%)  | %    | 14,2       | 12,9         | 1.09  | 13,5       | 12,8         | 1.05  | 12,8       | 12,7         | 1.01  | 12,1       | 10,5         | 1.13  | 11,4       | 8,2          | 0.72  |
| 8. Cakupan Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas (Visit Rate)                                    | Kali | 1,6        | 1,3          | 0.81  | 1,7        | 2,2          | 1.29  | 1,8        | 1,81         | 1.01  | 1,9        | 1,93         | 1.02  | 2          | 2            | 1.00  |
| 9. BOR (Bed Occupation Rate)/ Persentase pemanfaatan Tempat Tidur di Rumah Sakit (%)                | %    | 62         | 68,6         | 1.11  | 65         | 71,2         | 1.10  | 70         | 62           | 0.89  | 77         | 65,1         | 0.85  | 85         | 70,4         | 0.83  |
| 10. Terakreditasinya Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta) (%)  | %    | 80         | 33           | 0.41  | 83         | 35,18        | 0.42  | 88         | 37,03        | 0.42  | 93         | 33,88        | 0.36  | 40,74      | 43,4         | 1.07  |
| 11. Ketersediaan obat esensial dan obat generic pada puskesmas dan rumah sakit                      | %    | 80         | 81,7         | 1.02  | 85         | 85,4         | 1.00  | 90         | 91,07        | 1.01  | 95         | 92,5         | 0.97  | 100        | 100          | 1.00  |
| 12. Persentase rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan sehat                                  | %    | 37         | 37           | 1.00  | 44         | 44,8         | 1.02  | 51         | 58           | 1.14  | 58         | 69,38        | 1.20  | 65         | 69,3         | 1.07  |
| <b>TOTAL</b>  |      |            | <b>12.75</b> |       |            | <b>13.28</b> |       |            | <b>12.93</b> |       |            | <b>12.98</b> |       |            | <b>11.66</b> |       |
| <b>INDEX RERATA/TAHUN</b>   |      |            | 0.98         |       |            | 1.02         |       |            | 0.99         |       |            | 1.00         |       |            | 0.97         |       |
| <b>INDEX RERATA</b>   |      |            |              |       |            |              |       |            |              |       |            | 1.00         |       |            | 1.24         |       |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi, Desember 2010

Berdasarkan hasil kompilasi data, diperoleh indeks rata-rata derajat Kesehatan Sumatera Barat sebesar 1.00, artinya termasuk ke dalam kelompok dengan Klasifikasi A, sangat memuaskan, dimana target rata-rata dapat dicapai. Selanjutnya masih diperlukan langkah-langkah

peningkatan pencapaian dari masing-masing parameter indikator, dimana pencapaian tidak hanya untuk menyamai target angka pada tahun 2010, namun yang lebih penting adalah agar derajat Kesehatan Sumatera Barat tercapai setinggi-tingginya dan memiliki ketahanan Kesehatan yang handal.

Indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada perencanaan mendatang adalah terakreditasinya rumah sakit (pemerintah dan swasta) yang baru mencapai 33.88%. Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu syarat Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jika dipertahankan seperti ini, maka dengan laju pertumbuhan yang sangat kecil, maka pada akhir tahun 2015 hanya akan mencapai 33.8% saja. Sangat diperlukan program peningkatan untuk terakreditasinya rumah sakit (pemerintah dan swasta) agar bisa mencapai 100% pada tahun 2015

Untuk indikator angka kematian bayi, berdasarkan trend Angka Kematian Bayi yang ada maka diprediksikan dalam 5 tahun ke depan akan berhasil mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu, menurunkan angka kematian bayi sampai 23/1000 kelahiran hidup. Diprediksikan dengan laju penurunan sejak tahun 2006-2009, bahkan Provinsi Sumatera Barat bisa mencapai 14/1000 kelahiran hidup. Kecepatan penurunannya per tahun mampu mencapai 9,62%. Artinya dalam 5 tahun ke depan estimasi penurunan dapat mencapai hampir setengahnya. Ini merupakan pencapaian yang sangat baik sekali bagi Provinsi Sumatera Barat. Percepatan penurunan angka kematian bayi akan dapat dicapai antara lain bila terjadi perbaikan terhadap kesehatan ibu dan bayi, peningkatan ketersediaan sarana prasarana KIA, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga medis dan paramedis.

Untuk pencapaian peningkatan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga perempat jumlah angka kematian ibu hamil dan melahirkan, dengan target 102/100.000 kelahiran hidup, sepertinya akan cukup sulit dari pencapaian menjadi seperti yang ditargetkan. Peningkatan upaya program-program KIA yang lebih banyak lagi, yang menunjang untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut. Prediksi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2015 hanya bisa mencapai 181.6 /100.000 kelahiran hidup. Kecepatan laju penurunan per tahun, baru mencapai 2.64%. Artinya dalam 5 tahun kedepan hanya mampu menurunkan sekitar 13.2% saja.

Dengan adanya *global health*, perubahan iklim akan menyulitkan untuk memberantas HIV/AIDS dan penyakit-penyakit infeksi penyebab utama kematian seperti penyakit tuberkulosis dan malaria pada tahun 2015. Program-program intervensi dan upaya mencari bantuan dana dari berbagai sumber pembiayaan perlu diupayakan.

### **3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan antara lain tercermin dari peningkatan capaian Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (%), persentase perempuan pekerja profesional (%), perempuan dalam angkatan kerja (%) dan upah pekerja non pertanian (Rp.000). sedangkan Indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja.

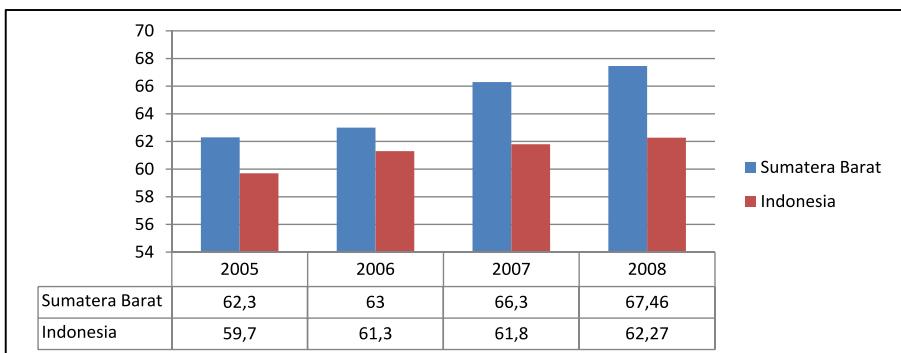
Pembangunan gender di Sumatera Barat dihitung berdasarkan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar dan Indeks Pemberdayaan Jender (IDG). Angka IPG dan IDG Sumatera Barat tahun 2007 sudah berada diatas angka nasional. Berikut tabel pencapaiannya:

**Tabel 2.16  
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2007**

| Lokasi         | Angka harapan hidup |      | Angka melek huruf |      | Rata-rata lama sekolah |     | % angkatan kerja |       | IPG  | Rangking |
|----------------|---------------------|------|-------------------|------|------------------------|-----|------------------|-------|------|----------|
|                | L                   | P    | L                 | P    | L                      | P   | L                | P     |      |          |
| Sumatera Barat | 66.5                | 70.5 | 97.6              | 94.6 | 8.3                    | 7.8 | 61.80            | 38.20 | 66.3 | 5        |
| Indonesia      | 66.50               | 70.5 | 94.6              | 88.4 | 7.9                    | 6.9 | 63.61            | 36.39 | 65.3 |          |

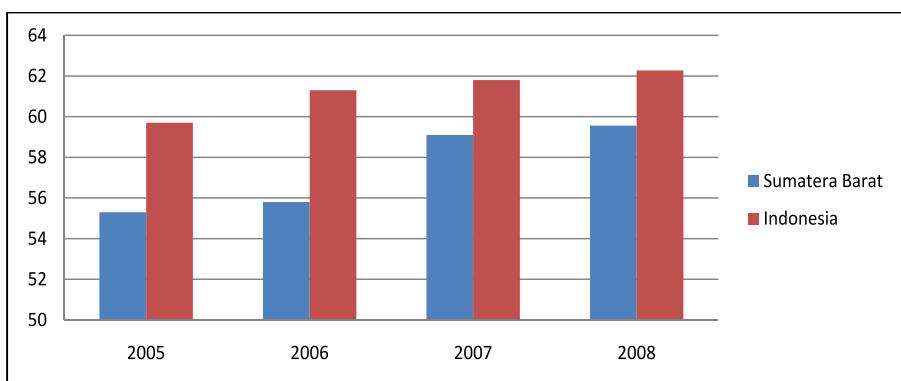
*Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS*

Jika dilihat trend Indeks Pembangunan Gender sejak tahun 2005 sampai 2008, yang diambil sumbernya dari Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak bekerjasama BPS terlihat capaian trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut pencapaian dari tahun 2005-2008:



**Gambar. 2.4**  
Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2005 – 2008

Akan tetapi pada trend Indeks Pemberdayaan Gender sejak tahun 2005 sampai 2008, yang diambil sumbernya dari Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak bekerjasama BPS terlihat capaian trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi pencapaian ini masih dibawah angka nasional. Berikut pencapaian dari tahun 2005-2008.



Sumber : Pembangunan Berbasis Gender 2006,2007 & 2008.  
Kementerian PP&PA bekerjasama BPS

**Gambar. 2.5**  
Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2005 – 2008

Berdasarkan kondisi ini tentunya upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pencapaian rendahnya angka indeks pemberdayaan wanita tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Sumatera Barat belum responsif. Persentase berdasarkan jumlah wanita di parlemen, perempuan yang menjadi pejabat tinggi, manajer, dan posisi staf teknis, serta angkatan kerja wanita masih kurang.

Permasalahan lainnya, di Sumatera Barat jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM jumlahnya mencapai kurang lebih 375 anak baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Sumatera Utara 6.061 kasus dan Jawa Tengah 2.280 kasus. Tapi angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara 30 kasus dan Papua Barat 42 kasus.

Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Data anak berhadapan dengan hukum menurut jenis kelamin Tahun 2008 yang didapat dari Dirjen pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM untuk Provinsi Sumatera Barat meliputi tahanan anak laki-laki 263 orang, perempuan 9 orang, untuk anak didik pemasyarakatan, terdiri dari anak sipil, anak negara dan anak pidana. Anak didik pemasyarakatan yang berstatus anak negara laki-laki 24 orang, berstatus anak pidana laki-laki 374 orang dan perempuan 1 orang.

#### **4. Pemuda dan Olah Raga**

Pembangunan bidang pemuda dan olah raga memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pemberdayaan dan prestasi olah raga. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga selama RPJMD ke 1, telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga pada RPJMD ke 2 Sumatera Barat.

Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda, antara lain;

- a. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 46,96 persen pada tahun 2005 menjadi 55,50 persen pada tahun 2008; APS penduduk usia 19-24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 14,35 pada 2008.

- b. Meningkatnya program peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan seperti; a). Paskibraka, b). Pramuka, c). Siswa/Osis.
- c. Percepatan/Akselerasi program sekolah sehat, pada TP UKS, UKS SD/MI, UKS SMP/MTs/UKS SMA/MA/K, UKS PONPES dan UKS PAUD.
- d. Meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Hal ini ditandai oleh banyaknya sarjana pelopor pembangunan yang turun ke nagari-nagari di Sumatera Barat.

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang olahraga, antara lain ditandai oleh;

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama di satuan pendidikan.
- b. Meningkatnya program pemasarkan olahraga seperti; a). pembinaan atlit dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 28,02 % tahun 2009. b). Penggalian Potensi Atlit pelajar dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 40,13 % pada tahun 2009. c). Penggalian Potensi Atlit Klub Olahraga dari 0% tahun 2005 menjadi 19,12 % tahun 2009. d). Penggalian Potensi Atlit Yunior dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 15,92 % tahun 2009. e). Pembudayaan Olahraga Massal dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 26,27 tahun 2009.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah penyelesaian susbtansi masalah kemiskinan dan kebodohan secara sistemik dengan menggerakkan segenap lingkungan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat bottom-up, partisipasi, akuntabel terpadu dan berkelanjutan.

Pemberdayaan memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor "yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya". Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga

masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Program pemberdayaan hendaknya menyentuh tiga level pemberdayaan, yakni: 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 2) pemberdayaan pada level kelompok / organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

Pemberdayaan masyarakat desa/nagari yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD pertama dalam agenda mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Melalui agenda mempercepat tingkat kemiskinan telah diperoleh penurunan jumlah penduduk miskin dari 550.250 jiwa pada tahun 2006 menjadi 429.250 jiwa pada tahun 2009. RTM penerima bantuan juga menurun dari 312.640 RTM tahun 2006 menjadi 257.412 RTM pada 2008. Namun pada agenda memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan terlihat bahwa kegiatan Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau Dalam Pembangunan Nagari, dan pengembangan Lembaga Keuangan Nagari (BPR dan LPN) belum terlaksana sepenuhnya sesuai harapan.

Disamping itu, bagi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, pemberdayaan usaha mikro juga menjadi fokus perhatian, terlihat dari komitmen pemerintah untuk meluncurkan kredit tanpa bunga kepada masyarakat yang merupakan spesifiknya Sumatera Barat yaitu Kredit Mikro Nagari (KMN) yang direalisasikan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota mulai tahun 2007.

Pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro tidaklah mudah mengingat jumlah usaha mikro di Sumatera Barat cukup besar dan sulit didata. Menurut Survey Ekonomi Tahun 2006 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha mikro kecil berjumlah lebih kurang 57.000 unit. Didalam pelaksanaannya program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro sebagian besar tergabung kedalam program/kegiatan urusan pertanian, kelautan perikanan, industri, perdagangan serta koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Capaian kinerja pembangunan pemberdayaan usaha mikro cukup sulit untuk diukur, karena ketersedian data usaha mikro sangat minim, namun dengan meningkatnya pelaku usaha mikro yang dilatih setiap tahunnya selama kurun waktu 2006 – 2008 serta meningkatnya jumlah bantuan sarana usaha dan modal yang disalurkan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah serta BUMN/BUMD dan swasta, maka tentunya terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas

usaha mikro, sehingga tidak lagi hanya untuk sekedar bertahan hidup bagi pelakunya.

## **6. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kealpaan dalam membangun dan meningkatkan perpustakaan, baik sarana maupun pelayanannya, berarti menutup sebagian sumber belajar warga masyarakat. Secara langsung dan tidak langsung mengganggu pembentukan dan pembinaan karakter individu yang matang dalam segala aspeknya serta mencederai pembangunan karakter bangsa. Penyediaan perpustakaan yang memadai dan dapat di akses oleh semua warga masyarakat sebenarnya telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Untuk itu tidak perlu diragukan lagi pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara demokratis menuju masyarakat madani, di samping sebagai pelestari nilai budaya dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 4,8 juta pada tahun 2010 sesungguhnya membutuhkan ketersediaan perpustakaan dalam jumlah yang relatif cukup banyak sebagai sumber dan media mentransformasikan ilmu pengetahuan, namun tidak dapat dipungkiri dewasa ini perpustakaan negara, perpustakaan nagari dan perpustakaan sekolah kurang memadai sesuai dengan tuntutan dan pengguna jasa baik dari kuantitas maupun kualitas. Demikain juga pelayanan yang di berikan. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan perpustakaan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan insan manusia dan membangun minat baca masyarakat. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sumatera Barat.

## **7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau lazim disebut sebagai UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi), menjadi isu sentral dalam program pemulihan ekonomi nasional dewasa ini. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistem perekonomian dimana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi juga berada dibawah pengendalian dan pengawasan anggota masyarakat.

Berlandaskan pengertian ekonomi kerakyatan tersebut diatas, maka diharapkan adanya peningkatan peran dari usaha kecil dan

menengah serta individu wirausaha dalam kegiatan ekonomi. Namun upaya peningkatan peran tersebut terkendala oleh banyaknya kelemahan yang melekat dalam usaha kecil baik industri maupun perdagangan dan jasa sehingga memerlukan bantuan perkuatan yang sekarang sering disebut sebagai upaya perberdayaan UMKMK.

Kontribusi UMKMK terhadap pembentukan PDB dan PDRB sudah cukup besar namun memperlihatkan pertumbuhan yang berfluktuasi selama periode 2004-2008. Di tingkat nasional kontribusi output UMKMK terhadap pembentukan PDB Indonesia secara rata-rata dalam periode tersebut mencapai 53,41 % sementara kontribusi UMKMK terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat secara rata-rata adalah sebesar 26,87 %. Perkembangan capaian nasional dan daerah Sumatera Barat di bidang kontribusi UMKMK terhadap PDRB dapat disimak di dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.17  
Perbandingan Output UMKMK Terhadap PDB/PDRB Indonesia  
dan Sumatera Barat Tahun 2004 – 2008 (dalam %)**

| % Output UMKMK Thdp PDRB | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | Rata2 Kontribusi | Rata2 Pert. |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|
| Capaian Nasional         | 55,40 | 53,90 | 53,49 | 53,60 | 52,70 | 53,41            | -1,23       |
| Capaian Sum. Barat       | 25,43 | 24,29 | 25,30 | 32,47 | -     | 26,87            | 9,34        |

Sumber : Bappenas RI, Laporan EKPD Sumatera Barat 2009

Kontribusi output UMKMK terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat dalam kurun waktu 2004 – 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 9,34 % yang mengindikasikan bahwa sektor UMKMK mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dan hal itu tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat di provinsi Sumatera Barat.

Gambaran mengenai perkembangan koperasi dan UKM di daerah Sumatera Barat selama periode 2006 – 2009 dapat dilihat pada tabel 2.18

**Tabel 2.18  
Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat Tahun 2006 -2009**

| Tahun | Jumlah Koperasi (unit) | Jumlah Anggota (orang) | Rata-rata (Jumlah anggota/Kop) | Waserda (unit) | Vol.Usaha Waserda (Rp jt) | Rata-rata modal (Rp jt/ kop) |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2006  | 3.254                  | 536.068                | 165                            | 286            | 56.998                    | 230,2                        |
| 2007  | 3.388                  | 560.845                | 166                            | 274            | 60.659                    | 156,5                        |
| 2008  | 3.424                  | 540.418                | 158                            | 265            | 57.762                    | 285,7                        |
| 2009  | 3.475                  | 560.521                | 162                            | 284            | 58.267                    | 336,8                        |

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Dari segi jumlah badan usaha dan jumlah anggota dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi cukup baik selama ini namun bila dilihat tingkat partisipasi anggota dan mutu pengelolaan koperasi, ternyata kondisinya tidak begitu baik. Sementara itu perkembangan UKM di daerah Sumatera Barat dapat disimak dari perkembangan industry kecil pangan, sandang, kimia & bangunan, logam & elektronik, kerajinan dan bengkel dan disajikan dalam tabel 2.19.

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan UKM di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009**

| Tahun | Unit Usaha | T.Kerja (orang) | Vol.Usaha (Rp jt) | Nilai Investasi (Rp jt) |
|-------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 2006  | 41.222     | 140.480         | 1.578,9           | 253,7                   |
| 2007  | 42.483     | 147.002         | 1.665,4           | 297,8                   |
| 2008  | 43.853     | 152.174         | 2.037,3           | 332,8                   |
| 2009  | 35.391     | 132.895         | 2.167,2           | 628,5                   |

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Jumlah UKM cukup signifikan dengan penyerapan tenaga kerja yang juga cukup besar dimana secara rata-rata setiap UKM dapat menyerap 4 orang pekerja yang juga berarti bagi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Namun demikian data diatas juga mengungkapkan rendahnya potensi perkembangan UKM mengingat rendahnya volume usaha dan investasi.

## 8. Perumahan dan Permukiman

Sejak tahun 2005 sampai saat ini, Sumatera Barat mengalami kejadian gempa bumi yang beruntun, baik dengan intensitas rendah dan tinggi. Kejadian tahun 2005, 2007, telah meninggalkan kerusakan sarana dan prasarana serta kerugian harta dan benda bagi masyarakat. Untuk kejadian terakhir yaitu gempa tahun 2009 saja, perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana terparah terjadi pada komponen perumahan dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp.15,41 triliun. Sektor infrastruktur lainnya mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.963 miliar, sektor social Rp.1,52 triliun, sektor ekonomi Rp.2,3 triliun, dan lintas sektor (sub-sektor pemerintahan dan lingkungan) menderita kerusakan dan kerugian sebesar Rp.674,6 miliar, sehingga total nilai kerusakan dan kerugian tercatat Rp.20,86 triliun.

Selain itu, sesuai hasil pemutakhiran data pada tanggal 28 Oktober 2009 oleh Pemerintah, total jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 249.833 unit dengan rincian: 114.797 unit rumah rusak berat, 67.198 unit rumah rusak sedang dan 67.838 unit rumah rusak ringan. Selain rumah juga telah merusak sarana dan prasarana publik lainnya, termasuk kerusakan sejumlah gedung pemerintahan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan,

fasilitas perdagangan, hotel dan gedung/perkantoran keuangan dan perbankan.

Hasil dari observasi dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kualitas rumah bahwa dari rumah-rumah yang hancur dan rusak berat setelah terjadinya gempa 30 September 2009 yang lalu, terjadi pada umumnya pada rumah yang secara struktural bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis. Artinya rumah-rumah tersebut dibangun dengan tidak memperhatikan persyaratan teknis bagi rumah yang aman terhadap bencana gempa.

Permasalahan lain dalam sektor perumahan adalah masih tingginya backlog perumahan yang harus dipenuhi. Dengan backlog atau perbedaan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan yang masih besar tahun 2010, di Sumatera Barat, menyebabkan beban pemerintah dan pengembang semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah di tahun berikutnya. Selain itu pada beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat, cenderung makin besarnya kawasan perumahan yang kumuh, yang memerlukan perhatian pihak yang terkait untuk melakukan peningkatan mutu perumahan tersebut. Kawasan tersebut ditandai dengan tidak lancarnya saluran drainase, sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, air bersih atau minum yang tidak secara kontinu tersedia serta tata kelola ruang yang tidak terencana dengan baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memasukkan faktor perumahan sebagai salah satu indikator, menempatkan Indonesia diurutan 107 dari 175 negara. Untuk Sumatera Barat, dibandingkan dengan Provinsi lainnya menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi di Indonesia. Dari sisi investasi, pembangunan perumahan di Indonesia masih ketinggalan (dimana masih dibawah 5 % dari PDB), sementara Malaysia dan Amerika pada tahun 2002 saja sudah mencapai mencapai 27,7 % dan 45,3 %.

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang juga sangat mendukung kelangsungan dan kenyamanan hunian adalah drainase dan persampahan. Kondisi drainase saat ini beragam antar kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan topografi setempat. Di daerah yang terletak pada dataran tinggi drainasenya lebih lancar dibandingkan dengan dataran rendah. Keadaan ini terjadi karena sistem drainase yang dibuat relatif sama, sehingga kelancarannya lebih tinggi di daerah yang topografinya tidak datar. Kemudian saluran drainase sering mampet karena budaya masyarakat yang masih membuang sampah ke dalam saluran drainase, disamping relatif rendahnya pemeliharaan saluran tersebut. Sistem pengelolaan limbah rumah tangga di Sumatera Barat masih sederhana dengan mengalirkan saluran air limbah rumah tangga ke saluran drainase. Sementara penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga. Jika sudah penuh, mobil penyedot yang dikelola pemda atau swasta

mendatangi tempat tersebut dan membuangnya pada tempat tertentu. Sebagian di antaranya telah mempunyai instalasi pengolahan limbah. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi dengan aktifitas yang meningkat, menyebabkan pengelolaannya perlu ditingkatkan dan direncanakan antisipasinya untuk masa datang.

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah rumah dalam kantong plastik atau karung dan ditempatkan di depan rumah. Kemudian petugas mengumpulkannya dalam *Tempat Penampungan Sementara* (TPS) yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke *Lokasi Pengolahan Akhir* (LPA). Penanganannya sederhana dengan membakar sebagian tumpukan sampah dan dijadikan kompos. Permasalahan umum dihadapi adalah bercampurnya sampah organik dan an-organik. Hal ini menyebabkan pengolahan lebih lanjut menjadi sulit. Pemisahan ini seyogyanya dilakukan mulai dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir. Dengan cara ini teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien dapat dilaksanakan.

Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan swasta, masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota. Bila melihat fenomena tersebut maka dapat diperkirakan bahwa masa mendatang, kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan teknologi. Persoalan lain adalah meningkatkan kebutuhan atas sarana dan prasarana bagi perumahan dan permukiman seperti: jaringan air, listrik, telekomunikasi, saluran limbah, persampahan, jalan dan transportasi, dan lainnya. Sehingga sangat perlu menetapkan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman.

## **9. Komunikasi dan Informasi**

Dari pengalaman selama ini di Indonesia, banyak pranata komunikasi dan informasi pada masa lalu dikontrol ketat oleh penguasa, sehingga mereka dapat dikendalikan. Keadaan itu terjadi karena penguasa mengembangkan sistem kekuasaan birokrasi otoriter (*authoritarian bureaucratic state*) yang memposisikan seluruh pranata komunikasi sebagai pendukung kekuasaan. Saluran-saluran komunikasi dan pusat-pusat penyebaran informasi berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah, sensor dilakukan dengan ketat, monopoli posisi untuk melakukan interpretasi disentralisir guna mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi. Oleh karena itu, pada saat ini perkembangan pembangunan sangat ditentukan juga oleh perkembangan bidang komunikasi dan informasi. Globalisasi informasi dan gerakan reformasi telah memaksa semua pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi

merumuskan kembali dan menata ulang posisi, peran, cara kerja dan bentuk-bentuk pelayanannya. Arus globalisasi dan gerakan reformasi secara paradigmatis telah mengubah konsep dan praktik di bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini secara mendasar telah membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam.

Untuk Sumatera Barat, bidang komunikasi dan informatika sedang berkembang, membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan komunikasi dan informatika sangat diperlukan, terutama karena Sumatera Barat, yang rawan terhadap bencana yang jika terjadi bencana bisa memutuskan hubungan transportasi, sehingga pilihan penggunaan media telekomunikasi dan informasi menjadi hal sangat diperlukan.

## **10. Hukum dan Hak Azasi Manusia**

Berangkat dari visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Barat dalam bidang Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, terutama untuk menciptakan jaminan perlindungan hukum dan HAM, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006- 2010, pengembangan produk hukum, serta penegakan hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat telah dicapai beberapa kemajuan.

Dalam periode jabatan Gubernur hasil Pilkada tahun 2005 (sampai bulan Juni 2010) telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 60 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 488 buah, dan Keputusan Gubernur sebanyak 2.321 buah serta Instruksi Gubernur sebanyak 18 buah, sebagai bagian untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan RPJMD dengan telah dihasilkan berbagai produk hukum dimaksud, juga merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan yang khusus/khas dimiliki oleh Sumatera Barat. Walaupun disadari di luar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, maka Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur merupakan instrumen hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembangunan bidang hukum.

Apabila dilihat dari sisi lain, keberhasilan dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*) pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005-2025. Apabila dianalisis dari berbagai produk hukum daerah dimaksud, khususnya Peraturan Daerah yang dihasilkan dalam periode jabatan Gubernur tersebut diatas (sampai bulan Juni

2010) sebanyak 60 buah, secara kuantitatif memang relatif sedikit, tetapi secara kualitatif telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat dalam aspek, ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan lainnya.

Sebagai bahan analisis lanjutan, maka beberapa materi Peraturan Daerah (Perda) akomodatif terhadap pengembangan nilai-nilai lokal sehingga cukup efektif, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Perda Nomor 3 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-quran, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Nomor 6 tahun 2008 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat, dan Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Pemberantasan Maksiat, Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009), serta Perda lainnya. Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan ekonomi seperti Perda Nomor 2 tahun 2006 Pembinaan dan Pengembangan perkoperasian, Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Investasi pemerintahan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD 2006-2010 telah dapat diwujudkan. Kemudian selama tahun 2010 (data sampai Juni 2010), telah dihasilkan sebanyak 7 buah peraturan daerah. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda Nomor 2 Tahun 2010).

Walaupun berbagai produk hukum daerah telah dapat dihasilkan, namun beberapa permasalahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan hukum terutama dalam pembentukan Perda, pada umumnya Perda tersebut dibuat tanpa melalui kajian akademis dan belum partisipatif. Dalam bidang kesadaran hukum, pengetahuan masyarakat akan hukum cukup meningkat baik, tetapi kesadaran masyarakat tetap masih rendah. Langkah harmonisasi hukum, singkronisasi hukum dalam menciptakan produk hukum daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal itu ditandai banyaknya produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Hal itu mempunyai korelasi langsung bahwa masih lemahnya profesionalisme dalam perancangan produk hukum di daerah.

Persoalan penegakan hukum masih dikeluhkan oleh banyak pihak, independensi peradilan masih dipertanyakan terutama oleh lembaga swadaya masyarakat yang kritis manakala terdakwanya menyangkut pejabat pemerintah dan anggota legislatif. Persoalan Hak Asasi Manusia masih merupakan persoalan yang harus diatasi dalam pembangunan masa datang, baik hak asasi berkaitan dengan hak milik, hak pendidikan dan pekerjaan dan lain-lain.

Walaupun pembangunan hukum terutama melalui pembentukan Peraturan Daerah, serta penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia telah dilakukan, termasuk pengawasan terhadap berbagai

produk hukum Kabupaten dan Kota, pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi hukum. Namun perlu upaya peningkatan dalam menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan berkualitas, melalui perlibatan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumberdaya aparatur perancang perundang-undangan, pengkajian produk hukum yang melanggar HAM, pengembangan jaringan informasi hukum. Untuk penegakan hukum yang optimal, perlu dilakukan koordinasi antar berbagai aparatur penegak hukum, termasuk penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang merupakan kewenangan dari daerah, terutama dalam penegakan peraturan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat, juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum yang dibentuk.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, bahwa sasaran pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum, struktur, dan kelembagaan serta budaya hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan pembaharuan produk-produk hukum daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini perlu pula dilakukan transformasi berbagai nilai-nilai kebijakan Minangkabau ke dalam produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan materi hukum. Disamping itu, perlu pula dilakukan pembangunan struktur atau kelembagaan hukum dalam upaya penegakan hukum, serta diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

## **11. Pemerintahan**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005- 2025, yang kemudian dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat agenda pembangunan bidang pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan "Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik" dengan berbagai prioritas program yang akan dicapai, terutama berkaitan dengan: Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara makro penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada provinsi merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh kabupaten dan kota yang merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal itu pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan di provinsi sangat ditentukan oleh keterpaduan kebijakan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan agenda sangat strategis karena merupakan lokomotif bagi pencapaian agenda RPJM lainnya. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang otonomi dan pemerintahan umum, dan administrasi keuangan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mantap dan sesuai dengan prinsip yang terkandung pada *good governance*. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah koordinasi penyelenggaraan, penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara umum dapat digambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan berbagai penataan kelembagaan melalui peraturan daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Dumatera Barat.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Dumatera Barat.
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Dumatera Barat.

Terwujudnya Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh indikator peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), capaian terhadap hal ini dimana telah dilakukan peningkatan strata pendidikan aparatur baik S-3, S-2, S-1 dan DIII sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk mewujudkan transparansi pemerintahan telah ditata Pola Rekrutmen pegawai dalam 3 tahun terakhir lebih objektif Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk tidak ada nepotisme dalam penerimaan pegawai dan selanjutnya pemeriksaan terhadap seleksi penerimaan pegawai melibatkan Perguruan Tinggi.

Langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan memberikan kemudahan dalam pelayanan untuk kepentingan publik juga telah dicapai privatisasi BUMD yakni dengan ditetapkannya berbagai peraturan daerah. Langkah itu adalah untuk mengurangi peran pemerintah dan menciptakan profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan daerah, peraturan daerah tersebut antara lain adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan PT ATS.
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Grafika.
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika.

Agenda penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada RPJMD 2006-2010 telah memperlihatkan peningkatan terhadap kemampuan pemerintah dan itu terlihat dari capaian kinerja, tetapi untuk promosi pegawai yang duduk pada jabatan, mutasi pegawai/aparatur yang akan menduduki jabatan, aspek transparansi dan profesionalisme pengisian jabatan masih banyak dipersoalkan dan dikritisi karena dirasakan masih belum dilakukan secara terbuka dan belum berbasis kompetensi.

Pembangunan prioritas peningkatan kemampuan pemerintahan telah dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan daerah dalam hal ini penetapan SOTK yang lebih efisien, kebijakan swastanisasi fungsi pemerintahan, transparansi pengisian jabatan publik dan rekrutmen pegawai dengan cara penyempurnaan manajemen pegawai, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Namun, pelaksanaan prioritas ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak hal yang perlu dicapai untuk mewujudkan *good governance*, seperti antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan;
- c. Masih belum optimalnya standarisasi baik untuk rekrutmen pegawai, dalam penentuan jabatan publik (promosi);
- d. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintahan dan antar instansi;
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan dan jenis, dan sifat pekerjaan;
- f. Terbatasnya kualitas SDM aparatur sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintahan;
- g. Sistem insentif/perbaikan penghasilan yang belum didasarkan atas beban kerja, tanggung jawab dan kompetensi/kecakapan, kerajinan aparatur;
- h. Terbatasnya SDM pengelola Diklat dan belum terpenuhi semua spesialisasi/mengajar terutama keuangan dan pembangunan.

Upaya pembangunan pada prioritas pelayanan publik pada beberapa jenis pelayanan publik telah dilakukan antara lain melalui penggunaan teknologi informasi/elektronik seperti layanan pengadaan barang dan jasa yang dikenal dengan *electronic procurement (e-procurement)*. Partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, telah dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mempertanyakan segala persoalan tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media masa.

Pembangunan dalam bidang pelayanan publik secara umum telah dilakukan perbaikan dengan penetapan standar pelayanan, penetapan

kebijakan pelayanan, penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan dan libatkan masyarakat dalam kontrol pelayanan publik, namun masih terdapatnya beberapa hal yang harus dibenahi. Namun, pengembangan manajemen pelayanan publik, peningkatan pengembangan partisipasi, pengembangan sistem informasi penduduk sesuai dengan amanat RPJM perlu dicapai sesuai agenda yang ditetapkan.

## **12. Perencanaan Pembangunan**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan, yaitu: Politik; Teknokratik; Partisipatif; Atas-bawah (*top-down*); dan Bawah atas (*bottom-up*).

Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat cukup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, SKPD Lembaga masyarakat lainnya, organisasi profesi, dan sektor swasta;

- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum SKPD, dan Forum Musrenbang;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b. Tersedianya hasil-hasil kajian dan dokumen perencanaan, meliputi: RPJPD, RPJMD RTRW, RKPD, KUA-PPAS, *data base* pembangunan, *data base* kemiskinan, dan data-data pembangunan serta kajian-kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan *focused group discussion (FGD)*;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Selama lima tahun terakhir perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut adalah disamping membuat perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS), juga telah membuat perencanaan yang bersifat khusus, misalnya perencanaan pembangunan bidang Ekonomi antara lain Penyusunan *Grand Design* Industri Unggulan Sumatera Barat, Kajian Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD), Bidang Sosial Budaya antara lain Penyusunan Database Perencanaan Pendidikan berbasis spasial, Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup antara lain Perencanaan pengembangan kawasan konservasi lingkungan hijau asri dan lestari.

**Tabel 2.20**  
**Data Perencanaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah**

| No. | Jenis  | Jumlah dokumen |      |      |      |      |
|-----|--|----------------|------|------|------|------|
|     |  | 2006           | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1   | Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2006-2010   | 1              | .    | .    | .    | .    |
| 2   | Penyusunan Ranperda RPJMD Tahun 2006-2010  | .              | 1    | .    | .    | .    |
| 3   | Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025   | .              | 1    | .    | .    | .    |
| 4   | Penyusunan Ranperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025  | .              | .    | 1    | .    | .    |
| 5   | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  | 1              | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 6   | Penyusunan KUA-PPAS APBD   | 1              | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 7   | Penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD   | .              | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 8   | Penyusunan Buku Tujuh Agenda Pembangunan Sumatera Barat  | 1              | .    | .    | .    | .    |
| 9   | Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Aksi Daerah | .              | 1    | .    | .    | .    |

*Sumber Data : Bappeda Propinsi Sumatera Barat tahun 2010*

### **13. Pengembangan IPTEK**

Perkembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di Sumatera Barat yang dikelola oleh sebuah Badan Litbang baik perguruan tinggi maupun oleh lembaga litbang lainnya yang telah menghasilkan temuan dan berbagai rekomendasi untuk dimanfaatkan oleh lembaga dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan. Pada Tabel dibawah dapat dilihat perkembangan hasil penelitian dari tahun 2006 – 2010.

**Tabel 2.21  
Perkembangan Jumlah Judul Penelitian di Sumatera Barat  
Tahun 2006-2009.**

| No | Bidang/Jenis    | Jumlah Judul Penelitian |      |      |      |
|----|-----------------|-------------------------|------|------|------|
|    |                 | Tahun                   |      |      |      |
|    |                 | 2006                    | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Riset Murni     | 195                     | 243  | 221  | 123  |
| 2. | Riset Aplikatif | 109                     | 154  | 104  | 142  |
|    | Jumlah          | 304                     | 397  | 325  | 265  |

*Sumber Data : Data sementara Stakeholder terkait bidang Litbang Sumatera Barat  
Tahun 2009*

Secara umum hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga Litbang dan perguruan tinggi belum dimanfaatkan oleh dinas dan instansi terkait. Lembaga-lembaga pemerintah belum merasakan adanya kebutuhan terhadap hasil penelitian dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam bidang masing-masing.

Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan nilai tambah proses produksi usaha kecil menengah masih rendah. Usaha kecil dan menengah, yang merupakan usaha dominasi di Sumatera Barat, masih mengandalkan proses produksi dengan teknologi yang konvensional, sehingga nilai tambah proses produksi masih sangat rendah malahan sebagian besar produk usaha masyarakat dijual dalam bentuk produk primer tanpa melalui pengolahan dengan teknologi yang berbasiskan IPTEK.

Publikasi dan sosialisasi hasil litbang masih terbatas yang disebabkan oleh relatif kecilnya jurnal ilmiah yang terakreditasi di Sumatera Barat. Demikian pula teknologi yang telah dihasilkan dari kegiatan litbang tidak banyak masyarakat dan kalangan dunia usaha yang memanfaatkannya untuk kepentingan peningkatan hasil usahanya. Disamping itu hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga-lembaga litbang pada taraf keilmuan telah cukup banyak malah sudah ada yang mengajukan paten namun tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga hasil penelitian tersebut baru digunakan

penemuan sebagai sekedar tambahan kredit untuk naik pangkat. Manfaat bagi masyarakat belum banyak dirasakan.

Budaya ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif, lebih suka membeli dan memakai produk yang dihasilkan pihak lain ketimbang menghasilkan karya inovasi yang dihasilkan sendiri. Demikian juga dari lembaga-lembaga birokrasi masih banyak kebijakan dan program yang dicanangkan tidak didasarkan pada hasil litbang yang umumnya membutuhkan waktu, serta belum dialokasikannya dana penelitian yang memadai.

Koordinasi dan sinergi lembaga penelitian dalam menghadirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah masih lemah. Perguruan tinggi melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan arahan para penyandang dana. Demikian juga balai penelitian sebagai perpanjangan tangan litbang departemen pusat melaksanakan penelitian sesuai arahan pusat. Sebagian dari dinas provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota juga melaksanakan penelitian, tetapi sampai saat ini belum ada koordinasi antara lembaga tersebut untuk mengarahkan kegiatan penelitian bagi kepentingan agar produk yang dihasilkan lebih bermanfaat.

#### **14. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, baik secara nasional maupun Daerah. Penyebab terjadinya kemiskinan antara lain karena penduduk mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi; keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk; pengaruh eksternal seperti lonjakan kenaikan harga bbm, tarif, dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada RPJMD Tahun 2006-2010, telah ditetapkan indikator kemiskinan yaitu penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan (berdasarkan 14 indikator, menurut data PPLS 06). Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 12,51 % dan RTM sebanyak 312.640 KK atau sebesar 29,28 %, yang dijadikan sebagai sasaran dalam pelaksanannya program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan melalui penguatan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik Provinsi maupun daerah kabupaten/kota, peningkatan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, berdasarkan data BPS, mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 % tahun 2006 menjadi 6,37 % pada tahun 2008. Hal ini berdampak kepada capaian penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 12,52 % dengan jumlah penduduk miskin 550.251 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 146.781 perkapita / bulan. Pada tahun 2007, tingkat kemiskinan mencapai 11,90 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 529.200 jiwa dengan garis kemiskinan Rp.180.669 perkapita/bulan dan pada tahun 2009, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 9,54 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 429.250 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 217.649 perkapita/bulan. Tren penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat 2006-2009 mencapai 0,6 % pertahunnya. Namun pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami penurunan secara signifikan, hal ini dikarenakan pada tanggal 30 September 2009, Sumatera Barat dan sebagian besar Kabupaten/Kota yang berada dipesisir pantai barat Sumatera mengalami bencana Gempa Bumi sehingga sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dan pada tahun 2010 (kondisi Maret), dapat diturunkan sedikit menjadi 9,5% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 430.024 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 230.823 perkapita / bulan.

Capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersebut dari tahun 2006-2010 selalu berada dibawah rata-rata Nasional dimana pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Nasional mencapai sebesar 13,3 %. (pada gambar 7.6.1). Selain itu, tingkat pengangguran di Sumatera Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2006 yang mencapai 11,87 % menjadi 7,9 % pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menjadi 6,95 %.

**Tabel 2.22**  
**Persandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran & Kemiskinan Antara Nasional dengan Sumatera Barat**

|                         | 2005  |         | 2006  |         | 2007  |         | 2008  |         | 2009  |         |
|-------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|                         | Nas   | Sum-bar |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,7   | 5,73    | 5,5   | 6,14    | 6,3   | 6,34    | 6,1   | 6,37    | 4,5   | 4,16    |
| Pengangguran (%)        | 11,24 | 13,34   | 10,28 | 11,87   | 9,11  | 10,31   | 8,39  | 8,04    | 7,87  | 7,90    |
| Kemiskinan (%)          | 15,97 | 10,89   | 17,75 | 12,51   | 15,42 | 11,90   | 15,42 | 9,80    | 14,15 | 9,54    |

Sumber : RPJMN 2010-2014

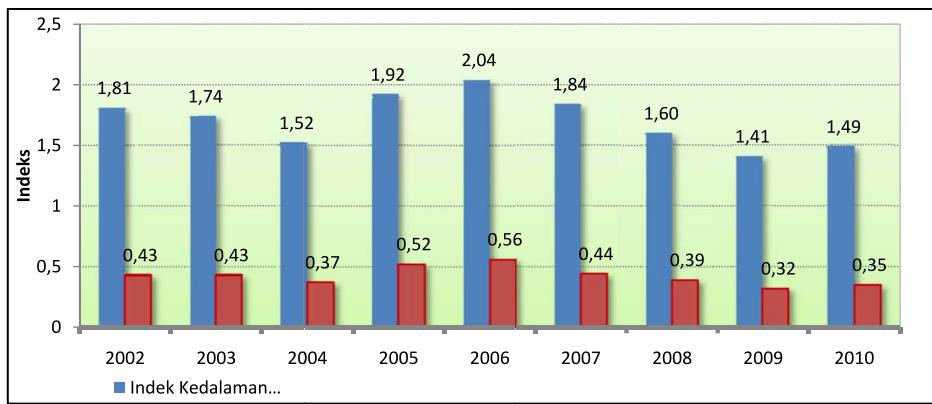


Sumber: Susenas Panel BPS, berbagai edisi penerbitan.

**Gambar 2.6**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Tahun 2002 - 2010**

Berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2006 sebesar 12,51 % dan menjadi 9,50 % pada tahun 2010 (maret) atau penduduk miskin sebesar 430.024 jiwa (trend 0,6 % per tahun).

Pada perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Sumatera Barat (Gambar 7.6.3) menunjukkan kecenderungan penurunan dari 2006 s.d 2009 dan sedikit meningkat di tahun 2010. Secara umum indek ini dipengaruhi oleh penurunan di perkotaan yang menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk miskin di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan.



Sumber Data : Sesenas

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2)**  
**Kemiskinan Tahun 2002 - 2010**

Kondisi Indeks keparahan kemiskinan tidak jauh berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini sedikit meningkat di tahun 2009-2010. Indeks keparahan kemiskinan untuk daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki disparitas yang lebih rendah

**Tabel 2.23**  
**Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Nasional dan Sumbar Tahun 2010-2015**

|                         | 2010      |        | 2011      |        | 2012      |        | 2013     |        | 2014     |        | 2015   |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
|                         | Nas       | Sumbar | Nas       | Sumbar | Nas       | Sumbar | Nas      | Sumbar | Nas      | Sumbar | Sumbar |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,5-5,6   | 5,93   | 6,0-6,3   | 6,37   | 6,4-6,9   | 6,56   | 6,7-7,4  | 6,78   | 7,0-7,7  | 6,99   | 7,21   |
| Pengangguran (%)        | 7,6-7,6   | 6,95   | 7,3-7,4   | 6,59   | 6,7-7,0   | 6,22   | 6,0-6,6  | 5,86   | 5,0-6,0  | 5,50   | 5,13   |
| Kemiskinan (%)          | 12,0-13,5 | 9,5    | 11,5-12,5 | 8,55   | 10,5-11,5 | 8,15   | 9,5-10,5 | 7,75   | 8,0-10,0 | 7,35   | 6,95   |

### 2.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan

#### 1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum peran sektor pertanian dalam pembangunan di Sumatera Barat tahun 2006- 2009 terlihat pada Tabel 2.24

**Tabel 2.24**  
**Peranan Pertanian dalam Pembangunan di Sumatera Barat 2006-2010**

| No | Aspek   | 2006  | 2007  | 2008   | 2009   | 2010   |
|----|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1  | Angkatan Kerja Yang Bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian (%) | 45,46 | 47,93 | 47,25  | 46,50  | 44,10  |
| 2  | Kontribusi Pertanian dalam PDRB (%)                               | 25,26 | 24,67 | 24,46  | 23,92  | 23,40  |
|    | - Tanaman Pangan dan Hortikultura                                 | 13,11 | 12,52 | 12,56  | 12,36  | 12,42  |
|    | - Perkebunan  | 5,61  | 5,61  | 5,45   | 5,03   | 5,18   |
|    | - Peternakan  | 2,04  | 2,02  | 1,97   | 1,97   | 1,97   |
|    | - Kehutanan   | 1,50  | 1,56  | 1,56   | 1,50   | 1,43   |
|    | - Perikanan   | 3,01  | 2,96  | 2,94   | 2,98   | 2,81   |
| 3  | Nilai Tukar Petani  | 74,21 | 75,19 | 105,09 | 103,73 | 105,60 |
| 4  | Produktivitas Tenaga kerja Pertanian (Juta Rp)                    | 9,32  | 8,88  | 9,13   | 9,66   | -      |

*Sumber Data : SKPD Terkait*

Dalam sektor pertanian, yang memberikan sumbangans besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ke empat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dan agroindustri. Pengembangan industri unggulan berbasis produk pertanian rakyat untuk peningkatan kualitas perekonomian Sumatera Barat, juga merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. Gambaran umum produksi komoditi utama pertanian di Sumatera Barat tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.25

**Tabel 2.25**  
**Produksi Beberapa Komoditi Utama Pertanian di Sumatera Barat**  
**Tahun 2006 – 2010 (Ton)**

| NO | KOMODITI     | 2006      | 2007      | 2008      | 2009       | 2010       |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1  | PADI         | 1.889.489 | 1.938.120 | 1.965.634 | 2.105.790  | 2.211.248  |
| 2  | JAGUNG       | 202.298   | 223.233   | 351.843   | 404.799    | 354.262    |
| 3  | DAGING SAPI  | 15.561,7  | 16.367,9  | 17.609,4  | 18.322.349 | 19.426.163 |
| 4  | TELUR        | 58.346,5  | 57.339,8  | 60.288,5  | 65.361.496 | 76.464.967 |
| 5  | SUSU         | 2.502,6   | 1.092,4   | 3.209,0   | 3.293.752  | 4.073.406  |
| 6  | KARET        | 89.631    | 89.714    | 103.880   | 10.993     | 10.993     |
| 7  | KELAPA SAWIT | 694.234   | 771.406   | 794.167   | 833.483    | 850.237    |
| 8  | KAKAO        | 18.721    | 20.917    | 32.359    | 40.250     | 49.769     |

*Sumber Data : SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar ekspor yang terus meningkat.

Produk hortikultura Sumatera Barat juga merupakan komoditi andalan karena disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal, Komoditi hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan telah di pasarkan keluar Sumatera Barat. Sebagian besar sayuran Sumatera Barat juga untuk memenuhi kebutuhan propinsi tetangga.

Secara umum produktifitas komoditi utama pangan mengalami kenaikan, kecuali Kacang tanah dan kacang hijau yang menurun dari tahun 2008 dan 2009 (Tabel 2.26).

**Tabel 2.26**  
**Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan**  
**Tahun 2006-2010 (kwintal/ha)**

| No | Komoditi     | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
|----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Padi         | 45,22  | 45,75  | 46,59  | 47,91  | 48,02  |
| 2  | Jagung       | 47,04  | 51,7   | 55,65  | 57,11  | 59,00  |
| 3  | Kedele       | 12,23  | 12,81  | 12,97  | 16,87  | 16,00  |
| 4  | kacang tanah | 12,62  | 13,46  | 13,16  | 11,92  | 12,59  |
| 5  | kacang hijau | 11,52  | 11,78  | 11,69  | 11,67  | 11,75  |
| 6  | Ubikayu      | 170,63 | 185,78 | 194,27 | 230,06 | 349,85 |
| 7  | Ubijalar     | 129,66 | 136,98 | 151,44 | 186,55 | 238    |

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pada tahun 2009 juga telah dilakukan pembinaan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian organik melalui DPA-SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat dan Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dalam bentuk demplot-demplot, peningkatan penggunaan kompos jerami, pengembangan Kawasan Pertanian Organik di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Tanah Datar, Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, dan Padang Panjang, serta pelaksanaan magang ke Institut Pertanian Organik Aie Angek. Aktivitas dan operasional yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan / sentra produksi pertanian organik selama tahun anggaran. Pengembangan pertanian organik tidak hanya terfokus pada komoditi hortikultura, melainkan juga diterapkan pada komoditi tanaman pangan terutama padi.

## 2. Perkebunan

Sumatera Barat memiliki potensi cukup besar di bidang perkebunan, karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi unggulan perkebunan Sumatera Barat adalah karet, pala, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Sedangkan yang ditetapkan sebagai komoditi spesifik daerah Sumatera Barat adalah casiavera, gambir, kelapa dan nilam. Usaha perkebunan mempunyai peran cukup besar dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan serta devisa untuk negara, juga berpeluang besar menggerakkan kegiatan ekonomi di Sumatera Barat karena hasilnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Pemasaran hasil perkebunan Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir ini juga meningkat cukup signifikan, terlihat dari ekspor mencapai nilai (90,77 % dari nilai ekspor pertanian pada tahun 2008).

Usaha dibidang perkebunan cukup kompleks, diusahakan oleh petani kecil (perkebunan rakyat), pengusaha besar swasta dan perkebunan Negara (perkebunan Besar). Perkebunan Rakyat diusahakan di lahan usaha dengan status hak milik petani atau tanah kaum/ulayat, dan umumnya diusahakan oleh pemilik beserta keluarganya. Rata-rata luas kepemilikan kecil dan tersebar tidak merata, sehingga tidak memenuhi skala ekonomi (*economic of scale*). Luas tanaman perkebunan di Sumatera Barat tahun 2008 adalah 728.535 Ha, tahun 2009 menjadi 782.815 Ha dengan kenaikan seluas 54.280 Ha (7,45 %). Perkembangan luas dan produksi komoditi utama perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.27

**Tabel 2.27  
Perkembangan Luas Dan Produksi Komoditi Utama Perkebunan  
Tahun 2008-2010**

| NO | KOMODITI     | LUAS (Ha) |         |         | PRODUKSI (Ton) |         |         |
|----|--------------|-----------|---------|---------|----------------|---------|---------|
|    |              | 2008      | 2009    | 2010    | 2008           | 2009    | 2010    |
| 1  | Kelapa sawit | 327.653   | 344.351 | 353.300 | 794.167        | 833.485 | 850.237 |
| 2  | Kelapa Dalam | 91.272    | 91.767  | 91.672  | 82.595         | 85.715  | 86.459  |
| 3  | Kopi         | 22.883    | 22.986  | 47.764  | 33.339         | 37.991  | 37.621  |
| 4  | Casia vera   | 38.566    | 38.741  | 38.701  | 36.648         | 19.827  | 19.782  |
| 5  | Cengkeh      | 6.954     | 6.987   | 6.997   | 1.741          | 1.749   | 1.717   |
| 6  | Gambir       | 19.663    | 18.335  | 18.910  | 13.930         | 13.932  | 13.919  |
| 7  | Kakao        | 61.464    | 84.254  | 101.014 | 32.359         | 40.250  | 49.769  |
| 8  | Karet        | 151.032   | 166.719 | 175.985 | 103.880        | 133.816 | 134.401 |
| 9  | Pinang       | 9.035     | 9.007   | 9.077   | 4.655          | 4.834   | 4.845   |
| 10 | Nilam        | 2.976     | 2.997   | 3.880   | 396            | 397     | 416     |

Sumber Data : Dinas Perkebunan Prov. Sumbar Tahun 2009

Penambahan produksi tahun 2009 sebesar 819 ton (+0,07 %), terjadi pada Perkebunan Rakyat (PR), sedangkan pada Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) naik 21 ton dan PT. Perkebunan Negara (PT.PN) produksinya naik 1 ton. Namun demikian, Produktivitas komoditi perkebunan masih jauh dari potensi produksi dari masing-masing komoditi, untuk itu perlu inovasi baru untuk meningkatkan produksi terutama pada aspek budi daya serta peran aktif penyuluhan dalam penerapan teknologi budi daya.

Produktifitas yang rendah menyebabkan pendapatan petani komoditi perkebunan juga relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena: pemakaian benih unggul masih rendah, pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) belum maksimal, pemanfaatan kemampuan lahan masih belum optimal, penggunaan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, jaringan pemasaran belum luas, kualitas mutu produk belum

mampu bersaing di pasar internasional karena belum sesuai dengan permintaan pasar.

Disamping masalah produktifitas, Komoditi perkebunan sebagai komoditi ekspor juga menghadapi persaingan yang cukup besar di pasaran, yaitu dari negara-negara penghasil komoditi yang serupa dan dipasarkan di pasar yang sama. Persaingan semakin ketat karena jumlah negara-negara penghasil komoditi yang sama bertambah, juga dengan adanya produk-produk sintetis yang bersifat substitusi dengan proses produksi yang sangat efisien.

Dalam bidang pengolahan hasil tanaman perkebunan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengadaan bantuan alat pengolahan beberapa komoditi perkebunan seperti alat pengolahan kakao terpadu, alat penyulingan nilam, alat pengolahan gambir dan alat pengolahan kelapa terpadu.

Disamping itu, Sumatera Barat akan dijadikan sebagai salah satu sentra pengembangan tanaman kakao di wilayah barat Indonesia yang dicanangkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 3 Agustus 2006.

### **3. Peternakan**

Secara umum program pengembangan usaha peternakan di Sumatera Barat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewani, meningkatkan mutu generik, populasi dan produksi daging ternak sehingga mampu menyediakan protein hewani asal ternak seperti daging, telur dan susu untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun provinsi tetangga. Khusus untuk usaha peternakan sapi, dalam peningkatan populasi secara umum dapat dilakukan melalui bioteknologi reproduksi kawin suntik/inseminasi buatan (IB), merupakan upaya penerapan teknologi tepat guna yang dalam peningkatan mutu genetik dan jumlah ternak serta pembentukan bibit ternak yang berkualitas.

Populasi dan produksi daging ternak di Sumatera Barat tahun 2008 memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Populasi ternak besar sebanyak 671.207 ekor, ternak kecil sebanyak 245.766 ekor, dan unggas sebanyak 26.580.470 ekor. Produksi daging Sumatera Barat tahun 2008 paling banyak berasal dari ternak unggas sebesar 25.161.890 kg, ternak besar yaitu 20.266.119 kg, ternak kecil sebesar 3.580.084 kg.

Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak adalah terlaksananya pemberantasan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk wabah Penyakit Hewan Menular (PHM) pada wilayah 5 Kab/Kota, Pemberantasan Penyakit Septicemia Epizootica (SE) di Kab. Mentawai serta Terkoordinasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit Flu Burung (AI) pada 8

Kabupaten/Kota. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah dalam rangka melindungi wilayah Sumatera Barat terhadap penyakit hewan eksotik dan melindungi konsumen serta memberikan keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan; mengetahui ada tidaknya pencemaran lingkungan peternakan sehingga berkurangnya kasus penyakit hewan ternak.

Capaian selanjutnya adalah terlaksananya pengambilan spesimen darah dan faeces sapi; Tersedianya obat-obatan pada Klinik dan Labor Keswan, terlaksananya pembinaan ke kawasan agropolitan dalam rangka persiapan kelompok tani dalam kegiatan agropolitan di Kab. Agam, Tanah Datar, Solok, Pessel, Padang Pariaman dan 50 Kota terlaksananya pertemuan deklarasi Brucellosis.

#### **4. Kelautan dan Perikanan**

Sub sektor Kelautan dan Perikanan merupakan sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai andalan masa depan Provinsi Sumatera Barat, karena sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sebagai pemasok kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, serta sebagai tulang punggung ekspor komoditi non migas daerah ini. Pertimbangan ini didasarkan, karena Sumatera Barat memiliki kawasan laut yang sangat luas yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki 185 pulau-pulau kecil, serta kawasan budidaya (baik budidaya air tawar maupun budidaya laut) yang juga cukup luas. Disamping potensi lautan, Sumatera Barat juga mempunyai potensi perikanan budidaya (baik laut maupun daratan) yang juga cukup luas. Potensi ini akan dapat mendongkrak produksi perikanan daerah ini guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, sekaligus meningkatkan pendapatan / kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah / devisa Negara.

Provinsi Sumatera Barat terletak pada kawasan yang sangat strategis dari segi kawasan laut sebagai daerah penangkapan ikan yaitu pada perairan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) di Samudera Hindia seluas 186.580 Km<sup>2</sup>, ditunjang dengan panjang garis pantai 375 Km, dimulai dari Kabupaten Pasaman Barat hingga ke Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dimasukkan garis pantai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka panjang keseluruhan pantai di Propinsi Sumatera Barat mencapai 2.420 Km.

Potensi ikan diperairan laut Sumatera Barat tercatat sebesar 248.708,40 ton (289.936 ton) dengan produksi ikan tahun 2008 sebesar 187.043,0 ton menjadi sebesar 191.343,9 ton pada tahun 2009 atau sejak 5 tahun terakhir produksi meningkat rata-rata sebesar 16,97 % pertahun, dengan perkataan lain pada tahun 2009 produksi perikanan laut sudah mencapai 75,22 % dari potensi perikanan.

Komoditi yang menjadi unggulan dari perikanan laut, yaitu; ikan tuna, dengan potensi lestari sebesar 43.343 ton dan ikan cakalang yang terdapat di perairan barat Sumatera Barat adalah sebesar 64.965 ton, pada tahun 2008 tingkat pemanfaatannya baru sekitar 14,6 % dari potensi lestarinya. Dengan demikian potensi perikanan tuna masih mempunyai peluang besar untuk dikembangkan, dan dapat dijadikan sebagai program prioritas pengembangan perikanan didaerah ini. Disamping ikan tuna masih terdapat jenis-jenis ikan ekonomis penting lainnya, seperti kakap, kerapu, udang, dll.

Disamping potensi sumberdaya perikanan laut, masih terdapat potensi kelautan lainnya, diantaranya:

- a. *Hutan mangrove* (Hutan bakau), merupakan ekosistem utama kehidupan yang penting diwilayah pesisir dan laut. Potensi hutan bakau (*mangrove*) adalah sebesar 3.700 Ha, yang terdapat sepanjang pesisir Kabupaten Pasaman sampai Kabupaten Pesisir Selatan), dan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 15.000 Ha);
- b. *Terumbu Karang*, ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis, dimana terdapatnya berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis penting. Di perairan Sumatera Barat terdapat seluas 40.804 Ha Terumbu Karang, dengan tingkat kerusakan sudah mencapai 80 %,
- c. *Padang lamun dan rumput laut*, ekosistem ini juga mempunyai prospek untuk dikembangkan dan dibudidayakan secara berkelompok oleh masyarakat pesisir.
- d. *Pulau-pulau kecil*, jumlahnya mencapai 185 pulau besar dan kecil yang sudah diberi nama dan diusulkan kepada PBB, juga mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan. Beberapa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, jasa-jasa kelautan lainnya.

Potensi perikanan darat di Sumatera Barat cukup besar, antara lain terdiri dari potensi perairan danau, perairan sungai, telaga maupun perairan umum lainnya. Aktivitas budidaya dilakukan melalui; budidaya kolam air deras, air tenang serta budidaya di keramba / jaring apung dan disawah. Luas areal dan produksi perikanan darat; dimana perikanan perairan umum seluas 51.645,6 Ha, sedangkan luas areal budidaya adalah 8.449,7 Ha.

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2006-2010**

| No | Jenis Kegiatan               | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010       | Pertumb (%) |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| A  | Perikanan Tangkap            | 130.100,5 | 196.448,8 | 195.585,0 | 199.895,4 | 202.599,5  | 16,01       |
| 1. | Penangkapan di Laut          | 123.527,4 | 187.088,8 | 187.043,0 | 191.344,9 | 192.658,4  | 16,79       |
| 2. | Penangkapan di Perairan Umum | 6.373,1   | 9.360,0   | 8.542,0   | 8.550,5   | 9.941,1    | 3,98        |
| B  | Perikanan Budidaya           | 41.870    | 54.787,2  | 65.653    | 84.864,7  | 115.602,15 | 21,64       |
| 1. | Budidaya Air Tawar           | 41.824,9  | 54.750,2  | 58.614,3  | 84.794,6  | 115.577,37 | 22,4        |
| 2. | Budidaya Air Payau           | 5,1       | 3,5       | 4,8       | 10,0      | 12,11      | 31,8        |
| 3. | Budidaya Laut                | 40        | 33,5      | 33,9      | 60,1      | 12,67      | 4386,3      |

Sumber Data : *Laporan tahunan dan Perikanan dalam Angka, Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam beberapa tahun terbitan*

Perikanan air tawar dilakukan pada daerah yang mempunyai sumber air yang banyak seperti di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 adalah sebesar 58.614 ton dan sebesar 84.794 pada tahun 2009, atau mengalami loncatan kenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar 45 %. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir adalah 21,64 %.

Untuk menunjang perikanan budidaya telah tersedia sumber-sumber benih ikan yang dilaksanakan oleh berbagai BBI.

Berdasarkan produksi diatas, maka tingkat konsumsi ikan masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2008 sudah mencapai 26,20 kg / capita / tahun, lebih rendah dari konsumsi rata-rata nasional. Angka ini baru mencapai sekitar 75 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004 menetapkan sebesar 35 kg / capita / tahun.

Dilihat dari armada penangkapan ikan di laut, secara kuantitatif terjadi penurunan rata-rata sebesar 12 %/tahun dalam masa 4 tahun terakhir, dimana pada tahun 2006 tercatat sebesar 9.950 unit, dan pada tahun 2009 menjadi 9.913 unit. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya program pengadaan motor long tail di berbagai kabupaten / kota, sehingga terjadi pengalihan dari perahu tanpa motor menjadi perahu motor tempel. Hal yang sama juga terjadi armada penangkapan di perairan umum, Lihat Tabel 2.29.

**Tabel 2.29**  
**Perkembangan Armada Perikanan di Sumatera Barat**  
**tahun 2006-2010**

| Jenis Armada                      | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | Pertumbuhan (%) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>A. Perikanan Laut</b>          | <b>9.950</b> | <b>9.130</b> | <b>9.095</b> | <b>8.819</b> | <b>8.725</b> | <b>10,28</b>    |
| 1.Perahu Tanpa Motor              | 5.623        | 4.023        | 3.793        | 3.215        | 3.093        | -2,92           |
| 2.Motor Tempel                    | 2.235        | 3.070        | 3.286        | 3.563        | 3.583        | 36,16           |
| 3.Kapal Motor                     | 2.092        | 2.037        | 2.016        | 2.041        | 2.049        | 4,54            |
| <b>B. Perikanan Perairan Umum</b> | <b>5.803</b> | <b>2.557</b> | <b>2.340</b> | <b>2.365</b> | <b>3.470</b> | <b>-19,63</b>   |
| 1.Jukung                          | 208          | 216          | 114          | 1.183        | 625          | 223,58          |
| 2.Perahu Tanpa Motor              | 5.770        | 2.520        | 2.043        | 851          | 2.764        | -37,15          |
| 3.Motor Tempel                    | 33           | 37           | 25           | 25           | 81           | -14,21          |
| 4.Kapal Motor                     | -            | -            | 3            | 3            | -            | 0               |

*Sumber Data : Laporan Tahunan dan Perikanan Dalam Angka, Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar. Dalam beberapa tahun terbitan*

Seiring dengan pertumbuhan produksi perikanan, maka dari segi nilai produksi perikanan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dalam 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 639 % per tahunnya. Peningkatan tersebut didominasi oleh produk perikanan laut, yaitu pada tahun 2009 sekitar 67 % dari total nilai produksi perikanan Sumatera Barat, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.55. Dari produksi perikanan tersebut pada tahun 2009 telah berhasil dieksport sebesar 723 ton ikan, dengan nilai Rp. 10,3 juta US \$. Ekspor komoditi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 887 % / tahun. Kenaikan ini terutama karena hadirnya perusahaan industry perikanan PT. DEMPO dan berbagai perusahaan penangkapan ikan tuna.

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Nilai Produksi (Rp. Miliar)**  
**dan Ekspor Hasil Perikanan (Rp. Miliar) Tahun 2006-2010**

| No        | Jenis Kegiatan               | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010             | Pertumb (%)  |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Perikanan Tangkap</b>     | <b>3.194,4</b> | <b>3.403,0</b> | <b>3.061,4</b> | <b>3.089,9</b> | <b>202.599,5</b> | <b>1,52</b>  |
| a         | Penangkapan di Laut          | 3.121,6        | 3.297,8        | 2.904,4        | 2.968,9        | 192.658,4        | 1,37         |
| b         | Penangkapan di Perairan Umum | 72,8           | 105,2          | 157,0          | 121,0          | 9.941,1          | 12,75        |
| <b>2.</b> | <b>Perikanan Budidaya</b>    | <b>607,8</b>   | <b>646,1</b>   | <b>766,8</b>   | <b>1.599,5</b> | <b>2.058,7</b>   | <b>43,33</b> |
| a         | Air Tawar                    | 606,8          | 644,3          | 765,3          | 1.596,7        | 2.056,8          | 43,42        |
| b         | Tambak                       | 0,204          | 0,087          | 0,266          | 0,179          | 0,388            | 22,81        |
| c         | Laut                         | 0,677          | 1,702          | 1,234          | 2,555          | 1,452            | 44,02        |
| <b>3.</b> | <b>Ekspor</b>                |                |                |                |                |                  |              |
|           | Jumlah ('000 kg)             | 593,0          | 496,2          | 391,0          | 723,3          | 1.122,9          | 639,94       |
|           | Nilai ('000 US \$)           | 2.279,3        | 992,4          | 4.292,0        | 10.288,4       | 7.848,15         | 887,19       |

*Sumber Data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Sumatera Barat, berbagai tahun*

Dilihat dari segi sumberdaya manusianya, maka pada tahun 2009 tercatat sebanyak 150.940 orang yang bekerja dalam bidang perikanan, antara lain sebagai nelayan laut, nelayan perairan umum dan pembudidaya ikan (Lihat Tabel 2.31). Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 1,13 % setiap tahun. Jumlah terbanyak tercatat pada pembudidaya ikan, yaitu mendominasi sebesar 62,40 % dari angkatan kerja perikanan. Dominasi ini juga selaras dengan target pengembangan produksi perikanan secara nasional, yaitu yang mengarah kepada produksi perikanan budidaya.

**Tabel 2.31**  
**Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Perikanan tahun 2006 – 2009**

| Angkatan Kerja           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | Pertumbuhan (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. Nelayan Laut          | 34.220         | 34.220         | 34.220         | 34.984         | 0,58            |
| 2. Nelayan Perairan Umum | 24.506         | 24.506         | 21.763         | 21.775         | -10,04          |
| 3. Pembudidaya Ikan      | 81.678         | 82.825         | 84.027         | 94.181         | 4,23            |
| <b>Jumlah</b>            | <b>140.404</b> | <b>141.551</b> | <b>140.010</b> | <b>150.940</b> | <b>1,13</b>     |

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar, dari berbagai tahun

## 5. Ketahanan Pangan

Pangan adalah makanan/minuman yang berasal dari hayati, air dan bahan tambahan dalam proses pengolahan (PP. NO : 68 TAHUN 2002). Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/ atau pengawasan terhadap kegiatan proses produksi dan peredaran pangan sampai dengan siap di konsumsi masyarakat (PP 28 Tahun 2004).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau (UU. NO.7/ 1996).

Peningkatan ketahanan pangan sebagai suatu sistem bertumpu kepada empat pilar, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan penunjang seperti kelembagaan. Pengembangan ketahanan pangan adalah untuk terpenuhinya pangan dengan kondisi; Cukup, Berkelanjutan, Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman, Merata. Terjangkau

Kondisi 2008 telah menghasilkan capaian antara lain berkembangnya perbenihan/pembibitan benih padi untuk seluas 4 ha, palawija 4 ton, kentang 0,5 ha dan bibit jeruk 19.000 batang , bibit rambutan dan

mangga 1000 batang di UPTD BBI Lubuk Minturun untuk memenuhi kebutuhan benih sebar oleh petani terutama benih padi, palawija dan hortikultura oleh Balai Benih Induk (BBI/BBU); Pengembangan Informasi Pasar (Pemberdayaan Kelompok Pangan melalui PENAS Tani XII di Palembang), Pencatatan Harga Pasar di Sentra 6 Lokasi di Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Pariaman, Pengiriman Harga ke RRI sehingga petani mengetahui tingkat perkembangan harga komoditi TPH setiap saat dan meningkatkan posisi tawar petani / produsen. Selanjutnya meningkatnya mutu dan keamanan pangan melalui pengawasan pupuk dan pestisida, terlaksananya penangulangan serangan hama penyakit yang bersifat eksplosif di 19 Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan serta Pendamping Pemberdayaan P3 A melalui pembinaan kolompok Petani Pemakai Air (P3A) dan pelatihan P3A.

Program ketahanan pangan ini juga menghasilkan pengembangan desa mandiri pangan dalam bentuk pembentukan kelompok desa mandiri pangan sebanyak 8 kelompok pada 2 Kabupaten, yakni Dharmasraya dan Pasaman dengan sasaran dengan KK miskin minimal 30 % dan kepada kelompok diberikan bantuan penguatan modal usaha; Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesian (DPM-LUEP) dalam bentuk pemberian LUEP kepada 108 LUEP gabah dan 14 LUEP jagung. Apresiasi diarahkan dalam rangka pengamanan penerapan Harga Pembelian oleh Pemerintah (HPP) minimal Rp. 2.000,-/kg (GKP), pengembangan dan peningkatan SDM petugas serta masyarakat tentang keamanan pangan dalam bentuk pembinaan terhadap petugas provinsi dan kabupaten kota, masyarakat produsen (kelompok tani dan pengusaha) dan konsumen.

Capaian program ketahanan pangan juga telah melaksanakan penyusunan database potensi produksi pangan Pemantauan analisis harga pangan masyarakat (Advokasi Penyusunan dan Koordinasi Pencapaian Target Tahunan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2006-2010, pengembangan Lumbung Pangan Desa (Koordinasi Pengembangan kelembagaan Pangan) dalam bentuk pengembangan jaringan informasi, baik dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maupun dengan Provinsi tetangga; Pengembangan Lumbung Pangan Desa (pelatihan petugas kecamatan pembina lumbung pangan) dalam bentuk monitoring dan pembinaan terhadap kelompok penerima pinjaman Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada 13 kabupaten/kota. Pelatihan penyusunan peta kerawanan pangan (FIA) untuk petugas FIA yang telah dilatih di 4 (empat) Kabupaten yakni Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat.

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pertanian tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: Masih belum optimalnya peningkatan produktivitas pada masing-

masing komoditi, Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi oleh petani, Lemahnya akses petani ke sumber modal, Masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, Belum terpadunya di dalam pengelolaan pengembangan kawasan pertanian, Kapasitas SDM pelaku usaha pertanian dan penyuluhan belum memadai, Rendahnya pemanfaatan potensi pertanian dan peluang pasar, Lemahnya sistem jaringan distribusi sarana produksi, serta Terbatasnya prasarana penunjang pembangunan pertanian.

Dalam mengantisipasi kerentanan masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok terutama kebutuhan pangan, pemerintah mengeluarkan pemberian bantuan beras terhadap masyarakat miskin. Program bantuan pangan berupa pemberian beras bersubsidi dikenal dengan istilah Bantuan Beras Keluarga Miskin (Raskin). Selama 3 tahun pelaksanaan RPJMD sudah disalurkan sebanyak 109.650 ton yang sebar ke 462 titik pendistribusian di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, masing-masingnya tahun 2006 sebanyak 22.060 ton, tahun 2007 meningkat menjadi 32.870 ton untuk 247.255 RT miskin pada tahun 2007 ini pendistribusian tidak mencapai 100 % karena tidak terdistribusinya Raskin sesuai target di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan tahun 2008 menjadi 54.710 ton untuk 312.475 RT miskin. Untuk itu perlu pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat secara mendalam.

**Tabel 2.32**  
**Komposisi Ketersediaan Energi dan Protein di Sumatera Barat**  
**Tahun 2005 - 2009**

| No. | Tahun | Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr) |            |       | Ketersediaan Protein (Gr/kap/hr) |            |       |
|-----|-------|-----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|-------|
|     |       | Pencapaian                        | Dianjurkan | (%)   | Pencapaian                       | Dianjurkan | (%)   |
| 1   | 2005  | 4.238                             | 2.500      | 169,5 | 86,13                            | 52,0       | 165,6 |
| 2   | 2006  | 5.565                             | 2.200      | 253,0 | 88,59                            | 57,0       | 155,4 |
| 3   | 2007  | 5.744                             | 2.200      | 261,1 | 91,30                            | 57,0       | 160,2 |
| 4   | 2008  | 4.638                             | 2.200      | 210,8 | 94,73                            | 57,0       | 166,2 |
| 5   | 2009  | 4.382                             | 2.200      | 222,6 | 100,56                           | 57,0       | 181,3 |

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Sumbar, 2009

Ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi cenderung meningkat setiap tahunnya. Tingkat pencapaian ketersediaan energi dan protein di Sumatera Barat sudah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut PPH, sebagaimana tertera pada tabel 2.32.

Meskipun Sumatera Barat terlihat surplus dalam penyediaan bahan pangan, namun, kondisi kualitas konsumsi penduduk di Sumatera Barat masih berada dibawah standar skor PPH optimal sebesar 100. Berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan fluktuasi

dimana pada tahun 2006 skor PPH sebesar 75,79. Mengalami peningkatan di tahun 2007 dengan skor PPH sebesar 77,87 dan 2008 skor PPH sebesar 79,83, kemudian tahun 2009 mengalami penurunan kembali dengan skor PPH menjadi 76,93. Untuk itu masih perlu strategi mencapai kualitas konsumsi pangan ideal di Sumatera Barat.

## **6. Kehutanan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha, yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung 0,91 juta Ha, hutan produksi terbatas 0,25 juta Ha, hutan produksi tetap 0,40 juta Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 0,19 juta Ha. Luasan kawasan hutan tersebut diatas meliputi seluas 61 % wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas.

Sesuai dengan usulan Provinsi Sumatera Barat terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan dalam rangka perubahan tata ruang luas kawasan hutan menjadi 57,2 % meliputi: Hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (0,77 juta Ha), hutan lindung 0,79 juta Ha), hutan produksi terbatas (0,23 juta Ha), hutan produksi tetap (0,36 juta Ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (0,19 juta Ha). Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi masih tetap merupakan kawasan yang paling luas.

Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam maupun hutan tanaman terdapat pada 5 (lima) kabupaten. Bentuk-bentuk hasil hutan yang dihasilkan Sumatera Barat adalah dalam bentuk Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Produksi hasil hutan berupa kayu bulat dari Sumatera Barat (dari IUPHHK, IPK, dan IPKTM), pada tahun 2005 adalah 257.287 m<sup>3</sup>, dan pada tahun 2009 produksi tersebut mengalami penurunan. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh karena adanya program pembatasan produksi hutan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

## **7. Perindustrian**

Pembangunan ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 diarahkan kepada mewujudkan perekonomian yang produktif dan mampu bersaing di dunia global, maka dapat ditempuh dengan empat strategi yakni: (1). Meningkatkan usaha pertanian moderen dan agribisnis yang maju, (2). Melaksanakan kegiatan industri dan jasa yang efisien, (3). Menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan

wisata nasional dan Internasional, (4). Menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai Barat Sumatera. Dalam kegiatan pengembangan industri dan jasa yang efisien, maka pada RPJMD II tahun 2010-2015 ini terutama dititikberatkan kepada: 1). Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sub sector perikanan terutama peningkatan sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan usaha, 2), mewujudkan kegiatan perdagangan yang mampu bersaing, 3). Pengembangan kewirausahaan yang mampu bersaing, dan pengembangan UMKM dan koperasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 4). Pengembangan kewirausahaan dan manajemen usaha secara lebih intensif.

Berdasarkan kepada arahan RPJPD Sumatera Barat ini, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi Sumatera Barat pada saat sekarang dalam RPJMD II 2010-2015 adalah pengembangan industri pertanian dan melalui pengembangan kegiatan agroindustri dan agro bisnis, sebagai pengembangan industri unggulan Sumatera Barat.

Sementara itu, Perpres No: 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional menetapkan 10 industri unggulan Sumatera Barat yakni: industri hasil laut, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan ringan, industri kulit dan alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri gambir, industri minyak atsiri, industri maritim, industri semen, industri alsintan.

Dari sepuluh industri unggulan Sumatera Barat yang ditetapkan di atas, maka enam diantaranya adalah industri yang berbasis produk pertanian yakni agro industri dan agro bisnis. Tentu saja industri agro ini merupakan tahap awal dalam pengembangan industri di suatu daerah dalam menuju industri manufaktur lainnya. Perekonomian Sumatera Barat sampai saat ini masih berada pada tahap pengembangan industri pengolahan produk pertanian ini, terutama pada industri pengolahan produk perkebunan tanaman perenial.

Dalam struktur perekonomian Sumatera Barat, terdapat sebanyak 21 kelompok usaha industri (KBLI) yang memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Sumatera dalam sub sektor industri besar dan kecil. Diantaranya yang memiliki jumlah output yang besar dan jumlah eksport yang tinggi itu adalah industri minyak dan lemak hewan, industri tekstil, pakaian, dan kulit, industri beras, industri semen dan industri makanan lainnya. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel di bawah ini.

**Tabel 2.33**  
**Kondisi Jumlah Output dan Eksport Industri Pengolahan**  
**Sumatera Barat Tahun 2008**

| No  | Jenis Industri                                      | Jumlah Output<br>(Rp Juta) | Jumlah Eksport<br>(Rp Juta) | Persentase<br>Eksport Terhadap<br>Output |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1.  | Industri Pemotongan hewan                           | 290,365.27                 | -                           | 0.00                                     |
| 2.  | Industri Pengolahan dan pengawetan makan            | -                          | 11,499.00                   | 0.00                                     |
| 3.  | Industri Minyak dan Lemak                           | 3,871,817.52               | 1,983,741.49                | 51.24                                    |
| 4.  | Industri Beras                                      | 2,883,729.33               | 737,315.39                  | 25.57                                    |
| 5.  | Industri Tepung                                     | 126,204.39                 | 885.86                      | 0.70                                     |
| 6.  | Industri Gula                                       | 44,802.88                  | 9,202.37                    | 20.54                                    |
| 7.  | Industri Makanan lainnya                            | 1,707,057.35               | 332,239.71                  | 19.46                                    |
| 8.  | Industri Minuman                                    | 667,347.60                 | 98,554.41                   | 14.77                                    |
| 9.  | Industri Pemintalan                                 | 1,441,982.45               | 177,468.28                  | 12.31                                    |
| 10. | Industri Tekstil, Pakaian, Kulit                    | 3,980,618.43               | 545,076.83                  | 13.69                                    |
| 11. | Industri Bambu, kayu, dan rotan                     | 334,813.93                 | 99,227.15                   | 29.64                                    |
| 12. | Industri Kertas                                     | 51,273.88                  | 1,316.74                    | 2.57                                     |
| 13. | Industri Pupuk dan Pestisida                        | 41,094.93                  | -                           | 0.00                                     |
| 14. | Industri Kimia                                      | 22,763.59                  | 1,379.23                    | 6.06                                     |
| 15. | industri barang karet dan Plastik                   | 705,675.80                 | 56,349.16                   | 7.99                                     |
| 16. | Industri barang barang mineral dan logam            | 458,810.68                 | 104,284.06                  | 22.73                                    |
| 17. | Industri Semen                                      | 1,856,855.56               | 943,748.83                  | 50.83                                    |
| 18. | Industri barang dan logam                           | 62,380.05                  | 6,613.27                    | 10.60                                    |
| 19. | Industri Mesin dan alat-alat perlengkapan listrik   | 136,604.42                 | 6,248.27                    | 4.57                                     |
| 20. | Industri alat pengangkutan                          | 8,381.68                   | 1,536.84                    | 18.34                                    |
| 21  | Industri barang lain yg belum digolongkan dimanapun | 23,646.64                  | -                           | 0.00                                     |
|     | Total   | 18,716,226.38              | 5,116,686.89                | 27.34                                    |

Sumber: Tabel I-O Sumatera Barat, BPS Sumbar 2008

Tabel 2.33 di atas memperlihatkan bahwa struktur industri pengolahan Sumatera Barat outputnya paling tinggi didominasi oleh 4 usaha industri yakni: industri tekstil, pakaian, kulit, industri minyak dan lemak hewan dan industri beras, serta industri semen. Namun output industri yang dieksport yang besar hanyalah industri minyak dan lemak hewan, industri semen dan industri beras, dan industri tekstil, pakaian, dan kulit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecilnya nilai tambah industri pengolahan Sumatera Barat ini diduga disebabkan karena rendahnya jumlah eksport dari kelompok industri lain terutama eksport ke negara lain. Sedangkan, kelompok industri yang outputnya besar tetapi, jumlah eksportnya kecil, diduga ditransaksikan ke wilayah provinsi tetangga seperti industri tepung, industri tekstil, pakaian, dan kulit.

Penetapan beberapa industri unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 sesuai dengan potensi industri dalam analisa input dan output seperti: industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki serta industri semen.

Sedangkan untuk industri unggulan lainnya merupakan industri yang potensial yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat.

Ke sepuluh Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari industri berbasis agro seperti: industri kakao, industri pengolahan hasil laut, industri gambir, industri makanan ringan, industri kulit dan alas kaki, industri minyak atsiri dan industri unggulan berbasis manufaktur seperti: industri semen, industri perkapalan, industri alsintan dan industri tekstil dan produk tekstil.

Disamping memiliki industri-industri unggulan, juga telah dikembangkan beberapa sentra-sentra industri potensial seperti: sentra industri bordir dan sulaman, sentra industri makanan ringan, sentra industri tenun, sentra batubata, sentra kerajinan, sentra perabot rotan dan terdapat satu klaster industri yang telah dikembangkan yaitu klaster industri semen.

Pengembangan industri pengolahan Sumatera Barat harus dimulai dari pengolahan produk pertanian masyarakat yang telah memberikan pendapatan yang luas kepada masyarakat selama ini. Produk unggulan pertanian yang mendatangkan aliran keuntungan kepada masyarakat petani.

## **8. Perdagangan**

### **A. Perdagangan Luar Negeri**

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam bidang perdagangan yang besar pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. Kegiatan utama yang dilakukan adalah dalam bentuk ekspor dan impor. Pengalaman masa lalu di banyak negara menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri ini merupakan salah satu faktor penggerak yang sangat penting bagi peningkatan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan perkembangan permintaan di luar negeri. Dengan demikian, peningkatan perdagangan luar negeri dapat berfungsi sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi (*Export led Growth*) untuk suatu daerah maupun nasional dalam rangka meningkatkan proses pembangunan.

Perkembangan ekspor Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006-2008 ternyata menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor yang cukup drastis. Kondisi ini terjadi sebagai akibat adanya *Krisis Finansial Global* yang mengakibatkan terjadinya penurunan drastis terhadap permintaan komoditi ekspor Sumatera Barat, khususnya karet, minyak sawit dan lulita manis. Disamping itu terjadinya gempa dengan kekuatan 7,9 Skala Richter pada tahun 2009 juga telah mengakibatkan menurunnya kegiatan ekspor daerah sebagai akibat dari hancurnya

beberapa kantor dan pergudangan perusahaan ekspor yang berada di Kota Padang. Tabel 2.34 memperlihatkan perkembangan kegiatan ekspor menurut negara tujuan.

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan**  
**Tahun 2006-2009 (Dalam US\$)**

| No | Negara Tujuan  | Tahun     |           |           |           | Pertumbuhan (%) |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|    |                | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |                 |
| 1  | Amerika        | 406,296   | 325,104   | 609,739   | 158,972   | -26,9           |
| 2  | India          | 204,069   | 160,943   | 674,432   | 489,744   | 33,9            |
| 3  | Singapura      | 87,065.   | 583,334   | 355,591   | 179,406   | 27,3            |
| 4  | Belanda        | 150,031   | 69,736    | 177,753   | 17,321    | -51,3           |
| 5  | China          | 107,582   | 27,265    | 180,124   | 187,564   | 20,4            |
| 6  | Malaysia       | 17,049    | 28,977    | 54,819    | 55,933    | 48,6            |
| 7  | Italia         | 15,559    | 1,081     | 10,368    | 17,652    | 4,3             |
| 8  | Pakistan       | 13,383    | 7,035     | 59,312    | 7,278     | -18,4           |
| 9  | Negara Lainnya | 141,955   | 230,470   | 262,451   | 262,451   | 22,7            |
|    | Jumlah         | 1,074,134 | 1,512.799 | 2,384,568 | 1,273,717 | 4,4             |

*Sumber Data : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, beberapa terbitan.*

Seperti terlihat pada Tabel 2.33 ternyata laju pertumbuhan nilai ekspor dalam periode 2006-2008 adalah 9,5 % dan menurun drastis pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan ekspor menurut negara tujuan memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran daerah pemasaran komoditi ekspor Sumatera Barat dari pasar tradisional di Amerika Serikat dan Eropa menuju Asia, khususnya India, Pakistan dan Malaysia. Pergeseran pemasaran ekspor ini juga dipicu oleh terjadinya Krisis Finansial Global pada tahun 2008 sehingga permintaan komoditi ekspor di Amerika dan Eropa mengalami penurunan drastis. Sungguhpun demikian, ekspor Sumatera Barat ke negara-negara ASEAN masih tetap rendah, kecuali Malaysia.

Bila dilihat perkembangan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok komoditi pada tahun 2009, laju pertumbuhan nilai ekspor hasil pertanian ternyata cukup tinggi yaitu mencapai 41,8 % rata-rata setiap tahunnya untuk periode 2006-2009. Dari ekspor hasil pertanian ini, ternyata ekspor biji coklat (cocoa beans) merupakan komoditi ekspor utama daerah dengan kontribusi mencapai 79,4 % sedangkan komoditi lainnya mempunyai kontribusi yang relatif kecil. Sedangkan dalam kelompok komoditi hasil industri, komoditi minyak kelapa sawit merupakan komoditi ekspor utama dengan kontribusi sekitar 63,8 % dan disusul oleh *crumb-rubber* dengan kontribusi sebesar 21,2 %. Sedangkan komoditi ekspor lainnya ternyata tidak terlalu penting dengan sumbangan yang sangat kecil. Tabel 2.35 menunjukkan perkembangan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat menurut komoditi untuk periode 2006-2009.

**Tabel 2.35**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat**  
**Menurut Kelompok Komoditi 2006-2009 (Dalam 000 US\$)**

| No | Kelompok Komoditi       | Tahun            |                  |                  |                  | Pertumbuhan (%) |
|----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                         | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             |                 |
| A  | <b>Hasil Pertanian</b>  | <b>15.914</b>    | <b>24.900</b>    | <b>53.118</b>    | <b>64.378</b>    | <b>41,8</b>     |
| 1. | Biji Coklat             | 3.040            | 13.205           | 34.878           | 51.095           | 57,0            |
| 2. | Kulit Manis             | 6.104            | 7.588            | 8.712            | 5.005            | -4,8            |
| 3  | Biji Lainnya            | 146              | 356              | 4.731            | 5.403            | 100,4           |
| 4  | Buah-buahan             | 2.107            | 2.291            | 2.076            | 1.010            | -16,8           |
| 5  | Hasil Pertanian Lainnya | 4.517            | 1.460            | 2.721            | 1.865            | -19,8           |
| B  | <b>Hasil Industri</b>   | <b>1.053.083</b> | <b>1.460.754</b> | <b>2.244.993</b> | <b>1.241.896</b> | <b>-4,2</b>     |
| 1. | Minyak Kelapa Sawit     | -                | 717.805          | 1.276.769        | 791.867          | 5,0             |
| 2. | Crumb-rubber            | 496.361          | 560.497          | 651.341          | 263.628          | -14,6           |
| 3. | Minyak Biji Sawit       | -                | 107.193          | 204.066          | 123.210          | 3,5             |
| 4. | Hasil Industri Lainnya  | 556.722          | 75.259           | 112.817          | 63.191           | -42,0           |
| C. | <b>Hasil Tambang</b>    | <b>5.137</b>     | <b>27.145</b>    | <b>86.457</b>    | <b>37.983</b>    | <b>64,9</b>     |
| 1. | Batubara                | 4.219            | 26.758           | 83.783           | 30.147           | 63,5            |
| 2. | Hasil Tambang Lainnya   | 918              | 387              | 2.674            | 7.836            | 70,9            |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>1.074.134</b> | <b>1.512.799</b> | <b>2.384.568</b> | <b>1.273.717</b> | <b>4,4</b>      |

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka, beberapa terbitan

Kalau dilihat komposisi jumlah nilai impor Sumatera Barat menurut jenis barang, ternyata sebagian besar dari barang impor tersebut adalah bahan penunjang kegiatan produksi dalam daerah seperti bahan mentah, bahan kimia, barang hasil industri dan mesin-mesin untuk perlengkapan pabrik dan pengangkutan. Sedangkan sisanya lebih banyak merupakan barang konsumsi seperti bahan makanan dan minuman.

Perkembangan kegiatan impor Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup signifikan, mulai pada tahun 2007 dan 2008. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya tendensi penurunan yang cukup berarti. Fluktuasi ini terutama akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998 karena menurun drastisnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga kebutuhan akan barang impor juga otomatis menurun. Akan tetapi mulai tahun 2006 pemulihan ekonomi mulai terjadi dan hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga impor juga mulai menunjukkan tendensi kembali meningkat. Tabel 2.36 memberikan perkembangan nilai impor Sumatera Barat tahun 2006-2009.

**Tabel 2.36**  
**Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 2006-2009**

| Kode SITC | Golongan Barang                                | Tahun         |               |                |                |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
|           |  | 2006          | 2007          | 2008           | 2009           |
| 0         | Bahan Makanan dan Binatang Hidup               | 3.797         | 16.448        | 7.826          | -              |
| 1         | Minuman dan Tembakau                           | -             | -             | -              | -              |
| 2         | Bahan Mentah Tidak untuk Dimakan               | 3.276         | 8.129         | 36.042         | 1.890          |
| 3         | Bahan Bakar Mineral, Pelumas dan Bahan terkait | -             | -             | 278.536        | 302.103        |
| 4         | Bahan Kimia                                    | 15.581        | 37.011        | 112.928        | 9.992          |
| 5         | Barang Buatan Pabrik                           | 8100          | 15.154        | 27.914         | 8.596          |
| 6         | Perlengkapan mesin dan pengangkut              | 6.058         | 18.674        | 12.903         | 11.263         |
| 7         | Barang-barang Lainnya                          | -             | 444           | 307            | 404            |
|           | <b>Jumlah</b>                                  | <b>36.812</b> | <b>95.861</b> | <b>476.457</b> | <b>346.247</b> |

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2009/2010

Mengingat komoditi impor Sumatera Barat adalah barang-barang yang relatif berat untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri, kebanyakan kegiatan impor tersebut dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Sedangkan kegiatan ekspor yang dilakukan melalui bandar udara minangkabau masih relatif kecil. Namun demikian, sebenarnya nilai impor Sumatera Barat yang dibawa melalui pelabuhan lain seperti: Tanjung Periuk (Jakarta), Belawan (Medan) dan Dumai (Pekanbaru) juga cukup besar karena adanya variasi dalam ongkos angkut dan muat barang di pelabuhan serta jadwal kedatangan kapal. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi ongkos transpor dan biaya muat bongkar di pelabuhan Teluk Bayur sangat penting artinya untuk meningkatkan kegiatan impor Sumatera Barat dimasa mendatang.

Dalam perdagangan luar negeri, kendala dan permasalahan pokok Sumatera Barat adalah masih rendahnya daya saing komoditi ekspor yang dapat dihasilkan daerah. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan relatif sulitnya dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah dan nilai ekspor daerah karena kalah bersaing dengan produk yang sama dihasilkan oleh negara dan daerah lainnya. Kesulitan ini semakin serius dalam era globalisasi dewasa ini dimana tingkat persaingan di dunia internasional semakin tajam.

Rendahnya daya saing tersebut terutama disebabkan karena komoditi ekspor Sumatera Barat umumnya masih barang-barang hasil pertanian dan barang setengah jadi yang diproduksi dengan menggunakan teknologi produksi yang masih bersifat tradisional. Disamping itu, pola manajemen usaha yang digunakan oleh produsen dan pengusaha ekspor dalam daerah umumnya juga masih bersifat usaha kecil dan menengah dan usaha keluarga yang belum banyak

menggunakan tenaga profesional terkait. Akibatnya, tingkat produktivitas menjadi rendah dan harga pokok rata-rata cenderung akan lebih tinggi sehingga daya saing produk menjadi rendah.

## B. Perdagangan Dalam Negeri

Perkembangan kegiatan perdagangan dalam negeri Sumatera Barat dapat dilihat dari 3 indikator utama yaitu: perkembangan pemberian *Surat Izin Usaha Perdagangan* (SIUP), distribusi dan perkembangan harga 9 bahan pokok dan perkembangan kegiatan pengujian mutu barang. Melalui perkembangan pemberian SIUP akan dapat memberikan gambaran umum tentang banyaknya pengusaha yang meminta izin usaha baru dan pelaksanaan kemetrologian dalam bentuk pelaksanaan tera baru dan tera ulang. Perkembangan distribusi serta harga barang akan dapat memberikan gambaran tentang volume perdagangan dalam negeri serta tingkat kestabilan harga. Sedangkan perkembangan pelaksanaan tera baru dan ulang menggambarkan perkembangan kegiatan pengujian barang sehingga mutu barang yang diperdagangkan akan menjadi lebih terjamin dan tidak merugikan konsumen.

**Tabel 2.37  
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2005-2009**

| Tahun           | PB    | PM    | PK     | Jumlah |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| 2005            | 235   | 543   | 4.619  | 5.397  |
| 2006            | 252   | 699   | 3.955  | 4.906  |
| 2007            | 343   | 990   | 3.616  | 4.949  |
| 2008            | 375   | 1.239 | 4.418  | 6.032  |
| 2009            | 341   | 705   | 4.336  | 5.382  |
| Jumlah          | 1.546 | 4.176 | 20.944 | 26.666 |
| Pertumbuhan (%) | 9,6   | 6,7   | -0,02  | -0,01  |

Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan pemberian izin usaha perdagangan di Provinsi Sumatera Barat ternyata kurang menggembirakan. Seperti terlihat pada Tabel 2.37, bahwa SIUP yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005-2009 telah berjumlah 26.666 Namun demikian, bila dilihat laju pertumbuhannya ternyata negatif yang berarti kegiatan perdagangan di Provinsi Sumatera Barat tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bila dilihat pemberian SIUP tersebut menurut jenisnya ternyata perkembangan distribusi barang ditekankan pada distribusi 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan utama masyarakat secara umum, seperti; beras, minuman dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. Barang-barang tersebut umumnya adalah hasil produksi dalam daerah dan impor baik dari daerah lain di Indonesia, maupun dari luar negeri. Sedangkan jenis barang kebutuhan lainnya umumnya merupakan peralatan mesin dan elektronik untuk kebutuhan rumah tangga yang umumnya di datang dari kota-kota besar di Jawa.

Data tentang distribusi sembilan bahan pokok sebegitu jauh tidak tersedia dengan baik. Namun demikian, dari gejolak harga akan dapat pula diketahui kondisi distribusi produk-produk tersebut. Bila harga cukup stabil, maka ini berarti bahwa distribusi barang tersebut cukup baik. Akan tetapi bila terjadi gejolak harga yang cukup tinggi maka hal ini memberikan indikasi bahwa distribusi barang belum baik dan banyak daerah yang mengalami kelangkaan barang sehingga memicu kenaikan harga.

**Tabel 2.38**  
**Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2005-2009**

| No | Jenis Barang                                     | Satuan       | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | Pertumbuhan (%) |
|----|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Beras<br>- IR. 42 Solok<br>- Bukittinggi         | L<br>L       | 5.079<br>5.080   | 6.067<br>6.903   | 6.770<br>7.250   | 6.774<br>7.500   | 8.053<br>7.766   | 12,2<br>11,2    |
| 2  | Gula Pasir<br>- Dalam Negeri<br>- Impor          | Kg<br>Kg     | 6.386<br>5.648   | 6.840<br>6.881   | 6.600            | 6.500            | 8.981            | 8,9             |
| 3  | Tepung Terigu<br>- Segi tiga Biru                | Kg           | 4.040            | 5.005            | 6.100            | 7.500            | 7.474            | 16,6            |
| 4  | Daging<br>-Daging sapi<br>- Dagig ayam boiler    | Kg           | 39.331<br>12.502 | 49.837<br>15.176 | 52.000<br>16.500 | 60.000<br>20.387 | 60.094<br>25.323 | 11,1<br>19,3    |
| 5  | Telur ayam                                       | Kg           | 13.500           | 16.156           | 15.200           | 13.500           | 13.505           | 0,1             |
| 6  | Ikan Teri asin No. 2                             | Kg           | 19.513           | 20.843           | 28.200           | 31.226           | 31.830           | 13,0            |
| 7  | Cabe merah keriting                              | Kg           | 13.213           | 15.130           | 18.000           | 21.935           | 17.552           | 7,4             |
| 8  | Bawang Merah                                     | Kg           | 7.975            | 8.865            | 9.550            | 10.465           | 11.707           | 10,1            |
| 9  | Minyak Goreng<br>- Merek Bimoli<br>- Tanpa Merek | Lt/btl<br>kg | 7.542<br>4.804   | 10.681<br>7.670  | 11.500<br>7.200  | 13.210<br>7.103  | 13.074<br>8.311  | 14,7<br>14,7    |

*Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat*

Pada Tabel 2.38 terlihat bahwa harga makanan meningkat berkisar antara 9 %-16,0 % yang berarti lebih tinggi dari tingkat inflasi secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan tersebut dapat dikatakan relatif tinggi yang mengidentifikasi adanya kendala dalam pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan distribusi 9 bahan pokok tersebut keseluruh pelosok daerah Provinsi Sumatera Barat akan sangat penting sekali dalam pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri.

Kendala dan permasalahan pokok yang dihadapi pada perdagangan dalam negeri adalah relatif rendahnya daya saing produk

yang dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat. Permasalahan ini menjadi semakin serius sejak diberlakukannya sistem perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai tahun 2010. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya produk-produk yang dihasilkan China umumnya lebih murah, tetapi mempunyai kualitas yang relatif lebih baik sehingga mempunyai daya saing yang relatif lebih kuat dibandingkan produk hasil produksi Sumatera Barat.

#### **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut antara lain adalah: (1) Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Ketersediaan Infrastruktur, (3) Iklim Investasi dan (4) Kualitas Sumberdaya Manusia. Dalam hal ini peringkat ditentukan secara komperatif antar provinsi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketersediaan data.

Gambaran umum tentang daya saing dapat diketahui dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan Bank Indonesia* (2002). Dengan melakukan sedikit modifikasi, yaitu hanya menggunakan 4 indikator utama saja, maka rangkuman hasil studi tentang daya saing daerah tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 2.38. Pada tabel ini terlihat bahwa daya saing daerah Provinsi Sumatera Barat hanya terletak pada peringkat 16 dari 25 provinsi di Indonesia yang dinilai. Ini berarti bahwa peringkat daya saing Provinsi Sumatera berada dibawah rata-rata nasional yang berarti cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Provinsi yang mempunyai daya saing tertinggi adalah DKI Jakarta sedangkan provinsi dengan daya saing terendah adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Namun demikian, sangat disadari bahwa karena studi ini dilakukan pada tahun 2002 yang lalu, sehingga besar kemungkinan peringkat daya saing daerah ini sudah mengalami perubahan dewasa ini. Disamping itu, karena penilaian dilakukan berdasarkan aspek yang cukup luas dan sebagian tidak bisa dinilai secara kuantitatif, maka penilaian juga akan cenderung menjadi kurang tepat dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

**Tabel 2.39**  
**Peringkat Daya Saing Daerah Sumatera Barat di Indonesia**

| Provinsi              | Kemampuan Ekonomi Daerah | Ketersediaan Infrastruktur | Iklim Investasi | Kualitas Sumberdaya Manusia | Peringkat Keseluruhan |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| DKI Jakarta           | 1                        | 1                          | 1               | 1                           | 1                     |
| Kalimantan Timur      | 3                        | 2                          | 6               | 6                           | 2                     |
| Jawa Timur            | 9                        | 3                          | 2               | 5                           | 3                     |
| Jawa Tengah           | 4                        | 9                          | 8               | 3                           | 4                     |
| Jawa Barat            | 2                        | 13                         | 5               | 4                           | 5                     |
| DIY Yogyakarta        | 7                        | 15                         | 3               | 2                           | 6                     |
| Bali                  | 12                       | 8                          | 7               | 7                           | 7                     |
| Sumatera Utara        | 6                        | 7                          | 11              | 8                           | 8                     |
| Sulawesi Selatan      | 10                       | 5                          | 9               | 14                          | 9                     |
| Riau                  | 5                        | 4                          | 10              | 20                          | 10                    |
| Kalimantan Tengah     | 8                        | 12                         | 15              | 18                          | 11                    |
| Lampung               | 19                       | 18                         | 4               | 10                          | 12                    |
| Jambi                 | 20                       | 22                         | 13              | 17                          | 13                    |
| Sumatera Selatan      | 14                       | 16                         | 14              | 11                          | 14                    |
| Kalimantan Selatan    | 23                       | 6                          | 12              | 16                          | 15                    |
| <i>Sumatera Barat</i> | <i>16</i>                | <i>14</i>                  | <i>17</i>       | <i>13</i>                   | <i>16</i>             |
| Kalimantan Barat      | 11                       | 20                         | 19              | 23                          | 17                    |
| Sulawesi Tengah       | 21                       | 17                         | 18              | 21                          | 18                    |
| Nusa Tenggara Barat   | 24                       | 19                         | 23              | 24                          | 19                    |
| Sulawesi Tenggara     | 18                       | 23                         | 20              | 19                          | 20                    |
| NusaTenggara Timur    | 13                       | 21                         | 22              | 25                          | 21                    |
| Maluku                | 26                       | 26                         | 21              | 12                          | 22                    |
| Irian Jaya            | 17                       | 11                         | 25              | 26                          | 23                    |
| Bengkulu              | 25                       | 25                         | 24              | 18                          | 24                    |
| Aceh                  | 22                       | 24                         | 26              | 22                          | 25                    |

*Sumber Data : Bank Indonesia, Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurnya di Indonesia, Yogyakarta; BPFE, 2002, halaman 101-110 dengan melakukan beberapa modifikasi.*

Kondisi daya saing yang relatif rendah tersebut tentunya akan menyebabkan daya tarik investor untuk melakukan investasi di Sumatera Barat menjadi relatif kecil. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan pula relatif rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di daerah, sehingga peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan relatif lambat. Dengan demikian terlihat bahwa upaya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang akan menjadi tantangan daerah yang cukup besar dan perlu segera dilakukan dalam rangka menggerakkan proses pembangunan daerah secara lebih cepat dan terarah. Dalam kaitan dengan hal ini pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya perlu mendapatkan perhatian lebih besar dimasa mendatang.

## **2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka kepada persaingan dengan provinsi lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Pada bagian ini akan dianalisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Sumatera Barat dengan menggunakan indicator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktifitas total daerah dan nilai tukar petani.

**Tabel 2.40  
Perkembangan Konsumsi Rumahtangga Per Kapita  
Tahun 2005 s/d 2010 Provinsi Sumatera Barat**

| No | Uraian                                       | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010*     |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Total Pengeluaran Rumahtangga Rp miliar)     | 16.362    | 17.038    | 17.739    | 18.541    | 18.846    | 19.123    |
| 2. | Jumlah Pengeluaran bahan makanan (Rp miliar) | 10.464    | 10.892    | 11.312    | 11.756    | 12.039    | 12.393    |
| 3. | Jumlah Pengeluaran non makanan (Rp miliar)   | 5.898     | 6.146     | 6.426     | 6.798     | 6.876     | 6.730     |
| 4. | Jumlah Rumahtangga (jiwa)                    | 1.070.543 | 1.109.731 | 1.121.904 | 1.073.923 | 1.086.792 | 1.086.792 |
| 5. | Konsumsi perkапita (Rp juta)                 | 15,28     | 15,35     | 15,81     | 17,26     | 17,34     | 17,60     |

*Sumber Data : BPS Sumatera Barat Tahun 2010*

\*angka sementara

Berdasarkan kepada tabel di atas terlihat bahwa total pengeluaran rumahtangga di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tahun 2005 berjumlah Rp 16.362 miliar didominasi oleh pengeluaran jenis bahan makanan yakni sebesar Rp 10.464 miliar atau 63,95 % dari total pengeluaran rumahtangga, sisanya untuk pengeluaran non pangan. Jumlah pengeluaran rumahtangga ini mengalami kenaikan yang sangat berarti sampai tahun 2009 yang mencapai Rp 18.846 miliar sehingga telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,18 % selama periode 2005 sampai 2009, sehingga rata-rata kenaikan per tahunnya adalah 3,04 %. Besarnya proporsi untuk pengeluaran bahan makanan tahun 2009 adalah sebesar 63,58 %, hal ini telah mengalami penurunan sejak tahun 2005.

Semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk bahan makanan ini tentunya telah diiringi oleh peningkatan untuk konsumsi non pangan dari 36,05 % tahun 2005 menjadi 36,42 % tahun 2009. Semakin meningkatnya proporsi rumahtangga untuk konsumsi non pangan tentunya memperlihatkan kemajuan yang lebih baik, karena konsumsi

non pangan dalam bentuk investasi rumah tangga ke peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerjanya, seperti pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara umum, meningkatnya proporsi pengeluaran untuk jenis pengeluaran non pangan telah memperlihatkan adanya pengurangan keadaan kemiskinan di tengah penduduk. Menurut ukuran kemiskinan yang diyakini benar selama ini adalah bahwa rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang proporsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi pangan lebih besar. Sehingga secara umum kemiskinan masih ada di tengah masyarakat Sumatera Barat, tetapi secara umum, angka kemiskinan itu secara perlahan mulai menurun, yang ditandai secara makro oleh semakin meningkatnya pengeluaran non pangan rumah tangga.

Konsumsi perkapita Sumatera Barat telah mencapai Rp 17,34 juta tahun 2009 yang didominasi oleh pengeluaran untuk bahan makanan sebesar Rp 11.982 miliar dan konsumsi non pangan sebesar Rp 6.864 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2005, berarti telah mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 13,48 selama periode 2005 s/d 2009 dengan rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 2,70 % per tahun.

Kemampuan perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari besarnya nilai tukar petani yang menggambarkan rasio antara jumlah penerimaan petani dalam sistem produksinya dengan jumlah harga yang dibayarkan petani dalam konsumsinya. Selama periode 2005 sampai 2010 nilai tukar petani terus mengalami peningkatan dari 70,3 tahun 2005 menjadi 105,68 tahun 2010, sehingga pertumbuhan nilai tukar petani selama 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar 39,78 % dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,95 %. Nilai tukar petani tertinggi selama lima periode lalu adalah pada tahun 2010 yang mencapai 105,68, artinya kemampuan daya beli petani lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan, memperlihatkan bahwa kemampuan daya beli petani mulai menurun apabila dibandingkan tahun 2008.

**Tabel 2.41**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2005-2010**  
**Provinsi Sumatera Barat.**

| No | Uraian                      | 2005  | 2006  | 2007  | 2008   | 2009   | 2010   |
|----|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1. | Indeks yang diterima Petani | 368,8 | 439,6 | 455,7 | 119,8  | 125,1  | 132,98 |
| 2. | Indeks yang dibayar petani  | 524,7 | 592,4 | 606,1 | 114,0  | 120,6  | 126,07 |
| 3. | Nilai Tukar Petani (NTP)    | 70,3  | 74,21 | 75,19 | 105,09 | 103,73 | 105,68 |

Sumber Data : berita resmi statistik beberapa edisi

Pertumbuhan indeks yang diterima petani selama tahun 2005 sampai 2009 adalah telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 66,16 %, artinya terjadi penurunan penerimaan petani selama ini, hal ini tentu saja disebabkan oleh karena harga relative komoditi pertanian yang dihasilkan petani mengalami penurunan nilainya, terutama produk yang berasal dari bahan mentah. Sedangkan pertumbuhan indeks pembayaran petani selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 77,11 %. Data ini mengimplikasikan telah terjadi penurunan tingkat daya beli petani terhadap barang-barang bahan makanan dan bukan makanan selama periode 2005-2009. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan rumah tangga tani, dan di lain sisi juga dapat dilakukan upaya peningkatan kemampuan daya beli petani untuk barang-barang makanan dan bukan makanan. Masih kecilnya indeks nilai tukar petani (<100) selama periode 2005 sampai 2007 memperlihatkan bahwa kemampuan daya beli petani masih rendah, barulah sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 kemampuan daya beli petani menjadi lebih baik.

**Tabel 2.42**  
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian**  
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.**

| No        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Capaian Kinerja |        |        |        |        |        | Standar (RPJPD) | Interpretasi Belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>) |
|-----------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--|
|           |   | 2005            | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |                 |  |
| 1.        | Kesejahteraan Masyarakat  |                 |        |        |        |        |        |                 |  |
| 1.1.      | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  |                 |        |        |        |        |        |                 |  |
| 1.1.1.    | Otonomi daerah, pemerintahan umum ad ministrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian |                 |        |        |        |        |        |                 |  |
| 1.1.1.1.  | Pertumbuhan PDRB  | 5,73            | 6,14   | 6,34   | 6,37   | 4,19   | 5,93   | 6,90            | (<)  |
| 1.1.1.2.  | Laju Inflasi  | 13,10           | 11,84  | 6,04   | 11,02  | 3,73   | -      | 6,50            | (<)  |
| 1.1.1.3.  | PDRB perkapita  | 6,40            | 6,68   | 7,01   | 7,35   | 7,55   | 8,16   | 8,50            | (<)  |
| 1.1.1.4.  | PDRB Harga Berlaku (milyar)   | 44.675          | 53.030 | 59.799 | 70.614 | 76.295 | 87.221 | 68,4            | (>)  |
| 1.1.1.5.  | PDRB Harga Konstant (milyar)  | 29.159          | 30.950 | 32.913 | 35.008 | 36.465 | 38.860 | 40,7            | (<)  |
| 1.1.1.6.  | Kontribusi Sektor Pertanian   | 25,01           | 24,74  | 24,43  | 24,10  | 24,03  | 23,40  |                 |  |
| 1.1.1.7.  | Kontribusi sektor Industri Pengolahan   | 13,06           | 12,85  | 12,79  | 12,75  | 12,58  | 12,32  |                 |  |
| 1.1.1.8.  | Kontribusi Sektor Pedagangan, Hotel Restoran  | 18,19           | 18,29  | 18,40  | 18,46  | 18,30  | 17,86  |                 |  |
| 1.1.1.9.  | Kontribusi Sektor Jasa  | 16,47           | 16,27  | 16,22  | 16,25  | 16,38  | 16,81  |                 |  |
| 1.1.1.10. | Konsumsi Masyarakat (%)   | 56,11           | 55,05  | 54,03  | 52,96  | 44,35  | 49,21  |                 |  |
| 1.1.1.11  | Konsumsi Swasta (%)   | 0,96            | 0,94   | 0,91   | 0,90   | 0,83   | 0,89   |                 |  |
| 1.1.1.12. | Konsumsi Pemerintah (%)   | 11,99           | 11,82  | 11,05  | 11,48  | 11,08  | 12,91  |                 |  |
| 1.1.1.13. | Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)   | 18,48           | 18,11  | 10,04  | 17,46  | 13,46  | 18,43  |                 |  |
| 1.1.1.14. | Eksport (%)   | 20,67           | 23,02  | 22,07  | 31,98  | 16,57  | 34,28  |                 |  |
| 1.1.1.15. | Impor (%)   | 7,95            | 8,17   | 6,09   | 14,29  | 13,71  | 13,59  |                 |  |
| 1.1.1.16  | ICOR (dihitung berdasarkan pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok kapital)                          | 3,46            | 3,26   | 2,72   | 2,92   | 4,41   | 3,65   | 4,06            | (>)  |
|           | ICOR (berdasarkan BPS)  |                 | 3,60   | 3,60   | 3,51   | 3,60   | 3,63   |                 |  |

Sumber Data : evaluasi kinerja pemerintan daerah beberapa edisi

Pembangunan pertanian ke depan haruslah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan petani dengan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan petani, sehingga nilai tukarnya menjadi lebih baik. Peningkatan nilai tambah produk petani dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian.

Upaya lain yang harus mendapat perhatian besar pula adalah memperbaiki sistem tata niaga pertanian masyarakat terutama pada komoditi eksport yang selama ini menjadi tumpuan rumahtangga petani dalam memperoleh pendapatannya, seperti karet, kayu manis, coklat, gambir, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk tanaman palawija. Disamping peningkatan sistem tata niaga yang memberikan margin keuntungan lebih besar kepada rumahtangga tani, juga yang tidak kalah penting dapat dilakukan adalah peningkatan nilai tambah produk pertanian rumahtangga tani melalui agroindustri terutama agroprosesing pasca panen, dengan menurunkan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu ke tingkat rumahtangga tani. Produk pertanian yang dihasilkan di tingkat rumahtangga harus dalam bentuk barang setengah jadi bukan barang mentah, pengolahan atau prosesing bukan dilakukan oleh pedagang untuk mengup-grade mutu, tetapi rumahtangga tani. Sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi dan keuntungan yang diterima akan lebih besar pula. Peran pemerintah disini adalah bagaimana pasar bersaing dalam keadaan sempurna dalam sistem tata niaga pertanian ini, mencegah terjadinya monopsoni alami yang diperankan oleh pedagang perantara pada pasar-pasar tradisional.

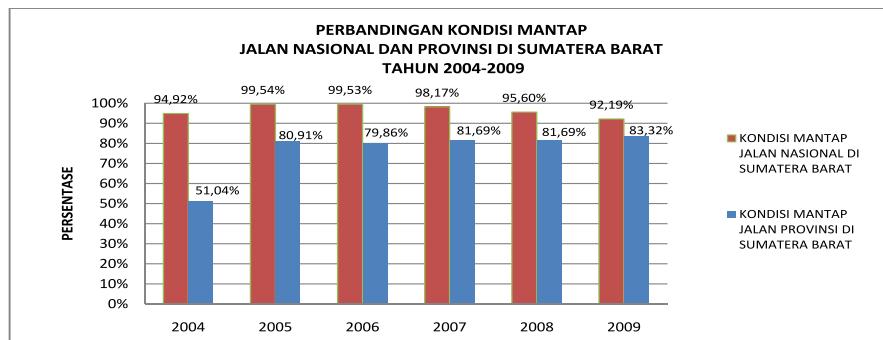
## **2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

### **1. Pekerjaan Umum**

Kejadian bencana (gempa, longsor, banjir dan abrasi) beruntun dari tahun 2005, 2007 dan 2009 yang menimpa Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Dampak yang demikian besar merusak berbagai prasarana fisik: Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. Seperti akibat bencana gempa tahun 2007, berdampak jalan-jalan yang retak dan tertutup longsor berada di Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam. Beberapa jaringan irigasi yang sebelumnya berfungsi dengan baik, mengalami kerusakan yang cukup berat. Kemudian kejadian gempa 30 September 2009, jalan yang berada di kawasan Silaing dekat lokasi air terjun hingga pasar Padang Panjang mengalami kerusakan atau tertutup karena longsor. Akses jalan lain menuju ke Padang seperti melalui Maninjau Kabupaten Agam pun juga tidak luput dari longsor, kondisi jalannya menjadi rusak. Begitu juga jalan lingkar sepanjang Danau Maninjau, yang tidak dapat dilalui karena tertutup longsor.

Seringnya terjadi bencana alam, yang mengakibatkan banyaknya badan jalan yang rusak, terutama pada jalan Provinsi dan jalan kabupaten, sedangkan dana untuk penanggulangan bencana alam sangat terbatas. Untuk tahun 2009, akibat gempa cukup banyak infrastruktur di Sumatera Barat mengalami kerusakan. Dari data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, tercatat jembatan yang mengalami rusak akibat gempa sebanyak 68 buah yang terdiri dari 21 buah rusak berat, 30 buah rusak sedang, serta 17 rusak ringan. Empat titik kerusakan jalan yang parah di wilayah Padang Pariaman dan satu titik di jalur Padang-Solok Kilometer 18 mendesak untuk diperbaiki. Kerusakan empat titik jalan di wilayah Padang Pariaman relatif akan mengganggu pengiriman bantuan dan aktivitas pemulihan serta tahap rekonstruksi di sejumlah wilayah pedalaman di kabupaten tersebut. Empat titik tersebut semuanya terletak di Kecamatan V Koto Timur, yang menuju ke arah Nagari Padang Alai serta Patamuan. Dua wilayah yang menjadi area terparah dampak gempa sebagian besar warganya masih dalam pengungsian. Di Jalur Padang-Solok di Km 18 juga mengkhawatirkan. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Kabupaten Solok serta kabupaten-kabupaten lain diwilayah tenggara Kota Padang.

Secara umum, persentase kondisi mantap dari jaringan jalan Nasional dan Provinsi di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut. Pada jalan Nasional dari total 1022,09 km terdapat 99,54 % dengan kondisi mantap tahun 2005, pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan kondisi mantap menjadi 99,53 % untuk tahun 2006; tetapi selanjutnya terjadi penurunan menjadi 98,17 tahun 2007; dan terus menurun menjadi 95,60 % tahun 2008; kondisinya terus menurun menjadi hanya 92,19 pada tahun 2009. Sedangkan untuk jalan provinsi dari 1153,87 km, dari tahun 2005 sampai tahun 2009 kecenderungannya meningkat, dimana kondisi mantap tahun 2005 adalah 80,91 %, hanya pada tahun 2006 menurun menjadi 79,86, sedangkan hingga tahun 2009 menjadi 83,32 % dengan kondisi mantap.



**Gambar 2.8**  
Perbandingan Kondisi Mantap Jalan Nasional dan Provinsi  
di Sumatera Barat Tahun 2004-2009

Walaupun kondisi mantap jalan nasional dan provinsi di Sumatera Barat cukup memadai, namun yang sangat penting selain itu adalah peningkatan kemampuan daya dukung ataupun kelas jalan yang mampu untuk mendukung peningkatan volume pergerakan orang dan volume serta beban dari barang yang akan melalui jaringan jalan yang ada.

Pada akhir tahun 2009, terdapat kondisi jembatan yang tidak mantap sebanyak 83 buah, dengan rincian kategori jembatan yang sempit sekitar 28 buah. Ditargetkan sampai tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi kondisi mantap sebanyak 31 buah. Selain dari pada itu saat ini, masih belum optimalnya kualitas pelayanan prasarana jalan, seperti masih banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi; keterbatasan akses dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran, outlet maupun ke perkotaan dan jalan lintas yang ada belum optimal mendukung pengembangan wilayah.

Permasalahan pembangunan bidang prasarana jalan dan jembatan di Sumatera Barat selama periode 2005-2009, antara lain: *rendahnya daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada*. Hal ini dapat dilihat dari kejadian runtuhnya jembatan di Pesisir Selatan karena dilalui oleh kendaraan berat yang melebihi kapasitas jembatan yang tersedia. Dimana saat ini kelas jalan maksimal hanya kelas IIA, dengan beban sumbu gandar yang diizinkan hanya 8 ton. Keadaan ini jelas tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan kendaraan yang ada serta peningkatan volume produksi serta volume pengangkutan yang muncul dari dunia industri ataupun dari pertanian dan perkebunan. Hasil atau volume produksi pertanian dan perkebunan seperti CPO dan semen yang mendominasi angkutan barang perkebunan di Sumatera Barat jelas perlu didukung oleh kemampuan dan kapasitas jalan yang memadai agar angkutan hasil produksi perkebunan dan industri semen dapat didistribusikan / disalurkan melalui jaringan jalan yang terdapat di Sumatera Barat.

Hal ini terjadi karena *rendahnya kesadaran dari pengguna jalan* (terutama pengusaha angkutan barang), dimana mereka memuat kendaraannya dengan beban yang melebihi dari beban yang diizinkan. Keadaan ini diperburuk oleh pengawasan yang rendah dan lemah dari satuan kerja yang ada di jembatan timbangan, terhadap beban kendaraan berat yang melalui jalan dan jembatan yang ada, sehingga banyak kendaraan pengangkut barang yang melebihi beban yang diizinkan pada jalan tersebut tetap beroperasi melaluiinya.

*Biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan semakin tinggi karena faktor topografis daerah yang bergelombang dan berbukit.* Kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan bencana yang bukan saja merusak infrastruktur tetapi juga memangsa korban jiwa. Dimulai pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2009, bencana gempa bumi yang

terjadi merusak infrastruktur yang ada di Sumatera Barat dengan nilai kerugian yang sangat besar. Untuk bidang prasarana jalan, jelas membutuhkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak dan tidak dapat perfungsi dengan baik.

*Belum terpadunya penanganan sistem jaringan jalan kabupaten, kota, Provinsi dan nasional, merupakan permasalahan tambahan yang perlu mendapat perhatian pihak penyelenggara jalan dan transportasi. Hal lain adalah lemahnya informasi kondisi jalan kabupaten. Banyak kabupaten yang belum memberikan data valid yang dilakukan dengan survey yang baik dan benar, banyak data yang diterbitkan berupa data perkiraan ataupun hanya dengan bentuk pengamatan tanpa menggunakan alat survey atau uji yang selayaknya.*

Potensi sumberdaya air yang ada di Sumatera Barat yang terdapat pada 9 Satuan Wilayah Sungai dengan potensi air permukaan sebesar  $80.2 \times 10^9 \text{ m}^3$  dan air tanah  $2,67 \times 10^9 \text{ m}^3$  dengan luas *catchment* area seluas 42.297,21 Ha, dengan 30 sungai-sungai besar dan 260 anak sungainya, serta 4 buah danau terdiri dari Danau Singkarak dengan luas 13.011 Ha, Danau Diatas dengan luas 3.150 Ha, Danau Dibawah dengan luas 1.400 Ha dan Danau Maninjau 9.950 ha, potensi ini dalam mendukung kebutuhan air masyarakat perkotaan, pedesaan, pertanian, industri secara adil dan merata belum terwujud. Di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, telah dilakukan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi. Selama rentang waktu 2005 sampai 2009, pemerintah telah melakukan peningkatan / perbaikan jaringan sepanjang 4.867 m; 9.093 m, 5.325 m; dan 6000 m. Sedangkan untuk pemeliharaan dilakukan terhadap jaringan yang memiliki luas 35.541 Ha, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.43  
Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi  
Tahun 2006-2010**

| No | Uraian                         | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |
|----|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                |        | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
| 1. | Peningkatan/perbaikan jaringan | m      | 4.867  | 9.093  | 5.325  | 6.000  | 9.356  |
| 2  | Pemeliharaan fungsi jaringan   | Ha     | 35.541 | 35.141 | 35.541 | 35.541 | 35.541 |

*Sumber Data : Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2010*

Terlihat bahwa terjadi peningkatan perbaikan terhadap jaringan irigasi pada tahun 2007. Hal ini terjadi karena banyaknya saluran irigasi yang rusak pada tahun tersebut karena dampak dari gempa yang terjadi pada tahun sebelumnya yang banyak merusak saluran irigasi, yang memerlukan perbaikan agar jaringan yang memberikan pelayanan pada lahan pertanian tetap berfungsi. Pembangunan jaringan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi sangat diperlukan oleh Sumatera Barat, karena provinsi ini masih tergantung pada bidang pertanian yang membutuhkan dukungan dari infrastruktur irigasi. Pernyataan ini tidak cukup hanya dengan pernyataan di atas kertas, tetapi harus diiringi dengan perhatian dan pendanaan yang cukup pada bidang ini agar hasil produksi pertanian dan perkebunan yang menjadi pendukung utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan lahan yang ada.

Untuk bangunan pengendali banjir, pengamanan abrasi pantai dan pengamanan daya rusak air selama periode 2006 sampai tahun 2009, telah cukup banyak pembangunan dibidang ini. Pembangunan bangunan pengendali banjir selama periode ini telah terbangun lebih kurang 21.021 m, dan untuk bangunan pengaman abrasi pantai sepanjang 1.300 m, sedangkan untuk bangunan pengaman daya rusak air dibangun untuk seluas 3.000 Ha. Pembangunan dibidang ini jelas membutuhkan dana yang sangat besar, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung pembangunan bidang lainnya.

**Tabel 2.44  
Pembangunan Pengendalian Banjir, Pengamanan Abrasi Pantai  
dan Pengamanan Daya Rusak Air Tahun 2006-2010**

| No | Uraian                       | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                              |        | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
| 1. | Bangunan Pengendalian Banjir | M      | 5.123 | 4.434 | 4.264 | 7.200 | 3.228 |
| 2. | Pengamanan Abrasi Pantai     | M      | 500   | 350   | 350   | 100   | 350   |
| 3. | Pengamanan Daya Rusak Air    | Ha     | 750   | 950   | 500   | 800   | 500   |

Sumber Data : Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2010

Permasalahan Sumber Daya Air, relatif juga cukup banyak, antara lain: *Tingkat Kerusakan DAS yang Makin Parah*. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh kerusakan daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung dimana tutupan lahan hutan berubah menjadi lahan terbuka yang mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan menyusutnya infiltrasi. Hal ini menyebabkan turunnya ketersediaan air permukaan dan ketersediaan air tanah. Ancaman keberlanjutan sumberdaya air juga disebabkan akibat terjadinya penggunaan air tanah yang tidak terkendali, baik penggunaan air permukaan maupun

penyedotan air bawah tanah. Kerusakan sumberdaya juga menyebabkan pencemaran air seperti yang terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melalui kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian yang menghasilkan banyak limbah.

*Kerusakan prasarana sumberdaya air akibat bencana alam.* Banyak prasarana irigasi yang rusak akibat bencana alam seperti rusaknya bendungan Tongar di Pasaman Barat dan rusaknya prasarana irigasi yang berupa saluran irigasi primer, sekunder dan tersier akibat banjir dan longsor. Permasalahan banjir dan galodo yang semakin meningkat. Pada musim penghujan, suatu hal yang harus di waspadai saat ini di Sumatera Barat adalah ancaman bencana banjir dan galodo. Pada tahun 2008, telah terjadi bencana galodo yang cukup besar di daerah Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Dampak bencana tersebut, menimbulkan rugikan material yang besar bagi masyarakat dan pemerintahan. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti Masjid, jembatan dan jalan penghubung. Sebelum itu telah terjadi pula bencana banjir di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, dengan meluapnya Batang Agam dan Sinamar, yang juga menimbulkan kerugian infrastruktur yang besar bagi masyarakat.

*Kurang optimalnya layanan jaringan irigasi* sehingga masih diperlukan pengembangan serta peningkatan fungsi jaringan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Setelah kejadian gempa yang sering melanda Sumatera Barat, yang terjadi pada tahun 2005, 2007 dan 2009, mengakibatkan kerusakan pada saluran irigasi sehingga distribusi air untuk lahan irigasi teknis, semi teknis menjadi terganggu. Terganggunya pelayanan irigasi ini mempengaruhi dan mengurangi hasil dan produksi dari lahan pertanian yang dialiri oleh jaringan irigasi tersebut. *Operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air yang masih rendah.* Kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan tidak hanya jaringan irigasi, namun juga kerusakan sungai akibat erosi dan pendangkalan sehingga mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan air irigasi dan air sungai.

Dampak perubahan iklim global yang semakin intens, menimbulkan gejala alam yang beragam. Gejala alam ini juga mempengaruhi Sumatera Barat, seperti gejala kenaikan level rata-rata permukaan laut, atau terjadinya fenomena alam badai dan arus gelombang laut yang besar. Sumatera Barat mempunyai panjang garis pantai daratan Sumatera Barat sekitar 541 km yang membujur dari Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah ini langsung berhadapan dengan Samudera Hindia yang mempunyai gelombang besar dan memberikan potensi untuk terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi daerah pantai dari abrasi juga telah dibangun bangunan pengaman pantai terutama di pantai Padang sedangkan pada daerah daerah rawan abrasi seperti di Sasak dan Air Bangis belum dapat ditangani.

*Masih lemahnya penyediaan, pengelolaan data dan informasi sumber daya air.* Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, dengan tersedianya data dan informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi sumberdaya air dirasa masih sangat kurang. Sehingga *koordinasi dan partisipasi masyarakat juga belum begitu kuat*. Peningkatan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan potensi konflik yang cenderung semakin besar. Hal ini perlu didukung dengan tersedianya peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumberdaya air.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air memerlukan dana yang sangat besar. Merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh dana yang dimaksudkan. Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempertahankan tingkat layanan dari infrastruktur yang ada dapat diberikan sangat perlu diprioritaskan agar tidak mengganggu kegiatan dan produksi bidang lainnya yang menghasilkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **2. Perhubungan**

Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan wilayah. Sistem transportasi suatu wilayah merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah sedemikian sehingga: terakomodasi mobilitas penduduk; dimungkinkan adanya pergerakan barang; dimungkinkannya akses ke semua wilayah. Dari peranannya, transportasi juga mendukung aspek lainnya yang bekerja secara bersama-sama dan saling keterkaitan dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Sektor transportasi berhubungan erat dengan sektor ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Kondisi saat ini pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan standar perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama transportasi jalan dan perkeretaapian. Begitu pula untuk pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang baru ataupun peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ada.

Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh bermacam jenis moda angkutan penumpang dan barang yang beroperasi. Pergerakan penumpang di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini didominasi oleh moda angkutan darat. Pengguna angkutan umum masih memiliki persentase terbesar yaitu kurang dari dua pertiga total pergerakan, diikuti pengguna kendaraan pribadi hampir sepertiga dan sisanya kendaraan tidak bermotor / becak. Dari berbagai jenis angkutan umum yang digunakan oleh pelaku perjalanan, yang mendominasi adalah bus sedang, sedangkan untuk kendaraan pribadi dinominasi oleh pengguna mini bus / van. Untuk perjalanan antar Provinsi yang berskala regional, angkutan moda antar pulau saat ini yang dominan adalah angkutan udara (dengan terminal Bandara Internasional Minangkabau). Untuk angkutan laut mendominasi angkutan barang menuju pulau Jawa ataupun untuk pengangkutan internasional, untuk angkutan laut saat ini dilayani oleh pelabuhan Teluk Bayur.

Hal yang perlu juga disikapi kedepannya adalah manajemen pengelolaan transportasi yang memungkinkan keterkaitan / integrasi antar moda maupun perkembangan angkutan multimoda yang memungkinkan pergerakan barang dan orang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

#### **A. Angkutan Jalan Raya**

Untuk angkutan darat jalan raya, Sumatera Barat memiliki empat daerah yang memiliki terminal dengan tipe A dan enam daerah yang memiliki terminal dengan tipe B. Dengan melihat data tersebut diatas dapat dilihat bahwa masih ada kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat yang belum dilengkapi dengan sarana terminal. Kota / Kabupaten yang belum memiliki sarana terminal adalah Kab Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai, Kab Solok Selatan, Kab. Agam, dan Kab. Padang Pariaman.

**Tabel 2.45  
Lokasi Terminal di Provinsi Sumatera Barat**

| Kota/Kabupaten                     | Tipe A  | Tipe B |
|------------------------------------|---|--------|
| Bukittinggi<br>Solok<br>Kiliranjao | Pariaman<br>Padang Panjang<br>Payakumbuh<br>Batusangkar<br>Sago (Painan)<br>Lubuk Sikaping<br>Sawah Lunto |        |

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Sumatera Barat, 2009*

Untuk wilayah pelayanan jaringan angkutan umum untuk masa mendatang pada dasarnya tidak berbeda jauh dari kondisi saat ini, karena wilayah pelayanan saat ini sudah cukup luas dan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Jaringan Trayek Angkutan Umum di Sumatera Barat dibagi atas Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Taksi dan Angkutan Sewa (travel). Pada masa datang selain pelayanan angkutan tersebut, juga akan dikembangkan Angkutan Antar Jemput.

Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi rendahnya mutu pelayanan jasa transportasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dari keselamatan, mobilitas, akses, dan keterjangkauan oleh masyarakat serta kurangnya perawatan. Angkutan penumpang umum yang beroperasi saat ini menghadapi kompetisi yang sangat gencar dari jenis angkutan penumpang liar. Didapati bahwa angkutan penumpang umum yang memiliki izin trayek, masih beroperasi dengan umur kendaraan yang relative tua, kurang memperhatikan aspek pelayanan terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan, serta masih kurangnya dalam hal frekuensi operasi dan waktu operasi.

Walaupun angkutan penumpang umum liar (tanpa izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan) juga mengabaikan aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan, namun mereka beroperasi menggunakan kendaraan minibus terbaru. Sehingga sebagian penumpang memilih angkutan penumpang tanpa izin ini untuk mereka gunakan karena relativ cepat. Ancaman terhadap keberlangsungan pelayanan angkutan penumpang umum yang berizin trayek demikian beratnya, sehingga sebagian telah berhenti beroperasi. Menghadapi hal ini, diperlukan suatu aturan dan penanganan yang tegas terhadap angkutan penumpang liar yang mengabaikan sisi legalitas operasinya.

Disamping keberadaan angkutan tidak resmi (travel liar), angkutan bus AKDP juga dibebani oleh permasalahan tidak optimalnya fungsi terminal, sehingga bus AKDP semakin ditinggalkan akibat kurangnya aksesibilitas ke dan dari terminal tersebut. Berbagai permasalahan tidak optimalnya terminal sebagai simpul transportasi bukan saja karena masalah teknis semata, namun juga dipengaruhi oleh perilaku pengguna jasa serta *law enforcement* yang penegakannya masih belum maksimal. Kedepan diharapkan dengan perencanaan dan komitmen Pemerintah dalam penataan jaringan transportasi, keberadaan terminal-terminal tersebut mampu berfungsi optimal untuk pelayanan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, baik untuk Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sehingga dapat mempelancar dan mempermudah perpindahan orang yang sesuai dengan fungsi terminal.

Tingginya angka kecelakaan dan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan. Pada tahun 2009, terdapat angka kematian sekitar 3,2

jiwa setiap harinya di Sumatera Barat. Setiap tahun angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut maupun harta benda semakin meningkat. Banyak penyebab hal tersebut, salah satu sebab kesadaran berlalu lintas yang rendah dari pengguna jalan dan kendaraan. Tingginya tingkat kerusakan jalan yang salah satunya diakibatkan operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan / kontrol pada jembatan timbang. Banyaknya pelanggaran penggunaan kendaraan dengan muatan yang melebihi kelas jalan. Hal ini mengakibatkan kerusakan parah badan jalan.

## B. Angkutan Udara

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura II, yang mengoperasikan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), terjadi peningkatan jumlah angkutan penumpang yang sangat signifikan. Pada tahun 2009, jumlah pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Frekuensi penerbangan di BIM pada tahun 2009 cukup tinggi dimana sudah melayani 10 konesitas dengan kota didalam dan luarnegeri. Operasional BIM ini memberikan kemudahan aksesibilitas dan peningkatan mobilitas bagi masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera Utara bagian selatan dalam pergerakannya. Pada tahun 2009, jumlah pesawat yang datang/berangkat tercatat 7,348 kali, dengan jumlah penumpang datang 915,012 orang. Kondisi terminal penumpang BIM saat ini pun sudah mencapai kapasitasnya yang hampir 1,000,000 penumpang/tahun, sehingga saat ini sedang dilaksanakan pembangunan / penambahan ruangan terminal untuk penumpang di bandara tersebut. Untuk cargo yang datang dan berangkat di BIM pada tahun 2009, untuk bongkar berjumlah 15.688 ton dan muat berjumlah 12,091 ton. Dari tahun 2007 hingga tahun 2009 terjadi peningkatan cargo bongkar rata-rata 500 ton/tahun, namun untuk cargo muat terjadi penurunan rata-rata 950 ton/tahunnya.

Peningkatan jumlah penerbangan dan penumpang tersebut, memerlukan pelayanan yang terorganisir dengan baik. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius pada tingkat pelayanan yang dapat diberikan pada penguna jasa angkutan umum. Untuk angkutan umum dari dan ke BIM saat ini dilayani oleh angkutan penumpang umum yang dilayani oleh PT. DAMRI dan PT.Tranex yang beroperasi tiap 30 menit, melayani dua jurusan dari/ke BIM dan kota Padang. Untuk saat ini layanan ini masih pada kondisi cukup memadai. Namun dengan akan terjadinya peningkatan dimasa datang diperlukan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat penguna angkutan darat dari dan ke BIM.

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai prasarana moda transportasi udara di Sumatera Barat memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat

baik kunjungan wisata, bisnis dan sosial. Disamping sebagai prasarana, BIM adalah simpul transportasi udara yang merupakan Bandara Pusat Penyebaran, sehingga aktifitas dan fasilitasnya harus dikembangkan di masa mendatang.

Disamping BIM, sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana khususnya di Kepulauan Mentawai, maka perlu penyiapan bandara *three in one* (untuk penumpang, pariwisata serta penanganan bencana alam), yaitu perlu disetiap pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan).

### C. Angkutan Laut

Angkutan laut di Sumatera Barat didukung oleh keberadaan pelabuhan laut yaitu 1 (satu) Pelabuhan Laut Internasional dan 5 (lima) Pelabuhan Laut Nasional. Pelabuhan Laut Internasional adalah Teluk Bayur, sedangkan Pelabuhan Laut Nasional adalah Air Bangis, Muara Padang, Muara Siberut, Sikakap dan Sioban. Keberadaan pelabuhan laut ini sangat mendukung angkutan barang menuju dan dari Sumatera Barat. Sedangkan angkutan penumpang mengalami kemunduran, dimana pada tahun 2007, penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut turun drastis, walaupun kapal yang berlabuh di Teluk Bayur mengalami kenaikan. Jumlah penumpang pada Pelabuhan Teluk Bayur turun sebesar 97,24 %. Sedangkan untuk arus muat barang di pelabuhan Teluk Bayur dapat dilihat pada Tabel 2.46.

**Tabel 2.46**  
**Angkutan Khusus Batu Bara dan Semen Melalui Pelabuhan Teluk Bayur**  
**Tahun 2005-2009 (Ton)**

| NO | Uraian              | TAHUN     |           |           |           |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                     | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| A  | <b>LUAR NEGERI</b>  |           |           |           |           |
| a. | Batu Bara           | 80.248    | 438.549   | 1.113.526 | 526.230   |
| b. | Semen               | 983.900   | 1.557.694 | 911.021   | 441.666   |
| c. | CPO                 | 1.205.681 | 1101145   | 1.356.776 | 1.552.981 |
| B  | <b>DALAM NEGERI</b> |           |           |           |           |
| a. | Batu Bara           | 16.063    | 14.079    | 80.093    | 53.440    |
| b. | Semen               | 2.434.628 | 1.826.003 | 2.480.120 | 2.615.630 |
| c. | CPO                 | 13.707    | 8.013     | 19.032    | 19.948    |

Sumber Data : PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur Padang

Terlihat terjadi peningkatan untuk angkutan semen setiap tahunnya. Perkembangan pelabuhan Teluk Bayur, sangat menarik untuk diamati, Karena pada saat ini jika dilihat dari keberadaan kapal yang bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur ini sudah mengalami antrian. Banyaknya kapal yang antri untuk membongkar barangnya di Teluk Bayur

relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, pertama bongkar muat barang yang sudah mencapai kapasitas kemampuan pelayanan pelabuhan pada saat tertentu, hal lain adalah karena keterbatasan kemampuan angkutan *feeder* darat untuk mengangkut barang yang akan dibawa, kemudian karena keterbatasan area penampungan barang (kapasitas terminal yang terbatas). Hal lain juga adalah karena kemampuan pengelolaan bongkar muat barang yang masih terbatas.

#### **D. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Keberadaan angkutan Sungai dan Danau di Provinsi Sumatera Barat masih terbatas. Jenis angkutan ini di dominasi oleh angkutan wisata, sedangkan untuk kebutuhan angkutan penumpang dan barang saat ini adalah angkutan dari Padang ke Mentawai. ASDP di Sumatera Barat, khususnya untuk kepulauan Mentawai memegang peranan yang sangat penting, menjadi angkutan primer (moda utama) bagi masyarakat kepulauan Mentawai menuju Sumatera Barat. Masyarakat kepulauan Mentawai sangat tergantung pada angkutan ini, Keberadaannya menjadi sangat penting karena keterbatasan pilihan dan ketersedian angkutan menuju dan dari Kepulauan Mentawai.

Keberadaan dan operasional angkutan ASDP Mentawai – Padang dipengaruhi oleh cuaca dan keadaan gelombang laut di perairan antara Sumatera dan kepulauan Mentawai menjadi penentu, dimana jika musim angin barat gelombang laut diperairan ini menjadi sangat besar, sehingga kapal feri yang beroperasi tidak mampu untuk mengarungi perairan ini. Sehingga transportasi antara Mentawai dan kota Padang menjadi terputus.

Permasalahan transportasi lainnya yang ada di Sumatera Barat khususnya adalah tuntutan terhadap masalah yang ditimbulkan oleh sarana dan prasarana transportasi, dimana permasalahannya sangat kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Lalu lintas dan angkutan semakin vital perananya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hal-hal yang berkaitan erat dengan transportasi menyinggung langsung kebutuhan masyarakat dan perekonomian kota. Persoalan-persoalan yang dikemukakan diatas, pada umumnya, meskipun dalam tingkat skala yang berbeda, hampir dijumpai diseluruh kota-kota. Masalah dampak lingkungan, keselamatan, dan pemborosan energi dibidang transportasi, akibat sistem lalu lintas dan tata guna lahan yang kurang efisien, perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan yang handal dan terjangkau oleh masyarakat secara luas.

Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pemberian sektor transportasi menjadi hal yang mendesak, untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Barat diperlukan peran serta masyarakat dan swasta, juga diperlukan tatanan transportasi

nasional dan wilayah yang dapat mewujudkan ketersediaan transportasi di daratan dan antar pulau di Kepulauan Mentawai secara lebih terpadu dan efisien, baik menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara yang bersinergis dengan pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor lainnya. Di dalam perencanaan transportasi memuat perancangan sarana (mobil, kereta api, pasawat, dll), perancangan prasarana (jalan, rel, pelabuhan, bandara dll) dan perancangan operasional dan pengendalian (lalu lintas, transit, jadwal, dll).

### **3. Energi**

Provinsi Sumatera Barat dengan luas 42.297,31 km<sup>2</sup> pada tahun 2010 mempunyai 4.845.998 Jiwa Penduduk. PDRB harga konstan tahun 2000 32.900.000 Rupiah dan PDRB per kapita 7.003,33 ribu Rupiah. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi sebesar 3,38 %. Sumatera Barat menghasilkan energi produksi energi primer berupa batubara dengan produksi 518.754 ton dan tenaga air sebesar 1.159.666 MWh Output.

Kebutuhan energi didominasi oleh sektor industri (42 %) dan sektor transportasi (41 %), kemudian disusul dengan sektor rumah tangga (16 %), sektor komersial (1 %), dan sektor lainnya (kurang dari 1 %). Kebutuhan energi pada sektor industri kurang dari tiga kali lipat kebutuhan sektor rumah tangga. Kebutuhan energi pada sektor komersial bahkan hanya 6 % dari kebutuhan energi pada sektor rumah tangga. Mengingat bahwa sektor rumah tangga adalah sektor non produktif, dengan demikian sebagian porsi kebutuhan energi belum digunakan untuk kegiatan produktif.

Di sektor industri, kebutuhan energi sebagian besar dicatut oleh batubara (85 %), kemudian oleh listrik (10 %), minyak bensin (4,5 %), dan sebagian kecil lainnya minyak diesel dan minyak bakar. Sedangkan, pada sektor transportasi, kebutuhan energi sebagian besar berupa minyak bensin (58 %), kemudian minyak diesel (35 %), avtur (5 %), dan sebagian kecil *residual fuel oil*. Pada sektor komersial, energi final yang digunakan sebagian besar adalah minyak diesel (87 %) dan listrik (12,8 %) serta dalam proporsi yang sangat kecil minyak tanah. Di sektor rumah tangga, kebutuhan energi dipenuhi oleh minyak tanah (58 %), listrik (35 %), dan sisanya adalah LPG. Rumah tangga juga menggunakan kayu bakar, namun data tentang jumlah penggunaan kayu bakar belum tersedia.

#### **A. Energi dan Ekonomi**

Pemakaian energi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 menurut jenis energy meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 5.872.406,16 SBM, Liquid Petroleum Gas (LPG) sebesar 102.539,86 SBM, Batubara sebesar 3.406.747,33 SBM, dan energi Listrik sebesar 989.904,52 SBM

Konsumsi energi final per jenis di Provinsi Sumatra Barat tahun 2005-2009 Secara total konsumsi energi final meningkat dari 10,548 juta SBM pada tahun 2005 menjadi 11.086 ribu pada tahun 2009. Secara rata-rata konsumsi energi final di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan 5,10 % per tahun. Jenis energi BBM yang dikonsumsi terdiri avgas, avtur, premium, minyak tanah dan minyak bakar. Sedangkan berdasarkan Konsumsi energi final per sektor di Provinsi Sumatera Barat tahun pada tahun 2009 konsumsi energi pada Sektor Transportasi sebesar 4.537.540 SBM, sektor industri sebesar 4.610.900 SBM, sektor rumah tangga sebesar 1.754.270 SBM, komersial sebesar 117.655 SBM dan sektor lainnya sebesar 65.711 SBM.

## B. Batubara

Batubara yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tersebar di beberapa wilayah kabupaten / kota, yaitu Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Total sumber daya batubara yang ada pada 7 (tujuh) kabupaten / kota di atas berjumlah 951 juta ton, sedangkan total cadangan mencapai 948 juta ton.

Selama 5 tahun terakhir, penyediaan batubara dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, seperti: PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin di Kota Sawahlunto, PT. AIC di Kabupaten Sijunjung dan PT. Karbindo di Kabupaten Sijunjung. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan tambang lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

**Tabel 2.47  
Pemakaian Batubara di Sumatera Barat Tahun 2005-2009**

| Pemakai Batu Bara      | Jumlah Pemakaian Batubara (Ton) |                  |                  |                |                  |
|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                        | 2005                            | 2006             | 2007             | 2008           | 2009             |
| PT. Semen Padang       | 678.123,37                      | 846.353          | 703.118          | 908.714        | 800.688          |
| PLTU Ombilin (PT. PLN) | 547.904,58                      | 520.967          | 543.505          | 407.628        | 456.044,1        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.226.027,95</b>             | <b>1.367.320</b> | <b>1.246.623</b> | <b>934.967</b> | <b>1.256.732</b> |

*Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

Batubara yang diproduksi Sumatera Barat sebagian besar untuk kebutuhan energi di PT. Semen Padang dan kebutuhan PLTU Ombilin, sedangkan sebagian lagi diekspor. Disamping itu, ada sebagian batubara untuk PT. Semen Padang dan PLTU Ombilin yang dipasok dari Propinsi Jambi dan Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan karena produksi batubara yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh PT. Semen Padang dan PLTU Ombilin belum mencukupi. Tabel 2.47 menunjukkan grafik pemakaian batubara di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir.

## C. Energi Listrik

**Tabel 2.48  
Produksi Pembangkit Listrik Tahun 2005 – 2009**

| Produksi (MWh)/ Jenis Produksi | Periode             |                     |                  |                  |                    |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                | 2005                | 2006                | 2007             | 2008             | 2009               |
| PLTD                           | 26.126,10           | 48.857,48           | 40.927,26        | 30.695           | -                  |
| PLTA                           | 1.051.908,57        | 1.003.452,65        | 1.159.666        | 869.749          | 826.907,9          |
| PLTG                           | 54.871,39           | 123.605             | 54.127           | 40.595           | 123.660,1          |
| PLTU                           | 1.087.910,00        | 1.031.730           | 1.068.915        | 801.686          | 927.621,6          |
| <b>JUMLAH</b>                  | <b>2.220.816,06</b> | <b>2.207.654,13</b> | <b>2.323.635</b> | <b>1.742.725</b> | <b>1.878.189,6</b> |

*Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

Tabel 2.48 menunjukkan produksi energi listrik untuk pembangkit-pembangkit listrik PLN yang ada di wilayah Provinsi Sumatra Barat antara tahun 2005-2009. Produksi energi listrik selama 5 tahun terakhir menurun dari 2.220.816,06 MWh pada tahun 2005 menjadi 1.878.189,6 pada tahun 2009. Kontribusi terbesar dalam produksi energi listrik ini adalah PLTU dan terkecil PLTD. Pada tahun 2009, produksi PLTU memberikan kontribusi 49,38 % dari total energi listrik yang diproduksi, sedangkan PLTA, PLTG dan PLTD masing-masing 44,03 %, 6,5 % dan 0%.

Pemakaian energi listrik di Provinsi Sumatra Barat selama 5 tahun terakhir diperlihatkan oleh Gambar 2.49. Total pemakaian energi listrik meningkat dari 1.580.350 GWh pada tahun 2005 menjadi 1.846.064 GWh tahun 2009, dengan persentase pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 3,36 %. Pada tahun 2009, pemakaian energi listrik pada sektor rumah tangga mencapai 43,75 % dari total seluruh pemakaian, sedangkan sektor industri merupakan pemakai energi listrik terbesar kedua mencapai 34,85 %, dan sektor bisnis & publik mengkonsumsi energi listrik masing-masing 12,44 % dan 8,96 %.

**Tabel 2.49  
Pemakaian Energi Listrik Tahun 2005 – 2009**

| Sektor            | Pemakaian Energi Listrik (Gwh) |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 2005                           | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             |
| Rumah Tangga      | 669.198                        | 696.012          | 751.519          | 501.013          | 807.671          |
| Unit Usaha/Bisnis | 147.456                        | 147.960          | 193.411          | 128.941          | 229.674          |
| Industri          | 634.344                        | 732.204          | 665.314          | 443.543          | 643.387          |
| Umum (Publik)     | 129.352                        | 164.788          | 166.124          | 110.749          | 165.330          |
| <b>JUMLAH</b>     | <b>1.580.350</b>               | <b>1.740.964</b> | <b>1.776.368</b> | <b>1.184.246</b> | <b>1.846.064</b> |

*Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Tahun 2009*

Indikator kinerja makro bidang energi listrik. Terlihat bahwa daerah cakupan pelayanan listrik dari tahun 2005-2009 meningkat dan mencapai 90,1 % dengan rasio elektrifikasi hampir 70%.

**Tabel 2.50  
Indikator Kinerja Makro Bidang Energi Listrik Tahun 2005-2009**

| No | Indikator Kinerja                | Satuan | Indikator kinerja makro RPJMD 2006-2009 bidang energi |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|----------------------------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |                                  |        | 2005  |       | 2006  |       | 2007  |       | 2008  |       | 2009  |  |
|    |                                  |        | R   | T     | R     | T     | R     | T     | R     | T     | R     |  |
| 1  | Daerah Cakupan Pelayanan Listrik | %      | 80,00   | 83,60 | 88,94 | 85,20 | 89,23 | 86,80 | 89,60 | 88,40 | 90,10 |  |
| 2  | Rasio Elektrifikasi              | %      | 51,50   | 52,83 | 53,98 | 54,64 | 57,94 | 56,46 | 71,50 | 58,29 | 69,92 |  |

Sumber Data : evaluasi kinerja pembangunan daerah beberapa edisi  
Keterangan: T=Target; R=Realisasi

#### **D. Potensi Energi Terbarukan**

Pengembangan energi terbarukan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 dan Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 yang menempatkan energi alternatif, khususnya bahan bakar nabati sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan pengembangan energi nasional. Untuk mengatasi kekurangan bahan bakar minyak bumi, pemerintah telah menggalakkan peluang pencarian alternatif bahan bakar berbasis bahan baku yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan memberikan jaminan suplai bahan baku.

Sumber energi terbarukan tersebut meliputi tenaga air, panas bumi, biomassa, energi surya dan biofuel.

#### **E. Tenaga Air**

Potensi mikro / piko-hidro tersebar di Kabupaten-kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pariaman, Agam, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sejumlah kecil potensi juga ditemui di Kabupaten 50 Kota dan Sijunjung. Potensi mikro / piko-hidro diperkirakan mencapai 127 MW. Distribusi potensi PLTMH berdasarkan kabupaten. Potensi terbesar terletak di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 39 % dari potensi yang telah dikaji. Potensi yang relatif besar juga terdapat di Kabupaten Agam dan Solok dengan masing-masing sebesar 32 % dan 26 %. Potensi yang kecil terdapat di Kabupaten 50 Kota, Pasaman Barat, dan Tanah Datar. Pada Tabel 2.50 diperlihatkan jumlah unit serta kapasitas terpasang dari PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Sebagian besar unit dipasang di Kabupaten-kabupaten Agam, Pasaman, dan Solok dengan persentase kapasitas lebih dari 80 % dari semua unit yang terpasang.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang PLTMH**

| Kabupaten                 | Jumlah (Unit) | Variasi Daya(kVA) | Total Daya(kVA) |
|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Kabupaten Agam            | 27            | 3 – 60            | 317             |
| Kabupaten 50 Kota         | 8             | 3 – 10            | 51              |
| Kabupaten Pasaman         | 30            | 2 – 60            | 280             |
| Kabupaten Solok           | 14            | 3 – 60            | 338             |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 8             | 2 – 40            | 85              |
| Kabupaten Sijunjung       | 2             | 5 – 30            | 35              |
| Kabupaten Tanah Datar     | 4             | 3 – 15            | 26              |
| <b>Total</b>              | <b>93</b>     | <b>2 – 60</b>     | <b>1132</b>     |

Sumber : *Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

## F. Panas Bumi

Kebanyakan, potensi energi panas bumi yang utama tersebar di Kabupaten Pasaman (termasuk Pasaman Barat) dan Solok (dan Solok Selatan). Potensi yang lebih kecil terdapat di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, dan Tanah Datar. Potensi energi panas bumi di Sumatra Barat diperkirakan mencapai 1598 MWe. Distribusi potensi panas bumi berdasarkan kabupaten. Dari gambar tersebut terlihat bahwa potensi terbesar terdapat di Kabupaten Solok, yaitu sebesar 55 %, dan yang kedua adalah Kabupaten Pasaman dengan potensi sebesar 36 %.

## G. Biomassa

Secara garis besar, biomassa terdiri dari bahan bakar berbasis kayu (batang kayu, ranting, serbuk gergaji, dll.), hasil samping dan limbah pengolahan hasil pertanian / perkebunan, limbah peternakan, serta produk turunannya, seperti arang tempurung. Sampah rumah tangga kadang-kadang juga dipandang sebagai biomassa. Sumatera Barat memiliki potensi energi dari biomassa, khususnya yang berasal dari limbah atau hasil samping pertanian dan perkebunan, di samping dalam porsi yang lebih kecil dari limbah peternakan.

**Tabel 2.52**  
**Potensi Energi Biomassa**

| Komoditi     | Produksi<br>(kilo ton)* | Residu        | RPR   | Kadar air<br>(%) | Jumlah<br>residu<br>(kilo ton) | Nilai kalor<br>(MJ/kg) | Energi (TJ) |
|--------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Kelapa sawit | 3960.24                 | Tandan kosong | 0.23  | 55               | 910.86                         | 8.16                   | 7,688       |
|              |                         | Sabut         | 0.11  | 40               | 435.63                         | 11.34                  | 2,964       |
|              |                         | Cangkang      | 0.06  | 10               | 237.61                         | 18.83                  | 4,027       |
| Kelapa       | 75.33                   | Sabut         | 0.419 | 10.3             | 31.56                          | 18.62                  | 527         |
|              |                         | Tempurung     | 0.12  | 8.7              | 9.04                           | 18.09                  | 149         |

| Komoditi | Produksi (kilo ton)* | Residu     | RPR   | Kadar air (%) | Jumlah residu (kilo ton) | Nilai kalor (MJ/kg) | Energi (TJ) |
|----------|----------------------|------------|-------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Padi     | 1982.49              | Sekam      | 0.267 | 12.37         | 529.32                   | 19.33               | 8,966       |
|          |                      | Jerami     | 1.757 | 12.71         | 3,483.23                 | 16.02               | 48,709      |
| Tebu     | 17.67                | Bagasse    | 0.29  | 49            | 5.12                     | 18.1                | 47          |
|          |                      | Top/leaves | 0.3   | 10            | 5.30                     | 17.41               | 83          |
| Kopi     | 24.65                | Husk       | 2.1   | 15            | 51.77                    | 12.38               | 545         |
| Ubi kayu | 125.96               | Batang     | 0.062 | 15            | 7.81                     | 17.5                | 116         |
| Jagung   | 211.91               | Tongkol    | 0.273 | 7.53          | 57.85                    | 16.28               | 871         |
|          |                      | Batang     | 2     | 15            | 423.83                   | 19.66               | 7,083       |

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan

## H. Energi Surya

Secara kasar, dari peta penerimaan energi surya dunia, Sumatera Barat terletak di wilayah dengan tingkat penyinaran matahari yang berkisar 4 – 5 kWh/m<sup>2</sup>/hari. Pemanfaatan energi surya dapat dilakukan dengan menggunakan sel surya (*photovoltaic*) maupun secara termal. Beberapa unit sel surya telah dipasang sejak tahun 1995. Secara keseluruhan, sampai tahun 2009 sebanyak 3.366 unit yang sudah terpasang. Berada di jalur khatulistiwa, Sumatera Barat menerima radiasi energi radiasi surya yang relatif merata sepanjang tahun. Namun demikian, besaran radiasi yang diterima rata-rata hanya sekitar 334 W/m<sup>2</sup>.

## I. Biofuel

Sebagai biofuel, biodiesel dan bioetanol merupakan sebuah alternatif bahan bakar diesel yang dihasilkan dari sumber terbarukan (*renewable resources*) seperti minyak nabati atau lemak hewan. Secara umum kedua bahan bakar tersebut ramah lingkungan, pembakarannya bersih, *biodegradable*, mudah dikemas dan disimpan, serta dapat diperbaharui.

Di Sumatera Barat pada 2006 terdapat tanaman kelapa 90.663 ha dan produksi buah 79.046 ton. Dari potensi buah kelapa, dapat diperoleh sekitar 7,24 % minyak biodiesel yang berarti sekitar 5.720,7 ton biodisel atau sekitar 6.350 kiloliter per tahunnya. Dengan asumsi 5 % dari buah kelapa dapat diperoleh bioetanol air kelapa, maka dapat diperoleh sekitar 4.000 ton bioetanol (sekitar 4.400 kiloliter) per tahunnya.

Biodiesel dapat juga dibuat dari CPO yang banyak dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit Sumatera Barat.

### **J. Jenis Energi Terbarukan Lainnya**

Beberapa jenis pembangkit listrik yang belum tergarap di Sumatera Barat (energi baru dan terbarukan) dapat dilihat pada Tabel 2.53

**Tabel 2.53**  
**Jenis Pembangkit Listrik Yang Belum Tergarap Di Sumatera Barat**  
**(Energi Baru Dan Terbarukan)**

| No | JENIS PEMBANGKIT                       | LOKASI  |
|----|--|---|
| 1  | Pembangkit Listrik Tenaga Angin        | Sepanjang Pantai Barat                                    |
| 2  | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi   | Kab. Solok Selatan dan Kab. Pasaman                       |
| 3  | Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai, dan Kota Padang |
| 4  | Pembangkit Listrik Tenaga Ombak        | Sepanjang Pantai Barat                                    |

*Sumber Data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2009*

Sesuai Kyoto Protocol, pengurangan emisi karbon Jepang sebesar 6 % sampai tahun 2012. Jepang menawarkan bentuk kerjasama saling menguntungkan untuk mengurangi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan Indonesia dengan menggunakan dana dan teknologi dari Jepang. Keunggulan: Selain menghasilkan listrik juga menghasilkan produk penyulingan air laut menjadi air tawar. Perkembangan OTEC di Sumatera Barat mesti dilakukan dengan pengajuan permohonan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Jepang melalui kedutaan besar pemerintah Jepang di Indonesia

Kesulitan mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) baik oleh karena sistem distribusinya maupun oleh karena relatif mahalnya harga BBM juga dialami oleh nelayan Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu di sisi lain di lingkungan di sekitar nelayan terdapat potensi tanaman kelapa yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan Biodiesel yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternative untuk kapal nelayan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya fasilitasi pembuatan biodiesel dari minyak yang berasal dari tanaman kelapa, melalui teknologi dan sistem yang dapat dilakukan oleh industri pada skala rumah tangga, atau skala kecil.

### **4. Penataan Ruang**

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat berlaku sampai dengan tahun 2005, namun dengan ditetapkannya undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan tahun perencanaan 2009-2029.

Sesuai dengan Undang-undang 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan sebagai kawasan strategis dari segi lingkungan hidup, karena selain kondisi topografi yang berbukit dan bergunung juga beberapa sungai besar hulunya berada di Sumatera Barat.

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat mencakup struktur dan pola ruang. Berdasarkan Struktur Ruang Sumatera Barat yang berisi sistem perkotaan, dan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan komunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sistem energi serta sistem jaringan prasarana lingkungan. Berdasarkan struktur ruang RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029, sistem perkotaan di Sumatera Barat terdiri dari 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Padang, 5 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Bukittinggi, Sawahlunto, Pariaman, Solok dan Muara Siberut. Disamping itu diusulkan beberapa kota akan menjadi pusat kegiatan wilayah yaitu Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan dan Simpang Empat. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebanyak 12 Kota, yaitu Painan, Padang Panjang, Lubuk Sikaping, Sari Lamak, Batusangkar, Padang Aro, Tuapejat, Lubuk Basung, Muaro Sijunjung, Lubuk Alung, Aro Suka dan Parik Malintang.

Berdasarkan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat kawasan lindung seluas 35,86 % (516.593 Ha) dari luas provinsi Sumbar dan kawasan budidaya seluas 64,14 % (2.713.137 Ha) dari luas provinsi Sumatera Barat. Kawasan lindung meliputi kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Lindung Lainnya. Kawasan Budidaya meliputi Kawasan hutan produksi, Kawasan hutan rakyat, Kawasan perkebunan, Kawasan pertanian pangan, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan permukiman dan Kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2008, Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Taman Nasional Kerinci Seblat, Stasiun Pengamat Dirgantara Bukit Koto Tabang, dan kawasan pulau kecil terluar (pulau Sibaru-Baru dan pulau Sinyaunyau Kab. Kep. Mentawai). Berdasarkan RTRW Sumbar 2009-2029 Provinsi Sumbar memiliki 14 kawasan strategis yang terdiri atas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ITBM (Indarung-Teluk Bayur-Bungus-Mandeh), kawasan industri PIP, kawasan poros barat timur (jalur Padang – batas Riau), kawasan Tapus Rao-Mapat Tunggul, Sungai Rumbai, Lunang Silaut, Pangkalan Koto Baru, Kamang Baru, Abai-Sangir-Taluak Aia Putiah; kawasan strategi sosial

budaya pada Kabupaten Tanah Datar dan kawasan startegis fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kembar dan Danau Talang.

## 5. Lingkungan Hidup

Sumatera Barat memiliki luas lahan 4,2 juta Ha. dengan kontur bergelombang, terdiri atas wilayah perbukitan dan pegunungan 2,2 juta Ha. (52,19 %), wilayah daratan yang dapat dihuni hanya 13,31 % (0,5 juta Ha). Dari luasan tersebut sekitar 60 % diantaranya (2,6 juta Ha.) adalah kawasan hutan. Dengan keadaan tersebut sangat menyulitkan bagi Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan. Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk, kondisi perbukitan dan pegunungan tersebut juga memposisikan wilayah ini pada daerah rawan bencana dan rawan gempa.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana baik pemukiman, industri, transportasi serta penduduk tentunya membutuhkan sumber daya alam yang lebih banyak, serta menghasilkan bahan sisa yang lebih banyak. Hal ini telah mendorong terjadinya penurunan kualitas lingkungan, baik itu sumber daya air, udara, ketersedian lahan yang sekaligus mempengaruhi aspek sosiologi masyarakat. Isu lingkungan yang terdapat dalam konteks kekinian adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktifitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alami bumi.

Alam Sumatera Barat juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, antara lain; a) keanekaragaman ekosistem (suaka alam, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata), b) keanekaragaman flora dan fauna (termasuk yang dilindungi), dan c) keanekaragaman genetik.

Keberadaan kuantitas air di Sumatera Barat, dapat dilihat dari perbedaan debit air antara musim kemarau dan musim hujan. Perbedaan debit yang sangat kontras terutama terjadi pada sungai utama di daerah perkotaan. Hal ini menandakan daerah tangkapan air (*catchments area*) dan daerah aliran sungai (DAS) telah mengalami kerusakan. Ketersediaan sumberdaya air di Sumatera Barat didukung oleh sebanyak 506 sungai besar dan kecil, serta 238 danau dan telaga.

Walaupun Sumatera Barat tidak menjadi sentra industri skala besar, isu terkait kualitas udara juga dapat dikontribusikan oleh dampak pemanfaatan lahan untuk pembukaan perkebunan dan dampak transportasi. Kualitas udara di Sumatera Barat umumnya masih baik pada saat keadaan normal, karena tidak ada kebakaran hutan yang signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan

industri pabrik kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang potensial ke depannya. Namun yang penting juga untuk diperhatikan adalah perubahan fungsi lahan berkaitan dengan kontribusinya dalam penyediaan karbon.

Kerusakan hutan bakau pada daerah pesisir juga perlu menjadi perhatian sebagai akibat dari laju erosi dan pembalakan yang tinggi. Kerusakan hutan bakau bisa dilihat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Pada kabupaten tersebut terlihat bahwa keberadaan hutan bakau semakin terancam dengan kategori rusak cukup parah sekitar 70-80 %. Disamping itu, kondisi terumbu karang juga mengalami kerusakan yang parah, yang terjadi sebagai akibat penggunaan sistem penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bom, potas maupun terumbu karang yang diambil secara langsung untuk diperdagangkan.

Fenomena lainnya di daerah pesisir yang perlu di cermati adalah potensi terjadinya abrasi pantai. Hal ini terutama pada daerah-daerah pesisir yang tekanan pada sempadan pantainya tinggi. Pemanfaatan sempadan dan daerah berbahaya sepanjang daerah pesisir sampai saat ini juga masih terjadi pada berbagai daerah, seperti halnya pemukiman nelayan yang sampai ke bibir pantai. Abrasi paling parah saat ini terlihat di kota Padang. Selain itu, yang perlu juga menjadi perhatian penting adalah kondisi terkait dengan lingkungan pemukiman, yang pada beberapa daerah belum memiliki sanitasi lingkungan yang memadai, terutama di kota-kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, seperti Padang dan Pariaman.

Sesuai dengan kondisinya Sumatera Barat memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi, dengan curah hujan rata-rata 4.000 mm/th. Kondisi alam yang penuh perbukitan ditambah dengan curah hujan yang tinggi menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah rawan dengan bencana alam, dan gempa.

**Tabel 2.54**  
**Tingkat Kekritisannya Lahan Tiap Wilayah Administrasi Pemerintah**

| No | Kab/Kota        | Kritis (Ha) | Sangat Kritis (Ha) | Jumlah (Ha) |
|----|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|    | Kabupaten       |             |                    |             |
| 1  | Agam            | 6.182       | 1.064              | 7.246       |
| 2  | Lima Puluh Kota | 105.591     | 6.508              | 112.099     |
| 3  | Padang Pariaman | 2.539       | -                  | 2.539       |
| 4  | Pasaman         | 59.078      | 10.567             | 69.645      |
| 5  | Pasaman Barat   | 162         | -                  | 162         |
| 6  | Pesisir Selatan | 8.169       | 3                  | 8.172       |
| 7  | Solok           | 28.719      | 8.898              | 37.617      |
| 8  | Solok Selatan   | 174         | -                  | 174         |

| No | Kab/Kota       | Kritis (Ha)    | Sangat Kritis (Ha) | Jumlah (Ha)    |
|----|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 9  | Tanah Datar    | 27.210         | 5.943              | 33.153         |
| 10 | Sijunjung      | 73.923         | 1.230              | 75.153         |
| 11 | Dharmasraya    | 1.589          | -                  | 1.589          |
| 12 | Kep. Mentawai  | -              | -                  | -              |
|    | Kota           |                |                    |                |
| 13 | Bukittinggi    | 104            | -                  | 104            |
| 14 | Padang         | 2.292          | -                  | 2.292          |
| 15 | Padang Panjang | 326            | 31                 | 357            |
| 16 | Sawahlunto     | 14.966         | 3.320              | 18.286         |
| 17 | Payakumbuh     | 586            | 854                | 1.440          |
| 18 | Solok          | 1.829          | 529                | 2.358          |
| 19 | Pariaman       | -              | -                  | -              |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>333.439</b> | <b>38.947</b>      | <b>372.386</b> |

*Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*

## 6. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam, seni dan budaya tradisional. Sebagai Negara yang memiliki keindahan alam dan keragaman budaya, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup populer di dunia. Kunjungan wisata ke Indonesia maupun ke daerah Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi tujuan wisata utama di pulau Sumatera untuk semua kategori wisatawan. Dari data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat, terungkap bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan nusantara ke Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, tahun 2007 jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Sumatera Barat sebanyak 4.843.822 orang dan wisatawan manca negara 27.978 orang. Pada tahun 2009 kunjungan wisatawan nusantara meningkat menjadi 7.412.910 orang dan wisatawan manca negara naik menjadi 47.6233 orang.

Walaupun daerah Sumatera Barat dilanda gempa bumi yang membawa kerusakan pada infrastruktur dan bangunan pada tahun 2009, namun infrastruktur pariwisata masih berfungsi dengan baik. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 267 hotel yang beroperasi dengan jumlah kamar 4.42.7 buah dan 8.827 tempat tidur. Tingkat hunian hotel juga masih cukup tinggi berkisar 35 – 50 % secara rata-rata yang mengindikasikan bahwa daerah Sumatera Barat masih banyak

dikunjungi baik untuk tujuan wisata maupun social dan kekeluargaan. Tercatat juga sebanyak 231 obyek wisata alam, 401 obyek wisata budaya dan 147 obyek wisata khusus yang masih beroperasi dengan baik di berbagai wilayah Sumatera Barat.

#### **2.4.3 Investasi Daerah**

Salah satu faktor utama yang menentukan daya saing daerah adalah kondisi iklim investasi yang terdapat di daerah bersangkutan. Alasannya jelas karena kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam menarik investor dari luar daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi iklim investasi daerah bersangkutan. Sedangkan peningkatan kegiatan investasi tersebut akan sangat menentukan kemampuan daerah bersangkutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, kondisi iklim investasi akan sangat menentukan kemampuan daerah bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat secara keseluruhan dimasa mendatang.

Peningkatan iklim investasi diperlukan untuk memperbaiki kondisi dan situasi sehingga investor merasa nyaman untuk melakukan penanaman modal di daerah ini. Iklim investasi tersebut mencakup berbagai kondisi yang dapat mendukung kegiatan investasi didaerah seperti tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang baik, prosedur perizinan yang relatif singkat dan mempunyai kepastian hukum, aturan perpajakan, kondisi korupsi dan pungutan liar dan lain-lainnya. Belum optimalnya kinerja investasi di Provinsi Sumatera Barat saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga disebabkan karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

**Tabel 2.55  
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) (Rp. Juta)  
Tahun 2006-2010**

| No                              | Institusi               | Tahun        |               |               |               |               |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |                         | 2006         | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          |
| <b>Atas Dasar Harga Berlaku</b> |                         |              |               |               |               |               |
| 1                               | Pemerintahan Umum       | 1.163.483,52 | 1.292.035,09  | 1.646.375,81  | 1.922.880,41  | 2.333.361,42  |
| 2                               | BUMN/D dan Swasta       | 4.162.865,50 | 4.558.840,08  | 5.292.647,29  | 6.017.754,62  | 7.869.747,51  |
| 3                               | Rumah Tangga            | 4.081.735,06 | 4.602.786,27  | 5.674.688,21  | 6.236.635,38  | 6.830.765,32  |
|                                 | Provinsi Sumatera Barat | 9.408.084,08 | 10.453.661,43 | 12.613.711,31 | 14.177.270,42 | 17.033.874,25 |
| <b>Atas Dasar Harga Konstan</b> |                         |              |               |               |               |               |
| 1                               | Pemerintahan Umum       | 731.770,51   | 765.968,46    | 804.208,00    | 865.907,29    | 1.000.359,97  |
| 2                               | BUMN/D dan Swasta       | 2.379.069,07 | 2.406.327,17  | 2.555.757,52  | 2.744.200,22  | 3.303.896,61  |
| 3                               | Rumah Tangga            | 2.493.806,29 | 2.651.977,83  | 2.771.924,63  | 2.825.765,51  | 2.856.839,59  |
|                                 | Provinsi Sumatera Barat | 5.604.645,29 | 5.824.273,46  | 6.131.890,15  | 6.435.873,02  | 7.161.096,17  |

*Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*

Sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang masih akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah kecenderungan menurunnya aliran investasi dari negara-negara maju. Namun demikian, prospek untuk berinvestasi di Indonesia cukup baik. UNCTAD (2009) dalam *World Investment Prospect* 2009-2011 melaporkan bahwa prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke delapan atau cukup prospektif, terutama karena besarnya pasar dan ketersediaan sumber daya alam. Meskipun demikian, ke depan keunggulan berupa besarnya pasar dan sumberdaya alam yang dimiliki perlu didukung dengan pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi para investor.

Permasalahan lain yang menyebabkan masih rendahnya pertumbuhan realisasi PMDN dan PMA di Sumatera Barat disebabkan antara lain oleh potensi sumber alam dan kemampuan ekonomi daerah yang relatif rendah, jumlah dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain-lain masih kurang, adanya masalah/konflik tanah ulayat yang tidak kunjung selesai, dan kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Salahsatusumberutamapertumbuhanekonomiyangberkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan proyek investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh suatu daerah. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

Perkembangan investasi di Sumatera Barat selama periode 2004 – 2009 terlihat cukup menggembirakan terutama realisasi PMDN. Investasi PMA terlihat menurun secara konsisten baik dari sisi persetujuan rencana penanaman modal maupun realisasinya. Rendahnya kinerja investasi asing berkaitan juga dengan krisis ekonomi global dan adanya isu negative tentang keamanan dan stabilitas politik selama masa pemilu dan pilkada di daerah Sumatera Barat.

Data lebih rinci mengenai perkembangan investasi PMDN dan PMA serta data penyerapan tenaga kerja sebagai hasil dari kegiatan penanaman modal dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.56**  
**Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA/PMDN**  
**di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009 (US \$ 000)**

| Tahun | PMA         |           | PMDN         |            |
|-------|-------------|-----------|--------------|------------|
|       | Persetujuan | Realisasi | Persetujuan  | Realisasi  |
| 2004  | 18.443,95   | 29.532,64 | 712.333,44   | 631.733,95 |
| 2005  | 160.545,37  | 85.568,91 | 358.420,30   | 607.061,37 |
| 2006  | 38.527,41   | 87.423,70 | 1.113.992,50 | 234.856,62 |
| 2007  | 153.489,56  | 7.028,76  | 2.667.814,88 | 58.511,10  |
| 2008  | 207.738,30  | 20.626,32 | 731.089,78   | 608.917,89 |
| 2009  | 23.315,39   | 20.994,06 | 647.680,83   | 761.617,90 |

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa rata-rata jumlah tenaga kerja per perusahaan PMDN adalah 256 orang, 1.149 orang dan, 656 orang masing-masing tahun 2007, 2008, dan 2009. Sementara itu PMA menyerap tenaga kerja sebanyak 163 orang, 115 orang dan 490 orang untuk periode yang sama. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daya serap perusahaan PMA dan PMDN terhadap tenaga kerja relatif kecil karena kebanyakan berupa perusahaan yang menggunakan teknologi dan padat modal.

Realisasi investasi asing atau PMA di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pertumbuhannya sangat fluktuatif karena sangat berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri, gejolak politik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Gambaran yang hampir sama juga terlihat dalam perkembangan realisasi PMA di daerah Sumatera Barat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang jauh berbeda. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 pertumbuhan realisasi PMA di tingkat nasional menunjukkan angka sekitar 23,39 % per tahun sedangkan untuk daerah Sumatera Barat pertumbuhannya hanya berkisar 0,50 %.

Capaian pertumbuhan realisasi PMA di Sumatera Barat jauh lebih rendah dari kinerja nasional di bidang investasi. Penyebabnya antara lain; potensi sumber alam dan ekonomi daerah relatif rendah, infrastruktur kurang memadai, pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain-lainnya masih kurang, adanya masalah / konflik tanah ulayat yang tidak kunjung selesai.

Walaupun angka pertumbuhan realisasi investasi PMA di daerah Sumatera Barat relatif kecil, namun kontribusinya bagi pembangunan ekonomi daerah cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan

jumlah badan usaha yang berstatus PMA, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam berbagai proyek investasi PMA tersebut.

Realisasi investasi domestik atau PMDN menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan yang juga berfluktuasi. Hal itu berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri, gejolak politik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan baik domestik maupun internasional. Gambaran yang hampir sama juga terlihat dalam perkembangan realisasi PMDN di daerah Sumatera Barat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 pertumbuhan realisasi PMDN di tingkat nasional menunjukkan angka sekitar 32,70 % per tahun sedangkan untuk daerah Sumatera Barat pertumbuhannya hanya berkisar 2,01 %. Rincian angka pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat dalam Tabel 2.57.

**Tabel 2.57  
Pertumbuhan PMA dan PMDN di Indonesia dan Sumatera Barat  
Tahun 2006-2008**

| % Pertumbuhan Realisasi PMA/PMDN | 2004   | 2005  | 2006   | 2007  | 2008   | Rata-Rata (%) |
|----------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| <b>PMA</b>                       |        |       |        |       |        |               |
| Capaian Nasional                 | 25,82  | 99,39 | -32,79 | 68,91 | -41,62 | 23,39         |
| Capaian Sum. Barat               | 1,90   | 0,02  | -0,92  | 1,93  | -      | 0,50          |
|                                  |        |       |        |       |        |               |
| <b>PMDN</b>                      |        |       |        |       |        |               |
| Capaian Nasional                 | -15,04 | 94,90 | -32,76 | 72,60 | 43,80  | 32,70         |
| Capaian Sum. Barat               | -0,04  | -0,61 | -0,75  | 9,41  | -      | 2,01          |

*Sumber Data : Bappenas RI, Laporan EKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

## **BAB III**

### **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **SERTA KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

##### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pasal 5 ayat 2 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2006–2010 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,02 %. Pertumbuhan sebesar ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana perimbangan, yaitu 19,34 % berbanding 9,07 %. Pada tahun 2006 jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh adalah Rp 494.930 juta dan meningkat menjadi Rp 1.004.001 juta pada tahun 2010. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,34 %. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,07 %, yaitu meningkat dari Rp 554.232 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 784.476 juta pada tahun 2010.

Akibat dari pertumbuhan sumber dana perimbangan lebih rendah daripada pendapatan asli daerah, maka komposisi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat pun mengalami perubahan yang cukup mendasar, dimana pada tahun 2006 komposisi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih rendah daripada dana perimbangan, yaitu Rp 494.930 juta (46,75 %) berbanding Rp 554.232 juta (52,35 %). Sebaliknya, pada tahun 2010, komposisinya sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih besar daripada dana perimbangan, yaitu Rp 1.004.001 juta (52,34 %) berbanding Rp 784.476 juta (40,90 %). Hal ini berarti, bahwa pada tahun 2010 ketergantungan Provinsi Sumatera Barat terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Komposisi sumber pendapatan daerah seperti dijelaskan di atas sedikit menguntungkan untuk pengembangan pembangunan daerah yang lebih baik. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pemerintah pusat pada masa datang pun tidak dapat diharapkan banyak. Karena, pemerintah pusat pada akhir-akhir ini juga mengalami kesulitan keuangan. Hal ini, dapat dilihat dengan peningkatan penerimaan dana alokasi umum (DAU) pada banyak daerah hanya berkisar 5 % saja. Untuk itu, pada masa datang harus diupayakan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling besar berasal dari pajak daerah, yang dalam kurun waktu 2006 – 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 17,08 %. Sekalipun pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun 2008, namun pada tahun 2010 pemerintah daerah membuat kebijakan sehubungan dengan pajak kendaraan yang mengakibatkan penerimaan dari pajak daerah kembali mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah terjadi pada tahun 2010. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah pendapatan ini adalah dampak Gempa 30 September 2009 dan perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga sumber penerimaan daerah dari RSUD ini dicatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah. Namun ke depan, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat harus lebih mengupayakan meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang didukung pula dengan adanya perubahan tentang undang-undang yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu dari UU No. 34 tahun 2000 menjadi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penggalian sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Untuk itu, perubahan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah harus sesegera mungkin ditindak lanjuti dengan penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan atau retribusi daerah. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah. Sedangkan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah. Apalagi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dilihat dari segi jenis objek pajak maupun tarif pajak. Misalkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenakan tarif pajak progresif bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 buah kendaraan bermotor.

Perkembangan penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber dana perimbangan lainnya. Penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan dari Rp 71.453 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 105.852 juta pada tahun 2010. Hal ini berarti terjadi peningkatan rata-rata per tahun sebesar 10,32. Sebaliknya penerimaan dari dana bagi hasil bukan pajak menurun dari Rp 5.750 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 2.590 juta pada tahun 2010. Sedangkan peningkatan penerimaan dana alokasi umum sedikit lebih baik, karena masih menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 477.029 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 661.617 juta pada tahun 2010, atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,52 %.

Sekalipun daerah tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan ini, namun upaya meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan pemerintah dari penerimaan pajak atupun bukan pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan alokasi dana perimbangan bagi daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat lihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 - tahun 2010**

| No | Uraian  | TA 2006          | TA 2007          | TA 2008          | TA 2009          | TA 2010          | Pertumbuhan Rata-Rata (%) |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|    |   | (Rp'Juta)        |                  |                  |                  |                  |                           |
|    | <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>1.058.664</b> | <b>1.281.400</b> | <b>1.727.424</b> | <b>2.026.241</b> | <b>1.918.052</b> | <b>16,02</b>              |
| A  | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>494.930</b>   | <b>571.608</b>   | <b>794.300</b>   | <b>739.747</b>   | <b>1.004.001</b> | <b>19,34</b>              |
| 1  | Pajak daerah                                      | 409.140          | 479.453          | 663.379          | 619.270          | 768.761          | 17,08                     |
| 2  | Retribusi daerah                                  | 10.786           | 32.386           | 54.374           | 51.932           | 28.267           | 27,24                     |
| 3  | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 25.574           | 29.889           | 36.481           | 39.582           | 46.814           | 16,32                     |
| 4  | Lain-Lain PAD yang sah                            | 49.430           | 29.879           | 40.066           | 28.963           | 160.159          | 34,17                     |
| B  | <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>554.232</b>   | <b>633.866</b>   | <b>744.202</b>   | <b>789.840</b>   | <b>784.476</b>   | <b>9,07</b>               |
| 1  | Dana bagi hasil pajak                             | 71.453           | 84.268           | 85.943           | 86.636           | 105.852          | 10,32                     |
| 2  | Dana bagi hasil bukan pajak                       | 5.750            | 3.265            | 1.981            | 7.081            | 2.590            | (18,07)                   |
| 3  | Dana alokasi umum                                 | 477.029          | 546.332          | 631.711          | 648.943          | 661.617          | 8,52                      |
| 4  | Dana alokasi khusus                               | -                | -                | 24.567           | 47.179           | 14.415           |                           |
| C  | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>       | <b>9.503</b>     | <b>75.927</b>    | <b>188.921</b>   | <b>496.654</b>   | <b>129.575</b>   | <b>92,16</b>              |
| 1  | Hibah   |                  | 2.857            | 188.921          | 495.775          | 80.678           |                           |
| 2  | Dana darurat                                      |                  | 53.000           |                  |                  |                  |                           |
| 3  | Dana penyesuaian dan otonomi khusus               |                  | 20.070           |                  | 879              | 48.898           |                           |

*Sumber : DPKD Provinsi*

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Berdasarkan Neraca Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 terlihat bahwa komposisi aset tetap lebih jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 88,57 %, 5,16 %, dan 6,24 %, sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Namun demikian, komposisi aset tetap sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010, yaitu menjadi 85,90 %, dan komposisi aset lancar naik menjadi 7,22 %. Perubahan komposisi aset ini disebabkan karena adanya peningkatan kewajiban bagi hasil kota/kabupaten yang belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun sehingga jumlah Kas di Kasda (bagian dari aset lancar) mengalami peningkatan dengan jumlah yang signifikan.

Aset yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitu dari Rp 4.838.858 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 6.463.738 juta pada tahun 2010, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,51 %. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang diperoleh dari tahun ke tahun, kemudian peningkatan investasi jangka panjang, dan peningkatan aset tetap. Namun pada sampai saat ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Dana Cadangan dan Kewajiban Jangka Panjang. Hal ini antara lain disebabkan sulitnya prosedur dan izin untuk melakukan pinjaman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan belum adanya rencana kerja yang membutuhkan dana besar sehingga perlu dicadangkan pada beberapa tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana**  
**Provinsi Sumatera Barat, tahun 2006– 2010**

| URAIAN                              | TA 2006          | TA 2007          | TA 2008          | TA 2009          | TA 2010          | Pertumbuhan Rata-Rata (%) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                                     | (Rp'Juta)        |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>ASET</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Aktiva Lancar                       | 249.485          | 288.486          | 396.706          | 788.531          | 466.519          | 16,94                     |
| Investasi Jangka Panjang            | 301.831          | 290.263          | 340.572          | 368.791          | 401.302          | 7,38                      |
| Aset Tetap                          | 4.285.753        | 4.542.084        | 4.773.401        | 5.038.199        | 5.552.048        | 6,69                      |
| Dana Cadangan                       | -                | -                | -                | -                | -                |                           |
| Aset Lainnya                        | 1.789            | 1.570            | 23.378           | 74.763           | 43.870           | 122,52                    |
| <b>JUMLAH ASET</b>                  | <b>4.838.859</b> | <b>5.122.403</b> | <b>5.534.057</b> | <b>6.270.283</b> | <b>6.463.739</b> | <b>7,51</b>               |
| <b>KEWAJIBAN dan EKUITAS</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>KEWAJIBAN</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Kewajiban Jangka Pendek             | 24.605           | 30.104           | 78.018           | 60.056           | 60.738           | 25,35                     |
| Kewajiban Jangka Panjang            | -                | -                | -                | -                | -                |                           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>             | <b>24.605</b>    | <b>30.104</b>    | <b>78.018</b>    | <b>60.056</b>    | <b>60.738</b>    | <b>25,35</b>              |
| <b>EKUITAS DANA</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Ekuitas Dana Lancar                 | 224.880          | 258.382          | 318.688          | 728.474          | 405.782          | 15,90                     |
| Ekuitas Dana Cadangan               | -                | -                | -                | -                | -                |                           |
| <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>          | <b>4.814.253</b> | <b>5.092.299</b> | <b>5.456.039</b> | <b>6.210.227</b> | <b>6.403.001</b> | <b>7,39</b>               |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | <b>4.838.859</b> | <b>5.122.403</b> | <b>5.534.057</b> | <b>6.270.283</b> | <b>6.463.739</b> | <b>7,51</b>               |

Sumber : DPKD Provinsi

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga sama untuk pertumbuhan jumlah dari kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan ekuitas dana per tahun adalah 7,39 % dan pertumbuhan kewajiban adalah 25,35 %. Namun karena komposisi ekuitas dana jauh lebih besar (lebih kurang 99 %) dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban yang lebih besar tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas dana. Tabel 3.2 menyajikan jumlah dan rata-rata aset, kewajiban, dan ekuitas dana Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memahami kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan analisis ratio keuangan, meliputi rasio lancar, kas rasio, rasio total hutang terhadap aset, dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dan kas rasio kedua-duanya dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset atau aset bersih digunakan.

Baik rasio lancar maupun kas rasio menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu lebih 1.000 %. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar lebih dari 10 kali lipat, dan atau jumlah hutang yang relative sangat kecil. Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dana dan atau total aset, yaitu berkisar hanya 1 % saja. Artinya, hutang yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat hanya 1 % dari jumlah aset atau ekuitas dana-nya. Dengan demikian, ke empat rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang sangat kuat (baik) dalam melunasi seluruh hutangnya.Tabel 3.3 berikut menyajikan rasio keuangan Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3.3**  
**Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2007 – 2010(Persen)**

| NO | Uraian                                 | 2006     | 2007   | 2008   | 2009     | 2010   |
|----|--|----------|--------|--------|----------|--------|
| 1  | Rasio lancar (current ratio)           | 1.013,95 | 958,28 | 508,48 | 1.312,99 | 768,09 |
| 2  | Rasio quick (quick ratio)              | 880,92   | 856,30 | 426,97 | 1.165,43 | 486,06 |
| 3  | Rasio total hutang terhadap total aset | 0,51     | 0,59   | 1,41   | 0,96     | 0,94   |
| 4  | Rasio hutang terhadap modal            | 0,51     | 0,59   | 1,43   | 0,97     | 0,95   |

Sumber : DPKD Provinsi

### **3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

#### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Pengklasifikasian belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait dengan metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang mulai diterapkan dalam era otonomi daerah merupakan manifestasi untuk meningkatkan dan mempercepat efektivitas proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran daripada menitikberatkan alokasi biaya atau *input* semata dan mengabaikan keluaran yang akan dicapai. **Output** (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan. **Input** (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau

jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang dan jasa yang dihasilkan.

Pada tahun 2007 dan tahun 2008, jumlah belanja tidak langsung sedikit lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Akan tetapi, pada tahun 2009 dan tahun 2010 jumlah belanja langsung sedikit lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Pada tahun 2007 jumlah belanja langsung Provinsi Sumatera Barat lebih besar dibandingkan dengan tidak langsung, yaitu Rp 668.009 juta berbanding Rp 577.432 juta. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah belanja tidak langsung adalah Rp 1.033.035 juta dan belanja langsung Rp 1.208.010 juta.

Pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata per tahun adalah 15,64 %, yaitu dari Rp 668.009 pada tahun 2007 menjadi Rp 1.033.035 juta pada tahun 2010. Analisis berdasarkan elemen pembentuk belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung untuk belanja pegawai jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung lainnya; seperti belanja sosial, belanja tak terduga, dan belanja hibah. Pada tahun 2007 jumlah belanja pegawai berjumlah Rp 308.430 juta dan meningkat menjadi Rp 452.839 juta pada tahun 2009. Di samping peningkatan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat, peningkatan belanja pegawai ini juga disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah, khususnya antara tahun 2007 dengan 2008.

Provinsi Sumatera Barat juga memberikan bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kota/kabupaten yang jumlah juga relatif besar, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban daerah provinsi. Pada tahun 2007, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berjumlah Rp 300.526 juta dan meningkat menjadi Rp 463.591 juta pada tahun 2009, Sedangkan belanja tidak langsung lainnya memiliki jumlah dan proporsi yang relatif kecil. Antara tahun 2007 sampai tahun 2010, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengeluarkan belanja bunga karena sampai saat ini belum memiliki hutang jangka panjang.

Dalam kurun waktu 2007-2010 pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu 27,90 % berbanding 15,64 %. Pertumbuhan komponen belanja langsung yang terbesar terjadi untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa, sedangkan belanja langsung untuk pegawai mengalami penurunan yang cukup berarti. Dengan demikian, kebijakan belanja Provinsi Sumatera Barat telah perubahan ke arah yang lebih baik, yang menekankan belanja untuk meningkatkan kinerja dan mempunyai dampak pembangunan ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk memperbaiki komposisi belanja kearah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memperbesar jumlah belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai mengalami peningkatan yang relatif lebih rendah, bahkan untuk belanja langsung; pegawai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Tabel 3.4 berikut memperlihatkan jumlah dan pertumbuhan realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – tahun 2010.

**Tabel 3.4  
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja  
Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 - 2010**

| No       | Uraian                        | TA 2007          | TA 2008          | TA 2009          | TA 2010          | Pertumbuhan Rata-Rata (%) |
|----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|          |                               | (Rp.Juta)        |                  |                  |                  |                           |
| <b>A</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b> | <b>668.009</b>   | <b>906.348</b>   | <b>769.823</b>   | <b>1.033.035</b> | <b>15,64</b>              |
| 1        | Belanja Pegawai               | 308.430          | 367.199          | 396.240          | 452.839          | 13,66                     |
| 2        | Belanja Bunga                 | -                | -                | -                | -                |                           |
| 3        | Belanja Subsidi               | -                | -                | -                | -                |                           |
| 4        | Belanja Hibah                 | -                | 24.628           | 16.760           | 57.091           |                           |
| 5        | Belanja Bantuan Sosial        | 54.987           | 35.067           | 29.514           | 55.848           | 0,52                      |
| 6        | Belanja Bagi Hasil            | 177.336          | 229.538          | 266.352          | 290.666          | 17,91                     |
| 7        | Belanja Bantuan Keuangan      | 123.189          | 249.799          | 58.531           | 172.925          | 11,97                     |
| 8        | Belanja Tidak Terduga         | 4.066            | 119              | 2.425            | 3.667            | (3,39)                    |
| <b>B</b> | <b>Belanja Langsung</b>       | <b>577.432</b>   | <b>735.008</b>   | <b>887.581</b>   | <b>1.208.010</b> | <b>27,90</b>              |
| 1        | Belanja Pegawai               | 76.255           | 59.173           | 66.105           | 79.095           | 1,23                      |
| 2        | Belanja Barang dan Jasa       | 241.916          | 313.732          | 359.444          | 545.847          | 31,16                     |
| 3        | Belanja Modal                 | 259.261          | 362.103          | 462.032          | 583.068          | 31,02                     |
|          | <b>Total Belanja</b>          | <b>1.245.441</b> | <b>1.641.357</b> | <b>1.657.404</b> | <b>2.241.045</b> | <b>21,63</b>              |

Sumber : DPKD Provinsi

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2007-2010 yang relatif baik sebagaimana di jelaskan di atas, kebijakan belanja aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur, dimana pada tahun 2007 berjumlah Rp 619.186 dan meningkat menjadi Rp.1.312.699

pada tahun 2010. Peningkatan yang lebih besar untuk belanja aparatur ini terutama adalah untuk belanja langsung; yang berhubungan untuk peningkatan kinerja aparatur, seperti belanja modal. Peningkatan belanja modal adalah 31,02 % sedangkan peningkatan belanja pegawai baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung adalah sebesar 15 % atau kurang.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2010**

| No       | Uraian   | 2007           | 2008           | 2009             | 2010             | Pertumbuhan Rata-Rata (%) |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|
|          |  | (Rp' Juta)     |                |                  |                  |                           |
| <b>A</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>308.430</b> | <b>367.199</b> | <b>404.300</b>   | <b>460.067</b>   | <b>14,26</b>              |
| 1        | Belanja Gaji dan Tunjangan   | 218.127        | 245.710        | 307.148          | 327.188          | 14,47                     |
| 2        | Belanja Tambahan Penghasilan   | 76.873         | 108.355        | 63.640           | 91.902           | 6,13                      |
| 3        | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH        | 13.430         | 13.134         | 13.480           | 12.455           | (2,48)                    |
| 4        | Belanja pemungutan Pajak Daerah  |                |                | 20.031           | 28.522           |                           |
| <b>B</b> | <b>Belanja Langsung</b>  | <b>310.756</b> | <b>421.276</b> | <b>693.588</b>   | <b>852.632</b>   | <b>40,00</b>              |
| 1        | Belanja Pegawai  | 51.495         | 59.173         | 66.105           | 79.095           | 15,38                     |
| 2        | Belanja Honorarium PNS   | n.a            | n.a            | 31.010           | 46.948           | 51,39                     |
| 3        | Belanja Uang Lembur  | n.a            | n.a            | 13.965           | 15.558           | 11,40                     |
| 4        | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | n.a            | n.a            | 9.494            | 6.626            | (30,21)                   |
| 5        | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS                | n.a            | n.a            | 23.610           | 26.154           | 10,78                     |
| 6        | Belanja premi asuransi kesehatan   | n.a            | n.a            | 8.417            | 4.567            | (45,74)                   |
| 7        | Belanja makanan dan minuman pegawai  | n.a            | n.a            | 31.919           | 38.578           | 20,86                     |
| 8        | Belanja pakaian dinas dan atributnya**)  | n.a            | n.a            | 3.300            | 3.300            | -                         |
| 9        | Belanja Pakaian Kerja, Khusus dan Hari-hari Tertentu                           | n.a            | n.a            | 1.221            | 1.209            | (0,98)                    |
| 10       | Belanja perjalanan dinas   | n.a            | n.a            | 87.299           | 109.862          | 25,85                     |
| 11       | Belanja perjalanan pindah tugas  | n.a            | n.a            | 190              | 173              | (8,87)                    |
| 12       | Belanja Pemulangan Pegawai   | n.a            | n.a            | Na               | na               | Na                        |
| 13       | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) | 259.261        | 362.103        | 462.032          | 583.068          | 31,02                     |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>619.186</b> | <b>788.475</b> | <b>1.097.888</b> | <b>1.312.699</b> | <b>28,46</b>              |

Sumber : DPKD Provinsi

Berdasarkan hasil pengolahan data perbandingan antara belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan total belanja dan pembiayaan, terjadi sedikit fluktuasi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur antara tahun 2007-2010. Pada tahun 2007, proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur adalah

49,72 %, dan turun menjadi 48,04 % pada tahun 2008. Tetapi, pada tahun 2009 proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur meningkat kembali dan jauh lebih tinggi yaitu menjadi 66,24 % dan 58,58 % pada tahun 2010. Hal ini terutama terjadi karena adanya peningkatan belanja tidak langsung akibat peningkatan gaji dan jumlah pegawai serta peningkatan belanja modal untuk aparatur yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya karena Gempa 30 september 2009 maka jumlah belanja yang dapat direalisasi pada tahun 2009 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2008. Akibatnya, komposisi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur mengalami peningkatan. Tabel 3.6 berikut menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

**Tabel 3.6  
Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2010**

| No | Uraian  | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur(Rp juta) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp juta) | Prosentase |
|----|---------|---|--|------------|
| 1  | TA 2007 | 619.186   | 1.245.441  | 49,72      |
| 2  | TA 2008 | 788.475   | 1.641.357  | 48,04      |
| 3  | TA 2009 | 1.097.888   | 1.657.404  | 66,24      |
| 4  | TA 2010 | 1.312.699   | 2.241.045  | 58,58      |

Sumber : DPKD Provinsi

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk mengerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat relatif terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus dapat meningkatkan **Kualitas Belanja**, baik dari segi ketepatan kegiatan yang harus didanai untuk mencapai sasaran tertentu maupun menerapkan konsep *value for money* dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dicapai melalui tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu menyusun perencanaan yang berkualitas dan penyusunan analisis standar belanja untuk kegiatan rutin serta menyusun standar harga yang lebih baik dan akurat.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman

daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan belanja, termasuk pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus yang terjadi pada tahun 2007 relatif rendah, yaitu sebesar Rp 30.722 juta dan meningkat menjadi Rp 70.585 juta pada tahun 2008, dan menjadi Rp 360.590 juta pada tahun 2009. Surplus yang sangat besar pada tahun 2009 tidak hanya disebabkan tertundanya dan atau terkendalanya pelaksanaan banyak kegiatan karena Gempa 30 September 2009 tetapi juga disebabkan adanya penerimaan pajak daerah yang lebih besar daripada yang dianggarkan.

Akibat lebih lanjut dari surplus yang terjadi pada 3 tahun terakhir tersebut dan ditambah dengan dana SILPA pada tahun 2006 sebesar Rp 212.783 juta, maka jumlah SILPA yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2010 berjumlah Rp 674.679. Akumulasi Surplus yang cukup besar tersebut telah dibelanjakan pada tahun 2010, sehingga jumlah belanja pada tahun 2010 lebih dari Rp 2,2 Triliun. Tabel 3.7 berikut memperlihatkan perkembangan Surplus Riil dan SILPA pada masing-masing tahun.

**Tabel 3.7  
Surplus (Defisit) Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2007 – 2010 (Rp juta)**

| NO  | Uraian  | TA 2007   | TA 2008   | TA 2009   | TA 2010   |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Realisasi Pendapatan Daerah                                       | 1.281.400 | 1.727.424 | 2.026.241 | 1.918.052 |
|     | Dikurangi realisasi:  |           |           |           |           |
| 2   | Belanja Daerah  | 1.245.441 | 1.641.357 | 1.657.404 | 2.241.045 |
| 3   | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                                     | 5.236     | 15.482    | 8.248     | 19.884    |
| A   | Surplus (Defisit) riil  | 30.722    | 70.585    | 360.590   | (342.877) |
|     | Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:                     |           |           |           |           |
| 4   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya | 212.783   | 243.505   | 314.090   | 674.679   |
| 5   | Pencairan Dana Cadangan   | -         | -         | -         | -         |
| 6   | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan                  | -         | -         | -         | -         |
| 7   | Penerimaan Pinjaman Daerah  | -         | -         | -         | -         |
| 8   | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | -         | -         | -         | -         |
| 9   | Penerimaan Piutang Daerah   | -         | -         | -         | -         |
| B   | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah                      | 212.783   | 243.505   | 314.090   | 674.679   |
| A-B | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan                    | 243.505   | 314.090   | 674.679   | 331.803   |

*Sumber : DPKD Provinsi*

### **3.3. KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama**

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja Dewan dan Kepala Daerah, belanja bagi hasil, serta belanja langsung; Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja jasa kantor.

Karena terjadinya peningkatan belanja yang cukup signifikan antara tahun 2007 dengan tahun 2008 akibat kenaikan gaji, maka analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama akan dilakukan berdasarkan pertumbuhan belanja yang terjadi antara tahun 2008-2010. Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp 579.236 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp 747.080 pada tahun 2010. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,57 %. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat minimal harus menyediakan dana sebesar jumlah tersebut di atas karena ikatan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

**Tabel 3.8**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Prov. Sumbar, tahun 2008– 2010**

| No       | Uraian   | 2008           | 2009           | 2010           | Pertumbuhan rata-rata (%) |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|          |  | (Rp)           |                |                |                           |
| <b>A</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>488.382</b> | <b>586.981</b> | <b>630.310</b> | <b>13,60</b>              |
| 1        | Belanja Gaji dan Tunjangan   | 245.710        | 307.148        | 327.188        | 15,40                     |
| 2        | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH                            | 13.134         | 13.480         | 12.455         | (2,62)                    |
| 3        | Belanja Bunga  |                | -              |                |                           |
| 4        | Belanja bagi hasil   | 229.538        | 266.352        | 290.666        | 12,53                     |
| <b>B</b> | <b>Belanja Langsung</b>  | <b>90.854</b>  | <b>98.794</b>  | <b>116.770</b> | <b>13,37</b>              |
| 1        | Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.   | 14.209         | 20.938         | 28.774         | 42,30                     |
| 2        | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  |                | 9.494          | 6.626          | (30,21)                   |
| 3        | Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) | 76.644         | 68.362         | 81.369         | 3,04                      |
| 4        | Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)                              | -              | -              | -              | -                         |
| 5        | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)          | -              | -              | -              | -                         |
| <b>C</b> | <b>Pembentukan Pengeluaran</b>   | -              | -              | -              | -                         |
| 1        | Pembentukan Dana Cadangan  | -              | -              | -              | -                         |
| 2        | Pembayaran pokok utang   | -              | -              | -              | -                         |
|          | <b>TOTAL (A+B+C)</b>   | <b>579.236</b> | <b>685.775</b> | <b>747.080</b> | <b>13,57</b>              |

Sumber : DPKD Provinsi

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Karena evaluasi capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2011-2012 menunjukkan kondisi yang lebih baik, maka diperlukan revisi terhadap proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Pada awalnya perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006-2010 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak dan retribusi daerah dan perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Perubahan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui UU No. 28 tahun 2009, dengan mengizinkan pengenaan tarif

pajak progresif sehingga diperkirakan akan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi pengalihan wewenang pengelolaan pajak air tanah dari propinsi ke kota/kabupaten akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu, diperkirakan pajak daerah akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011, tetapi setelah itu hanya akan mengalami sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebelumnya, yaitu 5 % per tahun.

Retribusi daerah menunjukkan prestasi yang cukup baik dalam periode 2006 -2010, yaitu dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,08 %. Prestasi seperti ini harus dipertahankan pada masa datang. Namun karena adanya perubahan status Rumah Sakit Umum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka terjadi perubahan klasifikasi pendapatan, yaitu dari retribusi daerah menjadi lain-lain PAD yang sah.

Secara umum, penerimaan retribusi daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. Dengan demikian, kalau pun kemungkinan akan terjadi fluktuasi sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian daerah, namun secara rata-rata diperkirakan akan mampu mempertahankan prestasinya pada tingkat pertumbuhan 9,14 % per tahun sebagaimana pertumbuhan yang terjadi antara tahun 2009 dengan tahun 2010.

Pembentahan manajemen pengelolaan dari usaha-usaha milik daerah yang ada saat ini diperkirakan masih mampu memberikan kontribusi yang memadai. Jika pada tahun 2006 sampai tahun 2010 terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 16,32 %, tetapi antara tahun 2008 dengan tahun 2009 hanya sebesar 8,50 %. Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi sampai tahun 2015 didasarkan perkiraan pesimis dengan pertumbuhan sama besarnya dengan tahun 2008-2009, yaitu 8,50 % pertahun. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan bahwa penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ini dialokasikan kembali untuk pengembangan kapasitas pengembalian investasi daerah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah membutuhkan seseorang yang mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dia mampu menyusun perencanaan kas dengan baik sehingga kelebihan dana dalam periode tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. Hal seperti ini telah dibuktikan oleh beberapa daerah yang mempunyai seorang Manajer Keuangan yang baik. Di samping itu, pada pos pendapatan ini juga terdapat sumber PAD yang berasal dari Rumah Sakit Umum yang berstatus BLUD. Oleh sebab itu, diperkirakan pendapatan daerah akan dapat ditingkatkan dari lain-lain PAD sebesar 5 % pertahun.

Pertumbuhan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak diperkirakan dapat ditingkatkan menjadi 10,32 % sejalan dengan perkiraan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil bukan pajak dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi, dengan standar deviasi yang cukup tinggi. Untuk periode 2006-2010 terjadi pertumbuhan bagi hasil bukan pajak sebesar minus 18,05 %. Namun pada masa datang diperkirakan dapat ditingkatkan tetap dapat dipertahankan yaitu 5,00 %. Hal ini dapat dilakukan di samping mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada saat ini, juga meningkatkan penelitian untuk mendapatkan potensi pajak yang berasal dari sumberdaya alam lainnya.

Pertumbuhan dana alokasi umum antara tahun 2006-2010 adalah 8,52 %. Pertumbuhan yang sangat besar terjadi antara tahun 2005 sampai tahun 2007 yaitu rata-rata pertahun sebesar 48,58 %. Tetapi antara tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 2,34 % pertahun. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dalam pemekaran daerah sehingga pertumbuhan dana alokasi umum menjadi jauh lebih rendah. Kebijakan pemekaran seperti ini pada tahun-tahun mendatang akan diperketat sehingga diperkirakan jumlah dana alokasi umum yang diterima daerah akan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, untuk memproyeksikan pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum akan dilakukan berdasarkan data yang lebih logis yaitu antara tahun 2007 sampai tahun 2010.

Pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum pada tahun 2007 – tahun 2010 adalah 6,59 %. Tingkat pertumbuhan 6,59 % ini lebih logis dan digunakan untuk memproyeksikan dana alokasi umum sampai tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi untuk sumber dana yang berasal dari dana alokasi khusus, yang diperkirakan mengalami pertumbuhan menjadi 5 %. Sedangkan sumber dana yang berasal dari hibah dan dana penyesuaian diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang berarti.

Evaluasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat pada 2 tahun terakhir (tahun 2011 dan tahun 2012) menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 33,8 %, yaitu dari Rp. 2.183.959 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 2.922.607 juta pada tahun 2012. Besarnya peningkatan pendapatan ini terjadi karena penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang diakui atau diperlakukan sebagai bagian pendapatan hibah. Padahal setelah diterima, dana ini akan didistribusikan kembali kepada pemerintah kota/kabupaten. Dana BOS yang berjumlah Rp 543.900 juta hanya numpang lewat. Oleh sebab itu, pemberlakukan penerimaan Dana BOS ini sebagai Pendapatan Hibah dalam analisis kinerja adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan hal sesungguhnya atau dapat

dibelanjakan untuk tujuan lain.

Jika Pendapatan Hibah Dana BOS dikeluarkan dari perhitungan/ analisis, realisasi jumlah pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari Rp 2.183.959 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 2.378.641 juta pada tahun 2012; yang berarti meningkat sebesar Rp 194.682 juta. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 1.051 juta, sedangkan peningkatan jumlah pendapatan Dana Perimbangan berjumlah Rp 212.013 juta, yang terdiri dari peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berjumlah Rp 153.879 juta dan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berjumlah Rp 66.366 juta. Dengan demikian, peningkatan jumlah PAD jauh lebih rendah daripada peningkatan jumlah pendapatan DAU dan Bagi Hasil Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan realisasi PAD jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan sumber pendapatan daerah lainnya. Dari segi capaian realisasi anggaran pendapatan, capaian kinerja PAD juga lebih rendah dibandingkan dengan dua sumber pendapatan daerah lainnya. Tabel 3.9 memperlihatkan perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan, serta tingkat capaian pada tahun 2011 dan tahun 2012.

**Tabel 3.9  
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – Tahun 2012 (Rp juta)**

| Uraian   | Tahun 2011 |           |             | Tahun 2012 * |           |             |
|--|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|  | Anggaran   | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran     | Realisasi | Capaian (%) |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                     | 2,071,161  | 2,183,959 | 105.45      | 2,349,555    | 2,378,641 | 101.24      |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | 1,147,304  | 1,224,415 | 106.72      | 1,232,140    | 1,225,466 | 99.46       |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 933,800    | 983,602   | 105.33      | 990,319      | 994,570   | 100.43      |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 32,331     | 41,698    | 128.97      | 33,897       | 38,055    | 112.26      |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 80,603     | 80,453    | 99.81       | 88,879       | 80,349    | 90.40       |
| Lain-lain PAD yang Syah                                      | 100,570    | 118,660   | 117.99      | 119,045      | 112,492   | 94.50       |
| <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                      | 897,641    | 931,883   | 103.81      | 1,107,390    | 1,143,896 | 103.30      |
| Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak                             | 92,227     | 126,468   | 137.13      | 156,329      | 192,835   | 123.35      |
| Dana Alokasi Umum  | 764,681    | 764,681   | 100.00      | 918,560      | 918,560   | 100.00      |
| Dana Alokasi Khusus  | 40,733     | 40,733    | 100.00      | 32,501       | 32,501    | 100.00      |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH</b>                        | 26,217     | 27,662    | 105.51      | 10,025       | 9,279     | 92.56       |
| Pendapatan Hibah   | 7,381      | 9,012     | 122.10      | 9,290        | 8,544     | 91.97       |
| Dana Penyesuaian   | 18,836     | 18,650    |             | 735          | 735       |             |
| Pendapatan Lainnya   | -          | -         |             | -            | -         |             |

\*) Tidak termasuk Dana BOS

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 (diolah)

Karena realisasi pendapatan daerah tahun 2011 dan tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi yang dibuat sebelumnya,

maka diperlukan revisi terhadap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan informasi capaian kinerja sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk konsistensi, dikarenakan penghitungan sebelumnya, yaitu untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012 tidak memasukkan Dana BOS, maka untuk revisi proyeksi pendapatan tahun 2013, 2014 dan 2015 pun dihitung dengan tidak memasukkan Dana BOS.

**Tabel 3.10**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2011 – 2015 \*)**

| NO.        | URAIAN  | TA 2011   | TA 2012   | TA 2013        |                | TA 2014        |                | TA 2015        |                |
|------------|---|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |           |           | Sebelum Revisi | Setelah Revisi | Sebelum Revisi | Setelah Revisi | Sebelum Revisi | Setelah Revisi |
| (Rp. Juta) |   |           |           |                |                |                |                |                |                |
|            | <b>PENDAPATAN</b>                                 | 1.986.576 | 2.106.241 | 2.233.479      | 2.585.214      | 2.368.798      | 2.828.241      | 2.512.743      | 3.110.525      |
| A          | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | 1.086.756 | 1.144.541 | 1.205.516      | 1.303.622      | 1.269.868      | 1.368.500      | 1.337.793      | 1.445.822      |
| 1          | Pajak daerah                                      | 911.8     | 957.39    | 1.005.260      | 1.055.932      | 1.055.522      | 1.067.706      | 1.108.299      | 1.079.611      |
| 2          | Retribusi daerah                                  | 30.576    | 33.371    | 36.421         | 29.461         | 39.75          | 30.893         | 43.383         | 32.395         |
| 3          | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 62.322    | 67.619    | 73.367         | 91.45          | 79.603         | 113.826        | 86.369         | 141.677        |
| 4          | Lain-lain PAD yang sah                            | 82.058    | 86.161    | 90.469         | 126.78         | 94.992         | 156.075        | 99.742         | 192.139        |
| B          | <b>Dana Perimbangan</b>                           | 894.605   | 956.224   | 1.022.213      | 1.271.802      | 1.092.894      | 1.449.591      | 1.168.612      | 1.654.180      |
| 1          | Dana bagi hasil pajak                             | 87.582    | 96.62     | 106.591        | 159.057        | 117.591        | 195.449        | 129.727        | 240.169        |
| 2          | Dana bagi hasil bukan pajak                       | 1.609     | 1.761     | 1.927          | 8              | 2.109          | 11.012         | 2.308          | 15.158         |
| 3          | Dana alokasi umum                                 | 764.681   | 815.073   | 868.787        | 1.039.923      | 926.04         | 1.169.724      | 987.066        | 1.315.727      |
| 4          | Dana alokasi khusus                               | 40.733    | 42.77     | 44.908         | 64.823         | 47.154         | 73.406         | 49.512         | 83.126         |
| C          | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>       | 5.215     | 5.476     | 5.75           | 9.79           | 6.037          | 10.15          | 6.339          | 10.524         |
| 1          | Hibah   | 5.215     | 5.476     | 5.75           | 9.79           | 6.037          | 10.15          | 6.339          | 10.524         |
| 2          | Dana darurat                                      | -         | -         | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 3          | Dana penyesuaian dan otonomi khusus               | -         | -         | -              | -              | -              | -              | -              | -              |

\*) Proyeksi pendapatan tidak termasuk dana BOS

Berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2011 dan tahun 2012, maka revisi proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2013 berjumlah Rp 2.5852,14 juta, meningkat menjadi Rp 2.828.241 juta pada tahun 2014, dan menjadi Rp 3.110.525 juta pada tahun 2015. Hasil perhitungan proyeksi pendapatan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011-2015 sebelum dan setelah revisi dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Analisis kapasitas riil keuangan daerah dilakukan berdasarkan perhitungan selisih antara jumlah pendapatan daerah dikurangkan dengan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Karena proyeksi pendapatan daerah telah dilakukan sebagaimana yang dapat dijelaskan di atas, maka langkah berikutnya adalah memproyeksikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan

tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,57 % sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab 3.3.1. Hasil perhitungan selsih total pendapatan daerah dengan jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Evaluasi terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak jauh berbeda dibandingkan hasil proyeksi sebelum revisi belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Oleh sebab itu, tidak perlu dilakukan revisi terhadap proyeksi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2013-2015. Dengan demikian jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebelum revisi dan setelah revisi adalah sama.

Jika pada awal tahun 2011 masih tersedia SILPA sebesar Rp 331.803 juta dan pada tahun-tahun berikutnya juga masih terjadi SILPA karena jumlah belanja langsung yang menjadi prioritas Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel 8.1 dan juga perkiraan belanja tidak langsung belum menghabiskan seluruh perkiraan pendapatan yang dihasilkan. Dengan demikian, penambahan SILPA ini mengakibatkan hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi yang lebih tinggi.

Akibat peningkatan revisi proyeksi pendapatan dan adanya SILPA pada awal tahun 2013, maka kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2013 menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum revisi. Jika sebelum revisi kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2013 berjumlah Rp 1.139.178 Juta dan meningkat menjadi Rp 1.655.483 Juta setelah revisi. Dengan kata lain terjadi peningkatan kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp 516.305 juta setelah dilakukan revisi. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 juga terjadi peningkatan kapasitas riil keuangan daerah sebelum dengan setelah revisi, masing-masing sebesar Rp 459.443 juta pada tahun 2014, yaitu dari Rp 1.126.020 juta menjadi Rp 1.585.463 juta, serta sebesar Rp 597.782 pada tahun 2015, yaitu dari Rp 1.101.340 juta menjadi Rp 1.699.122 juta.

Perhitungan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempertimbangkan hanya belanja tidak langsung Gaji dan tunjangan serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil sebagai pengurang pendapatan. Hasil perhitungan ini mengambarkan total sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan atau seluruh belanja langsung. Hasil perhitungan setelah revisi menunjukkan sumber dana menurut perhitungan ini berjumlah Rp 1.989.676 juta pada tahun 2014 dan Rp 1.939.976 juta pada tahun 2015. Rincian perkembangan dan atau revisi kapasitas riil keuangan daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat,**  
**tahun 2011 - tahun 2015**

| NO.        | URAIAN  | TA 2011   | TA 2012   | TA 2013        |                | TA 2014        |                | TA 2015        |                |
|------------|---|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |           |           | Sebelum Revisi | Setelah Revisi | Sebelum Revisi | Setelah Revisi | Sebelum Revisi | Setelah Revisi |
| (Rp. Juta) |   |           |           |                |                |                |                |                |                |
| 1          | Pendapatan  | 1.986.576 | 2.106.241 | 2.233.479      | 2.585.214      | 2.368.798      | 2.828.241      | 2.512.743      | 3.110.525      |
| 2          | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)  | .         | .         | .              | .              | .              | .              | .              | .              |
| 3          | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran  | 331.803   | 317.192   | .              | 164.57         | .              | 211.324        | .              | 221.77         |
|            | Total penerimaan  | 2.318.379 | 2.423.433 | 2.233.479      | 2.749.784      | 2.368.798      | 3.039.565      | 2.512.743      | 3.132.702      |
|            | Dikurangi:  | .         | .         | .              | .              | .              | .              | .              | .              |
| 4          | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  | 848.444   | 963.562   | 1.094.301      | 1.094.301      | 1.242.778      | 1.242.778      | 1.411.403      | 1.411.403      |
|            | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Sesuai Permendagri 54/2010)  | 1.469.934 | 1.459.871 | 1.139.178      | 1.655.483      | 1.126.020      | 1.796.787      | 1.101.340      | 1.721.299      |
|            | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Pendapatan - Belanja Tidak Langsung); Untuk Menutupi Belanja Langsung dan Belanja Transfer | 1.602.316 | 1.609.949 | 1.309.321      | 1.825.626      | 1.318.909      | 1.989.676      | 1.320.017      | 1.939.976      |

Kapasitas rill kemampuan keuangan dihitung di luar Pendapatan dan Belanja Dana Bos

Berdasarkan tabel 3.11, dapat pula disusun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011-2015. Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010, penggunaan kapasitas riil tersebut terutama diprioritaskan untuk belanja langsung guna melaksanakan program kerja yang menjadi prioritas utama Provinsi Sumatera Barat. Belanja langsung yang menjadi prioritas utama ini akan disusun berdasarkan urusan seperti dapat dilihat pada tabel 8.1. Pada tahun 2011, jumlah belanja langsung yang menjadi perioritas utama berjumlah Rp 781.091 juta, dan pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi Rp 1.052.454 juta pada tahun 2012, menjadi Rp 1.194.268 juta pada tahun 2013, menjadi Rp 1.375.436 juta pada tahun 2014, serta menjadi Rp 1.562.042 juta pada tahun 2015.

Di samping belanja langsung dan menjadi prioritas utama sebagaimana yang dijelas di atas, juga dibutuhkan belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun selama 3 tahun seperti terlihat pada tabel 3.8, yaitu sebesar 13,37 %.

Setelah dilakukan perhitungan, jumlah belanja langsung bersifat wajib dan mengikat diperkirakan meningkat menjadi Rp 132.381 juta pada tahun 2011, menjadi Rp 150.079 juta pada tahun 2012, menjadi Rp 179.143 juta pada tahun 2013, menjadi Rp 192.889 juta pada tahun 2014, dan menjadi Rp 218.676 pada tahun 2015.

Belanja yang menjadi prioritas berikutnya bagi Provinsi Sumatera Barat adalah untuk membiayai pengeluaran belanja tidak langsung. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa dalam analisis revisi analisis aspek pendanaan ini tidak dimasukkan belanja hibah untuk penyaluran Dana BOS. Dalam pembahasan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini pun juga tidak dimasukkan sumber dan penggunaan dana BOS. Proyeksi belanja tidak langsung dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010-2012. Penggunaan 3 tahun terakhir ini untuk proyeksi didasarkan asumsi perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan belanja tidak langsung khususnya besarnya gaji PNS lebih tercermin dari data 3 tahun terakhir dan juga adanya kebijakan yang lebih ketat dari Gubernur Sumatera Barat dalam mengimplementasikan kebijakan belanja bagi hasil.

Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung juga mempertimbangkan belanja wajib dan mengikat sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Seperti dapat dilihat pada tabel 3.8 di atas, belanja tidak langsung wajib dan mengikat yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil. Oleh sebab itu, belanja tidak langsung wajib dan mengikat pun di proyeksi sesuai dengan pertumbuhan rata-rata pertahun, yaitu sebesar 13,60 %. Proyeksi belanja tidak langsung wajib dan mengikat ini akan menjadi pengurangan terhadap jumlah hasil proyeksi belanja tidak langsung secara keseluruhan.

Hasil perhitungan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh selama tahun 2011-2015 dapat menutupi seluruh kebutuhan dana untuk menggerakkan pembangunan yang direncanakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, ada kecendrungan jumlah pendapatan daerah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Akibatnya, dari tahun ke tahun terjadi pengurangan jumlah SILPA; mulai Rp 317.192 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 24.921 juta pada tahun 2015. Secara lebih rinci, hasil perhitungan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

dapat dilihat pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 - tahun 2015**

| No    | Uraian   | TAHUN ANGGARAN |                |                |                |                |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| I     | Kapasitas riil kemampuan keuangan  | 1.469.934      | 1.459.871      | 1.655.483      | 1.585.463      | 1.699.122      |
|       | Rencana alokasi pengeluaran prioritas I  |                |                |                |                |                |
| II.a  | Belanja Langsung *)  | 913.472        | 1.202.533      | 1.364.411      | 1.568.325      | 1.780.719      |
| II.b  | Pembentukan dana cadangan  |                |                |                |                |                |
|       | <b>Dikurangi:</b>  |                |                |                |                |                |
| II.c  | Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama   | 132.381        | 150.079        | 170.143        | 192.889        | 218.676        |
| II.d  | Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama   |                |                |                |                |                |
| II    | Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b+II.c+II.d)  | 781.091        | 1.052.454      | 1.194.268      | 1.375.436      | 1.562.042      |
|       | <b>Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)</b> | <b>688.843</b> | <b>407.417</b> | <b>461.214</b> | <b>210.027</b> | <b>137.080</b> |
|       | <b>Rencana alokasi pengeluaran prioritas II</b>  |                |                |                |                |                |
| III.a | Belanja Tidak Langsung   | 1.087.715      | 1.056.330      | 1.174.048      | 1.237.739      | 1.304.885      |
|       | <b>Dikurangi:</b>  |                |                |                |                |                |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama   | 716.063        | 813.484        | 924.158        | 1.049.889      | 1.192.726      |
| III   | Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a+III.b)   | 371.651        | 242.847        | 249.891        | 187.850        | 112.159        |
|       | <b>Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)</b>   | <b>317.192</b> | <b>164.570</b> | <b>211.324</b> | <b>22.177</b>  | <b>24.921</b>  |



## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis pada dasarnya adalah menyangkut dengan unsur dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat kedepan. Kharakteristik isu-isu strategis adalah kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun dimasa mendatang. Ini berarti bahwa, apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis mencakup berbagai aspek pembangunan daerah yang meliputi bidang agama dan budaya ekonomi, sosial dan fisik prasarana. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa yang lebih baik. Kesemua aspek ini akan dihadapi dan harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah Sumatera Barat dimasa depan yang lebih baik dan diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 tahun mendatang.

#### **4.1 PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pembangunan daerah di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa bidang yaitu ekonomi, sosial-budaya dan fisik prasarana. Kendala dan tantangan bidang ekonomi menyangkut dengan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mendorong proses pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran daerah. Tantang bidang sosial menyangkut dengan kendala dan permasalahan dalam bidang sosial yang perlu segera dipecahkan untuk dapat mewujudkan kondisi sosial yang sejahtera dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan kendala dan tantangan bidang fisik prasarana adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera

ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan wilayah secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pembangunan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini antara lain adalah sebagai berikut:

Telah terjadi pergeseran nilai sehingga terjadi ketidakselarasan antara tingkah laku masyarakat dengan hukum dan kaedah yang terdapat dalam ajaran agama, baik Islam maupun agama lainnya. Sudah menjadi kenyataan umum dalam masyarakat bahwa apa yang dilarang dalam agama justru dianggap hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada umumnya agama melarang umatnya menipu dan mencuri, tetapi dalam kenyataannya korupsi dan penipuan menjadi hal yang banyak terjadi dalam masyarakat. Akibatnya bagi proses pembangunan daerah adalah banyak sekali upaya-upaya pembangunan yang sebenarnya sangat baik yang telah direncanakan tetapi ternyata belum dapat diraih manfaatnya semaksimal mungkin untuk peningkatan proses pembangunan daerah dan penciptaan keadilan dalam masyarakat.

2. Adanya kondisi geografis dan posisi Sumatera Barat yang kurang strategis bagi pengembangan ekonomi daerah. Kondisi geografis daerah di Sumatera Barat adalah berbukit-bukit sehingga biaya angkutan barang menjadi relatif tinggi sehingga menimbulkan kendala bagi pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Sementara itu, Sumatera Barat juga mempunyai hutan lindung yang cukup luas sehingga lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan juga sangat terbatas. Selain itu, letak daerah yang berada di pantai Barat pulau Sumatera ternyata membelakangi pusat kegiatan ekonomi dunia, yaitu Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan China, yang semuanya berada di Timur. Akibatnya sinergi antar perekonomian Sumatera Barat dengan negara-negara maju menjadi sangat lemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah juga cenderung menjadi lambat.
3. Kondisi prasarana dan sarana, terutama berkaitan dengan sektor perhubungan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ternyata juga belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sering terjadinya bencana alam (longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami). Akibatnya kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dan pembangunan daerah umumnya mengalami kendala yang cukup besar dalam meningkatkan aktifitasnya sehingga peningkatan kegiatan ekonomi dan kemakmuran daerah belum dapat terwujud sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.
4. Kemampuan penerapan IPTEK daerah yang masih sangat rendah

sehingga kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia menjadi sangat terbatas. Disamping itu, IPTEK yang rendah juga mengakibatkan mutu dan kualitas produk yang dapat dihasilkan dan kemampuan untuk menghasilkan produk baru menjadi relatif kurang. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi yang masih tradisional dan belum berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) pada dunia usaha. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masih rendahnya daya saing produk yang dapat dihasilkan daerah sehingga menimbulkan kendala sangat serius dalam mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Kendala ini menjadi semakin serius dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dimana tingkat persaingan menjadi sangat tajam

5. Masih relatif rendahnya efisiensi kegiatan produksi dan pemasaran produk sebagai akibat dari kegiatan produksi yang umumnya mempunyai skala kecil dan dikelola dengan pola manajemen tradisional yang kurang efisien sehingga harga jual dipasaran relatif tinggi. Faktor penyebab kurang efisiennya kegiatan produksi adalah karena relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja, potensi sumberdaya alam yang terbatas dan relatif tinggi ongkos transport sebagai akibat dari kondisi geografis yang umumnya berbukit-bukit. Rendahnya daya saing produk daerah ini menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan bisnis dan ekspor serta kurang menariknya melakukan investasi di Sumatera Barat.
6. Masyarakat Sumatera Barat yang menganut budaya Minangkabau memiliki tanah ulayat cukup luas yang dimiliki oleh kaum. Permasalahan yang dihadapi adalah tanah ulayat yang dimiliki tidak mempunyai kepastian hukum, karena tidak mempunyai bukti kepemilikan serta batas-batas tanah yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan tanah ulayat sulit untuk mendukung kegiatan usaha dan guna menarik investor menjadi sangat terbatas sehingga manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat tersebut belum dapat diperoleh secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
7. Walaupun proses pembangunan daerah secara terencana telah berjalan sejak dimulainya pelaksanaan *Rencana Pembangunan Lima Tahun* (REPELITA) tahun 1969 yang lalu, namun demikian sampai saat ini, permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tetap merupakan permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini. Namun demikian selama 5 tahun terakhir telah terbaikkan perbaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini terlihat dari perkembangan persentase penduduk menganggur

- yang mencapai 13,34 % pada tahun 2005 dan menurun menjadi 7,90 % pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan tingkat kemiskinan juga memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan dari 12,07 % pada tahun 2006 menjadi 9,54 % pada tahun 2009. Pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat masih belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Karena itu, pengangguran dan kemiskinan masih tetap sebagai salah satu permasalahan pokok dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Sumatera Barat sampai saat ini masih mempunyai 8 kabupaten daerah tertinggal yang perlu segera ditanggulangi.
8. Permasalahan dan sekaligus ancaman serius yang dialami oleh Sumatera Barat adalah bahwa daerah ini ternyata sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan tsunami. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan yang paling serius akibatnya adalah gempa besar 7,9 skala Richter yang terjadi di daerah Pariaman pada tanggal 30 September tahun 2009 yang lalu yang menelan korban sebanyak 1,200 orang dan ratusan bangunan runtuh dan rusak berat. Akibat negatifnya sangat dirasakan terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah karena dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
  9. Permasalahan dan ancaman lainnya yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah dalam bentuk peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan *Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN* (CAFTA) yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Sejalan dengan hal tersebut telah disepakati pula oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas pada tahun 2020 mendatang. Peningkatan persaingan ini segera akan menjadi permasalahan dan tantangan yang sangat serius dan bahkan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat sampai saat ini umumnya masih rendah yang terjadi sebagai cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi sehingga biaya produksi rata-rata masih relatif tinggi. Disamping itu penggunaan teknologi untuk kegiatan produksi yang belum maju sehingga kualitas produk yang dapat dihasilkan umumnya masih relatif rendah.
  10. Permasalahan pengembangan Sumatera Barat selain karena kondisi fisik juga adanya kesenjangan perkembangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan, seperti: (1) adanya disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan, sehingga wilayah selatan (Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan) relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah utara (2) Terdapatnya karakteristik alam yang berbukit dan bergunung,

dimana dari luas Provinsi Sumatera Barat 4.229.721 Ha, lahan dengan kelerengan lebih dari 40 % mencapai proporsi 39,03 % dari luas wilayah provinsi, kawasan non hutan hanya 38,54 % dan luas kawasan budidaya 54,83 %, belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu menciptakan rembesan kepada wilayah-wilayah belakangnya, masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

11. Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat saat ini sampai beberapa tahun ke depan adalah terbatasnya kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah angkatan kerja baru tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya adalah lapangan pekerjaan yang terbatas harus diperebutkan oleh warga Provinsi Sumatera Barat dengan warga daerah sekitarnya.
12. Masalah utama kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terutama masalah kekurusan, adalah sebesar 15.7 %. Hal ini merupakan permasalahan kesehatan yang sudah dianggap Kritis. Dari 19 Kabupaten / Kota, hanya Padang Panjang dan Kota Bukittinggi yang prevalensi kekurusan dibawah 10 %. Ada 7 Kabupaten / Kota yang menjadi permasalahan kesehatan yang serius yaitu: Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Payakumbuh, Kota Pariaman, Padang dan Sawahlunto, Kota Solok. Disamping itu yang ada 10 Kabupaten / Kota yang kritis, prevalensi diatas 15 % yaitu Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Koto, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat.

## **4.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Isu-isu pembangunan pokok pembangunan daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pemahaman Agama dan Budaya**

Isu strategis dibidang sosial budaya utama Sumatera Barat adalah pemahaman akan agama dan budaya dalam masyarakat yang dapat

memberikan arah dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah merupakan kekuatan utama yang terdapat dalam masyarakat. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi terkemuka berbasis sumberdaya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang;

## **2. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik**

Pengalaman masa lalu di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa tata-pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Karena itu, upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat. Perbaikan tata-pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketataan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang;

## **3. Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Isu strategis lainnya yang juga cukup menentukan masa depan pembangunan adalah dilaksanakannya otonomi daerah sehingga kewenangan dan peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan proses pembangunan daerah menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting artinya untuk dapat mendorong aspirasi, inisiatif dan kreasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pembangunan yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat;

## **4. Kualitas Sumberdaya Manusia**

Sejalan dengan hal tersebut, pengalaman di masa lalu menunjukkan pula bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Sumatera Barat adalah relatif baik. Kondisi ini tercermin dari perkembangan *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) yang sudah cukup baik yang didalamnya mencakup pendapatan, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan (lihat Tabel 4.1). Kualitas sumberdaya yang relatif baik akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk dapat proses pembangunan daerah berbasis sumberdaya manusia dalam rangka proses pembangunan daerah yang berlandaskan pada IPTEK. Karena itu, unsur kualitas sumberdaya manusia ini juga dapat diberikan

perhatian yang cukup tinggi dalam analisis faktor strategis sebagai faktor penggerak pembangunan daerah;

### **5. Kemampuan Wirausaha**

Disamping itu, kenyataan menunjukkan pula bahwa masyarakat Sumatera Barat sampai saat ini terkenal mempunyai jiwa dan semangat wirausaha (*Entrepreneurship*) yang cukup tinggi dan ulet. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Sumatera Barat;

### **6. Daya Beli Masyarakat**

Isu strategis berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat daerah sebagai hasil dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Peningkatan kebutuhan dan daya beli tersebut dapat pula memicu peningkatan permintaan efektif yang dapat mendorong kegiatan investasi masuk ke daerah. Peningkatan kegiatan investasi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat dan pemerintah daerah;

### **7. Daya Saing Daerah Untuk Menghadapi Globalisasi**

Proses globalisasi kelihatannya sudah menjadi kenyataan umum yang tidak dapat lagi ditolak. Untuk kawasan ASEAN dimana Indonesia termasuk di dalamnya, proses globalisasi tersebut telah berjalan dengan dimulainya pelaksanaan Asean Free Trade Area (AFTA) sejak tahun 2003 yang lalu dan akan dikembangkan tahun 2010 dengan masuknya China ke dalamnya. Sedangkan Untuk kawasan Asia-Pasifik akan dimulai pada tahun 2020 mendatang. Kondisi ini dapat merupakan masalah dan kendala bagi pengembangan kegiatan ekonomi daerah, tetapi sekaligus juga adalah peluang untuk peningkatan hubungan ekonomi internasional. Isu strategis dalam hal ini adalah peningkatan daya saing komoditi produksi daerah sehingga dapat menembus pasaran dunia sehingga volume perdagangan internasional akan dapat ditingkatkan. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka perekonomian daerah otomatis juga akan meningkat sehingga penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan dapat diperbaiki;

## **8. Akses Dengan Daerah Tetangga**

Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalulintas yang sangat tinggi dengan semakin berkembangan pembangunan di Provinsi Riau dan selesainya pembangunan *Fly Over* Kelok Sembilan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan untuk membangun jalan dua jalur dari Padang sampai ke Kota Payakumbuh. Pembangunan Jalan 2 jalur ini dari Batas Kota Padang sampai dengan batas Kota Payakumbuh. Rencana perbaikan dan pelebaran jalan tersebut merupakan isu strategis yang cukup penting dan dapat menjadikan hubungan ekonomi dan sosial antara Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau dan sebaliknya akan semakin lancar dan hal ini akan membawa pengaruh besar terhadap pembangunan daerah Sumatera Barat. Perkembangan masa depan yang akan muncul adalah semakin banyaknya arus lalu lintas barang dan orang, baik yang masuk maupun yang ke luar dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau yang pertumbuhan ekonominya sejak 10 tahun terakhir ternyata sangat pesat;

## **9. Prasarana dan Sarana Daerah**

Pembangunan bandar udara Minangkabau, Perluasan pelabuhan Teluk Bayur dan pengembangan prasarana dan sarana perhubungan juga diperkirakan merupakan isu strategis yang cukup penting bagi peningkatan peranan Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dikawasan pantai Barat Sumatera. Dengan adanya perluasan ini selanjutnya juga akan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang terkait dengan provinsi kabupaten dan kota daerah tetangga yang berada di pantai Barat Pulau Sumatera. Disamping itu, melalui pengembangan bandar udara dan pelabuhan ini diperkirakan akan dapat pula mendorong pengembangan kegiatan **ekspor daerah**;

## **10. Dukungan Pemerintah Nasional**

Isu strategis berikutnya yang masih tetap mendapatkan dukungan dan bantuan pemerintah nasional terhadap kegiatan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan dan bantuan ini ditunjukkan dari masih cukup besarnya perhatian dan tanggung jawab serta dana dekonsentrasi (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan program dan kegiatan berskala besar yang berlokasi di daerah Sumatera Barat. Dana dekonsentrasi yang cukup besar ini perlu terus disinergikan dengan dana APBD Sumatera Barat sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kegiatan pembangunan daerah;

## **11. Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Pembangunan**

Untuk mengatasi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan (Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan) perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, menciptakan rembesan pusat-pusat pertumbuhan kepada wilayah-wilayah belakangnya, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk mengentaskan daerah tertinggal diperlukan peningkatan akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah lainnya serta kegiatan-kegiatan sarana prasarana sosial ekonomi pada daerah tertinggal;

## **12. Bencana Alam**

Lebih dari 50 % luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang mempunyai zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan menengah. Kawasan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat tersebar di seluruh wilayah terutama pada sepanjang jalur sesar aktif (patahan semangka). Isu strategis dalam hal ini adalah menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

## **13. Kualitas Lingkungan Hidup**

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Termasuk dalam isu strategis ini adalah: penjagaan daerah konservasi dan hutan lindung, pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan laut, peningkatan kebersihan kota dan lain-lainnya.



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, adalah rencana pelaksanaan tahap ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025".

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, meliputi: 1) Mewujudkan Kehidupan Agama dan Budaya Berdasarkan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 2) Mewujudkan Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik; 3) Mewujudkan Sumberdaya Insani yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi; 4) Mewujudkan Ekonomi Produktif dan Mampu Bersaing di Dunia Global; 5) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.

Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJM ke 2 ini secara umum ditujukan untuk terwujudnya pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan dan jasa. Kondisi pemerintahan yang baik yang telah ditekankan pada RPJM ke 1 akan terus disempurnakan sehingga akan mempercepat proses pembangunan sektor pertanian yang modern. Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk barang dan jasa Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian akan dapat dikurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan akan semakin membaik. Pada periode ini diharapkan pengembangan sektor pariwisata sudah semakin kondusif karena kesejahteraan masyarakat telah membaik ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, disiplin atau keteraturan, kebersihan dan lain-lain. Disamping itu, pada periode ini juga diharapkan penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju di bidang pertanian sudah semakin meningkat dengan didorongnya upaya penguasaan teknologi maju melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan pengelolaan usaha jasa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi dan agenda pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan". Sejahtera mencerminkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi mencerminkan terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan keadilan. Mencerminkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan Misi Pembangunan Nasional adalah: 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar demokrasi, dan 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi dan Misi pemerintah Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih operasional ke dalam sebelas Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah:

### ***Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat***

Masyarakat *Madani* yang dimaksudkan disini adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistik, bersikap terbuka dan demokratis serta

selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan spiritual

*Adil* yang dimaksudkan disini adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga kebutuhan, kepentingan dan hak seluruh anggota masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Karena itu dalam suatu masyarakat yang adil akan terdapat tingkat kesejahteraan yang relatif merata, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), serta adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut.

*Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

*Bermartabat* dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dimana hak azasi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum yang cukup dari negara. Dengan demikian masyarakat yang bermartabat adalah suatu masyarakat yang taat azas, dihormati, mempunyai harga diri dan kedudukan yang sama dalam pergaulan masyarakat baik nasional maupun internasional.

## **5.2 MISI**

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan terdahulu. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"; Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik; Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi; Mewujudkan ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global; dan Mewujudkan kualitas lingkungan hidup

yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";**
- 2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;**
- 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;**
- 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global;**
- 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Misi untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya

manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Misi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidak adilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuensi. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksplorasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

### **5.3. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.3.1. Tujuan Pembangunan**

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2010-2015 adalah:

Tujuan Misi 1 adalah:

1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais
2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya

3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat

Tujuan Misi 2 adalah:

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif

Tujuan Misi 3 adalah:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat

Tujuan Misi 4 adalah:

1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis
2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi
3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya
4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal
5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat

Tujuan Misi 5 adalah:

1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana
2. Tercapainya lingkungan hidup yang ber kualitas

### **5.3.2. Sasaran Pembangunan**

1. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi pertama adalah:
  - a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
  - b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, c) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya,
  - d) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya, e) Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.
2. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kedua adalah:
  - a) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah, b) Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, c) Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif, d) Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM, e) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu, f) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, g) Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu, h) Meningkatnya kemampuan

pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan, i) Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, j) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, k) Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja, l) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, m) Berkurangnya temuan audit inspektorat, n) Terselenggaranya penata usahaan kearsipan secara efektif dan efisien, o) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, p) Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan

3. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ketiga adalah:  
a) Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD, b) Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, c) Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah, d) Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan, e) Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, f) Meningkatnya prestasi olah raga, g) Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan, h) Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan, i) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, j) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, k) Meningkatnya umur harapan hidup, l) Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang, m) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender, n) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
4. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah:  
a) Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; b) Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing); c) Meningkatnya kesejahteraan petani, d) Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah; e) Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan; f) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; g) Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan; h) Meningkatnya ekspor daerah; i) Meningkatnya investasi daerah; j) Berkembangnya wisata seni dan budaya; k) Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik; l) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; m) Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); n) Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial; o) Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya; p) Menurunnya tingkat kemiskinan; q) Meningkatnya akses menuju

- daerah tertinggal; r) Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal; s) Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal; t) Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal; u) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan; v) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat; w) Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang; x) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air; y) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara; z) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.
5. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima adalah:
- Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - Tersedianya informasi wilayah rawan bencana;
  - Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
  - Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihian ekosistem;
  - Menurunnya jumlah illegal logging

Hubungan hirarkhis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

| VISI<br>Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat  |   |  |
|---|---|--|
| MISI  | TUJUAN  | SASARAN  |
| <b>Misi 1:</b><br>Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah" | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais</li> <li>Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya</li> </ol> <p>Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama</i></li> <li>Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama</li> <li><i>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya</i></li> <li>Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya</li> <li>Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat</i></li> </ol>  |
| <b>Misi 2:</b><br>Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel</li> <li>Terwujudnya pelayanan publik yang prima</li> <li>Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya efektivitas peraturan daerah</li> <li><i>Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan</i></li> <li>Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif</li> <li>Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya perlindungan Hukum dan HAM</i></li> </ul> </li> <li>Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu</li> <li>Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</li> <li>Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu</li> <li>Meningkatnya kemampuan pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan</li> <li><i>Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu</i></li> <li>- <i>Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</i></li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</li> <li>Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja</li> <li>Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ol> |

| MISI  | TUJUAN  | SASARAN   |
|---|---|---|
|   | d. Tervujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif  | <p>4. Berkurangnya temuan audit inspektorat</p> <p>5. Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Berkurangnya temuan audit yang bernuansa KKN</i></li> </ul> <p>1. <i>Meningkatnya efektivitas (kualitas) perencanaan pembangunan</i></p> <p>2. <i>Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan</i></p>  |
| <b>Misi 3:</b><br>Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi                              | <p>1. Tervujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter</p> <p>2. Tervujudnya sumberdaya manusia yang sehat</p>  | <p>1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD</p> <p>2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar</p> <p>3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah</p> <p>4. Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan</p> <p>5. Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>6. <i>Meningkatnya prestasi olah raga</i></p> <p>7. Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan</p> <p>8. Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan</p> <p>9. <i>Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya SDM yang unggul dan mutu pendidikan</i></li> </ul> <p>1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak</p> <p>2. <i>Meningkatnya umur harapan hidup (meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)</i></p> <p>3. <i>Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang (meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)</i></p> <p>4. <i>Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender</i></p> <p>5. <i>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</i></p>  |
| <b>Misi 4:</b><br>Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global | <p>1. Tervujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis</p> <p>2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi</p> <p>3. Tervujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya</p> <p>4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal</p> <p>5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat</p> | <p>1. <i>Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</i></p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing)</p> <p>4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan</p> <p>1. <i>Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah</i></p> <p>2. Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan</p> <p>3. <i>Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi</i></p> <p>4. <i>Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan</i></p> <p>5. <i>Meningkatnya ekspor daerah</i></p> <p>6. <i>Meningkatnya investasi daerah</i></p> <p>1. Berkembangnya wisata seni dan budaya</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik</p> <p>3. <i>Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara</i></p> <p>1. Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>2. Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial</p> <p>3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya</p> <p>4. <i>Menurunnya tingkat kemiskinan</i></p> <p>5. Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal</p> <p>6. Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal</p> <p>7. <i>Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal</i></p> <p>8. Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Berkurangnya daerah tertinggal</i></li> </ul> <p>1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan</p> <p>2. Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air</p> <p>5. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara</p> |

| MISI   | TUJUAN  | SASARAN  |
|--|---|--|
|  |   | <p>6. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat</i></li> </ul>   |
| <b>Misi 5:</b><br>Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | <p>1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana</p> <p>2. Tercapainya lingkungan hidup yang ber kualitas</p> | <p>1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana</p> <p>3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya pengurangan resiko bencana, dan pemulihan kawasan/daerah pasca bencana</i></li> <li>- <i>Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana</i></li> <li>- <i>Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana</i></li> </ul> <p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup</p> <p>2. <i>Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem</i></p> <p>3. Menurunnya jumlah illegal logging</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup</i></li> <li>- <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i></li> </ul> |

**TARGET INDIKATOR KINERJA RPJMD  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 – 2015**

| VISI<br><b>Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat</b>                    |  |  |                    |                    |                                      |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| RPJMD 2010 – 2015  |  |  | TARGET             |                    |                                      |
| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR  | 2014               | 2015               | SKPD Penanggung Jawab                |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah ABS-SBK</b> |  |  |                    |                    |                                      |
| 1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais   | 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama                 | 1. Jumlah konflik dalam masyarakat bernuansa SARA  | 2                  | 1                  | Kesbang Pol                          |
|  |  | 2. Persentase peningkatan zakat /wakaf/ infak/sedekah yang disalurkan melalui badan amil zakat/wakaf /infak/ sedekah resmi                               | 10                 | 12                 | Biro Binsos                          |
| 2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya   | 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya | 1. Persentase KAN yang melaksanakan fungsinya  | 30                 | 45                 | Biro Binsos                          |
|  |  | 2. Jumlah sanggar seni dan budaya yang diberdayakan  | 29                 | 34                 | Dinas Dikbud                         |
| 3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat                     | 1. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat               | a. Jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani   | 1.210              | 1.162              | Satpol PP                            |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional</b>                                       |  |  |                    |                    |                                      |
| 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel  | 1. Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan           | 1. Opini BPK   | WTP                | WTP                | Inspektorat, DPKD. Biro Aset         |
|  | 2. Meningkatnya perlindungan hukum dan HAM                           | 1. Persentase kasus hukum masyarakat miskin yang terbantu  | 11.6               | 12.5               | Biro Hukum                           |
| 2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima   | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu                        | 1. Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu   | 100                | 100                | BKPMP                                |
|  | 2. Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah        | 1. Peringkat Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi<br>2. Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi | Tinggi (2,50)<br>B | Tinggi (2,75)<br>A | Biro Pemerintahan<br>Biro Organisasi |
| 3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN  | 1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah                           | 1. Rata-rata lamanya PNS yang mengikuti diklat   | 3 JPL              | 4 JPL              | Badan Diklat                         |
|  | 2. Berkurangnya temuan audit Inspektorat                             | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti<br>2. Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi          | 100<br>0.1         | 100<br>0.1         | Inspektorat                          |
| 4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif   | 1. Meningkatnya efektivitas (kualitas) perencanaan pembangunan       | 1. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD, KUA PPA dan APBD)  | 75                 | 80                 | Bappeda                              |
|  | 2. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan  | 1. Persentase kesesuaian perencanaan dg pelaksanaan (sesuai waktu dan realisasi)   | 80                 | 85                 | Bappeda                              |

| RPJMD 2010 – 2015   |   |   | TARGET                       |                             |                            |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR   | 2014                         | 2015                        | SKPD Penanggung Jawab      |
| <b>Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi</b> |   |   |                              |                             |                            |
| 1. Terwujudnya sumber-daya manusia yang cerdas dan berkarakter                                    | 1. Meningkatnya SDM yang unggul dan mutu pendidikan   | 1. Persentase APK PAUD  | 73.15                        | 75                          | Dinas Dikbud               |
|   |   | 2. Persentase APM Dikdas  | 100                          | 100                         | Dinas Dikbud               |
|   |   | 3. Meningkatnya APK/APM SMP/MTs/ SMPLB/Paket B  | 103.42/<br>83.45             | 104.92/<br>85               | Dinas Dikbud               |
|   |   | 4. Meningkatnya APK/APM SMA/SMK/ MA/SMALB/Paket C   | 85.58/75                     | 86/80                       | Dinas Dikbud               |
|   |   | 5. Angka rata-rata lama sekolah   | 8.78                         | 8.88                        | Dinas Dikbud               |
|   |   | 6. Persentase Melek Aksara Penduduk usia > 15 tahun   | 99.6                         | 99.7                        | Dinas Dikbud               |
|   |   | 7. Meningkatnya persentase kelulusan siswa diterima Perguruan Tinggi  | 32                           | 35                          | Dinas Dikbud               |
|   | 2. Meningkatnya prestasi olahraga   | 1. Peringkat kontingen PPLP Sumbar di tingkat Nasional<br>- Pencak Silat<br>- Senam<br>- Tekwondo<br>- Judo<br>- Tinju<br>- Gulat | 5<br>5<br>5<br>6<br>10<br>3  | 5<br>5<br>5<br>6<br>10<br>3 | Dispora                    |
|   |   | 2. Jumlah medali yang didapat pada kegiatan POPNAS<br>- Emas<br>- Perak<br>- Perunggu   | -<br>-<br>-<br>6             | 12<br>10<br>15<br>5         | Dispora                    |
|   |   | 3. Peringkat kontingen Sumbar pada Kejurnas Atlet andalan   | -                            | 10                          |                            |
|   |   | 4. Peringkat Kontingen Sumbar pada Peparpelnas  | -                            |                             |                            |
|   | 3. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat   | 1. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan  | 500 orang                    | 500 orang                   | Badan Perpustakaan & Arsip |
|   |   | 2. Peningkatan jumlah anggota baru perpustakaan   | 100 orang                    | 100 orang                   | Badan Perpustakaan & Arsip |
| 2. Terwujudnya sumber-daya manusia yang sehat   | 1. Meningkatnya umur harapan hidup (Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)              | 1. Angka harapan hidup  | 71.12                        | 71.48                       | Dinkes                     |
|   |   | 2. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup  | 118                          | 102                         | Dinkes                     |
|   |   | 3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup   | 24                           | 23                          | Dinkes                     |
|   | 2. Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang (Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat) | 1. Angka gizi kurang (BB/TB) pada balita  | 7                            | 6.6                         | Dinkes                     |
|   |   | 1. Indek Pembangunan Gender   | 71.49                        | 72.13                       | BPPR & KB                  |
|   | 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender                           | 2. Indek Pemberdayaan Gender  | 65.95                        | 67.02                       | BPPR & KB                  |
|   |   | 4. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk   | 1. Laju Pertumbuhan Penduduk | 1.34%                       | BPPR & KB                  |

| RPJMD 2010 – 2015   |   |  | TARGET                                    |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR  | 2014                                      | 2015                                      | SKPD Penanggung Jawab                        |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global</b> |   |  |   |   |  |
| 1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis   | 1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan                                | 1. Persentase peningkatan produksi:<br>1) Kakao<br>2) Kopi<br>3) Karet<br>4) Padi<br>5) Jagung<br>6) Daging<br>7) Nila   | 4<br>1<br>2.5<br>3.5<br>6<br>3.82<br>24.5 | 4<br>1<br>2.5<br>3.5<br>6<br>3.83<br>24.5 | Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/ DKP |
|   |   | 2. Persentase peningkatan UPH Perkebunan   | 7   | 7   | Dinas Perkebunan                             |
|   |   | 3. Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan  | 4   | 4   | DKP  |
|   |   | 4. Persentase penambahan unit pengolahan hasil tanaman pangan  | 8.69                                      | 8   | Dinas Pertanian                              |
|   | 2. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan  | 1. Nilai tukar petani  | 109                                       | 110                                       | Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/ DKP |
| 2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi  | 1. Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah  | 1. Persentase pertumbuhan industri pengolahan  | 4   | 4.5                                       | Disperindag                                  |
|   | 2. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi   | 1. Persentase pertumbuhan UMKM<br>2. Persentase koperasi yg berkualitas<br>3. Persentase peningkatan volume usaha koperasi   | 4<br>10<br>15                             | 5<br>12<br>20                             | Dinas Koperasi & UMKM                        |
|   | 3. Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan  | 1. Persentase pasar yang layak   | 23.01                                     | 24.03                                     | Disperindag                                  |
|   | 4. Meningkatnya ekspor daerah   | 1. Persentase Peningkatan nilai ekspor   | 2.3                                       | 2.3                                       | Disperindag                                  |
|   | 5. Meningkatnya investasi daerah  | 1. Penambahan realisasi investasi<br>a) PMDN (miliar rupiah)<br>b) PMA (juta US\$)   | 480<br>24                                 | 501<br>25                                 | BKPMP  |
| 3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya   | 1. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara  | 1. Persentase peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara<br>a) Wisatawan Nusantara<br>b) Wisatawan Mancanegara  | 5<br>10.3                                 | 5.5<br>12.5                               | Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif           |
| 4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal  | 1. Menurunnya tingkat kemiskinan<br>2. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal<br>3. Berkurangnya daerah tertinggal | 1. Tingkat Kemiskinan<br>2. Tingkat pengangguran<br>3. Jumlah daerah tertinggal  | 7.35<br>5.5<br>5                          | 6.95<br>5.13<br>3                         | Semua SKPD                                   |
| 5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat  | 1. Meningkatnya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat  | 1. Persentase peningkatan kemantapan jalan provinsi<br>2. Meningkatnya persentase cakupan layanan listrik (Rasio elektrifikasi)<br>3. Meningkatnya persentase cakupan layanan perumahan, pemukiman dan bangunan gedung | 86<br>94<br>65                            | 89.5<br>95<br>68                          | Dinas Prasjal Tarkim                         |
|   |   | 4. Meningkatnya persentase sarana prasarana perhubungan kominfo  | 70  | 75  | Dinas Perhubungan dan Kominfo                |

| RPJMD 2010 – 2015  |  |   | TARGET   |               |                        |
|--|--|---|--|---------------|------------------------|
| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR   | 2014   | 2015          | SKPD Penanggung Jawab  |
| <b>Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan</b> |  |   |  |               |                        |
| 1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana                          | 1. Meningkatnya pengurangan resiko bencana, dan pemulihan kawasan/daerah pasca bencana | 1. Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana   | 80   | 100           | BPBD                   |
|  |  | 2. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana serta sarana dan prasarana | 80   | 100           | BPBD                   |
|  |  | 2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana  | 80   | 80            | BPBD                   |
|  | 3. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana                                 | 1. Persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana               | 60   | 60            | BPBD                   |
|  |  | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup   | 1. Tingkat pencemaran lingkungan hidup (udara dan air)<br>1. Udara<br><br>2. Air | 82 < IPU < 90 | Bapedalda              |
|  |  | 2. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem   |  |               |                        |
|  | 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | 1. Persentase penurunan lahan kritis  | 2.68%  | 2.68%         | Dinas Kehutanan        |
|  |  | 1. Persentase penurunan illegal mining  | 5.5  | 5             | Dinas ESDM             |
|  |  | 2. Persentase tersedianya perencanaan-Tata Ruang dan Perda RTRW   | 90   | 95            | Dinas Prasjal & Tarkim |
|  |  | 3. Persentase penurunan kasus illegal logging   | 4%   | 4%            | Dinas Kehutanan        |

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **6.1. MISI 1: MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS-SBK**

Perwujudan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau yang dijadikan sebagai persyaratan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tenram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada falsafah berdasarkan "Adat Bersandi Sarak Sarak Bersandi Kitabullah". Sedangkan sasaran yang akan dicapai: a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, c) Meningkatnya kerukunan umat beragama, d) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, e) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya, f) Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, dan g) Berkurangnya tingkat konflik dalam masyarakat.

#### **6.1.1. Strategi untuk Misi 1**

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut: meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah, mengembangkan komunikasi antar umat beragama, mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah, mengembangkan lembaga seni dan budaya, meningkatkan kelembagaan adat dan budaya daerah, meningkatkan peranan pemangku adat dalam pendidikan adat, meningkatkan pendidikan moral bagi remaja, dan menekan terjadinya perbuatan maksiat.

### **6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1**

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 1 adalah: mengembangkan kurikulum pendidikan agama, mengembangkan kepustakaan rumah ibadah, meningkatkan kapasitas guru-guru agama, meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah, menambah jam pelajaran untuk praktek agama, mengembangkan forum pertemuan antar agama, mengembangkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan kurikulum pendidikan ABS-SBK, memasyarakatkan nilai-nilai moral ABS-SBK, mengembangkan gerakan terpadu pengamalan agama dan ABS-SBK, mengembangkan kepustakaan adat dan budaya, menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah, meningkatkan pengelolaan keberagaman sosial budaya, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, meningkatkan komunikasi pemangku adat dengan masyarakat, meningkatkan penyuluhan moral kepada remaja dan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 1 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.  
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1**

| VISI   | TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT   |   |  |
|--|--|---|--|
| MISI 1   | Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah"                                  |   |  |
| TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
| 1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais | 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama<br>2. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama  | 1. Meningkatkan akses informasi keagamaan<br>2. Meningkatkan pengelolaan potensi dan agihan zakat<br>3. Meningkatkan pelayanan haji<br>4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Qur'an<br>5. Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah | 1. Meningkatkan akses informasi keagamaan<br>2. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak<br>3. Menambah jam pelajaran untuk praktek agama<br>4. Meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat<br>5. Meningkatkan kualitas pelayanan Jemaah haji<br>6. Meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Qur'an<br>7. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah |
| 2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya | 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya<br>2. Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya<br>3. Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya | 1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah<br>2. Mengembangkan lembaga seni dan budaya<br>3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah<br>4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat seni dan budaya daerah               | 1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat<br>2. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah<br>3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah<br>4. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga adat, seni dan budaya daerah<br>5. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan adat dan budaya                           |

| TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |
|--|--|---|---|
| 3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat | 1. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menekan terjadinya perbuatan maksiat</li> <li>2. Meningkatkan pendidikan bagi moral remaja</li> </ol> | 1. Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat |

## 6.2 MISI 2: MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESSIONAL

Pelaksanaan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang mendambakan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi*, *Kolusi* dan *Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good goverment*) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien. Sasaran yang hendak dicapai adalah: a) Meningkatnya kinerja aparatur daerah, b) Tersedianya data dan informasi statistik, c) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah, d) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu, e) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, f) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, g) Berkurangnya temuan audit keuangan, h) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, i) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan.

### 6.2.1. Strategi untuk Misi 2

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 2, ditempuh strategi: meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah, meningkatkan jenis dan kualitas data statistik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah, meningkatkan ketatalaksanaan pelayanan publik, mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu, mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur, meningkatkan kemampuan aparatur

dalam bidangnya, meningkatkan ketepatan penempatan aparatur, meningkatkan disiplin aparatur, meningkatkan motivasi kerja aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengembangkan kelembagaan yang adaptif, membangun produk hukum yang adil dan partisipatif, memantapkan manajemen kepegawaian melalui pembinaan karir, mengembangkan perencanaan berbasis data, dan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pembangunan.

### **6.2.2 Arah Kebijakan untuk Misi 2**

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: mengembangkan produk hukum yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN, menyediakan data dan informasi statistik, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu, memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas, mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas, meningkatkan pola karir aparatur yang terarah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur, mengembangkan pola insentif yang efektif, melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang adaptif, mengembangkan kualitas musrenbang daerah, mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan, mengembangkan basis data pembangunan, dan meningkatkan administrasi pengawasan pembangunan. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 2 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2.  
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2**

| <b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat</b> |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>MISI 2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional</b>                 |  |  |   |
| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
| 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel                    | 1. Meningkatnya efektivitas peraturan daerah<br>2. <i>Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan</i><br>3. Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif<br>4. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM<br>- <i>Meningkatnya perlindungan Hukum dan HAM</i> | 1. Meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah<br>2. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah<br>3. Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas<br>4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penganggaran pembangunan<br>5. Pembangunan Materi Hukum<br>6. Mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan<br>7. Terwujudnya budaya sadar hukum dan taat hukum di masyarakat<br>8. Tersedianya sarana dan informasi hukum | 1. Mengembangkan produk hukum yang efektif<br>2. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah<br>3. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah<br>4. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan<br>5. Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah<br>6. Meningkatkan rancangan produk hukum<br>7. Meningkatkan budaya sadar dan taat hukum pada masyarakat<br>8. Meningkatkan saran dan informasi hukum |

| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|---|---|--|---|
| 2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima                        | <p>1. Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</p> <p>3. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu</p> <p>4. Meningkatnya kemampuan pemerintahan Nagari/Desa/ Kelurahan</p> <p>5. <i>Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>- <i>Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu</i></p> <p>- <i>Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</i></p> | <p>1. Mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu</p> <p>2. Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan system informasi kependudukan yang terpadu:</p> <p>4. Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/ Kelurahan</p> <p>5. Pengembangan komunikasi dan infomasi</p> <p>6. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik</p> <p>7. Meningkatnya tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah</p> <p>9. Terwujudnya good governance</p> <p>10.Terwujudnya sinergitas pembangunan antar wilayah</p> | <p>1. Mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu</p> <p>3. Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan kependudukan melalui ketersediaan system informasi kependudukan yang terpadu</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Nagari/Desa/Kelurahan</p> <p>6. Meningkatkan kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan</p> <p>7. Mengembangkan komunikasi dan infomasi</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik</p> <p>9. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>10.Meningkatkan kualitas lembaga perwakilan daerah</p> <p>11.Mewujudkan good governance</p> <p>12.Meningkatkan sinergitas pembangunan antar wilayah</p> |
| 3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN | <p>1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</p> <p>2. Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja</p> <p>3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>4. Berkurangnya temuan audit inspektorat</p> <p>5. Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien</p> <p>- <i>Berkurangnya temuan audit yang bernuansa KKN</i></p>  | <p>1. Meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidangnya</p> <p>3. Meningkatkan ketepatan penempatan aparatur</p> <p>4. Meningkatkan disiplin aparatur</p> <p>5. Meningkatkan motivasi kerja aparatur</p> <p>6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN</p> <p>7. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur pelaksana pembangunan</p> <p>8. Meningkatkan penambahan khasanah arsip</p> <p>9. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan</p>  | <p>1. Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas</p> <p>2. Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan karir aparatur yang terarah</p> <p>4. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur</p> <p>5. Mengembangkan pola insentif yang efektif</p> <p>6. Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah</p> <p>7. Meningkatkan manajemen kepegawaian</p> <p>8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN</p> <p>9. Menyusun SOP</p> <p>10. Meningkatkan SDM Aparatur</p> <p>11. Meningkatkan efektifitas penyusutan arsip instansi pemerintah</p> <p>12. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan</p>  |
| 4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif  | <p>1. <i>Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan</i></p> <p>2. <i>Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan</i></p>   | <p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan jenis dan kualitas data statistik</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan</p>   | <p>1. Mengembangkan kualitas musrenbang daerah</p> <p>2. Tersedianya data dan infomasi statistik</p> <p>3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan</p>   |

### **6.3 MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN DAN BERKUALITAS TINGGI**

Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: a) Meningkatnya angka partisipasi sekolah, b) Meningkatnya umur harapan hidup, c) Menurunnya persentase gizi buruk, d) Meningkatnya kualifikasi guru, d) Meningkatnya jumlah sekolah unggul dengan pendidikan berkarakter, e) Berkembangnya pendidikan bernuansa surau, f) Berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, g) Meningkatnya jumlah wirausahawan yang profesional, h) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, i) Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **6.3.1. Strategi untuk Misi 3**

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut: meningkatkan akses pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pembinaan pemuda dan olahraga, meningkatkan pelayanan kesehatan, penurunan persentase gizi buruk, meningkatkan strata pendidikan guru, meningkatkan sertifikasi guru, meningkatkan jumlah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, meningkatkan jumlah wirausahawan profesional, mengembangkan sumber-sumber belajar yang berkualitas, meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi.

#### **6.3.2. Arah kebijakan untuk Misi 3**

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan akses dan kualitas

pendidikan menengah, mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olah raga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelayan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, meningkatkan pendidikan guru minimal sarjana, meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernaluansa surau, meningkatkan jumlah dan kuantitas sekolah kejuruan, mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha, mengembangkan perpustakaan berkualitas, meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan, dan meningkatkan pertemuan antara peneliti dengan masyarakat dan swasta. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 3 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

**Tabel 6.3.  
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3**

| <b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat</b> |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>MISI 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi</b> |   |   |   |
| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
| 1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter                                    | 1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD<br>2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar<br>3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah<br>4. Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan<br>5. Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi<br>6. Meningkatnya prestasi olah raga<br>7. Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan<br>8. Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan | 1. Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD<br>3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>4. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar<br>5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>6. Meningkatnya kualifikasi guru menengah<br>7. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan berkualitas serta Dilandasi Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia<br>7. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan<br>8. Meningkatnya pembinaan dan permasyarakat olahraga<br>9. Terwujudnya sarana dan prasarana olah raga yang representatif | 1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD<br>3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>4. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar<br>5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>6. Meningkatnya kualifikasi guru menengah<br>7. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>8. Meningkatkan Pengelolaan, Pengawasan dan Manajemen<br>9. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter<br>10. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan boarding school<br>11. Meningkatnya jumlah sekolah bertaraf SBI dan RSBI<br>12. Meningkatkan kualitas sekolah sehat<br>13. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik<br>14. Meningkatkan kompetensi pendidikan bernaluansa surau<br>15. Meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan<br>16. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas peneliti |

| TUJUAN                                       | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|--|--|--|
|  | <p>9. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat<br/> <i>- Meningkatnya SDM yang unggul dan mutu pendidikan</i></p>  | <p>10. Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan<br/> 11. Meningkatnya kualitas organisasi pemuda peran serta keterampilan pemuda<br/> 12. Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang berkualitas</p>  | <p>17. Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan<br/> 18. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang<br/> 19. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah<br/> 20. Meningkatkan pembinaan olahraga yang intensif dan konsisten<br/> 21. Meningkatkan sarana parasarana olah raga<br/> 22. Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan<br/> 23. Meningkatkan kualitas organisasi pemuda<br/> 24. Meningkatkan keterampilan pemuda<br/> 25. Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan<br/> 26. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan<br/> 27. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan</p>   |
| 2. Terwujudnya Sumberdaya manusia yang sehat | <p>1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak<br/> 2. <i>Meningkatnya umur harapan hidup (meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)</i><br/> 3. <i>Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang (meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)</i><br/> 4. <i>Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender</i><br/> 5. <i>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</i></p> | <p>1. Meningkatkan kualitas pendidikan perempuan dan anak<br/> 2. Terwujudnya ketersediaan, pemerataan dan letarjang-kauan obat bagi masyarakat<br/> 3. Terwujudnya akses kesehatan bagi semua masyarakat<br/> 4. Meningkatnya peran aktif masyarakat, swasta dalam pembangunan kesehatan<br/> 5. Terwujudnya masyarakat yang terhindar dari penyakit menular/tidak menular<br/> 6. Terwujudnya peningatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar<br/> 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik<br/> 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan<br/> 9. Tersedianya akses pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan<br/> 10. Meningkatkan coverage pelayanan kesehatan masyarakat<br/> 11. Meningkatnya perencanaan pembangunan kesehatan<br/> 12. Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas<br/> 13. Penurunan persentase prevalensi gizi kurang</p> | <p>1. Meningkatkan pendidikan gender<br/> 2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak<br/> 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat<br/> 4. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata<br/> 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan<br/> 6. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara intensif<br/> 7. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar<br/> 8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan<br/> 9. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu<br/> 10. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan<br/> 11. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan<br/> 12. Meningkatnya kualitas data dan informasi kesehatan<br/> 13. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan<br/> 14. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin<br/> 15. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna<br/> 16. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat<br/> 17. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak</p> |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|--------|---------|--|---|
|        |         | 14. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak<br>15. Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan<br>16. Meningkatnya pengarus utamaan gender dan hak anak<br>17. Meningkatnya jumlah akseptor KB<br>18. Tersedianya informasi yang cukup tentang KB kepada masyarakat<br>19. Meningkatnya ketersediaan tenaga pendamping terampil | 18. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan<br>19. Meningkatkan pengarus utamaan gender dan anak<br>20. Meningkatkan jumlah akseptor KB terutama pasangan usia subur<br>21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi tentang KB<br>22. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping terampil |

#### **6.4. MISI 4: MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TANGGUH, PRODUKTIF, BERBASIS KERAKYATAN, BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL**

Pewujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidak adilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, wisata, dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: a) Meningkatnya produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, b) Meningkatnya jumlah kawasan sentra produksi pertanian, c) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, d) Meningkatnya industri unggulan daerah, e) Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan, f) Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan alam dan wisata budaya, g) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, h) Menurunnya persentase penduduk miskin, i) Menurunnya persentase pengangguran, j) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, k) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat,

l) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air, m) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, n) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

#### **6.4.1. Strategi untuk Misi 4**

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan, adalah sebagai berikut: meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (*fishery processing*), memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian, mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju, dan menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain.

Strategi pada prioritas pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi adalah sebagai berikut: mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah, meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan, melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan, meningkatkan daya saing komoditi daerah, dan meningkatkan kerjasama promosi dan investasi.

Strategi pada prioritas pengembangan kawasan alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat, mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat, meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata, dan meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur parawisata.

Untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran ditempuh strategi: mengembangkan pendataan penduduk miskin, membangun gerakan terpadu dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk miskin, memberikan bantuan bagi penduduk miskin dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Sedangkan pada prioritas pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat ditempuh strategi sebagai berikut: meningkatkan jumlah jalan dan jembatan, meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan, menyediakan perumahan dan pemukiman masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya air, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, dan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

#### **6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4**

Untuk melaksanakan strategi tersebut dalam prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani, membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan, mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan), mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) hasil perikanan (*fishery processing*), memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengembangkan gerakan terpadu dalam menfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari, dan menfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

Untuk prioritas pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri, meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK, meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK, meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK, meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK, meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK, membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan, meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen, memperpendek mata rantai pemasaran, meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi, mengembangkan pemberian insentif bagi para investor, meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor, dan mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Arah kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah mengembangkan kawasan wisata alam Gunung Padang, mengembangkan kawasan wisata alam Mandeh, mengembangkan kawasan wisata alam Panorama Baru, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Kembar, mengembangkan kawasan wisata alam Kawasan Harau, mengembangkan kawasan wisata tambang Sawahlunto, mengembangkan kawasan wisata budaya Ulakan Tapakis, mengembangkan kawasan wisata budaya Pagaruyung, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Maninjau, mengembangkan kawasan wisata surfing Mentawai, meningkatkan promosi

yang efektif, dan meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata, meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, meningkatkan Kualitas produk wisata budaya.

Untuk prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, memberikan bantuan biaya pendidikan penduduk miskin, memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin, melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, memberi bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah diperlukan arah kebijakan: meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan, membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat, membangun jalan dan jembatan penunjang pariwisata, membangun jalan dan jembatan untuk evakuasi bencana, mengembangkan infrastruktur kawasan khusus, membangun prasarana jalan strategis antar daerah, membangun perumahan masyarakat, menata bangunan dan lingkungan pemukiman, mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya, mengelola konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, mengembangkan angkutan kereta api, membangun dan rehabilitasi sarana dan fasilitas jalan, membangun dan rehabilitasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengembangkan komunikasi dan informasi, mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut, mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun regulasi dan pengelolaan energi, mengembangkan energi kelistrikan, menyusun regulasi dan mengendalikan pemanfaatan tambang mineral, hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 4 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4.**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4**

| <b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat</b>                              |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>MISI 4 : Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global</b> |   |  |  |
| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
| 1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis   | 1. <i>Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</i><br>2. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing)<br>4. <i>Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan</i> | 1. Meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>3. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing)<br>4. Memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian<br>5. Mengembangkan pembiayaan untuk menerapkan pertanian maju<br>6. Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain | 1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan<br>2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan<br>3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan<br>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani<br>5. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agro-industri pedesaan.<br>6. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan)<br>7. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan<br>8. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) hasil perikanan (Fishery Processing)<br>9. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, & perikanan<br>10. Mengembangkan gerakan terpadu dalam menfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya<br>11. Meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari |
| 2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi  | 1. <i>Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah</i><br>2. Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan<br>3. <i>Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi</i><br>4. <i>Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan</i><br>5. <i>Meningkatnya ekspor daerah</i><br>6. <i>Meningkatnya investasi daerah</i>  | 1. Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah<br>2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan<br>3. Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi<br>4. Menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan<br>5. Melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan<br>6. Meningkatkan daya saing komoditi daerah<br>7. Meningkatkan kerjasama promosi dan investasi   | 1. Menfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah<br>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri<br>3. Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK<br>4. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK<br>5. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK<br>6. Meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK<br>7. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK<br>8. Membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan<br>9. Meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen<br>10. Memperpendek mata rantai pemasaran<br>11. Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi<br>12. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor<br>13. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor<br>14. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal<br>15. Meningkatkan investasi dan pengawasan sumberdaya mineral dan batubara  |

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|---|--|--|--|
| 3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya         | <p>1. Berkembangnya wisata seni dan budaya</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik</p> <p>3. <i>Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara</i></p>  | <p>1. Mengembangkan wisata seni dan budaya daerah</p> <p>2. Mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat</p> <p>3. Mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat</p> <p>4. Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata</p> <p>5. Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur parawisata</p>   | <p>1. Meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas produk wisata budaya</p> <p>3. Mengembangkan kawasan (kws) wisata alam Gunung Padang</p> <p>4. Mengembangkan kws. wisata alam Mandeh</p> <p>5. Mengembangkan kws. wisata alam Panorama Baru</p> <p>6. Mengembangkan kws. wisata alam Danau Kembar</p> <p>7. Mengembangkan kws. wisata alam kws. Harau</p> <p>8. Mengembangkan kws. wisata tambang Sawahlunto</p> <p>9. Mengembangkan kws. wisata budaya Ulakan Tapakis</p> <p>10. Mengembangkan kws. wisata budaya Pagaruyung</p> <p>11. Mengembangkan kws. wisata alam danau maninjau</p> <p>12. Mengembangkan kws. wisata surfing Mentawai</p> <p>13. Meningkatkan promosi yang efektif</p> <p>14. Meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata</p>  |
| 4. Berkurangnya pen duduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal | <p>1. Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>2. Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial</p> <p>3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya</p> <p>4. <i>Menurunnya tingkat kemiskinan</i></p> <p>5. Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal</p> <p>6. Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal</p> <p>7. <i>Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal</i></p> <p>8. Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal</p> <p>- <i>Berkurangnya daerah tertinggal</i></p> | <p>1. Terwujudnya pelayanan terhadap PMKS</p> <p>2. Terwujudnya Sasaran program/ kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien</p> <p>3. Terwujudnya pengembangan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu</p> <p>4. Meningkatkan integrasi sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin</p> <p>5. Meningkatkan infrastruktur</p> <p>6. Meningkatkan rasio elektifikasi</p> <p>7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasana pelayanan dasar</p> <p>8. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan</p> | <p>1. Meningkatkan pelayanan panti sosial untuk PMKS</p> <p>2. Meningkatkan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS</p> <p>3. Sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial</p> <p>4. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu</p> <p>5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja</p> <p>6. Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja</p> <p>7. Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan</p> <p>8. Meningkatkan efektifitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>9. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan</p> <p>10. Meningkatkan jaringan listrik dan telekomunikasi</p> <p>11. Meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi</p> <p>12. Memperluas lapangan kerja</p> <p>13. Meningkatkan usaha ekonomi mikro</p> <p>14. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana pendidikan</p> <p>15. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana kesehatan</p> |
| 5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat    | <p>1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan</p> <p>2. Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air</p>  | <p>1. Membangun jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi</p> <p>2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat</p> <p>3. Menyediakan perumahan dan permukiman masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air</p>   | <p>1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan (PU)</p> <p>2. Meningkatkan aksesibilitas wil. yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau (pu)</p> <p>3. Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (pu)</p> <p>4. Penataan kawasan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat, dan asri (perumahan)</p> <p>5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum (air bersih, limbah, sampah dan drainase) yang memadai dan terpadu (perumahan)</p>  |

| TUJUAN | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |
|--------|---|---|---|
|        | <p>5. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara</p> <p>6. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik</p> <p><i>Meningkatnya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat</i></p> | <p>6. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara</p> <p>7. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik</p> | <p>6. Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung melalui pengawasan dan pembinaan teknis standar bangunan gedung serta peningkatan keserasiannya dengan tata ruang dan lingkungan (perumahan)</p> <p>7. Merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang (tata ruang)</p> <p>8. Peningkatan dan mempertahankan kondisi saluran irigasi dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (pu)</p> <p>9. Mengelola konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (pu)</p> <p>10. Optimalisasi bendung dan embung yang telah dibangun untuk menunjang irigasi dan pengendalian (pu)</p> <p>11. Medayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, pertanian, perkotaan, dan industri (pu)</p> <p>12. Melindungi kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/ sedimen (pu)</p> <p>13. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (pu)</p> <p>14. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut (perhubungan)</p> <p>15. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara (perhubungan)</p> <p>16. Mengembangkan angkutan kereta api (perhubungan)</p> <p>17. Mengembangkan energi kelistrikan (energi)</p> <p>18. Menyusun regulasi dan pengelolaan energi (energi)</p> |

## 6.5. MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuensi. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksplorasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima ini adalah: a) Tersedianya informasi wilayah rawan bencana, b) Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana, c) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, d) Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup, e) Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, f) Menurunnya jumlah *illegal logging* dan *illegal fishing*.

### **6.5.1. Strategi untuk Misi 5**

Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Misi 5, ditempuh strategi sebagai berikut: menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, dan menurunkan jumlah *illegal logging* dan *illegal fishing*.

### **6.5.2. Arah Kebijakan untuk Misi 5**

Sedangkan arah kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiagaan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari *illegal logging*, mengamankan laut dari *illegal fishing*, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 5 dapat dilihat pada Tabel 6.5.

**Tabel 6.5.**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5**

| <b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat<br><b>MISI 5</b> : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
| 1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana  | 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana<br>2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana<br>3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana<br>- <i>Meningkatnya pengurangan resiko bencana, dan pemulihan kawasan/daerah pasca bencana</i><br>- <i>Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana</i><br>- <i>Meningkatnya pemulihian wilayah/daerah pasca bencana</i> | 1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana<br>2. Menyediakan informasi wilayah rawan bencana<br>3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana | 1. Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana<br>2. Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu<br>3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana                                 |
| 2. Tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas   | 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup<br>2. <i>Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihian ekosistem</i><br>3. Menurunnya jumlah illegal logging<br>- <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup</i><br>- <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>  | 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup<br>2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihian ekosistem<br>3. Menurunkan jumlah illegal logging | 1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup<br>2. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam<br>3. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup<br>4. Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut<br>5. Mengamankan hutan dari <i>illegal logging</i> |



## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM**

#### **PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada Bab VI telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Berdasarkan hasil jabaran tersebut pada Bab ini akan diidentifikasi indikator-indikator kinerja, target capaian, serta program-program prioritas yang harus direalisir untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang. Program-program tersebut, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

##### **7.1.1 Kebijakan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan**

Kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur terdiri dari: Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

##### **7.1.2. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 1**

Kebijakan umum untuk mencapai Misi 1 adalah: Meningkatkan akses informasi keagamaan, Meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah, Menambah jam pelajaran untuk praktek agama, menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak, meningkatkan pengelolaan

potensi dana agihan zakat, meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji, meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Quran, mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat, Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah, Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat.

Sedangkan program-program prioritas untuk mewujudkan Misi 1 adalah: Gerakan Terpadu Pengamalan Agama dan ABS-SBK, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama, Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Seni dan Budaya, Pengembangan Pendidikan Budaya. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.1.

**TABEL 7.1**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 1**

| NO | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT                                  | CAPAIAN KINERJA         |                         | PROGRAM  | URUSAN   | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |   |   |   |                                      | KONDISI<br>AWAL         | KONDISI<br>AKHIR        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| I  | <b>Misi 1 : Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK</b> |   |   |   |                                      |                         |                         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | <b>Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat</b>  |   |   |   |                                      |                         |                         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama   | 1. Meningkatkan akses informasi keagamaan<br>2. Meningkatkan pemahaman terhadap Al Qur'an   | 1. Meningkatkan akses informasi keagamaan<br>2. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak<br>3. Menambah jam pelajaran untuk praktik agama.<br>4. Meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Qur'an | Meningkatnya syiar agama kepada masyarakat<br><br>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap Al Qur'an<br><br>Wirid/pelatihan/kegiatan ibadah yang dilaksanakan   | %<br><br>Peringkat<br><br>%          | N/A<br><br>5<br><br>N/A | 100<br><br>4<br><br>100 | Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan<br><br>Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama<br><br>Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama | Kebudayaan<br><br>Kebudayaan<br><br>Kebudayaan | Biro Binsos<br><br>Biro Binsos<br><br>Biro Binsos               |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama  | 1. Meningkatkan pengelolaan potensi dan agihan zakat<br>2. Meningkatkan pelayanan haji<br>3. Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah | 1. Meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat<br>2. Meningkatnya kualitas pelayan haji<br>3. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah   | Meningkatnya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan<br><br>Meningkatnya pelayanan Jemaah haji   | %<br><br>%                           | N/A<br><br>N/A          | 100<br><br>100          | Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan<br><br>Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama   | Kebudayaan<br><br>Kebudayaan                   | Biro Binsos<br><br>Biro Binsos                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya (SOSIAL BUDAYA)                                    | 1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah<br>2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah                    | 1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat   | Terwujudnya pengembangan nilai budaya di masyarakat<br><br>Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat adat<br><br>Sinkronisasi program pemerintah dengan lembaga adat. | %<br><br>Kali Pelati-han<br><br>kali | N/A<br><br>N/A          | 100<br><br>4<br><br>12  | Pengembangan Nilai Budaya<br><br>Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat<br><br>Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat  | Kebudayaan<br><br>Kebudayaan                   | Dinas Sosial, Biro Binsos<br><br>Biro Binsos<br><br>Biro Binsos |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat  | 1. Menekan terjadinya perbuatan maksiat<br>2. Meningkatkan pendidikan bagi moral remaja   | Fasilitasi pengawasan terhadap pelan ggara perbuatan maksiat  | Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat  | %                                    | N/A                     | 20                      | Peningkatan Pemberantasian Maksiat   | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri       | Badan Kesbang Linmas  |  |  |  |  |  |  |  |



### **7.1.3. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 2**

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 2 adalah: mengembangkan produk hukum yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN, menyediakan data dan informasi statistik, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu, memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas, mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas, meningkatkan pola karir aparatur yang terarah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur, mengembangkan pola insentif yang efektif, melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang adaptif, mengembangkan kualitas musrenbang daerah, mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan, mengembangkan basis data pembangunan, dan meningkatkan administrasi pengawasan pembangunan.

Sedangkan program prioritas untuk mencapai Misi 2 adalah: Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi, Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Pengembangan E-Government dan E-Procurement, Peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Materi Hukum, Pengembangan Data dan Statistik, Peningkatan Supremasi dan Jaminan Perlindungan Hukum, Peningkatan Budaya Hukum, Peningkatan Sarana Informasi Hukum, Peningkatan Penataan Perundang-undangan, Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, Peningkatan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik, Peningkatan manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsamaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Peningkatan Manajemen ADM Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah, Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.2.

**TABEL 7.2  
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 2**

| NO  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT       | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN   | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|-----------|-----------------|------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |   |   |           | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misi 2: Mewujudkan Tata-Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional</b> |  |  |   |   |           |                 |                  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan</b>        |  |  |   |   |           |                 |                  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah        | 1. Meningkatkan kualitas perekonomian pembangunan<br>2. Meningkatkan jenis dan kualitas data dan informasi pembangunan   | 1. Mengembangkan kualitas proses perencanaan daerah<br>2. Tersedianya data dan informasi pembangunan  | Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RTRW. RPJP, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS)                       | %         | -               | 77               | Perencanaan Pembangunan Daerah                   | Perencanaan Pembangunan  | BAPPEDA                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan | Meningkatkan koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas perencanaan pembangunan   | Meningkatkan kualitas koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan  | Meningkatnya konsistensi kesesuaian program dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah (RTRW. RPJPD, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS) | %         | -               | 65               | Pengembangan Data dan Informasi Statistik        | Perencanaan Pembangunan  | BAPPEDA                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif  | Pembangunan materi Hukum   | Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah   | Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas Produk Hukum Daerah yang kondusif  | Jml Perda | 11              | 21               | Pembangunan Materi Hukum                         | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian | Biro Hukum                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Meningkatnya kualitas perlindungan Hukum dan HAM               | 1. Mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan<br><br>2. Terwujudnya budaya sadar hukum dan taat hukum di masyarakat<br><br>3. Tersedianya sarana dan informasi hukum | 1. Meningkatkan rancangan produk hukum daerah<br><br>2. Meningkatkan budaya sadar dan taat hukum pada masyarakat<br>3. Meningkatkan saran dan informasi hukum | Meningkatnya jumlah pembinaan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota dalam rangka evaluasi   |           |                 |                  | Pembangunan Materi Hukum                         |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   | Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat  | %         | -               | 95               | Peningkatan Budaya Hukum                         | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian | Biro Hukum                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   | Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan HAM   | %         | -               | 95               | Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian | Biro Hukum                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   | Jumlah Perda yang ditegakkan  | Perda     | 0               | 2                | Peningkatan supremasi hukum Peraturan Daerah     | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                       | Sat Pol PP                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT          | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|----|--|---|---|--|--------------|-----------------|------------------|--|---|---|
|    |  |   |   |  |              | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |   |   |
|    |  |   |   | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi yang memahami fungsi Linmas             | Kab/kota     | 0               | 19               | Peningkatan fungsi perlindungan masyarakat                                 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  | Sat Pol PP  |
|    |  |   |   | Jumlah Kab/kota yang tertib dan tentram                                    | Kab/kota     | 0               | 19               | Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenetrarman masyarakat                  | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  | Sat Pol PP  |
|    |  |   |   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Informasi Hukum                         | %            | 95              | 45               | Sarana Informasi Hukum   | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Biro Hukum  |
|    |  |   |   | Persentase Perundang-Undangan yang Dapat Tersusun dan Terdokumentasikan    | %            | 95              | 75               | Peningkatan Penataan Perundang-Undangan                                    | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Biro Hukum, Setwan                                |
|    | Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu | Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan sistem informasi kependudukan yang terpadu                                    | Meningkatnya pelayanan kependudukan melalui ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu   | Ketersediaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang akuntabel | Jml Kab/Kota | N/A             | 19               | Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                    | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Biro Pemerintahan dan Kependudukan                |
|    | Meningkatnya kinerja aparatur daerah                                 | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan propinsi yang lebih professional   | 1. Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas<br>2. Meningkatkan pembinaan karir aparatur yang terarah<br>3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur                     | Persentase peningkatan kinerjaperangkat pemerintah daerah                  | %            |                 |                  | Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Biro Organisasi, Biro Pemerintahan & Kependudukan |
|    |  |   |   | Tingkat kelulusan diklat   | %            | 5               | 7                | Pendidikan Kedinasan   | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Badan Diklat                                      |
|    | Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan dan aset     | 1. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah<br>2. Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas | 1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah<br>2. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah<br>3. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur.                    | SKPD         | 5               | 38 (K)           | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparaturt                 | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Biro Organisasi                                   |

| NO | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT             | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|----|--|---|--|--|-----------------|-----------------|------------------|--|---|----------------------------------|
|    |  |   |  |  |                 | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |   |                                  |
|    |  |   |  | Kualitas LKPD  | Opini           | Disclaimer      | WTP              | Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum        | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Inspektorat                      |
|    |  |   |  | Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah                     | Ketepatan waktu | Tepat Waktu     | Tepat Waktu      | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | DPKD                             |
|    |  |   |  | Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan kab/kota sesuai dengan ketentuan   | Kab/ kota       | 19              | 19               | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota   | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | DPKD                             |
|    |  |   |  | Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah                          | Orang           | 210             | 600              | Peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah  | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | DPKD                             |
|    | Meningkatnya pendapatan daerah                                     |   |  | Persentase peningkatan pendapatan daerah   | %               | -5,20           | 61,92            | Peningkatan Pendapatan Daerah                            | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | DPKD                             |
|    |  |   |  |  | Rp.<br>(juta)   | 1.920.971       | 3.110.525        |  |   |                                  |
|    | Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik | Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik | Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik  | Meningkatnya mutu manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel       | %               | 30              | 100              | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                  | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | Bappeda (UPTB-LPSE)              |
|    | Meningkatnya kompetensi aparatur daerah                            | Meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur                            | Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas   | Meningkatnya Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur                         | %               | N/A             | 95               | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                      | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeng Dan Persandian | BKD                              |
|    | Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Nagari/ Desa/ Kelurahan          | Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/ Kelurahan             | 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Nagari/ Desa/ Kelurahan<br>2. Meningkatkan kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/ Kelurahan | Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan | %               | N/A             | 100              | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari | Pemberdayaan Masyarakat   | Biro Pemerintahan & Kependudukan |

| NO   | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | SAT | CAPAIAN KINERJA |   | PROGRAM  | URUSAN   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|-----------------------------|-----|-----------------|---|--|--|-----------------------|
|  |   |   |  |                             |     | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR   |  |  |                       |
| Terselenggaranya penatausahaan karsipan secara efektif dan efisien | 1. Meningkatkan penambahan khasanah arsip<br>2. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana karsipan<br>3. Optimalisasi layanan karsipan | 1. Meningkatkan efektifitas penyusutan arsip instansi pemerintah<br>2. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan karsipan<br>3. Melaksanakan pengolahan dan pemeliharaan arsip yang mempunyai nilai guna ilmiah dan kesejarahan<br>4. Meningkatkan wawasan arsiparis pada SKPD  | Meningkatnya Kelembagaan Pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan                                       | %                           | 100 | 100             | Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan nagari   | Pemberdayaan Masyarakat  | Biro Pemerintahan & Ke pendudukan              |                       |
|  |   |   | Dokumen daerah terselamatkan   | %                           |     | 95              | Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah       | Karsipan   | Badan Pustaka dan Arsip                        |                       |
|  |   |   | Jumlah khazanah arsip statis yang terselamatkan  | Kab/ kota                   | 4   | 4               | Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah      | Karsipan   | Badan Pustaka dan Arsip                        |                       |
|  |   |   | Optimalnya pelaksanaan karsipan  | SKPD                        | 10  | 42              | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi                | Karsipan   | Badan Pustaka dan Arsip                        |                       |
|  |   |   |  | Orang                       | 0   | 0               |   |  |  |                       |
|  | Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  | 1. Pengembangan komunikasi dan infomasi<br>2. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik<br>3. Meningkatnya tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>4. Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah<br>5. Terwujudnya good governance<br>6. Terwujudnya sinergitas pembangunan antar wilayah | Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan infomasi di Sumbar                        | %                           | N/A | 80              | Pengembangan Komunikasi dan Informatika                 | Komunikasi dan Informatika   | Dinas Perhubungan, Biro Humas                  |                       |
|  |   |   | Terlaksananya pembinaan komunikasi dan infomasi  | Paket                       | N/A | 2(t)            | Pengembangan Komunikasi dan Informatika                 | Komunikasi dan Informatika   | Dinas Perhubungan, Biro Humas, Ktr. Penghubung |                       |
|  |   |   | Ketersediaan data informasi penyelenggaraan komunikasi   | Buku                        | 0   | 5 (k)           | Pengembangan Data dan Infomasi                          | Komunikasi dan Informatika   | Dinas Perhubungan, Biro Humas                  |                       |
|  |   |   | Penyebarluasan Infomasi Penyelenggaraan Pemerintahan   | Kali Pem beritaan           | 0   | 60 (k)          | Penyebarluasan Infomasi Penyelenggaraan Pemerintahan    | Komunikasi dan Informatika   | Biro Humas                                     |                       |
|  |   |   | Meningkatnya pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta perbaikan manajemen kepegawaian | %                           | 50  | 85              | Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian | Biro Pembangunan dan Rantau                    |                       |
|  |   |   | Meningkatnya kapasitas dan etos kerja lembaga perwakilan daerah                                    | Kali Kunjungan              | N/A | 21              | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah         | Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian | Setwan   |                       |



#### **7.1.4. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 3**

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 3 adalah: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah, mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olah raga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelayan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, meningkatkan pendidikan guru minimal sarjana, meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, meningkatkan jumlah dan kuantitas sekolah kejuruan, mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha, mengembangkan perpustakaan berkualitas, meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan, dan meningkatkan pertemuan antara peneliti dengan masyarakat dan swasta.

Program prioritas untuk mencapai Misi 3 untuk prioritas pendidikan adalah: Gerakan Terpadu peningkatan SDM, Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Non Formal, Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Berkarakter, Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olah Raga, Pembinaan dan Pemasangan Olah Raga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Peningkatan Peranserta Kepemudaan, Peningkatan Penyadaran Kepemudaan, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Pendidikan Kharakter, Peningkatan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau, Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, Pengembangan "Sekolah Sahabat" regional dan internasional, Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan, Pengembangan sekolah sehat, Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah.

Program prioritas untuk mencapai Misi 3 untuk prioritas kesehatan adalah: Penyediaan Obat dan Pembekalan Kesehatan, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah sakit/RS. Paru/RS Jiwa/RS Mata, Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Keluarga Berencana, Pelayanan Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan

Anak, Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Paru/ RS Jiwa/ RS. Mata, Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.3.

**TABEL 7.3**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 3**

| NO  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                                       | SAT         | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN     | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |                |  |             | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misi 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi</b> |  |  |                |  |             |                 |                  |  |            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan</b>                              |  |  |                |  |             |                 |                  |  |            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD   | 1. Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatnya kualifikasi guru PAUD             | 1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD   |                | Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD                               | Jumlah APE  | -               | 182              | Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini                | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Workshop penyusunan materi PAUD                                      | Kali/ Judul | -               | 7                | Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini                |            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Sosialisasi Materi PAUD  | Orang       | -               | 937              | Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini                | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar   | 1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar | 1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar   |                | Meningkatnya wajib belajar anak usia sekolah Pembinaan Sekolah Sehat | %           | -               | 100              | Peningkatan Akses Pendidikan Dasar                             | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                |  | %           | -               | 100              | Peningkatan Akses Pendidikan Dasar                             | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah   | 1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatnya kualifikasi guru menengah         | 1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>2. Meningkatnya kualifikasi guru menengah<br>3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan<br>4. Meningkatkan Pengelolaan, Pengawasan dan Manajemen |                | Meningkatkan penyelegaraan pendidikan menengah                       | Sekolah     | -               | 48               | Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional                                | Jumlah SBI  | -               | -                |  |            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Percentase buta aksara > 15 th                                       | %           | 3,2             | 2                | Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal & Informal         | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Lembaga dan program PUDNI terakreditasi                              | %           | 0,03            | 3,50             |  |            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Sarana Prasarana PLB   | %           | -               | 100              | Program Pendidikan Luar Biasa                                  | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Percentase Peserta Didik Terlantai                                   | %           | -               | 100              | Program Pendidikan Luar Biasa                                  | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Dokumen Data Pokok Pendidikan  | dokumen     | -               | 1                | Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya        | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |                | Percentase pemantauan dan pengendalian program dan proses pendidikan | %           | -               | 100              | Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya        | Pendidikan | Dinas Pendidikan            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO   | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SAT                                 | CAPAIAN KINERJA                   |   | PROGRAM   | URUSAN                        | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|
|  |   |   |  |   |                                     | KONDISI AWAL                      | KONDISI AKHIR                           |   |                               |                       |
| Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan | 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan berkualitas serta Dilandasi Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia              | 1. Tersedianya lembaga pendidikan ber karakter<br>2. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan boarding school<br>3. Meningkatnya jumlah sekolah berta raf SBI dan RSBI<br>4. Meningkatkan kualitas sekolah sehat<br>5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik<br>6. Meningkatkan kompetensi pendidikan bernuansa surau | SDM berkualitas yang ber karakter<br>SD Piloting<br>SMP Piloting<br>Sosialisasi dan workshop pendidikan ber karakter<br>Sekolah Sehat<br>Buku Pembelajaran bernuansa surau<br>Sinkronisasi Program   | Kab/kota<br>Jumlah<br>Jumlah<br>Kab/ Kota<br>%<br>%   | -<br>N/A<br>N/A<br>N/A<br>35<br>100 | 19<br>38<br>38<br>19<br>60<br>100 | Pendidikan Ber karakter                 | Pendidikan  | Dinas Pendidikan, Biro Binsos |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  | Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan           | Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan   | 1. Meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan<br>2. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas peneliti<br>3. Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan<br>4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang<br>5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Percentase hasil riset dan pengembangan yang dikordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan | %<br><br><br><br><br>               | -<br><br><br><br><br>             | 60                                      | Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintah dan Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan       | BAPPEDA               |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
|  |   |   |  |   |                                     |                                   |   |   |                               |                       |
| Meningkatnya prestasi olah raga                              | 1. Meningkatnya pembinaan dan permasarakatan olahraga<br>2. Terwujudnya sarana dan prasarana olah raga yang representatif | 1. Meningkatkan pembinaan olahraga yang intensif dan konsisten<br>2. Meningkatkan sarana prasarana olah raga  | Meningkatnya pembuda yan olahraga masyarakat Sumatera Barat<br>Meningkatnya prestasi olahraga Sumatera Barat tingkat wilayah, Nasional dan Internasional   | %<br>Even/ Peringkat  | 24,91<br>3/5 E/4                    | 100<br>5/9 E/3                    | Pembinaan dan Pemas yarakatan Olah Raga | Kepemudaan dan Olah Raga  | Dispora dan Biro binsos       |                       |

| NO   | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT                               | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM                                    | URUSAN                   | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
|  |  |  |   |  |                                   | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                          |                             |
| Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan | Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan               | Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan |   | Pembinaan pusat pen didikan latihan olah raga pelajar (PPLP) dan sekolah keberba katan olah raga (SKO) | Jumlah atlet                      | 1               | 80               | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Kepemudaan dan Olah Raga | Dispora                     |
|  |  |  |   | Prasarana dan sarana olah raga yang representatif  | Unit Gedung/ GOR                  | 3               | 12               |  |                          |                             |
|  |  |  |   |  | Paket peralatan                   | 0               | 15               |  |                          |                             |
|  |  |  |   | Prasarana dan sarana Pemuda yang representatif   | Unit Gedung/ GOR/ Paket Peralatan | 0               | 6                |  |                          |                             |
|  | Meningkatnya kemandirian pemuda dan organiasi pemuda peran serta keterampilan pemuda | Meningkatnya kualitas organissi pemuda                                       | 1. Meningkatkan kualitas organissi pemuda<br>2. Meningkatkan keterampilan pemuda  | Prasarana dan sarana kepramukaan yang refresentatif  | Unit / Gedung/ GOR                | 0               | 3                | Peningkatan Peranserta Kepemudaan          | Kepemudaan dan Olah Raga | Biro Binsos                 |
|  |  |  |   | Percentase peningkatan penyadaran pemuda   | Keg/org                           | 60              | 100              |  |                          |                             |
|  |  |  |   | Percentase peningkatan pemberdayaan pemuda   | Keg/org                           | 0               | 56               |  |                          |                             |
|  | Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat                                       | Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang berkualitas                          | 1. Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan<br>2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan<br>3. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan | Pengembangan kepemimpinan pemuda   | %/keg                             | N/A             | 100              | Pengembangan Kepemimpinan Pemuda           | Kepemudaan & Olah Raga   | Disdikpora                  |
|  | <b>Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>                         |  |   |  |                                   |                 |                  |  |                          |                             |
|  | Meningkatnya Umur Harapan hidup  | Terwujudnya ketersediaan, pemerataan dan letarjangkauan obat bagi masyarakat | Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat  | Percentase ketersediaan obat essensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar                     | %                                 | 85              | 100              | Obat dan Pembekalan Kesehatan              | Kesehatan                | Dinkes                      |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT             | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN    | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |                 | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |           |                             |
|    |         |          |                | Ketersediaan jenis dan kuantitas obat esensial generic di pelayanan kesehatan rujukan | %               | 86              | 100              | Obat dan Pembekalan Kesehatan                                  | Kesehatan | RSUD Pariaman               |
|    |         |          |                | Persentase ketersediaan obat essensial generic di sarana pelayanan kesehatan dasar    | %               | 85              | 100              | Obat dan Pembekalan Kesehatan                                  | Kesehatan | RSUD Solok                  |
|    |         |          |                | Ketersediaan jenis dan kuantitas obat esensial generic di pelayanan kesehatan rujukan | %               | 86              | 100              | Obat dan pembekalan kesehatan                                  | Kesehatan | RSJ HB Saanin               |
|    |         |          |                | Persentase pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat                                | %               | 80              | 100              | Upaya Kesehatan Masyarakat                                     | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat   | %               | 76              | 100              | Upaya Kesehatan Masyarakat                                     | Kesehatan | RSJ HB Saanin               |
|    |         |          |                | Alokasi biaya Tindak siaga Medik  | %               | 100             | 100              | Upaya Kesehatan Masyarakat                                     | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Informasi KIA   | %               | 80              | 100              | Upaya Kesehatan Masyarakat                                     | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Sinkronisasi Program Kesehatan masyarakat   | %               | 100             | 100              | Upaya Kesehatan Masyarakat                                     | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Persentase promosi kesehatan kepada masyarakat  | %               | 63,7            | 80               | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                  | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Promosi kesehatan kepada masyarakat   | %               | 46              | 78               | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                  | Kesehatan | RSJ HB Saanin               |
|    |         |          |                | Meningkatnya pemahaman pelaksanaan program penyehatan lingkungan                      | Kali per temuan | 12              | 15               | Pengembangan Lingkungan Sehat                                  | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Penemuan kasus baru Tuberculosis  | %               | 77,81           | 90               | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular) | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Meningkatnya Succes Rate TB   | %               | 85              | 92               | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular) | Kesehatan | Dinkes                      |
|    |         |          |                | Cakupan ODHA yang diobati   | %               | 100             | 90               | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular) | Kesehatan | Dinkes                      |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT              | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN    | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|----|---------|----------|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|-----------|---------------------------------|
|    |         |          |                |  |                  | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |           |                                 |
|    |         |          |                | Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index API)                         | Per 100 penduduk | 0,24            | 1                | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)              | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat dan setelah haji             | %                | 100             | 100              | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)              | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Persentase pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan             | %                | 100             | 100              | Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru | Kesehatan | RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi |
|    |         |          |                | Sarana dan prasarana yang terpelihara  | %                | 100             | 100              | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa, RS Paru, RS Mata     | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Tugas belajar dokter spesialis   | Orang            | 12              | 6                | Sumber Daya Kesehatan   | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan                                    | Kali pelatihan   | 21              | 20               | Sumber Daya Kesehatan   | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Pertemuan peningkatan pelayanan kesehatan                                    | Kali             | 20              | 20               | Sumber Daya Kesehatan   | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Sinkronisasi Program Kesehatan Masyarakat                                    | %                | 100             | 100              | Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan                               | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan                            | % Penduduk       | 50              | 100              | Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan                               | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Persentase ketersediaan data kesehatan secara akurat dan tepat               | %                | 60              | 100              | Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan                               | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Persentase kesiap siagaan bencana  | %                | 100             | 100              | Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan                               | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Jumlah Penelitian  | Dokumen          | 1               | 5                | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                       | Kesehatan | Dinkes                          |
|    |         |          |                | Jumlah Rumah Sakit Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kepada Penduduk Miskin | Kab/Kota         | 18              | 18               | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin   | Kesehatan | RSAM                            |
|    |         |          |                | Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin                              | %                | 0               | 100              | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin   | Kesehatan | RSJ HB Saanin                   |
|    |         |          |                | Standarisasi, Akreditasi dan Peningkatan mutu Pelayanan di RS                |                  |                 |                  | Standarisasi Pelayanan Kesehatan  | Kesehatan | RSAM                            |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT  | CAPAIAN KINERJA        |                  | PROGRAM   | URUSAN  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|----|---------|----------|----------------|---|--|------------------------|------------------|---|---|----------------------------------|
|    |         |          |                |   |  | KONDISI<br>AWAL        | KONDISI<br>AKHIR |   |   |                                  |
|    |         |          |                | Standarisasi, Akreditasi dan Peningkatan mutu Pelayanan di RS   |  |                        |                  | Standarisasi Pelayanan Kesehatan                | Kesehatan   | RSUD Solok                       |
|    |         |          |                |   | %  | 0                      | 100              | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                 | Kesehatan   | RSUD Pariaman                    |
|    |         |          |                |   | %  | 0                      | 70               | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                 | Kesehatan   | RSUD Achmad Muchtar              |
|    |         |          |                |   | %  | 0                      | 75               | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                 | Kesehatan   | RSUD Solok                       |
|    |         |          |                |   | %  | 83,1                   | 80               | Perbaikan Gizi Masyarakat                       | Kesehatan   | Dinkes                           |
|    |         |          |                | Meningkatkan kualitas gizi masyarakat   | %  | 8,2                    | 6,8              | Perbaikan Gizi Masyarakat                       | Kesehatan   | Dinkes                           |
|    |         |          |                |   | Indeks pembangunan Gender (IPG)  |                        | 70,04            |   | Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak                                | BPPR dan KB.                     |
|    |         |          |                |   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   |                        | 61,69            |   | Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak                                | BPPR dan KB.                     |
|    |         |          |                |   | Terlaksananya peman-tauan terhadap KDRT dan KPA                                | %                      | 40               | 90  | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan    | Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak |
|    |         |          |                |   | Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan                       | Kali                   | 3                | 4   | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak |
|    |         |          |                | 1. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak<br>2. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan<br>3. Meningkatnya pengaruh utamaan gender dan hak anak | Pembinaan terhadap peran serta gender dalam pembangunan                        | %                      | 60               | 50  |   | BPPR dan Perlindungan Anak       |
|    |         |          |                |   | Meningkatnya pengaruh utamaan gender   | Organ-isasi Perem-puan | 8                | 16  | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak           | BPPR dan Perlindungan Anak       |
|    |         |          |                |   | Meningkatnya kulitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan | Kali per-temuan        | 5                | 13  | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan           | BPPR dan Perlindungan Anak       |
|    |         |          |                | Terselenggarannya pengarusutamaan hak anak (PUHA)   | Sistem Infor-masi  | 1                      | 1                | Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | BPPR dan Perlindungan Anak                                      | BPPR dan KB                      |

| NO                                   | SASARAN   | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                       | SAT            | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN                                       | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------|---|----------|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|--|--|-----------------------------|
|                                      |   |          |                |  |                | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |  |                             |
| Menurunnya laju pertumbuhan penduduk | 1. Meningkatnya jumlah akseptor KB<br>2. Tersedianya informasi yang cukup ttg KB kepada masyarakat<br>3. Meningkatnya ketersediaan tenaga pendamping terampil |          |                | Sosialisasi Bagi Anak                                | Kali pertemuan | 5               | 9                | Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak                              | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | BPPr KB                     |
|                                      |   |          |                | Laju Pertumbuhan Penduduk                            | %              | 1,34            |                  |  | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera    | BPPr KB                     |
|                                      |   |          |                | Jumlah akseptor KB                                   | PUS            | 153.191         | 151.693          | Keluarga Berencana   | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera    | BPPr KB                     |
|                                      |   |          |                | Persentase ketersediaan informasi KB pada masyarakat | %              | 60              | 100              | Keluarga Berencana   | Keluarga Berencana                           | BPPR dan KB                 |
|                                      |   |          |                | Informasi KB   | Kali           | 1               | 9                | Keluarga Berencana   | Keluarga Berencana                           | BPPR dan KB                 |
|                                      |   |          |                | Tersedianya informasi pelayanan kontrasepsi          | Kali           | 1               | 10               | Pelayanan Alat Kontrasepsi   | Keluarga Berencana                           | BPPR dan KB                 |
|                                      |   |          |                | Menurunnya perkawinan Usia Dini                      | %              | 60              | 100              | Kesehatan reproduksi remaja  | BPPR dan Perlindungan Anak                   | BPPR dan KB                 |
|                                      |   |          |                | Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera              | Kali           | 1               | 5                | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat | BPPR dan Perlindungan Anak                   | BPPR dan KB                 |
|                                      |   |          |                | Tersedianya tenaga pendamping terampil               | %              | 100             | 100              | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga Bina Balita                    | BPPR dan Perlindungan Anak                   | BPPR dan KB                 |

### **7.1.5. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 4**

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan adalah: meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani, membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan, mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan), mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) hasil perikanan (*fishery processing*), memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengembangkan gerakan terpadu dalam menfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari, dan menfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

Program prioritas untuk mencapai Misi 4 untuk dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan adalah: Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani, Pengembangan Satu Petani Satu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian, Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pelaku Usaha Pertanian dan masyarakat pesisir, Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Secara Berkelanjutan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan perikanan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian dan perikanan, Peningkatan Ketahanan dan Keamanan serta diversifikasi Pangan, Pengamanan Sumberdaya Hewani, Pengembangan Budidaya Perikanan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan industri olahan, perdagangan, dan iklim investasi adalah: meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri, meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK, meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK, meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK, meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK, meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK, membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan, meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen, memperpendek mata rantai

pemasaran, meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi, mengembangkan pemberian insentif bagi para investor, meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor, dan mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan industri olahan, perdagangan, dan iklim investasi adalah: Gerakan Terpadu Pengembangan UMKM dan Koperasi, Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, Peningkatan Iklim Usaha Industri, Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur, Revitalisasi dan Pengembangan IKM, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Klaster Industri Unggulan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar, Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah, Peningkatan Daya saing penanaman modal, Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Penyiapan potensi sumberdaya daerah, Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya mineral dan batubara, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kompetensi SDM dan Aparatur Pembina UMKMK, Dukungan Pemodal dan peningkatan akses permodalan UMKMK kelembagaan keuangan, Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Mendukung UMKMK, Pengembangan Kemitraan, Kualitas Produk, Promosi, dan Jaringan Pemasaran Produk UMKMK, Peningkatan koperasi dalam per-ekonomian daerah, Program terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil, Peningkatan lembaga keuangan non bank dalam pembiayaan UMKMK.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam Gunung Padang, mengembangkan kawasan wisata alam Mandeh, mengembangkan kawasan wisata alam Panorama Baru, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Kembar, mengembangkan kawasan wisata alam Kawasan Harau, mengembangkan kawasan wisata tambang Sawahlunto, mengembangkan kawasan wisata budaya Ulakan Tapakis, mengembangkan kawasan wisata budaya Pagaruyung, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Maninjau, mengembangkan kawasan wisata surfing Mentawai, meningkatkan promosi yang efektif melalui berbagai media, dan meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Wisata, Pengembangan Wisata Alam, Pengembangan SDM Pariwisata, Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau, Peningkatan

Diplomasi Seni dan Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pemberdayaan lembaga-lembaga seni dan budaya, dan Pengembangan Pendidikan Budaya.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal adalah: mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, memberikan bantuan biaya pendidikan penduduk miskin, memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin, melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, memberi bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal adalah: Gerakan Terpadu peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan, Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan, Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Peningkatan Perlindungan Terhadap Keluarga Miskin, Penyempurnaan Database dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah diperlukan arah kebijakan: meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan, membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat, meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau; meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum (air bersih, limbah, sampah dan drainase) yang memadai dan terpadu; membangun jalan dan jembatan penunjang pariwisata, membangun jalan dan jembatan untuk evakuasi bencana, mengembangkan infrastruktur kawasan khusus/tertinggal, membangun prasarana jalan strategis antar daerah, membangun perumahan masyarakat, menata bangunan dan lingkungan pemukiman, mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya, mengelola konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya,

mengembangkan angkutan kereta api, membangun dan rehabilitasi sarana dan fasilitas jalan, membangun dan rehabilitasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengembangkan komunikasi dan informasi, mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut, mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun regulasi dan pengelolaan energi, mengembangkan energi kelistrikan.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah: Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership), Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Angkutan Kereta Api, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara, Perencanaan Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan, Penyusunan Regulasi, Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi, Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus/Tertinggal, Pengembangan Komunikasi dan Informasi. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penangung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.4.

**TABEL 7.4**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 4**

| NO   | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT      | CAPAIAN KINERJA  |  | PROGRAM   | URUSAN  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|----------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   |  |  |  |          | KONDISI<br>AWAL  | KONDISI<br>AKHIR   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>I Misi 1 : Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK</b> |   |  |  |  |          |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1 Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat</b>  |   |  |  |  |          |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Meningkatnya produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | 1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan<br>2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan<br>3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan<br>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian<br>Menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman<br>Bertambahnya persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit unggul<br>Peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan<br>Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman<br>Meningkatnya produksi benih unggul<br>Berkembangnya bali alih teknologi pertanian<br>Terpenuhinya alsintan bagi petani<br>Meningkatnya kapasitas penyuluhan<br>Meningkatnya kapasitas penyuluhan<br>Jumlah penyuluhan yang mengikuti pelatihan<br>Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan | Ton<br>% | 2.273.602<br>0,4<br>30<br>4<br>1<br>30<br>Unit<br>Unit<br>unit<br>Orang<br>Orang<br>buku | 2.588.013<br>1<br>38<br>16<br>15<br>42<br>1<br>13.114<br>60<br>1.496<br>-<br>1 | Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan<br>Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Perkebunan<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Bakorluh | Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Bakorluh | Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Perkebunan<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Dinas Pertanian<br>Pertanian<br>Bakorluh |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                                  | SAT      | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN    | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|--|--|---|---|----------|-----------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|
|    |  |  |   |   |          | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |           |                             |
|    | Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. | Mengembangkan sentra produksi komoditi peranian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. | Meningkatnya jumlah KSP pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Meningkatnya kapasitas SDM penyuluhan                           | jenis    | 4               | 4                | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Temu tugas penyuluhan   | orang    | 180             | 210              | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluhan            | orang    | 160             | 210              | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Meningkatnya motivasi kerja                                     | orang    | 658             | 696              | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Meningkatnya motivasi dan kinerja penyuluhan                    | orang    | 18              | 18               | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Meningkatnya kualitas kelembagaan gapoktan                      | Gapoktan | 10              | 22               | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Meningkatnya kapasitas balai penyuluhan                         | Unit     | 22              | 35               | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian              | Pertanian | Bakorluh                    |
|    |  |  |   | Berkembangnya KSP : KSP Hortikultura                            | Kawasan  | 43              | 60               | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|    |  |  |   | KSP Perkebunan  | unit     | 14              | 30               | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Dinas Perkebunan            |
|    |  |  |   | KSP Peternakan  | ksp      | 6               | 14               | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |  |  |   | Tersedianya ternak kambing untuk penambahan populasi di kawasan | Ekor     | 65              | 75               |  |           |                             |
|    |  |  |   | Meningkatnya luas tanam komoditi kakao (Ha)                     | Ha       | 84              | 170              | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Perkebunan                  |
|    |  |  |   | Meningkatnya luas tanam komoditi kopi (Ha)                      | Ha       | 47              | 75               | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Perkebunan                  |
|    |  |  |   | Meningkatnya luas tanam komoditi karet                          | Ha       | 170             | 177              | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Perkebunan                  |
|    |  |  |   | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian               | Ton      | 4.092           | 11.031           | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian | Pertanian | Pertanian                   |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                         | SAT           | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN    | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|--|---------------|-----------------|------------------|---|-----------|-----------------------------|
|    |         |          |                |  |               | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |           |                             |
|    |         |          |                | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian      | Ton           | 354.262         | 629.618          | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian        | Pertanian | Pertanian                   |
|    |         |          |                | Perluasan Areal Pertanian                              | %             | 2               | 10               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Pengembangan balai Benih                               | Unit          | 1               | 1                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian             | Unit/<br>UPTD | 6               | 6                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian |           | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani            |               | 1               | 5                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Berfungsinya pasar ternak (unit)                       | Unit          | 1               | 7                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Peternakan                  |
|    |         |          |                | Peningkatan luas lahan budidaya sesuai target produksi | Ha            | 870             | 940              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian             | Ha            | 620             | 5.120            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian |           | Dinas pertanian             |
|    |         |          |                | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian             | Unit          | 19              | 47               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian             | Ha            | 50              | 2.955            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian             | Unit          | 11              | 20               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Peningkatan kualitas UPTD                              | Unit          | 3               | 4                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Fasilitas SKIM Kredit bagi petani                      | Jenis SKIM    | 2               | 3                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian | Pertanian | Dinas Peternakan            |

| NO  | SASARAN | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT      | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN    | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---|---------|--|---|---|----------|-----------------|------------------|---|-----------|-----------------------------|
|   |         |  |   |   |          | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |           |                             |
| Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery) |         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery)</li> <li>2. Mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan.</li> <li>2. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan)</li> <li>3. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan</li> <li>4. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) hasil perikanan (Fishery Processing)</li> <li>5. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, &amp; perikanan</li> </ol> | Jumlah produk semen beku  | Dosis    | 80.000          | 100.000          | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian                                     | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|   |         |  |   | Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani (SKIM)                                    | Kelompok | 5               | 5                | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian                                     | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|   |         |  |   | Tersedianya sarana dan prasarana pertanian  | Ha       | 50              | 2.955            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian                                     | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|   |         |  |   | Terkembangkannya Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro-Techno Park).              |          |                 |                  |   |           |                             |
|   |         |  |   | Terbangunnya Science/Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif. |          |                 |                  |   |           |                             |
|   |         |  |   | Berkembangnya balai alih teknologi pertanian  | Unit     | 1               | 1                | Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|   |         |  |   | Terpenuhinya alsintan bagi petani   | Unit     | 50              | 80               | Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|   |         |  |   | Tersedianya calon bibit unggul  | ekor     | 24              | 144              | Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|   |         |  |   | Tersebarnya informasi teknologi peternakan  | kali     | 1               | 5                | Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|   |         |  |   | Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian                       | Unit     | 5               | 100              | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian                               | Pertanian | Dinas pertanian             |
|   |         |  |   | Peningkatan produksi olahan hasil pertanian   | Komoditi | 90              | 190              | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian                               | Pertanian | Dinas Perkebunan            |
|   |         |  |   | Tersedianya produksi olahan hasil pertanian   | Macam    | 90              | 130              | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian                               |           | Dinas Pertanian             |
|   |         |  |   | Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian                                      | %        | 3               | 15               | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian                               | Pertanian | Dinas Perkebunan            |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                                  | SAT      | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN                 | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|----------|-----------------|------------------|---|------------------------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |          | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                        |                             |
|    |         |          |                | Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian | Kebun    | 100             | 620              | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian | Pertanian              | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Sertifikasi produk pangan                                       | Unit     | 2               | 12               | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian | Pertanian              | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Peningkatan jumlah UP3HP/UPH                                    | Unit     | 10              | 50               | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian | Pertanian              | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian | Unit     | 85              | 135              | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian |                        | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan                       | kelompok | 1               | 5                | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian |                        | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Peningkatan kualitas usaha produk olahan peternakan             | kelompok | 8               | 19               |   |                        | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan bagi UMKM             | Unit     | 4               | 25               | Peningkatan nilai tambah, daya saing produk hasil perikanan | Kelautan dan Perikanan | DKP                         |
|    |         |          |                | Peningkatan produksi olahan hasil perikanan                     | Ton      | 1.550,50        | 69.755,52        | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | DKP                         |
|    |         |          |                | Peningkatan mutu produk perikanan                               | Jenis    | 2               | 10               | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | DKP                         |
|    |         |          |                | Peningkatan unit pengolahan ikan yang bersertifikat             | Unit     | 2               | 10               | Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | DKP                         |
|    |         |          |                | Meningkatnya jumlah kelompok tani yang melakukan kemitraan      | unit     | -               | 10               | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian              | Pertanian              | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan                    | Unit     | 0               | 4                | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian              | Pertanian              | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Jumlah aktivitas promosi produk peternakan                      | Event    | 3               | 3                | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian              | Pertanian              | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Terpenuhinya daging yang layak konsumsi Produk olahan : Dendeng | ton      | 1<br>ton        | 20<br>465        | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian              | Pertanian              | Dinas Pertanian             |

| NO                                | SASARAN   | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT          | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN                 | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------|---|----------|---|--|--------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----------------------------|
|                                   |   |          |   |  |              | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                        |                             |
| Meningkatnya kesejahteraan petani | Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan dan perikanan</li> <li>2. Mengembangkan gerakan terpadu dalam menfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya</li> </ol> | Susu Operasi pasar komoditi peternakan   | ton komoditi | 3               | 3                |  |                        |                             |
|                                   |   |          |   |  | Ton          | 1.122,9         | 9.504,96         | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan   | Kelautan dan Perikanan | DKP                         |
|                                   |   |          |   | Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK)                    | KK           |                 | 1.528            | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dinas Perkebunan            |
|                                   |   |          |   | Jumlah rumah tangga petani yang sejahtera ditinjau dari penghasilan            | KK           | -               | 34.700           | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dinas pertanian             |
|                                   |   |          |   | Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera di nagari tertinggal    | KK           | -               | 29.760           | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dinas pertanian             |
|                                   |   |          |   | Terbentuknya model pengembangan sumberdaya hutan, serta penanganan kasus SDA   | Ha           | -               | 160              | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dishut                      |
|                                   |   |          |   | terbentuknya model pengembangan lebah madu/gula enau dll 94 unit               | unit         | -               | 94               | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dishut                      |
|                                   |   |          |   | Terbinanya Model social forestry dan Agroforestry 4 Ha                         | Ha           | -               | 4                | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dishut                      |
|                                   |   |          |   | Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/ HR) oleh 20 Kelompok tani | Kelompok     | -               | 20               | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani            | Pertanian              | Dishut                      |
|                                   |   |          |   | Peningkatan produksi bibit   | %            | 5               | 17               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani | Pertanian              | Dina Perkebunan             |
|                                   |   |          |   | Kelompok ternak berprestasi  | Kelompok     | 2               | 12               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani | Pertanian              | Dinas Peternakan            |
|                                   |   |          |   | Petugas lapangan berprestasi   | orang        | 3               | 15               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani | Pertanian              | Dinas Peternakan            |
|                                   |   |          |   | Pembinaan terhadap kelembagaan agribisnis peternakan                           | Lembaga      | 6               | 10               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani | Pertanian              | Dinas Peternakan            |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT       | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN    | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|-----------|-----------------|------------------|---|-----------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |           | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |           |                             |
|    |         |          |                | Jumlah kelompok yang dibina untuk kelompok penangkar bibit                                    | Kelompok  | 4               | 20               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Jumlah peternak yang ditingkatkan pengetahuannya tentang peternakan dan kelembagaan kelompok  | orang     | 150             | 1300             | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penanganan gangguan reproduksi ternak | orang     | 40              | 96               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Jumlah masyarakat yang dilatih tentang pemotongan hewan qurban dan kesrawan                   | orang     | 0               | 880              | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pemeriksa daging di RPH               | orang     | 20              | 20               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pengawasan obat hewan                 | orang     | 40              | 0                | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas Peternakan            |
|    |         |          |                | Peningkatan kelembagaan Penangkar Benih/Bibit   | Unit      | 86              | 110              | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dinas pertanian             |
|    |         |          |                |   | unit      | 33              | 160              |   |           | Dinas Perkebunan            |
|    |         |          |                | Berkembangnya luasan pertanian organic  | Ha        | 750             | 2.000            | Peningkatan produksi dan mutu produk pertanian secara berkelanjutan | Pertanian | Dinas Pertanian             |
|    |         |          |                | Peningkatan modal usaha petani mandiri  | Klp/tahun | 200             | 840              | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                    | Pertanian | Dina Pertanian,             |
|    |         |          |                | Jumlah kelompok tani yang memiliki ternak   | Kelompok  | 17              | 96               | Pengembangan Satu Petani Satu Sapi                                  | Pertanian | Dina Peternakan             |
|    |         |          |                | Jumlah ternak yang disebarkan pada kelompok   | Ekor      | 170             | 1.083            |   |           | Dina Peternakan             |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT             | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM                                   | URUSAN           | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |                 | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                  |                             |
|    |         |          |                | Meningkatnya ketahanan pangan   |                 |                 |                  |   |                  |                             |
|    |         |          |                | Terumusnya kebijakan ketahanan pangan   | Tahun Kebijakan | -               | 1                | Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Ketersediaan protein  | Grm/Kap.hr      | 57              | 63               | Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Penganekaragaman pangan yang bila dikonsumsi sesuai dengan daya beli sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi                             | %               | 75              | 78               | Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Jumlah kelembagaan pangan masyarakat (LDPM) bertambah   | Gapoktan        | 0               | 12               | Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi   | Ton             | 30              | 194,8            | Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Terbinanya sertifikat prima 2 dan prima 3   | Sertifikat      | 0               | 136              | Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Tertanggunginya mas yarakat yang mengalami rawan pangan   | Kab/Kota        | 0               | 19               |   |                  |                             |
|    |         |          |                | Meningkatnya ketahanan pangan Melalui konsumsi , keamanan pangan, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masyarakat (diversifikasi pangan) |                 |                 |                  |   |                  |                             |
|    |         |          |                | Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi kelompok dengan mudah dan murah   | Klpk            | 0               | 204              | Diversifikasi Pangan                      | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Terlaksananya dan tumbuhnya usaha bisnis kelompok pangan lokal  | Klpk            | 4               | 25               | Diversifikasi Pangan                      | Ketahanan Pangan | Badan Ketahanan Pangan      |
|    |         |          |                | Menurunnya kasus penyakit hewan menular   | Kasus           | 32              | 20               | Pengamanan Sumberdaya Hewani              | Pertanian        | Dinas Peternakan            |

| NO  | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                                      | SAT     | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN               | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---|--|---|----------------|---|---------|-----------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                |   |         | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                      |                             |
| Meningkatnya kualitas & produktivitas berbagai komoditi perikanan                       | Meningkatnya produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan perikanan | 1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan perikanan<br>2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang perikanan<br>3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan<br>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani |                | Tersedianya pusat pelayanan keswan                                  | Unit    | 65              | 75               | Pengamanan Sumber-daya Hewani                    | Pertanian            | Dinas Peternakan            |
|   |  |   |                | Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan keswan                      | Unit    | 1               | 9                | Pengamanan Sumber-daya Hewani                    | Pertanian            | Dinas Peternakan            |
|   |  |   |                | Meningkatnya aplikasi teknologi medik veteriner                     | Unit    | 1               | 1                | Pengamanan Sumber-daya Hewani                    | Pertanian            | Dinas Peternakan            |
|   |  |   |                | Peningkatan produksi benih/bibit                                    | %       | 2               | 45               | Pengembangan Budidaya Perikanan                  | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Peningkatan kelembagaan pembenihan rakyat yang disertifikasi (CPIB) | Unit    | 1               | 13               | Pengembangan Budidaya Perikanan                  | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Peningkatan luas lahan produksi                                     | Ha      | 12              | 180              | Pengembangan Budidaya Perikanan                  | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Peningkatan produksi perikanan                                      | %       | 26              | 116,5            | Pengembangan Budidaya Perikanan                  | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan                | Jenis   | 2               | 12               | Pengembangan Budidaya Perikanan                  | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Fasilitasi sarana dan prasarana balai benih                         | unit    | 3               | 3                | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petani | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Peningkatan kapasitas Penyuluhan                                    | Orang   | 40              | 187              | Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian                | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
| Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang perikanan | Mengembangkan sentra produksi komoditi perikanan.                            | Meningkatnya jumlah KSP perikanan   |                | Berkembangnya KSP Perikanan   |         |                 |                  |  |                      |                             |
|   |  |   |                | KSP Perikanan   | Kawasan | 15              | 15               | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi             | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan                              | Ton     | 22              | 5.745            | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi             | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Meningkatnya jumlah produksi komoditi Tuna                          |         |                 |                  |  |                      |                             |
|   |  |   |                | Meningkatnya jumlah produksi komoditi Nila                          | Ton     | 44.160,37       | 522.384,1        | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi             | Kelautan & Perikanan | DKP                         |
|   |  |   |                | Meningkatnya jumlah produksi komoditi Kerapu                        | Ton     | 11,98           | 758,59           | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi             | Kelautan & Perikanan | DKP                         |

| NO  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT       | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN                            | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---|--|--|--|---|-----------|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
|   |  |  |  |   |           | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                                   |                             |
|   |  |  |  | Fasilitasi izin usaha perikanan tangkap   | Dokumen   | 80              | 400              | Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap              | Kelautan & Perikanan              | DKP                         |
|   |  |  |  | Peningkatan kapasitas KUB nelayan skala kecil   | Kelompok  | 2               | 36               | Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap              | Kelautan & Perikanan              | DKP                         |
|   |  |  |  | Peningkatan jumlah kapal dan alat tangkap   | Unit      | 21.442          | 25.523           | Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap              | Kelautan & Perikanan              | DKP                         |
|   | Meningkatnya kesejahteraan petani                        | Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain    | 1. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perikanan<br>2. Mengembangkan gerakan terpadu dalam menfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya   | Meningkat jumlah rumah tangga nelayan sejahtera<br>Perencanaan Penganggaran Monitoring Evaluasi yang terintegrasi dan tepat waktu   | % / Tahun | -               | 80               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani            | Pertanian                         | Dinas Perkebunan            |
| <b>Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan, UMKMK Perdagangan dan Iklim Investasi</b> |  |  |  |   |           |                 |                  |   |                                   |                             |
|   | Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi | Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi | 1. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK<br>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK<br>3. Meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK<br>4. Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK<br>5. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi<br>- Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit)<br>- Jumlah Koperasi yang bersertifikasi (Unit)<br>- Penurunan koperasi tidak aktif<br>- Jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel (unit) | Unit      | 38              | 237              | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                   | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi              |
|   |  |  |  | Meningkatnya kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur UMKMK<br>- Jumlah pengelola Koperasi dan IKM yang di latih   | Unit      | 0               | 25               | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                   | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi              |
|   |  |  |  |   | % / Tahun | 2               | 2                | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                   | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi              |
|   |  |  |  |   | Unit      | 18              | 30               | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                   | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi              |
|   |  |  |  |   | Orang     | 120             | 600              | Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi              |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT   | CAPAIAN KINERJA |                    | PROGRAM  | URUSAN                            | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB             |
|----|---------|----------|----------------|--|---|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|
|    |         |          |                |  |   | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR   |  |                                   |   |
|    |         |          |                | Jumlah UMK yang dilatih (orang)  | Orang   | 90              | 600                | Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK      | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi                          |
|    |         |          |                | Meningkatnya permodalan UMKMK  | Orang   | 90              | 540                | Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK      | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi                          |
|    |         |          |                | Meningkatnya permodalan UMKMK  |   |                 |                    |  |                                   |   |
|    |         |          |                | Jumlah PKL yang diberi bantuan modal   | unit  | 7.000           | 13.000             | Peningkatan Dukungan dan Akses Permodalan UMKMK                  | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi                          |
|    |         |          |                | Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil  | UMK   | 0               | 950                | Prog. Terpadu Peningkatan Kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi                          |
|    |         |          |                | Meningkatnya lembaga keuangan non bank dalam pembiayaan UMKMK  | Unit  | 20              | 70                 | Peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Pembiayaan UMKMK     | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi                          |
|    |         |          |                | Meningkatnya kemitraan dan kualitas promosi pemasaran  | % / Thn   | 15              | 25                 | Pengembangan Kemitraan UMKMK                                     | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi, BKPM, Biro Perekonomian |
|    |         |          |                | Meningkatnya peranan koperasi dalam sektor riil  | Unit  | 10              | 50                 | Peningkatan Peranan Koperasi dalam Setor Riil                    | Koperasi & Usaha Kecil & Menengah | Dinas Koperasi                          |
|    |         |          |                | 1. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal<br>2. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor<br>3. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor<br>4. Meningkatkan investasi dan pengawasan sumber daya mineral dan batubara | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi |                 |                    | Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal                           |                                   |   |
|    |         |          |                | Jumlah perizinan/non perizinan yang diterbitkan PT SP  | Izin/non izin   | 0               | 940                |  | Penanaman Modal                   | BKPMP                                   |
|    |         |          |                | Realisasi investasi :<br>a. PMDN<br>b. PMA   | Miliar Rupiah Juta US \$  | 404,65<br>17,81 | 2.703,65<br>132,81 |  | Penanaman Modal                   | BKPMP                                   |
|    |         |          |                | Meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan modalnya di SumBAR dan Kerjasama di bidang investasi  |   |                 |                    | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                      |                                   |   |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                                    | SAT                                     | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN                        | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|---|-----------------|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |   | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                               |                             |
|    |         |          |                | - Jumlah calon investor   | Calon Investor                          | 46              | 215              |  | Penanaman Modal               | BKPMP                       |
|    |         |          |                | - Jumlah kesepakatan kerjasama                                    | Jumlah MoU                              | 0               | 10               |  | Penanaman Modal               | BKPMP                       |
|    |         |          |                | Tersedianya dokumen pendukung sumber daya daerah                  | Dokumen                                 | 0               | 9                | Penyiapan Potensi Sumberdaya daerah  | Penanaman Modal               | BKPMP                       |
|    |         |          |                | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB                      | dokumen                                 | 0               | 2                | Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara | Energi dan Sumberdaya Mineral | Dinas ESDM                  |
|    |         |          |                | Beroperasinya kegiatan pertambangan yang telah diberikan izin     | Izin                                    | 30              | 40               | Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara | Energi dan Sumberdaya Mineral | Dinas ESDM                  |
|    |         |          |                | Terwujudnya kawasan PETI yang menjadi wilayah Pertambangan Rakyat | Peti                                    | 0               | 42               | Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara | Energi dan Sumberdaya Mineral | Dinas ESDM                  |
|    |         |          |                | Meningkatnya jumlah Sarana pasar yang berkualitas                 | Unit                                    | 0               | 1.050            |  | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | Jumlah bantuan sarana perdagangan                                 | Unit/tahun                              | 0               | 1.050            | Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan                                   | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | Stabilisasi harga   | Kali/tahun                              | 0               | 6                | Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri                                 | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | Laju Inflasi  | %/tahun                                 | 0               | < 10             |  | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | Stabilnya tingkat inflasi   | %                                       | 0               | 100              | Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                 | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | Persentase peningkatan transaksi lelang                           | %/ Tahun                                | 1               | 2 %              |  | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | 1. Memperpendek mata rantai pemasaran                             | Meningkatnya nilai eksport daerah       | US \$ juta      | 2.219            | Peningkatan & Pengembangan Eksport Daerah                                      | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi         | Jumlah produk yang dieksport            | Komoditi        | 1                | Peningkatan & Pengembangan Eksport Daerah                                      | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | - Jumlah negara tujuan ekspor                                     | Negara                                  | 40-45           | 47-50            | Peningkatan & Pengembangan Eksport Daerah                                      | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | - Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan                         | Sertifikat Mutu                         | 0               | 1700             | Peningkatan & Pengembangan Eksport Daerah                                      | Perdagangan                   | Dinas Perindag              |
|    |         |          |                | Meningkatnya eksport daerah                                       | Meningkatkan daya saing komoditi daerah |                 |                  |  |                               |                             |

| NO  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT   | CAPAIAN KINERJA  |  | PROGRAM   | URUSAN | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--------|-----------------------------|
|   |  |  |   |   |   | KONDISI<br>AWAL  | KONDISI<br>AKHIR   |   |        |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya jumlah industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah</li> <li>- Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan</li> <li>Meningkatnya fasilitas pengembangan UMKM dalam upaya mendukung ekonomi lokal dan berdaya saing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan</li> <li>- Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah</li> <li>- Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen</li> <li>- Menfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah</li> <li>- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dan aparatur perdagangan</li> <li>- Berkurangnya konsumen yang dirugikan</li> <li>- Jumlah produk yang memenuhi SNI.</li> <li>- Peningkatan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang</li> <li>- Berkembangnya sentra-sentra industri potensial</li> <li>- Meningkatnya investasi usaha IKM.</li> <li>- Jumlah unit usaha industri unggulan daerah</li> <li>- Peningkatan jumlah unit usaha industri kecil (formal dan non formal)</li> <li>- Peningkatan jumlah unit usaha industri menengah</li> <li>- Jumlah rekayasa teknologi tepat guna</li> <li>- Terbangunnya aglomerasi industry</li> <li>- Meningkatnya produktifitas SDM IKM</li> <li>- Meningkatnya keikutsertaan UMK pada pameran tingkat nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang</li> <li>- Orang/tahun</li> <li>- Produk/tahun</li> <li>- %/tahun</li> <li>- Unit Sentral/tahun</li> <li>- % / Th</li> <li>- Unit usaha</li> <li>- Unit usaha/tahun</li> <li>- Unit usaha/tahun</li> <li>- Klaster/tahun</li> <li>- Orang/tahun</li> <li>- Jumlah UMK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0</li> <li>- 720</li> <li>- 30</li> <li>- 25</li> <li>- 5</li> <li>- 2</li> <li>- 10</li> <li>- 700</li> <li>- 1</li> <li>- 3</li> <li>- 50</li> <li>- 27</li> <li>- 25</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan</li> <li>- Peningkatan Perlindungan Konsumen &amp; Pengamanan Perdagangan</li> <li>- Peningkatan Perlindungan Konsumen &amp; Pengamanan Perdagangan</li> <li>- Pengembangan Senta-Sentra Industri Potensial</li> <li>- Peningkatan Iklim Usaha Industri</li> <li>- Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur</li> <li>- Revitalisasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>- Pengembangan Teknologi Tepat Guna</li> <li>- Pengembangan Klas ter Industri Unggulan</li> <li>- Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah dan Aparat Pembina</li> <li>- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perindustrian</li> <li>- Penanaman Modal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perindag</li> <li>- Biro Perekonomian</li> </ul> |        |                             |

| NO   | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME) | SAT | CAPAIAN KINERJA |  | PROGRAM    | URUSAN                                     | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|---|--|---|--------------------------------|-----|-----------------|--|------------|--|-----------------------------|
|  |   |  |   |                                |     | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR   |            |  |                             |
| <b>Prioritas 7 : Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya</b>   |   |  |   |                                |     |                 |  |            |  |                             |
| Berkembangnya<br>wisata seni dan<br>budaya   | Mengembangkan wisata seni<br>dan budaya daerah                          | 1. Meningkatkan kualitas cagar<br>budaya dan kapasitas sumber-<br>daya manusia seni dan budaya<br>daerah<br>2. Meningkatkan Kualitas produk<br>wisata budaya   | Meningkatnya jumlah<br>event budaya   | Event                          | 8   | 94              | Peningkatan Diplomasi<br>Seni dan Budaya                               | Pariwisata | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
|  |   |  | Meningkatnya jumlah<br>event ekonomi kreatif<br>berbasis seni dan budaya                        | Event                          |     |                 | Pengembangan<br>ekonomi kreatif berba-<br>sis seni dan budaya          | Pariwisata | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
|  |   |  | Meningkatnya jumlah<br>pengelolaan kekayaan<br>budaya yang difasilitasi                         | Kali                           | 3   | 7               | Pengelolaan Kekayaan<br>Budaya   | Kebudayaan | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
|  |   |  | Meningkat dan berkem-<br>bangnya produk wisata<br>budaya  | Produk                         | 0   | 12              | Peningkatan dan<br>Pengembangan<br>Produk Wisata Budaya<br>Minangkabau | Pariwisata | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
|  |   |  | Meningkat dan berkem-<br>bangnya produk ekono-<br>mi kreatif berbasis media<br>desain dan IPTEK | Produk                         |     |                 | Pengembangan<br>ekonomi kreatif<br>berbasis media desain<br>dan IPTEK  | Pariwisata | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
| Meningkatnya jumlah<br>dan kualitas wisata<br>alam dan wisata bu-<br>daya yang difasilitasi<br>pengembangannya | Mengembangkan kawasan<br>wisata alam unggulan utama<br>Sumatera Barat   | 1. Mengembangkan kawasan<br>(kws) wisata alam Gunung<br>Padang<br>2. Mengembangkan kws. wisata<br>alam Mandeh<br>3. Mengembangkan kws. wisata<br>alam Panorama Baru<br>4. Mengembangkan kws. wisata<br>alam Danau Kembar<br>5. Mengembangkan kws. wisata<br>alam kws. Harau<br>6. Mengembangkan kws. wisata<br>alam danau maninjau<br>7. Mengembangkan kws. wisata<br>surfing Mentawai | Meningkatnya jumlah ka-<br>wasan wisata alam yang<br>difasilitasi                               | Kawasan                        | 2   | 14              | Pengembangan<br>Kawasan Wisata Alam                                    | Pariwisata | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
|  |   |  | Meningkatnya jumlah<br>kawasan wisata alam<br>yang difasilitasi                                 | kawasan                        |     |                 | Pengembangan<br>destinasi dan daya tarik<br>wisata alam                | Pariwisata | Dinas Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif |                             |
|  |   |  |   |                                |     |                 |  |            |  |                             |
| Mengembangkan kawasan<br>wisata budaya unggulan<br>utama Sumatera Barat  | Mengembangkan kawasan<br>wisata budaya unggulan<br>utama Sumatera Barat | 1. Mengembangkan kws. wisata<br>tambang Sawahlunto<br>2. Mengembangkan kws. wisata<br>budaya Ulakan Tapakis<br>3. Mengembangkan kws. wisata<br>budaya  | Meningkatnya kualitas<br>kawasan wisata budaya  | Kawasan                        | 0   | 19              | Pengembangan<br>Kawasan Wisata<br>Budaya                               | Pariwisata | Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata      |                             |
|  |   |  | Meningkatnya kualitas<br>kawasan wisata budaya  | Kawasan                        |     |                 | Pengembangan Desti-<br>nasi dan Daya Tarik<br>Wisata Budaya            | Pariwisata | Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata      |                             |

| NO  | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT   | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN         | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|---|---|---|--|--|-------|-----------------|------------------|--|----------------|---------------------------------|
|   |   |   |  |  |       | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                |                                 |
|   | Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara                       | Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata                        | Meningkatkan promosi yang efektif  | Meningkatnya pelaksanaan promosi pariwisata di Sumatera Barat  | Event | 0               | 121              | Pengembangan Pemasaran Wisata  | Pariwisata     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
|   |   | Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur parawisata | Meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata  | Meningkatnya jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi dan profesionalisme biang pariwisata   | Orang | 100             | 1120             | Pengembangan SDM Pariwisata  | Pariwisata     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
|   |   |   |  | Pembangunan Jalan Menuju Objek Wisata (kws. Wisata Alam G. Padang, Mandeh, Panorama Baru, Danau Kembar, Harau, Danau Maninjau, Kws. Surfing Maninjau, Kws. Wisata Tambang Sawahlunto, Kws. Wisata Budaya Ulakan Tapakis) | KM    | 0               | 25               | Pembangunan Jalan dan Jembatan   | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim            |
| <b>Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal</b> |   |   |  |  |       |                 |                  |  |                |                                 |
|   | Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Terwujudnya pelayanan terhadap PMKS                                   | 1. Meningkatkan pelayanan panti sosial untuk PMKS<br>2. Meningkatkan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS | Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS   |       |                 |                  |  |                |                                 |
|   |   |   |  | Penyuluhan dan pembinaan kepada eks penyandang penyakit social   | Orang |                 | 40               | Program Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)                  | Sosial         | Dinas Sosial                    |
|   |   |   |  | Percentase partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan social  | %     | N/A             | 100              | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  | Sosial         | Dinas Sosial                    |
|   |   |   |  | Jumlah fakir miskin, komoditas adat terpencil, PMKS  | Orang | N/A             | 6.000 (K)        | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Sosial         | Dinsos                          |
|   |   |   |  | Terlaksananya rehabilitasi kesejahteraan social  | %     | N/A             | 100              | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  | Sosial         | Dinas Sosial                    |
|   |   |   |  | Meningkatnya kemandirian dan keterampilan anak terlantar   | Orang | 360             | 360              | Pembinaan Anak Terlantar   | Sosial         | Dinas Sosial                    |

| NO   | SASARAN  | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT      | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN                               | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|--|----------|----------------|---|----------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |          |                |   |          | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                                      |                             |
| Terkait dengan pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial                           | Tertingkatnya keterampilan anak cacat  |          |                | Meningkatnya keterampilan anak cacat  | Orang    | 150             | 150              | Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma       | Sosial                               | Dinas Sosial                |
|  |  |          |                | Meningkatnya layanan bagi penghuni panti  | Orang    | 155             | 155              | Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo                  | Sosial                               | Dinas Sosial                |
|  |  |          |                | Jumlah lanjutan usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti                                       | Orang    | 180             | 180              |  | Sosial                               | Dinas Sosial                |
|  | Terwujudnya pemeliharaan taman makam pahlawan kusuma negara Padang   |          |                | Luas Taman Makam Pahlawan yang terpelihara  | M2       | 28,50           | 1948,5           | Pengembangan nilai budaya                            | Kebudayaan                           | Dinas Sosial                |
|  |  |          |                | Sinkronisasi program kegiatan bidang kesejahteraan sosial   | Kali     | N/A             | 6                | Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial               | Sosial                               | Biro Binsos                 |
|  |  |          |                | Terlaksananya program rehabilitasi social pasca bencana alam  | Kab/Kota | N/A             | 11               | Pengelolaan dan Penanganan dampak Bencana Alam       | Sosial                               | Biro Binsos                 |
|  | Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial   |          |                | Terlaksananya koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat   | Kali     | N/A             | 43               | Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat                 | Sosial                               | Biro Binsos                 |
|  |  |          |                | 1. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu | Orang    | 416             | 2080             | Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga Kerja    | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|  |  |          |                | 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja   | Orang    | 350             | 700              | Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga Kerja    |                                      |                             |
|  |  |          |                | 3. Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja  | Orang    | 150             | 150              | Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga Kerja    |                                      |                             |
| Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya | Terwujudnya pengembangan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu |          |                | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi   | Orang    | 3500            | 14100            | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|  |  |          |                | Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat  | Orang    | 15              | 10               | Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan    | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |

| NO | SASARAN                               | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT   | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN                               | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------------------------------------|---|---|--|---|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                       |   |   |  |   | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                                      |                             |
|    |                                       |   |   | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek   | orang   | 50.000          | 103.184          |  |                                      |                             |
|    |                                       |   |   | Besaran pengujian lingkungan kerja di perusahaan   | Sampel  | 800             | 840              | Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|    |                                       |   |   | Besaran pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan  | Orang   | 900             | 900              | Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|    |                                       |   |   | Besaran perusahaan yang harus menerapkan peraturan perundang- undangan tentang perlindungan Tenaga kerja dan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan | Perusa-haan   | 150             | 28,45            | Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja         | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|    |                                       |   |   | Besaran kelompok usaha mandiri yang diberi bantuan   | Orang   | 240             | 240              | Gerakan terpadu pence-jahteraan fakir miskin                         | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|    |                                       |   |   | Besaran transmigrasi yang akan dibina  | KK  | 70              | 70               | Transmigrasi   | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|    |                                       |   |   | Meningkatnya pemasukan keuangan daerah   | Perusa-haan   | 40              | 40               | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah             | Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasi | Disnakertrans               |
|    | Menurunnya tingkat kemiskinan         | Meningkatkan integrasi sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin | 1. Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan<br>2. Meningkatkan efek tifitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat                               | Meningkatkan keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan   | Kali Rapat  | N/A             | 16 (k)           | Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan                           | Pemberdayaan Masyarakat              | BPM                         |
|    | Berkurangnya Jumlah Daerah tertinggal | Terwujudnya sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal yang tepat sasaran, efektif dan efisien.                                       | 1. Meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi & sinergitas program & kegiatan pembangunan daerah tertinggal<br>2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah | Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal  | Jumlah Koordinasi & kerjasama Perencanaan Pembangunan daerah tertinggal . | 19              | 15               | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal                 | Perencanaan Pembangunan              | BAPPEDA                     |

| NO   | SASARAN                                   | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT  | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN                  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|---|----------|----------------|---|--|-----------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
|  |   |          |                |   |  | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                         |                             |
|  |   |          |                | Peningkatan Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal   | Kawasan  | 0               | 125              | Pembangunan Infrastruktur permukiman di perdesaan    | Perumahan               | Dinas Prasjal Tarkim        |
|  |   |          |                | Pembinaan kelompok lokasi penerima bantuan  | Kab  |                 | 5                | Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari | Pemberdayaan Masyarakat | BPM                         |
|  |   |          |                | Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat  | Kali   |                 | 1                | Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari | Pemberdayaan Masyarakat | BPM                         |
|  |   |          |                | Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat  | %  |                 | 100              | Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari | Pemberdayaan Masyarakat | BPM                         |
|  |   |          |                | Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan masyarakat di daerah   | Kali   |                 | 53               | Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari | Pemberdayaan Masyarakat | BPM                         |
|  |   |          |                | Meningkatnya partisipasi masyarakat   | Kab/Kota   | 0               | 19               | Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari | Pemberdayaan Masyarakat | BPM                         |
|  | Pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir |          |                |   | KK   | -               | 5.680            | Gerakan pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir    | Kelautan dan Perikanan  | DKP                         |
| <b>Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat</b> |   |          |                |   |  |                 |                  |  |                         |                             |
|  |   |          |                | 1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan<br>2. Meningkatkan aksesibilitas wil. yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau<br>3. Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur | Meningkatnya kondisi jalan/ jembatan & bertambahnya panjang jalan /jembatan yang terbangun |                 |                  |  |                         |                             |
|  |   |          |                | Pembangunan jembatan kelok sembilan   | Meter  | -               | 432              | Pembangunan Jalan dan Jembatan                       | Pekerjaan Umum          | Dinas Prasjal Tarkim        |
|  |   |          |                | Pembangunan dan peningkatan jalan nasional  | Km   | -               | 300              | Pembangunan Jalan dan Jembatan                       | Pekerjaan Umum          | Dinas Prasjal Tarkim        |
|  |   |          |                | Pembangunan Jalan Rao-Rokan (Bts. Riau)   | Km   | -               | 5                | Pembangunan Jalan dan Jembatan                       | Pekerjaan Umum          | Dinas Prasjal Tarkim        |
|  |   |          |                | Pembangunan dan peningkatan jalan nasional pantai barat   | Km   | -               | 60               | Pembangunan Jalan dan Jembatan                       | Pekerjaan Umum          | Dinas Prasjal Tarkim        |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT         | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN         | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|----|---------|----------|----------------|---|-------------|-----------------|------------------|---|----------------|---|
|    |         |          |                |   |             | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                |   |
|    |         |          |                | Terlaksananya pembangunan jalan Padang - By pass  | Km          | -               | 14               | Pembangunan Jalan dan Jembatan                    | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim (Balai Besar Pelaksana Jalan II) |
|    |         |          |                | Lanjutan pembangunan jalan Duku-Sicincin – Malalak-Bukittinggi  | Km          | -               | 20               | Pembangunan Jalan dan Jembatan                    | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Pembangunan Jembatan Provinsi dan Jembatan Strategis Provinsi   | Meter       | -               | 250              | Pembangunan Jalan dan Jembatan                    | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Peningkatan Jalan Provinsi  | Km          | -               | 75               | Pembangunan jalan dan jembatan                    | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Pembangunan Jalan Baru (Jalan strategis provinsi)   | Km          | -               | 40               | Pembangunan jalan dan jembatan                    | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Meningkatnya sistem jaringan jalan yang ada agar tetap dalam kondisi yang layak sesuai dengan standar pelayanan | KM/tahun    | -               | 800              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  | Pekerjaan Umum | Balai Besar Pelaksana Jalan II                        |
|    |         |          |                | Pemeliharaan rutin jembatan nasional  | Meter/tahun | -               | 6.000            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  | Pekerjaan Umum | Balai Besar Pelaksana Jalan II                        |
|    |         |          |                | Rehab/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan Provinsi   | KM/tahun    | -               | 600              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Kemantapan Jalan Nasional   | %           | 90              | 95               | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                   | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Kemantapan Jalan Provinsi   | %           | 80              | 88               | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                   | Pekerjaan Umum | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Meningkatnya pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan  | kws         |                 | 125              | Pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan | Perumahan      | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan                               | kws         | -               | 25               | Pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan | Perumahan      | Dinas Prasjal Tarkim                                  |
|    |         |          |                | Terbangunnya jalan perdesaan penunjang pertanian dan perkebunan   | kws         | -               | 10               | Pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan | Perumahan      | Dinas Prasjal Tarkim                                  |

| NO                                       | SASARAN                                  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT   | CAPAIAN KINERJA  |   | PROGRAM  | URUSAN  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------------|
|  |  |   |  |  |   | KONDISI<br>AWAL  | KONDISI<br>AKHIR  |  |   |                             |
| Meningkatnya pengelolaan sumber-daya air | Meningkatkan pengelolaan sumber daya air | 1. Mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya<br>2. Mengelola konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya<br>3. Optimalisasi bendung dan embung yang telah dibangun untuk menunjang irigasi & pertanian<br>4. Medayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, pertanian, perkotaan, dan industri<br>5. Melindungi kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sedimen | Terbangunnya irigasi baru<br>Terehabilitasinya jaringan irigasi<br>Terlaksananya OP jaringan irigasi<br>Terehabilitasinya jaringan rawa<br>Terlaksananya OP Jaringan rawa<br>Terlaksananya rehab dan OP sumur air tanah<br>Terlaksananya pembangunan checkdam<br>Terlaksananya pembangunan embung<br>Terlaksananya rehab embung<br>Terlaksananya OP Embung<br>Terbangunnya bending | Km<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Buah<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>Ha | 2,311<br>15.403<br>31.720<br>300<br>31.354<br>1<br>2<br>2<br>2<br>20<br>500 | 15<br>24.206<br>35.246<br>300<br>31.354<br>1<br>2<br>4<br>5<br>25<br>6.100 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya<br>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi<br>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi<br>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi<br>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi<br>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi<br>Pengembangan, penge<br>loaan dan konservasi<br>sungai, danau dan sum<br>ber air lainnya<br>Pengembangan, penge<br>loaan dan konservasi<br>sungai, danau dan sum<br>ber air lainnya<br>Pengembangan, penge<br>loaan dan konservasi<br>sungai, danau dan sum<br>ber air lainnya<br>Pengembangan, penge<br>loaan dan konservasi<br>sungai, danau dan sum<br>ber air lainnya | Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum<br>Pekerjaan Umum | Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA<br>Dinas PSDA + BWSS V<br>Dinas PSDA |                             |

| NO  | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT   | CAPAIAN KINERJA |                                | PROGRAM                                   | URUSAN                                | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                      |
|---|---|---|---|---|---|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|   |   |   |   |   |   | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR               |   |                                       |                             |                      |
| Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang | Penyediaan dan pengelolaan air baku   | Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang | 1. Merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang | Terpeliharanya persediaan air baku                                      | kawasan   | 3               | 3                              | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku       | Pekerjaan Umum                        | Dinas PSDA (BWSS V)         |                      |
|   | Pengendalian banjir dan pengamanan pantai   |   |   | Pengamanan banjir dan pantai  | KM  | 10              | 60                             | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | Pekerjaan Umum                        | Dinas PSDA                  |                      |
|   | Kawasan   |   |   | 2   | 5   |                 |                                |   |                                       |                             |                      |
|   |   |   |   |   |   |                 |                                |   |                                       |                             |                      |
|   | Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumbar   |   |   | Buku  | -   | 10              | Perencanaan Tata Ruang         | Penataan Ruang                            | Dinas Prasjal Tarkim                  |                             |                      |
|   | Penetapan Perda, Pergub dan SK.Gub dalam penataan ruang   |   |   | Perda   | -   | 1               | Perencanaan Tata Ruang         | Penataan Ruang                            | Dinas Prasjal Tarkim                  |                             |                      |
|   | Meningkatnya keserasian dan keselarasan program pembangunan di Sumbar   |   |   | kawasan   | -   | 13              | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Penataan Ruang                            | Dinas Prasjal Tarkim                  |                             |                      |
|   | Tersedianya dokumen zoning regulation   |   |   | Buku  | -   | 1               | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Penataan Ruang                            | Dinas Prasjal Tarkim                  |                             |                      |
|   | 1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat<br>2. Menyediakan perumahan dan permukiman masyarakat |   |   | 1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat | Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan memperkuat kelembagaan bidang perumahan | Paket           | -                              | 5   | Pengembangan Perumahan dan permukiman | Perumahan                   | Dinas Prasjal Tarkim |
|   |   |   |   | 2. Membangun perumahan masyarakat                                       | Pembangunan dan pengembangan TPA regional   | Kawasan         | -                              | -   | Pengembangan Perumahan dan permukiman | Perumahan                   | Dinas Prasjal Tarkim |
|   |   |   |   | 3. Menata bangunan dan lingkungan permukiman                            | Pengembangan system pelayanan air minum   | Kawasan         | -                              | 50  | Pengembangan Perumahan dan permukiman | Perumahan                   | Dinas Prasjal Tarkim |
|   |   |   |   | Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan di Sumbar                 | %   | -               | 25                             | Penataan bangunan dan lingkungan          | Perumahan                             | Dinas Prasjal Tarkim        |                      |
|   |   |   |   | Rekonstruksi bangunan SKPD dan Kanwil KL yang roboh (20-buah)           | unit  |                 | 19                             | Penataan bangunan dan lingkungan          | Perumahan                             | Dinas Prasjal Tarkim        |                      |
|   |   |   |   | Revitalisasi kawasan tradisional dan bersejarah                         | Paket   |                 | 3                              | Penataan bangunan dan lingkungan          | Perumahan                             | Dinas Prasjal Tarkim        |                      |

| NO | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT   | CAPAIAN KINERJA                    |                  | PROGRAM  | URUSAN      | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|--|--|--|--|-------|------------------------------------|------------------|--|-------------|-----------------------------|
|    |  |  |  |  |       | KONDISI<br>AWAL                    | KONDISI<br>AKHIR |  |             |                             |
|    | Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara | Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara | 1. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal<br>2. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut<br>3. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara<br>4. Mengembangkan angkutan kereta api | Meningkatnya pengembangan angkutan kereta api di Sumbar  | km    | Kajian, ganti rugi tanah dan fisik | 0                | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Terlaksananya pelayanan berklasifikasi baik berdasarkan standart pelayanan perhubungan darat           | %     | -                                  | 80               | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan kewenangan Provinsi                                     | Paket | -                                  | 1                | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Meningkatnya pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumbar (%)                        | Unit  | -                                  | -                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Meningkatnya penyeberangan Moda Transportasi Laut di Sumbar  | paket | -                                  | 1                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Peningkatan dermaga dan fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut (Teluk Bayur dan Teluk Tapang) | Paket | -                                  | 1                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Penetapan Perda / Pergub / SK.Gub  | Paket | -                                  | 2                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Terlaksananya pembangunan dermaga khusus & areal pergudangan   | Paket | -                                  | -                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Terbangunnya dermaga dan pergudangan   | Paket | -                                  | 1                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |
|    |  |  |  | Meningkatkan moda transportasi laut pada daerah terpencil (Kab. Mentawai)                              | unit  | -                                  | 1                | Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Perhubungan | Dinas Perhubungan           |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT                     | CAPAIAN KINERJA     |                     | PROGRAM  | URUSAN  | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB    |            |
|----|---------|----------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|------------|
|    |         |          |                |  |                         | KONDISI<br>AWAL     | KONDISI<br>AKHIR    |  |   |                                |            |
|    |         |          |                | Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan moda transportasi udara di Sumbar                        | Meter                   | 2.750               | -                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara   | Perhubungan   | Dinas Perhubungan              |            |
|    |         |          |                | Terlaksananya pembangunan Bandara three in one di Mentawai   | paket                   | -                   | 1                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara   | Perhubungan   | Dinas Perhubungan              |            |
|    |         |          |                | Terlaksananya Rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan prasarana, fasilitasi Angkutan Kereta Api | paket                   |                     |                     | Pengembangan Angkutan Kereta Api   | Perhubungan   | Dinas Perhubungan              |            |
|    |         |          |                | Tersedianya perencanaan rencana induk pembangunan jaringan KA Sumbar                               | paket                   |                     |                     | Pengembangan Angkutan Kereta Api   | Perhubungan   | Dinas Perhubungan              |            |
|    |         |          |                | Meningkatkan keselamatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas                                   | %                       |                     |                     | Pengendalian dan pengamanan lalu lintas  | Perhubungan   | Dinas Perhubungan              |            |
|    |         |          |                | 1. Mengembangkan energi kelistrikan<br>2. Menyusun regulasi dan dokumen pengelolaan energi         | 75 % rasio eletrifikasi | %                   | 69,50               | 75   | Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas ESDM |
|    |         |          |                | Terlatihnya operator pelaku usaha kelistrikan  | Orang                   | 20                  | 100                 | Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                                      | Energi dan Sumber Daya Mineral                      | Dinas ESDM                     |            |
|    |         |          |                | Pemanfaatan energi terbarukan  | Unit                    | 3 (1 PLTMH; 2 Pico) | 12 (8 LTMH; 4 Pico) | Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                                      | Energi dan Sumber Daya Mineral                      | Dinas ESDM                     |            |
|    |         |          |                | Tersedianya data perencanaan pengembangan energi kelistrikan                                       | Buku                    | 0                   | 1 Perda             | Peenyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi dan kelistrikan | Energi dan Sumber Daya Mineral                      | Dinas ESDM                     |            |
|    |         |          |                |  |                         |                     |                     |  |   |                                |            |

### **7.1.6. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 5**

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 5 adalah: menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiagaan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari *illegal logging*, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Sedangkan program prioritas untuk mewujudkan misi 5 adalah: Peningkatan Mitigasi Bencana, Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Penanganan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan & Konservasi Sumberdaya Hutan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.5.

**TABEL 7.5**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 5**

| NO   | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT             | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM                                   | URUSAN           | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |                |  |                 | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan</b> |  |  |                |  |                 |                 |                  |   |                  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prioritas 10: Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b>  |  |  |                |  |                 |                 |                  |   |                  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana                               | Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana | 1. Meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana  |                | Jalan evakuasi yang dibangun   | KM              | -               | 5                | Pembangunan jalan dan jembatan            | Pekerjaan Umum   | Dinas Pras jal Tarkim       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Jembatan evakuasi yang dibangun  | Unit            | -               | 3                | Pembangunan jalan dan jembatan            | Pekerjaan Umum   | Dinas Pras jal Tarkim       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Escape building yang dibangun  | Unit            | -               | 1                | Penataan Bangunan dan Lingkungan          | Pekerjaan Umum   | Dinas Pras jal Tarkim       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Shelter/ tempat Evakuasi yang dibangun   | Buah            | -               | 5                | Penataan Bangunan dan Lingkungan          | Pekerjaan Umum   | Dinas Pras jal Tarkim       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Terbangunnya perkutan tebing sungai  | KM              | 0,5             | 4,0              | Pengendalian banjir dan pengamanan pantai | Lingkungan Hidup | Dinas PSDA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Terbangunnya tanggul pengendali banjir   | KM              | 1               | 5                | Pengendalian banjir dan pengamanan pantai | Lingkungan Hidup | Dinas PSDA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Terbangunnya pengamanan pantai   | Unit            | 3               | 5                | Pengendalian banjir dan pengamanan pantai | Lingkungan Hidup | Dinas PSDA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Terbangunnya tanggul pengendali sedimen/ahar                                   | Unit            | 3               | 3                | Pengendalian banjir dan pengamanan pantai | Lingkungan Hidup | Dinas PSDA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)                      | Laporan         | 1               | 1                | Peningkatan Mitigasi Bencana              | Lingkungan Hidup | BPBD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) per-jenis bencana                          | Laporan         | -               | 1                | Peningkatan Mitigasi Bencana              | Lingkungan Hidup | BPBD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tersedianya informasi wilayah rawan bencana  | Menyediakan informasi wilayah rawan bencana          | Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana &terpadu |                | Penetapan dan penyusunan dok. kebijakan (Perda, Pergub, SK-Gub)                | Paket           | -               | 1                | Peningkatan Mitigasi Bencana              | Lingkungan Hidup | BPBD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Penetapan pembentukan Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Prov. / Kab. / Kota     | Prov. Kab/ Kota | 3<br>1          | 3<br>14          | Peningkatan Mitigasi Bencana              | Lingkungan Hidup | BPBD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                | Penetapan dan pembinaan Forum Pengurangan risiko Bencana (Prov. / Kab. / Kota) | Prov. Kab/ Kota | 3<br>1          | 3<br>14          | Peningkatan Mitigasi Bencana              | Lingkungan Hidup | BPBD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO   | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT                     | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM  | URUSAN           | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------------------|
|  |  |  |  |  |                         | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |  |                  |                             |
| Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana   | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana   | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana | Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana                                  | Paket                   | -               | 1                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | BPBD                        |
|  |  |  |  | Terlaksananya operasional PUSDALOPS Prov.                                      | Tahun                   | 1               | 1                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | BPBD                        |
|  |  |  |  | Terlaksananya Simulasi/ Pelatihan PB bagi Masyarakat (Kab. / Kota)             | Prov/ Kab/ Kota         | 5               | 20               | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | BPBD                        |
|  |  |  |  | Terlaksananya peningkatan akses Data Informasi BencanaIndonesia (DIBI) - Paket | Paket                   | 1               | 1                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | BPBD                        |
|  |  |  |  | Tersedianya peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana gunung api (lembar) | Buah                    | 1               | 5                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | ESDM                        |
|  |  |  |  | Tersedianya peta kawasan rawan gerakan tanah (lembar)                          | Lembar                  | -               | 1                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | ESDM                        |
|  |  |  |  | Jumlah monitor gunung api prov. Sumatera Barat                                 | Paket                   | -               | 1                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | ESDM                        |
|  |  |  |  | Peta daerah rawan bencana geologi  | Lembar                  | -               | 4                | Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana           | Lingkungan Hidup | ESDM                        |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan kebencanaan/ Lapangan                                     | paket                   | -               | -                | Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana               | Lingkungan Hidup | BPBD                        |
|  |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat                            | %                       | 60              | 80               | Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana               | Lingkungan Hidup | BPBD                        |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian                |  | Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup                 | Objek                   | -               | 24               | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|  |  |  |  | Jumlah kab/kota yang dibina  | Kab/ Kota               |                 | 5                | Perlindungan dan konser vasi sumber daya alam          | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|  |  |  |  | Masyarakat pelopor pelestarian lingkungan Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan  | Orang/Klp<br>Perusahaan |                 | 4<br>10          | Perlindungan dan konser vasi sumber daya alam          | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |

| NO | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)   | SAT          | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN           | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---|---|--|--|--------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------------------|
|    |   |   |  |  |              | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                  |                             |
|    | Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihannya ekosistem | Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihannya ekosistem | <p>1. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam</p> <p>2. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> | Terpantauanya pencemaran sungai dan danau  | Sungai Danau |                 | 5<br>4           | Perlindungan dan konser vasi sumber daya alam   | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|    |   |   |  |  | Sungai       |                 | 1                | Perlindungan dan konser vasi sumber daya alam   | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|    |   |   |  |  | Kab/ Kota    |                 | 3                | Perlindungan dan konser vasi sumber daya alam   | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|    |   |   |  |  | %            |                 | 15               | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|    |   |   |  |  | Kawasan      | 1               | 5                | Perlindungan dan konser vasi sumber daya alam   | Lingkungan Hidup | DKP                         |
|    |   |   |  | Terlaksananya pembinaan KLHS   | Kab Kota     | -               | 2                | Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan   | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|    |   |   |  |  | %            | -               | 100              | Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan   | Lingkungan Hidup | BAPEDALDA                   |
|    |   |   |  |  | Batang       | -               | 210.000          | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | Dishut                      |
|    |   |   |  |  | Batang       | -               | 15.300.000       | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | BP DAS Agam Kuantan         |
|    |   |   |  | Berkurangnya lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan 10.000 ha/ tahun | Batang       |                 | 15.000.000       | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | BP DAS Indra Giri           |
|    |   |   |  |  | Batang       |                 | 15.000.000       | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | BP DAS Batang Hari          |
|    |   |   |  |  | Ha           | -               | 165              | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | Dishut,                     |
|    |   |   |  |  | Ha           | -               | 27.229           | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | BP DAS Indragiri            |
|    |   |   |  | Terehabilitasinya lahan kritis dalam kawasan hutan 30.603 Ha                         | Ha           | -               | 1.864            | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | BP DAS Agam Kuantan         |
|    |   |   |  |  | Ha           |                 | 1350             | Rehabilitasi Hutan dan Lahan                    | Lingkungan Hidup | BP DAS Batang Hari          |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT   | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM                      | URUSAN           | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|-------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |       | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |                              |                  |                             |
|    |         |          |                | Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 66.490 ha                         | Ha    | -               | 194              | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | Dishut,                     |
|    |         |          |                |   | Ha    | -               | 36.784           | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Indragiri             |
|    |         |          |                |   | Ha    | -               | 21.578           | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Agam Kuantan          |
|    |         |          |                |   | Ha    |                 | 7.934            | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BP DAS Batang Hari          |
|    |         |          |                | Terbangunnya bangunan konservasi (Dam Pengendali, Dam Penahan dan Gulir Plug) 12 unit | Unit  | -               | 4                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Indragiri             |
|    |         |          |                |   | Unit  | -               | 0                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Agam Kuantan          |
|    |         |          |                |   | unit  |                 | 0                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BP DAS Batang Hari          |
|    |         |          |                |   | unit  |                 | 8                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | Dishut                      |
|    |         |          |                | Terbangunnya bangunan konservasi (Sumur Resapan, Embung dan Biopori) 6 unit           | Unit  | -               | 6                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | Dishut,                     |
|    |         |          |                |   | Unit  | -               | 0                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Indragiri             |
|    |         |          |                |   | Unit  | -               | 0                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Agam Kuantan          |
|    |         |          |                |   | Unit  | -               | 0                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BP DAS Batang Hari          |
|    |         |          |                | Terbangunnya teras gulungan 0 unit  | unit  | -               | -                | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Lingkungan Hidup | BPDAS Indragiri             |
|    |         |          |                | Terpeliharanya batas kawasan hutan 330 Km   | Km    | -               | 170              | Pemantapan Kawasan Hutan     | Kehutanan        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Penataan batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350 Km                        | Km    | -               | 75               | Pemantapan Kawasan Hutan     | Kehutanan        | BPKH Wil. II                |
|    |         |          |                | Penataan batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350 Km                        | unit  | -               | 1                | Pemantapan Kawasan Hutan     | Kehutanan        | Dishut                      |
|    |         |          |                | Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model 3 unit                            | Judul | -               | 107              | Pemantapan Kawasan Hutan     | Kehutanan        | Dishut                      |

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)  | SAT       | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN           | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|----------|----------------|---|-----------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------------------|
|    |         |          |                |   |           | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                  |                             |
|    |         |          |                | Tebentuknya model pengembangan sumber daya hutan, serta penanganan kasus SDA                    | Ha        | -               | 160              | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani                                     | Pertanian        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Terbentuknya model pengembangan lebah madu/gula enau dll 94 unit                                | Unit      | -               | 94               | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani                                     | Pertanian        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Terbinanya model sosial forestry dan agroforestry 2 Ha  | Ha        |                 | 4                | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani                                     | Pertanian        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/HR) oleh 20 kelompok tani                   | Klp tani  |                 | 20               | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani                                     | Pertanian        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan 5%  | Kab/ Kota | -               | 19               | Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan                   | Kehutanan        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Peningkatan tertib pernatausahaan hasil hutan Legal di Kab/Kota                                 | Kab/ Kota | -               | 19               | Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan                   | Kehutanan        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Peningkatan performance industri Hasil hutan di Kab/Kota  | Kab/ Kota | -               | 19               | Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan                   | Kehutanan        | Dinas Kehutanan             |
|    |         |          |                | Meningkatnya kawasan pesisir yang rusak pulih kembali Terlaksananya Rehabilitasi hutan Mangrove | Ha        | -               | 50               | Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut                    | Lingkungan Hidup | DKP                         |
|    |         |          |                | Terlaksananya Penghijauan pantai 50 ha  | Ha        | 10              | 50               | Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut                    | Lingkungan Hidup | DKP                         |
|    |         |          |                | Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang   | Ha        | 3               | 15               | Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut                    | Lingkungan Hidup | DKP                         |
|    |         |          |                | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil          | Kawasan   | 5               | 44               | Pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil | Lingkungan Hidup | DKP                         |

| NO | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(OUTCOME)                                       | SAT      | CAPAIAN KINERJA |                  | PROGRAM   | URUSAN                 | SKPD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|----|---|---|--|--|----------|-----------------|------------------|---|------------------------|---------------------------------|
|    |   |   |  |  |          | KONDISI<br>AWAL | KONDISI<br>AKHIR |   |                        |                                 |
|    | Menurunnya jumlah illegal logging dan illegal fishing | Menurunkan jumlah illegal logging dan illegal fishing | 1. Mengamankan hutan dari illegal logging<br>2. Peningkatan kapasitas hukum kawasan hutan 20 % | Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang                            | Lokasi   | 2               | 9                | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan | Kelautan dan Perikanan | DKP                             |
|    |   |   |  | Berkurangnya tekanan kerusakan hutan 20%                             | %        | -               | 20               | Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim                            | Lingkungan Hidup       | Dishut, BKSDA TNKS Wil. II, TNS |
|    |   |   |  | Pengawasan hot spot dan pengendalian kebakaran                       | Kab/kota | -               | 6                | Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim                            | Lingkungan Hidup       | Dishut, BKSDA TNKS Wil. II, TNS |
|    |   |   |  | Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang REDD pada 10 Kab             | Kab      | -               | 10               | Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim                            | Lingkungan Hidup       | Dishut                          |
|    |   |   |  | Perkembangan ekosistem kawasan hutan atau lahan daerah rawan bencana | lokasi   |                 | 41               | Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim                            | Lingkungan Hidup       | Dishut                          |

## **7.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN**

Pelaksanaan pembangunan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJPD 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMD 2010-2015, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk (1) mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah; (2) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem darat dan perairan pesisir; (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; (6) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan;

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebesar 9,54 % pada tahun 2009 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat antara lain (1) masih terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, modal, sarana produksi dan perlindungan pemasaran produk (2) ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi lingkungan, air minum serta penerangan.

Provinsi Sumatera Barat, saat ini masih terdapat 8 daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Sijunjung dan Kepulauan Mentawai dengan total nagari sebanyak 253 nagari. Permasalahan yang dihadapi di daerah tertinggal antara lain (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju; (2) kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar; serta (3) miskin sumberdaya alam dan manusia (4) Sarana dan Prasarana Soisal Ekonomi Yang Terbatas, Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi fisik penyebab ketertinggalan yakni kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, penggunaan listrik, telepon, air bersih, kesehatan, pendidikan, komunikasi, pasar dan pelayanan publik lainnya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

**Tabel 7.6**  
**Jumlah Nagari Tertinggal per Kabupaten**

| No | Kabupaten                    | Jumlah Nagari/<br>Desa | Jumlah Nagari/<br>Desa Tertinggal |
|----|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Kabupaten Sijunjung          | 54                     | 34                                |
| 2  | Kabupaten Solok Selatan      | 38                     | 24                                |
| 3  | Kabupaten Dharmasraya        | 52                     | 32                                |
| 4  | Kabupaten Solok              | 74                     | 24                                |
| 5  | Kabupaten Pesisir Selatan    | 76                     | 44                                |
| 6  | Kabupaten Pasaman Barat      | 19                     | 18                                |
| 7  | Kabupaten Padang Pariaman    | 47                     | 35                                |
| 8  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 43                     | 40                                |
|    | <b>J u m l a h</b>           | <b>403</b>             | <b>253</b>                        |

*Sumber Data : Biro Pemerintahan dan Kependudukan Serda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

Pengembangan ekonomi wilayah sampai saat ini produksi terbesar adalah padi, sawit, karet, kakao, yang berada di seluruh wilayah. Hal ini karena masing-masing kabupaten dalam pengembangan produk pertanian belum berbasis pada kawasan dan komoditi unggulan masing-masing daerah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya.

### **1. Sasaran pembangunan berdimensi kewilayahian**

- a. Perwujudan sistem perkotaan dan Peningkatan sarana dan prasarana pada pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL)
- b. Pemantapan kawasan lindung
- c. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam
- d. Peningkatan kawasan pengembangan pertanian berbasis potensi kawasan dan komoditi unggulan masing-masing Kabupaten/Kota serta sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah
- e. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu
- f. Pengembangan kawasan perbatasan dengan provinsi tetangga dilakukan dengan strategi:
  - Meningkatkan stabilitas kemanan dan ketertiban kawasan perbatasan;

- Mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.
- Peningkatan Fasilitas dan utilitas kawasan perbatasan
- g. Pengurangan daerah tertinggal dengan basis nagari sebanyak 180 nagari dari 253 nagari tertinggal sampai tahun 2015 atau dari 8 kabupaten tertinggal menjadi 4 kabupaten tertinggal.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan arah pengembangan wilayah tersebut diatas, maka strategi pengembangan wilayah 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan yang potensial untuk menjadi pusat-pusat perkotaan
- b. Mendorong wilayah-wilayah potensial yang masih tertinggal dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah yang telah maju;
- c. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
- d. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
- e. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
- f. Mendorong pengentasan ketertinggalan daerah berbasisnaganri atau kabupaten.

## **3. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan**

Pengembangan wilayah perkotaan di Sumatera Barat terutama diarahkan kepada melayani kegiatan yang berskala kota yang meliputi sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Menurut RTRW provinsi Sumbar 2009-2029, untuk Pusat Kegiatan

Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL.

Satu kota PKN yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang, dengan criteria yang dimiliki sebagai pusat kegiatan Nasional, diantaranya adalah: kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan eksport-impor nasional, memiliki pelabuhan udara sebagai pintu gerbang menuju dunia Internasional, menjadi pusat industry dan jasa nasional, dan sebagai pusat pengembangan jaringan sistem transportasi yang menyatukan beberapa kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan arahan RTRW Sumatera Barat 2009 - 2029, maka terdapat 5 kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan wilayah (PKW) di Sumatera Barat yakni: Kota Bukittinggi, kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Muaro Siberut. Apabila dilihat dari kriteria yang harus melekat pada pusat kegiatan wilayah ini, dimana suatu PKW harus dapat berfungsi sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Rencana pengembangan hirarki kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup provinsi Sumatera Barat. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah Rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selain itu, dasar acuan penetapan fungsi juga mengacu pada ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah menetapkan arahan hirarki pusat-pusat kegiatan atau permukiman perkotaan nasional, dengan kriteria seperti pada tabel 7.7.

**Tabel 7.7**  
**Kriteria Fungsi Kota**

| No | Fungsi Kota                   | Kriteria   |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan ibukota Provinsi</li> <li>b. Merupakan gerbang nasional dan memiliki akses cepat dengan kota-kota internasional yang diindikasikan dengan bandara primer dan pelabuhan laut primer.</li> <li>c. Berfungsi sebagai simpul utama jaringan transportasi nasional dan lintas negara.</li> <li>d. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan nasional yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan jaringan jalan lintas negara atau jalur penerbangan internasional dan nasional sebagai jalur distribusi.</li> <li>e. Merupakan pusat lokasi ekonomi nasional yang memiliki potensi mendorong perkembangan secara nasional atau beberapa Provinsi.</li> <li>f. Memiliki fungsi pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan jasa publik/kemasyarakatan untuk skala nasional atau beberapa Provinsi.</li> </ul> |
| 2  | Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berfungsi sebagai pusat pengolahan, pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan wilayah berorientasi pasar yang melayani beberapa kabupaten.</li> <li>b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi wilayah untuk beberapa kabupaten.</li> <li>c. Penghubung antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).</li> <li>d. Umumnya merupakan kota simpul utama di kawasan prioritas (sentra produksi dan kawasan andalan).</li> <li>e. Memiliki bandar udara sekunder atau tersier atau pelabuhan pengumpan.</li> <li>f. Memiliki fungsi pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan beberapa kabupaten.</li> </ul>  |
| 3  | Pusat Kegiatan Lokal (PKL)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan lokal berorientasi pasar wilayah beberapa kecamatan.</li> <li>b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi lokal</li> <li>c. Berfungsi sebagai pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan beberapa kecamatan.</li> <li>d. Bersifat khusus mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten.</li> </ul>  |

Sumber Data : PP 26 Tahun 2008

Berdasarkan kriteria tersebut maka hirarki pusat-pusat permukiman perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dapat ditentukan, sebagaimana disampaikan pada tabel 7.8

**Tabel 7.8**  
**Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029**

| PKN         | PKW  | PKWp  | PKL   |
|-------------|--|---|---|
| Kota Padang | 1. Kota Bukittinggi<br>2. Pariaman<br>3. Sawahlunto<br>4. Kota Solok<br>5. Muara Siberut | 1. Kota Payakumbuh<br>2. Kota Pulau Punjung<br>3. Kota Tapan<br>4. Kota Simpang Empat | 1. Kota Painan<br>2. Kota Padang Panjang<br>3. Kota Lubuk Sikaping<br>4. Kota Sari Lamak<br>5. Kota Batusangkar<br>6. Kota Padang Aro<br>7. Kota Tuapejat<br>8. Kota Lubuk Basung<br>9. Kota Muaro Sijunjung<br>10. Kota Lubuk Alung<br>11. Kota Aro Suka |

*Sumber Data : PP 26 Tahun 2008, dan Hasil Analisis, 2008.*

Pada Tabel diatas, terlihat bahwa pusat kegiatan pembangunan wilayah di provinsi Sumatera Barat itu adalah yang memiliki perkembangan aktifitas perekonomian yang mendukung kota utama Padang sebagai pusat kegiatan nasional yang aktifitas dominannya adalah kegiatan ekspor dan impor.

Pada sistem jaringan transportasi yang dapat dilihat pada aspek aksessibilitas menuju dan keluar kawasan Kota Padang, dan interaksi kota Padang dengan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW). Diantara jaringan transportasi jalan raya pada PKN dan PKW Provinsi Sumatera Barat, maka kota yang memiliki aksessibilitas geografis yang tinggi yang tercermin dari kecilnya indeks aksessibilitas geografisnya adalah Kota Padang, Bukittinggi, dan Kota Solok, dengan besaran matrik A(G)nya secara berturut-turut adalah 138,1 dan 130,9 serta 127,7. Hal ini berimplikasi bahwa dua kota yang tersebut terakhir ini memiliki tingkat aksessibilitas yang tinggi terhadap Kota Padang sebagai PKN. Jumlah arus penumpang yang datang ke Kota Padang dari Kota Bukittinggi tahun 2005 mencapai 268.657 orang, yang meninggalkan Kota Padang menuju Kota Bukittinggi mencapai 301.871 orang, telah meningkat menjadi 686.628 orang dan 689.627 orang tahun 2009 ini.

Terdapat tiga kota PKWp yang memiliki indeks aksessibilitas yang tinggi yakni kota Tapan 287,4 Simpang Empat: 223,8 dan Pulau Punjung 173,6. Tingginya indeks aksessibilitas geografis mengimplikasikan semakin sulitnya akses yang terlihat dari jauhnya jarak tempuh dan lamanya waktu tempuh menuju dan keluar kota-kota PKW ini. Dalam perencanaan pembangunan ke depan, selama RPJM II ini, maka program peningkatan aksessibilitas geografis diantara kota-kota PKW dengan PKNnya, maupun antara kota-kota PKL dengan PKW dan PKN harus menjadi pertimbangan prioritas, agar saling keterkaitan fisik diantara

pusat kegiatan nasional yakni Kota Padang, dengan pusat kegiatan wilayahnya semakin tinggi, yang berimplikasi semakin tingginya keterkaitan ekonominya.

**Tabel 7.9  
Indeks Aksessibilitas Geografis PKN dan PKW  
Sumatera Barat Selama RPJM I 2005-2010**

| No  | PKN dan PKW serta PKWp | Indeks Aksessibilitas Geografis (AG) Berdasarkan jarak |
|-----|------------------------|--|
| 1.  | Padang                 | 138,1  |
| 2.  | Bukittinggi            | 130,9  |
| 3.  | Pariaman               | 145,7  |
| 4.  | Sawah Lunto            | 156,7  |
| 5.  | Solok                  | 127,7  |
| 6.  | Muara Siberut          | na   |
| 7.  | Payakumbuh             | 149,1  |
| 8.  | Pulau Punjung          | 173,6  |
| 9.  | Tapan                  | 287,4  |
| 10. | Simpang IV             | 223,8  |

*Sumber Data : Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

Pada tabel di atas terlihat bahwa kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat memiliki indeks geografis yang lebih kecil dari kota-kota lainnya yang bukan PKW. Kota yang memiliki indeks aksessibilitas geografis yang paling tinggi adalah Kota Tapan, sebesar 287,4 Simpang IV yakni 223,8. Sehingga semakin tinggi indeks aksessibilitas geografis, maka semakin sulit akses masuk dan keluar kota tersebut. Semakin sulitnya akses mengimplikasikan jaringan transportasi terutama jalan darat belum memadai untuk meningkatkan aksessibilitas dengan daerah lain baik sebagai kota PKN maupun dengan kota PKW dan PKL. Sehingga, agar indeks aksessibilitas geografis menjadi lebih kecil seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi, maka jaringan transportasi darat harus semakin lebih baik. Oleh sebab itu, dalam pembangunan jaringan transportasi ke depan, wilayah PKW yang terletak di Ujung Utara dan Ujung Selatan pada wilayah Sumatera Barat haruslah dapat ditingkatkan aksessibilitasnya dengan menambah panjang jalan beraspal sehingga mempercepat waktu tempuh orang dan barang menuju Kota Padang sebagai kota yang melayani kegiatan ekspor dan impor.

#### 4. Arahan Pengembangan Kawasan Lindung

**Tabel 7.10**  
**Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat**  
**Hingga Tahun 2028 per Kabupaten/Kota**

| No       | Kabupat/Kota     | Luas<br>(Ha) | Luas Hutan Lindung |                    | Rencana Perubahan Luas |         |        |
|----------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|--------|
|          |                  |              | Sk. 422<br>th 1999 | Rencana<br>th 2028 | Ha                     | % 1)    | % 2)   |
| <b>A</b> | <b>Kabupaten</b> |              |                    |                    |                        |         |        |
| 1        | Agam             | 223.230      | 32.134             | 22.451             | -9.683                 | -30,13  | 5,08   |
| 2        | Dharmasraya      | 296.113      | 12.336             | 8.660              | -3.676                 | -29,80  | 1,93   |
| 3        | Kep. Mentawai    | 601.135      | 4.614              | 6.406              | 1.792                  | 38,84   | -0,94  |
| 4        | Limapuluh Kota   | 335.430      | 123.003            | 99.022             | -23.981                | -19,50  | 12,59  |
| 5        | Padang Pariaman  | 132.879      | 22.268             | 13.334             | -8.934                 | -40,12  | 4,69   |
| 6        | Pasaman          | 444.763      | 237.044            | 158.455            | -78.589                | -33,15  | 41,24  |
| 7        | Pasaman Barat    | 338.777      | 95.461             | 78.264             | -17.197                | -18,01  | 9,03   |
| 8        | Pesisir Selatan  | 579.495      | 41.672             | 23.096             | -18.576                | -44,58  | 9,75   |
| 9        | Sijunjung        | 313.080      | 88.262             | 78.015             | -10.247                | -11,61  | 5,38   |
| 10       | Solok            | 373.800      | 119.646            | 118.603            | -1.043                 | -0,87   | 0,55   |
| 11       | Solok Selatan    | 334.620      | 89.286             | 80.040             | -9.246                 | -10,36  | 4,85   |
| 12       | Tanah Datar      | 133.600      | 29.208             | 18.480             | -10.728                | -36,73  | 5,63   |
| <b>B</b> | <b>Kota</b>      |              |                    |                    |                        |         |        |
| 13       | Bukittinggi      | 2.524        | -                  | -                  | -                      | -       | -      |
| 14       | Padang           | 69.496       | 13.778             | 13.433             | -345                   | -2,50   | 0,18   |
| 15       | Padang Panjang   | 2.300        | 36                 | -                  | -36                    | -100,00 | 0,02   |
| 16       | Pariaman         | 7.336        | -                  | -                  | -                      | -       | -      |
| 17       | Payakumbuh       | 8.043        | 148                | 295                | 147                    | 99,32   | -0,08  |
| 18       | Sawahlunto       | 27.345       | 496                | 294                | -202                   | -40,73  | 0,11   |
| 19       | Solok            | 5.764        | 1.141              | 1.141              | -                      | -       | -      |
|          | <b>Jumlah</b>    | 4.229.730    | 910.532            | 719.989            | -190.544               | -20,93  | 100,00 |

*Sumber Data : Hasil rencana perubahan fungsi hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008*

Keterangan :

- 1) Terhadap luas hutan lindung per kabupaten/kota
- 2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

Penyebaran kawasan perlindungan setempat tersebut, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 7.11

**Tabel 7.11**  
**Rencana Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat**  
**Dirinci Menurut Kabupaten / Kota**

| No. | Kawasan Perlindungan Setempat   |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 1   | Sempadan Pantai                 | Kab. Pesisir Selatan  |
|     |                                 | Kota Padang   |
|     |                                 | Kab. Padang Pariaman  |
|     |                                 | Kota Pariaman   |
|     |                                 | Kab. Agam   |
|     |                                 | Kab. Pasaman Barat  |
|     |                                 | Kab. Kepulauan Mentawai   |
| 2   | Sempadan Sungai                 | Seluruh Kota dan Kabupaten  |
| 3   | Kawasan Sekitar Danau dan Waduk | Kab. Agam   |
|     |                                 | Kab. Tanah Datar  |
|     |                                 | Kab. Solok  |
| 4   | Kawasan Sekitar Mata Air        | Seluruh Kabupaten dan Kota  |
| 5   | Kawasan Terbuka Hijau perkotaan | Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Sumatera Barat |

*Sumber Data : Hasil rencana perubahan fungsi hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008*

## 5. Arahan Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya adalah meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

### a. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa.

Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun perairan; dan/ atau
- Mempunyai fungsi utama pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang ada di dalamnya.

b. Kawasan Suaka Alam Laut

Sesuai dengan karakteristik fisiografi yang dijumpai di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan hasil scoring dan hasil perubahan bahwa luasan kawasan yang termasuk Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari:

- *Cagar alam*, dijumpai di Kab. Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Pasaman, dan Agam. Dengan luasan terbesar di Kabupaten Pasaman ( 570 Ha ), dan terendah di Kab.Agam. seluas 3,4 Ha.
- *Kawasan Suaka Margasatwa* terdapat di kawasan Suaka margasatwa di Pulau Pagai Selatan
- *Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya*, Kawasan konservasi laut daerah Pulau Penyu, Kawasan konservasi laut daerah di Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, Kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau Sikuai, Kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, Daerah perlindungan laut Tiku Agam, Kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung) dengan Bengkulu (Pulau Baringin), Kawasan konservasi biota laut langka di Pulau Penyu dan Pulau Pasumpahan.
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini terletak di Batang Tomak Air Bangis, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut Pesisir Selatan; Sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Agam, Pariaman dan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Pelestarian Alam, dengan distribusi berupa: 1. Taman Nasional didominasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Solok, dan Kab. Dharmasraya, dengan luas mencapai sekitar 348.126 Ha. Sedangkan taman hutan raya, taman wisata alam, dan cagar budaya masing-masing dijumpai di: Kota Padang, Kab. Solok, dan Kab. Tanah Datar.

## 6. Arah Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang termasuk kawasan bencana alam meliputi: rawan bencana alam tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir, rawan letusan gunung berapi,

rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan bahaya gas beracun.

Secara lebih rinci dan lengkap peluang bencana yang dapat terjadi diwilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Tanah Longsor tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan samangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjalan serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuarter merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih dari 50 % dari seluruh luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Provinsi Bengkulu.
- b. Kawasan Rawan Banjir di Sumatera Barat terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

## **7. Arah Pengembangan Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memiliki keunikan baik dari jenis bebatuan, bentang alam, proses geologi maupun kawasan imbuhan air tanah. Untuk kawasan lindung geologi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya:

- a. kawasan cagar alam geologi;  
Kawasan lindung Kars, kawasan lindung kars kubah Batusangkar, bukit-bukit kars di sungaidareh di kab. Dharmasraya dan sijunjung,

b. kawasan rawan bencana alam geologi; meliputi:

- Kawasan rawan gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatera yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-VII MMI tingkat resiko sedang tingkat tiga, yaitu mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan rawan gempa tektonik dengan sumber pada zona patahan aktif Sumatera yaitu sepanjang patahan Semangko dengan tingkat intensitas kerusakan mencapai skala VIII-IX MMI, dengan tingkat resiko besar satu yang mencakup wilayah Kabupaten Sijunjung, Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Agam. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi dengan skala V-VII dengan tingkat resiko kecil yang disebabkan oleh goncangan akibat gempa tektonik dan vulkanik yang mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan ini terjadi umumnya pada daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah gempa tektonik yang berpusat di laut. Sedangkan kawasan rawan gempa tektonik yang berada zona sepanjang patahan Semangko meliputi mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, sampai Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

- Kawasan Rawan Letusan Gunung Api terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci dengan klasifikasi: kawasan bahaya I dengan radius 3 km dari puncak gunung, kawasan bahaya II dengan radius 3-7 km dari puncak gunung, dan kawasan bahaya III dengan radius 8-14 km dari puncak gunung. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat juga pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas gunung api memanjang hingga ke lereng bawah, sebagai akibat adanya aliran lahar, dan abu vulkanik.

Kawasan ini umumnya terjadi di Kabupaten dan Kota yang berada < 10 Km dari pusat erupsi gunung api pada Kawasan gunung api aktif yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan rawan tsunami di pesisir

Provinsi Sumatera Barat dapat di kelompokan dalam tiga kategori zona kerawanan tsunami yaitu:

- Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
  - Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
  - Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
- Kawasan Rawan Abrasi Pantai terjadi pada daerah pantai dengan komposisi batuan sedimen lunak yang dicirikan oleh pantai landai dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Terdapat mulai dari Kota Padang, hingga Kota Pariaman. Termasuk yang ada di Pasaman Barat dan kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai.
  - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan ini termasuk kawasan tuf ngarai sianok, danau dibawah, dan kaldera gunung api maninjau.

## **8. Arah Pengembangan Kawasan Budidaya**

### **A. Arah pengembangan Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan budidaya hutan produksi, berdasarkan PP 26 tahun 2008 terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi serta hutan rakyat. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2028 adalah seluas 796.424 Ha. Adapun pengembangan hutan produksi di arahkan di Kab/kota yang meliputi: Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Dhomasraya, Kab. Tanah Datar Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok Selatan dan Kota Sawah Lunto

### **B. Arah Pengembangan Kawasan Pertanian**

Kawasan peruntukan budidaya pertanian dimaksudkan untuk dapat menciptakan produktivitas maksimal dengan masukan terbatas, tanpa mengurangi keseimbangan lingkungan, baik untuk pertanian tanaman pangan maupun perkebunan.

**Tabel 7.12**  
**Arahan Kawasan Pusat Pengembangan Pertanian (Agropolitan)**

| No | Pusat Kawasan Agropolitan | Kabupaten       | Core Komoditi                             |
|----|---------------------------|-----------------|---|
| 1  | IV Angkat Candung         | Agam            | Sapi dan Sayuran Dataran Tinggi           |
| 2  | Lembah Gumanti            | Solok           | Sayuran Dataran Tinggi                    |
| 3  | Koto Baru                 | Tanah Datar     | Sayuran Dataran Tinggi                    |
| 4  | Lengayang                 | Pesisir Selatan | Sapi Potong                               |
| 5  | VII Koto Sungai Sarik     | Padang Pariaman | Sapi Potong                               |
| 6  | Mungka                    | Lima Puluh Kota | Unggas                                    |
| 7  | Kecamatan Rao             | Kab. Pasaman    | Karet                                     |
| 8  | Kecamatan Bonjol          | Kab. Pasaman    | Pertanian Terpadu (Pertanian, Peternakan) |

*Sumber Data : Kementerian Pertanian Tahun 2008*

**Tabel 7.13**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Sapi Potong, Sapi Perah,Kerbau, Kambing dan Domba**

| No | Komoditi    | Kabupaten/Kota  |
|----|-------------|---|
| 1  | Sapi Potong | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman<br><br>Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (20 kawasan) : Kenagarian Mungo, Mungka Kab. Limapuluh Kota, Koto Hilalang, Baso, Pakan Kamis Kab. Agam, Sitiung, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Tanjung Emas, Salimpaung Kab. Tanah Datar, Lembah Gumanti Kab. Solok, Lubuk Alung, Padang Sago Kab. Padang Pariaman, Sutera, Bayang Kab. Pesisir Selatan dan Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat. |
| 2  | Sapi Perah  | Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang<br><br>Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (2 Kawasan): Gungung Kota Padang Panjang, X Koto Kab. Tanah Datar   |
| 3  | Kerbau      | Kawasan Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung<br><br>Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (5 kawasan) Sijunjung Kab. Sijunjung, IV Kota, Matur, Batagak, Kabupaten Agam, Alahan Panjang Kab. Solok.   |
| 4  | Kambing     | Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Solok  |
| 5  | Itik        | Kawasan sentra Itik 3 Kawasan : Sumani Kab. Solok, Pitalah Kab. Tanah Datar, Payobasung Kota Payakumbuh.  |

*Sumber Data : Kesepakatan dengan Kabupaten/Kota*

**Tabel 7.14**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Peternakan**

| No | Komoditi     | Kawasan Sentra  | Penyangga  |
|----|--------------|---|--|
| 1  | Sapi Potong  | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Dharmasraya, Kota Payakumbuh | Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan       |
| 2  | Sapi Perah   | Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang                             | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Sawahlunto |
| 3  | Kerbau       | Kab. Agam, Kab. Sijunjung   | Kab. Solok, Kab. Tanah Datar,                                |
| 4  | Kambing      | Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar,                           | Kab. Solok Kota Sawahlunto                                   |
| 5  | Itik         | Kab. Tanah Datar, Kab. Pss Selatan.                               | Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya                               |
| 6  | Ayam Potong  | Kota Padang, Kab.Pdg Pariaman                                     | Kota Payakumbuh, Kota Pariaman                               |
| 7  | Ayam Petelur | Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh                             | Kota Padang, Kab.Pasaman Barat                               |
| 8  | Ayam Buras   | Kota Swahlunto, Kab.Tanah Datar                                   | Kab.Pss Selatan, Kab.Pdg Pariaman, Kab.Sjj                   |

*Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota*

### **C. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Hasil analisis menunjukan, kawasan yang sesuai untuk tujuan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas: 1.148.728 Ha, yang terdiri dari: potensi lahan sawah, dan lahan bukan sawah, sedangkan distribusi kesesuaian untuk tiap kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas areal potensial dengan potensi tertinggi, dan Kota Padang Panjang mempunyai areal potensial terendah. Sedangkan potensi pengembangan areal pertanian terluas di kabupaten Agam seluas 29.611 Ha, dan terendah Kota Bukittinggi hanya 414 Ha. Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian pangan dan holtikultura, adalah:

#### 1. Pertanian Lahan sawah

Tersebar pada seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Barat . Pengembangan lahan irigasi: Kab. Pasaman (Irigasi Panti Rao), Kab. Dharmasraya (Irigasi Batang Hari), Kab. Pasaman Barat (Irigasi Batang Tongar dan Irigasi Batang Batahan), Kab. Pesisir Selatan (Irigasi Inderapura), Kab. Padang Pariaman (Irigasi Batang Anai II), Kabupaten Tanah Datar (Irigasi Sinamar).

#### 2. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Palawija dan Hortikultura)

Pertanian lahan kering meliputi palawija dan holtikultura terdiri dari komoditi sayuran (seperti kubis, kentang, bawang merah, cabe), buah-buahan (seperti: manggis, pisang, jeruk, melinjo, markisah,

alpokat, salak), dan tanaman hias serta obat-obatan. Dimana sentra produksinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.15 berikut.

**Tabel 7.15**  
**Arahan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura**

| No                   | Komoditi        | Lokasi  |
|----------------------|-----------------|---|
| <b>Buah-buahan</b>   |                 |   |
| 1.                   | Jeruk           | Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Padang Pariman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok |
| 2.                   | Pisang          | Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok   |
| 3.                   | Alpokat         | Kab. Solok  |
| 4.                   | Manggis         | Kab. 50 Kota, Kab. Agam, Kab. Pdg Pariaman dan Kab. Siunjung, Kab. Solok.   |
| 5.                   | Markisa         | Kab. Solok  |
| 6.                   | Sawo            | Kab. Tanah Datar  |
| <b>Sayur-sayuran</b> |                 |   |
| 1.                   | Sayuran organik | Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota  |
| 2.                   | Kentang         | Kab. Agam dan Kab. Solok,   |
| 3.                   | Bawang Merah    | Kab. Solok  |
| 4.                   | Tomat           | Kab. Tanah Datar, Kab. Solok  |
| 5.                   | Cabe            | Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam, Kab. Solok  |
| <b>Palawija</b>      |                 |   |
| 1                    | Jagung          | Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung   |
| 2                    | Kedele          | Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya   |
| <b>Tanaman Hias</b>  |                 |   |
| 1.                   | Bunga           | Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota   |

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

**Tabel 7.16**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura**

| No                 | Komoditi | Lokasi Sentra               | Penyangga                            |
|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Buah-buahan</b> |          |                             |                                      |
| 1                  | Jeruk    | Kab. Limapuluh Kota,        | Kab. Agam, Kab. Solok Selatan        |
| 2.                 | Pisang   | Kab. Tanah Datar, Kab. Agam | Kab. Pasaman, Kota Pariaman          |
| 3.                 | Alpokat  | Kab. Solok                  | Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar |
| 4.                 | Manggis  | Kab. 50 Kota,               | Kab. Padang Pariaman, Kab. Sjj       |
| 5.                 | Markisa  | Kab. Solok                  |                                      |
| 6.                 | Sawo     | Kab. Tanah Datar            |                                      |

| No                   | Komoditi        | Lokasi Sentra                            | Penyangga   |
|----------------------|-----------------|--|---|
| <b>Sayur-sayuran</b> |                 |  |   |
| 1.                   | Sayuran organik | Kab. Tanah Datar                         | Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota                    |
| 2.                   | Kentang         | Kab. Solok                               | Kab. Agam, Kab. Tanah Datar                                   |
| 3.                   | Bawang Merah    | Kab. Solok                               | Kab. Tanah Datar, Kab. Agam                                   |
| 4.                   | Tomat           | Kab. Tanah Datar,                        | Kab. Solok, Kab. Agam   |
| 5.                   | Cabe            | Kota Payakumbuh                          | Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar |
| <b>Palawija</b>      |                 |  |   |
| 1                    | Jagung          | Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan | Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar                                |
| 2                    | Kedele          | Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya      |   |
| <b>Tanaman Hias</b>  |                 |  |   |
| 1.                   | Bunga           | Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang,   | Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota  |

*Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota*

#### **D. Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan. Kawasan Perkebunan.**

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut kimbu. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan antara lain berupa Komoditi unggulan: kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, gambir, cassia vera, nilam, jarak pagar. Adapun rencana pengembangan kawasan perkebunan adalah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 7.17**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan**

| No | Komoditi Perkebunan | Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota   |
|----|---------------------|---|
| 1  | Kelapa Sawit        | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai |
| 2  | Karet               | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman                                |
| 3  | Kelapa Dalam        | Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Kab. Kepulauan Mentawai   |

| No | Komoditi Perkebunan | Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota  |
|----|---------------------|--|
| 4  | Kakao               | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok |
| 5  | Kopi                | Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman  |
| 6  | Gambir              | Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung  |
| 7  | Cassiavera          | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Pasaman, Kab. Solok   |
| 8  | Nilam               | Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sujun-jung. Kab. Solok  |
| 9  | Jarak Pagar         | Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan   |

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

**Tabel 7.18**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan**

| No | Komoditi Perkebunan | Lokasi Sentra   | Penyangga  |
|----|---------------------|---|--|
| 1  | Kelapa Sawit        | Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat   | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Solok Selatan,                               |
| 2  | Karet               | Kab. Sijunjung , Kab. Dharmasraya,  | Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman                                  |
| 3  | Kelapa Dalam        | Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai | Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai   |
| 4  | Kakao               | Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman  | Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Kep. Mentawai, |
| 5  | Kopi                | Kab. Tanah Datar, Kab. Solok  | Kab. Agam  |
| 6  | Gambir              | Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan,  | Kab. Agam  |
| 7  | Cassiavera          | Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan  | Kab. Solok   |
| 8  | Nilam               | Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai   | Kab. Solok, Kab. Sjj   |

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

## E. Arahan Pengembangan Kawasan Perikanan

### ▪ Perikanan Tangkap

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12

mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang provinsi adalah sejauh 12 mil.

Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan di 2 kota dan 5 Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah (1) Kota Padang, (2) Kabupaten Pesisir Selatan, (3) Kabupaten Padang Pariaman, (4) Kabupaten Agam, (5) Kabupaten Pasaman Barat dan (6) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan (7) Kota Pariaman.

#### ▪ **Perikanan Budidaya**

Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Budidaya laut dikembangkan di wilayah kota dan kabupaten yang memiliki perairan laut, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komoditi budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan kerapu serta tambak udang.

Rencana pengembangan perikanan darat budidaya yaitu tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kab.

Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya.

### **F. Arahan Pengembangan Kawasan Pertambangan**

Hampir semua wilayah administrasi merupakan rencana areal penambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten kota mempunyai bahan mineral yang berpotensi untuk dieksplorasi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kaya akan hasil tambang, terutama: tambang, bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. Kawasan pertambangan di Sumatera Barat berada di Sawahlunto, Sijunjung dan Pesisir Selatan untuk batubara; Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat dan Solok untuk pertambangan Galena; Sijunjung, Solok, Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai untuk pertambangan minyak dan gas; serta Padang Pariaman, Agam dan Pasaman Barat untuk kawasan tambang pasir besi.

## G. Arahan Pengembangan Kawasan Industri

Adapun rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Disamping kawasan industry tersebut arah pengembangan sentra industri pada Kabupaten/Kota antara lain:

**Tabel 7.19**  
**Arahan Pengembangan Industri di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Kabupaten/ Kota              | Komoditi Industri   |
|----|------------------------------|---|
| 1  | Kabupaten Limapuluh Kota     | Gambir, anyaman rotan, batu bata, bubuk kopi Komoditi Inti : Gambir   |
| 2  | Kabupaten Agam               | Bordir, konveksi/garmen, kerajinan perak, CPO, gula tebu, perabot Komoditi Inti : Konveksi/Garment  |
| 3  | Kabupaten Dharmasraya        | CPO, batu bata, meubel kayu, keret, genteng Komoditi Inti : Industri Berbasis Tanah Liat  |
| 4  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Pengolahan hasil laut, minyak nilam, batu bata, kelapa, kopra, rotan Komoditi Inti : Rotan  |
| 5  | Kota Padang                  | Makanan ringan, pengolahan hasil laut, kompor minyak tanah, sulaman benang emas, perabot rotan, semen Komoditi Inti : Pengolahan Hasil Laut |
| 6  | Kota Pariaman                | Emping melinjo, bordir, sulaman benang emas, pengolahan hasil laut Komoditi Inti : Kelapa Terpadu   |
| 7  | Kota Solok                   | Bubuk kopi, perabot kayu, batu bata, makanan ringan Komoditi Inti : Industri Pakaian Jadi & Tekstil Lainnya                                 |
| 8  | Kota Payakumbuh              | Makanan ringan, bordir, anyaman bambu, telur rendang Komoditi Inti : Industri Pengolahan Daging (Rendang, Dendeng Salai)                    |

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Pada RPJMD ini, pengembangan industri unggulan diarahkan pada pengembangan 10 (sepuluh) industri unggulan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Sumatera Barat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yaitu:

**Tabel 7.20**  
**Sepuluh (10) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat**

| No | Industri Unggulan         | Lokasi Pengembangan   |
|----|---------------------------|---|
| 1  | Industri Pengolahan Kakao | Industri Fermentasi : Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Sawahlunto, Industri Pengolahan Kakao: Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Industri Makanan berbasis Coklat : Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh |
| 2  | Industri Gambir           | Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan  |

| No | Industri Unggulan                                 | Lokasi Pengembangan  |
|----|---|--|
| 3  | Industri Minyak Atsiri                            | Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Daharmasraya |
| 4  | Industri Pengolahan Makanan Ringan                | Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok  |
| 5  | Industri Kulit dan Alas Kaki                      | Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi<br>Kabupaten Tanah Datar  |
| 6  | Industri Tekstil dan Produk Tekstil               | Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh  |
| 7  | Industri Alsintan                                 | Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Payakumbuh   |
| 8  | Industri Semen (suku cadang dan pengolahan semen) | Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota  |
| 9  | Industri Maritim (perkapalan)                     | Kabupaten Pesisir Selatan  |
| 10 | Industri Hasil Laut                               | Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai   |

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

## H. Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui penataan kawasan wisata terdiri atas: penetapan obyek/atraksi unggulan, kota pusat pelayanan pariwisata, dan jalur wisata. Upaya pengembangan wisata Provinsi Sumatera Barat ini juga tetap dikaitkan dengan pusat pariwisata nasional yakni: Jakarta, Jogja, dan Bali sebagai satu kesatuan tujuan wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan pengembangan koridor wisata dan peningkatan daya tarik obyek wisata. Pengembangan pariwisata ini ditujukan untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pembangunan sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dibagi kedalam 7 (tujuh) WPP sebagaimana diuraikan berikut:

**Tabel 7.21**  
**Wilayah Pengembangan Pariwisata**

| No | Wilayah Pengembangan                | Kabupaten/kota dan Pusat Layanan  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1  | Wilayah Pengembangan Pariwisata I   | Koridor Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. WPP ini dominasi atraksi adalah Budaya, Belanja, MICE, Kerajinan, Kesenian, Peninggalan Sejarah, Danau, Pegunungan, serta Flora dan Fauna dengan Pusat Layanan di Kota Bukittinggi         |
| 2  | Wilayah Pengembangan Pariwisata II  | Meliputi koridor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. DPP ini didominasi atraksi dari jenis wisata bahari, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai dan hutan dengan pusat layanan di Kota Padang            |
| 3  | Wilayah Pengembangan Pariwisata III | Meliputi koridor Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dimana WPP ini didominasi jenis wisata Budaya, Peninggalan Sejarah, Kesenian, Rekreasi, Danau, Agro, Olah Raga, Pegunungan, Hutan, Kerajinan dengan Pusat Layanan di Kota Batusangar  |
| 4  | Wilayah Pengembangan Pariwisata IV  | Meliputi koridor Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok dengan Pusat Layanan di Kota Arosuka. WPP ini didominasi jenis wisata Rekreasi Danau, Pegunungan, Hutan, Agro, Taman Nasional Budaya dan Kesenian  |
| 5  | Wilayah Pengembangan Pariwisata V   | WPP ini meliputi koridor Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang didominasi oleh jenis wisata Peninggalan Sejarah, Tambang, Rekreasi Agro, Olah Raga, Hutan dengan Pusat Layanan di Kota Sawahlunto  |
| 6  | Wilayah Pengembangan Pariwisata VI  | Meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pusat Layanan di Kota Painan. Berupa objek wisata bahari karena terdapat kawasan yang ditetapkan dalam RIPPNAS Pariwisata sebagai Pusat Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Barat, yakni Kawasan Wisata Mandeh   |
| 7  | Wilayah Pengembangan Pariwisata VII | Meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan kondisi geografis berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas Samudera Hindia, maka kawasan ini dinominasi oleh wisata bahari yang dilengkapi dengan wisata budaya dan alam. Pusat layanan pada WPP ini adalah Kota Tua Pejat |

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Arah pengembangan kawasan pariwisata pada RPJMD ini sesuai dengan kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota tentang 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Pariwisata adalah:

**Tabel 7.22**  
**Sepuluh (10) Destinasi Unggulan Pariwisata**

| No | Destinasi Unggulan                             | Kabupaten/kota               |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Pantai air Manis, Pantai Padang, Gunung Padang | Kota Padang                  |
| 2  | Teuk Katurai, Pantai Barat Sikakap dan Siberut | Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 3  | Panorama Baru                                  | Kota Bukittinggi             |
| 4  | Heritage transportasi batubara                 | Kota Sawahlunto              |
| 5  | Lembah Harau                                   | Kabupaten Lima Puluh Kota    |
| 6  | Kawasan Mandeh                                 | Kabupaten Pesisir Selatan    |
| 7  | Danau Kembar                                   | Kabupaten Solok              |
| 8  | Istana Pagaruyung                              | Kabupaten Tanah Datar        |
| 9  | Ulakan Tapakis, Tabuik                         | Kabupaten Padang Pariaman    |
| 10 | Danau Maninjau, Puncak Lawang                  | Kabupaten Agam               |

*Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009*

### **I. Arahan pengembangan Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Secara keseluruhan luas lahan terbangun di Provinsi Sumatera Barat direncanakan seluas 61.682 ha, sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan, Adapun arahan pengembangan kawasan permukiman adalah:

- a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehingga pada permukiman yang telah ada diupayakan untuk direlokasi ke wilayah yang relatif aman.
- b. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- c. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- d. Perlu pengelompokan kawasan permukiman agar dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman lebih efisien dan efektif.

- e. Perlu adanya penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
- f. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.

### **J. Arahan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain**

Sumatera Barat di wilayah utara berbatas langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, wilayah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi tetangga sebagai berikut:

**Tabel 7.23  
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan  
Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga**

| No | Provinsi Berbatasan | Kabupaten       | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kecamatan   |
|----|---------------------|-----------------|------------------|--|
| 1  | Sumatera Utara      | Pasaman Barat   | 4                | Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh dan Lembah Malintang |
|    |                     | Pasaman         | 4                | Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul                          |
| 2  | Riau                | Pasaman         | 2                | Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan                             |
|    |                     | Lima Puluh Kota | 4                | Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh Sago Halaban         |
|    |                     | Sijunjung       | 3                | Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus                             |
|    |                     | Dharmasraya     | 2                | Sitiung dan Koto Baru  |
| 3  | Jambi               | Dharmasraya     | 2                | Koto Baru, Sungai Rumbai   |
|    |                     | Solok Selatan   | 2                | Sangir Jujuhan dan Sangir  |
|    |                     | Pesisir Selatan | 3                | Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut              |
| 4  | Bengkulu            | Pesisir Selatan | 1                | Lunang Silaut  |

Wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga sebagian besar merupakan wilayah yang tertinggal dan sebagai kantong-kantong kemiskinan. Hal ini terjadi karena pada wilayah perbatasan merupakan wilayah yang termarginalkan dari pusat pemerintahan; kurangnya aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energy serta sifat permukimannya menyebar.

Strategi pengembangan wilayah perbatasan antara lain:

- a. Pengembangan infrastruktur meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
- b. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
- c. Pengembangan potensi ekonomi, Potensi ekonomi berupa potensi wisata, sumberdaya alam serta sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.

Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.

### **7.3. Arahan Pengembangan Daerah Tertinggal**

Wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten, saat ini masih 8 kabupaten yang dikategorikan tertinggal, secara aksesibilitas ke ibu kota kabupaten pada dasarnya sudah lancar dan terhubung, hanya satu kabupaten yang membutuhkan transportasi melalui laut dan udara yang sering terkendala dengan cuaca yaitu ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karakteristik wilayah atau kondisi geografis serta menyebarunya kawasan permukiman sehingga akses ke nagari/jorong masih banyak yang belum dapat ditempuh dengan lancar.

Penetapan nagari/desa tertinggal berdasarkan kepada 15 kriteria dasar, yaitu jalan utama desa, lapangan usaha masyarakat, fasilitas dan tenaga kesehatan, sarana komunikasi kondisi perekonomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kepadatan penduduk, Sumber air, sumber bahan bakar, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga pertanian, kondisi sosial ekonomi masyarakat, akses sarana kesehatan dan ke pasar serta kemudahan mencapai pertokoan. Pendekatan untuk pengurangan daerah tertinggal perlu berbasis pada nagari, sehingga peningkatan sarana aksesibilitas dari wilayah nagari ke pusat ekonomi atau ibukota kabupaten dan peningkatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat akan terfokus.

Strategi pengurangan daerah tertinggal berbasis nagari dilakukan dengan:

- a. Pengembangan kebersamaan dan kemandirian daerah dalam pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui; (1) Pengembangan ekonomi lokal, (2) Pemberdayaan masyarakat, dan (3) Penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan.

- b. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan. Strategi ini diharapkan untuk dapat mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kondisi potensi lokal setempat. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing dilakukan melalui; (1) Peningkatan investasi daerah baik investasi swasta, masyarakat dan pemerintah, (2) Pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi dan dunia usaha, (3) Pengembangan kawasan produksi, kawasan cepat tumbuh dan agropolitan.
- c. Peningkatan sistem wilayah ekonomi yang sinergis antara daerah tertinggal dan daerah maju tanpa mempertimbangkan wilayah administrasi. Strategi ini dilakukan melalui; (1) Pengembangan akses dan jaringan ekonomi dan prasarana antar wilayah, (2) Pengembangan sentra produksi, (3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Peningkatan penanganan kawasan tertinggal yang memiliki permasalahan khusus dengan membuka aksesibilitas kepada daerah yang sulit dijangkau secara fisik disebabkan kurangnya moda transportasi, komunikasi dan informasi, minimnya infrastruktur. Strategi ini dilakukan melalui; (1) Pembukaan infrastruktur untuk mengatasi keterisolasi daerah, (2) Pembangunan infrastruktur dasar berupa pendidikan, kesehatan, komunikasi, air bersih dan energi, (3) Pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sasaran pengurangan daerah tertinggal berbasis nagari dilakukan melalui:

- 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tertinggal minimal sama dengan daerah yang lebih maju.
- 2. Meningkatnya aksesibilitas kepada daerah tertinggal.
- 3. Berkurangnya ketimpangan antara daerah yang lebih maju dengan daerah tertinggal yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten tertinggal.

## **7.4. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **7.4.1. Agenda Pembangunan Daerah**

Agenda pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah

dirumuskan serta mempedomani agenda pembangunan nasional, maka pada bagian ini ditetapkan 5 agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2010-2015. Masing-masing agenda merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk setiap misi. Kelima agenda tersebut adalah:

### **Agenda 1: Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah**

Penerapan ajaran agama dan budaya daerah merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais menuju masyarakat madani. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pengembangan pendidikan bernuansa agama, peningkatan toleransi beragama, penerapan dan pengembangan budaya Minangkabau serta peningkatan kepastian hukum tanah ulayat,

### **Agenda 2: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Oleh karena peran pemerintah dalam pembangunan cukup dominan, maka percepatan proses pembangunan daerah berkaitan erat dengan tata-kelola pemerintah daerah. Dengan demikian perbaikan tata-kelola pemerintah daerah merupakan agenda penting dalam mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Tekanan utama dalam agenda pembangunan ini adalah: peningkatan keterpaduan dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparansi, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur, dan peningkatan pelayanan publik.

### **Agenda 3: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata, perbaikan gizi dan penerapan dan pengembangan IPTEK tepat guna serta perbaikan etos kerja masyarakat.

#### **Agenda 4: Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, penambahan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Nagari serta pengembangan prasarana dan sarana pembangunan.

#### **Agenda 5: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pembangunan yang baik tidak hanya dalam bentuk peningkatan kemakmuran masyarakat, tetapi juga dalam bentuk terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, agenda perbaikan kualitas lingkungan hidup juga merupakan unsur yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Fokus utama agenda ini adalah pada perbaikan kualitas *Rencana Tata-Ruang Wilayah* (RTRW), mewujudkan disiplin aparatur dan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata–ruang tersebut serta terus meningkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

#### **7.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari masing-masing agenda pembangunan. Agenda pembangunan Sumatera Barat tahun 2010-2015 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, yaitu: 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat, 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan, 6) Pengembangan Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, 10) Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas, dapat dilihat pada Tabel 7.24.

**Tabel 7.24**  
**Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan**

| NO | MISI  | AGENDA   | PRIORITAS  |
|----|---|--|--|
| 1  | Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" | Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah           | 1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat   |
| 2  | Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional  | Perbaikan Tatake-lola Pemerintahan Daerah                      | 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan  |
| 3  | Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi  | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK | 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan<br>4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat   |
| 4  | Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global                                 | Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat     | 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan<br>6. Pengembangan Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi<br>7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya<br>8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal<br>9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat |
| 5  | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan   | Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup                            | 10. Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup  |

**Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.** Prioritas pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif diharapkan akan terwujud: 1) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) Terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) Terceminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Terwujudnya optimalisasi peran lembaga lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Berkurangnya perbuatan maksiat.

**Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.** Prioritas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terwujudnya kepastian hukum 7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel 9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

**Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.** Prioritas peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Indonesia Bagian Barat, 6) Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) Lahirnya wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

**Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.** Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya angka harapan hidup, 3) Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat, 7) Meningkatnya layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

**Prioritas 5: Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.** Prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan,

perikanan dan kelautan) yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, 2) Berkembangnya agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 3) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai propinsi agraris dengan petani yang sejahtera, 4) Berkembangnya penerapan teknologi pertanian, 5) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, 6) Terwujudnya ketahanan pangan, 7) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah penghasil pengusaha profesional, 8) Terwujudnya pola pembangunan berbasis kawasan, 9) Terwujudnya pola pembangunan berbasis komoditi unggulan dan prinsip *one village one product*.

**Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi.** Prioritas pengembangan industri olahan dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah. Dengan pengembangan industri ini diharapkan: 1) Berkembang sentra industri dan jasa berdasarkan potensi lokal, 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 3) Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, 4) Meningkatnya jumlah ekspor produk industri, 5) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 6) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pelopor pertumbuhan UMKMK dan ekonomi kerakyatan, 7) Terwujudnya promosi dan pemasaran produk industri, 8) Peningkatan Investasi.

**Prioritas 7: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.** Prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan budaya diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs-situs budaya Minangkabau yang sudah ada menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata alam dan budaya ini diharapkan: 1) Berkembang objek-objek wisata alam yang potensial, 2) Berkembang objek-objek wisata budaya yang sudah ada pada setiap daerah, 3) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya.

**Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal.** Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam, 3) Perluasan lapangan kerja, 4) Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, 5) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, 6) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal.

### **Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat**

**Rakyat.** Prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses, jumlah, dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian, dan perumahan rakyat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar kota dan desa, 3) Meningkatnya akses jalan terhadap destinasi wisata, 4) Tersedianya akses jalan evakuasi penagglangan bencana, 5) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 6) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 7) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

### **Prioritas 10: Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup**

**Lingkungan Hidup.** Prioritas Penanggulangan Bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga masyarakat, tersedianya tim gerak cepat, tersedianya sistem peringatan dini, dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan potensi sumberdaya yang sudah ada untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Terwujudnya kesiapan daerah untuk penanggulangan bencana, 2) Terwujudnya pemetaan daerah rawan bencana, 3) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap siaga, 4) Pengurangan resiko bencana alam, 5) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi, 6) Terwujud konservasi sumberdaya alam, 7) Penekanan laju deforestasi, 8) Pengendalian kerusakan lingkungan, 9) Penurunan pencemaran lingkungan, 10) Terpeliharanya kearifan lokal terhadap lingkungan.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Sumatera Barat dengan Prioritas Nasional dilihat pada Tabel 7.25

**Tabel 7.25**  
**Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Sumatera Barat**

| <b>PRIORITAS NASIONAL</b>  | <b>PRIORITAS PROVINSI</b>  |
|--|--|
| 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.<br>2. Pendidikan<br>3. Kesehatan<br>4. Penanggulangan Kemiskinan<br>5. Ketahanan Pangan<br>6. Infrastruktur<br>7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha<br>8. Energi<br>9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana<br>10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik<br>11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi | 1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat (1,11)*<br>2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan (1)<br>3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (2)<br>4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (3)<br>5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan (5, 7)<br>6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi (7,11)<br>7. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya (11)<br>8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal (4, 10)<br>9. Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat (6, 8, 10)<br>10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (9) |

*\*) Nomor di belakang prioritas menunjukkan nomor prioritas nasional yang terkait*

#### **7.4.3 Program Per Prioritas Pembangunan**

Visi dan misi Pemerintah Daerah 2010-2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional kedalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

**Tabel 7.26**  
**Hubungan Misi, Agenda, Prioritas dan Program**

| MISI   | AGENDA  | PRIORITAS  | PROGRAM   |
|--|---|--|---|
| 1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" | 1. Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah | 1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat | 1. Program Gerakan Terpadu Pengamalan Agama, ABS-SBK<br>2. Program Pengembangan Nilai Budaya<br>3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat<br>4. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama<br>5. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama<br>6. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan<br>7. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan<br>8. Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)<br>9. Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat<br>10. Program Pengembangan Pendidikan Budaya<br>11. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya  |
| 2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional  | 2. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan Daerah             | 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan      | 1. Program Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi<br>2. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik<br>3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>4. Program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah<br>5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah<br>6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan<br>7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan<br>8. Program Pendidikan Politik Masyarakat<br>9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban Umum<br>10. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah<br>11. Program Pendidikan Kedinasan<br>12. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM<br>13. Pengembangan manajemen pelayanan publik<br>14. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur<br>15. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (good governance)<br>16. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur |

| MISI  | AGENDA  | PRIORITAS   | PROGRAM  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | 17. Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah<br>18. Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan<br>19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur<br>20. Program Kerjasama Pembangunan<br>21. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah<br>22. Program Sarana Informasi Hukum<br>23. Program Peningkatan Penataan Perundang- undangan<br>24. Program Pembangunan Materi Hukum<br>25. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat<br>26. Program Peningkatan Budaya Hukum<br>27. Program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum<br>28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah<br>29. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari<br>30. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan<br>31. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari<br>32. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari<br>33. Program perbaikan Sistem Administrasi Karsipan<br>34. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip daerah<br>35. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan<br>36. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika<br>37. Program Pengembangan Data dan Informasi<br>38. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan |
| 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi | 3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK | 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan | 1. Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM<br>2. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini<br>3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar<br>4. Program Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah<br>5. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal<br>6. Program Pendidikan Luar Biasa<br>7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya<br>8. Program Pendidikan Berkarakter<br>9. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan  |

| MISI | AGENDA | PRIORITAS                                   | PROGRAM  |
|------|--------|---|--|
|      |        |   | 10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga<br>11. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga<br>12. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan<br>13. Program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga<br>14. Program peningkatan penyadaran kepemudaan<br>15. Program pengembangan kepemimpinan pemuda<br>16. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan   |
|      |        | 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM<br>2. Program Penyediaan obat dan pembekalan kesehatan<br>3. Program upaya kesehatan masyarakat<br>4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat<br>5. Program Perbaikan gizi masyarakat<br>6. Program pengembangan lingkungan sehat<br>7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular)<br>8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rs. paru / rs.mata<br>9. Program sumber daya kesehatan<br>10. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan<br>11. Program penelitian dan pengembangan kesehatan<br>12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin<br>13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br>14. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs. paru/rs.mata<br>15. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD<br>16. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan<br>17. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan<br>18. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak<br>19. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan<br>20. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak<br>21. Program Kesehatan reproduksi remaja<br>22. Program pelayanan alat kontrasepsi<br>23. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat<br>24. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita<br>25. Program keluarga berencana |

| MISI   | AGENDA   | PRIORITAS  | PROGRAM   |
|--|--|--|---|
| 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global | 4. Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat  | 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani</li> <li>2. Program Pensejahteraan Ekonomi Nelayan</li> <li>3. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Perikanan</li> <li>4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian dan Perikanan</li> <li>5. Program Pengembangan Teknologi informasi pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna</li> <li>6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan</li> <li>7. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM Petani</li> <li>8. Program Peningkatan Produksi dan mutu Pertanian secara berkelanjutan</li> <li>9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan</li> <li>10. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, produk Hasil Pertanian dan Perikanan</li> <li>11. Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan</li> <li>12. Program Diversifikasi Pangan</li> <li>13. Program Pengamanan Sumberdaya Hewani</li> <li>14. Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi</li> <li>15. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>16. Program Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap</li> <li>17. Program Pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan</li> </ol> |
|  | 6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>3. Program Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK</li> <li>4. Program Peningkatan Dukungan dan akses pemodaluan UMKMK</li> <li>5. Program Pengembangan Kemitraan UMKMK</li> <li>6. Program Peningkatan Peranan Koperasi dalam sektor riil</li> <li>7. Program peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank dalam pembiayaan UMKMK</li> <li>8. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal</li> <li>9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>10. Program Penyiapan Potensi Sumber daya daerah</li> <li>11. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar</li> </ol>   |

| MISI | AGENDA | PRIORITAS  | PROGRAM   |
|------|--------|--|---|
|      |        |  | 12. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan<br>13. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah<br>14. Program pengembangan sentra-sentra industri Potensial<br>15. Program Peningkatan Iklim Usaha Industri<br>16. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan berbasis Agro dan Manufaktur<br>17. Program Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah<br>18. Program Pengembangan SDM Industri kecil dan Menengah dan Aparat pembina<br>19. Program Pengembangan Teknologi Tepatguna<br>20. Program Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan aparatur perdagangan<br>21. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri<br>22. Program Pengembangan Klaster Industri Unggulan   |
|      |        | 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya<br><br>8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal | 1. Program Pengembangan Pemasaran Wisata<br>2. Program Pengembangan Kawasan Wisata Alam<br>3. Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya<br>4. Program Pengembangan SDM Pariwisata<br>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau<br>6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br>7. Program Pengembangan Pendidikan Budaya<br>8. Program Pemberdayaan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya<br><br>1. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin<br>2. Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan<br>3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari<br>4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha<br>5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial<br>6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya<br>7. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial<br>8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial<br>9. Program Pembinaan Anak Terlantar<br>10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma |

| MISI | AGENDA | PRIORITAS  | PROGRAM  |
|------|--------|--|--|
|      |        | <p>9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo</li> <li>12. Program Produktifitas Tenaga Kerja</li> <li>13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan diversifikasi usaha</li> <li>14. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> <li>15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium</li> <li>16. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja</li> <li>17. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership - PPP)</li> <li>2. Program Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus</li> <li>3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya</li> <li>5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</li> <li>6. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</li> <li>7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat</li> <li>8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>9. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman</li> <li>10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</li> <li>11. Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>13. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan , Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan</li> <li>14. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut</li> <li>15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara</li> <li>16. Pengembangan Angkutan Kereta Api</li> <li>17. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalsitrikan</li> <li>18. Program Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya mineral dan batubara</li> <li>19. Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan prasarana Energi dan Kelistrikan</li> </ul> |

| MISI   | AGENDA                                 | PRIORITAS   | PROGRAM  |
|--|--|---|--|
| 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup | 10. Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana</li> <li>2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</li> <li>3. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam</li> <li>4. Program Penanganan Tanggap Darurat</li> <li>5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>7. Program Tata lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan</li> <li>8. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim</li> <li>9. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</li> <li>10. Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>12. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</li> <li>13. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan</li> <li>14. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan</li> </ol> |



## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 5 agenda dan 10 prioritas pembangunan, program-program tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan SKPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SKPD langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 23 urusan wajib dan dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program

diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama SKPD dan kemudian disepakati dengan DPRD Provinsi. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada SKPD dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta SKPD penanggungjawab. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.

**TABEL 8.1**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                     | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |      |           |      |      |           |      |   |           |            |            |           | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |           |                                 |
|--|---|------------|-----------------|----------------|---|------|-----------|------|------|-----------|------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
|  |   |            | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |      |           | 2012 |      |           | 2013 |   |           | 2014       |            |           | TARGET     | 2015                  |           |                                 |
|  |   |            |                 |                | T   | R    | RP. (Jt)  | T    | R    | RP. (Jt)  | T    | R | RP. (Jt)  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |           |                                 |
| URUSAN WAJIB   |   |            |                 |                |   |      | 1,285,909 |      |      | 1,903,228 |      |   | 1,232,617 |            |            | 2,004,165 |            |                       | 2,313,561 |                                 |
| PENDIDIKAN   |   |            |                 |                |   |      | 71,775    |      |      | 76,209    |      |   | 83,440    |            |            | 90,499    |            |                       | 91,678    |                                 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                    |   |            |                 |                |   |      | 71,025    |      |      | 75,384    |      |   | 82,532    |            |            | 86,531    |            |                       | 88,170    |                                 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur            | -          | -               | -              | -   | -    | 1,231     | -    | -    | 1,547     | -    | - | 3,533     | -          | -          | 3,138     | -          | -                     | 3,452     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                  | -          | -               | -              | -   | -    | 466       | -    | -    | 266       | -    | - | 242       | -          | -          | 175       | -          | -                     | 192       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                             | -          | -               | -              | -   | -    | 60        | -    | -    | 67        | -    | - | 91        | -          | -          | 483       | -          | -                     | 532       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD | -          | -               | -              | -   | -    | 444       | -    | -    | 910       | -    | - | 1,279     | -          | -          | 927       | -          | -                     | 1,019     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini                    | Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD                          | Jumlah APE | 182             | 124            |   |      | 430       | 136  |      | 473       | 150  |   | 520       | 165        |            | 572       | 182        |                       | 630       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Workshop penyusunan materi PAUD                                 | Kali/Judul | -               | 7              | 5   | 5    | 256       | 6    | 4    | 282       | 6    |   | 310       | 7          |            | 341       | 7          |                       | 375       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Sosialisasi Materi PAUD   | Orang      | -               | 937            | 160   | 120  | 1,083     | 176  | 300  | 1,191     | 194  |   | 1,310     | 213        |            | 1,441     | 234        |                       | 1,586     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Akses Pendidikan Dasar                                 | Meningkatnya wajib belajar anak usia sekolah                    | %          | -               | 100            | 60  |      | 857       | 70   |      | 943       | 80   |   | 1,037     | 90         |            | 1,141     | 100        |                       | 1,256     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Pembinaan Sekolah Sehat   | %          | -               | 100            | 80  | 80   | 967       | 85   | 85   | 1,064     | 90   |   | 1,171     | 95         |            | 1,288     | 100        |                       | 1,416     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah     | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah                | Sekolah    | -               | 48             | 28  |      | 2,351     | 33   |      | 2,586     | 38   |   | 2,845     | 43         |            | 3,129     | 48         |                       | 3,442     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional                           | Jumlah SBI | -               | -              | 5   |      | 19,434    | 6    |      | 21,377    | 7    |   | 23,515    | 8          |            | 25,867    | 9          |                       | 28,453    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal &Informal              | Percentase buta aksara > 15 th                                  | %          | 3.2             | 2              | 3.1   | 3.03 | 2,845     | 3    | 1.66 | 3,442     | 80   |   | 3,442     | 90         | 2.5        | 3,787     | 100        | 2                     |           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Lembaga dan program PUDNI terakreditasi                         | %          | 0.03            | 3.5            |   |      |           |      |      |           |      |   |           |            |            | 2.5       |            |                       | 3.5       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |          |      |       |           |      |      |          |            |            |          | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |                                 |
|--|--|----------|-----------------|---------------|---|-----|----------|------|-------|-----------|------|------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------|
|  |  |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |     |          | 2012 |       |           | 2013 |      |          | 2014       |            |          | TARGET   | 2015                  |            |                                 |
|  |  |          |                 |               | T   | R   | RP. (Jt) | T    | R     | RP. (Jt)  | T    | R    | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN |                                 |
| Program Pendidikan Luar Biasa                                | Sarana Prasarana PLB   | %        | -               | 100           | 70  | 70  | 995      | 75   | 80    | 1,095     | 80   |      | 1,204    | 90         |            | 1,324    | 100      |                       | 1,457      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Persentase Peserta Didik Terlayani                                   | %        | -               | 100           | 80  | 80  | 1,030    | 85   | 93,25 | 1,133     | 90   |      | 1,246    | 95         |            | 1,371    | 100      |                       | 1,508      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya      | Dokumen Data Pokok Pendidikan  | dokumen  | -               | 1             | 1   | 1   | 400      | 1    | 1     | 440       | 1    |      | 484      | 1          |            | 532      | 1        |                       | 586        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Persentase pemantauan dan pengendalian program dan proses pendidikan | %        | -               | 100           | 80  | 80  | 6,500    | 85   | 90    | 7,150     | 90   |      | 7,865    | 100        |            | 8,652    | 100      |                       | 9,517      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pendidikan Berkarakter                                       | SDM berkualitas yang berkarakter                                     | Kab/Kota | -               | 19            | 19  | 19  | 28,500   | 19   | 19    | 28,500    | 19   |      | 28,500   | 19         |            | 28,500   | 19       |                       | 28,500     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | SD Piloting  | Jumlah   | N/A             | 38            |   |     |          |      |       |           |      |      |          |            |            | 19       |          |                       | 38         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | SMP Piloting   | Jumlah   | N/A             | 38            |   |     |          |      |       |           |      |      |          |            |            | 19       |          |                       | 38         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Sosialisasi dan workshop pendidikan berkarakter                      | Kab/Kota | N/A             | 19            |   |     |          |      |       |           |      |      |          |            |            | 19       |          |                       | 19         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  | Sekolah Sehat  | %        | 35              | 60            |   |     |          |      |       |           |      |      |          |            |            | 55       |          |                       | 60         |                                 |
|  | Buku Pembelajaran bernuansa surau                                    | %        | N/A             | 100           |   |     |          |      |       |           |      |      |          |            |            | 95       |          |                       | 100        |                                 |
| Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan             | Sinkronisasi Program   | %        | -               | 100           | 80  | 80  | 460      | 90   | -     | 506       | 100  |      | 557      | 100        |            | 612      | 100      |                       | 673        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>BIRO BINA SOSIAL</b>                                      |  |          |                 |               |   |     | 750      |      |       | 825       |      |      | 908      |            |            | 998      |          |                       | 1,098      |                                 |
| Pendidikan Berkarakter                                       | Meningkatnya kompetensi pendidikan bernuansa surau                   | %        | N/A             | 100           | 80  | 80  | 750      | 85   | 85    | 825       | 90   |      | 908      | 95         |            | 998      | 100      |                       | 1,098      | Biro Binsos                     |
| <b>DINAS PERTANIAN</b>                                       |  |          |                 |               |   |     | -        |      |       | -         |      |      | -        |            |            | 2,970    |          |                       | 2,410      |                                 |
| Peningkatan dan pengembangan SDM Pertanian                   | Meningkatnya dan berkembangnya SDM Pertanian                         | Orang    | -               | 210           | -   | -   | -        | -    | -     | -         | -    | -    | -        | -          |            | 210      | 480      | -                     | 210        | 570 Dinas Pertanian             |
|  | Meningkatnya dan berkembangnya SDM Pertanian                         | Orang    | -               | 75,300        | -   | -   | -        | -    | -     | -         | -    | -    | -        | -          |            | 75300    | 590      | -                     | 75300      | 590 Dinas Pertanian             |
|  | Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan pertanian     | Unit     | -               | 2             | -   | -   | -        | -    | -     | -         | -    | -    | -        | -          |            | 2        | 1,900    | -                     | 2          | 1,250 Dinas Pertanian           |
| <b>KESEHATAN</b>   |  |          |                 |               |   |     | 701,486  |      |       | 1,023,215 |      |      | 225,647  |            |            | 586,830  |          |                       | 757,201    |                                 |
| <b>DINAS KESEHATAN</b>                                       |  |          |                 |               |   |     | 28,002   |      |       | 31,131    |      |      | 34,366   |            |            | 124,891  |          |                       | 50,915     |                                 |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran                 |          |                 |               | 20%   | 20% | 3,058    | 40%  | 40%   | 3,458     | 60%  | 60%  | 3,958    | 80%        | 80%        | 5,442    | 100%     | 100%                  | 5,986      | Dinas Kesehatan                 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparat                   |          |                 |               | 20%   | 20% | 1,503    | 140% | 140%  | 1,981     | 160% | 160% | 2,146    | 80%        | 80%        | 3,213    | 100%     | 100%                  | 3,534      | Dinas Kesehatan                 |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN         | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |          |      |       |          |      |        |          |            |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                       |                 |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---|-------|----------|------|-------|----------|------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|  |   |                |                 |               | 2011  |       |          | 2012 |       |          | 2013 |        |          | 2014       |            |            | RP. (Jt)   | 2015 TARGET           |                       |                 |
|  |   |                | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R     | RP. (Jt) | T    | R     | RP. (Jt) | T    | R      | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       |                       |                 |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Meningkatnya Disiplin Aparatur  |                |                 |               | 20%   | 20%   |          | 179  | 240%  | 240%     | 174  | 260%   | 260%     | 174        | 80%        | 80%        | 188        | 100% 100%             | 207 Dinas Kesehatan   |                 |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur   |                |                 |               | 20%   | 20%   |          | 33   | 340%  | 340%     | 68   | 360%   | 360%     | 68         | 80%        | 80%        | 76         | 100% 100%             | 84 Dinas Kesehatan    |                 |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD   |                |                 |               | 20%   | 20%   |          | 459  | 440%  | 440%     | 605  | 460%   | 460%     | 688        | 80%        | 80%        | 694        | 100% 100%             | 763 Dinas Kesehatan   |                 |
| Obat dan Pembekalan Kesehatan                                      | Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan  | %              | 85              | 100           | 85  | 85    | 5,236    | 90   | 100   | 5,584    | 95   | 90     | 6,142    | 100        | 80         | 5,171      | 100 100    | 5,444 Dinas Kesehatan |                       |                 |
| Upaya Kesehatan Masyarakat   | Percentase pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat  | %              | 80              | 100           | 70  | 85    |          | 80   | 100   |          | 90   | 100    |          | 100        | -          | -          | 100        | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |
|  | Alokasi biaya Tindak siaga  | %              | 100             | 100           | 100   | 100   | 1,464    | 100  | 100   | 2,196    | 100  | 100    | 2,418    | 100        | -          | -          | 100        | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |
|  | Informasi KIA   | %              | 80              | 100           | 70  | 70    |          | 80   | 95.13 |          | 90   | 100    |          | 100        | -          | -          | 100        | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |
|  | Sinkronisasi Program Kesehatan masyarakat   | %              | 100             | 100           | 70  | 70    |          | 80   | 100   |          | 90   | -      |          | 95         | -          | -          | 100        | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |
|  | Menurunnya AKI dan AKB  | %              | -               | -             | -   | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -      | -        | -          | 80         | 7,482      | -          | 100                   | 8,399                 |                 |
|  | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat   | %              | 63.7            | 80            | 72  | 69.38 | 1,469    | 74   | 100   | 2,029    | 76   | 80.2   | 2,232    | 78         | 80         | 2,009      | 80         | 100                   | 1,582                 | Dinas Kesehatan |
| Perbaikan Gizi Masyarakat  | Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang | %              | 8,20            | 6,80          | 8,20  | 8,20  | 2,250    | 7,80 | 6,50  | 2,475    | 7,40 | 6.5    | 2,723    | 7,00       | 80         | 3,264      | 6,80       | 100                   | 1,005 Dinas Kesehatan |                 |
| Pengembangan Lingkungan Sehat                                      | Meningkatnya pemahaman pelaksanaan program penyehatan lingkungan  | Kali pertemuan | 12              | 15            | 7   | 14    | 394      | 9    | 9     | 433      | 11   | 11     | 477      | 13         | -          | -          | 15         | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |
|  | Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat   | %              | -               | -             | -   | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -      | -        | -          | 80         | 1,142      | -          | 100                   | 416                   |                 |
| Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)     | Penemuan kasus baru Tuberclosis   | %              | 77.81           | 90            | 55  | 58.38 | 34       | 60   | 58.95 | 37       | 70   | 139.05 | 41       | 80         | -          | -          | 90         | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |
|  | Meningkatnya Succes Rate TB   | %              | 85              | 92            | 88  | 88    | 232      | 89   | 100   | 255      | 90   | 89.76  | 281      | 91         | -          | -          | 92         | -                     | Dinas Kesehatan       |                 |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN            | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |      |          |       |       |          |       |       |          |            |            |        | SKPD PENANGGUNG JAWAB | RP. (Jt)   |                       |                        |
|---|--|--|-----------------|---------------|---|------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
|   |  |  | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |      |          | 2012  |       |          | 2013  |       |          | 2014       |            |        | TARGET                | 2015       |                       |                        |
|   |  |  |                 |               | T   | R    | RP. (Jt) | T     | R     | RP. (Jt) | T     | R     | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | TARGET | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN |                       |                        |
| Kesehatan   | Cakupan ODHA yang diobati  | %  | 100             | 90            | 90  | 100  | 57       | 90    | 100   | 63       | 90    | 100   | 69       | 90         | -          | -      | 90                    | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)   | Per 100 penduduk   | 0.24            | 1             | 2   | 0,30 | 84       | 2     | 0.24  | 92       | 1     | 0.25  | 102      | 1          | -          | -      | 1                     | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat dan setelah haji   | %  | 100             | 100           | 100   | 100  | 111      | 100   | 100   | 122      | 100   | 100   | 134      | 100        | -          | -      | 100                   | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, monitroing dan peningkatan SDM kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota | %  | -               | -             | -   | -    | -        | -     | -     | -        | -     | -     | -        | -          | 80         | 308    | -                     | 100        | 339 Dinas Kesehatan   |                        |
|   | Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru  | Terpenuhinya sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD | %               | 100           | 100   | 100  | 100      | 2,289 | 100   | 100      | 1,413 | 100   | 100      | 1,554      | 100        | 80     | 12,306                | 100        | 100                   | 19,002 Dinas Kesehatan |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa, RS Paru, RS MAta | Meningkatnya sarana dan prasarana di dinas kesehatan/UPTD/RS melalui pemeliharaan sarana dan prasarana   | %  | 100             | 100           | 85  | 90   | 253      | 90    | 100   | 358      | 95    | 95    | 394      | 100        | 80         | 308    | 100                   | 100        | 339 Dinas Kesehatan   |                        |
| Sumber Daya Kesehatan   | Tugas belajar dokter spesialis   | Orang  | 12              | 6             | 2   | 12   | 450      | 3     | 9     | 495      | 4     | 2     | 545      | 6          | -          | -      | 6                     | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan  | Kali pelatihan   | 21              | 20            | 12  | 50   | 1,488    | 14    | 2     | 1,637    | 16    | 41    | 1,800    | 20         | -          | -      | 20                    | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Pertemuan peningkatan pelayanan kesehatan  | Kali   | 20              | 20            | 21  | 21   | 766      | 13    | 22    | 843      | 15    | 15    | 927      | 18         | -          | -      | 20                    | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di Kab/Kota dan RS serta Provinsi                     | %  | -               | 100           | -   | -    | -        | -     | -     | -        | -     | -     | -        | -          | 80         | 3,171  | -                     | 100        | 2,473 Dinas Kesehatan |                        |
| Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan                           | Sinkronisasi Program Kesehatan Masyarakat  | %  | 100             | 100           | 80  | 80   | 967      | 90    | 100   | 1,064    | 100   | 100   | 1,170    | 100        | -          | -      | 100                   | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan  | % Penduduk   | 50              | 100           | 63.8  | 61.6 | 4,177    | 78.6  | 72.64 | 4,595    | 91.3  | 73.35 | 5,054    | 100        | -          | -      | 100                   | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Persentase ketersediaan data kesehatan secara akurat dan tepat   | %  | 60              | 100           | 80  | 80   | 243      | 85    | 68    | 267      | 90    | 90    | 294      | 95         | -          | -      | 100                   | -          | Dinas Kesehatan       |                        |
|   | Persentase kesiap siagaan bencana  | %  | 100             | 100           | 80  | 100  | 372      | 90    | 97.6  | 409      | 95    | 95    | 450      | 100        | -          | -      | 100                   | -          | Dinas Kesehatan       |                        |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                             | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN             | CAPAIAN KINERJA |     | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                |          |          |                |       |          |               |        |          |                |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                       |  |  |
|--|--|--------------------|-----------------|-----|---|----------------|----------|----------|----------------|-------|----------|---------------|--------|----------|----------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|  |  |                    | KONDISI AWAL    |     | KONDISI AKHIR                                 |                | 2011     |          |                | 2012  |          |               | 2013   |          |                | 2014       |            |                       |                       |  |  |
|  |  |                    | T               | R   | RP. (Jt)                                      | T              | R        | RP. (Jt) | T              | R     | RP. (Jt) | T             | R      | RP. (Jt) | TARGET         | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       |                       |  |  |
|  | Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota   | %                  | -               | -   | -   | -              | -        | -        | -              | -     | -        | -             | -      | -        | 80             | 79,682     | -          | 100                   | 863 Dinas Kesehatan   |  |  |
| Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  | Jumlah Penelitian  | Dokumen penelitian | 1               | 5   | 1   | 1              | 434      | 2        | 2              | 478   | 3        | 0             | 525    | 5        | -              | -          | 5          | -                     | - Dinas Kesehatan     |  |  |
|  | Meningkatnya SDM dibidang penelitian dan pengembangan, pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam memberikan masukan untuk perumusan kebijakan program dan penanggulangan kesehatan | %                  | -               | -   | -   | -              | -        | -        | -              | -     | -        | -             | -      | -        | 100            | 435        | -          | 100                   | 479                   |  |  |
| <b>RSUD PARIAMAN</b>   |  |                    |                 |     |   | <b>576,043</b> |          |          | <b>701,640</b> |       |          | <b>50,054</b> |        |          | <b>163,253</b> |            |            | <b>418,459</b>        |                       |  |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran   | bulan              | -               | -   | -   | 1,718          | 12 bulan | -        | 2,225          | -     | -        | -             | -      | -        | -              | -          | -          | -                     | RSUD Pariaman         |  |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparat   | %                  | 100%            | -   | -   | 775            | 100%     | 100%     | 544            | -     | -        | -             | -      | -        | -              | -          | -          | -                     | RSUD Pariaman         |  |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | %                  | 100%            | -   | -   | 139            | 100%     | 100%     | 144            | -     | -        | -             | -      | -        | -              | -          | -          | -                     | RSUD Pariaman         |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur  | %                  | 100%            | -   | -   | 125            | 100%     | 100%     | 130            | -     | -        | -             | -      | -        | -              | -          | -          | -                     | RSUD Pariaman         |  |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                       | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD  | %                  | 100%            | -   | -   | 75             | 100%     | 100%     | 208            | -     | -        | -             | -      | -        | -              | -          | -          | -                     | RSUD Pariaman         |  |  |
| Obat dan Perbekalan Kesehatan  | Terjalminya ketersediaan obat/bahan habis pakai dan reagen untuk pemeriksaan labor   | %                  | 86              | 100 | 100   | 100            | 1,437    | 100      | 100            | 1,557 | 100      | 100           | 1,315  | 100      | 100            | 4,826      | 100        | 100                   | 4,488 RSUD Pariaman   |  |  |
| Upaya kesehatan masyarakat   | Lancarnya pelayanan siaga dan tindak medik kepada masyarakat/pasien  | %                  | 100             | 100 | 80  | 80             | 3,599    | 90       | 85             | 6,332 | 100      | 100           | 1,204  | 100      | 100            | 779        | 100        | 100                   | 857 RSUD Pariaman     |  |  |
| Promosi kesehatan masyarakat   | Meningkatnya informasi pelayanan dan kesehatan kepada masyarakat RS  | %                  | 100             | 100 | 20  | 100            | 96,000   | 40       | 100            | 45    | 100.00   | -             | 36.00  | 100.00   | -              | 41.40      | 100.00     | -                     | 47.60 RSUD Pariaman   |  |  |
| Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS Paru/RS Mata | Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan RS   | %                  | 0               | 100 | 20  | 20             | 3,994    | 40       | 40             | 5,800 | 60       | 60            | 18,217 | 80       | 80             | 10,968     | 100        | 100                   | 9,500 RSUD Pariaman   |  |  |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS Paru/RS Mata           | Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana RS sesuai standar dan berfungsi baik   | %                  | 0               | 100 | 20  | 60             | 81       | 40       | 40             | 1,555 | 60       | 60            | 457    | 60       | 60             | 100,000    | 100        | 100                   | 350,000 RSUD Pariaman |  |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                            | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN    | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |               |          |       |                |      |      |               |            |            |                | SKPD PENANGGUNG JAWAB | RP. (Jt)   |                |                     |               |
|---|--|-----------|-----------------|---------------|---|-------|---------------|----------|-------|----------------|------|------|---------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|
|   |  |           | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |               | 2012     |       |                | 2013 |      |               | 2014       |            |                | TARGET                | 2015       |                |                     |               |
|   |  |           |                 |               | T   | R     | RP. (Jt)      | T        | R     | RP. (Jt)       | T    | R    | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)       | TARGET                | SBLM PRBHN | STLH PRBHN     |                     |               |
| Pelayanan kesehatan penduduk miskin   | Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin                               | %         | 0               | 100           | 20  | 20    | 468,100       | 40       | 40    | 683,100        | 60   | 60   | 825           | 60         | 80         | 1,423          | 100                   | 100        | 1,566          | RSUD Pariaman       |               |
| Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD   | Terjaminnya ketersediaan biaya operasional pelayanan RS                              | %         | 0               | 100           |   |       |               |          |       |                |      |      | 100           | 8,000      | 100        | 100            | 25,216                | 100        | 100            | 27,000              | RSUD Pariaman |
|   | BOR  | %         | 0               | 70            | 70  | 65    | -             | 75       | 74.05 | -              | 75   | 78.4 | 20,000        | 78         | 78         | 20,000         | 80                    | 80         | 25,000         | RSUD Pariaman       |               |
| <b>RSUD ACHMAD MUCHTAR</b>  |  |           |                 |               |   |       | <b>54,827</b> |          |       | <b>237,176</b> |      |      | <b>85,377</b> |            |            | <b>188,263</b> |                       |            | <b>190,734</b> |                     |               |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Lancarnya pelayanan administrasi kantor  |           |                 |               |   |       | 1,360         |          |       |                |      |      |               |            |            |                |                       |            |                | RSUD Achmad Muchtar |               |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Lancarnya penyelenggaraan tugas dinas aparatur                                       |           |                 |               |   |       | -             |          |       | -              |      |      | 294           |            |            | 3,213          |                       |            | 3,534          | RSUD Achmad Muchtar |               |
| Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru | Meningkatnya pelayanan unggulan RS dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap | %         | 100             | 100           | 100   | 88,96 | 6,794         | 100      | 97.83 | 187,979        | 100  |      | 17,350        | 100        | 100        | 90,500         | 100                   | 100        | 82,150         | RSUD Achmad Muchtar |               |
| Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin   | Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin                            | Kab/ Kota | 18              | 18            | 11  | 18    | 500           | 12       | 18    | 1,024          | 15   |      | 1,383         | 17         | 18         | 1,700          | 19                    | 18         | 2,000          | RSUD Achmad Muchtar |               |
| Standarisasi pelayanan kesehatan  | Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan                 |           |                 |               |   |       | 500           |          |       | 500            |      |      | 1,350         |            |            | 1,700          |                       |            | 2,000          | RSUD Achmad Muchtar |               |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata                            | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana RS setelah dilakukan pemeliharaan         |           |                 |               |   |       |               |          |       |                |      |      |               |            |            | 1,150          |                       |            | 1,050          | RSUD Achmad Muchtar |               |
| Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD   | Meningkatnya kemandirian RS dengan pelayanan BLUD yang berkualitas                   | %         |                 | 75            | 71  | 59.2  | 45,673        | 73       | 63.85 | 47,673         |      |      | 65,000        |            | 70         | 90,000         |                       | 75         | 100,000        | RSUD Achmad Muchtar |               |
| <b>RSUD SOLOK</b>   |  |           |                 |               |   |       | <b>25,067</b> |          |       | <b>34,067</b>  |      |      | <b>32,125</b> |            |            | <b>89,057</b>  |                       |            | <b>63,676</b>  |                     |               |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran                                 |           |                 |               |   |       | 1,647         | 12 bulan |       | 2,511          | 100% |      | 2,737         | 12 bulan   |            | 3,716          | 12 bulan              |            | 4,377          | RSUD Solok          |               |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                                 |           |                 |               |   |       | 595           |          |       | 881            |      |      | 1,316         |            |            | 782            |                       |            | 1,401          | RSUD Solok          |               |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Meningkatnya Disiplin Aparatur   |           |                 |               |   |       | 164           |          |       | 192            |      |      | 177           |            |            | 188            |                       |            | 195            | RSUD Solok          |               |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                              | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |               |      |       |               |      |    |               |        |             |               | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |               |            |
|---|--|----------|-----------------|---------------|---|-------|---------------|------|-------|---------------|------|----|---------------|--------|-------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|------------|
|   |  |          |                 |               | 2011  |       |               | 2012 |       |               | 2013 |    |               | 2014   |             |               | RP. (Jt) | 2015                  |               |            |
|   |  |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R     | RP. (Jt)      | T    | R     | RP. (Jt)      | T    | R  | RP. (Jt)      | TARGET | SBLM PRBH N | STLH PRBH N   | TARGET   | SBLM PRBH N           | STLH PRBH N   |            |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur   | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur  |          |                 |               |   |       | 150           |      |       | 250           |      |    | 116           |        |             |               | 116      |                       | 116           | RSUD Solok |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                        | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD                    |          |                 |               |   |       | 200           |      |       | 300           |      |    | 236           |        |             |               | 211      |                       | 232           | RSUD Solok |
| Standarisasi pelayanan kesehatan  | Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan                                     | Kegiatan | 0               | 1             | -   | -     | -             | -    | -     | -             | -    | -  | -             | 1      | 250         | -             | -        | -                     | RSUD Solok    |            |
| Pengadaan, Peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru | Meningkatnya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan                 | %        | 0               | 100           | 20  | 20    | 15,775        | 40   | 40    | 22,778        | 60   | 60 | 20,851        | 80     | -           | -             | 100      | -                     | RSUD Solok    |            |
| Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin   | Meningkatnya persentase masyarakat miskin menerima pelayanan kesehatan RS          | %        | 0               | 100           | -   | -     | -             | -    | -     | -             | -    | -  | -             | 80     | 76,301.00   | -             | 100      | 48,866                | RSUD Solok    |            |
|   | Meningkatnya persentase masyarakat miskin menerima pelayanan kesehatan RS          | %        | 0               | 95            | -   | -     | -             | -    | -     | -             | -    | -  | -             | 88     | 1,667.00    | -             | 95       | 3,501                 | RSUD Solok    |            |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru/RS Mata                     | Sarana dan prasarana yang terpelihara  | %        | 0               | 100           | 20  | 20    | 150           | 40   | 40    | 430           | 60   | 60 | 150           | 80     | 80          | 1,000         | 100      | 100                   | 500           | RSUD Solok |
| Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD   | BOR  | %        | 83.1            | 80            | 71  | 80.29 |               | 73   | 87.47 |               |      |    |               |        | 78          |               |          | 80                    |               | RSUD Solok |
| Obat dan Pembekalan Kesehatan   | Persentase ketersediaan obat essensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar | %        | 85              | 100           | 85  | 85    | 5,586         | 90   | 100   | 5,412         | 95   |    | 5,133         | 100    | 100         | 4,826         | 100      | 100                   | 4,488         | RSUD Solok |
| <b>RSJ HB SAANIN</b>  |  |          |                 |               |   |       | <b>17,547</b> |      |       | <b>19,201</b> |      |    | <b>23,725</b> |        |             | <b>21,366</b> |          |                       | <b>33,417</b> |            |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | %        | -               | -             | 100   | -     | 1,862         | -    | -     | -             | 100  | -  | 100           | -      | -           | -             | -        | -                     | RSJ HB SAANIN |            |
| Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur   | Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatuer                   | %        | 40              | 100           | 45  | -     | 1,625         | 50   | -     | 1,081         | -    | -  | -             | -      | -           | 100           | 100      | 550                   | RSJ HB SAANIN |            |
| Peningkatan disiplin Aparatur   | Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatuer  | %        | -               | 100           | 100   |       | 137           | -    | -     | -             | -    | -  | -             | -      | -           | -             | -        | -                     | RSJ HB SAANIN |            |
| Peningkatan kapasitas Sumbra daya Aparatur  | Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur                                      | %        | -               | 100           | -   | -     | 75            | 100  | 100   | -             | -    | -  | -             | -      | -           | -             | -        | -                     | RSJ HB SAANIN |            |
| Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan                        | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD                    | %        |                 |               |   |       | 242           |      |       |               |      |    |               |        |             |               |          |                       | RSJ HB SAANIN |            |
| Obat dan perbekalan kesehatan   | Tersedianya obat generik dan perbekalan kesehatan di RS                            | %        | 86              | 100           | 90  | 90    | 1,437         | 90   | 95    | 1,557         | 95   | 95 | 1,315         | -      | -           | -             | -        | -                     | RSJ HB SAANIN |            |
| Upaya Kesehatan Masyarakat  | Pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat                                      | %        | 76              | 100           | 80  | 78    |               | 90   | 85    | 752           |      |    |               |        | 100         |               | 100      |                       | RSJ HB SAANIN |            |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |           |                |            |           |                |            |           |                |            |            |                | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |                                |
|--|--|--------|-----------------|---------------|---|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
|  |  |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |           |                | 2012       |           |                | 2013       |           |                | 2014       |            |                | RP. (Jt)              | 2015       |                                |
|  |  |        |                 |               | T   | R         | RP. (Jt)       | T          | R         | RP. (Jt)       | T          | R         | RP. (Jt)       | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)       | TARGET                | SBLM PRBHN | STLH PRBHN                     |
| Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Ruamah Sakit Jiwa/RSP Paru/RS Mata | Terlaksananya peningkatan sarana rumah sakit   | %      | 20              | 100           | 20  | 20        | 4,645          | 40         | 40        | 7,385          | 60         | 60        | 11,810         | -          | 80         | 3796           | -                     | 100        | 11207 RSJ HB SAANIN            |
| Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat  | Terwujudnya pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat   | %      | 46              | 78            | 74  | 60        | 500.00         | 0          | 0         | 370            | 60         | 0         | 440            | 70         | 65         | 510            | 80                    | 80         | 600 RSJ HB SAANIN              |
| Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin  | Terlaksananya pelayanan penduduk miskin  | %      | 0               | 100           | 20  |           | 23.8           | 40         |           | 55.9           | 60         |           | 60             | 80         | 80         | 1,060          | 100                   | 100        | 1,060 RSJ HB SAANIN            |
| Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD  | Terlaksananya Program BLUD   | %      | Belum BLUD      | 100           | BLUD Penuh                                    | 100       | 7000           | BLUD Penuh | 100       | 8000           | BLUD Penuh | 100       | 10,000         | 80         | 100        | 16,000         | 100                   | 100        | 20,000 RSJ HB SAANIN           |
|  |  | %      | 76              | 85            | 73  | 78        | -              | 75         | 80        | -              | 80         | 80.33     | -              | -          | 84         | -              | -                     | 85         | - RSJ HB SAANIN                |
| <b>PEKERJAAN UMUM</b>  |  |        |                 |               |   |           | <b>132,494</b> |            |           | <b>288,301</b> |            |           | <b>330,261</b> |            |            | <b>867,663</b> |                       |            | <b>933,996</b>                 |
| <b>DINAS PRASARANA JALAN</b>   |  |        |                 |               |   |           | <b>55,608</b>  |            |           | <b>84,481</b>  |            |           | <b>98,310</b>  |            |            | <b>735,903</b> |                       |            | <b>789,627</b>                 |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran  | %      |                 |               | 100   | 100       | 2,270          | 100        | 100       | 2,238          | 100        | 100       | 3,254          | 100        | 100        | 3,222          | 100                   | 100        | 3,545 Dinas Prasjal Tarkim     |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Meningkatnya kelancaran tugas aparatur   | %      |                 |               | 100   | 100       | 1,805          | 100        | 100       | 1,815          | 100        | 100       | 1,950          | 100        | 100        | 2,689          | 100                   | 100        | 2,958 Dinas Prasjal Tarkim     |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur  | %      |                 |               | 100   | 100       | 264            | 100        | 100       | 264            | 100        | 100       | 300            | 100        | 100        | 291            | 100                   | 100        | 320 Dinas Prasjal Tarkim       |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  | Tercapainya Peningkatan SDM Aparatur   | %      |                 |               | 100   | 100       | 69             | 100        | 100       | 69             | 100        | 100       | 700            | 100        | 100        | 549            | 100                   | 100        | 604 Dinas Prasjal Tarkim       |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                                 | Meningkatnya tertib administrasi keuangan  | %      |                 |               | 100   | 100       | 872            | 100        | 100       | 872            | 100        | 100       | 1,485          | 100        | 100        | 2,083          | 100                   | 100        | 2,292 Dinas Prasjal Tarkim     |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan   | Meningkatnya kualitas sarana jalan dan jembatan dlm rangka mengurangi biaya transportasi dan meningkat efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat |        |                 |               |   |           |                |            |           |                |            |           |                |            |            |                |                       |            |                                |
| a. Pembangunan jembatan kelok sembilan   | Meter  | -      | 432             | 145           | 145   | 50.000 *) | 500            | 250        | 98.000 *) | 500            | 100        | 98.000 *) | -              | -          | -          | -              | -                     | -          | Dinas Prasjal Tarkim           |
| b. Pembangunan dan pengembangan jalan nasional   | Km   | -      | 300             | 240.15        | 117   | 664.000*) | 294            | 160        | 765.000*) | 211            | 112        | 482.000*) | 83             | 60         | 192.000*)  | 145            | 60                    | 363.000*)  | Balai Besar Pelaksana Jalan II |
| c. Pembangunan Jalan Rao-Rokan (Bts. Riau)   | Km   | -      | 5               | 15            | 4.65  | 18,992    | 15             | 4.65       | 20,891    | 15             | 2.7        | 22,980    | 15             | 0          | 25,278     | 15             | 0                     | 27,806     | Dinas Prasjal Tarkim           |
| d. Pembangunan dan pengembangan jalan nasional pantai barat  | Km   | -      | 60              | 42            | 41  | 107.000*) | 60             | 135        | 150.000*) | 60             | 21.4       | 150.000*) | 60             | 60         | 150.000*)  | 60             | 60                    | 150.000*)  | Balai Besar Pelaksana Jalan II |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN      | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |          |       |                  |           |       |                  |           |            |            |           | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                      |                                |
|--|---|-------------|-----------------|---------------|---|-------|----------|-------|------------------|-----------|-------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
|  |   |             | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |          | 2012  |                  |           | 2013  |                  |           | 2014       |            |           | TARGET   | 2015                  |                      |                                |
|  |   |             |                 |               | T   | R     | RP. (Jt) | T     | R                | RP. (Jt)  | T     | R                | RP. (Jt)  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)  | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN           |                                |
| Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur                    | h. Terlaksananya pembangunan jalan Padang - By pass   | Km          | -               | 14            | DED   | DED   | 5.000*)  | 36    | Pembebasan Tanah | 155.000*) | 36    | Pembebasan Tanah | 155.000*) | 36         | 7          | 155.000*) | 36       | 7                     | 155.000*)            | Balai Besar Pelaksana Jalan II |
|  | i. Lanjutan pembangunan jalan Duku-Sicincin – Malalak – Bukittinggi   | Km          | -               | 20            | 60  | 3.72  | 55.000*) | 60    | 6.1              | 55.000*)  | 17    | 2.51             | 42.500*)  | 17         | 16         | 42.500*)  | 17       | 20                    | 42.500*)             | Dinas Prasjal Tarkim           |
|  | j. Pembangunan Jembatan Provinsi dan Jembatan Strategis Provinsi  | Meter       | -               | 250           | 25  | 42    | 5,000    | 100   | 227              | 20,000    | 100   | 146              | 20,000    | 100        | 50         | 20,000    | 100      | 50                    | 20,000               | Dinas Prasjal Tarkim           |
|  | Pembangunan Jalan Menuju Objek Wisata (kws. Wisata Alam Gn. Padang, Mandeh, Panorama Baru, Danau Kembar, Harau, Danau Maninjau, Kws. Surfina Maninjau, Kws. Wisata Tambang Sawahlunto, Kws. Wisata Budaya Ulakan Tapakis) | KM          | 0               | 25            | 5   | 4     | -        | 5     | 5.19             | 10.000 *) | 5     | 5                | 10.000 *) | 5          | 5          | 10.000 *) | 5        | 5                     | 10.000 *)            | Dinas Prasjal Tarkim           |
|  | Peningkatan Jalan Provinsi  | Km          | -               | 75            | 15  | 18    |          | 15    | 22               |           | 15    | 25.42            |           |            |            | 15        |          |                       | 15                   | Dinas Prasjal Tarkim           |
|  | Pembangunan Jalan Baru (Jalan strategis provinsi)   | Km          | -               | 40            | 8   | 15    |          | 8     | 21               |           | 8     | 34.59            |           |            |            | 8         |          |                       | 8                    | Dinas Prasjal Tarkim           |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan             | Meningkatnya sistem jaringan jalan yang ada agar tetap dalam kondisi yang layak sesuai dengan standar pelayanan   | KM/tahun    | -               | 800           | 800   | 854   | 48.500*) | 800   | 1022             | 48.500*)  | 800   | 1026             | 48.500*)  | 800        | 800        | 48.500*)  | 800      | 800                   | 48.500*)             | Balai Besar Pelaksana Jalan II |
|  | Pemeliharaan rutin jembatan nasional  | Meter/tahun | -               | 6,000         | 6,000   | 7,999 | 30.000*) | 6,000 | 8,170            | 30.000*)  | 6,000 | 6,000            | 30.000*)  | 6,000      | 6,000      | 30.000*)  | 6,000    | 6,000                 | 30.000*)             | Balai Besar Pelaksana Jalan II |
|  | Rehab/ pemeliharaan jalan dan jembatan prov   | KM/tahun    | -               | 600           | 1,150   | 1035  | 26,000   | 1,150 | 1,027            | 28,750    | 1,150 | 1,024            | 35,000    | 1,150      | 600        | 38,000    | 1,150    | 600                   | 42,000               | Dinas Prasjal Tarkim           |
| Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                              | Kemantapan Jalan Nasional   | %           | 90              | 95            | 89  | 90    |          | 91    | 92               |           | 93    | 95               |           | 0          |            |           | 0        |                       | 0                    | Balai Besar Pelaksana Jalan II |
|  | Kemantapan Jalan Provinsi   | %           | 80              | 88            | 82  | 82    |          | 83    | 85               |           | 84    | 87               | 86        | 0          |            | -         | 88       | 0                     | -                    | Dinas Prasjal Tarkim           |
| Pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi                   | Meningkatnya kapasitas SDM jasa konstruksi  | Kali        |                 | 5             | 5   | 336   | 6        | 6     | 757              | 8         | 22    | 3,334            | 8         | 8          | 800        | 8         | 8        | 800                   | Dinas Prasjal Tarkim |                                |
|  | Meningkatnya persentase layanan sarana prasarana ke PU an   | Paket       |                 | -             | -   | -     | -        | 1     | 1                | 8,825     | 1     | 1                | 9,125     | 1          | 1          | 11,000    | 1        | 1                     | 11,000               | Dinas Prasjal Tarkim           |
|  | persentase kemantapan jalan   | %           | -               | -             | -   | -     | -        | -     | -                | -         | -     | -                | -         | -          | 86         | 593,931   | -        | 89.5                  | 521,043              | Dinas Prasjal Tarkim           |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                     | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |                      |        |        |                     |        |        |                     |            |          |                       | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                |  |
|--|--|---------|-----------------|----------------|---|--------|----------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--|
|  |  |         | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |        |                      |        | 2012   |                     |        |        | 2013                |            |          |                       | TARGET     | 2015                  |                                |  |
|  |  |         |                 |                | T   | R      | RP. (Jt)             | T      | R      | RP. (Jt)            | T      | R      | RP. (Jt)            | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET                | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                                |  |
|  | Persentase cakupan layanan air minum   | %       | -               | -              | -   | -      | -                    | -      | -      | -                   | -      | -      | -                   | -          | 65       | 29,841                | -          | 67                    | 8,242 Dinas Prasjal Tarkim     |  |
|  | Jumlah bangunan  | unit    | -               | -              | -   | -      | -                    | -      | -      | -                   | -      | -      | -                   | -          | 2        | 143,415 <sup>*)</sup> | -          | 5                     | 141,655 Dinas Prasjal Tarkim   |  |
|  | TPA Regional   | Paket   | -               | -              | -   | -      | -                    | -      | -      | -                   | -      | -      | -                   | -          | 2        | 5,915                 | -          | 2                     | 4,930 Dinas Prasjal Tarkim     |  |
|  | Sarana dan Prasarana bidang jalan dan jembatan   | Paket   | -               | -              | -   | -      | -                    | -      | -      | -                   | -      | -      | -                   | -          | 4        | 2,304                 | -          | 4                     | 2,432 Dinas Prasjal Tarkim     |  |
| DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  |  |         |                 |                |   |        | 76,886               |        |        | 203,820             |        |        | 231,671             |            |          | 131,700               |            |                       | 144,271                        |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | Bulan   | 12              | 60             | 12  | 12     | 1,079                | 12     | 12     | 1,468               | 12     | 12     | 2,142               | 12         | 12       | 1,931                 | 12         | 12                    | 2,124 Dinas PSDA               |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Meningkatnya kelancaran tugas aparatur   | unit    | 29              | 962            | 29  | 29     | 1,475                | 186    | 186    | 3,531               | 233    | 233    | 4,781               | 264        | 264      | 771                   | 250        | 250                   | 848 Dinas PSDA                 |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur  | Orang   | 405             | 1573           | 405   | 405    | 141                  | 405    | 405    | 141                 | 249    | 249    | 87                  | 257        | 257      | 99                    | 257        | 257                   | 109 Dinas PSDA                 |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan               | Meningkatnya tertib administrasi keuangan  | laporan | 36              | 68             | 36  | 36     | 346                  | 2      | 2      | 583                 | 10     | 10     | 707                 | 10         | 10       | 767                   | 10         | 10                    | 844 Dinas PSDA                 |  |
| Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya | Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya                  | Km      | 2.311           | 15             | 3   | 11.1   | 3,710                | 6      | 7.015  | 4,081               | 9      | 9      | 4,489               | 12         | 12       | 4,938                 | 15         | 15                    | 5,432 Dinas PSDA               |  |
| Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi                                    | Terehabilitasinya jaringan irigasi   | Ha      | 15,403          | 24,206         | 24,206  | 50,736 | 37,412               | 24,206 | 50,736 | 82,092              | 24,206 | 24,206 | 90,301              | 24,206     | -        | -                     | 24,206     | -                     | - Dinas PSDA                   |  |
|  | Terlaksananya OP jaringan irigasi  | Ha      | 31,720          | 35,246         | 31,720  | 48,427 | 7,000                | 31,720 | 35,246 | 10,171              | 31,720 | 35,246 | 17,169              | 31,720     | -        | -                     | 31,720     | -                     | - Dinas PSDA                   |  |
|  | Terehabilitasinya jaringan rawa  | Ha      | 300             | 300            | 300   | 300    | 10,000 <sup>*)</sup> | 300    | 300    | -                   | 300    | 300    | -                   | 300        | -        | -                     | 300        | -                     | - Dinas PSDA                   |  |
|  | Terlaksananya OP Jaringan rawa   | Ha      | 31,354          | 31,354         | 5,000   | 31,354 | 500 <sup>*)</sup>    | 5,000  | 31,354 | 500 <sup>*)</sup>   | 5,000  | 31,354 | 500 <sup>*)</sup>   | 5,000      | -        | -                     | 5,000      | -                     | - Dinas PSDA                   |  |
|  | Terlaksananya rehab dan OP sumur air tanah   | Buah    | 1               | 1              | 1   | 1      | 840 <sup>*)</sup>    | 1      | 1      | 840 <sup>*)</sup>   | 1      | 1      | 840 <sup>*)</sup>   | 1          | -        | -                     | 1          | -                     | - Dinas PSDA                   |  |
|  |  |         | 2               | 2              | 2   | 2      | 240 <sup>*)</sup>    | 2      | 2      | 240 <sup>*)</sup>   | 2      | 1      | 240 <sup>*)</sup>   | 2          | -        | -                     | 2          | -                     | - Dinas PSDA (BWSS V)          |  |
|  | Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya                  |         |                 |                |   |        |                      |        |        |                     |        |        |                     |            |          |                       |            |                       |                                |  |
|  | Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau, danau dan sumber air lainnya |         |                 |                |   |        |                      |        |        |                     |        |        |                     |            |          |                       |            |                       |                                |  |
|  | Pembangunan check Dam  | unit    | 2               | 4              | 1   | 1      | 3,723                | 4      | 5      | 25,931              | 4      | 2      | 28,525              | 4          | 2        | 31,377                | 4          | 1                     | 34,715 Dinas PSDA              |  |
|  | Pembangunan embung/ Situ   | unit    | 1               | 2              | 2   | 2      | 7.000 <sup>*)</sup>  | 2      | 2      | 7.000 <sup>*)</sup> | 2      | 1      | 7.000 <sup>*)</sup> | 2          | 1        | 7.000 <sup>*)</sup>   | 2          | 1                     | 7.000 <sup>*)</sup> Dinas PSDA |  |
|  | Rehabilitasi embung/ Situ  | unit    | 2               | 5              | 5   | 5      | 2.500 <sup>*)</sup>  | 5      | 2      | 2.500 <sup>*)</sup> | 5      | 2      | 2.500 <sup>*)</sup> | 5          | 2        | 2.500 <sup>*)</sup>   | 5          | 2                     | 2.500 <sup>*)</sup> Dinas PSDA |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                    | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |               |       |       |               |       |       |               |            |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                              |
|---|--|----------|-----------------|---------------|---|-----|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|   |  |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |     |               | 2012  |       |               | 2013  |       |               | 2014       |            |            | TARGET     | 2015                  |                              |
|   |  |          |                 |               | T   | R   | RP. (Jt)      | T     | R     | RP. (Jt)      | T     | R     | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)   | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                              |
|   | OP Embung/ Situ  | unit     | 20              | 25            | 25  | 25  | 3.750*)       | 25    | 35    | 3.750*)       | 25    | 25    | 3.750*)       | 25         | 25         | 3.750*)    | 25         | 25                    | Dinas PSDA + BWSS V          |
|   | Bendung serta saluran irigasi  | Ha       | 500             | 6,100         | 3,000   | 300 | 75.000*)      | 6,100 | 573.6 | 60.000*)      | 6,100 | 1,000 | 80.000*)      | 6,100      | 1,000      | 80.000*)   | 6,100      | 1,000                 | 90.000*) Dinas PSDA          |
| Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku   | Meningkatnya ketersediaan data air baku  | ka-wasan | 3               | 3             | 3   | 3   | 50.000*)      | 3     | 3     | 60.000*)      | 3     | 3     | 60.000*)      | 3          | 3          | 60.000*)   | 3          | 3                     | 60.000*) Dinas PSDA (BWSS V) |
| Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai   | Meningkatnya pengendalian banjir dan pengamanan pantai   | KM       | 10              | 60            | 40  | 40  | 22,000        | 12    | 6,375 | 75,822        | 12    | 8     | 83,470        | 12         | 8          | 91,817     | 12         | 8                     | 100,199 Dinas PSDA           |
|   |  | Ka-wasan | 2               | 5             | 2   | 2   | 160.000*)     | 3     | 1     | 200.000*)     | 3     | 1     | 200.000*)     | 3          | 1          | 200.000*)  | 3          | 1                     | 200.000*) Dinas PSDA         |
| <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>  |  |          |                 |               |   |     | -             |       |       | -             |       |       | <b>280</b>    |            |            | <b>60</b>  |            |                       | <b>98</b>                    |
| Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal | Besaran transmigrasi yang akan dibina  | KK       | 250             | 250           | -   | -   | -             | -     | -     | -             | 250   | 50    | 280.14        | 250        | 250        | 60.4       | 250        | 250                   | 195.64 Disnakertrans         |
|   | Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan | %        | 250             | 23.07         | KK  | -   | -             | -     | -     | -             | 250   | 50    | 280.14        | 15.38      | 15.38      | 60.4       | 250        | 23.07                 | 98.42 Disnakertrans          |
| <b>PERUMAHAN</b>  |  |          |                 |               |   |     | <b>38,350</b> |       |       | <b>42,175</b> |       |       | <b>46,404</b> |            |            | <b>133</b> |            |                       | <b>146</b>                   |
| <b>DINAS PRASARANA JALAN</b>  |  |          |                 |               |   |     | <b>38,350</b> |       |       | <b>42,175</b> |       |       | <b>46,404</b> |            |            | <b>133</b> |            |                       | <b>146</b>                   |
| Pembangunan Infrastruktur permukiman di perdesaan   | Meningkatnya pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan   | Ka-wasan | 0               | 125           | 25  | 32  |               | 25    | 15    |               | 0     | 25    |               | 0          | 25         | -          | 0          |                       | Dinas Prasjal Tarkim         |
|   | Peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan                            | kws      | -               | 25            | 25  | 31  |               | 25    | 40    |               | 25    | 0     |               | 0          | 0          | -          | 0          |                       | Dinas Prasjal Tarkim         |
|   | Terbangunnya jalan perdesaan penunjang pertanian dan perkebunan  | kws      | -               | 10            | 2   | 2   |               | 7     | 2     |               | 0     | 0     |               | 0          | 0          | -          | 0          |                       | Dinas Prasjal Tarkim         |
| Pengembangan Perumahan dan Permukiman   | Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan memperkuat kelembagaan bidang perumahan                | Paket    | -               | 5             | 1   | 1   | 100           | 1     | 1     | 100           | 1     | 1     | 121           | 1          | 1          | 133        | 1          | 1                     | 146 Dinas Prasjal Tarkim     |
|   | Pembangunan dan pengembangan TPA regional  | Ka-wasan | -               | -             | 1   | 1   |               | 1     | 1     |               | 1     | 1     |               | 1          | 1          | -          | 1          | 1                     | Dinas Prasjal Tarkim         |
|   | Pengembangan sistem pelayanan air minum  | ka-wasan | 50              | 10            | 13  |     | 10            | 17    |       | 10            | 11    |       |               | 10         | -          |            | 10         |                       | Dinas Prasjal Tarkim         |
| Penataan bangunan dan lingkungan  | Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan di Sumbar  | %        | -               | 25            | 40  | 64  | 28,500        | 80    | 100   | 31,350        | 100   | 100   | 34,485        | -          | -          | -          | -          | -                     | Dinas Prasjal Tarkim         |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN     | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |               |      |    |               |      |    |               |            |            |               | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                              |
|--|---|---------|-----------------|---------------|---|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|  |   |         | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |    |               | 2012 |    |               | 2013 |    |               | 2014       |            |               | TARGET     | 2015                  |                              |
|  |   |         |                 |               | T   | R  | RP. (Jt)      | T    | R  | RP. (Jt)      | T    | R  | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN    | STLH PRBHN |                       |                              |
| PENATAAN RUANG   | Rekonstruksi bangunan SKPD dan Kanwil KL yang roboh (20-buah)   | unit    |                 | 19            | 40  | 3  | 9,500         | 80   | 5  | 10,450        | 80   | 3  | 11,495        | 100        | 0          | -             | -          | 0                     | Dinas Prasjal Tarkim         |
|  | Revitalisasi kawasan tradisional dan bersejarah   | Paket   |                 | 3             | 3   | 1  | 250           | 3    | 2  | 275           | 3    | 1  | 303           | 3          | 0          | -             | 3          | 0                     | Dinas Prasjal Tarkim         |
| <b>DINAS PRASARANA JALAN</b>                                     |   |         |                 |               |   |    | <b>2,150</b>  |      |    | <b>2,365</b>  |      |    | <b>2,602</b>  |            |            | <b>1,799</b>  |            | <b>1,977</b>          |                              |
| Perencanaan Tata Ruang   | Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumbar   | Dokumen | -               | 10            | 3   | 3  | 1,350         | 3    | 5  | 1,485         | 3    | 2  | 1,634         | 2          | 4          | 1,799         | 2          | 5                     | 1,977 Dinas Prasjal Tarkim   |
|  | Penetapan Perda, Pergub dan SK.Gub dalam penataan ruang   | Perda   | -               | 1             | 1   | 1  |               | 1    | 1  |               | 1    | 1  |               | 1          | 0          | -             | 1          | 0                     | Dinas Prasjal Tarkim         |
| Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                   | Meningkatnya keserasian dan keselarasan rencana dengan pembangunan  | kawasan | -               | 13            | 3   | 3  | 4.900*)       | 4    | 5  | 5.400*)       | 4    | 5  | 5.400*)       | 4          | 2          | 5.400*)       | 4          | 2                     | 5.400*) Dinas Prasjal Tarkim |
|  | Tersedianya dokumen zoning regulatian   | Buku    | -               | 1             | 2   | 2  | 800           | 2    | 3  | 880           | 1    | 2  | 968           | 1          | 0          | -             | 1          | 0                     | Dinas Prasjal Tarkim         |
| <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>                                   |   |         |                 |               |   |    | <b>16,947</b> |      |    | <b>17,544</b> |      |    | <b>17,706</b> |            |            | <b>19,156</b> |            | <b>23,567</b>         |                              |
| <b>BAPPEDA</b>   |   |         |                 |               |   |    | <b>16,947</b> |      |    | <b>17,544</b> |      |    | <b>17,706</b> |            |            | <b>19,156</b> |            | <b>23,567</b>         |                              |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan operasional perkantoran Bappeda dan UPTB LPSE         | bulan   | -               | 60            | 12  | 12 | 1,639         | 12   | 12 | 1,825         | 12   | 12 | 2,037         | 12         | 12         | 2,802         | 12         | 12                    | 2,532 BAPPEDA                |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Meningkatnya kualitas gedung perkantoran  | bulan   | -               | 60            | 12  | 12 | 1,364         | 12   | 12 | 2,025         | 12   | 12 | 2,340         | 12         | 12         | 1,280         | 12         | 12                    | 1,265 BAPPEDA                |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                    | Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur   | bulan   | -               | 60            | 12  | 12 | 53.7          | 12   | 12 | 47            | 12   | 12 | 50            | 12         | 12         | 53            | 12         | 12                    | 53 BAPPEDA                   |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                        | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Perencana Bappeda  | bulan   | -               | 60            | 12  | 12 | 110           | 12   | 12 | 154           | 12   | 12 | 161           | 12         | 12         | 188           | 12         | 12                    | 103 BAPPEDA                  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertiib administrasi keuangan  | bulan   | -               | 60            | 12  | 12 | 388           | 12   | 12 | 433           | 12   | 12 | 625           | 12         | 12         | 541           | 12         | 12                    | 606 BAPPEDA                  |
| Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah dokumen perencanaan  | Buah    | 4               | 24            | 4   | 4  | 1,575         | 9    | 9  | 3,230         | 3    | 3  | 1,892         | 4          | -          | -             | 4          | -                     | BAPPEDA                      |
|  | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RTRW, RPJP, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS) | %       |                 |               |   |    |               |      |    |               |      |    |               |            | 74         | 3,304         | 77         | 5,188 BAPPEDA         |                              |
| Pengembangan Data dan Informasi Statistik                        | Jumlah dokumen data dan statistic pembangunan/ publikasi statistik  | Buku    | 4               | 24            | 4   | 4  | 2,215         | 4    | 5  | 1,725         | 5    | 5  | 1,897         | 5          | -          | -             | 5          | -                     | 2,087 BAPPEDA                |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA                    |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |               |      |    |               |      |    |               |            |            |              | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |         |                   |
|--|---|--|------------------------------------|---------------|---|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|-------------------|
|  |   |  | KONDISI AWAL                       | KONDISI AKHIR | 2011  |    |               | 2012 |    |               | 2013 |    |               | 2014       |            |              | TARGET     | 2015                  |         |                   |
|  |   |  |                                    |               | T   | R  | RP. (Jt)      | T    | R  | RP. (Jt)      | T    | R  | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)     | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |         |                   |
|  | Tersedianya data dan statistik pembangunan  | %  | -                                  | 65            | -   | -  | -             | -    | -  | -             | -    | -  | -             | -          | 60         | 1,897        | 65         | 2,087                 |         |                   |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah  | Kali   | -                                  | 76            | 78  | -  | 8,027         | 73   | 85 | 6,349         | 73   | 86 | 6,708         | 73         | -          | -            | 76         | -                     | BAPPEDA |                   |
|  | Meningkatnya konsistensi kesesuaian program dengan pelaksanaan Pembangunan daerah (RTRW, RPJPD, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS) | %  |                                    |               |   |    |               |      |    |               |      |    |               |            | 75         | 6,985        | 80         | 7,329                 |         |                   |
| Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintah dan Pembangunan Daerah                  | Jumlah penelitian dan pengembangan terapan  | Judul  | 11                                 | 34            | 14  | 14 | 1,425         | 19   | 19 | 1,606         | 24   | 24 | 1,846         | 29         | -          | -            | 34         | -                     | BAPPEDA |                   |
|  | Jumlah diskusi aktual   | Judul  | 5                                  | 41            | 17  | 17 | -             | 23   | 23 | -             | 29   | 30 | -             | 35         | -          | 50           | 2,106      | 60                    | 2,317   |                   |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal   | Persentase hasil riset dan pengembangan yang dikordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan                     | %  | -                                  | 60            | -   | -  | -             | -    | -  | -             | -    | -  | -             | -          | 50         | -            | -          | -                     | BAPPEDA |                   |
|  | Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal   | Jml Koord. & kerjma Perenc. Pemb. daerah tertinggal. | 19                                 | 15            | 19  | 19 | 150           | 19   | -  | 150           | 17   | 17 | 150           | 17         | -          | -            | 15         | -                     | BAPPEDA |                   |
| <b>PERHUBUNGAN</b>   |   |  |                                    |               |   |    | <b>16,991</b> |      |    | <b>13,754</b> |      |    | <b>26,615</b> |            |            | <b>9,748</b> |            | <b>10,926</b>         |         |                   |
| <b>DINAS PERHUBUNGAN &amp; KOMINFO</b>   |   |  |                                    |               |   |    | <b>16,991</b> |      |    | <b>13,754</b> |      |    | <b>26,615</b> |            |            | <b>9,748</b> |            | <b>10,926</b>         |         |                   |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran   |  |                                    |               |   |    | 1,100         |      |    | 1,654         |      |    | 1,942         |            |            | 1,845        |            |                       | 1,954   | Dinas Perhubungan |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Peningkatan Pemeliharaan  |  |                                    |               |   |    | 267           |      |    | 842           |      |    | 2,624         |            |            | 282          |            |                       | 554     | Dinas Perhubungan |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Peningkatan disiplin aparat   |  |                                    |               |   |    | 115           |      |    | 98            |      |    | 86            |            |            | 98           |            |                       | 100     | Dinas Perhubungan |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  | Meningkatnya kapasitas SDM aparat   |  |                                    |               |   |    | 40            |      |    | 50            |      |    | 130           |            |            | 100          |            |                       | 120     | Dinas Perhubungan |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                                   | Meningkatnya tertiib administrasi keuangan  |  |                                    |               |   |    | 174           |      |    | 285           |      |    | 426           |            |            | 375          |            |                       | 445     | Dinas Perhubungan |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan | Meningkatnya pengembangan angkutan kereta api di Sumbar   | km   | Kajian, ganti rugi tanah dan fisik | 0             | 4.5   | 0  | 10,000        | 2.5  |    | 75.000*)      | 2    |    | 50.000*)      | 0          |            | 10.000*)     | 0          |                       |         | Dinas Perhubungan |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |           |      |   |           |         |   |           |            |            |            | SKPD PENANGGUNG JAWAB | RP. (Jt) |                             |                            |
|--|--|--------|-----------------|---------------|---|-------|-----------|------|---|-----------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
|  |  |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |           | 2012 |   |           | 2013    |   |           | 2014       |            |            | TARGET                | 2015     |                             |                            |
|  |  |        |                 |               | T   | R     | RP. (Jt)  | T    | R | RP. (Jt)  | T       | R | RP. (Jt)  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |          |                             |                            |
|  | Terlaksananya pelayanan berklasifikasi baik berdasarkan standart pelayanan perhubungan darat           | %      | -               | 80            | 76  | 50    | 345       | 77   |   | 380       | 78      |   | 417       | 79         |            | 459        | 80                    |          | 505 Dinas Perhubungan       |                            |
|  | Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan kewenangan Provinsi                                     | Paket  | -               | 1             | 1   | 5     | 1,100     | 1    |   | 1,210     | 1       |   | 1,331     | 1          |            | 1,464      | 1                     |          | 1,611 Dinas Perhubungan     |                            |
| Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut  | Meningkatnya pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumbar (%)                        | Unit   | -               | -             | -   | 1     |           | 1    | - | 28.500*)  | -       |   |           | 1          |            | 30.000*)   | -                     |          | Dinas Perhubungan           |                            |
|  | Meningkatnya penyelenggaraan Moda Transportasi Laut di Sumbar  | paket  | -               | 1             | 1   | 1     | 10.500*)  | 1    |   | 15.000*)  | 1       |   | 15.000*)  | 1          |            | 15.000*)   | 1                     |          | 15.000*) Dinas Perhubungan  |                            |
|  | Peningkatan dermaga dan fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut (Teluk Bayur dan Teluk Tapang) | Paket  | -               | 1             | 2   | 2     | 385.000*) | 2    |   | 385.000*) | 2       |   | 385.000*) | 1          |            | 300.000*)  | 1                     |          | 300.000*) Dinas Perhubungan |                            |
|  | Penetapan Perda / Pergub / SK.Gub  | Paket  | -               | 2             | 2   | 0     |           | 2    |   |           | 2       |   |           | 2          |            |            | 2                     |          | Dinas Perhubungan           |                            |
|  | Terlaksananya pembangunan dermaga khusus dan areal pergudangan   | Paket  | -               | -             | 1   | 1     | 400*)     | 1    |   | 50.000*)  | 1       |   | 75.000*)  | 1          |            | 150.000*)  | 1                     |          | Dinas Perhubungan           |                            |
|  | Terbangunnya dermaga dan pergudangan   | Paket  | -               | 1             | 1   | 0     | 10.500*)  | 1    |   | 13.500*)  | 1       |   | 15.000*)  | 1          |            | 15.000*)   | 1                     |          | 20.000*) Dinas Perhubungan  |                            |
|  | Meningkatkan moda transportasi laut pada daerah terpencil (Kab. Mentawai)                              | unit   | -               | 1             | 1   | 0     |           | 1    |   | 5.000*)   | 1       |   | 10.000*)  | 1          |            | 10.000*)   | 1                     |          | 10.000*) Dinas Perhubungan  |                            |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara             | Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan moda transportasi udara di Sumbar                            | Meter  | 2,750           | -             | 50  | 2,500 | 20.000*)  | 150  |   | 75.000*)  | -       |   | 25.000*)  | -          |            | -          | -                     |          | Dinas Perhubungan           |                            |
|  | Terlaksananya pembangunan Bandara three in one di Mentawai   | paket  | -               | 1             | Kajian  | 0     |           | -    | 1 |           | 2.000*) | 1 |           | 100.000*)  | 1          |            | 150.000*)             | 1        |                             | 50.000*) Dinas Perhubungan |
| Pengembangan angkutan Kereta Api                             | Terlaksananya Rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan prasarana, fasilitasi Angkutan Kereta Api     | paket  |                 |               | DED dan Pembebasan Lahan                      |       | 3,600     | 1    |   | 6,960     | 1       |   | 16,356    | 1          |            | 4,792      | 1                     |          | 5,271 Dinas Perhubungan     |                            |
|  | Tersedianya perencanaan rencana induk pembangunan jaringan KA Sumbar                                   | paket  |                 |               | Kajian dan Pembebasan Lahan                   |       | 250       | DED  |   | 2,275     | 1       |   | 3,303     | 1          |            | 333        | 1                     |          | 366 Dinas Perhubungan       |                            |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |     | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |                   |               |       |                   |               |            |                   |               |            |            | RP. (Jt)      | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                      |                      |            |
|--|--|---------|-----------------|-----|---|-----|-------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|  |  |         | KONDISI AWAL    |     | KONDISI AKHIR                                 |     | 2011              |               |       | 2012              |               |            | 2013              |               |            | 2014       |               |                       | TARGET               | 2015                 |            |
|  |  |         | T               | R   | RP. (Jt)                                      | T   | R                 | RP. (Jt)      | T     | R                 | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN        | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN           | RP. (Jt)             | SBLM PRBHN |
| Pengendalian dan pengamanan lalu lintas                            | Meningkatkan keselamatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas   | %       |                 |     | 20  |     |                   | 20            |       |                   | 20            |            |                   | 20            |            |            | 20            |                       |                      | Dinas Perhubungan    |            |
| <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |         |                 |     | <b>50,635</b>                                 |     |                   | <b>94,270</b> |       |                   | <b>91,515</b> |            |                   | <b>43,873</b> |            |            | <b>65,261</b> |                       |                      |                      |            |
| <b>DINAS PRASJAL TARKIM</b>  |  |         |                 |     | <b>17,000</b>                                 |     |                   | <b>49,000</b> |       |                   | <b>47,000</b> |            |                   | -             |            |            | <b>17,000</b> |                       |                      |                      |            |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan                                     | a. Jalan evakuasi yang dibangun                                    | KM      | -               | 5   | 3.5   | 2   | 5,000<br>10.000*) | 5             | 1.5   | 7,000<br>10.000*) | 5             | 4.5        | 5,000<br>10.000*) | 5             | 0          | -          | 5             | -                     | -                    | Dinas Prasjal Tarkim |            |
|  | b. Jembatan evakuasi yang dibangun                                 | Buah    | -               | 3   | 3   | 1   | 2,000             | 3             | 2     | 10,000<br>7.000*) | 3             | 3          | 10,000<br>7.000*) | 3             | 0          | -          | 3             | -                     | -                    | Dinas Prasjal Tarkim |            |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan                                   | Escape building yang dibangun                                      | Buah    | -               | 1   | 1   | 1   | 10,000            | 1             | 1     | 30,000            | 1             | 1          | 30,000            | 1             | 0          | -          | 1             | -                     | -                    | Dinas Prasjal Tarkim |            |
|  | Shelter/ tempat Evakuasi yang dibangun                             | Buah    | -               | 5   | -   | -   |                   | 5             | 6     | 2,000             | 5             | -          | 2,000             | 5             | 0          | -          | 5             | -                     | -                    | Dinas Prasjal Tarkim |            |
|  | Tersedianya bangunan shelter                                       | Unit    | -               | -   | -   | -   | -                 | -             | -     | -                 | -             | -          | -                 | 2             | 28.000 *)  | -          | 6             | 17,000                | Dinas Prasjal Tarkim |                      |            |
| <b>DINAS PSDA</b>  |  |         |                 |     | <b>24,005</b>                                 |     |                   | <b>26,405</b> |       |                   | <b>29,045</b> |            |                   | <b>31,949</b> |            |            | <b>35,145</b> |                       |                      |                      |            |
| Pegendalian banjir dan pengamanan pantai                           | Terbangunnya perkuatan tebing sungai                               | KM      | 0.5             | 4   | 0.5   | 0.5 | 13,750            | 0.5           | 5.205 | 15,125            | 0.5           | 0.5        | 16,637            | 0.5           | 0.5        | 18,301     | 0.5           | 0.5                   | 20,131 Dinas PSDA    |                      |            |
|  | Terbangunnya tanggul pengendali banjir                             | KM      | 1               | 5   | 1   | 1   | 6,350             | 1             | 1.17  | 6,985             | 1             | 1          | 7,683             | 1             | 1          | 8,451      | 1             | 1                     | 9,297 Dinas PSDA     |                      |            |
|  | Terbangunnya pengamanan pantai                                     | Unit    | 3               | 5   | 3   | 3   | 3,905             | 3             | 0     | 4,295             | 3             | 1          | 4,725             | 3             | 1          | 5,197      | 3             | 1                     | 5,717 Dinas PSDA     |                      |            |
|  | Terbangunnya tanggul pengendali sedimen/lahar                      | Unit    | 3               | 3   | 3   | 3   | 25.000*)          | 3             | 0     | 15.000*)          | 3             | 1          | 15.000*)          | 3             | 1          | 15.000*)   | 3             | 1                     | 15.000*)             | Dinas PSDA           |            |
| <b>BPBD</b>  |  |         |                 |     | <b>4,271</b>                                  |     |                   | <b>12,458</b> |       |                   | <b>7,718</b>  |            |                   | <b>3,440</b>  |            |            | <b>3,942</b>  |                       |                      |                      |            |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                    | %       | 20              | 100 | 20  | 20  | 648               | 40            | 40    | 843               | 60            | 60         | 1,061             | 80            | 80         | 1,115      | 100           | 100                   | 1,290 BPBD           |                      |            |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   | %       | 20              | 100 | 20  | 20  | 463               | 40            | 40    | 1,215             | 60            | 60         | 1,049             | 80            | 80         | 479        | 100           | 100                   | 1,073 BPBD           |                      |            |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparat  | %       | 20              | 100 | 20  | 20  |                   | 19            | 40    | 40                | 21            | 60         | 60                | 21            | 80         | 80         | 28            | 100                   | 100                  | 28 BPBD              |            |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparat                                  | %       | 20              | 100 | 20  | 20  | 150               | 40            | 40    | 60                | 60            | 60         | 45                | 80            | 80         | 80         | 100           | 100                   | 100 BPBD             |                      |            |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                          | %       | 20              | 100 | 20  | 20  | 97                | 40            | 40    | 192               | 60            | 60         | 204               | 80            | 80         | 204        | 100           | 100                   | 223 BPBD             |                      |            |
| Peningkatan Mitigasi Bencana                                       | Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)          | Laporan | 1               | 1   | -   | -   |                   | 1             | 1     | 250               | 1             | 0          | 250               | 1             | -          | -          | 1             | -                     | -                    | BPBD                 |            |
|  | Dokumen Rencana Kon-tijensi (Renkon) per-jenis bencana             | Laporan | -               | 1   | -   | 1   |                   | 1             | 1     | 250               | 1             | 1          | 250               | 1             | -          | -          | 1             | -                     | -                    | BPBD                 |            |
|  | Penetapan dan penyusunan dokumen kebijakan (Perda, Pergub, SK-Gub) | Paket   | -               | 1   | -   | -   |                   | 1             | -     | 250               | 1             | 0          | 250               | 1             | -          | -          | 1             | -                     | -                    | BPBD                 |            |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                      | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN                    | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |          |      |                                    |          |      |    |          |        |            |            | SKPD PENANGGUNG JAWAB |        |            |            |
|---|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|----------|------|------------------------------------|----------|------|----|----------|--------|------------|------------|-----------------------|--------|------------|------------|
|   |   |                           | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |                 |          | 2012 |                                    |          | 2013 |    |          | 2014   |            |            | RP. (Jt)              | 2015   |            |            |
|   |   |                           |                 |               | T   | R               | RP. (Jt) | T    | R                                  | RP. (Jt) | T    | R  | RP. (Jt) | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |
| Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana                                      | Penetapan pembentukan dan Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Prov. / Kab. / Kota  | Prov.                     | 3               | 3             | 3   | 3               | 269      | 3    | 3                                  | 296      | 3    | 1  | 325      | 3      | -          | -          | 3                     | -      | -          | BPBD       |
|   |   | Kab/ Kota                 | 1               | 14            | 1   | 1               |          | 5    | 5                                  |          | 8    | 10 |          | 11     | -          | -          | 14                    | -      | -          |            |
|   | Penetapan dan pembinaan Forum Pengurangan risiko Bencana (Prov. / Kab. / Kota)  | Prov.                     | 3               | 3             | 3   | 3               | 180      | 3    | 3                                  | 198      | 3    | 1  | 217      | 3      | 1          | -          | 3                     | -      | -          | BPBD       |
|   |   | Kab/ Kota                 | 1               | 14            | 1   | 1               |          | 5    | 5                                  |          | 8    | 8  |          | 11     | 10         | -          | 14                    | -      | -          |            |
|   |   | %                         | -               | -             | -   | -               | -        | -    | -                                  | -        | -    | -  | -        | -      | -          | -          | -                     | -      | -          | BPBD       |
|   | Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana                                   | Paket                     | -               | 1             | 1   | 100 (buku)      | 300      | 1    | 1 unit Baliho, 5.500 Lembar Brosur | 300      | 1    | 1  | 300      | 1      | -          | -          | 1                     | -      | -          | BPBD       |
| Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana  | Terlaksananya peningkatan akses Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - Paket | Paket                     | 1               | 1             | 1   | 1               | 224      | 1    | 1                                  | 246      | 1    | 1  | 271      | 1      | -          | -          | 1                     | -      | -          | BPBD       |
|   | Terlaksananya operasional PUSDALOPS Prov.                                       | Tahun                     | 1               | 1             | 1   | 1               | 968      | 1    | 1                                  | 1,064    | 1    | 1  | 1,171    | 1      | -          | -          | 1                     | -      | -          | BPBD       |
|   | Terlaksananya Simulasi/ Pelatihan PB bagi Masyarakat (Kab. / Kota)              | Prov/ Kab/ Kota           | 5               | 20            | 20  | 20              | 703      | 20   | 20                                 | 773      | 20   | 20 | 851      | 20     | 20         | 936        | 20                    | -      | -          | BPBD       |
|   |   | %                         | -               | -             | -   | -               | -        | -    | -                                  | -        | -    | -  | -        | -      | 48         | 598        | -                     | 60     | 1,228      | BPBD       |
| ESDM  | Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana                           | paket                     | -               | -             | -   | -               | -        | 9    | 6                                  | 6,000    | -    | 5  | 953      | -      | -          | -          | -                     | -      | -          | BPBD       |
|   | Terlaksananya Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat                             | % (dari kejadian bencana) | 60              | 80            | 70  | 70              | 250      | 75   | 75                                 | 500      | 75   | 75 | 500      | 75     | -          | -          | 80                    | -      | -          | BPBD       |
|   |   | %                         | -               | -             | -   | -               | -        | -    | -                                  | -        | -    | -  | -        | -      | 64         | *)         | -                     | 80     | *)         | BPBD       |
| e. Tersedianya peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana gunung api (lembar) |   | Buah                      | 1               | 5             | 1   | 1 (gn. Kerinci) | 75       | 1    | 1 (gn. Talang)                     | 82       | -    | 1  | 90       | -      | 1          | 99         | 1                     | 1      | 109        | ESDM       |
| f. Tersedianya peta kawasan rawan gerakan tanah (lembar)                          |   | Lembar                    | -               | 1             | 1   | 1               | 40       | 2    | 2                                  | 44       | 5    | 5  | 48       | -      | 5          | 53         | 1                     | 1      | 58         | ESDM       |
| g. Jumlah monitor gunung api prov. Sumatera Barat                                 |   | Paket                     | -               | 1             | 1   | 1               | 50       | 1    | 1                                  | 55       | 1    | 1  | 60       | 1      | 1          | 66         | 1                     | 1      | 73         | ESDM       |
| Peta daerah rawan bencana geologi   |   | Lembar                    | 0               | 4             |   |                 |          |      |                                    |          |      |    |          |        | 5          | 543        | -                     | 4      | 660        |            |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN         | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |              |              |      |              |              |      |              |              |             |              |        | RP. (Jt)     | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                   |              |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
|  |  |                | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |              |              | 2012 |              |              | 2013 |              |              | 2014        |              |        | RP. (Jt)     | 2015                  |                                   |              |
|  |  |                |                 |               | T   | R            | RP. (Jt)     | T    | R            | RP. (Jt)     | T    | R            | RP. (Jt)     | STBLM PRBHN | STLH PRBHN   | TARGET |              | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN                        |              |
| <b>BAPEDALDA</b>   |  |                |                 |               |   |              | <b>2,983</b> |      |              | <b>2,964</b> |      |              | <b>3,454</b> |             |              |        | <b>3,248</b> |                       |                                   | <b>3,829</b> |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | %              | 100             | 100           | 100   | 868.8424     | 100          | 100  | 815          | 100          | 100  | 962          | 100          | 100         | 881          | 100    | 100          | 1,101                 | BAPEDALDA                         |              |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   | %              | 100             | 100           | 100   | 943.6945     | 100          | 100  | 234          | 100          | 100  | 504          | 100          | 100         | 294          | 100    | 100          | 527                   | BAPEDALDA                         |              |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur  | %              | 100             | 100           | 100   | 23.8         | 100          | 100  | 26           | 100          | 100  | 23           | 100          | 100         | 24           | 100    | 100          | 24                    | BAPEDALDA                         |              |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  | %              | 100             | 100           | 100   | 91.58        | 100          | 100  | 59           | 100          | 100  | 49           | 100          | 100         | 47           | 100    | 100          | 47                    | BAPEDALDA                         |              |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan  | %              | 100             | 100           | 100   | 217.25       | 100          | 100  | 232          | 100          | 100  | 249          | 100          | 100         | 214          | 100    | 100          | 217                   | BAPEDALDA                         |              |
| Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan                    | Terhimpun, Tersusun dan Terselamatkannya arsip/dokumen daerah  | %              | -               | -             | -   | -            | -            | -    | -            | -            | -    | -            | -            | -           | -            | -      | -            | 100                   | BAPEDALDA                         |              |
| Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup             | Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup   | Objek          | -               | 24            | 7   | 8            | 85           | 8    | 12           | 150          | 9    | 19           | 175          | 10          | 22           | 185    | 11           | 24                    | 200                               | BAPEDALDA    |
| Perlindungan dan konservasi sumber daya alam                       | Jumlah kab/kota yang dibina  | Kab/Kota       | 5               | 13            | 13  | 125          | 13           | 13   | 190          | 13           | 13   | 209          | 13           | 13          | 230          | 13     | 13           | 250                   | BAPEDALDA                         |              |
|  | Masyarakat pelopor pelestarian lingkungan  | Orang/Kelompok | 4               | 4             | 4   | 125          | 4            | 4    | 173          | 4            | 6    | 173          | 4            | 4           | 173          | 4      | 4            | 173                   | BAPEDALDA                         |              |
|  | Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan  | Perusahaan     | 10              | 2             | -   | 7.000*)      | 4            | 6    | 9.000*)      | 6            | 9    | 11.000*)     | 8            | 8           | 13.000*)     | 10     | 10           | 15.000*)              | BAPEDALDA                         |              |
|  | Terpantauanya pencemaran sungai dan danau  | Sungai         | 5               | 2             | 2   | 200          | 3            | 3    | 260          | 2            | 2    | 260          | 4            | 4           | 350          | 5      | 5            | 350                   | BAPEDALDA                         |              |
|  | Danau  |                | 4               | -             | -   | 500*)        | 2            | 2    | 500*)        | 4            | 4    | 500*)        | 4            | 4           | 600*)        | 4      | 4            | 600*)                 |                                   |              |
|  | Ditetapkannya daya tampung dan daya dukung sungai  | Sungai         | 1               | 1             | 1   | 94           | 1            | 1    | 200          | 1            | 1    | 200          | 1            | 1           | 200          | 1      | 1            | 225                   | BAPEDALDA                         |              |
|  | Terfasilitasinya penyusunan status Kehati 19 kabupaten/kota dan tersusunnya 1 (satu) rangkuman Kehati Provinsi | Kabupaten/Kota | 3               | 4             | 4   | 110          | 4            | 5    | 300          | 4            | 4    | 300          | 4            | 4           | 300          | 4      | 3            | 300                   | BAPEDALDA                         |              |
| Tata Lingkungan dan Peningkatan Hukum Lingkungan                   | Terlaksananya pembinaan KLHS   | Kab/Kota       | -               | 2             | 0   | 0            | 54           | 1    | 1            | 200          | 1    | 1            | 200          | 2           | 2            | 200    | 2            | 2                     | 225                               | BAPEDALDA    |
|  | Terfasilitasinya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan   | %              | -               | 100           | 100   | 100          | 45           | 100  | 100          | 125          | 100  | 100          | 150          | 100         | 100          | 150    | 100          | 100                   | 175                               | BAPEDALDA    |
| <b>DINAS KEHUTANAN</b>   |  |                |                 |               |   | <b>1,911</b> |              |      | <b>2,438</b> |              |      | <b>3,150</b> |              |             | <b>3,400</b> |        |              | <b>3,645</b>          |                                   |              |
| Pengamanan dan pengendalian hutan serta mitigasi perubahan iklim   | Berkurangnya tekanan kerusakan hutan 20%   | %              | 20              | 4             | 4.6   | 500          | 4            | 3.63 | 900          | 4            | 3.77 | 1,000        | 4            | 4           | 1,025        | 4      | 4            | 1,120                 | Dishut, BKSDA, TNKS Wil. III, TNS |              |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN    | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |            |          |            |            |          |            |         |          |            |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                     |                     |                 |
|--|---|-----------|-----------------|----------------|---|------------|----------|------------|------------|----------|------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
|  |   |           | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |            |          | 2012       |            |          | 2013       |         |          | 2014       |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                     |                     |                 |
|  |   |           |                 |                | T   | R          | RP. (Jt) | T          | R          | RP. (Jt) | T          | R       | RP. (Jt) | TARGET     | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |            |                       |                                     |                     |                 |
|  |   |           |                 |                |   |            | 6.300*)  |            |            | 6.500*)  |            |         | 6.500*)  |            |            |            | 6.700*)    |                       |                                     |                     |                 |
|  | b. Pengawasan hot spot dan pengendalian kebakaran                                     | Kab/ Kota | -               | 6              | 19  | 19         | 186      | 19         | 19         | 300      | 19         | 19      | 400      | 6          | 19         | 500        | 6          | 19                    | 500 Dishut, BKSDA TNKS Wil. II, TNS |                     |                 |
|  | c. Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang REDD pada 10 Kab                           | Kab       | -               | 10             | 2   | 3          | 100      | 2          | 2          | 100      | 2          | 6       | 350      | 2          | 2          | 400        | 2          | 2                     | 450 Dishut                          |                     |                 |
|  | d. Perkembangan ekosistem kawasan hutan atau lahan daerah rawan bencana 41 lokasi     | Lokasi    | -               | 41             | 10  | 10         | 400      | 11         | 9          | 100      | 11         | 3       | 150      | 12         | 4          | 500        | 15         | 5                     | 600 Dishut                          |                     |                 |
| Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                 | Berkurangnya lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan 10.000 ha/ tahun  | Batang    | -               | 210,000        | 200,000                                       | 200,000    | 575      | 210,000    | 182,700    | 500      | 210,000    | 100,000 | 500      | 210,000    | 100,000    | 500        | 210,000    | 100,000               | 500 Dishut                          |                     |                 |
|  |   | Batang    | -               | 15,300,000     | 15,300,000                                    | 31,864,660 | 14.435*) | 15,300,000 | 18,387,470 | 14.435*) | 15,300,000 | -       | 14.435*) | 15,300,000 | 5,000,000  | 14.435*)   | 15,300,000 | 5,000,000             | 14.435*)                            | BP DAS Agam Kuantan |                 |
|  |   | Batang    | -               | 15,000,000     | -   | -          | -        | -          | -          | -        | -          | -       | -        | -          | -          | 5,000,000  | -          | 5,000,000             | BP DAS Indra Giri                   |                     |                 |
|  |   | Batang    | -               | 15,000,000     | -   | -          | -        | -          | -          | -        | -          | -       | -        | -          | -          | 5,000,000  | -          | 5,000,000             | BP DAS Batang Hari                  |                     |                 |
|  | Terehabilitasinya lahan kritis dalam kawasan hutan 30.603 Ha                          | Ha        | -               | 165            | 20  | 0          | 300*)    | 35         | 30         | 350*)    | 60         | 90      | 600*)    | 10         | 25         | -          | 35         | 25                    | Dishut,                             |                     |                 |
|  |   | Ha        | -               | -              | -   | -          | -        | -          | -          | -        | -          | -       | -        | -          | -          | 150        | -          | -                     |                                     |                     |                 |
|  |   | Ha        | -               | 27,229         | 12,037  | 12,037     | 15.500*) | 12,037     | 3,633      | 15.500*) | 12,037     | -       | 15.500*) | 12,037     | 300        | 15.500*)   | 12,037     | 200                   | 15.500*)                            | BP DAS Indragiri    |                 |
|  |   | Ha        | -               | 1,864          | 5.39  | 5.39       | 5.400*)  | 8.6        | 1,100      | 8.200*)  | 1500       | -       | 8.300*)  | 10.35      | 200        | 10.100*)   | 8.37       | 150                   | 8.100*)                             | BP DAS Agam Kuantan |                 |
|  |   | Ha        | -               | 1,350          | -   | -          | -        | -          | -          | -        | -          | -       | -        | -          | -          | 1,000      | -          | 200                   | -                                   | 150                 | BP DAS Bt. Hari |
|  | Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 66.490ha                          | Ha        | -               | 194            | 24  | 40         | 150      | 70         | 75         | 300      | 60         | 180.47  | 350      | 90         | 20         | 350        | 90         | 20                    | 350                                 | Dishut,             |                 |
|  |   | Ha        | -               | 36,784         | 15,492  | 15,492     | 15.492*) | 15,492     | 6,350      | 15.492*) | 2,800      | 3,291   | 15.492*) | 3,291      | 1,800      | 15.492*)   | 15,492     | 1,200                 | 15.492*)                            | BPDAS Indragiri     |                 |
|  |   | Ha        | -               | 21,578         | 5,531   | 5,531      | 5.531*)  | 5,375      | -          | 5.375*)  | 3,400      | 6,622   | 5.531*)  | 6,469      | 6,622      | 5531*)     | 6,438      | 650                   | 5531*)                              | BPDAS Agam Kuantan  |                 |
|  |   | Ha        | -               | 7,934          | -   | -          | -        | -          | -          | -        | -          | -       | -        | -          | -          | 3000       | -          | 4,184                 | -                                   | 750                 | BP DAS Bt. Hari |
|  | Terbangunnya bangunan konservasi (Dam Pengendali, Dam Penahan dan Guliv Plug) 12 unit | Unit      | -               | 4              | -   | -          | -        | -          | -          | -        | -          | -       | -        | -          | -          | 2          | -          | 2                     | -                                   | BPDAS Indragiri     |                 |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN        | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |          |       |       |          |      |       |          |            |            |          | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                               |  |
|---|--|---------------|-----------------|----------------|---|-------|----------|-------|-------|----------|------|-------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|   |  |               | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |       |          | 2012  |       |          | 2013 |       |          | 2014       |            |          | TARGET     | 2015                  |                               |  |
|   |  |               |                 |                | T   | R     | RP. (Jt) | T     | R     | RP. (Jt) | T    | R     | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                               |  |
|   |  |               |                 |                | -   | -     | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -        | -          | -          | -        | -          |                       |                               |  |
| Terbangunnya bangunan konservasi (Sumur Resapan, Embung dan Biopori) 6 unit | Unit   | Unit          | -               | 0              | -   | -     | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -        | -          | 0          | -        | 0          | BPDAS Agam Kuantan    |                               |  |
|   |  | unit          | -               | 0              | -   | -     | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -        | -          | 0          | -        | -          | BP DAS Bt. Hari       |                               |  |
|   |  | unit          | -               | 6              | -   | -     | -        | 2     | 2     | 87.5     | 2    | 2     | 125      | 2          | 2          | 125      | 2          | 2                     | 125 Dishut                    |  |
|   | Unit   | Unit          | -               | 6              | -   | -     | -        | 2     | 3     | 150*)    | 2    | 2     | 150*)    | 2          | 1          | 150*)    | 2          | 1                     | 150*) Dishut, BPDAS Indragiri |  |
|   |  | Unit          | -               | 0              | 23  | -     | -        | 0     | -     | -        | 0    | 0     | -        | 0          | -          | -        | 0          | -                     | BPDAS Agam Kuantan            |  |
|   |  | Unit          | -               | 0              | 77,933  | -     | -        | 0     | -     | -        | 0    | 0     | -        | 0          | -          | -        | 0          | -                     | BP DAS Bt. Hari               |  |
|   | Unit   | Unit          | -               | 0              | -   | -     | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -        | -          | -          | -        | -          | -                     | BPDAS Indragiri               |  |
|   |  | teras guludan | unit            | 0              | -   | -     | -        | 0     | -     | -        | 0    | 0     | -        | 0          | -          | -        | -          | -                     |                               |  |
| DINAS KELAUTAN & PERIKANAN  |  |               |                 |                |   |       |          | 300   |       | 825      |      |       | 950      |            |            | 1,075    |            | 800                   |                               |  |
| Perlindungan dan konservasi sumber daya alam                                | Terlindunginya kawasan konservasi sumber daya alam                                     | Kawasan       | 1               | 5              | 1   | 2     | 25       | 1     | 3     | 100      | 1    | 2     | 100      | 1          | 1          | 125      | 1          | 125                   | DKP                           |  |
| Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut                     | Meningkatnya kawasan pesisir yang rusak pulih kembali                                  |               |                 |                |   |       |          |       |       |          |      |       |          |            |            |          |            |                       |                               |  |
| Rehabilitasi hutan mangrove   | Ha   | -             | 50              | 50             | 1   | 200*) | 100      | 6     | 750*) | 100      | 3.5  | 750*) | 100      | 10         | 750*)      | 100      | 10         | 750*)                 | DKP                           |  |
| Penghijauan pantai  | Ha   | 10            | 50              | 50             | 1   | 150   | 100      | 1.4   | 500   | 100      | 52   | 500   | 100      | 10         | 500        | 100      | 10         | 100                   | DKP                           |  |
| Rehabilitasi terumbu karang   | Ha   | 3             | 15              | 3              | 0   | 25    | 6        | 3     | 75    | 9        | 3.5  | 125   | 12       | 3          | 175        | 15       | 3          | 225                   | DKP                           |  |
| Pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil   | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil | Kawasan       | 5               | 44             | 1   | 8     | 125      | 2     | 10    | 250      | 3    | 10    | 325      | 4          | 14         | 400      | 5          | 15                    | 475 DKP                       |  |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                |  |               |                 |                |   |       |          | 2,465 |       | 2,630    |      |       | 3,201    |            |            | 3,342    |            | 4,092                 |                               |  |
| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB   |  |               |                 |                |   |       |          | 2,465 |       | 2,630    |      |       | 3,201    |            |            | 3,342    |            | 4,092                 |                               |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | bulan         |                 |                | 12  | 12    | 513      | 12    | 12    | 532      | 12   | 12    | 560      | 12         | 12         | 567      | 12         | 12                    | 819 BPPr&KB                   |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   | Meningkatnya kualitas gedung perkantoran   | bulan         |                 |                | 12  | 12    | 75       | 12    | 12    | 68       | 12   | 12    | 424      | 12         | 12         | 354      | 12         | 12                    | 582 BPPr&KB                   |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Meningkatnya disiplin aparatuer  | bulan         |                 |                | 12  | 12    | 17       | 12    | 12    | 19       | 12   | 12    | 15       | 12         | 12         | 19       | 12         | 12                    | 25 BPPr&KB                    |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                   | Meningkatnya kapasitas SDM aparatuer   | bulan         |                 |                | 12  | 12    | 52       | 12    | 12    | 41       | 12   | 12    | 19       | 12         | 12         | 45       | 12         | 12                    | 60 BPPr&KB                    |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |          |              |    |          |              |    |          |              |            |            | SKPD PENANGGUNG JAWAB |        |            |                 |
|--|---|------------------|-----------------|---------------|---|-------|----------|--------------|----|----------|--------------|----|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------------|
|  |   |                  | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |          | 2012         |    |          | 2013         |    |          | 2014         |            |            | RP. (Jt)              | 2015   |            |                 |
|  |   |                  |                 |               | T   | R     | RP. (Jt) | T            | R  | RP. (Jt) | T            | R  | RP. (Jt) | TARGET       | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN      |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                       | bulan            |                 |               | 12  | 12    | 142      | 12           | 12 | 139      | 12           | 12 | 170      | 12           | 12         | 143        | 12                    | 12     | 170        | BPPR&KB         |
|  | Indeks pembangunan Gender (IPG)   |                  | 70,04           |               | 71,33   | 69,55 |          | 72,62        | 0  |          | 73,91        |    |          | 75,2         | 71,49      |            | 76,49                 | 72,13  |            | BPPR dan KB,    |
|  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  |                  | 61,69           |               | 62,76   | 64,62 |          | 63,82        | 0  |          | 64,88        |    |          | 65,95        | 65,95      |            | 67,02                 | 67,02  |            | BPPR dan KB,    |
| Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan       | Percentase lembaga unit pelayanan terpadu perempuan dan anak                    | %                | 40              | 90            | 70  | 95,38 |          | 50           | 75 | 70       | 55           | 80 | 373      | 61           | 85         | 90         | 67                    | 90     | 90         | 73 BPPR dan KB. |
| Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan    | Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan                        | Kali             | 3               | 4             | 3   | 1     |          | 78           | 4  | 2        | 84           | 4  | 1        | 92           | 4          | 4          | 101                   | 4      | 4          | 111 BPPR dan KB |
|  | Percentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender                        | %                | 60              | 50            | 75  | 75    |          | 362          | 85 | 85       | 398          | 95 | 95       | 438          | 28         | 28         | 482                   | 50     | 50         | 530 BPPR dan KB |
| Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak              | Percentase organisasi perempuan yang aktif                                      | %                | 60              | 90            | 8   | 57    |          | 345          | 10 | 57       | 380          | 12 | 54       | 417          | 85         | 85         | 459                   | 90     | 90         | 505 BPPR dan KB |
| Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan              | Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan | Kali pertemuan   | 5               | 13            | 5   | 5     |          | 392          | 7  | 5        | 431          | 9  | 9        | 474          | 11         | 11         | 521                   | 13     | 13         | 574 BPPR dan KB |
|  | Percentase industri rumahan yang dikelola perempuan yang aktif                  | %                |                 |               |   |       |          |              |    |          |              |    |          |              |            |            | 85                    |        |            | 90 BPPR dan KB  |
|  | Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan                                | Kasus            | 0               | 445           |   |       |          |              |    |          |              |    |          |              |            |            | 445                   |        |            | 445 BPPR dan KB |
| Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak                    | Percentase kelembagaan anak yang aktif  | Sistem Informasi | 1               | 1             | 1   | 1     |          | 63           | 1  | 1        | 69           | 1  | 1        | 76           | 1          | -          | -                     | 1      | -          | BPPR dan KB     |
|  |   | %                | 60              | 90            | -   | -     |          | -            | -  | -        | -            | -  | -        | -            | -          | -          | 85                    | 84     | -          | 90 BPPR dan KB  |
|  | Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak                                     | Kali pertemuan   | 5               | 9             | 5   | 4     |          | 376          | 6  | 6        | 414          | 7  | 7        | 455          | 8          | -          | -                     | 8      | -          | BPPR dan KB     |
|  |   | %                | 25              |               | -   | -     |          | -            | -  | -        | -            | -  | -        | -            | -          | -          | 557                   | 500    |            | 557 BPPR dan KB |
| <b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>                   |   |                  |                 |               |   |       |          | <b>1,024</b> |    |          | <b>1,129</b> |    |          | <b>1,239</b> |            |            | <b>1,363</b>          |        |            | <b>1,500</b>    |
| <b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB</b>                         |   |                  |                 |               |   |       |          | <b>1,024</b> |    |          | <b>1,129</b> |    |          | <b>1,239</b> |            |            | <b>1,363</b>          |        |            | <b>1,500</b>    |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |         |               |         |               |          |               |         |               |            |            |          | RP. (Jt)      | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                    |             |
|---|---|--------|-----------------|---------------|---|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|   |   |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |         |               | 2012    |               |          | 2013          |         |               | 2014       |            |          | TARGET        | 2015                  |                    |             |
|   |   |        |                 |               | T   | R       | RP. (Jt)      | T       | R             | RP. (Jt) | T             | R       | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | SBLM PRBHN    | STLH PRBHN            |                    |             |
|   | Laju Pertumbuhan Penduduk   | %      | 1.34            |               | 1.1   | 102     |               | 1.3     | 1.34          |          | 1.27          | 1.34    |               |            | 1.1        |          |               | 1.1                   | BPPr KB            |             |
| Keluarga Berencana  | Persentase ketersediaan informasi KB pada masyarakat                                  | %      | 60              | 100           | 70  | 70      | 196           | 80      | 80            | 216      | 90            | 90      | 237           | 95         | -          | -        | 100           | -                     | - BPPR dan KB      |             |
|   | Informasi KB  | Kali   | 1               | 9             | 2   | 9       | 166           | 5       | 9             | 183      | 7             | 1       | 201           | 9          | -          | -        | 9             | -                     | - BPPR dan KB      |             |
|   | Jumlah akseptor KB  | PUS    | 53,191          | 151,693       | 170,781                                       | 198,624 |               | 188,375 | 169,624       |          | 207,782       | 154,034 |               | 229,188    | 151,693    | 482      | 252,799       | 151,693               | 530                | BPPr KB     |
| Pelayanan Alat Kontrasepsi  | Tersedianya informasi pelayanan kontrasepsi   | Kali   | 1               | 10            | 2   | 1       | 430           | 4       | 4             | 474      | 6             | 5       | 521           | 8          | 8          | 573      | 10            | 10                    | 630                | BPPR dan KB |
| Kesehatan reproduksi remaja   | Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi                            | %      | 60              | 100           | 80  | 85      | 67            | 85      | 85            | 74       | 90            | 90      | 81            | 95         | 95         | 89       | 100           | 100                   | 98                 | BPPR dan KB |
| Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat                                      | Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak   |        | 1               | 5             | 1   | 1       | 125           | 2       | 1             | 138      | 3             | 1       | 151           | 4          | 4          | 166      | 5             | 5                     | 183                | BPPR dan KB |
| Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga Bina Balita   | Persentase tersedianya tenaga pendamping  | %      | 100             | 100           | 80  | 30      | 40            | 85      | 85            | 44       | 90            | 90      | 48            | 95         | 95         | 53       | 100           | 100                   | 59                 | BPPR dan KB |
| <b>SOSIAL</b>   |   |        |                 |               |   |         | <b>33,493</b> |         | <b>39,002</b> |          | <b>43,269</b> |         | <b>46,323</b> |            |            |          | <b>43,538</b> |                       |                    |             |
| <b>DINAS SOSIAL</b>   |   |        |                 |               |   |         | <b>32,463</b> |         | <b>37,869</b> |          | <b>42,022</b> |         | <b>44,952</b> |            |            |          | <b>42,030</b> |                       |                    |             |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                       | bln    |                 | 60            | 12  | 12      | 2,280         | 12      | 12            | 3,216    | 12            | 12      | 3,145         | 12         | 12         | 3,244    | 12            | 12                    | - Dinas Sosial     |             |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Pelayanan Pemeliharaan  | Tahun  |                 | 5             | 1   | 1       | 1,011         | 1       | 1             | 2,439    | 1             | 1       | 3,481         | 1          | 1          | 2,839    | 1             | 1                     | - Dinas Sosial     |             |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Peningkatan disiplin aparat   | Tahun  |                 | 5             | 1   | 1       | 110           | 1       | 1             | 97       | 1             | 1       | 100           | 1          | 1          | 110      | 1             | 1                     | - Dinas Sosial     |             |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur   | Meningkatnya kapasitas SDM aparat   | Tahun  |                 | 5             | 1   | 1       | 6             | 1       | 1             | 24       | 1             | 1       | 21            | 1          | 1          | 10       | 1             | 1                     | - Dinas Sosial     |             |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan  | Meningkatnya tertiib administrasi keuangan  | Tahun  |                 | 5             | 1   | 1       | 349           | 1       | 1             | 515      | 1             | 1       | 539           | 1          | 1          | 540      | 1             | 1                     | - Dinas Sosial     |             |
| Program Eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)                 | Eks Korban Narkoba dan eks penyakit sosial yang telah mengikuti rehabilitasi/ mandiri | Orang  |                 | 40            | 40  | 40      | 2,645         | 40      | 40            | 2,909    | 40            | 40      | 3,200         | 40         | 40         | 3,520    | 40            | 40                    | 3,872 Dinas Sosial |             |
| Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial   | PSKS/LKS yang berkompotensi dan melakukan pelayanan kepada PMKS                       | %      | N/A             | 100           | 70  | 70      | 42            | 80      | 100           | 46       | 85            | 100     | 51            | 90         | 90         | 56       | 100           | 100                   | 61 Dinas Sosial    |             |
| Pemberdayaan Fakir Misik, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Fakir misik, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya yang mandiri                   | Orang  | N/A             | 6,000 (K)     | 4,500   | 4,691   | 15,263        | 4750    | 4,833         | 16,789   | 5,000         | 4,700   | 18,468        | 5,500      | 4,850      | 20,314   | 6,000         | 6,000                 | 22,346 Dinsos      |             |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN       | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |              |      |       |               |      |       |              |            |            |               | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |              |                |
|--|--|--------------|-----------------|----------------|---|-------|--------------|------|-------|---------------|------|-------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------------------|--------------|----------------|
|  |  |              | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |       |              | 2012 |       |               | 2013 |       |              | 2014       |            |               | TARGET   | 2015                  |              |                |
|  |  |              |                 |                | T   | R     | RP. (Jt)     | T    | R     | RP. (Jt)      | T    | R     | RP. (Jt)     | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)      | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN   |                |
| Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                    | Aksesibilitas yang memadai bagi PMKS   | %            | N/A             | 100            | 70  | 70    | 2,000        | 80   | 80    | 2,200         | 90   | 90    | 2,420        | 100        | 100        | 2,662         | 100      | 100                   | 2,928        | Dinas Sosial   |
| Pembinaan Anak Terlantar   | Kemandirian anak terlantar   | Jumlah Panti | 2               | 2              | 2   | 2     | 3,116        | 2    | 2     | 3,428         | 2    | 2     | 3,771        | 2          |            | 4,148         | 2        |                       | 4,563        | Dinas Sosial   |
|  |  | Orang        | 360             | 360            |   | 360   |              |      | 360   |               |      | 360   |              |            | 360        |               |          | 360                   |              |                |
| Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma                     | Kemandirian penyandang disabilitas   | Jumlah Panti | 2               | 2              | 2   | 2     | 2,147        | 2    | 2     | 2,362         | 2    | 2     | 2,598        | 2          |            | 2,858         | 2        |                       | 3,144        | Dinas Sosial   |
|  |  | Orang        | 150             | 150            |   | 150   |              |      | 150   |               |      | 150   |              |            | 150        |               |          | 150                   |              |                |
| Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo                                | - Lanjut usia yang mandiri/ potensi<br>- Anak asuh yang menamatkan pendidikan SLTA | Jumlah Panti | 2               | 2              | 2   | 2     | 3,494        | 2    | 2     | 3,844         | 2    | 2     | 4,228        | 2          |            | 4,651         | 2        |                       | 5,116        | Dinas Sosial   |
|  |  | Orang        | 155             | 155            |   | 155   |              |      | 155   |               |      | 155   |              |            | 155        |               |          | 155                   |              |                |
|  |  | Orang        | 180             | 180            | 180   | 180   |              |      | 180   |               |      | 180   |              |            | 180        |               |          | 180                   |              |                |
| <b>BIRO BINSOS</b>   |  |              |                 |                |   |       | <b>1,030</b> |      |       | <b>1,133</b>  |      |       | <b>1,247</b> |            |            | <b>1,371</b>  |          |                       | <b>1,508</b> |                |
| Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial                             | Sinkronisasi program Pembangunan kesejahteraan sosial                              | Kali         | N/A             | 6              | 6   | 6     | 850          | 6    | 6     | 935           | 6    | 6     | 1,029        | 6          |            | 1,131         | 6        |                       | 1,244        | Biro Binsos    |
| Pengelolaan dan Penanganan dampak Bencana Alam                     | Terlaksananya program rehabilitasi sosial pasca bencana alam                       | Kab/ Kota    | N/A             | 11             | 11  | 11    | 90           | 11   | 18    | 99            | 11   | 11    | 109          | 11         |            | 120           | 11       |                       | 132          | Biro Binsos    |
| Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat                               | Terlaksananya koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat                  | Kali         | N/A             | 43             | 4   | 4     | 90           | 6    | 6     | 99            | 9    | 9     | 109          | 12         |            | 120           | 12       |                       | 132          | Biro Binsos    |
| <b>KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>                            |  |              |                 |                |   |       | <b>9,540</b> |      |       | <b>10,056</b> |      |       | <b>9,834</b> |            |            | <b>10,165</b> |          |                       | <b>8,338</b> |                |
| <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                         |  |              |                 |                |   |       | <b>9,540</b> |      |       | <b>10,056</b> |      |       | <b>9,834</b> |            |            | <b>10,165</b> |          |                       | <b>8,338</b> |                |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                    | %            | 85              | 85             | 85  | 77,68 | 1,904        | 85   | 87,55 | 1,838,77      | 85   | 90,97 | 1,868,88     | 85         | 85         | 2,323,96      | 85       | 85                    | 2,630,34     | Disnaker-trans |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | %            | 85              | 85             | 85  | 87,98 | 1,351        | 85   | 89,5  | 2,558,51      | 85   | 91,98 | 2,096,71     | 85         | 85         | 1,692,32      | 85       | 85                    | 1,913,76     | Disnaker-trans |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur                                      | %            | 85              | 85             | 85  | 94,05 | 121          | 85   | 82,21 | 111,30        | 85   | 99,71 | 86,80        | 85         | 85         | 80,1          | 85       | 85                    | 114,50       | Disnaker-trans |
| Fasilitasi Purna Tugas PNS   | Meningkatnya fasilitas Purna Tugas PNS   | %            | 85              | 85             | 85  |       | -            | 85   | 100   | 542,50        | 85   |       | -            | 85         | 85         | -             | 85       | 85                    | -            | Disnaker-trans |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya Wawasan dan kemampuan / kapasitas SDM aparatur                        | %            | 85              | 85             | 85  | 54,50 | 10           | 85   | 17,41 | 13,50         | 85   | 72,24 | 24,50        | 85         | 85         | 11,4          | 85       | 85                    | 18,00        | Disnaker-trans |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja dan sistem pelaporan kinerja SKPD                     | %            | 85              | 85             | 85  | 94,92 | 714          | 85   | 97,66 | 758,30        | 85   | 98,08 | 759,21       | 85         | 85         | 743,47        | 85       | 85                    | 729,61       | Disnaker-trans |
| Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja                | Persentase tenaga kerja yang berkompeten   | Orang        | 416             | 2080           | 416   | 1,184 | 3,318        | 416  | 1157  | 2,633,76      | 416  | 1,173 | 2,827,8      | 90,91      | 90,85      | 3,318,4       | 416      | 90,90                 | 318,20       | Disnaker-trans |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |        |          |        |         |          |         |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                      |               |
|--|--|------------|-----------------|---------------|---|--------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|----------|---------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|  |  |            |                 |               | 2011  |        |          | 2012   |        |          | 2013   |         |          | 2014    |            |            | RP. (Jt)   | 2015                  |                      |               |
|  |  |            | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R      | RP. (Jt) | T      | R      | RP. (Jt) | T      | R       | RP. (Jt) | TARGET  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                      |               |
|  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat                                    | Orang      | -               | -             | -   | -      | -        | -      | -      | -        | 350    | 350     | -        | -       | -          | -          | -          | -                     | · Disnakertrans      |               |
|  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan  | Orang      | -               | -             | -   | -      | -        | -      | -      | -        | 150    | 150     | -        | -       | -          | -          | -          | -                     | · Disnakertrans      |               |
| Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha                   | Persentase serapan tenaga kerja sektor formal  | Orang      | 3500            | 14100         | 2,350   | 879    | 1,270    | 2,500  | 2500   | 469.00   | 2,750  | 6,658   | 791.37   | 8.79    | -          | -          | 3.500 org  | -                     | · Disnakertrans      |               |
|  |  | %          | -               | -             | -   | -      | -        | -      | -      | -        | -      | -       | -        | -       | 10.75      | 645.3      | -          | 20.17                 | 815.67 Disnakertrans |               |
| Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                      | Berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial   | Kasus      | 15              | 10            | 15  | 8      | 702      | 10     | 10     | 814.41   | 20     | 41      | 365.83   | 14      | 12         | 422.5      | 6          | 10                    | 409.99 Disnakertrans |               |
|  | Jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker   | orang      | 50,000          | 110,000       | 50,000  | 91,472 |          | 60,000 | 93,572 |          | 95,226 | 103,184 |          | 103,184 | 103,184    |            | 103,184    | 110,000               |                      | Disnakertrans |
| Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja           | Persentase perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 | Perusahaan | 150             | 28.45         | -   | -      | -        | -      | -      | -        | 150    | 193     | 100.22   | 25.29   | 25.29      | 63.4       | 150        | 28.45                 | 54.12 Disnakertrans  |               |
| Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium | Besaran pengujian lingkungan kerja di perusahaan   | sampel     | 800             | 840           | -   | -      | -        | -      | -      | -        | 800    | 800     | 592.49   | 840     | 840        | 639.4      | 840        | 840                   | 770 Disnakertrans    |               |
|  | Besaran pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan  | orang      | 900             | 900           | -   | -      | -        | -      | -      | -        | 900    | 900     | -        | 900     | 900        | -          | 900        | 900                   |                      | Disnakertrans |
| Gerakan terpadu pensejahteraan fakir miskin                            | Persentase serapan tenaga kerja sektor informal  | Orang      | 240             | 240           | -   | -      | -        | -      | -      | -        | 240    | 240     | 75.00    | 55.71   | 86.77      | 72.6       | 240        | 83.57                 | 411.70 Disnakertrans |               |
| Transmigrasi (pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh)          | Besaran transmigran yang akan dibina   | KK         | 70              | 70            | -   | -      | -        | 70     | 70     | 156.33   | -      | -       | -        | -       | -          | -          | -          | -                     |                      |               |
| Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               | Meningkatnya pemasukan keuangan daerah   | Perusahaan | 40              | 40            | 40  | 40     | 150.00   | 40     | 40     | 160.00   | 40     | 40      | 245.00   | 40      | 40         | 152        | 40         | 40                    | 152 Disnakertrans    |               |
| <b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                   |  |            |                 |               |   |        |          |        |        |          |        |         |          |         |            |            |            |                       |                      |               |
| Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha                   | Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi   | Orang      | N/A             | 221           | 36  | 36     |          | 40     | 27     |          | 44     |         |          | 48      |            |            | 53         |                       | BPM                  |               |
| <b>KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                           |  |            |                 |               |   |        | 9,390    |        |        | 9,179    |        |         | 10,625   |         |            | 13,323     |            |                       | 15,646               |               |
| <b>DINAS KOPERASI DAN UKM</b>  |  |            |                 |               |   |        | 9,390    |        |        | 9,179    |        |         | 10,625   |         |            | 13,323     |            |                       | 15,646               |               |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | %          | 100             | 100           | 20  | 20     | 2,130    | 40     | 40     | 1,049    | 60     | 60      | 913      | 80      | 80         | 1,028      | 100        | 100                   | 1,105 Dinas Koperasi |               |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                    | SATUAN    | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |          |        |        |          |        |        |          |        |            |            | SKPD PENANGGUNG JAWAB |        |                      |                |
|--|--|-----------|-----------------|---------------|---|-------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------|
|  |  |           | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |          | 2012   |        |          | 2013   |        |          | 2014   |            |            | RP. (Jt)              | 2015   |                      |                |
|  |  |           |                 |               | T   | R     | RP. (Jt) | T      | R      | RP. (Jt) | T      | R      | RP. (Jt) | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       | TARGET | SBLM PRBHN           | STLH PRBHN     |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   | %         | 100             | 100           | 20  | 20    | 1,107    | 40     | 40     | 582      | 60     | 60     | 739      | 80     | 80         | 1,189      | 100                   | 100    | 1,076 Dinas Koperasi |                |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur                                  | %         | 100             | 100           | 20  | 20    | 108      | 40     | 40     | 31       | 60     | 60     | 31       | 80     | 80         | 31         | 100                   | 100    | 31 Dinas Koperasi    |                |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                            | %         | 100             | 100           | 20  | 20    | 182      | 40     | 40     | 62       | 60     | 60     | 52       | 80     | 80         | 70         | 100                   | 100    | 90 Dinas Koperasi    |                |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                      | %         | 100             | 100           | 20  | 20    | 313      | 40     | 40     | 249      | 60     | 60     | 291      | 80     | 80         | 395        | 100                   | 100    | 425 Dinas Koperasi   |                |
| Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                          | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi                     |           |                 |               |   |       | 524      |        |        | 825      |        |        | 935      |        |            | 1,125      |                       |        | 1,215                |                |
|  | - Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit)         | Unit      | 38              | 237           | 41  | 45    |          | 44     | 51     |          | 47     | 47     |          | 51     | 51         |            | 54                    | 54     |                      | Dinas Koperasi |
|  | - Jumlah Koperasi yang bersertifikasi (Unit)                   | Unit      | 0               | 25            | 5   | 0     |          | 10     | 20     |          | 15     | 20     |          | 20     | 20         |            | 25                    | 25     |                      | Dinas Koperasi |
|  | - Penurunan koperasi tidak aktif                               | % / Tahun | 2               | 2             | 2   | 1.7   |          | 2      | 3.05   |          | 2      | 4.17   |          | 2      | 2          |            | 2                     | 2      |                      | Dinas Koperasi |
|  | - Jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel (unit)        | Unit      | 18              | 30            | 20  | 16    |          | 22     | 31     |          | 24     | 19     |          | 27     | 27         |            | 30                    | 30     |                      | Dinas Koperasi |
| Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK        | Meningkatnya kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK   |           |                 |               |   |       | 990      |        |        | 1,020    |        |        | 1,050    |        |            | 1,050      |                       |        | 1,050                |                |
|  | - Jumlah pengelola Koperasi dan IKM yang di latih              | Orang     | 120             | 600           | 200   | 180   |          | 300    | 500    |          | 400    | 400    |          | 500    | 500        |            | 600                   | 180    |                      | Dinas Koperasi |
|  | - Jumlah Aparatur pembina yang di latih                        | Orang     | 90              | 600           | 120   | 90    |          | 240    | 180    |          | 360    | 0      |          | 450    | 450        |            | 600                   | 60     |                      | Dinas Koperasi |
|  | - Jumlah UMK yang dilatih (orang)                              | Orang     | 90              | 540           | 180   | 180   |          | 270    | 300    |          | 360    | 360    |          | 450    | 450        |            | 540                   | 120    |                      | Dinas Koperasi |
| Peningkatan Dukungan dan Akses Permodalan UMKMK                    | Meningkatnya permodalan UMKMK                                  | unit      | 7,000           | 13,000        | 9,000   | 9,000 | 2,000    | 10,000 | 10,932 | 2,400    | 11,000 | 11,930 | 2,620    | 12,000 | 1,200      | 2,862      | 13,000                | 13,000 | 3,128 Dinas Koperasi |                |
| Program Terpadu Peningkatan Kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil | Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil        | UMK       | 0               | 950           | 190   | 190   | 1,160    | 380    | 2,229  | 1,740    | 570    | 644    | 2,610    | 760    | 760        | 3,915      | 950                   | 950    | 5,872 Dinas Koperasi |                |
| Peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Pembentukan UMKMK      | Meningkatnya lembaga keuangan non bank dalam pembentukan UMKMK | Unit      | 20              | 70            | 30  | 36    | 219      | 40     | 82     | 531      | 50     | 76     | 644      | 60     | 60         | 858        | 70                    | 70     | 774 Dinas Koperasi   |                |
| Pengembangan Kemitraan UMKMK                                       | Meningkatnya kemitraan dan kualitas promosi pemasaran          | % / Thn   | 15              | 25            | 17  | 17    | 140      | 19     | 53.49  | 160      | 21     | 2.28   | 180      | 23     | 23         | 200        | 25                    | 25     | 240 Dinas Koperasi   |                |
| Peningkatan Peranan Koperasi dalam Sektor Riil                     | Meningkatnya peranan koperasi dalam sektor riil                | Unit      | 10              | 50            | 15  | 15    | 517      | 22     | 22     | 530      | 30     | 30     | 560      | 40     | 40         | 600        | 50                    | 50     | 640 Dinas Koperasi   |                |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN         | CAPAIAN KINERJA |               |     |              | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |        |          |     |        |          |        |            |            |            |            | SKPD PENANGGUNG JAWAB |              |  |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|-----|--------------|---|-----|--------|----------|-----|--------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--|
|  |   |                | 2011            |               |     | 2012         |   |     | 2013   |          |     | 2014   |          |        | RP. (Jt)   | 2015       |            |            |                       |              |  |
|  |   |                | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R            | RP. (Jt)                                      | T   | R      | RP. (Jt) | T   | R      | RP. (Jt) | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       |              |  |
| PENANAMAN MODAL  |   |                |                 |               |     |              | 3,308   |     |        | 5,014    |     |        | 4,101    |        |            |            | 4,945      |            | 8,262                 |              |  |
| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PPT                           |   |                |                 |               |     |              | 3,308   |     |        | 5,014    |     |        | 4,101    |        |            |            | 4,945      |            | 8,262                 |              |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran  | %              | 0               | 100           | 20  | 20           | 692   | 40  | 40     | 543      | 60  | 60     | 548      | 80     | 80         | 651        | 100        | 100        | 784 BKMP dan PPT      |              |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur   | %              | 0               | 100           | 20  | 20           | 276   | 40  | 40     | 539      | 60  | 60     | 151      | 80     | 80         | 362        | 100        | 100        | 870 BKMP dan PPT      |              |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur   | %              | 0               | 100           | 20  | 20           | 18  | 40  | 40     | 18       | 60  | 60     | 18       | 80     | 80         | 16         | 100        | 100        | 19 BKMP dan PPT       |              |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur   | %              | 0               | 100           | 20  | 20           | 39  | 40  | 40     | 123      | 60  | 60     | 38       | 80     | 80         | 73         | 100        | 100        | 150 BKMP dan PPT      |              |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                      | %              | 0               | 100           | 20  | 20           | 196   | 40  | 40     | 246      | 60  | 60     | 277      | 80     | 80         | 300        | 100        | 100        | 367 BKMP dan PPT      |              |  |
| Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal                             | Penambahan realisasi investasi PMDN/PMS   |                |                 |               |     |              | 1,034   |     |        | 1,804    |     |        | 1,560    |        |            | 1,904      |            |            | 3,673                 |              |  |
|  | Jumlah perizinan/non perizinan yang diterbitkan PT SP   | Izin/non izin  | 0               | 940           | 0   | 8            |   | 10  | 39     |          | 30  | 644    |          |        | 400        | 400        |            | 500        | 500                   | BKMP dan PPT |  |
|  | Realisasi Investasi PMDN  | Milyar Rupiah  | 404.65          | 2,703.<br>65  | 418 | 1,678.<br>38 |   | 439 | 749.93 |          | 461 | 873.76 |          |        | 480        | 480        |            | 501        | 501                   | BKMP dan PPT |  |
|  | Realisasi Investasi PMA   | Juta US \$     | 17.81           | 132.81        | 21  | 65.46        |   | 22  | 86.19  |          | 23  | 136.12 |          |        | 24         | 24         |            | 25         | 25                    | BKMP dan PPT |  |
| Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                        | Meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat dan kerjasama investasi |                |                 |               |     |              | 748   |     |        | 935      |     |        | 965      |        |            | 974        |            |            | 1,999                 |              |  |
|  | Jumlah calon investor   | Calon Investor | 46              | 215           | 19  | 27           |   | 36  | 47     |          | 36  | 32     |          | 38     | 38         |            | 40         | 40         | BKMP dan PPT          |              |  |
|  | Jumlah kesepakatan kerjasama  | Jumlah MoU     | 0               | 10            | 1   | 2            |   | 2   | 2      |          | 2   | 5      |          | 3      | 3          |            | 2          | 2          | BKMP dan PPT          |              |  |
| Penyiapan Potensi Sumberdaya daerah                                | Menyiapkan potensi sumber daya daerah   | Dokumen        | 0               | 9             | 2   | 2            | 305   | 2   | 2      | 806      | 2   | 2      | 544      | 2      | 2          | 665        | 2          | 1          | 400 BKMP dan PPT      |              |  |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>   |   |                |                 |               |     |              | -   |     |        | -        |     |        | -        |        |            | -          |            |            |                       |              |  |
| Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                        | Meningkatnya nilai transaksi dan kontak dagang UMK peserta promosi                                      | Jumlah UMK     | 27              | 25            | 22  | 27           |   | 40  | 40     |          | 25  | 25     |          | 42     | 25         |            | 42         | 25         | Biro Perekonomian     |              |  |
| <b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>   |   |                |                 |               |     |              | 12,718  |     |        | 14,618   |     |        | 16,045   |        |            | 18,058     |            |            | 21,064                |              |  |
| <b>BIRO BINA SOSIAL</b>  |   |                |                 |               |     |              | 7,171   |     |        | 7,888    |     |        | 8,679    |        |            | 9,544      |            |            | 10,498                |              |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN         | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |               |       |     |               |       |     |               |            |            |               | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB               |                                     |                                      |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---|-------|---------------|-------|-----|---------------|-------|-----|---------------|------------|------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   |                | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |               | 2012  |     |               | 2013  |     |               | 2014       |            |               | TARGET   | 2015                                |                                     |                                      |
|  |   |                |                 |               | T   | R     | RP. (Jt)      | T     | R   | RP. (Jt)      | T     | R   | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)      | TARGET   | SBLM PRBHN                          | STLH PRBHN                          |                                      |
| Pengembangan Nilai Budaya  | Terwujudnya pengembangan nilai budaya di masyarakat                                 | %              | N/A             | 100           | 70  | 70    | 785           | 75    | 80  | 863           | 80    |     | 950           | 90         | 90         | 1,045         | 100      | 100                                 | 1,149 Dinas Sosial, Biro Binsos     |                                      |
| Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat                                       | Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat adat                                      | Kali Pelatihan | N/A             | 4             | 4   | 6     | 650           | 4     | 4   | 715           | 4     |     | 787           | 4          | 4          | 865           | 4        | 4                                   | 952 Biro Binsos                     |                                      |
|  | Sinkronisasi program pemerintah dengan lembaga adat                                 | kali           |                 | 12            | 3   | 3     | 1,000         | 4     | 3   | 1,100         | 6     |     | 1,210         | 9          | 9          | 1,331         | 12       | 12                                  | 1,464 Biro Binsos                   |                                      |
| Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama                                       | Meningkatnya pelayanan Jemaah haji  | %              | N/A             | 100           | 100   | 179.1 | 1,651         | 100   | 170 | 1,816         | 100   |     | 1,998         | 100        | 100        | 2,197         | 100      | 100                                 | 2,417 Biro Binsos                   |                                      |
| Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama    | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap Al Qur'an                            | Peringkat      | N/A             | 5             | 4   | 5     | 5             | 1,250 | 5   | 5             | 1,375 | 4   |               | 1,513      | 4          | 4             | 1,664    | 4                                   | 9                                   | 1,830 Biro Binsos                    |
|  |   | %              |                 | 100           | 80  | 80    | 675           | 90    | 80  | 743           | 100   |     | 817           | 100        | 100        | 898           | 100      | 100                                 | 988 Biro Binsos                     |                                      |
| Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan                                     | Meningkatnya syiar agama kepada masyarakat  | %              | N/A             | 100           | 70  | 70    | 860           | 80    | 80  | 946           | 90    |     | 1,041         | 95         | 95         | 1,145         | 100      | 100                                 | 1,259 Biro Binsos                   |                                      |
| Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan | Meningkatnya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan | %              | N/A             | 100           | 70  | 70    | 300           | 80    | 80  | 330           | 90    |     | 363           | 95         | 95         | 399           | 100      | 100                                 | 439 Biro Binsos                     |                                      |
| <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>   |   |                |                 |               |   |       | <b>5,547</b>  |       |     | <b>6,730</b>  |       |     | <b>7,293</b>  |            |            | <b>8,514</b>  |          |                                     | <b>10,566</b>                       |                                      |
| Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya                             | Peningkatan jumlah lembaga seni dan budaya  | Lembaga        | orang           | 2             | 3   | 2     | 2             | 1,970 | 2   | 8             | 2,300 | 3   |               | 2,400      | 3          | 3             | 2,500    | 3                                   | 3                                   | 2,600 Dinas Pendidikan & Kebudayaan  |
|  | Workshop/pelatihan bagi pemangku adat   | orang          |                 | 0             | 100   | -     | -             | -     | -   | -             | -     | -   |               | -          | -          | -             | -        | 100                                 | 300 Dinas Pendidikan & Kebudayaan   |                                      |
| Pengembangan Pendidikan Budaya   | Jumlah kunjungan ke museum Nagari Adityawarman                                      | Kali           | 21              | 30            | 3   | 3     | 431           | 21    | 31  | 900           | 21    |     | 950           | 25         | 25         | 1,576         | 30       | 39                                  | 2,700 Dinas Pendidikan & Kebudayaan |                                      |
|  | Jumlah pelaksanaan praktik pendidikan adat, sejarah dan budaya daerah               | Kali           |                 | 2             | 10  | 5     | 5             | 300   | 6   | 9             | 400   | 7   |               | 500        | 8          | 8             | 650      | 10                                  | 10                                  | 800 Dinas Pendidikan & Kebudayaan    |
| Pengelolaan Kekayaan Budaya  | Jumlah produk warisan budaya yang meningkat kualitasnya                             | Kali           | 3               | 7             | 4   | 4     | 2,846         | 5     | 5   | 3,130         | 6     | 6   | 3,443         | 6          | 6          | 3,788         |          |                                     |                                     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|  |   |                |                 | -             | -   | -     | -             | -     | -   | -             | -     | -   | -             | -          | -          | 7             | 7        | 4,166 Dinas Pendidikan & Kebudayaan |                                     |                                      |
| <b>DINAS SOSIAL</b>  |   |                |                 |               |   |       | -             |       |     | -             |       |     | <b>73</b>     |            |            | -             |          |                                     | -                                   |                                      |
| Pengembangan nilai budaya  | Luas Taman Makam Pahlawan yang terpelihara  | M2             | Paket           | 28.5          | 1948.5  | 28.5  | 28.5          |       | 960 | 960           |       | 960 | 960           | 73         |            |               |          |                                     |                                     | Dinas Sosial                         |
|  |   |                |                 | -             | -   | -     | -             | -     | -   | -             | -     | -   | 1             |            |            | 1             |          | 1                                   |                                     |                                      |
| <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>  |   |                |                 |               |   |       | <b>10,584</b> |       |     | <b>15,085</b> |       |     | <b>22,269</b> |            |            | <b>49,790</b> |          |                                     | <b>53,513</b>                       |                                      |



| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN       | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |      |              |        |        |              |          |          |              |            |          |              | SKPD PENANGGUNG JAWAB |               |                   |
|--|--|--------------|-----------------|---------------|---|------|--------------|--------|--------|--------------|----------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|  |  |              | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |      |              | 2012   |        |              | 2013     |          |              | 2014       |          | RP. (Jt)     | 2015                  |               |                   |
|  |  |              |                 |               | T   | R    | RP. (Jt)     | T      | R      | RP. (Jt)     | T        | R        | RP. (Jt)     | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET       | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN    |                   |
|  | Persentase penyediaan sarana dan prasarana olah raga Sumatera Barat                              |              |                 |               | -   | -    | -            | -      | -      | -            | -        | -        | -            | -          | 21,400   |              |                       | 20,350        |                   |
| Peningkatan Peranserta Kepemudaan                            | Persentase peningkatan penyadaran pemuda   | Keg/Org      | 60              | 100           | 70  | 70   |              | 1/70   | 1/70   | 150          | 1/80     | 1/80     | 191          | 2/95-80    | -        | -            | 2/120-95              | -             | Dispora           |
|  | Persentase peningkatan pemberdayaan pemuda   | Keg/Org      | 0               | 56            | 5   | 0    |              | 2/30-6 | 2/30-4 | 320          | 2/50-100 | 2/50-100 | 383          | 2/196-30   | -        | -            | 3/50-30-130           | -             | Dispora           |
|  | Persentase peningkatan pengembangan pemuda   | Keg/Org      | 60              | 100           | 70  | 70.1 |              | 100    | 100    | 1,063        | 100      | 100      | 930          | 110        | -        | -            | 110                   | -             | Dispora           |
|  | Persentase pemuda Sumatera Barat yang ditingkatkan peransertanya di berbagai kegiatan masyarakat |              |                 |               | -   | -    | -            | -      | -      | -            | -        | -        | -            | -          | 5,885    | -            | -                     | 6,910         |                   |
| Peningkatan Penyadaran Kepemudaan                            | Jumlah organisasi pramuka yang mandiri   | Lemb         | 0               | 20            | 0   | 0    | 795          | -      | -      | 0            | 7        | 7        | 160          | 7          | -        | -            | 20                    | -             | Dispora           |
|  | Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan  |              |                 |               | -   | -    | -            | -      | -      | -            | -        | -        | -            | -          | 876      | -            | -                     | 1,339         |                   |
| Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olah Raga       | Jumlah organisasi pemuda yang mandiri  | Keg/Org/Lemb | 2               | 85            | 2   | 2    | 659          | 80     | 80     | 160          | 50       | 50       | 177          | 70         | -        | -            | 120                   | -             | Dispora           |
|  | Jumlah organisasi olahraga yang mandiri  | Keg/Org/Lemb | 2               | 10            | 2   | 2    |              | -      | -      | 0            | -        | -        | 0            | -          | -        | -            | 2                     | -             | Dispora           |
|  | Persentase kemandirian organisasi pemuda dan olah raga   |              |                 |               | -   | -    | -            | -      | -      | -            | -        | -        | -            | -          | 177      | -            | -                     | 484           |                   |
| Pengembangan Kepemimpinan Pemuda                             | Persentase keterampilan dan semangat wirausaha pemuda  | %/Keg        | N/A             | 100           | 70  | 63   | 2,003        | 80     | 72     | 551          | 85       | 97,18    | 1,205        | 90         | -        | -            | 100                   | -             | Dispora           |
|  | Persentase peningkatan keterampilan dan semangat wirausaha pemuda                                |              |                 |               | -   | -    | -            | -      | -      | -            | -        | -        | -            | -          | 250      | -            | -                     | 330           |                   |
| <b>BIRO BINA SOSIAL</b>                                      |  |              |                 |               |   |      | <b>7,127</b> |        |        | <b>7,840</b> |          |          | <b>8,624</b> |            |          | <b>9,486</b> |                       | <b>10,435</b> |                   |
| Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah Raga                      | Meningkatnya budaya olah raga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat                   | %            | N/A             | 95            | 65  | 58.5 | 6,727        | 75     | 67.5   | 7,400        | 80       |          | 8,140        | 85         | 85       | 8,954        | 95                    | 95            | 9,849 Biro binsos |
| Peningkatan Peranserta Kepemudaan                            | Persentase peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesetiaan masyarakat.           | %            | N/A             | 95            | 65  | 58.5 | 400          | 75     | 67.5   | 440          | 80       |          | 484          | 85         | 85       | 532          | 95                    | 95            | 586 Biro Binsos   |
| <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>              |  |              |                 |               |   |      | <b>6,382</b> |        |        | <b>7,551</b> |          |          | <b>8,669</b> |            |          | <b>9,088</b> |                       | <b>8,417</b>  |                   |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |              |       |       |              |    |      |              |          | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |            |                          |            |
|---|--|--------|-----------------|----------------|---|-------|--------------|-------|-------|--------------|----|------|--------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|
|   |  |        | 2011            |                |   | 2012  |              |       | 2013  |              |    | 2014 |              | RP. (Jt) | 2015       |                       |            |            |                          |            |
|   |  |        | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | T   | R     | RP. (Jt)     | T     | R     | RP. (Jt)     | T  | R    | RP. (Jt)     | TARGET   | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                          |            |
| <b>BADAN KESBANG POL</b>  |  |        |                 |                |   |       | <b>3,479</b> |       |       | <b>3,645</b> |    |      | <b>4,298</b> |          |            | <b>4,699</b>          |            |            | <b>3,396</b>             |            |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                              |        |                 |                |   |       | 527          |       |       | 635          |    |      | 712          |          |            | 782                   |            |            | - Kesbang Limmas         |            |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     | Pelayanan Pemeliharaan   |        |                 |                |   |       | 400          |       |       | 213          |    |      | 467          |          |            | 445                   |            |            | - Kesbang Limmas         |            |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Peningkatan disiplin aparatur  |        |                 |                |   |       | 26           |       |       | 26           |    |      | 19           |          |            | 25                    |            |            | - Kesbang Limmas         |            |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                     | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  |        |                 |                |   |       | 20           |       |       | 20           |    |      | 35           |          |            | 50                    |            |            | - Kesbang Limmas         |            |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan            | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                    |        |                 |                |   |       | 187          |       |       | 198          |    |      | 258          |          |            | 308                   |            |            | - Kesbang Limmas         |            |
| Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan                                | Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan                                | %      | 60              |                | 75  |       | 1,058        | 80    |       | 1,164        | 85 |      | 1,281        | 90       |            | 1,409                 | 95         |            | 1,549 Kesbang Limmas     |            |
| Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan                                     | Jumlah aparat kesbang limmas kabupaten/kota                                  | Org    | 200             |                | 40  |       | 451          | 40    |       | 497          | 40 |      | 546          | 40       |            | 601                   | 40         |            | 661 Kesbang Limmas       |            |
| Pendidikan politik masyarakat   | Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan politik masyarakat            | %      | 70              |                | 75  |       | 645          | 80    |       | 710          | 85 |      | 780          | 90       |            | 859                   | 90         |            | 944 Kesbang Limmas       |            |
| Peningkatan Pemberitasan Maksiat  | Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat                           | %      | N/A             | 20             | 20  | 20    | 165          | 20    | 89.95 | 182          | 20 |      | 200          | 20       | 20         | 220                   | 20         | 20         | 242 Badan Kesbang Limmas |            |
|   | Meningkatnya wawasan aparatur, toga dan tomas                                | %      | N/A             | 20             | 20  | 0     |              |       | 40    | 0            |    | 20   |              |          | 20         | 20                    | 20         | 20         | Badan Kesbang Limmas     |            |
|   | Terlaksananya sosialisasi  | Orang  |                 |                | 50  |       |              |       |       | 40           |    |      |              |          |            | 40                    |            | 40         |                          |            |
| <b>SATPOL PP</b>  |  |        |                 |                |   |       | <b>2,903</b> |       |       | <b>3,906</b> |    |      | <b>4,371</b> |          |            | <b>4,389</b>          |            |            | <b>5,021</b>             |            |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                              |        |                 |                |   |       | 1,078        |       |       | 1,447        |    |      | 1,809        |          |            | 1,756                 |            |            | 2,108 Satpol PP          |            |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     | Pelayanan Pemeliharaan   |        |                 |                |   |       | 139          |       |       | 629          |    |      | 400          |          |            | 325                   |            |            | 331 Satpol PP            |            |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Peningkatan disiplin aparatur  |        |                 |                |   |       | 199          |       |       | 94           |    |      | 21           |          |            | 210                   |            |            | 252 Satpol PP            |            |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                     | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  |        |                 |                |   |       | 41           |       |       | 44           |    |      | 68           |          |            | 77                    |            |            | 85 Satpol PP             |            |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan            | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                    |        |                 |                |   |       | 96           |       |       | 208          |    |      | 439          |          |            | 224                   |            |            | 269 Satpol PP            |            |
| Peningkatan Pemberitasan Maksiat  | Jumlah pelanggaran maksiat yang ditangani                                    | Kasus  |                 |                | 1,313   | 1,508 |              | 1,313 | 1,508 |              | 0  |      |              | 0        | 605        |                       | 0          | 581        |                          | Sat Pol PP |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum | Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum | %      | 75              |                | 80  |       | 1,350        | 85    |       | 1,484        | 90 |      | 1,634        | 95       |            | 1,797                 | 95         |            | 1,976 Sat Pol PP         |            |
| Peningkatan supremasi hukum peraturan daerah                                  | Jumlah perda yang ditegakkan   | Perda  | 0               | 2              | 0   | 0     |              | 0     | 0     |              | 0  |      |              | 0        | 2          |                       | 0          | 2          |                          | Satpol PP  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |                |      |   |                |      |   |                |            |            |                | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                |                          |
|---|--|----------|-----------------|----------------|---|----|----------------|------|---|----------------|------|---|----------------|------------|------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|
|   |  |          | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |    |                | 2012 |   |                | 2013 |   |                | 2014       |            | TARGET         | 2015     |                       |                |                          |
|   |  |          |                 |                | T   | R  | RP. (Jt)       | T    | R | RP. (Jt)       | T    | R | RP. (Jt)       | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN     |                          |
| Peningkatan fungsi perlindungan masyarakat  | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi memahami fungsi Linmas              | Kab/Kota | 0               | 19             | 0   | 0  |                | 0    | 0 |                | 0    |   |                | 0          | 19         |                | 0        | 19                    |                | Satpol PP                |
| Pemeliharaan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat                               | Jumlah Kab/Kota yang tertib dan tenram                                 | Kab/Kota | 0               | 19             | 0   | 0  |                | 0    | 0 |                | 0    |   |                | 0          | 18         |                | 0        | 19                    |                | Satpol PP                |
| <b>OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN</b> |  |          |                 |                |   |    | <b>141,959</b> |      |   | <b>154,938</b> |      |   | <b>165,080</b> |            |            | <b>168,815</b> |          |                       | <b>188,006</b> |                          |
| <b>SETDA (BIRO ORGANISASI)</b>  |  |          |                 |                |   |    | <b>3,276</b>   |      |   | <b>3,526</b>   |      |   | <b>3,916</b>   |            |            | <b>4,327</b>   |          |                       | <b>4,677</b>   |                          |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                        |          |                 |                |   |    | 607            |      |   | 528            |      |   | 619            |            |            | 648            |          |                       | 708            | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Pelayanan Pemeliharaan   |          |                 |                |   |    | 62             |      |   | 83             |      |   | 87             |            |            | 137            |          |                       | 79             | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Peningkatan disiplin aparat  |          |                 |                |   |    | -              |      |   | -              |      |   | -              |            |            | -              |          |                       | -              | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur   | Meningkatnya kapasitas SDM aparat                                      |          |                 |                |   |    | 21             |      |   | 25             |      |   | 25             |            |            | 29             |          |                       | 40             | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                    | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                              |          |                 |                |   |    | 58             |      |   | 109            |      |   | 127            |            |            | 149            |          |                       | 149            | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan manajemen SDM aparat  | Persentase Aparatur bereselon yang dilakukan penilaian                 | %        |                 |                | 50  |    | 398            | 75   |   | 437            | 85   |   | 481            | 95         |            | 529            | 100      |                       | 582            | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah            | Persentase peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah             |          | %               |                | 50  |    | 628            | 75   |   | 691            | 85   |   | 760            | 95         | 95         | 836            | 100      | 100                   | 919            | Setda (Biro Organisasi)  |
| Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur                             | Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP Secara tepat               | SKPD     | 5               | 38 (K)         | 5   | -  | 486            | 10   | - | 535            | 10   |   | 588            | 10         | 10         | 647            | 3        | 3                     | 712            | Setda (Biro Organisasi)  |
| Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)                                  | Persentase pemerintah daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik | %        | N/A             | 100            | 15  | 15 | 1,016          | 45   | - | 1,118          | 75   |   | 1,230          | 85         | 85         | 1,353          | 100      | 100                   | 1,488          | Setda (Biro Organisasi)  |
| <b>SETDA (BIRO BINA SOSIAL)</b>   |  |          |                 |                |   |    | <b>267</b>     |      |   | <b>727</b>     |      |   | <b>804</b>     |            |            | <b>782</b>     |          |                       | <b>782</b>     |                          |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                        |          |                 |                |   |    | 151            |      |   | 355            |      |   | 342            |            |            | 481            |          |                       | 481            | Setda (Biro Bina Sosial) |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Pelayanan Pemeliharaan   |          |                 |                |   |    | 33             |      |   | 242            |      |   | 382            |            |            | 146            |          |                       | 146            | Setda (Biro Bina Sosial) |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Peningkatan disiplin aparat  |          |                 |                |   |    | -              |      |   | -              |      |   | -              |            |            | -              |          |                       | -              | Setda (Biro Bina Sosial) |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |              |      |    |              |      |    |              |          |            |              | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB         |
|--|---|------------|-----------------|---------------|---|----|--------------|------|----|--------------|------|----|--------------|----------|------------|--------------|------------|-------------------------------|
|  |   |            | 2011            |               | 2012  |    |              | 2013 |    |              | 2014 |    |              | RP. (Jt) | 2015       |              |            |                               |
|  |   |            | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R  | RP. (Jt)     | T    | R  | RP. (Jt)     | T    | R  | RP. (Jt)     | TARGET   | SBLM PRBHN | STLH PRBHN   | SBLM PRBHN | STLH PRBHN                    |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur   |            |                 |               |   |    | 28           |      |    | 40           |      |    | -            |          |            |              | 60         |                               |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                     |            |                 |               |   |    | 55           |      |    | 90           |      |    | 80           |          |            |              | 95         |                               |
| <b>SETDA (BIRO PEREKONOMIAN)</b>                                   |   |            |                 |               |   |    | <b>2,738</b> |      |    | <b>3,332</b> |      |    | <b>3,501</b> |          |            | <b>3,748</b> |            | <b>3,849</b>                  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                               |            |                 |               |   |    | 148          |      |    | 205          |      |    | 240          |          |            | 232          |            | 279 Setda (Biro Perekonomian) |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                       |            |                 |               |   |    | 32           |      |    | 322          |      |    | 143          |          |            | 104          |            | 125 Setda (Biro Perekonomian) |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur                                    |            |                 |               |   |    | 12           |      |    | 4            |      |    | 14           |          |            | 14           |            | 17 Setda (Biro Perekonomian)  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya pelaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan        |            |                 |               |   |    | 46           |      |    | 51           |      |    | 104          |          |            | 148          |            | 178 Setda (Biro Perekonomian) |
| Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)               | Tersedianya regulasi sebagai pedoman pengembangan perekonomian daerah         | ran-perda  | 1               | 8             | 1   | 2  | 2,000        | 2    | 1  | 2,200        | 3    |    | 2,400        | 4        | 2          | 2,600        | 5          | 2,600 Biro Perekonomian       |
|  | Pergub tentang kebijakan ekonomi daerah                                       | pergub     | 4               | 28            | 2   | 4  | 500          | 4    | 7  | 550          | 6    |    | 600          | 8        | 8          | 650          | 10         | 8 Biro Perekonomian           |
|  | Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi daerah | Kali Rapat | 60              | 352           | 65  | 68 |              | 65   | 70 |              | 70   |    |              | 72       | 76         |              | 74         | 76 Biro Perekonomian          |
| <b>SETDA (BIRO HUKUM)</b>  |   |            |                 |               |   |    | <b>2,885</b> |      |    | <b>3,266</b> |      |    | <b>3,738</b> |          |            | <b>3,882</b> |            | <b>4,203</b>                  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                               |            |                 |               |   |    | 151          |      |    | 198          |      |    | 248          |          |            | 83           |            | 98 Setda (Biro Hukum)         |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  |            |                 |               |   |    | -            |      |    | 35           |      |    | 163          |          |            | 58           |            | 69 Setda (Biro Hukum)         |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur   |            |                 |               |   |    | -            |      |    | -            |      |    | -            |          |            | -            |            | - Setda (Biro Hukum)          |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur   |            |                 |               |   |    | 63           |      |    | 83           |      |    | 65           |          |            | 70           |            | 84 Setda (Biro Hukum)         |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                     |            |                 |               |   |    | 70           |      |    | 87           |      |    | 114          |          |            | 119          |            | 143 Setda (Biro Hukum)        |
| Pembangunan Materi Hukum   | Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas Produk Hukum Daerah yang kondusif      | Jml Perda  | 11              | 21            | 15  | 15 | 1,045        | 17   | 17 | 1,150        | 19   | 8  | 1,264        | 19       | 19         | 1,391        | 21         | 21 1,530 Setda (Biro Hukum)   |
| Peningkatan Budaya Hukum   | Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat              | %          | -               | 95            | 50  | 50 | 191          | 65   | 65 | 210          | 75   | 75 | 231          | 85       | 85         | 254          | 95         | 95 279 Biro Hukum             |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |              |      |     |              |      |       |              |            |          |              | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |   |
|--|--|--------|-----------------|---------------|---|-----|--------------|------|-----|--------------|------|-------|--------------|------------|----------|--------------|------------|-----------------------|---|
|  |  |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |     |              | 2012 |     |              | 2013 |       |              | 2014       |          |              | TARGET     | 2015                  |   |
|  |  |        |                 |               | T   | R   | RP. (Jt)     | T    | R   | RP. (Jt)     | T    | R     | RP. (Jt)     | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET       | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |   |
| Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM                   | Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan HAM  | %      | -               | 95            | 75  | 75  | 178          | 80   | 80  | 196          | 85   | 85    | 216          | 90         | 90       | 237          | 95         | 95                    | 261 Biro Hukum                                      |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat                                 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN                           | %      | N/A             | 100           | 35  | 35  | 344          | 50   | 50  | 379          | 75   | 75    | 417          | 90         | 90       | 548          | 100        | 100                   | 504 Biro Hukum                                      |
| Sarana Informasi Hukum   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Informasi Hukum   | %      | 95              | 45            | 45  | 60  | 18           | 60   | 75  | 20           | 75   | 75    | 22           | 85         | 85       | 24           | 95         | 95                    | 27 Biro Hukum                                       |
| Peningkatan Penataan Perundang-Undangan                            | Persentase Perundang-Undangan yang Dapat Tersusun dan Terdokumentasikan                            | %      | 95              | 75            | 75  | 80  | 825          | 80   | 85  | 908          | 85   | 72    | 998          | 90         | 90       | 1,098        | 95         | 95                    | 1,208 Biro Hukum                                    |
| <b>SETDA (BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU)</b>  |  |        |                 |               |   |     | <b>1,852</b> |      |     | <b>2,164</b> |      |       | <b>2,561</b> |            |          | <b>3,875</b> |            |                       | <b>4,098</b>  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | %      | 100             | 100           | 100   | 100 | 116          | 100  | 100 | 178          | 100% | 88.47 | 279          | 100        | 100      | 299          | 100        | 100                   | 301 Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau)   |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   | %      | 100             | 100           | 100   | 100 | 116          | 100  | 100 | 115          | 100  | 96.65 | 70           | 100        | 100      | 91           | 100        | 100                   | 52 Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau)    |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur  | %      |                 |               |   |     | -            |      |     | -            |      |       | -            |            |          | -            |            |                       | - Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau)     |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  | %      | 100             | 100           | 100   | 100 | -            | 100  | 100 | -            | 100  | 70.6  | 59           | 100        | 100      | 45           | 100        | 100                   | 50 Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau)    |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan  | %      | 100             | 100           | 100   | 100 | 41           | 100  | 100 | 51           | 100  | 91.53 | 82           | 100        | 100      | 44           | 100        | 100                   | 49 Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau)    |
| Peningkatan Manajemen Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah           | Meningkatnya pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta perbaikan manajemen kepegawaian | %      | 50              | 85            | 65  | 70  | 1,320        | 75   | 75  | 1,520        | 75   | 84.66 | 1,620        | 80         | 80       | 3,071        | 85         | 85                    | 3,288 Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau) |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN       | CAPAIAN KINERJA |     | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |               |          |    |               |          |       |               |          |        |               | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |               |   |  |
|--|--|--------------|-----------------|-----|---|----|---------------|----------|----|---------------|----------|-------|---------------|----------|--------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---|--|
|  |  |              | KONDISI AWAL    |     | KONDISI AKHIR                                 |    | 2011          |          |    | 2012          |          |       | 2013          |          |        | 2014          |            |                       |               |   |  |
|  |  |              | T               | R   | RP. (Jt)                                      | T  | R             | RP. (Jt) | T  | R             | RP. (Jt) | T     | R             | RP. (Jt) | TARGET | SBLM PRBHN    | STLH PRBHN |                       |               |   |  |
| Kerjasama Pembangunan  | Kerjasama pembangunan antar lembaga daerah/wilayah dan luar negeri         | %            | 65              | 100 | 70  | 70 | 259           | 75       | 75 | 300           | 80       | 93,56 | 451           | 90       | 90     | 325           | 100        | 100                   | 358           | Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau) |  |
| <b>SETDA (UMUM)</b>  |  |              |                 |     |   |    | <b>15,805</b> |          |    | <b>16,248</b> |          |       | <b>18,952</b> |          |        | <b>19,771</b> |            |                       | <b>19,860</b> |   |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                            |              |                 |     |   |    | 8,937         |          |    | 9,759         |          |       | 11,178        |          |        | 11,130        |            |                       | 11,675        | Setda (Biro Umum)                             |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   |              |                 |     |   |    | 5,305         |          |    | 5,110         |          |       | 6,191         |          |        | 6,529         |            |                       | 5,780         | Setda (Biro Umum)                             |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur  |              |                 |     |   |    | 419           |          |    | 566           |          |       | 534           |          |        | 460           |            |                       | 495           | Setda (Biro Umum)                             |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  |              |                 |     |   |    | 238           |          |    | 121           |          |       | 202           |          |        | 202           |            |                       | 280           | Setda (Biro Umum)                             |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                  |              |                 |     |   |    | 906           |          |    | 692           |          |       | 847           |          |        | 1,450         |            |                       | 1,630         | Setda (Biro Umum)                             |  |
| <b>SETDA (BIRO PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN)</b>                  |  |              |                 |     |   |    | <b>3,393</b>  |          |    | <b>3,850</b>  |          |       | <b>3,903</b>  |          |        | <b>4,261</b>  |            |                       | <b>3,440</b>  |   |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                            |              |                 |     |   |    | 802           |          |    | 625           |          |       | 482           |          |        | 495           |            |                       | -             | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   |              |                 |     |   |    | 80            |          |    | 468           |          |       | 368           |          |        | 295           |            |                       | -             | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur  |              |                 |     |   |    | -             |          |    | -             |          |       | -             |          |        | -             |            |                       | -             | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  |              |                 |     |   |    | 45            |          |    | 36            |          |       | 48            |          |        | 45            |            |                       | -             | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                  |              |                 |     |   |    | 102           |          |    | 105           |          |       | 159           |          |        | 300           |            |                       | -             | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |
| Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan            | Ketersediaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang akuntabel | Jml Kab/Kota | N/A             | 19  | 3   | 19 | 461           | 5        | 19 | 507           | 5        |       | 557           | 4        | 4      | 613           | 2          | 2                     | 675           | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |
| Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)               | Persentase pemerintah daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik     | %            | N/A             | 100 | 15  | 15 | 1,016         | 45       | -  | 1,118         | 75       |       | 1,230         | 85       | 85     | 1,353         | 100        | 100                   | 1,488         | Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)          |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN               | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |   | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |              |   |   |              |                                     |                   |              |            |   |              | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB                     |  |                                      |
|--|--|--------|-----------------|---|---|----|--------------|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------|---|--------------|----------|---|--|--------------------------------------|
|  |  |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR                             | 2011  |    |              | 2012                                    |   |              | 2013                                |                   |              | 2014       |   |              | TARGET   | 2015                                      |  |                                      |
|  |  |        |                 |   | T   | R  | RP. (Jt)     | T                                       | R                                       | RP. (Jt)     | T                                   | R                 | RP. (Jt)     | SBLM PRBHN | STLH PRBHN                                | RP. (Jt)     | TARGET   | SBLM PRBHN                                | STLH PRBHN                                 |                                      |
| Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah | Persentase peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah           | %      |                 |   | 50  |    | 628          | 75                                      |   | 691          | 85                                  |                   | 760          | 95         |   | 836          | 100      |   | 919 Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)   |                                      |
| Kerjasama Pembangunan  | Kerjasama pembangunan antar lembaga daerah/wilayah dan luar negeri   | %      | 65              | 100                                       | 70  | 70 | 259          | 75                                      | 75                                      | 300          | 80                                  |                   | 300          | 90         | 90  | 325          | 100      | 100                                       | 358 Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)   |                                      |
| <b>SETDA (BIRO HUMAS)</b>  |  |        |                 |   |   |    | <b>1.138</b> |   |   | <b>1.261</b> |                                     |                   | <b>1.611</b> |            |   | <b>1.349</b> |          |   | <b>1.399</b>                               |                                      |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                      |        |                 |   |   |    | 859          |   |   | 922          |                                     |                   | 1.009        |            |   | 967          |          |   | 1.063 Setda (Biro Humas)                   |                                      |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | Pelayanan Pemeliharaan   |        |                 |   |   |    | 178          |   |   | 193          |                                     |                   | 479          |            |   | 251          |          |   | 191 Setda (Biro Humas)                     |                                      |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Peningkatan disiplin aparatur  |        |                 |   |   |    | -            |   |   | -            |                                     |                   | -            |            |   | -            |          |   | - Setda (Biro Humas)                       |                                      |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                  | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                  |        |                 |   |   |    | -            |   |   | 36           |                                     |                   | 14           |            |   | 18           |          |   | 20 Setda (Biro Humas)                      |                                      |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan         | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                            |        |                 |   |   |    | 101          |   |   | 110          |                                     |                   | 109          |            |   | 113          |          |   | 125 Setda (Biro Humas)                     |                                      |
| <b>SETDA (BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH)</b>                                |  |        |                 |   |   |    | -            |   |   | <b>5.201</b> |                                     |                   | <b>5.961</b> |            |   | <b>4.339</b> |          |   | <b>5.862</b>                               |                                      |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran      | bulan  | 0               | 48 bulan                                  |   |    | -            | 12 bulan                                | 12 bulan                                | 2.081        | 12 bulan                            | 12 bulan          | 1.379        | 0          | 12 bulan                                  | 1.244        | 0        | 12 bulan                                  | 1.713 Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |                                      |
|  | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | bulan  | 0               | 12 bulan                                  |   |    | -            | 12 bulan                                | 12 bulan                                |              | 0                                   | 0                 |              | 0          | 0   |              | 0        |   |  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah                         | tahun  | 0               | 120 unit bangunan dan 2 unit kendaraan R4 |   |    | -            | 80 unit bangunan dan 170 unit kendaraan | 80 unit bangunan dan 170 unit kendaraan |              | 120 unit bangunan, 4 unit kendaraan | 120 unit bangunan |              | 0          | 120 unit bangunan dan 2 unit kendaraan R4 |              | 0        | 120 unit bangunan dan 2 unit kendaraan R4 |  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersedianya Alat tulis kantor  | bulan  | 0               | 48 bulan                                  |   |    | -            | 12 bulan                                | 12 bulan                                |              | 12 bulan                            | 12 bulan          |              | 0          | 12 bulan                                  |              | 0        | 12 bulan                                  |  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan                           | bulan  | 0               | 48 bulan                                  |   |    | -            | 12 bulan                                | 12 bulan                                |              | 12 bulan                            | 12 bulan          |              | 0          | 12 bulan                                  |              | 0        | 12 bulan                                  |  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |  | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |      |          |  |  |          |  |  |          |          | RP. (Jt)  | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |  |  |
|--|--|--------|-----------------|--|---|------|----------|--|--|----------|--|--|----------|----------|---|-----------------------|------------|--|--|
|  |  |        | 2011            |  |   | 2012 |          |  | 2013                                       |          |  | 2014   |          | RP. (Jt) | 2015  |                       |            |  |  |
|  |  |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR  | T   | R    | RP. (Jt) | T  | R  | RP. (Jt) | T  | R  | RP. (Jt) | TARGET   | SBLM PRBHN  | STLH PRBHN            | SBLM PRBHN | STLH PRBHN   |  |
|  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                        | bulan  | 0               | 1 unit mesin fotocopy, 1 unit kulkas   |   |      |          | 18 unit                                    | 18 unit                                    |          | 1 unit mesin fotocopy, 1 unit kulkas             |  |          | 0        | 0   |                       | 0          | 0  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)       |
|  | Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu                     | bulan  | 0               | 48 bulan   |   |      |          | 12 bulan                                   | 12 bulan                                   |          | 12 bulan   | 12 bulan   |          | 0        | 12 bulan  |                       | 0          | 12 bulan   | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)       |
|  | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah | bulan  | 0               | 48 bulan   |   |      |          | 12 bulan                                   | 12 bulan                                   |          | 12 bulan   | 12 bulan   |          | 0        | 12 bulan  |                       | 0          |  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)       |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur    | unit   | 0               | 3 unit   |   |      | -        |  |  | 271      | 1 unit kendaraan                                 | 1 unit kendaraan                                 | 596      | 0        | 1 unit  | 479                   | 0          | 1 unit   | 1,377 Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tercapainya ketersediaan meubelair                                   | unit   | 0               | 20 unit meja kursi, 3 unit almari arsip, 1 unit almari pustaka, 7 kursi hadap eselon 3 |   |      |          | 16 unit meja dan 16 unit kursi             | 16 unit meja dan 16 unit kursi             |          | 2 unit lemari arsip, 7 unit kursi hadap eselon 3 | 2 unit lemari arsip, 7 unit kursi hadap eselon 3 |          | 0        | 2 unit filing kabinet, 1 unit almari arsip, 1 unit almari pustaka |                       | 0          | 4 unit meja dan kursi kerja                          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)       |
|  | Tersedianya peralatan komputer dan jaringannya                       | unit   | 0               | 10 unit PC, 11 note-book, 11 unit printer, 1 stabilizer, 4 UPS                         |   |      |          | 4 PC, 4 Note-book, 4 printer, 4 stabilizer | 4 PC, 4 Note-book, 4 printer, 4 stabilizer |          | 2 unit PC, 4 note-book, 3 printer, 1 stabilizer  | 2 unit PC, 4 note-book, 3 printer, 1 stabilizer  |          | 0        | 2 unit PC, 2 Unit laptop, 3 unit printer, 2 unit UPS              |                       | 0          | 2 unit PC, 2 Unit laptop, 3 unit printer, 2 unit UPS | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)       |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |  | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |   |          |                               |                               |           |                                     |                                     |          |            |  |          | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB                              |                                      |   |
|--|---|--------|-----------------|--|---|---|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|--|----------|----------|--|--------------------------------------|---|
|  |   |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR                                      | 2011  |   |          | 2012                          |                               |           | 2013                                |                                     |          | 2014       |  |          | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB                              |                                      |   |
|  |   |        |                 |  | T   | R | RP. (Jt) | T                             | R                             | RP. (Jt)  | T                                   | R                                   | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN   | RP. (Jt) | TARGET   |  |                                      |   |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Tersedianya alat studio, komunikasi dan informasi                               | unit   | 0               | 1 unit TV, 1 unit infocus, 1 unit kamera           |   |   |          |                               |                               |           | 1 unit TV, 1 Unit kamera            | 1 unit TV, 1 Unit kamera            |          | 0          | 1 unit infokus, 1 unit kamera                      |          | 0        | 0  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |
|  | Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional                                    | unit   | 1               | 3 unit   |   |   |          | 1 unit                        | 1 unit                        |           | 2 unit kendaraan R4                 | 2 unit kendaraan R4                 |          | 0          | 2 unit   |          | 0        | 3 unit   | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |
|  | Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringannya                             | unit   | 0               | 18 unit laptop, 18 unit komputer, 18 unit printer  |   |   |          | 9 notebook, 16 PC, 10 printer | 9 notebook, 16 PC, 10 printer |           | 12 unit notebook, 15 PC, 12 printer | 12 unit notebook, 15 PC, 12 printer |          | 0          | 15 unit laptop, 16 unit komputer, 15 unit printer  |          | 0        | 18 unit laptop, 18 unit komputer, 18 unit printer  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |
|  | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor                                   | unit   | 0               | 5 unit AC, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin fotocopy |   |   |          |                               |                               |           | 5 unit AC, 3 unit mesin tik,        | 5 unit AC, 3 unit mesin tik,        |          | 0          | 5 unit AC, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin fotocopy |          | 0        | 5 unit AC, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin fotocopy | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |
|  | Terlaksananya pengolahan, pengawasan aset                                       | bulan  | 0               | 36 bulan   |   |   |          |                               |                               |           | 12 bulan                            | 12 bulan                            |          | 0          | 12 bulan   |          | 0        | 12 bulan   | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur   | buah   | 0               | 10 orang   |   |   | -        |                               |                               | 35        | 2 orang                             | 2 orang                             |          | 13         | 0  | 4 orang  | 66       | 0  | 4 orang                              | 77 Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Jumlah pengawai yang mengikuti sosialisasi dan lokakarya sesuai dengan undangan | kali   | 0               | 6 orang  |   |   |          |                               |                               | 0         | 0                                   |                                     | 0        | 3 orang    |  | 0        | 3 orang  |  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                       | bulan  | 0               | 12 dokumen   |   |   |          |                               |                               | 4 dokumen | 4 dokumen                           |                                     | 323      | 0          | 4 dokumen  | 315      | 0        | 4 dokumen  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |   |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |  | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |      |          |                         |                         |            |   |   |          |          | RP. (Jt)                      | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |            |                                      |
|--|---|----------|-----------------|--|---|------|----------|-------------------------|-------------------------|------------|---|---|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|
|  |   |          | 2011            |  |   | 2012 |          |                         | 2013                    |            |   | 2014                                      |          | RP. (Jt) | 2015                          |                       |            |            |                                      |
|  |   |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR                                    | T   | R    | RP. (Jt) | T                       | R                       | RP. (Jt)   | T   | R   | RP. (Jt) | TARGET   | SBLM PRBHN                    | STLH PRBHN            | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                                      |
|  | Terlaksananya Administrasi kegiatan dan keuangan  | bulan    | 0               | 48 bulan   |   |      |          | 12 bulan                | 12 bulan                | 100        | 12 bulan                                  | 12 bulan                                  |          | 0        | 12 bulan                      |                       | 0          | 12 bulan   | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD                       | bulan    | 0               | 12 dokumen                                       |   |      |          | 3 dokumen               | 3 dokumen               |            | 3 dokumen                                 | 3 dokumen                                 |          | 0        | 3 dokument (renja, DPA, DPPA) |                       | 0          | 3 dokumen  | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
| Peningkatan Manajemen Penyelenggaran Pemerintahan Daerah     | Kesesuaian belanja modal SKPD dengan RKBMD dan DKBMD                                    | dokumen  | 0               | 28 dokumen                                       |   |      |          | 7 dokumen/ 25 buah buku | 7 dokumen/ 25 buah buku | 840        | 7 dokumen                                 | 7 dokumen                                 | 1,327    | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersedianya Nilai Aset SKPD yang belum Bernilai   | item     | 0               | 190 item   |   |      |          | 170 item                | 170 item                | 350        | 0   | 0   |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terbitnya Surat Izin Penghunian   | SIP      | 0               | 400  |   |      |          | 100 SIP                 | 100 SIP                 | 85         | 100 SIP                                   | 97 SIP                                    |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlaksananya proses administrasi peneristikafatan dan Terbitnya Sertifikat Kepemilikan | proses   | 0               | 105 persil                                       |   |      |          | 50 persil               | 0                       | 450        | 20 persil                                 | 0   |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersedianya Software Managemen aset terintegrasi dan Upgrade Program GIS                | aplikasi | 0               | 4 aplikasi                                       |   |      |          | 1 aplikasi              | 1 aplikasi              | 250        | 1 unit software untuk 46 SKPD, 1 aplikasi | 1 unit software untuk 46 SKPD, 1 aplikasi |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa  |          |                 | 1086 paket                                       |   |      |          |                         |                         | 0          | 0   |   |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersedianya aplikasi penyusutan aset tetap  |          |                 | 3 aplikasi                                       |   |      |          |                         |                         | 1 aplikasi | 1 aplikasi                                |   |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlabelisasiya aset  |          |                 | 20 persil tanah, 150 unit bangunan, 50 kendaraan |   |      |          |                         |                         | 0          | 0   |   |          | -        | -                             | -                     | -          | -          | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN               | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN              | CAPAIAN KINERJA |  | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |   |          |                             |                             |          |   |   |          |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |        |                                      |
|--|---|---------------------|-----------------|--|---|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---|---|----------|------------|------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
|  |   |                     | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR  | 2011  |   |          | 2012                        |                             |          | 2013  |   |          | 2014       |            | TARGET                | 2015   |                                      |
|  |   |                     |                 |  | T   | R | RP. (Jt) | T                           | R                           | RP. (Jt) | T   | R   | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       | TARGET | SBLM PRBHN                           |
|  |   | %                   | 0               | 100  | -   | - | -        | -                           | -                           | -        | -   | -   | -        | 85         | 2,236      | 90                    | 2,695  |                                      |
| Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | Tersedianya pedoman standarisasi Barang dan Jasa  | buku                | 0               | 7<br>dokumen   |   |   |          | 42<br>SKPD,<br>1<br>dokumen | 42<br>SKPD,<br>1<br>dokumen | 115      | 2<br>dokumen,<br>2 SK<br>Gub  | 2<br>dokumen,<br>2 SK<br>Gub  | 2,324    | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlaksananya sensus BMD dan Tersedianya buku Laporan Hasil sensus BMD                        | buku                | 0               | 46<br>SKPD<br>dan 1<br>laporan   |   |   |          |                             |                             |          | 46<br>SKPD  | 46<br>SKPD  |          | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terbitnya SK Penghapusan Aset   | SK                  | 0               | 65 SK  |   |   |          | 10                          | 10                          | 150      | 25 SK<br>Gub  | 25 SK<br>Gub  |          | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Tersusunnya Buku Laporan hasil rekonsiliasi, buku laporan semesteran dan tahunan BMD          | buku                | 0               | 16<br>dokumen  |   |   |          | 4<br>dokumen                | 4<br>dokumen                | 325      | 4<br>dokumen  | 4<br>dokumen  |          | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlaksananya Rakor dengan SKPD dan Kab/Kota dan terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD      | kali                | 0               | 3 kali<br>bimtek,<br>46<br>SKPD<br>yang dibina   |   |   |          | 1 kali/<br>80<br>orang      | 1 kali/<br>80<br>orang      | 150      | 1 kali  | 1 kali  |          | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terlaksananya rapat Pembahasan pemindahtempaan dan Terbitnya Berita Acara Pemindahtempaan BMD | kali                | 0               | 22 BA<br>dan 22<br>SK gub<br>tentang<br>hibah  |   |   |          |                             |                             |          | 8 BA<br>dan<br>8 SK<br>Gub  | 8 BA<br>dan<br>8 SK<br>Gub  |          | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  | Terbitnya Surat perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Pinjam Pakai                             | surat<br>perjanjian | 0               | 15<br>perjanjian<br>pinjam<br>pakai,<br>25<br>perjanjian<br>pemanfaatan,<br>1 kali<br>sosialisasi,<br>46 SK<br>penetapan<br>status |   |   |          |                             |                             |          | 15<br>surat<br>perjanjian<br>pinjam<br>pakai,<br>10<br>perjanjian<br>kerjasama<br>pemanfaatan | 15<br>surat<br>perjanjian<br>pinjam<br>pakai,<br>10<br>perjanjian<br>kerjasama<br>pemanfaatan |          | 0          | -          | 0                     | -      | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |   | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |             |               |             |             |               |             |             |               |             | RP. (Jt)    | SKPD PENANGGUNG JAWAB |             |                       |                                      |
|--|---|------------------|-----------------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  |   |                  | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR                           | 2011  |             |               | 2012        |             |               | 2013        |             |               | 2014        |             |                       | RP. (Jt)    | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                      |
|  |   |                  |                 |   | T   | R           | RP. (Jt)      | T           | R           | RP. (Jt)      | T           | R           | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN  | STLH PRBHN  | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN  |                       |                                      |
|  | Tercapainya target rencana aksi penyelesaian permasalahan aset                  |                  |                 | 3 SKPD, 6 kali rapat, 1 laporan capaian |   |             |               |             |             |               | 0           | 0           |               | 0           | -           |                       | 0           |                       | Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah) |
|  |   | %                | 0               | 100                                     | -   | -           | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -           | 100         | 1,805                 | -           | 100                   | 1,890                                |
| <b>SEKRETARIAT DPRD</b>  |   |                  |                 |   |   |             | <b>54,292</b> |             |             | <b>60,335</b> |             |             | <b>61,504</b> |             |             | <b>57,639</b>         |             |                       | <b>69,997</b>                        |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                 |                  |                 |   |   |             | 9,169         |             |             | 12,289        |             |             | 12,910        |             |             | 14,111                |             |                       | 15,523                               |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  |                  |                 |   |   |             | 9,511         |             |             | 9,018         |             |             | 5,951         |             |             | 5,220                 |             |                       | 5,284                                |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur   |                  |                 |   |   |             | 392           |             |             | 380           |             |             | 343           |             |             | 1,990                 |             |                       | 2,189                                |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur   |                  |                 |   |   |             | 531           |             |             | 341           |             |             | 534           |             |             | 693                   |             |                       | 762                                  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                       |                  |                 |   |   |             | 480           |             |             | 677           |             |             | 373           |             |             | 383                   |             |                       | 422                                  |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah                    | Meningkatnya kapasitas dan etos kerja lembaga perwakilan daerah                 | Kali Kunjungan   | N/A             | 21                                      | 15  | 15          | 34,209        | 17          | -           | 37,630        | 19          | -           | 41,393        | 19          | -           | 21                    | -           |                       | Setwan                               |
|  |   | Perda            | -               | 74                                      | -   | -           | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -           | 15          | 35,242                | -           | 21                    | 45,817                               |
| <b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                           |   |                  |                 |   |   |             | <b>31,131</b> |             |             | <b>31,653</b> |             |             | <b>30,980</b> |             |             | <b>32,713</b>         |             |                       | <b>34,566</b>                        |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                 | %                | -               | 100                                     | 20  | 20          | 8,289         | 40          | 40          | 7,436         | 60          | 60          | 6,551         | 80          | 80          | 8,899                 | 100         | 100                   | 8,168                                |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | %                | -               | 100                                     | 20  | 20          | 6,951         | 40          | 40          | 7,592         | 60          | 60          | 7,124         | 80          | 80          | 4,986                 | 100         | 100                   | 5,891                                |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Meningkatnya motivasi semangat kerja dan disiplin aparatur                      | %                | -               | 100                                     | 20  | 20          | 154           | 40          | 40          | 123           | 60          | 60          | 113           | 80          | 80          | 111                   | 100         | 100                   | 111                                  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur                                      | %                | -               | 100                                     | 20  | 20          | 150           | 40          | 40          | 74            | 60          | 60          | 115           | 80          | 80          | 53                    | 100         | 100                   | 53                                   |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                      | %                | -               | 100                                     | 20  | 20          | 1,592         | 40          | 40          | 1,552         | 60          | 60          | 1,618         | 80          | 80          | 1,660                 | 100         | 100                   | 1,638                                |
| Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah           | Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan peanggaran pembangunan | Keterpaten waktu | Tepat Waktu     | Tepat Waktu                             | Tepat Waktu                                   | Tepat Waktu | 4,546         | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 4,628         | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 4,781         | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 5,259                 | Tepat Waktu | Tepat Waktu           | 5,785                                |
|  |   | Opini            | Disclaimier     | WTP                                     | WDP   | WDP         |               |             |             |               | WTP         | WTP         |               |             | WTP         | WTP                   |             | WTP                   | WTP                                  |
| Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota             | Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan kab/kota sesuai dengan ketentuan  | Kab/kota         | 19              | 19                                      | 19  | 19          | 520           | 19          | 19          | 820           | 19          | 19          | 820           | 19          | 19          | 902                   | 19          | 19                    | 992                                  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                             | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |           |              |           |           |              |           |           |              |           |            |               | RP. (Jt)  | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                            |
|--|---|------------|-----------------|---------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
|  |   |            | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |           |              | 2012      |           |              | 2013      |           |              | 2014      |            |               | RP. (Jt)  |                       |                            |
|  |   |            |                 |               | T   | R         | RP. (Jt)     | T         | R         | RP. (Jt)     | T         | R         | RP. (Jt)     | TARGET    | SBLM PRBHN | STLH PRBHN    |           |                       |                            |
| Peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah            | Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah | Orang      | 210             | 600           | 136   | 136       | 705          | 369       | 369       | 952          | 790       | 790       | 1,216        | 0         | 600        | 1,338         | 0         | 600                   | 1,472 DPKD                 |
| Peningkatan Pendapatan Daerah                                      | Persentase peningkatan pendapatan daerah                | %          | -5.2            | 61.92         | 3.42  | 13.69     | 8,225        | 9.64      | 23.82     | 8,476        | 34.58     | 36.22     | 8,642        | 0         | 47.23      | 9,507         | 0         | 61.92                 | 10,457 DPKD                |
|  |   | Rp. (juta) | 1,920,971       | 3,110,525     | 1,986,576                                     | 2,183,959 | 2,106,241    | 2,378,641 | 2,233,479 | 2,161,841    | 2,828,241 | 2,828,241 | 2,828,241    | 2,828,241 | 2,828,241  | 2,828,241     | 3,110,525 |                       |                            |
| <b>INSPEKTORAT PROVINSI</b>  |   |            |                 |               |   |           | <b>7,603</b> |           |           | <b>8,723</b> |           |           | <b>9,438</b> |           |            | <b>10,892</b> |           |                       | <b>11,982</b>              |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran         |            |                 |               |   |           | 1,250        |           |           | 1,432        |           |           | 1,480        |           |            | 1,516         |           |                       | 1,668 Inspektorat Provinsi |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan                                  |            |                 |               |   |           | 254          |           |           | 571          |           |           | 583          |           |            | 1,201         |           |                       | 1,321 Inspektorat Provinsi |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur                           |            |                 |               |   |           | 36           |           |           | 38           |           |           | 31           |           |            | 33            |           |                       | 36 Inspektorat Provinsi    |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                     |            |                 |               |   |           | 86           |           |           | 121          |           |           | 130          |           |            | 174           |           |                       | 192 Inspektorat Provinsi   |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan               |            |                 |               |   |           | 71           |           |           | 64           |           |           | 68           |           |            | 107           |           |                       | 118 Inspektorat Provinsi   |
| Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum                  | Kualitas LKPD   | Opini      | Disclaim-er     | WTP           | WDP   | WDP       | 5,906        | WDP       | WTP       | 6,497        | WTP       | WTP       | 7,146        | WTP       | WTP        | 7,861         | WTP       | WTP                   | 8,647 Inspektorat          |
| <b>KANTOR PENGHUBUNG</b>   |   |            |                 |               |   |           | <b>2,195</b> |           |           | <b>3,576</b> |           |           | <b>3,190</b> |           |            | <b>2,784</b>  |           |                       | <b>3,026</b>               |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran         |            |                 |               |   |           | 1,414        |           |           | 2,028        |           |           | 2,111        |           |            | 1,846         |           |                       | 1,976 Kantor Pen-ghubung   |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan                                  |            |                 |               |   |           | 367          |           |           | 989          |           |           | 395          |           |            | 452           |           |                       | 498 Kantor Pen-ghubung     |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur                           |            |                 |               |   |           | 13           |           |           | 23           |           |           | 343          |           |            | 21            |           |                       | 30 Kantor Pen-ghubung      |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                     |            |                 |               |   |           | 73           |           |           | 68           |           |           | 77           |           |            | 85            |           |                       | 86 Kantor Pen-ghubung      |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan               |            |                 |               |   |           | 328          |           |           | 468          |           |           | 264          |           |            | 380           |           |                       | 436 Kantor Pen-ghubung     |
| <b>BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN</b>                                |   |            |                 |               |   |           | <b>6,268</b> |           |           | <b>5,715</b> |           |           | <b>9,316</b> |           |            | <b>8,281</b>  |           |                       | <b>8,974</b>               |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran         |            |                 |               |   |           | 915          |           |           | 1,381        |           |           | 1,323        |           |            | 1,781         |           |                       | 1,954 Badan Diklat         |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan                                  |            |                 |               |   |           | 2,132        |           |           | 750          |           |           | 3,924        |           |            | 2,040         |           |                       | 2,145 Badan Diklat         |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur                           |            |                 |               |   |           | 38           |           |           | 28           |           |           | 34           |           |            | 67            |           |                       | 49 Badan Diklat            |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                     |            |                 |               |   |           | 45           |           |           | 55           |           |           | 139          |           |            | 90            |           |                       | 95 Badan Diklat            |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan               |            |                 |               |   |           | 149          |           |           | 213          |           |           | 280          |           |            | 325           |           |                       | 355 Badan Diklat           |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |     | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |       |          |       |       |          |             |             |          |             |             | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                            |  |  |  |
|--|--|--------|-----------------|-----|---|----|-------|----------|-------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
|  |  |        | KONDISI AWAL    |     | KONDISI AKHIR                                 |    | 2011  |          |       | 2012  |          |             | 2013        |          |             | 2014 TARGET |          |                       |                            |  |  |  |
|  |  |        | T               | R   | RP. (Jt)                                      | T  | R     | RP. (Jt) | T     | R     | RP. (Jt) | SBLM PRBHNN | STLH PRBHNN | RP. (Jt) | SBLM PRBHNN | STLH PRBHNN |          |                       |                            |  |  |  |
| Pendidikan Kedinasan   | Tingkat kelulusan peserta diklat memuaskan'                              | %      | 5               | 7   | 5   | 6  | 2,989 | 5        | 6.8   | 3,288 | 6        |             | 3,616       | 6        |             | 3,978       | 7        |                       | 4,376 Badan Diklat         |  |  |  |
| <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                    |  |        |                 |     |   |    | 6,712 |          |       | 2,716 |          |             | 2,795       |          |             | 6,971       |          |                       | 7,252                      |  |  |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima              | bulan  |                 |     | 12  | 12 | 1,081 | 12       | 12    | 1,114 | 12       | 12          | 1,327       | 12       | 12          | 1,751       | 12       | 12                    | 1,562 BKD                  |  |  |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                     | bulan  |                 |     | 12  | 12 | 776   | 12       | 12    | 812   | 12       | 12          | 707         | 12       | 12          | 742         | 12       | 12                    | 543 BKD                    |  |  |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Meningkatnya disiplin aparatuar  | bulan  |                 |     | 12  | 12 | 38    | 12       | 12    | 38    | 12       | 12          | 36          | 12       | 12          | 52          | 12       | 12                    | 52 BKD                     |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatatur                                    | bulan  |                 |     | 12  | 12 | 30    | 12       | 12    | 51    | 12       | 12          | 42          | 12       | 12          | 39          | 12       | 12                    | 41 BKD                     |  |  |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan kegiatan      | bulan  |                 |     | 12  | 12 | 289   | 12       | 12    | 321   | 12       | 12          | 293         | 12       | 12          | 258         | 12       | 12                    | 304 BKD                    |  |  |  |
| Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatatur                       | %      | N/A             | 95  | 50  | 50 | 4,498 | 65       | 69.57 | 380   | 75       | 78.17       | 390         | 85       | 85          | 4,129       | 95       | 95                    | 4,750 BKD                  |  |  |  |
| <b>BAPPEDA</b>   |  |        |                 |     |   |    | 2,405 |          |       | 2,646 |          |             | 2,910       |          |             | 3,201       |          |                       | 3,521                      |  |  |  |
| Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                            | Meningkatnya mutu manajemen pelayanan publik yg transparan dan akuntabel | %      | 30              | 100 | 30  | 30 | 2,405 | 50       | 81.82 | 2,646 | 70       | 100         | 2,910       | 90       | 90          | 3,201       | 100      | 100                   | 3,521 Bappeda (UPTB-LPSE)  |  |  |  |
| <b>KORPRI</b>  |  |        |                 |     |   |    | -     |          |       | -     |          |             | -           |          |             | -           |          |                       | 519                        |  |  |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Tersedianya administrasi perkantoran Set DP Korpri                       | %      | 0               | 100 | -   | -  | -     | -        | -     | -     | -        | -           | -           | -        | -           | -           | -        | 100                   | 519 KORPRI                 |  |  |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Meningkatnya sarana dan prasarana Sekretariat DP KORPRI                  | %      | 0               | 100 | -   | -  | -     | -        | -     | -     | -        | -           | -           | -        | -           | -           | -        | 100                   | 169 KORPRI                 |  |  |  |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Terlaksananya disiplin aparatatur dilingkungan Set DP KORPRI             | %      | 0               | 100 | -   | -  | -     | -        | -     | -     | -        | -           | -           | -        | -           | -           | -        | 100                   | 5 KORPRI                   |  |  |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan              | %      | 0               | 100 | -   | -  | -     | -        | -     | -     | -        | -           | -           | -        | -           | -           | -        | 100                   | 75 KORPRI                  |  |  |  |
| Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik                         | Terlaksananya kepemerintahan yang baik di Sekretariat DP KORPRI          | %      | 0               | 100 | -   | -  | -     | -        | -     | -     | -        | -           | -           | -        | -           | -           | -        | 100                   | 230 KORPRI                 |  |  |  |
| <b>KETAHANAN PANGAN</b>  |  |        |                 |     |   |    | 3,775 |          |       | 4,369 |          |             | 5,869       |          |             | 7,515       |          |                       | 10,755                     |  |  |  |
| <b>BADAN KETAHANAN PANGAN</b>                                      |  |        |                 |     |   |    | 3,775 |          |       | 4,369 |          |             | 5,869       |          |             | 7,515       |          |                       | 10,755                     |  |  |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                          | bulan  |                 |     | 12  | 12 | 665   | 12       | 12    | 750   | 12       | 12          | 979         | 12       | 12          | 169         | 12       | 12                    | 900 Badan Kehanahan Pangan |  |  |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN       | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |      |        |          |      |        |          |            |            |          | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                        |                        |
|--|--|--------------|-----------------|----------------|---|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |              | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |        |          | 2012 |        |          | 2013 |        |          | 2014       |            |          | TARGET   | 2015                  |                        |                        |
|  |  |              |                 |                | T   | R      | RP. (Jt) | T    | R      | RP. (Jt) | T    | R      | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN             |                        |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   | bulan        |                 |                | 12  | 12     | 1,086    | 12   | 12     | 872      | 12   | 12     | 541      | 12         | 12         | 847      | 12       | 12                    | 1,245                  | Badan Ketahanan Pangan |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur  | bulan        |                 |                | 12  | 12     | 43       | 12   | 12     | 43       | 12   | 12     | 36       | 12         | 12         | 36       | 12       | 12                    | 45                     | Badan Ketahanan Pangan |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  | bulan        |                 |                | 12  | 12     | 50       | 12   | 12     | 30       | 12   | 12     | 36       | 12         | 12         | 56       | 12       | 12                    | 60                     | Badan Ketahanan Pangan |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan  | bulan        |                 |                | 12  | 12     | 221      | 12   | 12     | 214      | 12   | 12     | 447      | 12         | 12         | 460      | 12       | 12                    | 295                    | Badan Ketahanan Pangan |
| Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan                          | Ketersediaan energi  | Kkal. kap/hr | 2,200           | 2,400          | 50  | 4,569  | 250      | 50   | 5,408  | 300      | 52   | 5,489  | 350      | 55         | 2,400      | -        | 57       | 2,400                 | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Ketersediaan protein   | Grm/Kap.hr   | 57              | 63             | 80  | 109.72 | 250      | 82   | 129.21 | 300      | -    | 129.31 | 350      | -          | 63         | -        | -        | 63                    | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Penganekaragaman pangan yang bila dikonsumsi sesuai dengan daya beli sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi                | %            | 75              | 78             | 80  | 77     | 450      | 82   | 75.8   | 40       | 83   | 76     | 500      | 84         | 77         | -        | 85       | 78                    | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Jumlah kelembagaan pangan masyarakat (LDPM) bertambah  | Gapoktan     | 0               | 12             | 20  | 3      | 400      | 50   | 3      | 600      | 80   | 3      | 700      | 110        | 3          | -        | 140      | 3                     | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi  | Ton          | 30              | 194.8          | 54  | 54     | -        | 20   | 20.8   | 550      | 30   | 30     | 600      | 40         | 30         | -        | 60       | 30                    | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Terbinanya sertifikat prima 2 dan prima 3  | Sertifikat   | 0               | 136            | 16  | 16     |          | 40   | 30     |          | 30   | 30     | 200      | 40         | 30         | -        | 60       | 30                    | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Tertanggulanginya masyarakat yang mengalami rawan pangan   | Kab/Kota     | 0               | 19             | 1   | 1      |          |      | 1      |          | 6    | 6      | 250      | 6          | 6          | -        | 6        | 6                     | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Memperkuat Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein |              |                 |                |   |        |          |      |        |          |      |        |          |            |            |          |          |                       | Badan Ketahanan Pangan |                        |
|  | Ketersediaan energi  | Kkal. kap/hr | -               | -              | -   | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -          | 2,400      | 440      | -        | 2,400                 | 570                    | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Ketersediaan protein   | Grm/Kap.hr   | -               | -              | -   | -      | -        | -    | -      | -        | -    | -      | -        | -          | 63         | -        | -        | 63                    | -                      | Badan Ketahanan Pangan |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN        | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |      |               |    |      |               |    |      |                |            |            |               | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                        |                        |
|--|---|---------------|-----------------|---------------|---|------|---------------|----|------|---------------|----|------|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |               | 2011            |               |   | 2012 |               |    | 2013 |               |    | 2014 |                |            | RP. (Jt)   | 2015          |            |                       |                        |                        |
|  |   |               | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R    | RP. (Jt)      | T  | R    | RP. (Jt)      | T  | R    | RP. (Jt)       | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN    | STLH PRBHN | TARGET                |                        |                        |
| Diversifikasi Pangan   | Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi   | ton ekv beras | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 30         | 683           | 0          | 30                    | 775                    | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Persentase penanganan daerah rawan pangan   | %             | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 60         | 271           | -          | 60                    | 500                    | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Persentasi ketersediaan informasi :   |               |                 |               |   |      |               |    |      |               |    |      |                |            | 1,211      |               |            |                       | 1,345                  | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Pasokan pangan  | %             | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 100        |               |            | 100                   |                        |                        |
|  | Harga pangan  | %             | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 100        |               |            | 100                   |                        |                        |
|  | Stabilitasi harga bahan pangan pokok di tingkat produsen  |               | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | CV ≤ 5%    | 180           | CV ≤ 5%    | 190                   | Badan Ketahanan Pangan |                        |
|  | Persentase penanganan keamanan pangan   | %             | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 80         | 1,872         | -          | 80                    | 2,200                  | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi kelompok dengan mudah dan murah   | Kelompok      | 0               | 204           | 25  | 12   | 160           | 50 | 12   | 320           | 75 | 74   | 380            | 100        | 60         | -             | 100        | 60                    | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Terlaksananya dan tumbuhnya usaha bisnis kelompok pangan lokal  | Kelompok      | 4               | 25            | 10  | 4    | 200           | 20 | 12   | 350           | 30 | 1    | 500            | 40         | 2          | -             | 50         | 2                     | -                      | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar dan pemberdayaan di tingkat masyarakat |               |                 |               |   |      |               |    |      |               |    |      |                |            |            |               |            |                       |                        | Badan Ketahanan Pangan |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                      | Angka konsumsi :  |               |                 |               |   |      |               |    |      |               |    |      |                |            |            | 750           |            |                       | 850                    | Badan Ketahanan Pangan |
|  | Energi  | kkal/kap/hr   | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 2000       |               | 2000       |                       |                        |                        |
|  | Protein   | Gr/kap/hr     | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 52         |               | 52         |                       |                        |                        |
|  | Penurunan konsumsi beras  | %             | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 1          | 110           | 1          | 1,290                 |                        |                        |
|  | Skor Pola Pangan Harapan  | %             | -               | -             | -   | -    | -             | -  | -    | -             | -  | -    | -              | -          | 77         | 430           | 78         | 490                   |                        |                        |
| <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                               |   |               |                 |               |   |      | <b>15,109</b> |    |      | <b>72,653</b> |    |      | <b>111,121</b> |            |            | <b>33,085</b> |            |                       | <b>40,341</b>          |                        |
| <b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                         |   |               |                 |               |   |      | <b>14,485</b> |    |      | <b>71,967</b> |    |      | <b>110,366</b> |            |            | <b>32,255</b> |            |                       | <b>39,428</b>          |                        |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran   |               |                 |               |   |      | 541           |    |      | 755           |    |      | 1,018          |            |            | 860           |            |                       | 900                    | BPM                    |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | Pelayanan Pemeliharaan  |               |                 |               |   |      | 552           |    |      | 564           |    |      | 660            |            |            | 1,235         |            |                       | 1,245                  | BPM                    |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |              |      |    |              |      |    |              |            |            |              | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                      |
|--|--|------------|-----------------|----------------|---|----|--------------|------|----|--------------|------|----|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  |  |            | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |    |              | 2012 |    |              | 2013 |    |              | 2014       |            |              | TARGET     | 2015                  |                                      |
|  |  |            |                 |                | T   | R  | RP. (Jt)     | T    | R  | RP. (Jt)     | T    | R  | RP. (Jt)     | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN   | STLH PRBHN |                       |                                      |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatuer   |            |                 |                |   |    | 24           |      |    | 24           |      |    | 21           |            |            |              | 38         |                       | 45 BPM                               |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatuer   |            |                 |                |   |    | 46           |      |    | 48           |      |    | 57           |            |            |              | 60         |                       | 60 BPM                               |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertiib administrasi keuangan   |            |                 |                |   |    | 271          |      |    | 308          |      |    | 414          |            |            |              | 285        |                       | 295 BPM                              |
| Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan                         | Meningkatkan keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan                           | Kali Rapat | N/A             | 16 (k)         | 4   | 4  | 1,742        | 3    | 4  | 1,916        | 3    |    | 2,108        | 3          |            | 2,318        | 3          |                       | 2,550 BPM                            |
| Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari                | Pembinaan kelompok lokasi penerima bantuan   | Kab        |                 | 5              | 2   | 2  |              | 2    | 2  | 56,000       | 5    | 5  | 90,000       | 5          | 5          | 68           | 5          | 5                     | 90 BPM                               |
|  | Terseleggaranya pemberdayaan masyarakat  | Kali       |                 | 1              | 1   |    | 415          | 1    |    | 457          | 1    |    | 502          | 1          |            | 552          | 1          |                       | 608 BPM                              |
|  | Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat                                       | %          |                 | 100            | 70  | 30 | 740          | 80   | 35 | 814          | 90   |    | 895          | 95         |            | 985          | 100        |                       | 1,083 BPM                            |
|  | Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan masyarakat di daerah  | Kali       |                 | 53             | 36  | 36 | 650          | 40   | 27 | 715          | 44   | 27 | 787          | 48         | 28         | 544          | 53         | 19                    | 400 BPM                              |
|  | Meningkatnya partisipasi masyarakat  | Kab/Kota   | 0               | 19             | 18  | 18 | 147          | 19   | 19 | 162          | 19   |    | 178          | 19         |            | 196          | 19         |                       | 215 BPM                              |
| <b>BIRO PEMERINTAHAN &amp; KEPENDUDUKAN</b>                        |  |            |                 |                |   |    | <b>624</b>   |      |    | <b>686</b>   |      |    | <b>755</b>   |            |            | <b>830</b>   |            |                       | <b>913</b>                           |
| Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari           | Meningkatkan tertiib pengelolaan administrasi pemerintahan Nagari/ Desa/ Kelurahan | %          | N/A             | 100            | 75  | 75 | 624          | 80   | 80 | 686          | 90   |    | 755          | 100        | 100        | 830          | 100        | 100                   | 913 Biro Pemerintahan & Kependudukan |
| Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan nagari              | Meningkatnya Kelembagaan Pemerintahan Nagari/ Desa/ Kelurahan                      | %          | 100             | 100            | 40  | 40 |              | 60   | 60 |              | 80   |    |              | 100        | 100        |              | 100        | 100                   | Biro Pemerintahan & Kependudukan     |
| <b>KEARSIPAN</b>   |  |            |                 |                |   |    | <b>2,703</b> |      |    | <b>2,944</b> |      |    | <b>4,072</b> |            |            | <b>7,818</b> |            |                       | <b>10,037</b>                        |
| <b>BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>                            |  |            |                 |                |   |    | <b>2,703</b> |      |    | <b>2,944</b> |      |    | <b>4,072</b> |            |            | <b>7,818</b> |            |                       | <b>10,037</b>                        |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                    |            |                 |                |   |    | 1,085        |      |    | 1,351        |      |    | 1,761        |            |            | 1,827        |            |                       | 2,552 Badan Pustaka dan Arsip        |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan   |            |                 |                |   |    | 474          |      |    | 363          |      |    | 821          |            |            | 845          |            |                       | 1,153 Badan Pustaka dan Arsip        |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatuer   |            |                 |                |   |    | 49           |      |    | 48           |      |    | 43           |            |            | 45           |            |                       | 110 Badan Pustaka dan Arsip          |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatuer   |            |                 |                |   |    | 31           |      |    | 28           |      |    | 178          |            |            | 155          |            |                       | 300 Badan Pustaka dan Arsip          |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |          |      |    |          |       |    |          |        |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                             |                                     |  |
|--|---|------------------|-----------------|---------------|---|----|----------|------|----|----------|-------|----|----------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |   |                  |                 |               | 2011  |    |          | 2012 |    |          | 2013  |    |          | 2014   |            |            | RP. (Jt)   | 2015                  |                             |                                     |  |
|  |   |                  | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R  | RP. (Jt) | T    | R  | RP. (Jt) | T     | R  | RP. (Jt) | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                             |                                     |  |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan   |                  |                 |               |   |    | 263      |      |    | 273      |       |    | 299      |        |            |            | 298        |                       | 345 Badan Pustaka dan Arsip |                                     |  |
| Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah                  | Jumlah khazanah arsip statis yang terselamatkan   | Kab/Kota         | 4               | 4             | 5   | 4  |          | 5    | 4  |          | -     | -  | -        | -      | 4          | 0          |            | -                     | 4                           | 0                                   | - Badan Pustaka dan Arsip                            |
|  | Dokumen daerah yang terselamatkan   | Dokumen          | -               | -             | -   | -  |          | -    | -  |          | -     | -  | -        | -      | 4          | 1,035      | -          | 4                     | 1,255                       | Badan Pustaka dan Arsip             |  |
|  | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib arsip  | SKPD             | -               | -             | -   | -  |          | -    | -  |          | -     | -  | -        | -      | 2          | 1,644      | -          | 2                     | 1,910                       | Badan Pustaka dan Arsip             |  |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan                 | Optimalnya pelaksanaan kearsipan  | SKPD             | 10              | 42            | 15  | 5  | 801      | 25   | 11 | 881      | 35    |    | 970      | 42     | 42         | -          | 42         | 0                     | -                           | Badan Pustaka dan Arsip             |  |
|  | Orang   | Orang            | 0               | 0             | 0   | 0  | 0        | 0    | 0  | 0        | 0     | 0  | 0        | 0      | 10         | 1,969      |            | 10                    | 2,412                       |                                     |  |
| <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                  |   |                  |                 |               |   |    | 260      |      |    | 2,771    |       |    | 3,034    |        |            |            | 3,324      |                       |                             | 5,643                               |  |
| <b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>               |   |                  |                 |               |   |    | 130      |      |    | 2,641    |       |    | 2,904    |        |            |            | 3,194      |                       |                             | 3,514                               |  |
| Pengembangan Komunikasi dan Informatika                            | Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informasi di Sumbar              | %                | N/A             | 80            | 70  | 70 | 3.000*)  | 72   | -  | 3.500*)  | 75    |    | 4.000*)  | 77     | 77         | 4.250*)    | 80         | 80                    | 4.500*)                     | Dinas Perhubungan, Biro Humas, KPID |  |
|  | Terlaksananya pembinaan komunikasi dan informasi  | Paket            | N/A             | 2(t)          | 1   | 1  |          | 75   | 2  | -        | 2,580 | 2  |          | 2,837  | 2          | 2          | 3,121      | 2                     | 2                           | 3,433                               | Dinas Perhubungan, Biro Humas, Ktr. Penghubung, KPID |
| Pengembangan Data dan Informasi                                    | Ketersediaan data informasi penyelenggaraan komunikasi                                    | Buku             | 0               | 5 (k)         | 1   | 2  |          | 55   | 2  | 2        | 61    | 1  |          | 67     | 1          | 1          | 73         | 1                     | 1                           | 81                                  | Dinas Perhubungan, Biro Humas                        |
| <b>BIRO HUMAS</b>  |   |                  |                 |               |   |    | 130      |      |    | 130      |       |    | 130      |        |            |            | 130        |                       |                             | 130                                 |  |
| Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan              | Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pemberitaan | Kali Pemberitaan | 0               | 60 (k)        | 12  | 14 |          | 130  | 12 | 12       | 130   | 12 |          | 130    | 12         | 12         | 130        | 12                    | 12                          | 130 Biro Humas                      |  |
| <b>KPID</b>  |   |                  |                 |               |   |    | -        |      |    | -        |       |    | -        |        |            | -          |            |                       | 1,999                       |                                     |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran   | %                | 0               | 100           | -   | -  |          | -    | -  | -        | -     | -  | -        | -      | -          | -          | -          | 100                   | 1,170                       | KPID                                |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  | %                | 0               | 100           | -   | -  |          | -    | -  | -        | -     | -  | -        | -      | -          | -          | -          | 100                   | 138                         | KPID                                |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |                |        |        |                |      |       |          |                |            |                | RP. (Jt)                      | SKPD PENANGGUNG JAWAB           |                             |
|--|---|--------|-----------------|---------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------------|------|-------|----------|----------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  |   |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |        |                | 2012   |        |                | 2013 |       |          | 2014           |            |                | RP. (Jt)                      | SKPD PENANGGUNG JAWAB           |                             |
|  |   |        |                 |               | T   | R      | RP. (Jt)       | T      | R      | RP. (Jt)       | T    | R     | RP. (Jt) | SBLM PRBHN     | STLH PRBHN | RP. (Jt)       | TARGET                        |                                 |                             |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                 | %      | 0               | 100           | -   | -      | -              | -      | -      | -              | -    | -     | -        | -              | -          | -              | 100                           | 71 KPID                         |                             |
| Pembinaan dan pengembangan aparatur                                | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur                          | %      | 0               | 100           | -   | -      | -              | -      | -      | -              | -    | -     | -        | -              | -          | -              | 100                           | 10 KPID                         |                             |
| Pengembangan Komunikasi dan Informatika                            | Persentase lembaga penyiaran yang taat aturan                             | %      | 0               | 40            | -   | -      | -              | -      | -      | -              | -    | -     | -        | -              | -          | -              | 40                            | 610 KPID                        |                             |
|  | Persentase FMPM yang berperan aktif                                       | %      | 0               | 50            | -   | -      | -              | -      | -      | -              | -    | -     | -        | -              | -          | -              | 50                            | 610 KPID                        |                             |
| <b>PERPUSTAKAAN</b>  |   |        |                 |               |   |        | <b>2,371</b>   |        |        | <b>3,456</b>   |      |       |          |                |            | <b>5,419</b>   |                               | <b>6,360</b>                    |                             |
| <b>BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>                            |   |        |                 |               |   |        | <b>2,371</b>   |        |        | <b>3,456</b>   |      |       |          |                |            | <b>5,419</b>   |                               | <b>6,360</b>                    |                             |
| Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                | Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca                               | Orang  | 6,575           | 35,000        | 30,000  | 31,453 | 2,371          | 17,000 | 57,737 | 3,456          |      |       |          | 0              | 500        | 5,419          | 0                             | 500                             | 6,360 Badan Pustaka & Arsip |
| <b>URUSAN PILIHAN</b>  |   |        |                 |               |   |        | <b>153,329</b> |        |        | <b>217,869</b> |      |       |          | <b>581,075</b> |            | <b>299,603</b> |                               | <b>320,964</b>                  |                             |
| <b>PERTANIAN</b>   |   |        |                 |               |   |        | <b>108,108</b> |        |        | <b>153,999</b> |      |       |          | <b>495,596</b> |            | <b>207,419</b> |                               | <b>219,752</b>                  |                             |
| <b>DINAS PERTANIAN</b>   |   |        |                 |               |   |        | <b>35,351</b>  |        |        | <b>43,200</b>  |      |       |          | <b>58,893</b>  |            | <b>63,381</b>  |                               | <b>62,886</b>                   |                             |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                           | %      | 0               | 100           | 20  | 20     | 1,877          | 40     | 40     | 2,544          | 60   | 60    | 2,931    | 80             | 80         | 2,719          | 100                           | 100 2,991 Dinas Pertanian       |                             |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  | %      | 0               | 100           | 20  | 20     | 1,394          | 40     | 40     | 1,330          | 60   | 60    | 1,609    | 80             | 80         | 1,206          | 100                           | 100 1,327 Dinas Pertanian       |                             |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur   | %      | 0               | 100           | 20  | 20     | 249            | 40     | 40     | 242            | 60   | 60    | 207      | 80             | 80         | 217            | 100                           | 100 238 Dinas Pertanian         |                             |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                       | %      | 0               | 100           | 20  | 20     | 120            | 40     | 40     | 244            | 60   | 60    | 18       | 80             | -          | -              | 100                           | - Dinas Pertanian               |                             |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                 | %      | 0               | 100           | 20  | 20     | 436            | 40     | 40     | 589            | 60   | 60    | 954      | 80             | 80         | 954            | 100                           | 100 1,097 Dinas Pertanian       |                             |
| Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan       | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian                         | Ton    | 2,273,602       | 2,588,013     | -   | -      | -              | -      | -      | -              | -    | -     | -        | -              | 2,512,634  | 1,200          | -                             | 2,588,013 1,819 Dinas Pertanian |                             |
|  | Menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman                             | %      | 0.4             | 1             | -   | -      | -              | 1      | 1      | 426            | 2    | 1     | 260      | 3              | 1          | 850            | 4                             | 1 900 Dinas Pertanian           |                             |
|  | Bertambahnya persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit unggul     | %      | 30              | 38            | 30  | 30     | 400            | 32     | 31     | 500            | 34   | 34    | 750      | 36             | 36         | 1,000          | 38                            | 38 1,250 Dinas Pertanian        |                             |
|  | Meningkatnya produksi pertanian organik                                   | Ha     | 750             | 2,000         | -   | -      | -              | -      | -      | -              | -    | 1,500 | 1,682    | -              | 1,750      | 1,188          | - 2,000 1,500 Dinas Pertanian |                                 |                             |
| Pemberdayaan Penyuluh Pertanian                                    | Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian untuk pengembangan teknologi | unit   | 20              | 60            | 20  | 40     | 1,200          | 30     | 66     | 1,700          | 40   | 66    | 1,950    | 50             | 50         | 2,200          | 60                            | 60 2,450 Dinas Pertanian        |                             |
|  | Meningkatnya kapasitas penyuluh   | Orang  | 1,496           | 1,496         | 40  | 1,496  | 900            | 60     | 1,496  | 1,800          | 80   | 1,496 | 2,300    | 100            | 60         | 227            | 120                           | 60 227 Dinas Pertanian          |                             |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |         |          |         |         |          |         |         |          |            |            |          | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                        |
|---|---|------------|-----------------|---------------|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------------------|
|   |   |            | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |         |          | 2012    |         |          | 2013    |         |          | 2014       |            |          | TARGET     | 2015                  |                        |
|   |   |            |                 |               | T   | R       | RP. (Jt) | T       | R       | RP. (Jt) | T       | R       | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                        |
| Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian  | Terbangunnya sentra kawasan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan agroindustri                         |            |                 |               |   |         |          |         |         |          |         |         |          |            |            |          |            |                       |                        |
|   | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian   | Kawasan    | 43              | 60            | 40  | 43      | 3,230    | 47      | 60      | 3,550    | 52      | 60      | 3,800    | 56         | 60         | 4,050    | 60         | 60                    | 4,300 Dinas Pertanian  |
|   | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian   | Ton        | 4,092           | 11,031        | 10,191  | 10,603  | -        | 10,395  | 11,873  | 100      | 10,603  | 12,087  | 102      | -          | 10,815     | 104      | -          | 11,031                | 106 Pertanian          |
|   | Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian   | Ton        | 354,262         | 629,618       | 488,978                                       | 471,849 | 1,600    | 524,138 | 495,497 | 1,712    | 559,298 | 547,417 | 1,831    | 594,458    | 594,458    | 1,959    | 629,618    | 629,618               | 2,096 Pertanian        |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian   | Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian   |            |                 |               |   |         |          |         |         |          |         |         |          |            |            |          |            |                       |                        |
|   | Pengembangan sarana dan prasarana UPT Diperta   | Unit/ UPTD | 6               | 6             | 6   | 6       | 650      | 6       | 6       | 650      | 6       | 6       | 650      | -          | 6          | 650      | 6          | 650                   | Dinas Pertanian        |
|   | Terlaksananya cetak sawah   | Ha         | 620             | 5,120         | 750   | 430     | -        | 2000    | 2150    | -        | 1000    | 1,000   | 250      | -          | 500        | 250      | -          | 250                   | Dinas pertanian        |
|   | Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO)   | Unit       | 19              | 47            | 19  | 38      | 6,650    | 32      | 40      | 8,150    | 37      | 42      | 8,650    | 42         | 42         | 9,150    | 47         | 47                    | 9,650 Dinas Pertanian  |
|   | Perluasan areal hortikultura  | Ha         | 50              | 2,955         | 690   | 690     | 3,105    | 940     | 890     | 4,105    | 1,190   | 100     | 5,105    | 1,440      | 300,000    | 6,105    | 1,690      | 300,000               | 7,105 Dinas Pertanian  |
| Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna | Meningkatnya informasi dan penerapan teknologi pertanian  |            |                 |               |   |         |          |         |         |          |         |         |          |            |            |          |            |                       |                        |
|   | Berkembangnya balai alih teknologi pertanian  | Unit       | 1               | 1             | -   | -       | -        | -       | -       | -        | -       | -       | -        | -          | 1          | -        | -          | 1 Dinas Pertanian     |                        |
|   | Terpenuhinya alsintan bagi petani   | %          | 50              | 80            | 70  | 50      | 500      | 75      | 65      | 550      | 80      | 70      | 9,020    | 80         | 750        | 11,011   | 100        | 750                   | 4,500 Dinas Pertanian  |
| Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian   | Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi komoditi pertanian  | Unit       | 5               | 100           | 20  | 10      | 400      | 40      | 20      | 600      | 60      | 10      | 800      | 80         | 80         | 1,000    | 100        | 100                   | 1,200 Dinas pertanian  |
|   | Tersedianya produksi olahan hasil pertanian   | Macam      | 90              | 130           | 90  | 90      | 600      | 115     | 115     | 900      | 140     | 120     | 1,200    | 165        | 125        | 1,500    | 190        | 130                   | 2,000 Dinas Pertanian  |
|   | Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian   | Kebun      | 100             | 620           | 100   | 200     | 200      | 200     | 300     | 400      | 300     | 100     | 600      | 400        | 450        | 800      | 500        | 500                   | 1,000 Dinas Pertanian  |
|   | Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian   | Unit       | 85              | 135           | 10  | 10      | 100      | 20      | 20      | 200      | 30      | 30      | 600      | 40         | 40         | 800      | 50         | 50                    | 1,000 Dinas Pertanian  |
| Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian  | Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian   | unit       | -               | 10            | 2   | 2       | -        | 4       | 5       | 200      | 6       | 5       | 300      | 8          | 2          | 400      | 10         | 2                     | 500 Dinas Pertanian    |
| Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani   | Meningkatnya penerapan teknologi dan pengembangan usaha pertanian melalui gerakan terpadu pencejahteraan petani | KK         | -               | 34,700        | 2,480   | 2,480   | 10,740   | 4,960   | 4,960   | 11,458   | 4,960   | 4,960   | 11,834   | 1670       | 9,920      | 12,210   | 1,528      | 12,400                | 12,710 Dinas pertanian |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |                | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |               |       |     |               |      |     |               |           |                            |               | RP. (Jt)  | SKPD PENANGGUNG JAWAB     |                |                  |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|---|-----|---------------|-------|-----|---------------|------|-----|---------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------|------------------|
|  |   |                  | KON-DISI AWAL   | KON-DISI AKHIR | 2011  |     |               | 2012  |     |               | 2013 |     |               | 2014      |                            |               | TARGET    | 2015                      |                |                  |
|  |   |                  |                 |                | T   | R   | RP. (Jt)      | T     | R   | RP. (Jt)      | T    | R   | RP. (Jt)      | SBLM PRBH | STLH PRBH                  | RP. (Jt)      | SBLM PRBH | STLH PRBH                 |                |                  |
|  |   |                  |                 |                |   |     |               |       |     |               |      |     |               |           |                            |               |           |                           |                |                  |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani                   | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan usaha pertanian                                  |                  |                 |                |   |     |               |       |     |               |      |     |               |           |                            |               |           |                           |                |                  |
|  | Peningkatan kelembagaan Penangkar Benih/Bibit   | Unit             | 86              | 110            | 33  | 50  | 250           | 50    | 96  | 250           | 70   | 70  | 240           | 90        | 90                         | -             | 110       | 0                         | 135            | Dinas pertanian  |
|  | Terfasilitasi petani dalam pembangunan pertanian PUP/LKMA, UPJA dan Penyelia Mitra Tani | kelembagaan/unit | 0               | 8 kelimb,      | 0   | 0   | 0             | 0     | 0   | 0             | 0    | 0   | 0             | 0         | 4 kelembagaan, 30 komputer | 131           | 0         | 4 kelembagaan, 5 komputer | 135            | Dinas pertanian  |
|  | Peningkatan modal usaha petani mandiri  | Klp/Tahun        | 200             | 840            | 25  | 146 | 750           | 35    | 146 | 1,000         | 45   | 228 | 1,250         | 55        | 5 P4S                      | 1,500         | 65        | 4 P4S                     | 1,750          | Dinas Pertanian  |
| <b>DINAS PERKEBUNAN</b>  |   |                  |                 |                |   |     | <b>59,866</b> |       |     | <b>77,211</b> |      |     | <b>85,044</b> |           |                            | <b>93,437</b> |           |                           | <b>105,775</b> |                  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran   | %                | 0               | 100            | 20  | 20  | 561           | 40    | 40  | 806           | 60   | 60  | 850           | 80        | 80                         | 766           | 100       | 100                       | 910            | Dinas Perkebunan |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  | %                | 0               | 100            | 20  | 20  | 376           | 40    | 40  | 1,719         | 60   | 60  | 1,747         | 80        | 80                         | 1,276         | 100       | 100                       | 1,507          | Dinas Perkebunan |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatuar  | %                | 0               | 100            | 20  | 20  | 55            | 40    | 40  | 56            | 60   | 60  | 64            | 80        | 80                         | 59            | 100       | 100                       | 56             | Dinas Perkebunan |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatuar  | %                | 0               | 100            | 20  | 20  | 70            | 40    | 40  | 101           | 60   | 60  | 220           | 80        | 80                         | 100           | 100       | 100                       | 220            | Dinas Perkebunan |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan   | %                | 0               | 100            | 20  | 20  | 173           | 40    | 40  | 414           | 60   | 60  | 567           | 80        | 80                         | 438           | 100       | 100                       | 500            | Dinas Perkebunan |
| Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian                     | KSP Perkebunan  | unit             | 14              | 30             | 14  | 20  | 927           | 17    | 25  | 1,122         | 20   | 22  | 1,358         | 24        | 28                         | 1,640         | 28        | 30                        | 1,988          | Dinas Perkebunan |
|  | Meningkatnya luas tanam komoditi kakao  | Ha               | 84              | 170            | 110   | 117 | 1,594         | 140   | 137 | 1,623         | 160  | 148 | 1,652         | 180       | 155                        | 1,661         | 200       | 165                       | 1,711          | Dinas Perkebunan |
|  | Meningkatnya luas tanam komoditi kopi   | Ha               | 47              | 75             | 55  | 55  | 252           | 60    | 60  | 274           | 65   | 65  | 298           | 70        | 70                         | 324           | 75        | 75                        | 353            | Dinas Perkebunan |
|  | Meningkatnya luas tanaman komoditi karet  | Ha               | 170             | 177            | 170   | 172 | 2400          | 171.5 | 173 | 1800          | 173  | 173 | 1800          | 175       | 175                        | 1,800         | 177       | 177                       | 3,000          | Dinas Perkebunan |
| Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan       | Peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan                                  | %                | 4               | 16             | 4   | 4   | 30,000        | 6     | 6   | 35,000        | 7    | 7   | 37,000        | 2         | 2                          | 40,000        | 2         | 2                         | 45,000         | Dinas Perkebunan |
|  | Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman   | %                | 1               | 15             | 1   | 2   | -             | 1     | 1   | 450           | 1    | 1   | 550           | 3         | 10                         | 650           | 4         | 15                        | 750            | Dinas Perkebunan |
|  | Meningkatnya produksi benih unggul  | %                | 30              | 42             | 30  | 20  | 250           | 32    | 30  | 500           | 40   | 40  | 750           | 4         | 4                          | 1,000         | 4         | 4                         | 1,250          | Dinas Perkebunan |
| Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian        | Peningkatan produksi olahan hasil pertanian   | Ko-modifikasi    | 90              | 190            | 90  | 5   | 180           | 115   | 4   | 230           | 2    | 2   | 155           | 1         | 1                          | 183           | 1         | 1                         | 210            | Dinas Perkebunan |
|  | Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian  | %                | 3               | 15             | 3   | 3   | 700           | 5     | 2   | 6,000         | 8    | 2   | 6,500         | 10        | 2                          | 7,000         | 15        | 2                         | 7,500          | Dinas Perkebunan |
|  | Sertifikasi produk pangan   | Unit             | 2               | 12             | 2   | 7   | 100           | 2     | 2   | 200           | 7    | 2   | 350           | 10        | 1                          | 500           | 13        | 1                         | 650            | Dinas Perkebunan |
|  | Peningkatan jumlah UP3HP/UHP  | Unit             | 10              | 50             | 10  | 15  | 100           | 20    | 25  | 200           | 30   | 2   | 600           | 40        | 12                         | 800           | 50        | 1                         | 1,000          | Dinas Perkebunan |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN    | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |               |       |       |               |       |       |                |        |            |               | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                  |                                       |
|---|--|-----------|-----------------|---------------|---|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|--------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
|   |  |           |                 |               | 2011  |       |               | 2012  |       |               | 2013  |       |                | 2014   |            |               | RP. (Jt)   | 2015                  |                  |                                       |
|   |  |           | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | T   | R     | RP. (Jt)      | T     | R     | RP. (Jt)      | T     | R     | RP. (Jt)       | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN    | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            | TARGET           |                                       |
| Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani   | Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK)                    | KK        |                 | 1,528         | 1,780   | 2,480 | 10,704        | 1,840 | 1,640 | 11,458        | 1,650 | 1,660 | 11,834         | 1,670  | 1,670      | 12,210        | 1,528      | 1,528                 | 12,710           | Dinas Perkebunan                      |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani  | Peningkatan produksi bibit   | %         | 5               | 17            | 5   | 5     | 5,900         | 8     | 8     | 8,400         | 11    | 12    | 10,900         | 14     | 14         | 13,400        | 17         | 17                    | 15,900           | Dinas Perkebunan                      |
|   | Peningkatan kelembagaan Penangkar Benih/Bibit                                  | unit      | 33              | 160           | 33  | 50    | 3,150         | 50    | 60    | 3,650         | 45    | 45    | 4,150          |        | 15         | 4,650         |            | 25                    | 5,150            | Dinas Perkebunan                      |
|   | Perencanaan Penganggaran Monitoring Evaluasi yang terintegrasi dan tepat waktu | % / Tahun | -               | 80            | 60  | 60    | 1,054         | 65    | 60    | 1,138         | 70    | 75    | 1,229          | 80     | 80         | 1,400         | 80         | 90                    | 1,400            | Dinas Perkebunan                      |
| Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian  | Terbentuknya kontrak kerjasama antara gapoktan dengan pengusaha agribisnis     |           |                 | 10            | 2   | 2     | -             | 4     | 5     | 200           | 6     | 6     | 300            | 8      | 8          | 400           | 10         | 10                    | 500              | Dinas Perkebunan                      |
| Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan pertanian   | Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian                                    |           |                 |               |   |       |               |       |       |               |       |       |                |        |            |               |            |                       |                  |                                       |
|   | - perluasan areal pertanian  | %         | 2               | 10            | 2   | 2     | 500           | 4     | 4     | 1,000         | 6     | 6     | 1,250          | 8      | 8          | 1,500         | 10         | 10                    | 1,750            | Dinas Perkebunan                      |
|   | - pengembangan balai benih   | unit      | 1               | 1             | 1   | 1     | -             | 1     | 1     | -             | 1     | 1     | -              | 1      | 1          | -             | 1          | 1                     | -                | Dinas Perkebunan                      |
|   | - evaluasi penggunaan dana kredit  | 0         | 1               | 5             | 1   | 1     | 70            | 2     | 2     | 70            | 2     | 2     | 70             | 3      | 3          | 70            | 4          | 5                     | 70               | Dinas Perkebunan                      |
|   | - peningkatan luas lahan budidaya sesuai                                       | 0         | 870             | 940           | 870   | 870   | 250           | 900   | 900   | 250           | 930   | 930   | 250            | 1      | 960        | 960           | 1          | 990                   | 990              | Dinas Perkebunan                      |
| Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna | Meningkatnya teknologi informasi pertanian                                     |           |                 |               |   |       |               |       |       |               |       |       |                |        |            |               |            |                       |                  |                                       |
| - Terpenuhinya alisintan bagi petani  | %  | 50        | 100             | 70            | 70  | 500   | 75            | 550   | 550   | 80            | 80    | 600   | 85             | 85     | 650        | 90            | 90         | 700                   | Dinas Perkebunan |                                       |
| <b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>   |  |           |                 |               |   |       | <b>11,846</b> |       |       | <b>32,488</b> |       |       | <b>347,655</b> |        |            | <b>46,423</b> |            |                       | <b>46,321</b>    |                                       |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran                               | bulan     |                 | 12            | 12  |       | 683           | 12    | 12    | 1,058         | 12    | 12    | 1,279          | 12     | 12         | 1,741         | 12         | 12                    | 1,966            | Dinas Peter-nakan dan Kesehatan Hewan |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Pelayanan Pemeliharaan   | bulan     |                 | 12            | 12  |       | 289           | 12    | 12    | 2,509         | 12    | 12    | 3,188          | 12     | 12         | 2,245         | 12         | 12                    | 1,965            | Dinas Peter-nakan dan Kesehatan Hewan |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Peningkatan disiplin aparatur  | bulan     |                 | 12            | 12  |       | 56            | 12    | 12    | 56            | 12    | 12    | 56             | 12     | 12         | 54            | 12         | 12                    | 64               | Dinas Peter-nakan dan Kesehatan Hewan |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur   | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  | bulan     |                 | 12            | 12  |       | 185           | 12    | 12    | 75            | 12    | 12    | 208            | 12     | 12         | 59            | 12         | 12                    | 120              | Dinas Peter-nakan dan Kesehatan Hewan |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |         |        |          |        |        |          |            |            |          | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |                                      |
|--|---|--------|-----------------|---------------|---|--------|----------|---------|--------|----------|--------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
|  |   |        | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |        |          | 2012    |        |          | 2013   |        |          | 2014       |            |          | TARGET   | 2015                  |            |                                      |
|  |   |        |                 |               | T   | R      | RP. (Jt) | T       | R      | RP. (Jt) | T      | R      | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN |                                      |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                     | bulan  |                 |               | 12  | 12     | 200      | 12      | 12     | 485      | 12     | 12     | 806      | 12         | 12         | 787      | 12       | 12                    | 830        | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Peningkatan produksi dan mutu pertanian secara berkelanjutan       | Meningkatnya produksi dan mutu pertanian secara berkelanjutan |        |                 |               |   |        |          |         |        |          |        |        |          |            |            | 22,723   |          |                       | 10,344     |                                      |
|  | Tersedianya produksi daging sapi                              | Ton    | 18322           | 64450         | 5,622   | 5,435  |          | 5,017   | 55,858 | 125      | 59,970 | 24,162 | 128      | 62,100     | -          | -        | 64,450   | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersedianya produksi daging                                   | Ton    |                 |               | 5,960   | 52,982 |          | 575,456 | 57,575 |          | 59,970 | 59,882 |          | 62,100     | 61,675     | -        | 64,450   | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Produksi Daging   | %      |                 | 2.99          | -   | -      | -        | -       | -      | -        | -      | -      | -        | 2.99       | -          | -        | 4.49     | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersedianya produksi telur                                    | Ton    |                 |               | 68,750  | 69,590 |          | 70,187  | 72,390 |          | 75,285 | 75,285 |          | 77,000     | -          | -        | 79,870   | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersedianya ternak sapi                                       | ekor   |                 |               | 300   |        | 2,500    | 1100    | 1095   | 12,280   | 900    | 880    | 10,560   | 1400       | -          | -        | 1100     | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersedianya ternak kambing                                    | ekor   |                 |               | 175   |        | 300      | 1000    | 959    | 1,975    | 1,700  | 1,600  | 4,000    | 850        | -          | -        | 300      | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersedianya unggas lokal                                      | ekor   |                 |               | 3000  |        | 300      | 4200    | 4156   | 415      | 6,600  | 6,600  | 830      | 1500       | -          | -        | 1800     | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersedianya anak hasil ET                                     | ekor   | 4               | 20            | 4   | 4      | 150      | 4       | 4      | 150      | 4      | 4      | 150      | 4          | -          | -        | 4        | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian                     | Jumlah kelompok GEPEMP yang difasilitasi                      |        | 17              | 55            | 0   | 0      | -        | 17      | 17     | 1,100    | 14     | 14     | 1,464    | 12         | -          | -        | 12       | -                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | KSP Peternakan  | KSP    | 6               | 14            | 6   | 6      | 1,654    | 8       | 10     | 2,200    | 10     | 10     | 134      | 12         | 0          | -        | 14       | 0                     | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                     | SATUAN         | CAPAIAN KINERJA |     | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |       |          |     |       |          |     |         |          |        |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |  |  |  |
|--|---|----------------|-----------------|-----|---|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-----|---------|----------|--------|------------|------------|-----------------------|--|--|--|
|  |   |                | KONDISI AWAL    |     | KONDISI AKHIR                                 |     | 2011  |          |     | 2012  |          |     | 2013    |          |        | 2014       |            |                       |  |  |  |
|  |   |                | T               | R   | RP. (Jt)                                      | T   | R     | RP. (Jt) | T   | R     | RP. (Jt) | T   | R       | RP. (Jt) | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                       |  |  |  |
|  | persentase Kawasan yang mempunyai fasilitas memadai             | %              | 0               | 0   | 0   | 0   | 0     | 0        | 0   | 0     | 0        | 0   | 0       | 0        | 0      | 50         | -          | 0                     | 58.33                                      | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Tersedianya ternak kambing untuk penambahan populasi di kawasan | ekor           | 200             | 500 | 175   | 175 | 300   | 200      | 200 | 368   | 100      | 110 | 275.000 | 88       | 0      | -          | 100        | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
| Pengamanan Sumberdaya Hewani                                 | Meningkatnya pengamanan sumber daya hewani                      |                |                 |     |   |     |       |          |     |       |          |     |         |          |        | 2,381      |            |                       | 3,376 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |  |
|  | Menurunnya kasus penyakit hewan menular                         | Kasus          | 32              | 20  | 30  | 25  | 600   | 25       | 20  | 500   | 20       | 36  | 400     | 15       | 0      | -          | 10         | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Jumlah penyakit hewan strategis dengan O kejadian               | Jenis penyakit |                 |     |   |     |       |          |     |       |          |     |         |          | 2      | -          | 0          | 2                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Penurunan kasus penyakit hewan menular (flu burung/Al)          | %              |                 |     |   |     |       |          |     |       |          |     |         |          | 5      | -          | 0          | 5                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Tersedianya pusat pelayanan keswan                              | Unit           | 65              | 75  | 65  | 65  | 325   | 68       | 68  | 340   | 70       | 70  | 350     | 73       | 0      | -          | 75         | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan keswan                  | Unit           | 1               | 9   | 1   | 1   | 2,000 | 2        | 2   | 4,000 | 2        | 2   | 4,000   | 2        | 0      | -          | 2          | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Meningkatnya aplikasi teknologi medik veteriner                 | Unit           | 1               | 1   | 1   | 1   | 180   | 1        | 1   | 180   | 1        | 1   | 180     | 1        | 0      | -          | 1          | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian        | Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian                     | Unit           | 1               | 7   | 1   | 4   | 100   | 2        | 7   | 200   | 4        | 4   | 300     | 6        | 0      | -          | 7          | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Peningkatan kualitas UPTD                                       | Unit           | 3               | 4   | 1   | 1   | -     | 2        | 2   | -     | 1        | 1   | 635     | 3        | 0      | -          | 4          | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |
|  | Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO)                           | Unit           | 11              | 20  | 11  | 11  | -     | 0        | 0   | -     | 4        | 4   | -       | 3        | 0      | -          | 2          | 0                     | - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     |  |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |          |       |       |          |         |         |          |            |            |            | SKPD PENANGGUNG JAWAB | RP. (Jt) |     |                                      |
|--|---|---|-----------------|---------------|---|-------|----------|-------|-------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------|-----|--------------------------------------|
|  |   |   | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |          | 2012  |       |          | 2013    |         |          | 2014       |            |            | TARGET                | 2015     |     |                                      |
|  |   |   |                 |               | T   | R     | RP. (Jt) | T     | R     | RP. (Jt) | T       | R       | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |          |     |                                      |
| Peningkatan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian | Fasilitas SKIM kredit bagi petani   | Jenis SKIM  | 2               | 3             | 2   | 2     | -        | 2     | 2     | -        | 2       | 2       | -        | 3          | 0          | -          | 3                     | 0        | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Jumlah produk semen beku  | Dosis   | 80000           | 100000        | 80000   | 80000 | 650      | 90000 | 90000 | 735      | 100,000 | 100,000 | 741      | 100000     | 0          | -          | 100000                | 0        | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani (skim)  | Kelompok  | 5               | 5             | 5   | 5     | 70       | 5     | 5     | 70       | 5       | 0       | 70       | 5          | 0          | -          | 5                     | 0        | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna | Berkembangnya teknologi informasi peternakan dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna |                 |               |   |       |          |       |       |          |         |         |          |            |            | 182        |                       |          | 318 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Jumlah akseptor ET untuk meningkatkan mutu genetik ternak                                 | ekor  | 24              | 144           | 24  | 24    | 150      | 30    | 33    |          | 30      | 30      | 150      | 30         | 0          | -          | 30                    | 0        | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Persentase peternak yang sudah mengimplementasikan embryo transfer pada ternak sapi       | %   | 0               | 0             | 0   | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          | 0.06       | -          | 0                     | 0.07     | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Persentase peternak yang sudah mengimplementasikan inseminasi buatan pada ternak sapi     | %   | 0               | 0             | 0   | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          | 71.41      | -          | 0                     | 89.26    | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Tersebarinya informasi teknologi peternakan   | kali  | 1               | 5             | 1   | 1     | 385      | 1     | 1     | 44       | 1       | 1       | 60       | 1          | 0          | -          | 1                     | 0        | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Meningkatnya nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian                             |   |                 |               |   |       |          |       |       |          |         |         |          |            |            | 362        |                       |          | 470 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan   | kelompok  | 1               | 5             | 0   | 0     | -        | 1     | 1     | 57       | 2       | 2       | 85       | 1          | 0          | -          | 1                     | 0        | -   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Peningkatan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian | Persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan :                |   |                 |               |   |       |          |       |       |          |         |         |          |            |            |            |                       |          |     |                                      |
|  | Daging  | %   | 0               | 0             | 0   | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          | 30         |            |                       | 30       |     |                                      |
|  | Telur   | %   | 0               | 0             | 0   | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          | 30         |            |                       | 30       |     |                                      |
|  | Susu  | %   | 0               | 0             | 0   | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          | 50         |            |                       | 50       |     |                                      |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                         | SATUAN    | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |        |          |      |    |          |              |             |        | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB                |                                      |
|--|---|-----------|-----------------|---------------|---|--------|----------|--------|--------|----------|------|----|----------|--------------|-------------|--------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   |           | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |        |          | 2012   |        |          | 2013 |    |          | 2014         |             |        | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB                |                                      |
|  |   |           |                 |               | T   | R      | RP. (Jt) | T      | R      | RP. (Jt) | T    | R  | RP. (Jt) | STBLM PRBHNM | STLH PRBHNM | TARGET |          |                                      |                                      |
| Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian               | Peningkatan kualitas usaha produk olahan peternakan | kelompok  | 8               | 19            | 8   | 8      | 25       | 10     | 10     | 118      | 14   | 14 | 100      | 17           | 0           | -      | 19       | 0                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian     |           |                 |               |   |        |          |        |        |          |      |    |          |              |             | 1,337  |          | 2,118                                | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Jumlah aktivitas promosi produk peternakan          | Event     | 3               | 3             | 3   | 3      | 385      | 3      | 3      | 176      | 0    | 3  | 176      | 3            | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Terpenuhinya daging yang layak konsumsi             | ton       |                 |               | 36,000  | 36,636 |          | 38,000 | 38,637 |          |      |    | 39,000   |              | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Produk olahan :                                     |           |                 |               |   |        |          |        |        |          |      |    |          |              | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Dendeng   | ton       | 1               | 11            | 1   | 1      |          | 1      | 1      |          | 1.5  |    |          |              | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Rendang   | ton       | 20              | 465           | 20  | 20     |          | 25     | 20     |          | 30   |    |          |              | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Susu  | ton       | 3               | 3             | 1   | 1      |          | 1      | 1      |          | 1.5  |    |          |              | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Operasi pasar komoditi peternakan                   | ko-modidi |                 |               | 3   | 3      | 65       | 3      | 3      | 70       |      | 0  | 100      |              | -           | -      | -        | -                                    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|  | Persentase peternak/Kelompok penerima KKPE          | %         | 0               | 0             | 0   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0    | 0  | 0        | 0.53         | -           | 0.62   |          |                                      |                                      |
| Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petani             | Persentase peternak/Kelompok yang menerima KUPS     | %         | 0               | 0             | 0   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0    | 0  | 0        | 0.05         | -           | 0.06   |          |                                      |                                      |
|  | Jumlah MoU/kerjasama kelompok tani dengan pengusaha | MoU       | 0               | 0             | 0   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0    | 0  | 0        | 7            | -           | 9      |          |                                      |                                      |
|  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dari SDM Petani  |           |                 |               | 0   | 0      | 49       | 0      | 0      | 86       | 0    | 0  | 90       |              | 3,642       | -      | 4,048    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |                                      |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |          |      |     |          |      |    |          |            |            |            | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB                |  |
|--|---|----------|-----------------|---------------|---|-----|----------|------|-----|----------|------|----|----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--|
|  |   |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |     |          | 2012 |     |          | 2013 |    |          | 2014       |            |            | TARGET     | 2015                                 |  |
|  |   |          |                 |               | T   | R   | RP. (Jt) | T    | R   | RP. (Jt) | T    | R  | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |                                      |  |
|  | Kelompok ternak berprestasi   | Kelompok | 2               | 12            | 2   | 2   |          | 2    | 2   |          |      |    |          |            |            |            |            | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Petugas lapangan berprestasi  | orang    | 3               | 15            | 3   | 3   |          | 3    | 3   |          |      |    |          |            |            |            |            | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Pembinaan terhadap kelembagaan agribisnis peternakan  | Lembaga  | 6               | 10            | 6   | 6   | 30       | 9    | 9   | 120      | 0    | 9  | 117      | -          | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Jumlah kelompok yang dibina untuk kelompok penangkar bibit                                    | Kelompok | 4               | 20            | 0   | 0   |          | 4    | 4   | 86       | 0    | 4  | 35       | -          | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Jumlah peternak yang ditingkatkan pengetahuannya tentang peternakan dan kelembagaan kelompok  | orang    | 150             | 1300          | 150   | 150 | 150      | 300  | 300 | 260      | 156  | 90 | -        | -          | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penanganan gangguan reproduksi ternak | orang    | 40              | 96            | 0   | 0   |          | 40   | 40  | 550      | 0    | 16 | 100      | 20         | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Jumlah masyarakat yang dilatih tentang pemotongan hewan qurban dan kesrawan                   | orang    | 0               | 880           | 0   | 0   | 0        | 0    | 0   | 0        | 0    | 0  | 0        | 380        | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pemeriksa daging di RPH               | orang    | 20              | 20            | 0   | 0   | 0        | 0    | 0   | 0        | 0    | 0  | 0        | 0          | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pengawasan obat hewan                 | orang    | 40              | 0             | 0   | 0   | 0        | 0    | 0   | 0        | 0    | 0  | 0        | -          | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
|  | Persentase SDM Peternakan yang bersertifikat  | %        | 0               | 0             | 0   | 0   | 0        | 0    | 0   | 0        | 0    | 0  | 0        | 0.52       | -          | 0.67       | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
| Pemberdayaan Penyuluh Pertanian                              | Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan  | orang    | 35              | -             | 35  | 35  | 65       | 40   | 40  | 80       | 30   | 30 | 64       | -          | -          | -          | -          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |
| Pengembangan satu petani satu sapi                           | Berkembangnya program satu petani satu sapi   |          |                 |               |   |     |          |      |     |          |      |    |          | 2,847      |            | 14,554     |            | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN        | CAPAIAN KINERJA |      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |              |      |          |              |       |          |              |          |            | RP. (Jt)     | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                                      |          |
|--|---|---------------|-----------------|------|---|--------------|------|----------|--------------|-------|----------|--------------|----------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|
|  |   |               | KONDISI AWAL    |      | 2011  |              | 2012 |          | 2013         |       | 2014     |              | TARGET   | 2015       |              |                       |                                      |          |
|  |   |               | T               | R    | RP. (Jt)                                      | T            | R    | RP. (Jt) | T            | R     | RP. (Jt) | STLH PRBHN   | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN   |                       |                                      |          |
| <b>DINAS KEHUTANAN</b>   | Jumlah kelompok tani yang memiliki ternak                                       | Kelompok      | 17              | 96   | 0   | 0            | -    | 17       | 17           | 2,020 |          |              | 3,009    | 0          | 0            | 0                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |          |
|  | Persentase peternak yang memiliki usaha lebih dari satu                         | %             | 0               | 0    | 0   | 0            | 0    | 0        | 0            | 0     | 0        | 0            | 1.39     | 0          | 0            | 1.75                  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |          |
|  | Jumlah ternak yang disebarluaskan pada kelompok                                 | ekor          | 170             | 1083 | 0   | 0            | -    | 170      | 170          |       |          | 275          | 0        | -          | 330          | 0                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |          |
| <b>DINAS KEHUTANAN</b>   |   |               |                 |      |   | <b>1,045</b> |      |          | <b>1,100</b> |       |          | <b>1,290</b> |          |            | <b>1,300</b> |                       |                                      |          |
| Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani                                | Terbentuknya model pengembangan sumberdaya hutan, serta penanganan kasus SDA    | Ha            | -               | 160  | 20  | 20           | 320  | 10       | 35           | 325   | 50       | 50           | 330      | 10         | 40           | 335                   | 10                                   | Dishut   |
|  | terbentuknya model pengembangan lebah madu/gula enau dkk 94 unit                | unit          | -               | 94   | 19  | 15           | 625  | 15       | 16           | 625   | 18       | 21           | 800      | 20         | 21           | 800                   | 22                                   | Dishut   |
|  | Terbinanya Model social forestry dan Agroforestry 2 Ha                          | Ha            | -               | 2    | 0   | -            | 0    | 0        | 0            | 0     | 0        | 0            | 0        | 50         | 2            | 165*)                 | 50                                   | Dishut   |
|  | Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/ HRI) oleh 20 Kelompok tani | Kelompok tani | -               | 20   | 2   | 2            | 100  | 2        | 8            | 150   | 2        | 20           | 160      | 2          | 7            | 165                   | 2                                    | Dishut   |
| <b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b> |   |               |                 |      |   |              |      |          |              |       |          | <b>2,714</b> |          |            | <b>2,878</b> |                       |                                      |          |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                 | bulan         |                 | -    | -   | -            | -    | -        | -            | -     | -        | -            | 12       | 12         | 129          | 12                    | 206                                  | Bakorluh |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                            | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparat                             | bulan         |                 | -    | -   | -            | -    | -        | -            | -     | -        | -            | 12       | 12         | 598          | 12                    | 195                                  | Bakorluh |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparat   | bulan         |                 | -    | -   | -            | -    | -        | -            | -     | -        | -            | 12       | 12         | 7            | 12                    | 12                                   | Bakorluh |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan   | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                       | bulan         |                 | -    | -   | -            | -    | -        | -            | -     | -        | -            | 12       | 12         | 62           | 12                    | 335                                  | Bakorluh |
| Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian                                    | Meningkatnya pelayanan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha          |               |                 |      |   |              |      |          |              |       |          |              |          |            |              |                       |                                      |          |
|  | Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan                            | buku          | 1               | 1    | -   | -            | -    | -        | -            | -     | 1        | 1            | 50       | 1          | 1            | 65                    | 1                                    | Bakorluh |
|  | Meningkatnya kapasitas SDM penyuluhan   | jenis         | 4               | 4    | -   | -            | -    | -        | -            | -     | 4        | 4            | 95       | 4          | 4            | 105                   | 4                                    | Bakorluh |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |              |      |     |              |      |       |              |            |            |              | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                     |                |
|--|---|----------|-----------------|---------------|---|-----|--------------|------|-----|--------------|------|-------|--------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------|
|  |   |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |     |              | 2012 |     |              | 2013 |       |              | 2014       |            |              | TARGET   | 2015                  |                     |                |
|  |   |          |                 |               | T   | R   | RP. (Jt)     | T    | R   | RP. (Jt)     | T    | R     | RP. (Jt)     | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)     | TARGET   |                       |                     |                |
| KESATUAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH                      | Temu tugas penyuluhan   | orang    | 180             | 210           | -   | -   | -            | -    | -   | -            | -    | -     | -            | -          | 180        | 180          | 93       | 210                   | 210                 | 150 Bakorluh   |
|  | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluhan  | orang    | 160             | 210           | -   | -   | -            | -    | -   | -            | -    | -     | -            | -          | 160        | 160          | 93       | 210                   | 210                 | 250 Bakorluh   |
|  | Meningkatnya motivasi kerja   | orang    | 658             | 696           | -   | -   | -            | -    | -   | -            | -    | 662   | 662          | 2,173      | 696        | 696          | 2,147    | 696                   | 696                 | 2,300 Bakorluh |
|  | Meningkatnya motivasi dan kinerja penyuluhan  | orang    | 18              | 18            | -   | -   | -            | -    | -   | -            | -    | 18    | 18           | 191        | 18         | 18           | 165      | 18                    | 18                  | 200 Bakorluh   |
|  | Meningkatnya kualitas kelembagaan gapoktan  | Gapoktan | 10              | 22            | -   | -   | -            | -    | -   | -            | -    | 10    | 10           | 93         | 20         | 20           | 90       | 22                    | 22                  | 120 Bakorluh   |
|  | Meningkatnya kapasitas balai penyuluhan   | Unit     | 22              | 35            | -   | -   | -            | -    | -   | -            | -    | 22    | 22           | 112        | 29         | 29           | 120      | 35                    | 35                  | 150 Bakorluh   |
| <b>KEHUTANAN</b>   |   |          |                 |               |   |     | <b>2,654</b> |      |     | <b>3,427</b> |      |       | <b>3,277</b> |            |            | <b>2,969</b> |          |                       | <b>3,351</b>        |                |
| <b>DINAS KEHUTANAN</b>   |   |          |                 |               |   |     | <b>2,654</b> |      |     | <b>3,427</b> |      |       | <b>3,277</b> |            |            | <b>2,969</b> |          |                       | <b>3,351</b>        |                |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran   | %        | 0               | 100           | 12  | 12  | 662          | 12   | 12  | 748          | 12%  | 12    | 698          | 12         | 12         | 754          | 12       | 12                    | 977 Dinas Kehutanan |                |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  | %        | 0               | 100           | 71  | 57  | 378          | 34   | 59  | 1,079        | 36   | 42    | 864          | 73         | 73         | 401          | 42       | 42                    | 502 Dinas Kehutanan |                |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur   | %        | 0               | 100           | 163   | 162 | 60           | 163  | 165 | 57           | 163  | 163   | 59           | 163        | 139        | 75           | 163      | 163                   | 75 Dinas Kehutanan  |                |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur   | %        | 0               | 100           | 12  | 12  | 21           | 12   | 12  | -            | 12   | 12    | 5            | 12         | 12         | 21           | 12       | 12                    | 10 Dinas Kehutanan  |                |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan   | %        | 0               | 100           | 6   | 5   | 141          | 6    | 6   | 225          | 6    | 5     | 252          | 6          | 5          | 229          | 6        | 5                     | 297 Dinas Kehutanan |                |
| Perencanaan dan Pengembangan Hutan                                 | Terwujudnya perencanaan pembangunan kehutanan yang sinergis, dinamis, terarah dan terpadu sesuai dengan perkembangan daerah | Paket    | 1               | 1             | 1   | 1   | 217          | 1    | 1   | 238          | 1    | 1     | 262          | 1          | 1          | 289          | 1        | 1                     | 317 Dinas Kehutanan |                |
| PENGEMBANGAN DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT                            | Terpeliharanya batas kawasan hutan 330 Km   | Km       | -               | 170           | 80  | 80  | 75           | 80   | 80  | 200          | 70   | 70    | 220          | 170        | 50         | 242          | 170      | 50                    | 170 Dinas Kehutanan |                |
|  | Penataan batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350Km   | Km       | -               | 75            | 100   | 115 | 750*)        | 50   | 800 | 400*)        | 50   | 1,152 | 400*)        | 75         | 75         | 600*)        | 75       | 75                    | 600*) BPKH Wil. II  |                |
|  | Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model 3 unit  | unit     | -               | 1             | -   | 2   |              | 0    | 1   |              | 0    | 0     | 75*)         | -          | 1          |              | 1        | 0                     | 75*) Dishut         |                |
|  | Tersedianya atas potensi hasil hutan kayu & Non kayu, NSDH penggunaan, pemanfaatan kawasan hutan sebanyak 107 judul         | Judul    | -               | 107           | 15  | 16  | 500          | 31   | 31  | 100          | 20   | 32    | 110          | 20         | 4          | 121          | 21       | 4                     | 133 Dishut          |                |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                            | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA    |                    | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                    |              |      |                    |              |      |          |              |        |            |              | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                     |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------|------|--------------------|--------------|------|----------|--------------|--------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
|   |   |          |                    |                    | 2011  |                    |              | 2012 |                    |              | 2013 |          |              | 2014   |            |              | RP. (Jt)   | 2015                  |                     |
|   |   |          | KONDISI AWAL       | KONDISI AKHIR      | T   | R                  | RP. (Jt)     | T    | R                  | RP. (Jt)     | T    | R        | RP. (Jt)     | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN   | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                     |
| Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan                                 | Peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan 5%  | Kab/Kota | -                  | 19                 | 19  | 19                 | 200          | 19   | 19                 | 270          | 19   | 19       | 270          | 19     | 19         | 270          | 19         | 19                    | 270 Dinas Kehutanan |
|   | Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan Legal di Kab/Kota  | Kab/Kota | -                  | 19                 | 19  | 19                 | 250          | 19   | 19                 | 275          | 19   | 19       | 302          | 19     | 19         | 332          | 19         | 19                    | 365 Dinas Kehutanan |
|   | Peningkatan performance industri Hasil hutan di Kab/Kota  | Kab/Kota | -                  | 19                 | 10  | 10                 | 150          | 10   | 10                 | 235          | 10   | 10       | 235          | 19     | 10         | 235          | 19         | 10                    | 235 Dinas Kehutanan |
| <b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>  |   |          |                    |                    |   |                    | <b>4,533</b> |      |                    | <b>5,510</b> |      |          | <b>6,234</b> |        |            | <b>7,990</b> |            |                       | <b>9,251</b>        |
| <b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>  |   |          |                    |                    |   |                    | <b>4,533</b> |      |                    | <b>5,510</b> |      |          | <b>6,234</b> |        |            | <b>7,990</b> |            |                       | <b>9,251</b>        |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD  | bulan    |                    |                    | 12  | 12                 | 612          | 12   | 12                 | 607          | 12   | 12       | 659          | 12     | 12         | 907          | 12         | 12                    | 972 Dinas ESDM      |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Mejingkatnya sarana dan prasarana aparatuer yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                                 | bulan    |                    |                    | 12  | 12                 | 368          | 12   | 12                 | 538          | 12   | 12       | 651          | 12     | 12         | 501          | 12         | 12                    | 483 Dinas ESDM      |
| Peningkatan Disiplin Aparatur   | Tingkat pemenuhan penugasan disiplin aparatuer  | bulan    |                    |                    | 12  | 12                 | 36           | 12   | 12                 | 35           | 12   | 12       | 29           | 12     | 12         | 29           | 12         | 12                    | 39 Dinas ESDM       |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur   | Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatuer  | bulan    |                    |                    | 12  | 12                 | 98           | 12   | 12                 | 50           | 12   | 12       | 150          | 12     | 12         | 221          | 12         | 12                    | 250 Dinas ESDM      |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                      | Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | bulan    |                    |                    | 12  | 12                 | 129          | 12   | 12                 | 150          | 12   | 12       | 286          | 12     | 12         | 445          | 12         | 12                    | 324 Dinas ESDM      |
| Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                                     | Pencapaian rasio elektifikasi   | %        | 69.5               | 75                 | 71  | 71.6               | 1,620        | 72   | 73.48              | 1,782        | 73   | 77.69    | 1,960        | 74     | 79         | 4,052        | 75         | 81                    | 4,458 Dinas ESDM    |
|   | Trlathinya operator pelaku usaha kelistrikan  | Orang    | 20                 | 100                | 20  | 20                 | 70           | 40   | 40                 | 138          | 60   | 60       | 151          | -      | -          | -            | -          | -                     | - Dinas ESDM        |
|   | Pemanfaatan energi terbarukan   | Unit     | 3                  | 12                 | 3   | 3                  | 1,300        | 6    | 3                  | 1,430        | 9    | 3 (6-9)  | 1,573        | -      | -          | -            | -          | -                     | - Dinas ESDM        |
|   |   |          | (1 PLT-MH; 2 Pico) | (8 PLT-MH; 4 Pico) | (1 PLT-MH; 2 Pico)                            | (1 PLT-MH; 2 Pico) |              |      | (1 PLT-MH; 2 Pico) |              |      | 3 PLT-MH |              |        | -          | -            | -          | -                     |                     |
| Penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi dan kelistrikan | Pengawasan terhadap SPBU dan Agen penyalur BBM dan LPG sesuai dengan harga pemerintah                                       | Buku     | 0                  | 1 Perda            | 1   | 0                  | 200          | 1    | 0                  | 255          | 1    | 1        | 150          | 0      | 0          | -            | 0          | 0                     | - Dinas ESDM        |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA                      |                    | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |         |         |          |          |       |          |                   |          |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB |            |                |            |           |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------|----------|---------|---------|----------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------|------------|-----------|
|  |  |  | KONDISI AWAL                         | KONDISI AKHIR      | 2011  |        |          | 2012    |         |          | 2013     |       |          | 2014              |          | RP. (Jt) | 2015                  |            |                |            |           |
|  |  |  |                                      |                    | T   | R      | RP. (Jt) | T       | R       | RP. (Jt) | T        | R     | RP. (Jt) | STLH PRBHN        | RP. (Jt) | TARGET   | SBLM PRBHN            | STLH PRBHN |                |            |           |
|  |  | SPBU & Agen  | -                                    | 102 SPBU & 20 Agen | -   | -      | -        | -       | -       | -        | -        | -     | -        | 102 SPBU &20 Agen | 500      | -        | 102 SPBU &20 Agen     | 760        |                |            |           |
| Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara | Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB | dokumen  | 0                                    | 2                  | 0   | 0      | -        | 2       | 2 perda | 150      | 2        | 0     | 175      | 0                 | 1        | 135      | 0                     | 0          | Dinas ESDM     |            |           |
|  |  | Izin   | 30                                   | 40                 | 0   | 30     | -        | 31      | 31      | 250      | 33       | 33    | 300      | 36                | 36       | 350      | 40                    | 40         | 400 Dinas ESDM |            |           |
|  |  | Peti   | 0                                    | 42                 | 1   | 8      | 100      | 2       | 14      | 125      | 3        | 10    | 150      | 4                 | 5        | 175      | 5                     | 5          | 200 Dinas ESDM |            |           |
|  |  | Angka kecelakaan tambang   | %                                    | 0                  |   |        |          |         |         |          |          |       |          | 0                 | 675      | 0        | 0                     | 1,365      |                |            |           |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                 |  |                                      |                    |   |        | 16,846   |         |         | 22,920   |          |       | 27,567   |                   |          | 31,366   |                       |            | 35,384         |            |           |
|  |  |  |                                      |                    |   |        | 16,846   |         |         | 22,920   |          |       | 27,567   |                   |          | 31,366   |                       |            | 35,384         |            |           |
|  |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                      | Bulan                                | 12                 | 60  | 12     | 12       | 1,013   | 12      | 12       | 1,086    | 12    | 12       | 1,588             | 12       | 12       | 1,646                 | 12         | 12             | 1,638 DKP  |           |
|  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                            | Bulan                                | 12                 | 60  | 12     | 12       | 606     | 12      | 12       | 963      | 12    | 12       | 745               | 12       | 12       | 594                   | 12         | 12             | 594 DKP    |           |
| Peningkatan Disiplin Aparatur  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur    | Meningkatnya disiplin aparatur                                       | Bulan                                | 12                 | 60  | 12     | 12       | 74      | 12      | 12       | 75       | 12    | 12       | 75                | 12       | 12       | 75                    | 12         | 12             | 75 DKP     |           |
|  |  | Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja          | Bulan                                | 12                 | 60  | 12     | 12       | -       | 12      | 12       | 16       | 12    | 12       | 30                | 12       | 12       | 50                    | 12         | 12             | 42 DKP     |           |
|  |  | Terlaksananya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Bulan                                | 12                 | 60  | 12     | 12       | 273     | 12      | 12       | 375      | 12    | 12       | 379               | 12       | 12       | 379                   | 12         | 12             | 379 DKP    |           |
|  |  | Terbangunnya kawasan sentra produksi perikanan                       | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi | Kawasan            | 15  | 15     | 15       | 15      | 1,900   | 15       | 15       | 2,400 | 15       | 15                | 2,900    | 15       | 15                    | 3,400      | 15             | 15         | 3,900 DKP |
| Pengembangan Budidaya Perikanan  |  | Sentra produksi  |                                      |                    |   |        |          |         |         |          |          |       |          |                   |          |          |                       |            |                |            |           |
|  |  | Produksi Tuna  |                                      | Ton                | 22  | 5,745  | 890      | 586.6   | 250     | 945      | 1,225,75 | 300   | 1,150    | 1,151,35          | 350      | 1,260    | 1,260                 | 400        | 1,500          | 1,500      | 450 DKP   |
|  |  | Produksi Nila  |                                      | Ton                | 44,160,                                       | 522,   | 65,725   | 56,447, | 1,000   | 84,927   | 76,016,  | 1,300 | 96,540   | 82,398,38         | 1,690    | 95       | 122,605,80            | 2,197      | 271            | 152,586,30 | 2,856 DKP |
|  |  | Produksi Kerapu  |                                      | Ton                | 11.98   | 758.59 | 70       | 56.77   | 900     | 120      | 96.24    | 1,400 | 134.74   | 310.04            | 1,900    | 220      | 188.63                | 2,400      | 270            | 245.22     | 2,900 DKP |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |           |               |           | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |           |           |               |           |            |               |          |            |               |        |           | RP. (Jt)      | SKPD PENANGGUNG JAWAB                |  |
|---|---|----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|----------|------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
|   |   |          | KONDISI AWAL    |           | KONDISI AKHIR |           | 2011  |           |           | 2012          |           |            | 2013          |          |            | 2014          |        |           | TARGET        | 2015                                 |  |
|   |   |          | T               | R         | RP. (Jt)      | T         | R   | RP. (Jt)  | T         | R             | RP. (Jt)  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN    | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN    | TARGET |           |               |                                      |  |
|   | persentase produksi perikanan   | %        | 26              | 116.5     | 27            | 20.28     | 1,000   | 27        | 37.33     | 1,250         | 20        | 14.5       | 1,500         | 27       | 9.6        | 1,750         | 27     | 15        | 2,000         | DKP                                  |  |
|   | Penyakit yang dikendalikan  | Jenis    | 2               | 12        | 4             | 6         | 150   | 2         | 3         | 200           | 2         | 5          | 250           | 10       | 2          | 250           | 12     | 2         | 300           | DKP                                  |  |
| Peningkatan nilai tambah, daya saing produk hasil perikanan   | Meningkatnya peningkatan nilai tambah, daya saing hasil produksi perikanan                            |          |                 |           |               |           |   |           |           |               |           |            |               |          |            |               |        |           |               |                                      |  |
|   | Penerapan GHP dan GMP bagi UMKM   | Unit     | 4               | 25        | 5             | 4         | -   | 5         | 5         | 150           | 5         | 3          | 300           | 5        | 5          | 400           | 5      | 5         | 500           | DKP                                  |  |
|   | Produksi olahan hasil perikanan   | Ton      | 1,550,50        | 69,755,52 | 120,75        | 15,341,30 | 180   | 12,670,75 | 13,861,79 | 200           | 14,416,36 | 7,396,43   | 350           | 5        | 14,992,91  | 375           | 5      | 15,592,60 | 400           | DKP                                  |  |
|   | Peningkatan mutu produk perikanan   | Jenis    | 2               | 10        | 2             | 2         | -   | 2         | 2         | 150           | 2         | 2          | 300           | 2        | 2          | 450           | 2      | 2         | 600           | DKP                                  |  |
|   | Unit pengolahan ikan yang bersertifikat   | Unit     | 2               | 10        | 2             | 2         | 300   | 2         | 2         | 1,000         | 2         | 3          | 1,250         | 2        | 2          | 1,500         | 2      | 2         | 1,750         | DKP                                  |  |
| Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan  | Meningkatnya pemasaran hasil perikanan  | Ton      | 1,122,90        | 9,504,96  | 1,300,6       | 1,578,99  | -   | 1,534,71  | 1,346,68  | 250           | 1,826,3   | 1,957,1    | 250           | 1        | 2,191,56   | 250           | 1      | 2,651,79  | 250           | DKP                                  |  |
| Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Petani  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM petani   | unit     | 3               | 3         | 3             | 3         | 1,000   | 3         | 3         | 2,500         | 3         | 3          | 3,500         | 3        | 3          | 4,500         | 3      | 3         | 5,000         | DKP                                  |  |
| Pemberdayaan Penyuluh Pertanian   | Peningkatan kapasitas Penyuluh  | Orang    | 40              | 187       | 40            | 40        | 100   | 40        | 37        | 130           | 35        | 37         | 160           | 40       | -          | -             | 40     | -         | -             | DKP                                  |  |
| Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap  | Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap   |          |                 |           |               |           |   |           |           |               |           |            |               |          |            |               |        |           |               |                                      |  |
|   | Izin usaha  | Dokumen  | 80              | 400       | 50            | 101       | 200   | 50        | 170       | 200           | 100       | 170        | 200           | 50       | 100        | 200           | 50     | 100       | 200           | DKP                                  |  |
|   | Peningkatan Kapasitas KUB   | Kelompok | 2               | 36        | 2             | 3         | -   | 4         | 5         | 225           | 10        | 15         | 300           | 8        | 10         | 350           | 10     | 10        | 450           | DKP                                  |  |
|   | Peningkatan Jumlah alat tangkap   | Unit     | 21,442          | 25,523    | 23,586        | 23,079    | 5,400   | 24,197    | 25,067    | 5,400         | 24,301    | 25,418     | 5,400         | 0.5      | 24,912     | 5,400         | 0.5    | 25,523    | 5,400         | DKP                                  |  |
| Gerakan pencejahteraan ekonomi masyarakat pesisir   | Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir   | KK       | -               | 5,680     | -             | -         | 1,400   | 1,472     | -         | 1,400         | 1,509     | -          | 125           | 1,440    | -          | 150           | 1,440  | -         | DKP           |                                      |  |
| Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan        | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan | Lokasi   | 2               | 9         | 2             | 7         | 300   | 2         | 7         | 300           | 9         | 9          | 300           | 8        | 9          | 300           | 10     | 9         | 300           | DKP                                  |  |
| Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna | Meningkatnya teknologi informasi pertanian  | unit     | 0               | 6         | 0             | 0         | 0   | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 0             | 0        | 3          | 300           | 0      | 3         | 300           | DKP                                  |  |
| <b>PARIWISATA</b>   |   |          |                 |           |               |           | <b>11,192</b>                                 |           |           | <b>13,022</b> |           |            | <b>19,224</b> |          |            | <b>17,945</b> |        |           | <b>19,667</b> |                                      |  |
| <b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   |   |          |                 |           |               |           | <b>11,192</b>                                 |           |           | <b>13,022</b> |           |            | <b>19,224</b> |          |            | <b>17,945</b> |        |           | <b>19,667</b> |                                      |  |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Terlaksananya proses administrasi sesuai SOP  | bulan    | 12              | 60        | 12            | 12        | 2,217   | 24        | 24        | 2,749         | 36        | 36         | 3,115         | 48       | 48         | 2,971         | 60     | 60        | 2,971         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |     |          |       |     |          |       |     |          |            |            |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB | RP. (Jt)   |            |       |                                      |
|--|--|----------|-----------------|---------------|---|-----|----------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|------------|------------|----------|-----------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------|
|  |  |          | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |     |          | 2012  |     |          | 2013  |     |          | 2014       |            |          | TARGET                | 2015       |            |       |                                      |
|  |  |          |                 |               | T   | R   | RP. (Jt) | T     | R   | RP. (Jt) | T     | R   | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | TARGET                | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |       |                                      |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif                                   | unit     | 73              | 1037          | 73  | 73  |          | 625   | 241 | 241      | 1,008 | 239 | 239      | 424        | 242        | 242      | 1,103                 | 242        | 242        | 1,103 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur  | stel     | 260             | 1130          | 260   | 260 |          | 103   | 260 | 260      | 103   | 220 | 220      | 100        | 190        | 190      | 80                    | 200        | 200        | 80    | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur  | bulan    | 12              | 60            | 12  | 12  |          | 50    | 24  | 24       | 80    | 36  | 36       | 100        | 48         | 48       | 50                    | 60         | 60         | 50    | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan  | bulan    | 12              | 60            | 12  | 12  |          | 221   | 24  | 24       | 250   | 36  | 36       | 470        | 48         | 48       | 525                   | 60         | 60         | 525   | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya                              | Meningkatnya jumlah event budaya   | Event    | 8               | 94            | 7   | 4   |          | 1,225 | 11  | 16       | 1,347 | 14  | 48       | 1,482      | 17         | 21       | 1,630                 | 20         | -          | -     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya              | Jumlah iven seni dan budaya yang rutin dialaksanakan   | Event    | -               | 23            | -   | -   |          | -     | -   | -        | -     | -   | -        | -          | -          | -        | -                     | -          | 23         | 1,793 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau      | Meningkat dan berkembangnya produk wisata budaya   | Produk   | 0               | 12            | 1   | 1   |          | 291   | 2   | 4        | 320   | 2   | 7        | 352        | 3          | 1        | 387                   | 4          | -          | -     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek       | Jumlah produk ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK yang berkembang                  | Produk   | -               | 2             | -   | -   |          | -     | -   | -        | -     | -   | -        | -          | -          | -        | -                     | -          | 2          | 426   | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Kawasan Wisata Alam                                   | Meningkatnya jumlah kawasan wisata alam yang difasilitasi                                      | Ka-wasan | 2               | 14            | 3   | 2   |          | 3,500 | 4   | 4        | 4,000 | 5   | 6        | 4,500      | 6          | 10       | 5,000                 | 7          | -          | -     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Alam                  | Jumlah kawasan wisata alam yang berkembang menjadi wisata utama dan kawasan wisata strategis   | Ka-wasan | -               | 7             | -   | -   |          | -     | -   | -        | -     | -   | -        | -          | -          | -        | -                     | -          | 7          | 5,500 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Kawasan Wisata Budaya                                 | Meningkatnya kualitas kawasan wisata budaya  | Ka-wasan | -               | 19            | 0   | 5   |          | -     | 0   | 6        | -     | 1   | 9        | 1,500      | 2          | 14       | 2,000                 | 3          | -          | -     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Budaya                | Jumlah kawasan wisata budaya yang berkembang menjadi wisata utama dan kawasan wisata strategis | Ka-wasan | -               | 2             | -   | -   |          | -     | -   | -        | -     | -   | -        | -          | -          | -        | -                     | -          | 2          | 2,500 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                     | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |              |       |       |               |       |       |               |            |            |               | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |  |
|--|---|------------------|-----------------|---------------|---|-------|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--|
|  |   |                  | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |              | 2012  |       |               | 2013  |       |               | 2014       |            |               | TARGET     | 2015                  |  |
|  |   |                  |                 |               | T   | R     | RP. (Jt)     | T     | R     | RP. (Jt)      | T     | R     | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |  |
| Pengembangan Pemasaran Wisata                                      | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman pintu imigrasi   | %                | 0               | 37            | 5   | 5     | 2,810        | 10    | 10    | 3,000         | 12    | 37    | 3,500         | -          | -          | -             | -          | -                     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif       |
|  | Meningkatnya pelaksanaan promosi pariwisata Sumatera Barat      | Event            | 0               | 121           | -   | -     | -            | -     | -     | -             | 12    | 38    | 3,500         | 15         | 81         | 4,000         | 20         | 121                   | 4,500 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan SDM Pariwisata  | Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi | Orang            | 100             | 1120          | 125   | 125   | 150          | 125   | 240   | 165           | 185   | 395   | 181           | 220        | 60         | 199           | 220        | 200                   | 219 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   |
| <b>PERDAGANGAN</b>   |   |                  |                 |               |   |       | <b>3,855</b> |       |       | <b>10,894</b> |       |       | <b>14,982</b> |            |            | <b>11,471</b> |            |                       | <b>11,967</b>                              |
| <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                         |   |                  |                 |               |   |       | <b>3,855</b> |       |       | <b>10,894</b> |       |       | <b>14,982</b> |            |            | <b>11,471</b> |            |                       | <b>11,967</b>                              |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                 | bulan            | 0               | 60            | 12  | 12    | -            | 12    | 12    | 1,713         | 12    | 12    | 1,588         | 12         | 12         | 1,828         | 12         | 12                    | 2,023 Dinas Perindag                       |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan  | bulan            | 0               | 60            | 12  | 12    | -            | 12    | 12    | 1,419         | 12    | 12    | 4,335         | 12         | 12         | 2,654         | 12         | 12                    | 2,101 Dinas Perindag                       |
| Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparat                                     | orang            | 0               | 174           | 200   | 167   | -            | 210   | 163   | 73            | 180   | 180   | 63            | 174        | 174        | 69            | 174        | 174                   | 66 Dinas Perindag                          |
| Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparat                               | orang            | 0               | 40            | 90  | 90    | -            | 98    | 87    | 137           | 180   | 180   | 250           | 30         | 30         | 269           | 40         | 40                    | 250 Dinas Perindag                         |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                       | bulan            | 0               | 60            | 12  | 12    | -            | 12    | 12    | 313           | 12    | 12    | 584           | 12         | 12         | 559           | 12         | 12                    | 559 Dinas Perindag                         |
| Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan                       | Meningkatnya jumlah Sarana pasar yang berkualitas               | Unit             | 0               | 1,050         | 56  | 56    | -            | 344   | 26    | -             | 280   | 280   | -             | 180        | 180        | -             | 190        | 190                   | Dinas Perindag                             |
|  | Jumlah bantuan sarana perdagangan                               | Unit/tahun       | 0               | 1,050         | 56  | 56    | -            | 344   | 26    | 3,000         | 280   | 280   | 3,500         | 180        | -          | -             | 190        | -                     | Dinas Perindag                             |
|  | Meningkatnya jumlah sarana perdagangan                          | %                | -               | 100           | -   | -     | -            | -     | -     | -             | -     | -     | -             | -          | 80         | 4,000         | -          | 100                   | 4,500                                      |
| Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri                     | Stabilisasi harga   | Kali/tahun       | 0               | 6             | 2   | 2     | 1,006        | 3     | 3     | 1,106         | -     | 3     | 1,217         | -          | -          | -             | -          | -                     | Dinas Perindag                             |
|  | Laju inflasi  | %/tahun          | 0               | < 10          | < 10  | 5.37  | -            | < 10  | 4.16  | -             | < 10  | < 10  | -             | < 10       | -          | -             | < 10       | -                     | Dinas Perindag                             |
|  | Persentase peningkatan transaksi lelang                         | %/Tahun          | 1               | 2%            | 1   | 5%    | -            | 1     | 1     | -             | 15    | 1     | -             | 18         | -          | -             | 20         | -                     | Dinas Perindag                             |
|  | Stabilitas tingkat inflasi                                      | %                | -               | 100           | -   | -     | -            | -     | -     | -             | -     | -     | -             | -          | 80         | 1,338         | -          | 100                   | 1,472                                      |
| Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah                         | Meningkatnya nilai ekspor daerah                                | US \$ juta/tahun | 2,219           | 2,750         | 2,552   | 2,552 | 252          | 2,935 | 2,363 | 277           | 3,375 | 2,500 | 304           | 3,882      | -          | -             | 4,464      | -                     | Dinas Perindag                             |
|  | Jumlah produk yang dieksport                                    | Komoditi/tahun   | 1               | 37-39         | 2   | 30    | -            | 2     | 30    | -             | 2     | 31-32 | -             | -          | 2          | -             | -          | 2                     | -  |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN                  | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |       |              |       |       |              |       |       |               |            |            |               | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB  |
|--|--|-------------------------|-----------------|---------------|---|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|---------------|------------|------------|---------------|----------|------------------------|
|  |  |                         | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |       |              | 2012  |       |              | 2013  |       |               | 2014       |            |               | RP. (Jt) | SKPD PENANGGUNG JAWAB  |
|  |  |                         |                 |               | T   | R     | RP. (Jt)     | T     | R     | RP. (Jt)     | T     | R     | RP. (Jt)      | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt)      | TARGET   |                        |
| Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan | Jumlah negara tujuan ekspor  | Negara / tahun          | 40-45           | 47-50         | 40-45   | 40    |              | 45-50 | 45    |              | 50-55 | 46-50 |               | 55-60      | -          | 60-65         | -        | - Dinas Perindag       |
|  | Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan                                  | Sertifikat Mutu / tahun | 0               | 1,700         | 1,500   | 1,500 |              | 1,550 | 1,665 |              | 1,600 | 1,600 |               | 1,650      | -          | 1,700         | -        | - Dinas Perindag       |
|  | Meningkatnya nilai ekspor daerah   | %                       | -               | 100           | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 335           | 100      | 368                    |
| Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan   | Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dan aparat perdagangan            | Orang                   | 0               | 532           | 25  | 25    | 315          | 50    | 182   | 346          | 75    | 75    | 381           | 100        | -          | -             | 150      | - Dinas Perindag       |
|  | Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dan aparat perdagangan            | %                       | -               | 100           | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 419           | -        | 100 628                |
| PERINDUSTRIAN  | Berkurangnya konsumen yang dirugikan                                     | Produk/tahun            | 6               | 30            | 6   | 6     | 1,141        | 12    | 6     | 1,255        | 18    | 6     | 1,380         | 24         | -          | -             | 30       | - Dinas Perindag       |
|  | - Jumlah produk yang memenuhi SNI.                                       | Produk/tahun            | 6               | 30            | 6   | 6     | 1,141        | 12    | 6     | 1,255        | 18    | 6     | 1,380         | 24         | -          | -             | 30       | - Dinas Perindag       |
|  | - Peningkatan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang                       | %/tahun                 | 5               | 25            | 10  | 10.11 |              | 10    | 2.68  |              | 10    | 5     |               | 10         | -          | -             | 10       | - Dinas Perindag       |
|  | Berkurangnya konsumen yang dirugikan                                     | %                       | -               | 100           | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 1,518         | 100      | 1,670                  |
| <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                     |  |                         |                 |               |   |       | <b>6,141</b> |       |       | <b>8,097</b> |       |       | <b>14,195</b> |            |            | <b>20,443</b> |          | <b>21,592</b>          |
| Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                  | Berkembangnya sentra-sentra industri potensial                           | Unit Sentra/tahun       | 5               | 25            | 2   | 2     | 60           | 10    | 9     | 400          | 15    | 5     | 450           | 20         | -          | -             | 25       | - Dinas Perindag       |
|  | Lancarnya kegiatan industri di sentra industri potensial                 | %                       |                 |               | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 500           | -        | 100 550                |
| Peningkatan Iklim Usaha Industri                               | Meningkatnya investasi usaha IKM.  | % / Th                  | 2               | 2.25          | 7   | 2     | 92           | 2     | 2.68  | 250          | 2     | 2.15  | 5,104         | 2          | -          | -             | 2        | - Dinas Perindag       |
|  | %  | -                       | 100             | -             | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 5,500         | -        | 100 5,614              |
| Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur      | Jumlah unit usaha industri unggulan daerah                               | Unit usaha              | 1               | 10            | 1   | 1     | 3,800        | 1     | 2     | 4,640        | 2     | 2     | 5,104         | 2          | 2          | 5,500         | 3        | 3 5,614 Dinas Perindag |
|  | %  | -                       | 100             | -             | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 5,500         | -        | 100 5,614              |
| Revitalisasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah      | Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah secara proporsional | Unit usaha/tahun        | 0               | 700           | 600   | 447   | 380          | 600   | 147   | 418          | 600   | 140   | 459           | 600        | -          | -             | 600      | - Dinas Perindag       |
|  | %  | -                       | 100             | -             | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 505           | -        | 100 600                |
| Pengembangan Teknologi Tepat Guna                              | Jumlah rekayasa teknologi tepat guna                                     | Unit                    | 3               | 18            | 6   | 3     | 555          | 9     | 3     | 610          | 12    | 3     | 771           | 15         | -          | -             | 18       | - Dinas Perindag       |
|  | %  | -                       | 100             | -             | -   | -     |              | -     | -     |              | -     | -     |               | -          | 80         | 938           | -        | 100 1,100              |
| Pengembangan Klaster Industri Unggulan                         | Terbangunnya aglomerasi industri   | Klaster/tahun           | 1               | 3             | 1   | 1     | 1,000        | 1     | 2     | 1,500        | 2     | 2     | 2,000         | 2          | -          | -             | 3        | -                      |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN    | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)        | SATUAN      | CAPAIAN KINERJA |               | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |    |           |      |     |           |      |     |           |            |            |          | RP. (Jt)   | SKPD PENANGGUNG JAWAB |                |
|---|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---|----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|----------------|
|   |                                    |             | KONDISI AWAL    | KONDISI AKHIR | 2011  |    |           | 2012 |     |           | 2013 |     |           | 2014       |            |          | TARGET     | 2015                  |                |
|   |                                    |             |                 |               | T   | R  | RP. (Jt)  | T    | R   | RP. (Jt)  | T    | R   | RP. (Jt)  | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | RP. (Jt) | SBLM PRBHN | STLH PRBHN            |                |
| Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah dan Aparat Pembina | Meningkatnya produktifitas SDM IKM | Orang/tahun | 50              | 250           | 50  | 50 | 254       | 100  | 205 | 279       | 150  | 150 | 307       | 200        | -          | 2,000    | 100        | 2,500                 | Dinas Perindag |
| JUMLAH  |                                    | %           |                 |               | 100   | -  | -         |      |     |           |      |     |           | 80         | 338        | 100      | 371        |                       |                |
|   |                                    |             |                 |               |   |    | 1,439,238 |      |     | 2,121,097 |      |     | 1,813,692 |            | 2,301,678  |          | 2,631,228  |                       |                |



## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi: Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2009, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. Selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9.1**  
**Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat**

| No.        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |            | SAT    | THN<br>2010 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
|------------|--|------------|--------|-------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--|--|
|            | SBLM PRBHN   | STLH PRBHN |        |             | 2011                        |            | 2012   |            | 2013   |            | 2014   |            | 2015   |  |  |
|            |  |            |        |             | TARGET                      | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET |  |  |
|            | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                               |            |        | 73,78       | 74,24                       | 74,28      | 74,64  | 74,7       | 75,04  | 75,01      | 75,44  | 75,44      | 75,84  |  |  |
|            | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                 |            |        |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
| <b>1.</b>  | <b>Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi</b>                    |            |        |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 1.1.a      | Laju Pertumbuhan Ekonomi (Th Dasar 2000)                       |            | %      | 5,93        | 6,21                        | 6,26       | 6,5    | 6,38       | 6,81   | 6,18       | 7,13   | 6,42       | 7,46   |  |  |
| 1.1.b      | Laju Pertumbuhan Ekonomi (Th Dasar 2010)                       |            | %      | 5,60        |                             | 6,30       |        | 6,30       |        | 6,00       |        | 6,14       | 6,28   |  |  |
| 1.2        | PDRB Per Kapita  | Rp. Jt     | 17,93  | 20,26       | 20,17                       | 22,4       | 22,21  | 24,48      | 25,1   | 26,49      | 26,49  | 28,44      | 28,44  |  |  |
| 1.3        | ICOR   |            | 3,63   | 3,41 ***    |                             | 3,44 ***   |        | 3,48 ***   |        | 3,50 ***   |        | 3,54 ***   |        |  |  |
| 1.4        | PDRB Harga Konstan   | Rp.T       | 38,86  | 41,03       |                             | 43,69      |        | 46,67      |        | 49,99      |        | 53,73      |        |  |  |
| 1.5.a      | PDRB Harga Berlaku (Th Dasar 2000)                             | Rp.T       | 87,22  | 100,64      | 98,96                       | 112,82     | 110,1  | 125        | 127,1  | 137,17     | 137,17 | 149,35     |        |  |  |
| 1.5.b      | PDRB Harga Berlaku (Th Dasar 2010)                             | Rp.T       | 105,2  |             | 118,67                      |            | 131,44 |            | 146,89 |            | 164,27 |            | 183,71 |  |  |
| 1.6        | Investasi ADHK   | Rp.M       | 7.161  | 8.166       | 7.940                       | 9.184      | 8.505  | 10.347     |        | 11.634     | 11.634 | 13.191     | 13.191 |  |  |
| 1.7        | Tingkat Pengangguran   | %          | 6,95   | 6,59        | 6,45                        | 6,22       | 6,52   | 5,86       | 7,02   | 5,5        | 5,5    | 5,13       | 5,13   |  |  |
| 1.8        | Tingkat Kemiskinan   | %          | 9,5    | 8,55        | 8,99                        | 8,15       | 8      | 7,75       | 7,56   | 7,35       | 7,35   | 6,95       | 6,95   |  |  |
| 1.9        | Jumlah Kabupaten Tertinggal                                    | Kab        | 8      | 8           | 8                           | 7          | 8      | 6          |        | 5          | 5      | 4          | 4      |  |  |
| <b>2.</b>  | <b>Kesejahteraan Sosial</b>                                    |            |        |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
| <b>2.1</b> | <b>Pendidikan</b>  |            |        |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 2.1.1      | Rata-rata Lama Sekolah (th)                                    | TH         | 8,48   | 9,35        | 8,57                        | 9,7        | 8,68   | 10,05      | 8,68   | 10,4       | 8,78   | 10,75      | 8,88   |  |  |
| 2.1.2      | Angka Partisipasi Kasar  |            |        |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
| a.         | SD/MI/SDLB/Paket A   | %          | 112,54 | 118,48      | 111,91                      | 119,98     | 111,94 | 120,44     | 115,8  | 121,92     | 117    | 122,1      | 118    |  |  |
| b.         | SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B .                                      | %          | 98,31  | 98,92       | 92,96                       | 100,42     | 93,51  | 101,92     | 103,52 | 103,42     | 103,42 | 104,92     | 104,92 |  |  |
| c.         | SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C                                   | %          | 83,92  | 84,33       | 67,42                       | 84,75      | 86,75  | 85,16      | 95,3   | 85,58      | 85,58  | 86         | 86     |  |  |
| 2.1.3      | Angka Partisipasi Murni  |            |        |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |        |  |  |
| a.         | SD/MI/ SDLB/ Paket A   | %          | 99,67  | 99,67       | 94,46                       | 99,75      | 94,49  | 100        | 99,54  | 100        | 95     | 100        | 95,25  |  |  |
| b.         | SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B  | %          | 77,25  | 78,8        | 75,43                       | 80,35      | 80,9   | 82,9       | 80,75  | 83,45      | 82,28  | 85         | 83,44  |  |  |
| c.         | SMA/ SMK/MA/ SMALB Paket C                                     | %          | 55,5   | 62,5        | 50,34                       | 67,5       | 69,67  | 72,5       | 71,96  | 75         | 72,33  | 80         | 73,99  |  |  |
| 2.1.4      | Ranking Ujian Nasional   |            | 9      | 9           | 28                          | 9          | 23     | 9          |        | 8          |        | 8          |        |  |  |
| a.         | SMP  |            |        |             |                             |            |        |            |        | 24         |        | 22         | 20     |  |  |
| b.         | SMA  |            |        |             |                             |            |        |            |        | 23         |        | 21         | 19     |  |  |
| c.         | SMK  |            |        |             |                             |            |        |            |        | 28         |        | 26         | 24     |  |  |

| No.                           | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |            | SAT                | THN<br>2010 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |            |            |            |  |
|-------------------------------|--|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|--|
|                               |  |            |                    |             | 2011                        |            | 2012   |            | 2013   |            | 2014   |            | 2015       |            |            |  |
|                               | SBLM PRBHN   | STLH PRBHN |                    |             | TARGET                      | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET | SBLM PRBHN | STLH PRBHN | SBLM PRBHN | STLH PRBHN |  |
| 2.1.5                         | Kualifikasi guru setara S1/DIV                                 |            | %                  | 86,63       | 90                          | 90,5       | 95     | 90,5       | 100    | 90,5       | 100    | 91         | 100        | 91,25      |            |  |
|                               | b. SMP   |            | %                  | 91,01       | 95                          | 92,61      | 100    | 92,61      | 100    | 97,95      | 100    | 98,5       | 100        | 99,01      |            |  |
|                               | c. SMA   |            | %                  | 91,01       | 95                          | 91,95      | 100    | 92,95      | 100    | 97,55      | 100    | 98,2       | 100        | 99,15      |            |  |
| 2.1.6                         | Sertifikasi Guru   |            |                    |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |            |            |            |  |
|                               | a. TK  |            | Org                | 30          | 50                          | 390        | 75     | 712        | 100    | 925        | 125    | 125        | 150        | 150        |            |  |
|                               | b. SLB   |            | Org                | 30          | 50                          | 243        | 75     | 328        | 100    | 328        | 125    | 125        | 150        | 150        |            |  |
|                               | c. SD/MI   |            | Org                | 600         | 750                         | 13.823     | 1.500  | 17.499     | 2.250  | 18.199     | 3.000  | 3.000      | 4.250      | 4.250      |            |  |
|                               | d. SMP/MTs   |            | Org                | 1.440       | 1.750                       | 8.955      | 2.500  | 10.563     | 3.250  | 11.263     | 4.250  | 4.250      | 5.250      | 5.250      |            |  |
|                               | e. SMA/SMK/MA  |            | Org                | 2.400       | 2.500                       | 8.879      | 3.750  | 10.039     | 5.000  | 11.009     | 6.250  | 6.250      | 7.500      | 7.500      |            |  |
| 2.1.7                         | Wajib Belajar 12 tahun (rintisan wajib belajar 12 tahun)       |            | % (Kab/ Kota)      | 3           | 10                          | 21,05      | 20     | 21,05      | 30     | 21,05      | 40     | 26,31      | 50         | 31,57      |            |  |
| 2.1.8                         | Lembaga pendidikan terakreditasi                               |            | %                  | 30          | 30                          | 62,91      | 75     | 67,68      | 100    | 85,47      | 100    | 86         | 100        | 87         |            |  |
| 2.1.9                         | Rasio guru bidang studi dan siswa                              |            |                    | 55          | 30                          | 30         | 30     | 30         | 25     | 30         | 25     | 25         | 20         | 20         |            |  |
| 2.1.10                        | Boarding School Bertaraf Maju                                  |            | buah               | 2           | 3                           | 2          | 3      | 3          | 4      | 6          | 4      | 4          | 5          | 5          |            |  |
| 2.2                           | Kesehatan  |            |                    |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |            |            |            |  |
| 2.2.1                         | Umur Harapan Hidup (UHH)                                       |            | Th                 | 69,5        | 71,12                       | 69,76      | 71,48  | 70,02      | 71,84  | 70,09      | 72,2   | 71,12      | 72,56      | 71,48      |            |  |
| 2.2.2                         | Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan                       |            | Org Per 100.000 KH | 207         | 190                         | 207*)      | 166    | 212*)      | 142    | 212*)      | 118    | 118        | 102        | 102        |            |  |
| 2.2.3                         | Menurunnya Angka Kematian Bayi                                 |            | Bayi per 1.000 KH  | 28          | 22                          | 28*)       | 20     | 27*)       | 18     | 27*)       | 16     | 24         | 14         | 23         |            |  |
| 2.2.4                         | Angka Gizi Kurang (BB/TB) (pada Balita)                        |            | %                  | 8,2         | 8,2                         | 8,2        | 7,8    | 7,2        | 7,4    | 6,5        | 7      | 7          | 6,6        | 6,6        |            |  |
| 2.2.5                         | Akses Air Minum yang berkualitas                               |            | %                  | 46,68       | 64                          | 65,02      | 65     | 72,81      | 66     | 78,71      | 67     | 67         | 68         | 68         |            |  |
| 2.2.6                         | Kasus baru Tuberculosis  |            | %                  | 57,05       | 55                          | 57,77      | 60     | 58,95      | 70     | 139,05     | 80     | 80         | 90         | 90         |            |  |
| 2.2.7                         | Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)/1000 pdk             |            | Per 1.000 pdk      | 0,24        | ≤2                          | 0,29       | ≤2     | 0,27       | ≤1     | 0,25       | ≤1     | ≤1         | 1          | 1          |            |  |
| 2.2.8                         | ODHA yang diobati  |            | %                  | 100         | 90                          | 100        | 93     | 100        | 95     | 100        | 100    | 100        | 100        | 100        |            |  |
| 2.2.9                         | Cakupan imunisasi bayi usia 0-11 bulan                         |            | %                  | 95,6        | 80                          | 89         | 85     | 89         | 90     | 91         | 95     | 95         | 100        | 100        |            |  |
| 2.2.10                        | Penduduk menggunakan Jamaban Sehat                             |            | %                  | 61,49       | 67                          | 69,02      | 70     | 70,05      | 73     | 73,56      | 74     | 74         | 75         | 75         |            |  |
| 2.2.11                        | Jaminan pemeliharaan kesehatan                                 |            | %                  | 50,08       | 63,8                        | 61,6       | 78,6   | 72,64      | 91,3   | 73,3       | 100    | 80,44      | 100        | 84,34      |            |  |
| 2.2.12                        | Bed Occupation Rate (BOR)                                      |            | %                  | 65,1        | 71                          | 74,2       | 73     | 75,9       | 75     | 75,86      | 78     | 78         | 80         | 80         |            |  |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   |  |            |                    |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |            |            |            |  |
| <b>Pelayanan Urusan Wajib</b> |  |            |                    |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |            |            |            |  |
| 1.                            | <b>Pekerjaan Umum</b>  |            |                    |             |                             |            |        |            |        |            |        |            |            |            |            |  |
| 1.1                           | Kemantapan Jalan Provinsi                                      |            | %                  | 80          | 82                          | 82         | 83     | 85         | 85     | 84         | 86     | 86         | 88         | 88         |            |  |
| 1.2                           | Panjang Irigasi Terbangun                                      |            | Km                 | 2,311       | 2,313                       | 6,015      | 2,316  | 7,015      | 2,319  |            | 2,322  | 2,322      | 2,325      | 2,325      |            |  |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |  | SAT     | THN<br>2010 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
|-----------|--|--|---------|-------------|-----------------------------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--|--|
|           | SBLM PRBHN   | STLH PRBHN                                       |         |             | 2011                        |            | 2012    |            | 2013   |            | 2014   |            | 2015   |  |  |
|           |  |  |         |             | TARGET                      | REALI SASI | TARGET  | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET | REALI SASI | TARGET |  |  |
| 1.3       | Panjang Jalan Evakuasi   |  | Km      | 0           | 10                          | 14         | 20      | 27,5       | 30     | 42,5       | 40     | 0          | 50     |  |  |
| 1.4       | Jumlah shelter terbangun                                       | unit   |         | -           | -                           | -          | -       | -          | -      | 4          | -      | 9          | -      |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Kebudayaan</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 2.1       | Jemaah haji yang terlayani                                     | Org  | 4.398   | 4.398       | 7.877                       | 4.398      | 7.498   | 4.398      | 3.599  | 4.398      | 3.599  | 4.398      | 3.599  |  |  |
| 2.2       | Kasus Perbuatan Maksiat  | Kasus  | 1.471   | 1.368       | 1.038                       | 1.313      | 1.508   | 1.261      | -      | 1.210      | 1.210  | 1.162      | 1.162  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Pemerintahan</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 3.1       | Opini BPK  | Opini  | WDP     | WDP         | WDP                         | WTP        | WTP     | WTP        | WTP    | WTP        | WTP    | WTP        | WTP    |  |  |
|           | <b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>                                |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| <b>1.</b> | <b>Pertanian</b>   |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 1.1       | Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian                    | Rp. Jt   | 9,66    | 10,72       | 11,57                       | 11,25      | 11,92   | 11,78      | -      | 12,31      | 12,31  | 12,84      | 12,84  |  |  |
| 1.2       | Berkembangnya Balai Alih Teknologi Pertanian (UPTD)            | Unit   | 1       | 6           | 11                          | 14         | -       | 22         | -      | 30         | 30     | 38         | 38     |  |  |
| 1.3       | Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi                          |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| a.        | KSP Tanaman Pangan (unit)                                      | Unit   | 40      | 43          | 64                          | 47         | 64      | 52         | 60     | 56         | 56     | 60         | 60     |  |  |
| b.        | KPS Perkebunan (unit)  | Unit   | 12      | 14          | 20                          | 17         | 25      | 20         | 22     | 24         | 24     | 28         | 28     |  |  |
| c.        | KSP Peternakan (unit)  | Unit   | 6       | 6           | 6                           | 8          | 10      | 10         | 10     | 12         | 12     | 14         | 14     |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Energi</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 2.1       | Cakupan Layanan Listrik  | %  | 90      | 91          | 91                          | 92         | 93,96   | 93         | -      | 94         | 94     | 95         | 95     |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Pariwisata</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 3.1       | Jumlah Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan                 | Fasilitasi pengembangan destinasi kawasan wisata | Kws     | 2           | 3                           | 2          | 4       | 4          | 5      | 6          | 6      | 10         | 7      |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 4.1       | Lahan Kritis (Ha)  | Ha   | 372.386 | 362.386     | 361.336                     | 352.386    | 342.278 | 342.386    | -      | 332.386    | 10.000 | 322.386    | 10.000 |  |  |
|           | Penanganan Lahan Kritis (Ha)                                   | Ha   |         | 10.000      | 1.050                       | 10.000     | 10.108  | 10.000     | -      | 10.000     | -      | 10.000     | -      |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Industri</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 5.2       | Pertumbuhan Industri Pengolahan                                | %  | 2,51    | 10,68       | 4,65                        | 11,47      | 4,04    | 12,7       | 4,86   | 13,07      | 6,5    | 13,69      | 6,9    |  |  |
|           | <b>ASPEK DAYA SAING</b>  |  |         |             |                             |            |         |            |        |            |        |            |        |  |  |
| 1.        | Nilai Tukar Petani   | %  | 105,6   | 106         | 106,25                      | 107        | 105,03  | 108        | -      | 109        | 109    | 110        | 110    |  |  |
| 2.        | Produktifitas total daerah                                     | Rp. Jt.  | 40      | 44,88       | -                           | 49,62      | -       | 54,23      | -      | 58,68      | -      | 63         | -      |  |  |
| 3.        | Rasio ekspor terhadap PDRB                                     | %  | 27,68   | 23          | 28,95                       | 27         | 27,95   | 31         | -      | 35         | 35     | 39         | 39     |  |  |

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2010-2015.

#### **10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016**

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Proses penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan gubernur terpilih hasil Pilkada Tahun 2015. Selanjutnya Gubernur Sebagai Kepala Daerah Terpilih Dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2016 berikut penyusunan RKPD Tahun 2016.

#### **10.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan penganggaran serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan

Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2010-2015 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
4. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dalam menyusun Renstra dengan SKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sudah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
9. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
10. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
11. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin

agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD".

12. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
13. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



IRWAN PRAYITNO





**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pertengahan jalan (midterm review) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir dalam RPJMD sehingga RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 harus dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

dan

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 6**

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
  - d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
  - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
  - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
  - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
  - j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) Mengubah Bab II, Bab III, Bab VIII dan Bab IX pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

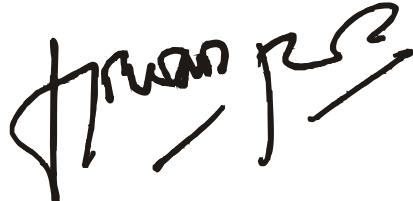
## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 Juni 2014

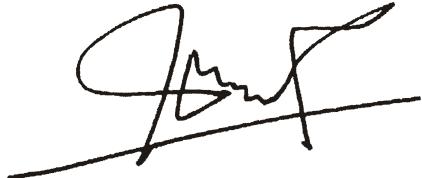
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 6 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5**  
**TAHUN 2011**

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**(RPJMD) DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2015**

**I. Penjelasan Umum**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJMD) Tahap II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut berisikan lima Agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut: Agenda Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah, Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Agenda Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK, Agenda Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Agenda Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJM, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional meliputi antara lain perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, penerapan standar pelayanan minimal, serta adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 95**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 4 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 6 JUNI 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>       |
| 1.1. LATAR BELAKANG  | 1              |
| 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN  | 2              |
| 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN  | 4              |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN   | 7              |
| 1.5. MAKSDUD DAN TUJUAN  | 8              |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>                                   | <b>9</b>       |
| 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI  | 9              |
| 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah                                       | 9              |
| 2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah                                   | 19             |
| 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana  | 21             |
| 2.1.4 Demografi  | 25             |
| 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  | 28             |
| 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi                             | 28             |
| 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial   | 39             |
| 2.2.3 Gambaran Kondisi Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat                | 41             |
| 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM  | 43             |
| 2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib                                       | 43             |
| 2.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan                                     | 70             |
| 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH   | 91             |
| 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah   | 93             |
| 2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur  | 96             |
| 2.4.3 Investasi Daerah   | 119            |
| <b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN</b> | <b>123</b>     |
| 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU  | 123            |
| 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD  | 123            |
| 3.1.2. Neraca Daerah   | 126            |

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| 3.2.          | KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU   | 128        |
| 3.2.1.        | Proporsi Penggunaan Anggaran   | 128        |
| 3.2.2.        | Analisis Pembiayaan  | 132        |
| 3.3.          | KERANGKA PENDANAAN   | 134        |
| 3.3.1.        | Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama   | 134        |
| 3.3.2.        | Penghitungan Kerangka Pendanaan  | 135        |
| <b>BAB IV</b> | <b>ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b>  | <b>145</b> |
| 4.1.          | PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH  | 145        |
| 4.2.          | ISU-ISU STRATEGIS DAERAH   | 149        |
| <b>BAB V</b>  | <b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>   | <b>155</b> |
| 5.1.          | VISI   | 155        |
| 5.2.          | MISI   | 157        |
| 5.3.          | TUJUAN DAN SASARAN   | 159        |
| 5.3.1.        | Tujuan Pembangunan   | 159        |
| 5.3.2.        | Sasaran Pembangunan  | 160        |
| <b>BAB VI</b> | <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>   | <b>169</b> |
| 6.1.          | MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS-SBK        | 169        |
| 6.1.1.        | Strategi untuk Misi 1  | 169        |
| 6.1.2.        | Arah Kebijakan untuk Misi 1  | 170        |
| 6.2.          | MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL   | 171        |
| 6.2.1.        | Strategi untuk Misi 2  | 171        |
| 6.2.2.        | Arah Kebijakan untuk Misi 2  | 172        |
| 6.3.          | MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN DAN BERKUALITAS TINGGI                              | 174        |
| 6.3.1.        | Strategi untuk Misi 3  | 174        |
| 6.3.2.        | Arah kebijakan untuk Misi 3  | 174        |
| 6.4.          | MISI 4 : MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TANGGUH, PRODUKTIF, BERBASIS KERAKYATAN, BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL | 177        |
| 6.4.1.        | Strategi untuk Misi 4  | 178        |
| 6.4.2.        | Arah Kebijakan untuk Misi 4  | 179        |
| 6.5.          | MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN  | 183        |
| 6.5.1.        | Strategi untuk Misi 5  | 183        |
| 6.5.2.        | Arah Kebijakan untuk Misi 5  | 184        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>                             | <b>187</b> |
| 7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                                       | 187        |
| 7.1.1 Kebijakan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan                                 | 187        |
| 7.1.2 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 1  | 187        |
| 7.1.3 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 2  | 191        |
| 7.1.4 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 3  | 197        |
| 7.1.5 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 4  | 206        |
| 7.1.6 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 5  | 233        |
| 7.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN  | 240        |
| 7.3. ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  | 264        |
| 7.4. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH   | 265        |
| 7.4.1. Agenda Pembangunan Daerah   | 265        |
| 7.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah   | 267        |
| 7.4.3 Program Per Prioritas Pembangunan  | 272        |
| <b>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI<br/>KEBUTUHAN PENDANAAN</b> | <b>281</b> |
| <b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH</b>   | <b>347</b> |
| <b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN</b>                                     | <b>351</b> |
| 10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016  | 351        |
| 10.2 Kaidah Pelaksanaan  | 351        |

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Tabel 2.1 Perkembangan Nilai Indeks Koefisien Lokasi Menurut Sektor Dan Sub Sektor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009                   | 20             |
| Tabel 2.2 Kerentanan Umum di Provinsi Sumatera Barat  | 24             |
| Tabel 2.3 Kerentanan Khusus di Provinsi Sumatera Barat  | 24             |
| Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 2010  | 26             |
| Tabel 2.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006 – 2010  | 27             |
| Tabel 2.6 Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 atas Dasar Harga Konstan | 29             |
| Tabel 2.7 Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 Atas Dasar Harga Berlaku | 30             |
| Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005-2010 Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat       | 31             |
| Tabel 2.9 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB pada Harga Belaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2010 di Provinsi Sumatera Barat                 | 33             |
| Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan pada Harga Berlaku dan Konstan                                  | 34             |
| Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2005-2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat                                       | 36             |
| Tabel 2.12 Nilai Inflasi PDRB Rata-rata Tahun 2005-2009 Provinsi Sumatera Barat   | 38             |
| Tabel 2.13 Gambaran Kondisi Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat  | 42             |
| Tabel 2.14 Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan Tahun 2006– 2010  | 45             |
| Tabel 2.15 Perkembangan Kinerja Makro Bidang Kesehatan Sumatera Barat Tahun 2006– 2010  | 47             |
| Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2007   | 49             |
| Tabel 2.17 Perbandingan Output UMKMK Terhadap PDB/PDRB Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2004-2008   | 55             |
| Tabel 2.18 Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat Tahun 2006 -2009   | 55             |
| Tabel 2.19 Perkembangan UKM di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009   | 56             |
| Tabel 2.20 Data Perencanaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah   | 65             |
| Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Judul Penelitian di Sumatera Barat Tahun 2006-2010   | 66             |
| Tabel 2.22 Persandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran & Kemiskinan Antara Nasional dengan Sumatera Barat                          | 68             |

|       |      |  |     |
|-------|------|--|-----|
| Tabel | 2.23 | Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Nasional<br>dan Sumbar Tahun 2010-2015  | 70  |
| Tabel | 2.24 | Peranan Pertanian dalam Pembangunan di Sumatera Barat 2006-2010  | 70  |
| Tabel | 2.25 | Produksi Beberapa Komoditi Utama Pertanian di Sumatera Barat<br>Tahun 2006 – 2010  | 71  |
| Tabel | 2.26 | Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2006-2010   | 72  |
| Tabel | 2.27 | Perkembangan Luas dan Produksi Komoditi Utama Perkebunan<br>Tahun 2008-2010  | 73  |
| Tabel | 2.28 | Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2006-2010  | 77  |
| Tabel | 2.29 | Perkembangan Armada Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2006-2010  | 78  |
| Tabel | 2.30 | Perkembangan Nilai Produksi dan Ekspor Hasil Perikanan Tahun<br>2006-2010  | 78  |
| Tabel | 2.31 | Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Perikanan Tahun 2006-2009   | 79  |
| Tabel | 2.32 | Komposisi Ketersediaan Energi dan Protein di Sumatera Barat<br>Tahun 2005-2009   | 81  |
| Tabel | 2.33 | Kondisi Jumlah Output dan Ekspor Industri Pengolahan Sumatera<br>Barat Tahun 2008  | 84  |
| Tabel | 2.34 | Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan<br>Tahun 2006-2009  | 86  |
| Tabel | 2.35 | Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Kelompok<br>Komoditi 2006-2009  | 87  |
| Tabel | 2.36 | Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 2006-2009   | 88  |
| Tabel | 2.37 | Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun 2005-2009  | 89  |
| Tabel | 2.38 | Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun 2005-2009  | 90  |
| Tabel | 2.39 | Peringkat Daya Saing Daerah Sumatera Barat di Indonesia  | 92  |
| Tabel | 2.40 | Perkembangan Konsumsi Rumahtangga Per Kapita Tahun 2005-2010<br>Provinsi Sumatera Barat  | 93  |
| Tabel | 2.41 | Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2005-2010<br>Provinsi Sumatera Barat   | 94  |
| Tabel | 2.42 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian<br>Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera<br>Barat | 95  |
| Tabel | 2.43 | Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi Tahun 2006-2010   | 99  |
| Tabel | 2.44 | Pembangunan Pengendalian Banjir, Pengamanan Abrasi Pantai dan<br>Pengamanan Daya Rusak Air Tahun 2006-2010                             | 100 |
| Tabel | 2.45 | Lokasi Terminal di Provinsi Sumatera Barat   | 103 |

|       |      |  |     |
|-------|------|--|-----|
| Tabel | 2.46 | Angkutan Khusus Batu bara dan Semen Melalui Pelabuhan Teluk Bayur<br>Tahun 2005-2009                                     | 106 |
| Tabel | 2.47 | Pemakaian Batubara di Sumatera Barat Tahun 2005-2009   | 109 |
| Tabel | 2.48 | Produksi Pembangkit Listrik Tahun 2005 – 2009  | 110 |
| Tabel | 2.49 | Pemakaian Energi Listrik Tahun 2005 – 2009   | 110 |
| Tabel | 2.50 | Indikator Kinerja Makro Bidang Energi Listrik Tahun 2005-2009  | 111 |
| Tabel | 2.51 | Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang PLTMH  | 112 |
| Tabel | 2.52 | Potensi Energi Biomassa  | 112 |
| Tabel | 2.53 | Jenis Pembangkit Listrik Yang Belum Tergarap Di Sumatera Barat   | 114 |
| Tabel | 2.54 | Tingkat Kekritisian Lahan Tiap Wilayah Administrasi Pemerintah   | 117 |
| Tabel | 2.55 | Investasi (Pembantukan Modal Tetap Bruto) Tahun 2006-2010  | 119 |
| Tabel | 2.56 | Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA/PMDN<br>di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009                         | 121 |
| Tabel | 2.57 | Pertumbuhan PMA dan PMDN di Indonesia dan Sumatera Barat<br>Tahun 2004-2008  | 122 |
| Tabel | 3.1  | Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2006-2010                            | 125 |
| Tabel | 3.2  | Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana<br>Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2006 – 2010                   | 127 |
| Tabel | 3.3  | Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2006 – 2010   | 128 |
| Tabel | 3.4  | Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Barat,<br>Tahun 2007 – 2010                                   | 130 |
| Tabel | 3.5  | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2007-2010                                | 131 |
| Tabel | 3.6  | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi<br>Sumatera Barat, Tahun 2007 - 2010                              | 132 |
| Tabel | 3.7  | Surplus (Defisit) Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat,<br>Tahun 2007 – 2010  | 133 |
| Tabel | 3.8  | Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi<br>Sumatera Barat, tahun 2008 – 2010                       | 135 |
| Tabel | 3.9  | Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah<br>Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2012                         | 138 |
| Tabel | 3.10 | Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat,<br>tahun 2011 – 2015   | 139 |
| Tabel | 3.11 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai<br>Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 – 2015 | 141 |
| Tabel | 3.12 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah<br>Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015                   | 143 |

|       |      |   |     |
|-------|------|---|-----|
| Tabel | 5.1  | Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran   | 162 |
| Tabel | 6.1  | Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1   | 170 |
| Tabel | 6.2  | Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2   | 172 |
| Tabel | 6.3  | Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3   | 175 |
| Tabel | 6.4  | Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4   | 181 |
| Tabel | 6.5  | Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5   | 185 |
| Tabel | 7.1  | Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 1   | 189 |
| Tabel | 7.2  | Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 2   | 192 |
| Tabel | 7.3  | Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 3   | 199 |
| Tabel | 7.4  | Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 4   | 210 |
| Tabel | 7.5  | Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 5   | 234 |
| Tabel | 7.6  | Jumlah Nagari Tertinggal per Kabupaten  | 241 |
| Tabel | 7.7  | Kriteria Fungsi Kota  | 244 |
| Tabel | 7.8  | Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009   | 245 |
| Tabel | 7.9  | Kondisi Jaringan Jalan dan Aksesibilitas Geografis PKN dan PKW<br>Sumatera Barat selama RPJM I 2005-2010      | 246 |
| Tabel | 7.10 | Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi<br>Sumatera Barat Hingga Tahun 2028 per Kabupaten/Kota | 247 |
| Tabel | 7.11 | Rencana Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi<br>Sumatera Barat Dirinci Menurut Kabupaten/Kota       | 248 |
| Tabel | 7.12 | Arahan Kawasan Pusat Pengembangan Pertanian (Agropolitan)   | 253 |
| Tabel | 7.13 | Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Sapi Potong,<br>Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba           | 253 |
| Tabel | 7.14 | Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Peternakan   | 254 |
| Tabel | 7.15 | Arahan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan<br>Horituklatura                                       | 255 |
| Tabel | 7.16 | Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Produksi<br>Tanaman Pangan dan Hortikultura                  | 255 |
| Tabel | 7.17 | Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan  | 256 |
| Tabel | 7.18 | Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan   | 257 |
| Tabel | 7.19 | Arahan Pengembangan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat  | 259 |
| Tabel | 7.20 | Sepuluh (20) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat  | 259 |
| Tabel | 7.21 | Wilayah Pengembangan Pariwisata   | 261 |
| Tabel | 7.22 | Sepuluh (10) Destinasi Unggulan Pariwisata  | 262 |
| Tabel | 7.23 | Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang Berbatasan dengan<br>Provinsi Tetangga                               | 263 |
| Tabel | 7.24 | Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan   | 268 |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Tabel 7.25 | Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Sumatera Barat   | 272 |
| Tabel 7.26 | Hubungan Misi, Agenda, Prioritas dan Program  | 273 |
| Tabel 8.1  | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat                            | 283 |
| Tabel 9.1  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat | 348 |

## DAFTAR GAMBAR

|        |     | <b>Halaman</b>   |    |
|--------|-----|--|----|
| Gambar | 1.1 | Proses penyusunan dan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya                         | 6  |
| Gambar | 1.2 | Bagan keterkaitan RPJMD Provinsi dengan dokumen perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota | 6  |
| Gambar | 2.1 | Penduduk Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 1971-2010  | 26 |
| Gambar | 2.2 | Ketimpangan Wilayah Menurut Indeks Williamson di Sumatera Barat                                    | 37 |
| Gambar | 2.3 | Grafik Indeks Aksessibilitas Potensial Kota-Kota Utama di Sumatera Barat, Tahun 2009               | 37 |
| Gambar | 2.4 | Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2005-2008  | 50 |
| Gambar | 2.5 | Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2005-2008   | 50 |
| Gambar | 2.6 | Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002-2010                         | 69 |
| Gambar | 2.7 | Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Tahun 2002-2010            | 69 |
| Gambar | 2.8 | Perbandingan Kondisi Mantap Jalan Nasional dan Provinsi di Sumatera Barat Tahun 2004-2009          | 97 |